SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel perlu menyelenggarakan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi dan terpadu;
b. bahwa agar pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berjalan terarah sesuai dengan tata kelola, manajemen, pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta audit teknologi informasi dan komunikasi, perlu mendeskripsikan arah, langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam bentuk arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selaras dengan rencana pembangunan daerah;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan rencana pembangunan daerah sehingga perlu disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemeritah Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 90);
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemeritah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH .

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 59) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 6 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

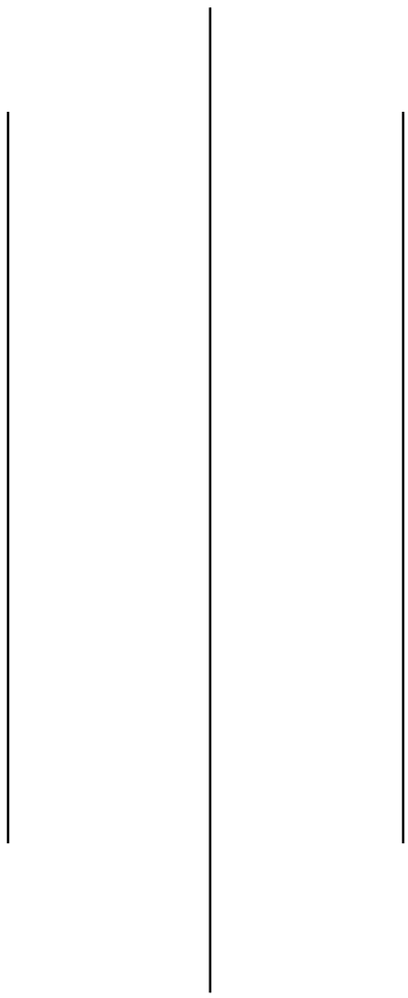

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan 4

1.1. Latar Belakang 5

1.2. Maksud dan Tujuan 11

1.3. Landasan Hukum 12

1.4. Landasan Teori 13

1.4.1. Roadmap Reformasi Birokrasi 13

1.4.2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 18

1.4.3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 21

1.4.4. Referensi Arsitektur SPBE Nasional 24

Bab II Visi dan Misi Strategi SPBE 46

2.1. Visi 47

2.2. Strategi Peningkatan SPBE 49

2.3. Inisiatif Strategis SPBE 51

Bab III Analisa Kondisi as-is SPBE 53

3.1. Kebijakan & Manajemen 54

3.1.1. Kebijakan 54

3.1.2. Manajemen 54

3.2. Arsitektur SPBE 55

3.2.1. Arsitektur Proses Bisnis 55

3.2.1.1. Katalog Proses Bisnis 56

3.2.1.2. Analisis Katalog Proses Bisnis 78

3.2.2. Arsitektur Data dan Informasi 81

3.2.2.1. Katalog Data dan Informasi 81

3.2.2.2. Analisis Katalog Data dan Informasi 200

3.2.3. Arsitektur Layanan SPBE 203

3.2.3.1. Katalog Layanan 203

3.2.3.2. Analisis Diagram Layanan 267

3.2.4. Arsitektur Aplikasi 270

3.2.4.1. Katalog Aplikasi 270

3.2.4.2. Analisis Diagram Aplikasi 314

3.2.5. Arsitektur Infrastruktur SPBE 318

3.2.5.1. Pusat Komputasi (Pusat Data) 318

3.2.5.2. Sistem Integrasi 330

3.2.5.3. Platform 337

3.2.6. Arsitektur Keamanan 365

3.2.6.1. Standar Keamanan 367

3.2.6.2. Penerapan Keamanan 368

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 58.627,512 Ha. Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak di antara 7° 38'42" – 7° 59'3" Lintang Selatan dan antara 110° 1'37" – 110° 16'26" Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Kulon Progo berbatasan dengan wilayah administrasi sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Wilayah Kabupaten Kulon Progo secara administratif terdiri dari 12 Kecamatan dan 87 Desa. Berdasarkan dokumen RPJMD, visi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

> ***"Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius,***

Pertimbangan dari adanya visi diatas, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu melakukan transformasi digital untuk peningkatan aksesibilitas pelayanan administrasi pemerintah dan pelayanan publik khususnya pada sektor perekonomian, pendidikan dan kesehatan.

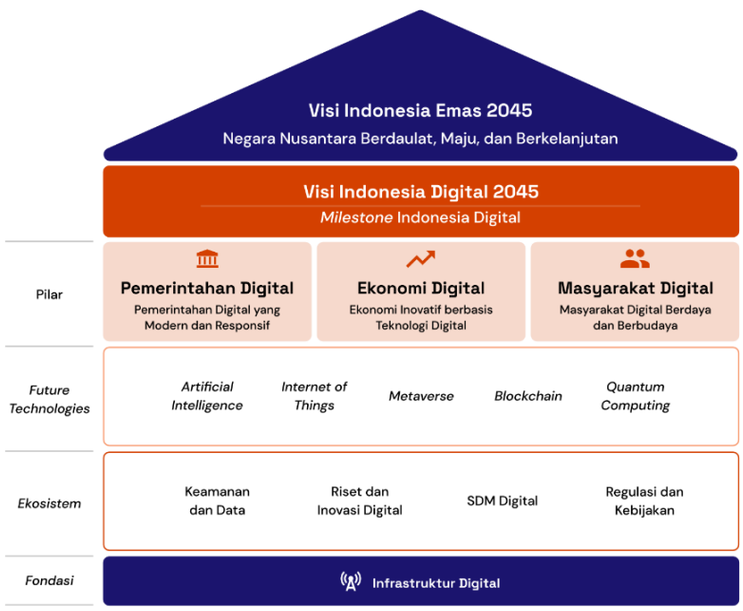

Gambar 1.1.1. Kerangka Visi Indonesia Digital 2045

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dari Visi Misi menuju Indonesia Emas 2045 perlu didukung dengan adanya penekanan fokus arah kebijakan pada upaya nasional untuk meraih kapasitas dan penguasaan teknologi digital ke depan yang dituangkan ke dalam Visi Indonesia Digital 2045 sebagai berikut.

“Mewujudkan Ekosistem Digital yang Inklusif dan Kolaboratif Berbasis Inovasi, untuk Mendukung

Berangkat dari Visi Indonesia Digital 2045, maka didapatkan poin-poin misi yang menjadi tujuan bagi arah Indonesia Digital ke depan. Berikut adalah misi-misi tersebut:

- Mempercepat transformasi digital nasional sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kualitas layanan publik, serta memperkuat ketahanan dan keamanan nasional;
- Mengembangkan dan memperkuat ekosistem digital nasional yang menyeluruh dan berkesinambungan dengan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, bisnis dan industri, asosiasi, akademisi, dan masyarakat sebagai co-creator dari ekosistem digital;
- Membuat regulasi-regulasi yang adaptif dan akomodatif terhadap perkembangan teknologi digital; dan
- Mendorong penguatan institusi sosial kemasyarakatan (lembaga pendidikan, keagamaan, masyarakat/keluarga) sebagai upaya masif peningkatan pemahaman digital untuk mengoptimalkan manfaat teknologi digital dan meminimalisir dampak negatifnya.

Sebagaimana tertuang dalam kerangka Visi Indonesia Digital 2045 diperlukan persiapan dan perencanaan di berbagai sektor secara matang, serta orkestrasi seluruh komponen pembangunan digital yang didukung dengan adanya 3 pilar, yakni sebagai berikut.

- Pemerintahan digital yang modern dan responsif;
- Ekonomi digital untuk menciptakan ekonomi inovatif berbasis teknologi digital; dan
- Masyarakat digital yang berdaya dan berbudaya.

Berdasarkan ketiga pilar tersebut, ditentukan sasaran yang menjadi target pencapaian Indonesia Digital 2045. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu dibangun pondasi utama dari pembangunan digital, yaitu infrastruktur digital, dan dikembangkan ekosistem digital nasional yang terdiri dari Regulasi dan Kebijakan, SDM Digital, Riset dan Inovasi Digital, serta Keamanan dan Data. Dengan pondasi dan ekosistem digital yang kuat, perkembangan teknologi masa depan akan dapat dikendalikan dan dimanfaatkan dengan baik, artinya kebermanfaatan sosial dan ekonomi dapat diraih, dan potensi ancaman dapat diminimalisir.

Langkah selanjutnya sebagai bentuk upaya mewujudkan visi tersebut di era Revolusi Industri 4.0 saat ini tentunya dalam bertransformasi dapat didukung dengan adanya penerapan teknologi pada berbagai sendi pemerintahan, seperti: penetrasi teknologi yang serba disruptif, serta adanya perkembangan *Internet of Things* (IoT) yang menjadikan proses bisnis semakin cepat dan mudah dijalankan. Lebih jauh, pelayanan administrasi pemerintahan perlu didukung dengan teknologi yang menjadikan internet sebagai jalur untuk pengelolaan data dan aplikasi *(cloud computing)*, hingga kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). IoT telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi digital di berbagai sektor dengan menghubungkan perangkat mesin ke internet. IoT memungkinkan pengumpulan data secara *realtime*, otomasi proses, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Namun dalam penerapan transformasi digital tentunya terdapat beberapa

tantangan seperti: perlunya dukungan regulasi, infrastruktur dan konektivitas, SDM Digital dan tidak kalah penting di sisi kebutuhan pendanaan yang besar.

Menjawab tantangan transformasi digital, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerapkan mandat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Instruksi nasional ini menjadi payung hukum yang kuat dalam mengimplementasikan Tata Kelola Pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut telah dijelaskan mengenai misi SPBE Nasional sebagai berikut.

> ***"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang***

Pertimbangan dari adanya misi nasional diatas bagi pemerintah daerah yaitu untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh khususnya kolaborasi dengan pemerintah pusat sebagai langkah peningkatan reformasi birokrasi pemerintahan yang fokus pada orientasi pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan TIK karena faktanya, kini masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, birokrasi yang cepat dan efektif sehingga pemanfaatan teknologi informasi menjadi tuntutan yang harus diterapkan dengan serius. Sejalan dengan fakta diatas, pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan (*Smart Government*) telah lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat hanya saja masih terdapat keterbatasan yang perlu disempurnakan diantaranya: standarisasi TIK dan *Service Level Agreement* (SLA), pengembangan aplikasi yang masih belum seragam, kemudian adanya duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK yang mengurangi tingkat keamanan informasi dalam proses pemeliharaan. Penerapan SPBE tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi administratif melalui pengurangan metode manual, melainkan juga membuka peluang untuk mencapai tingkat transparansi yang lebih tinggi. Selain itu, juga memberikan kemudahan kepada masyarakat terhadap layanan publik, meningkatkan efisiensi sumber daya, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan daya saing wilayah dalam menghadapi tantangan global. Penerapan transformasi digital ini juga berpotensi memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan saluran interaksi yang responsif antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan SPBE dapat dipandang sebagai kunci utama dalam membentuk pemerintahan yang responsif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di era digital ini.

Gambar 1.1.2. Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Sejauh ini di tahun 2023, dalam rangka mendukung keterpaduan layanan digital nasional di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Presiden telah menetapkan peraturan Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diharapkan dengan adanya payung hukum ini dapat mencapai misi SPBE nasional. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Pusat melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. Berikut adalah daftar 9 (sembilan) layanan prioritas yang menjadi fokus nasional dalam rangka mempercepat laju transformasi digital pemerintahan.

Gambar 1.1.3. Fokus Utama 9 (Sembilan) Layanan Prioritas Pemerintah

Dalam rangka mempercepat proses transformasi digital pemerintahan, perlu adanya dukungan komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap beberapa hal sebagai berikut.

1. Menyatukan 9 layanan prioritas diatas kedalam 1 portal publik dan 1 portal aparatur;
2. Mempercepat pembangunan layanan dan sistem digital prioritas seperti penggunaan *Digital ID, Data Exchange, Digital Payment*, Portal Nasional dan Layanan Dasar; dan
3. Fokus pada kemudahan layanan dengan mengevaluasi setiap pengembangan aplikasi yang ada berdasarkan testimoni langsung penggunanya.

Keterpaduan layanan digital nasional dapat diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan Arsitektur SPBE yang sejalan dengan arahan nasional. Dimana penerapan SPBE ini juga dievaluasi secara berkala oleh evaluator dari Kemenpan-RB dengan tujuan untuk memastikan kelangsungan dari implementasi SPBE. Dalam menanggapi amanat SPBE ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berinisiatif untuk menyusun dokumen perencanaan ini yang bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengimplementasikan SPBE selama 5 tahun kedepan agar dalam pelaksanaannya seluruh instansi internal yang terlibat dapat saling bersinergi.

Komitmen kepala daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu kunci dalam menciptakan budaya digital dalam sistem pemerintahannya. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meraih indeks SPBE untuk kategori Kabupaten/Kabupaten dengan perolehan nilai 3,91 (Sangat Baik). Sehingga dalam hal ini, dengan adanya perencanaan ini diharapkan dapat meningkatkan penilaian indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara bertahap.

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. KULON PROGO	3,91 (Sangat Baik)

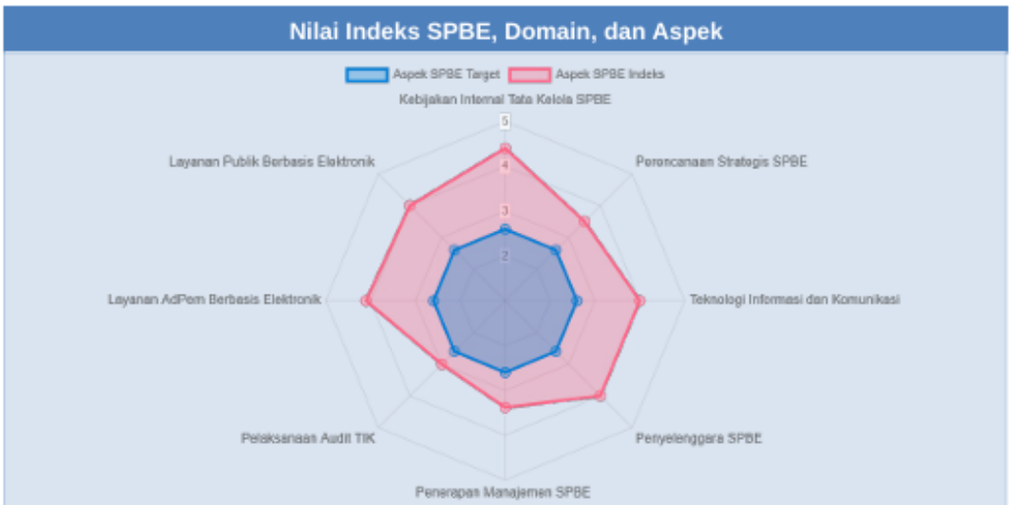

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	**3,91**
Domain Kebijakan SPBE	4,40
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*4,40*
Domain Tata Kelola SPBE	3,80
Perencanaan Strategis SPBE	*3,50*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*4,00*
Penyelenggara SPBE	*4,00*
Domain Manajemen SPBE	3,27
Penerapan Manajemen SPBE	*3,38*
Audit TIK	*3,00*
Domain Layanan SPBE	4,06
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*4,10*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,00*

Gambar 1.1.1. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024
(Sumber: Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Kulon Progo, 2024)

Secara umum, hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada Tahun 2024 di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan menjadi *baseline* dalam penyusunan Arsitektur SPBE. Dokumen ini disusun untuk menentukan strategi yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo lima tahun mendatang serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Selain itu, diharapkan juga dapat mewujudkan terciptanya digitalisasi pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi nasional.

Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Arsitektur SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi. Arsitektur SPBE memuat 2 komponen, yaitu:

1. Referensi Arsitektur SPBE, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur; dan
2. Domain Arsitektur SPBE, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur infrastruktur, dan domain arsitektur keamanan.

Diharapkan dari permasalahan-permasalahan yang ada saat ini terkait dengan proses pembangunan dan pemeliharaan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat terselesaikan dan mampu diimplementasikan dengan baik menyesuaikan proses bisnis yang ada di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai langkah optimalisasi SPBE, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu melakukan penyusunan dan pembaharuan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Harapannya dengan adanya dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam pengembangan SPBE yang lebih sistematik dan terpadu. Keterpaduan ini ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 yaitu:

1. Penyusunan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengimplementasikan SPBE;
2. Memberikan gambaran mengenai kondisi eksisting arsitektur proses bisnis, data, layanan, aplikasi, teknologi/ infrastruktur dan keamanan informasi;
3. Menyusun target arsitektur SPBE ke depan sesuai dengan arahan referensi, kebijakan dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan layanan SPBE yang terbaik sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi Daerah;
4. Terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang terintegrasi antar pemangku kepentingan; dan
5. Terwujudnya implementasi SPBE yang terarah dan komprehensif.

Adapun tujuan dari penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
2. Menyusun Arsitektur SPBE yang selaras dengan visi, misi dan tujuan serta rencana strategis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo guna mendukung pencapaian kesesuaian dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE sehingga dapat menjadi yang menjadi acuan bagi pengembangan SPBE ke depan;
3. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan

4. Menyusun dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 guna optimalisasi layanan masyarakat yang semakin baik di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SIstem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
20. Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Peraturan BRIN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
23. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
24. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Mendukung Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Satu Data Daerah.
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah.

1.4. Landasan Teori

1.4.1. Roadmap Reformasi Birokrasi

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, dan tentunya yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Road Map disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari Grand Design RB Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 47.992 struktur pada 95 kementerian/lembaga yang telah disederhanakan, 148.256 struktur pada 33 provinsi dan 498 instansi daerah serta 44.870 Jabatan Administrasi yang telah dialihkan ke Jabatan Fungsional pada 91 kementerian/lembaga, disusul dengan 31 provinsi, 371 Kabupaten dan 86 Kabupaten yang telah diusulkan dan diberikan pertimbangan tertulis untuk penyederhanaan birokrasi.

2. Penghapusan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang Tidak Efektif

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih tugas fungsi di antara Instansi Pemerintah yang mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran. Tercatat 37 LNS telah dibubarkan dan diintegrasikan pada kementerian/lembaga yang sesuai.

3. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Terdapat 159 Instansi Pemerintah yang memiliki tingkat kematangan SPBE “baik”. Kualitas digital birokrasi semakin positif, tercermin pada indeks *e-Government Development Index* (EGDI) yang dikeluarkan oleh United Nations. Pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-88 atau naik 19 level dari tahun 2018.

4. Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar ± Rp 112 Triliun.

5. Penguatan Pengawasan Melalui Pembangunan Zona Integritas

Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Tercatat sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk 1.937 unit kerja WBK dan 225 unit kerja WBBM.

6. Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Sampai akhir tahun 2021, terdapat 56 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.

A. Fokus Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi

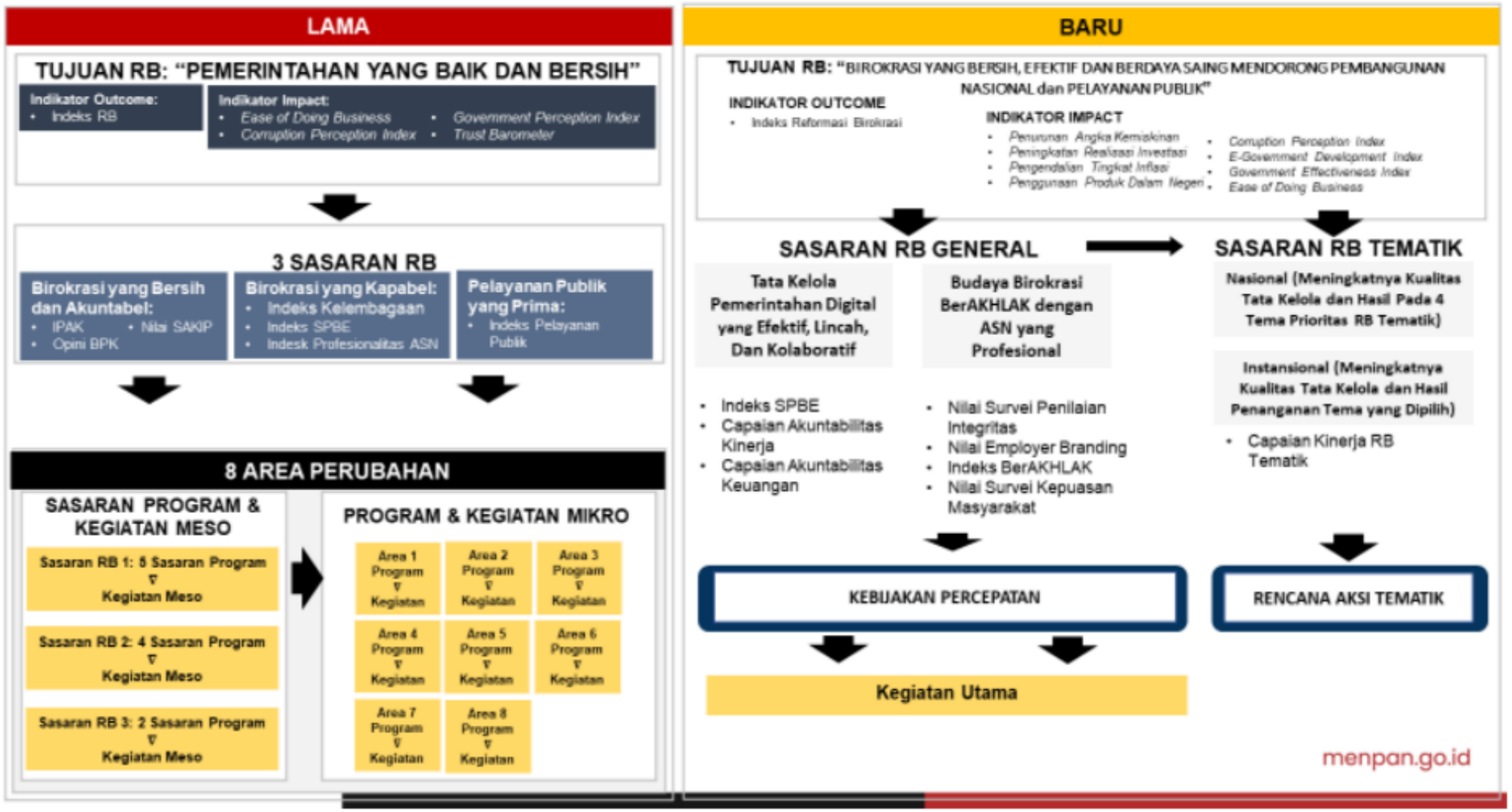

Gambar 1.4.1.1. Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB

Gambaran Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map RB 2020-2024 dibandingkan dengan Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman.

1. Tujuan RB

Tujuan pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman yaitu "Pemerintahan yang baik dan bersih", menjadi "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". Tujuan RB diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang. Isu tersebut terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

2. Sasaran Strategis RB

Sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, hard element Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Aspek soft element yaitu Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Kegiatan RB tidak dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

4. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan RB

Ekspektasi atas pelaksanaan RB yaitu mampu menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat serta menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar tersebut, setelah penajaman pelaksanaan RB mengarah ke dalam dua fokus "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu hulu RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir RB Tematik.

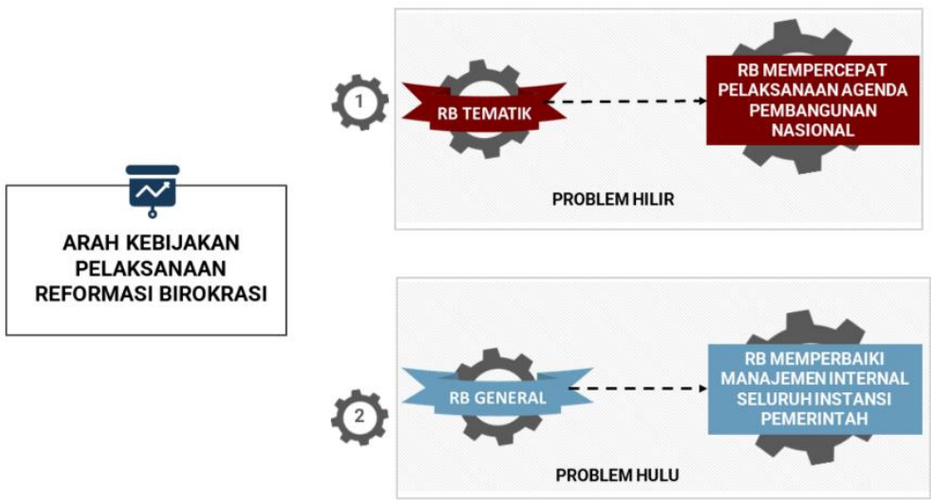

Gambar 1.4.1.2. *Double Track* Fokus Pelaksanaan RB

5. Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator RB

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan. Guna mendapatkan peningkatan kepercayaan masyarakat dan untuk menunjukan efektivitas RB, maka ditentukan indikator tujuan yang berkualitas dampak *(impact)* yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil *(outcomes)* yaitu terkait hasil *(outcomes)* dari perbaikan tata kelola pemerintahan *(governance)* pada tingkat intermediate outcomes dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil. Sehingga Indikator RB dapat memenuhi indikator yang *spesific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

1.4.2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018, SPBE didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE pemerintah daerah sehingga SPBE menjadi terpadu dan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah. Satu-kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh dapat menghasilkan proses birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

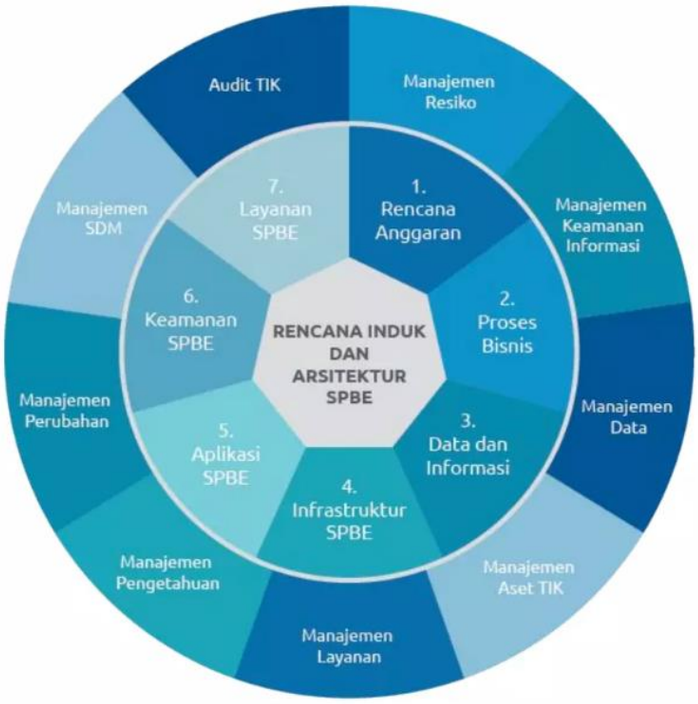

Gambar 1.4.3.1. Ruang Lingkup Arsitektur SPBE Nasional

Secara umum implementasi SPBE terdapat tiga tahapan penting dalam kesuksesan SPBE, yaitu:

1. Perencanaan: Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kontrak;
2. Pelaksanaan: Manajemen Proyek/Kegiatan, Manajemen Rekanan, dan Tim Pelaksana (jumlah & kompetensi); dan
3. Evaluasi: Monitoring dan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui capaian progres penerapan Arsitektur SPBE khususnya *Roadmap*, Kondisi permasalahan *eksisting* SPBE, Inisiatif perbaikan program.

Saat ini, kondisi penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat menggunakan konsep tingkat kematangan SPBE untuk mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkatan kematangan mengarah pada pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

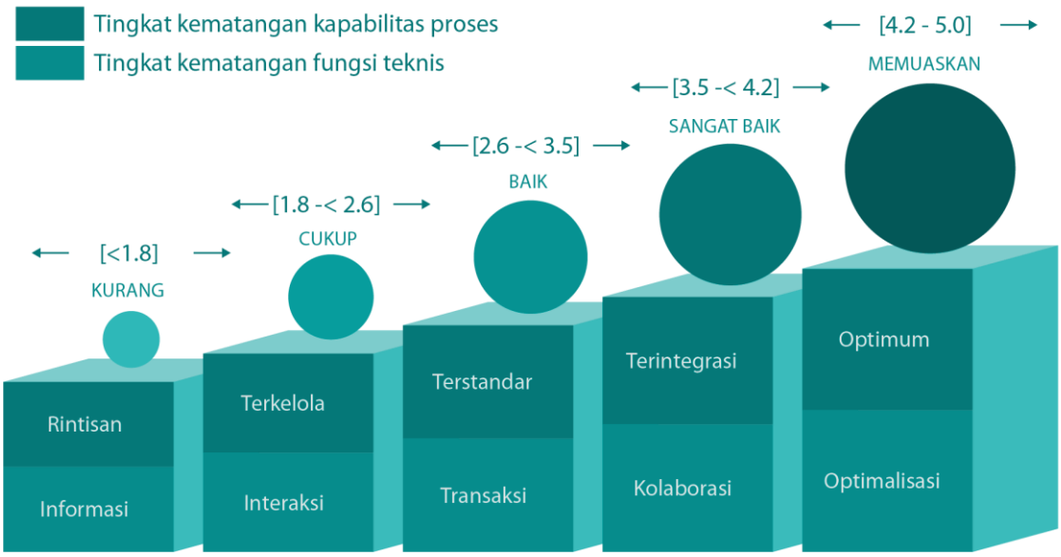

Gambar 1.4.3.2. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Adapun kondisi tingkat kematangan penerapan yang terdapat pada SPBE dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4.3.1. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat		Karakteristik
1	Rintisan	• Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.
	Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk satu arah.
2	Terkelola	• Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi.
	Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk dua arah.
3	Terstandarisasi	• Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait.
	Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4	Terintegrasi	• Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif.
	Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain.
5	Optimum	• Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.
	Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

1.4.3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Keberhasilan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penyelenggaraan alur pemerintahan perlu didukung oleh arsitektur SPBE yang terperinci sehingga dapat menjadi acuan pengembangan SPBE oleh seluruh *stakeholder*. Gambaran mengenai cakupan arsitektur SPBE Nasional yang perlu diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar berikut:

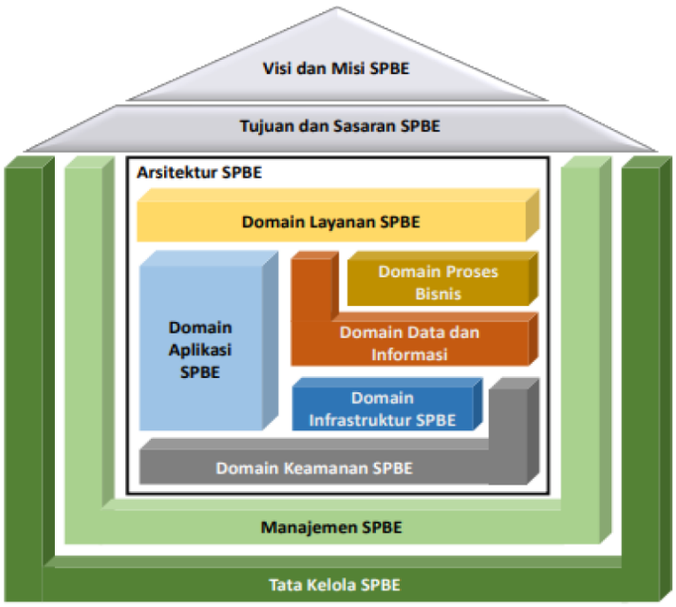

Gambar 1.4.3.1. Domain Arsitektur SPBE Nasional

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi antara proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, serta keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari keenam arsitektur tersebut didukung oleh manajemen yang dilaksanakan dengan baik dan tata kelola yang disusun secara rinci dan terarah. Setiap *layer* arsitektur yang disebutkan dalam kerangka SPBE memiliki detail masing-masing yang selanjutnya saling terkait dan dapat mendorong keberhasilan domain lainnya.

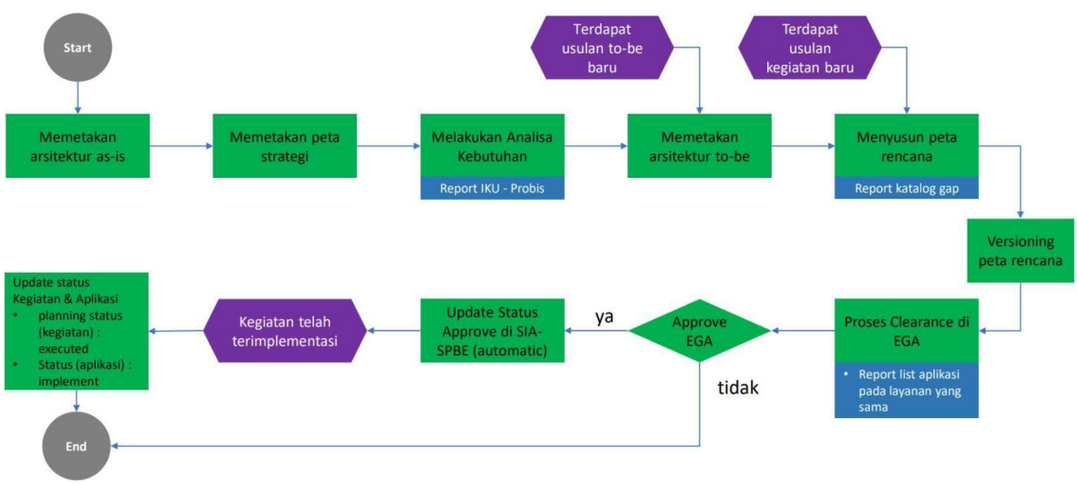

Gambar 1.4.3.2. Alur Proses Implementasi Arsitektur SPBE

Langkah strategis dalam mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan dapat dilihat berdasarkan gambar diatas.

1. Memetakan arsitektur as-is

   Tahap pertama dalam proses implementasi arsitektur SPBE adalah memetakan kondisi arsitektur eksisting *(as-is)* SPBE pemerintah daerah terkait yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi saat ini berdasarkan domain proses bisnis, layanan, data, aplikasi, keamanan, dan infrastruktur.

2. Memetakan peta strategi

   Langkah selanjutnya adalah memetakan peta strategi yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai panduan dalam perencanaan transformasi digital di sektor pemerintahan dan memastikan setiap langkah yang diambil terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Melakukan analisa kebutuhan

   Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan berdasarkan hasil pemetaan peta strategi dan arsitektur *as-is.*

4. Memetakan arsitektur to-be

   Bilamana terdapat usulan baru dari perangkat daerah pemerintah terkait yang berdasarkan analisa kebutuhan diatas, tahap berikutnya adalah memetakan arsitektur target *(to-be)* yang pelaksanaannya direncanakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

5. Menyusun peta rencana

   Berdasarkan pemetaan arsitektur *to-be*, perlu dilakukan penyusunan peta rencana, yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk hasil analisis katalog gap yang berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi arsitektur saat ini *(as-is)* dan kondisi target *(to-be)*.

6. *Versioning* peta rencana

   Pada tahap ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan *versioning* atau pengelolaan versi dari peta rencana yang telah disusun sebelumnya. Versioning penting untuk melacak perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

7. Proses *Clearance* di EGA

   Dalam upaya meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penganggaran menjadi salah satu elemen krusial untuk memastikan setiap inisiatif teknologi dan digitalisasi berjalan optimal. Proses penganggaran SPBE yang efektif melibatkan beberapa tahapan mulai dari perencanaan awal, pengajuan, hingga evaluasi dan clearance melalui aplikasi Evaluasi Anggaran (EGA) SPBE yang dapat diakses pada: https://ega-spbe.layanan.go.id/.

   Pada tahap ini, setiap perangkat daerah diharapkan melakukan pelaporan secara akurat dan tepat waktu, sehingga evaluasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

8. *Update* Status *Approve* di SIA-SPBE *(automatic)*

   Bilamana proses *clearance* telah disetujui, status persetujuan secara otomatis akan di update pada aplikasi SIA-SPBE (Sistem Informasi Administrasi SPBE).

9. *Kegiatan* telah terimplementasi

   Kegiatan yang direncanakan kini telah terimplementasi sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya.

10. *Update* status kegiatan & aplikasi

    Status kegiatan dan aplikasi selanjutnya perlu diperbarui secara manual pada aplikasi SIA-SPBE dengan ketentuan *update* status kegiatan menjadi "*executed*" (terlaksana), sedangkan status aplikasi menjadi "*implement*" (telah diterapkan).

Sesuai pada gambar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa melalui proses yang terstruktur, penggunaan anggaran SPBE dapat dipantau secara efisien, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi. Aplikasi Evaluasi Anggaran SPBE memainkan peran penting dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap pengeluaran SPBE dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Langkah awal proses penyusunan dokumen arsitektur SPBE yang harus disusun terlebih dahulu dengan mendefinisikan tata kelola. Tata kelola adalah serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan kegiatan dalam institusi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan dari institusi. Penerapan tata kelola dimulai dengan membentuk tim koordinasi SPBE dan jadwal kegiatan, menetapkan kebijakan SPBE, dan menyusun rencana dan anggaran SPBE.

Langkah kedua dalam proses penyusunan arsitektur SPBE yaitu dengan menentukan bentuk-bentuk manajemen yang akan dilakukan dalam proses pengembangan SPBE di perangkat daerah. Manajemen adalah sebuah cara untuk mengarahkan seluruh *stakeholder* untuk mencapai tujuan utama melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Adapun 8 (delapan) proses penentuan manajemen, yaitu:

- Manajemen Resiko
- Manajemen Keamanan Informasi
- Manajemen SDM
- Manajemen Pengetahuan
- Manajemen Data
- Manajemen Layanan
- Manajemen Aset TIK
- Manajemen Perubahan

Arsitektur proses bisnis menjadi hal pertama yang perlu dikelola. Proses bisnis perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan alur organisasi internal dan pelayanan yang efektif dan efisien. Arsitektur proses bisnis selanjutnya menjadi acuan dalam pembangunan aplikasi pada domain aplikasi. Aplikasi dapat berupa portal yang mendukung layanan dan telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain. Adapun beberapa portal layanan yang dapat dibangun antara lain, yaitu:

- Portal layanan administrasi pemerintah;
- Portal layanan publik;

- Portal pusat layanan; dan
- Integrasi kanal layanan.

Aplikasi juga dapat dibagi berdasarkan penggunaanya, yaitu aplikasi yang bersifat khusus dan umum. Adapun berdasarkan penggunaannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aplikasi umum nasional;
- Aplikasi khusus instansi pemda.

Pembangunan aplikasi mengacu pada data yang dikelola oleh perangkat daerah. Selain itu, pada arsitektur data memungkinkan adanya integrasi data dengan portal data nasional. Arsitektur lain yang dikembangkan dalam proses pembangunan SPBE adalah arsitektur infrastruktur. Arsitektur ini dikembangkan sebagai bentuk penanganan alat yang digunakan dalam pelayanan. Arsitektur infrastruktur dibagi menjadi dua jenis, yaitu: infrastruktur jaringan dan infrastruktur pusat data daerah. Infrastruktur jaringan adalah hal-hal mengenai pengelolaan koneksi yang ada pada perangkat daerah termasuk didalamnya pusat pengendalian dan jaringan, jaringan intra instansi pusat, jaringan intra instansi pemerintah daerah dan jaringan pita lebar. Sedangkan untuk infrastruktur pusat data daerah didalamnya terdapat *cloud services* dan repositori aplikasi/data.

Arsitektur terakhir yang digunakan dalam peningkatan layanan instansi adalah arsitektur keamanan informasi, dimana aspek keamanan informasi adalah aspek-aspek yang dilingkupi dan melingkupi keamanan informasi dalam sebuah sistem informasi. Aspek-aspek ini, meliputi: privasi/kerahasiaan yang menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak kecuali untuk pihak yang memiliki kewenangan. Kelima arsitektur yang telah disebutkan (arsitektur proses bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan informasi) adalah domain yang dikelola untuk meningkatkan layanan yang dimiliki oleh perangkat daerah. Pengembangan domain layanan tentunya mengedepankan aspek kemudahan bagi pengguna layanan tersebut. Adapun klasifikasi layanan yang diberikan oleh instansi pusat adalah layanan administrasi pemerintahan, layanan publik, dan survei penggunaan aplikasi SPBE. Secara umum, arsitektur SPBE Nasional terdiri dari enam komponen berupa taksonomi referensi arsitektur di tingkat nasional yang menjadi acuan oleh setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) sesuai dengan struktur yang telah ditentukan dalam setiap domain arsitektur SPBE Nasional.

1.4.4. Referensi Arsitektur SPBE Nasional

Referensi Arsitektur SPBE Nasional merupakan taksonomi dalam SPBE yang terdiri dari Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB-01), Taksonomi Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD-02), Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL-03), dan Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RA-04), Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI-05), Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK-06). Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL) merupakan arsitektur yang berfokus pada desain layanan yang dapat digunakan oleh beberapa aplikasi untuk melakukan tugas yang sama. Setiap layanan yang ada memungkinkan aplikasi untuk saling berbagi informasi dan membangun integrasi.

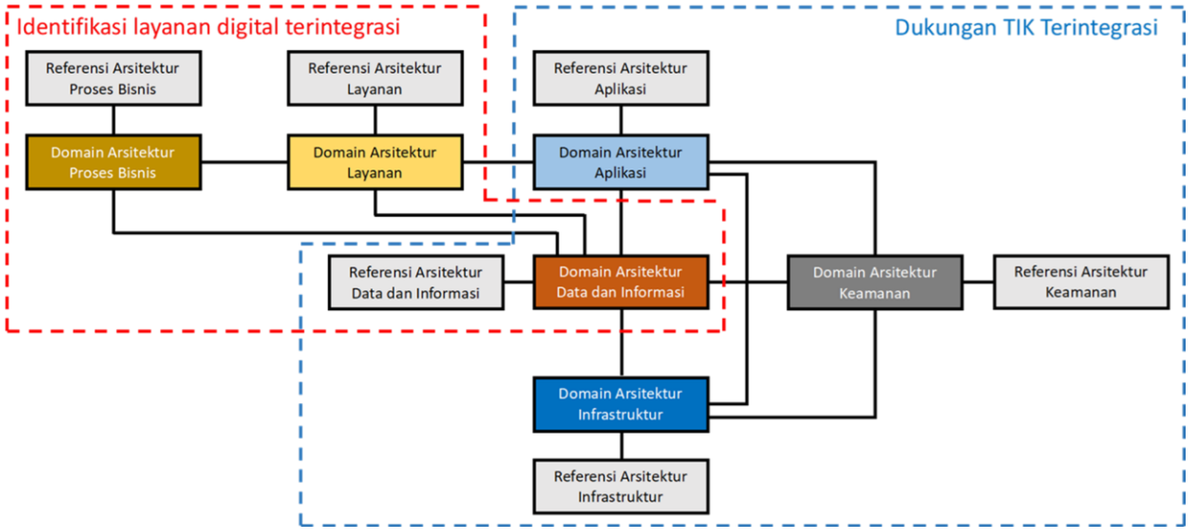

Gambar 3.1.1. Keterkaitan Antar Domain Arsitektur SPBE

Adapun kondisi tingkat kematangan yang terdapat pada RAL Level 1 SPBE dapat dilihat pada tabel berikut.

A. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur proses bisnis 4 (empat) tingkat, yaitu:

a. Sektor pemerintahan: mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
b. Urusan pemerintahan: menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
c. Fungsi pemerintahan: menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional; dan
d. Sub fungsi pemerintahan: menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Adapun penjelasan mengenai referensi arsitektur proses bisnis dapat dilihat pada gambar berikut:

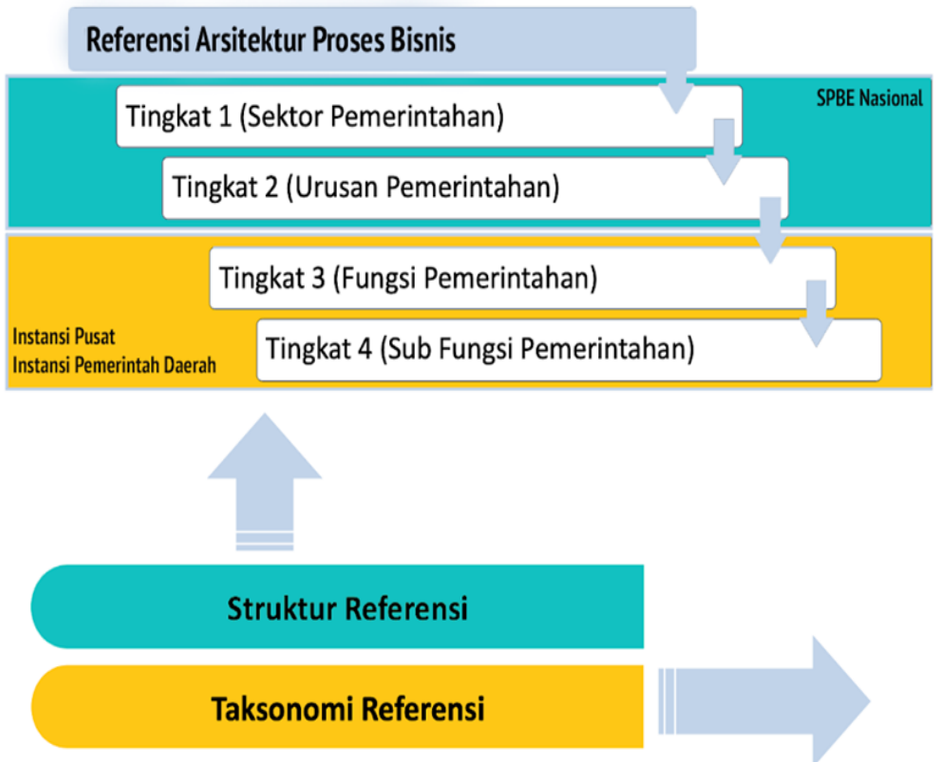

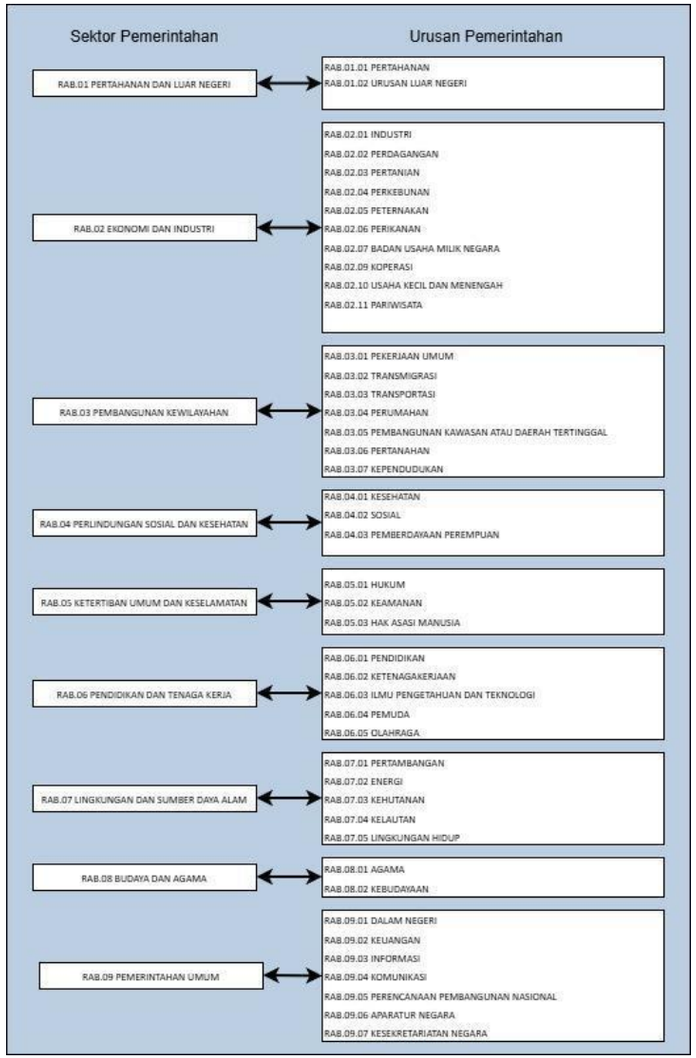

Gambar 1.4.4.1. Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Berikut Tabel 1.4.5.1 adalah referensi tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) yang merupakan struktur referensi nasional.

Tabel 1.4.5.1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 2 (kedua)

No	Kode	Sektor Pemerintahan	Kode	Urusan Pemerintahan	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
1	RAB 01	Pertahanan dan Luar Negeri	RAB 01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara
2	RAB 01	Pertahanan dan Luar Negeri	RAB 01.02	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
3	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.
4	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan
5	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian
6	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan
7	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan
8	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan
9	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pengelolaan badan usaha milik negara.
10	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan penanaman modal
11	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan koperasi
12	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.10	Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah
13	RAB 02	Ekonomi dan Industri	RAB 02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan
14	RAB 03	Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum
15	RAB 03	Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi
16	RAB 03	Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi

No	Kode	Sektor Pemerintahan	Kode	Urusan Pemerintahan	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
17	RAB 03	Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan
18	RAB 03	Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
19	RAB 03	Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.06	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan
20	RAB 03	Pembangunan Kewilayahan	RAB 03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan
21	RAB 04	Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan
22	RAB 04	Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial
23	RAB 04	Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB 04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan
24	RAB 05	Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum
25	RAB 05	Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan
26	RAB 05	Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB 05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia
27	RAB 06	Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan
28	RAB 06	Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan
29	RAB 06	Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
30	RAB 06	Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda
31	RAB 06	Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB 06.05	Olah Raga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan
32	RAB 07	Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan
33	RAB 07	Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi
34	RAB 07	Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan
35	RAB 07	Lingkungan dan	RAB 07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan

No	Kode	Sektor Pemerintahan	Kode	Urusan Pemerintahan	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
		Sumber Daya Alam			pemerintahan dalam bidang kelautan
36	RAB 07	Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB 07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup
37	RAB 08	Budaya dan Agama	RAB 08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama
38	RAB 08	Budaya dan Agama	RAB 08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan
39	RAB 09	Pemerintahan Umum	RAB 09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri
40	RAB 09	Pemerintahan Umum	RAB 09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara
41	RAB 09	Pemerintahan Umum	RAB 09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi
42	RAB 09	Pemerintahan Umum	RAB 09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi
43	RAB 09	Pemerintahan Umum	RAB 09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional
44	RAB 09	Pemerintahan Umum	RAB 09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara
45	RAB 09	Pemerintahan Umum	RAB 09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara

B. Struktur Referensi Arsitektur Data (RAD)

Domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur data dan informasi berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

a. Data pokok: mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
b. Data tematik: menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
c. Data topik: menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional; dan
d. Data sub topik: menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam

membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

Adapun penjelasan mengenai taksonomi referensi arsitektur data dapat dilihat pada gambar berikut:

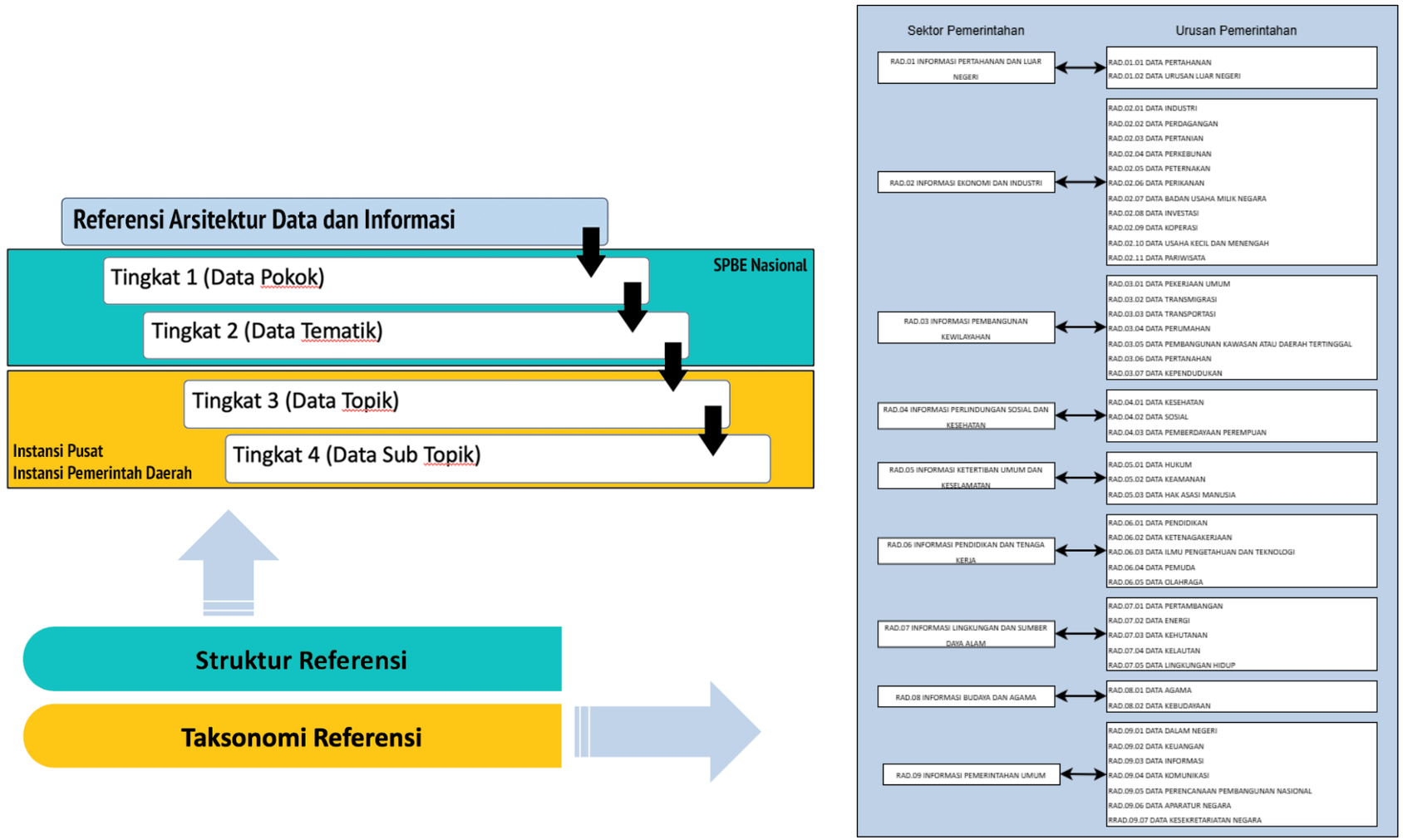

Gambar 1.4.4.2. Taksonomi Referensi Arsitektur Data (RAD)

Berikut tabel 1.4.5.2 adalah referensi Arsitektur Data dan Informasi tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) yang merupakan struktur referensi nasional.

Tabel 1.4.5.2 Referensi Arsitektur Data Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 2 (kedua)

No	Kode	Data Pokok	Kode	Data Tematik	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
1	RAD 01	Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD 01.01	Data Pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertahanan negara
2	RAD 01	Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD 01.02	Data Hubungan Luar Negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri
3	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.01	Data Industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri
4	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.02	Data Perdagangan	Data yang mempresentasikan bidang perdagangan
5	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.03	Data Pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian
6	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.04	Data Perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang perkebunan
7	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.05	Data Peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan
8	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.06	Data Perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan
9	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.07	Data Badan Usaha Milik Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan badan usaha milik negara
10	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.08	Data Investasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal
11	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.09	Data Koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi
12	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah
13	RAD 02	Informasi Ekonomi dan Industri	RAD 02.11	Data Pariwisata	Data yang merepresentasikan bidang kepariwisataan
14	RAD 03	Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum
15	RAD 03	Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.02	Data Transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi
16	RAD 03	Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi
17	RAD 03	Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.04	Data Perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan
18	RAD 03	Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.05	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
19	RAD 03	Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.06	Data Pertanahan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan
20	RAD 03	Pembangunan Kewilayahan	RAD 03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan
21	RAD 04	Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan
22	RAD 04	Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD 04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial
23	RAD 04	Informasi Perlindungan	RAD 04.03	Data Pemberdayaan	Data yang merepresentasikan

No	Kode	Data Pokok	Kode	Data Tematik	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
		Sosial dan Kesehatan		Perempuan	bidang pemberdayaan perempuan
24	RAD 05	Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD 05.01	Data Hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum
25	RAD 05	Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD 05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan
26	RAD 05	Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD 05.03	Data Hak Asasi Manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia
27	RAD 06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.01	Data Pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan
28	RAD 06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.02	Data Ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan
29	RAD 06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
30	RAD 06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.04	Data Pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda
31	RAD 06	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD 06.05	Data Olahraga	Data yang mempresentasikan bidang keolahragaan.
32	RAD 07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD 07.01	Data Pertambangan	Data yang mempresentasikan bidang pertambangan.
33	RAD 07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD 07.02	Data Energi	Data yang mempresentasikan bidang energi
34	RAD 07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD 07.03	Data Kehutanan	Data yang mempresentasikan bidang kehutanan
35	RAD 07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD 07.04	Data Kelautan	Data yang mempresentasikan bidang kelautan
36	RAD 07	Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD 07.05	Data Lingkungan Hidup	Data yang mempresentasikan bidang lingkungan hidup
37	RAD 08	Informasi Budaya dan Agama	RAD 08.01	Data Agama	Data yang mempresentasikan bidang agama
38	RAD 08	Informasi Budaya dan Agama	RAD 08.02	Data Kebudayaan	Data yang mempresentasikan bidang kebudayaan
39	RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.01	Data Dalam Negeri	Data yang mempresentasikan bidang dalam negeri
40	RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.02	Data Keuangan	Data yang mempresentasikan bidang keuangan negara
41	RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.03	Data Informasi	Data yang mempresentasikan bidang informasi
42	RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.04	Data Komunikasi	Data yang mempresentasikan bidang komunikasi
43	RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang mempresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional
44	RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.06	Data Aparatur Negara	Data yang mempresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara
45	RAD 09	Informasi Pemerintahan Umum	RAD 09.07	Data Kesekretariatan Negara	Data yang mempresentasikan bidang kesekretariatan negara
46	RAD 10	Data Pendukung Umum	RAD 10.01	Kebijakan Pemerintah	Data yang mempresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah
47	RAD 10	Data Pendukung Umum	RAD 10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang mempresentasikan informasi terkait manajemen

No	Kode	Data Pokok	Kode	Data Tematik	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
					kegiatan pemerintahan
48	RAD 10	Data Pendukung Umum	RAD 10.03	Data Kewilayahan	Data yang mempresentasikan informasi kewilayahan
49	RAD 10	Data Pendukung Umum	RAD 10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang mempresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya

C. Struktur Referensi Arsitektur Proses Layanan (RAL)

Domain arsitektur layanan SPBE diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat struktur, yaitu:

a. Domain layanan: mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
b. Area layanan: menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
c. Kategori layanan: menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
d. Sub kategori layanan: menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Adapun penjelasan mengenai taksonomi referensi arsitektur layanan dapat dilihat pada gambar berikut:

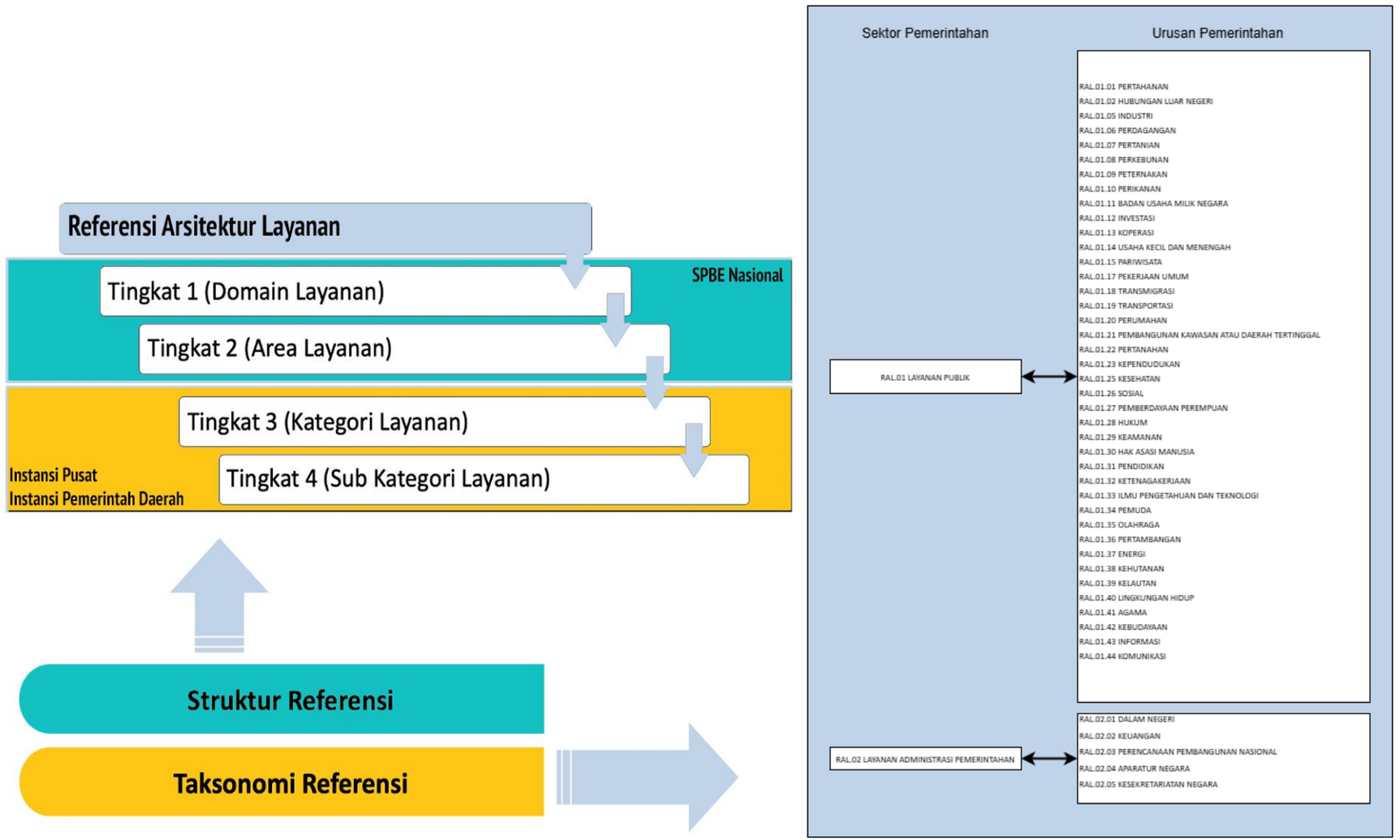

Gambar 1.4.4.3. Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan (RAL)

Berikut tabel 1.4.5.3 adalah referensi Arsitektur Layanan tingkat 1 (pertama) dan 2 (kedua) yang merupakan struktur referensi nasional.

Tabel 1.4.5.3 Referensi Arsitektur Layanan Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 2 (kedua)

No	Kode	Domain Layanan	Kode	Area Layanan	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
1	RAL 01	Layanan Publik	01.01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara
2	RAL 01	Layanan Publik	01.02	Urusan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang urusan luar negeri
5	RAL 01	Layanan Publik	01.05	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri
6	RAL 01	Layanan Publik	01.06	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan
7	RAL 01	Layanan Publik	01.07	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian
8	RAL 01	Layanan Publik	01.08	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan
9	RAL 01	Layanan Publik	01.09	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan
10	RAL 01	Layanan Publik	01.10	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan
11	RAL 01	Layanan Publik	01.11	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara
12	RAL 01	Layanan Publik	01.12	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan penanaman modal
13	RAL 01	Layanan Publik	01.13	Koperasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan koperasi
14	RAL 01	Layanan Publik	01.14	Usaha Kecil dan Menengah	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah
15	RAL 01	Layanan Publik	01.15	Pariwisata	Kegiatan pelayanan dalam bidang kepariwisataan
16	RAL 01	Layanan Publik	01.16	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi
17	RAL 01	Layanan Publik	01.17	Pekerjaan Umum	Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
18	RAL 01	Layanan Publik	01.18	Transmigrasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi.
19	RAL 01	Layanan Publik	01.19	Transportasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi.
20	RAL 01	Layanan Publik	01.20	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan
21	RAL 01	Layanan Publik	01.21	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
22	RAL 01	Layanan Publik	01.22	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan.
23	RAL 01	Layanan Publik	01.23	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan

No	Kode	Domain Layanan	Kode	Area Layanan	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
24	RAL 01	Layanan Publik	01.24	Pemerintah Daerah	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum
25	RAL 01	Layanan Publik	01.25	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan
26	RAL 01	Layanan Publik	01.26	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial
27	RAL 01	Layanan Publik	01.27	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan
28	RAL 01	Layanan Publik	01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum
29	RAL 01	Layanan Publik	01.29	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan
30	RAL 01	Layanan Publik	01.30	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia
31	RAL 01	Layanan Publik	01.31	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan
32	RAL 01	Layanan Publik	01.32	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan
33	RAL 01	Layanan Publik	01.33	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
34	RAL 01	Layanan Publik	01.34	Pemuda	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda
35	RAL 01	Layanan Publik	01.35	Olahraga	Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan
36	RAL 01	Layanan Publik	01.36	Pertambangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan
37	RAL 01	Layanan Publik	01.37	Energi	Kegiatan pelayanan dalam bidang energi
38	RAL 01	Layanan Publik	01.38	Kehutanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan
39	RAL 01	Layanan Publik	01.39	Kelautan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan
40	RAL 01	Layanan Publik	01.40	Lingkungan Hidup	Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup
41	RAL 01	Layanan Publik	01.41	Agama	Kegiatan pelayanan dalam bidang agama
42	RAL 01	Layanan Publik	01.42	Kebudayaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan
43	RAL 01	Layanan Publik	01.43	Informasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi
44	RAL 01	Layanan Publik	01.44	Komunikasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi
45	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.01	Dalam Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang dalam negeri
46	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan
47	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional
48	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan aparatur negara
49	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.05	Kesekretariatan Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesekretariatan negara

No	Kode	Domain Layanan	Kode	Area Layanan	Deskripsi (Perpres 132, 2022)
50	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi
51	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja
52	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan
53	RAL 02	Layanan Administrasi Pemerintahan	02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan

D. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

Domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan kedalam 4 (empat) tingkat, yaitu:

a. Domain aplikasi: mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
b. Area aplikasi: menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), menjadi struktur di tingkat nasional;
c. Kategori aplikasi: menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
d. Sub kategori aplikasi: menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur aplikasi dijelaskan pada gambar berikut:

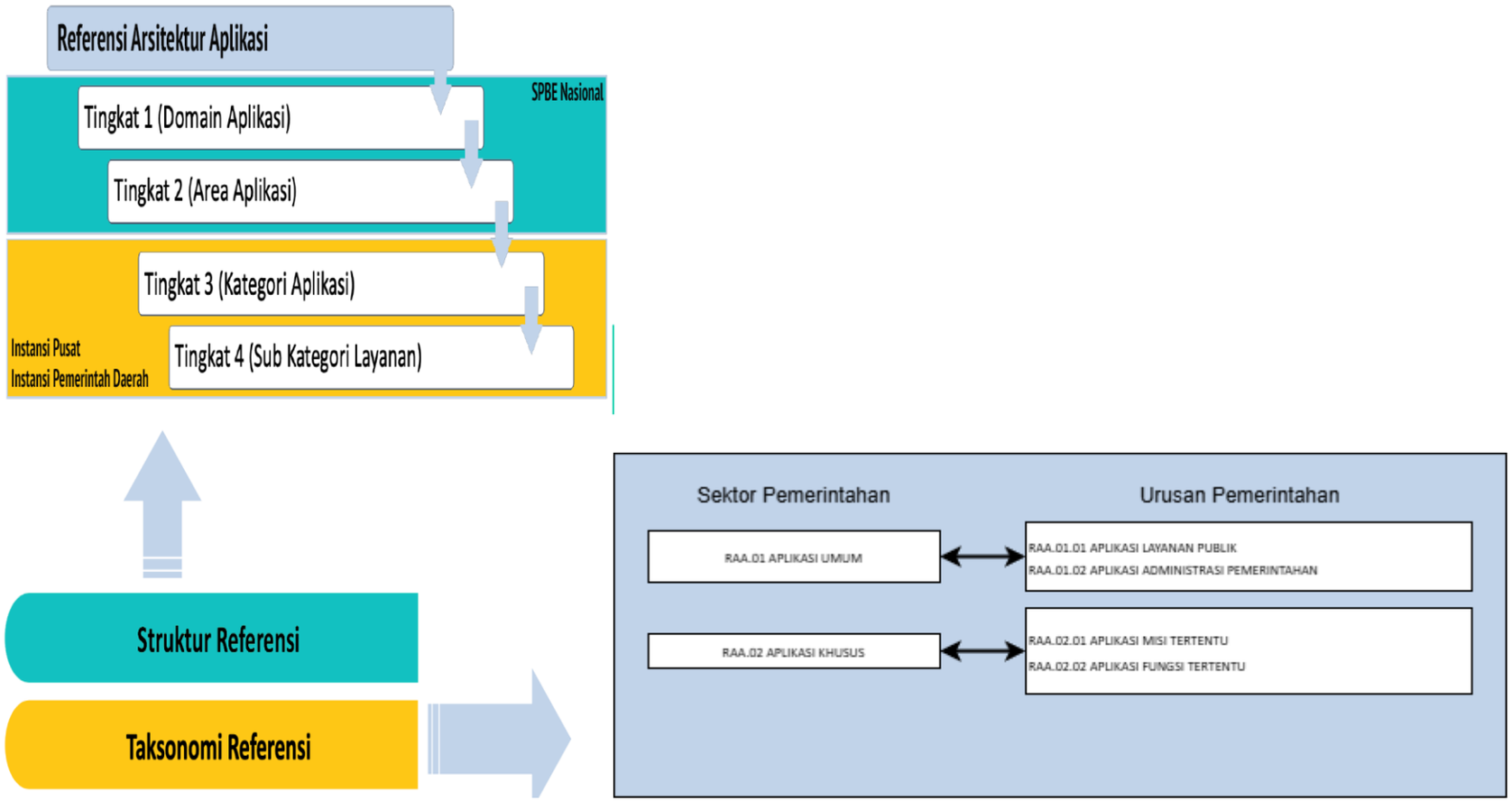

Gambar 1.4.4.4. Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

Berikut Tabel 1.4.5.4 adalah referensi Arsitektur Aplikasi tingkat 1 (pertama) dan 2 (kedua) yang merupakan struktur referensi nasional.

Tabel 1.4.5.4 Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 2 (kedua).

No	Kode	Domain Aplikasi	Kode	Area Aplikasi	Deskripsi (perpres 132, 2022)
1	RAA 01	Aplikasi Umum	RAA 01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.
2	RAA 01	Aplikasi Umum	RAA 01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
3	RAA 02	Aplikasi Khusus	RAA 02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pr.rsat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
4	RAA 02	Aplikasi Khusus	RAA 02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

E. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

Domain arsitektur infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:

a. Domain infrastruktur, mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
b. Area infrastruktur, menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi, data dan informasi yang kemudian dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua) dan menjadi struktur di tingkat nasional; dan
c. Kategori infrastruktur, menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga) yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur infrastruktur dijelaskan pada gambar berikut:

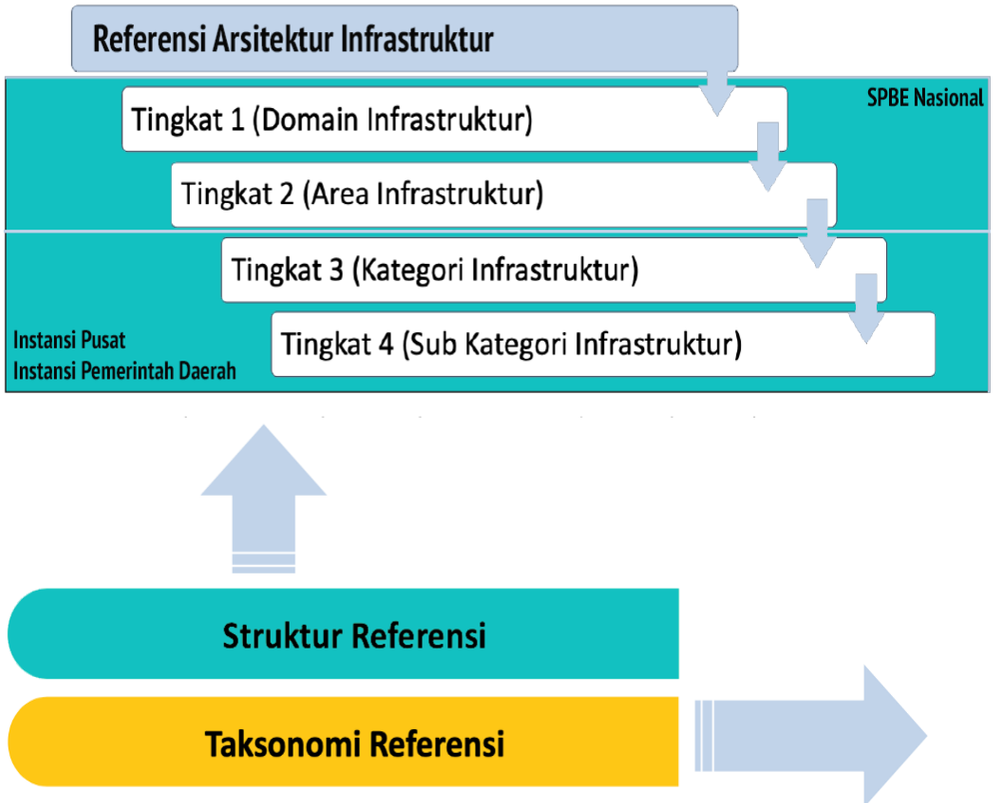

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Fasilitas Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi *cloud* untuk lingkungan kerja aplikasi

Gambar 1.4.4.5. Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

Berikut tabel 1.4.5.5 adalah referensi Arsitektur Infrastruktur tingkat 1 (pertama) dan 2 (kedua) yang merupakan struktur referensi nasional.

Tabel 1.4.5.5 Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 2 (kedua).

No	Kode	Domain Infrastruktur	Kode	Area Infrastruktur	Deskripsi (perpres 132, 2022)
1	RAI 01	Fasilitasi Komputasi	RAI 01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
2	RAI 01	Fasilitasi Komputasi	RAI 01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu
3	RAI 01	Fasilitasi Komputasi	RAI 01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem
4	RAI 02	Sistem Integrasi	RAI 02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/ organisasi.
5	RAI 02	Sistem Integrasi	RAI 02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
6	RAI 03	Platform	RAI 03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
7	RAI 03	Platform	RAI 03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja aplikasi.

F. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan Informasi

Domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional yang selanjutnya merupakan substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur keamanan SPBE berupa 2 (dua) tingkat, yaitu:

a. Domain keamanan: mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan, dan pertimbangan kelayakan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional; dan
b. Area keamanan: mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur keamanan informasi dijelaskan pada gambar berikut.

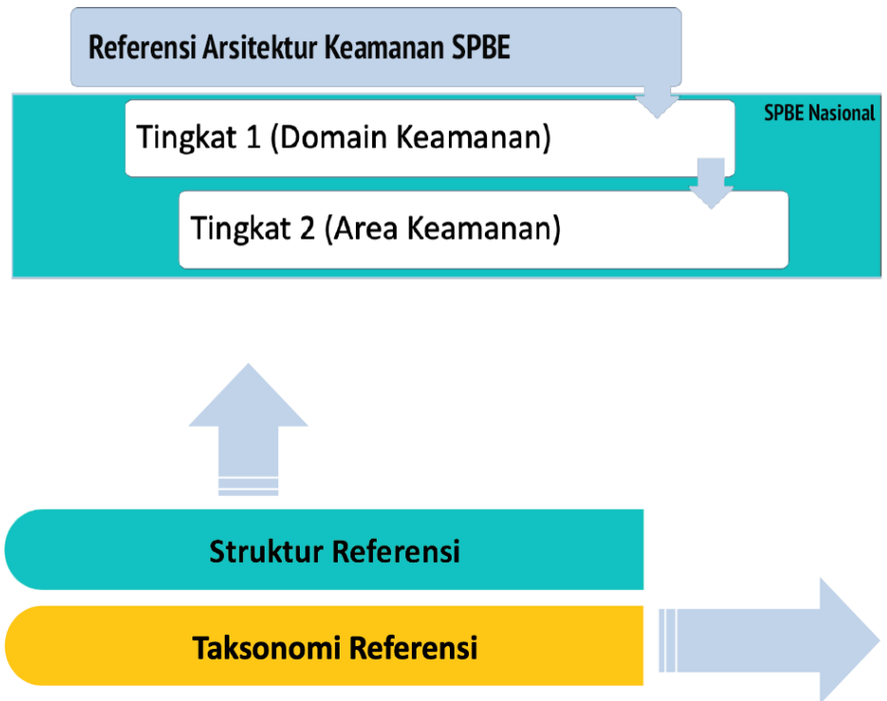

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Standar atau Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk penerapan Keamanan SPBE.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk menanggulangi, memulihkan dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Uji kelaikan keamanan terhadap aplikasi umum yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Uji kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Infrastruktur SPBE Nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

Gambar 1.4.4.6. Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan Informasi (RAK)

Berikut tabel 1.4.5.6 adalah referensi Arsitektur Keamanan tingkat 1 (pertama) dan 2 (kedua) yang merupakan struktur referensi nasional.

Tabel 1.4.5.6 Referensi Arsitektur Keamanan Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 2 (kedua).

No	Kode	Domain Keamanan	Kode	Area Keamanan	Deskripsi (perpres 132, 2022)
1	RAK 01	Standar Keamanan	RAK 01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
2	RAK 01	Standar Keamanan	RAK 01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.
3	RAK 01	Standar Keamanan	RAK 01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
4	RAK 02	Penerapan Keamanan	RAK 02.01	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE
5	RAK 02	Penerapan Keamanan	RAK 02.02	Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
6	RAK 02	Penerapan Keamanan	RAK 02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE
7	RAK 02	Penerapan Keamanan	RAK 02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
7	RAK 02	Penerapan Keamanan	RAK 02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE.
8	RAK 03	Kelaikan Keamanan	RAK 03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelayakan keamanan.
9	RAK 03	Kelaikan Keamanan	RAK 03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di

No	Kode	Domain Keamanan	Kode	Area Keamanan	Deskripsi (perpres 132, 2022)
					Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

Bab II Visi dan Misi Strategi SPBE

2.1. Visi

Secara umum, arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga harus mengacu pada visi SPBE Nasional yaitu:

> ***"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang***

Berdasarkan hal tersebut, visi SPBE Nasional ini perlu diselaraskan, disinkronisasikan, dan diharmonisasikan dengan visi dan misi SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo guna mendefinisikan arsitektur dan peta rencana SPBE yang sesuai. Adapun Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 :

> ***“Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri,***

Mengacu pada dua hal tersebut pondasi strategi dalam arsitektur dan peta jalan SPBE, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029. Lebih jauh, visi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo guna menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Berbagai upaya pencapaian visi SPBE dan strategi pencapaian implementasi SPBE yang dapat digunakan antara lain, yaitu:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola SPBE yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal, dan;
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Secara umum, merujuk pada visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo antara lain, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sebagai turunan dari visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen TIK yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM TIK.

Berdasarkan sasaran SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tersebut perlu dimasukkan kedalam unsur-unsur yang ada di dalam SPBE, guna mencapai SPBE yang selaras dengan arah digitalisasi Nasional. Adapun unsur-unsur dalam SPBE dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 2.1.1. Unsur-unsur dalam SPBE

2.2. Strategi Peningkatan SPBE

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. KULON PROGO | **3,91** (Sangat Baik)

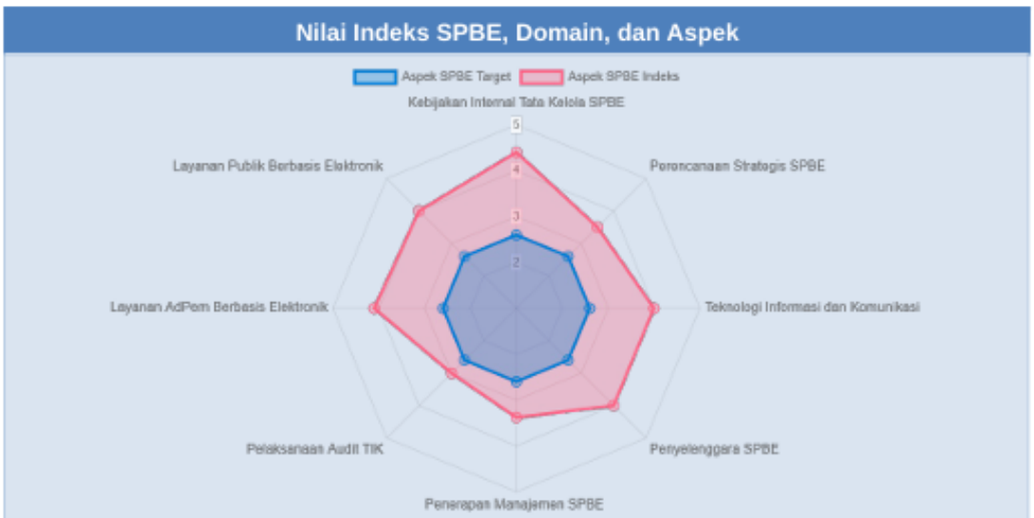

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	**3,91**
Domain Kebijakan SPBE	4,40
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*4,40*
Domain Tata Kelola SPBE	3,80
Perencanaan Strategis SPBE	*3,50*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*4,00*
Penyelenggara SPBE	*4,00*
Domain Manajemen SPBE	3,27
Penerapan Manajemen SPBE	*3,38*
Audit TIK	*3,00*
Domain Layanan SPBE	4,06
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*4,10*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,00*

Gambar 2.2.1. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
(Sumber: Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Kulon Progo, 2024)

Merujuk pada Gambar 2.2.1. dapat disimpulkan bahwa anggota dalam Tim Koordinasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya aktif berkolaborasi dalam penerapan tata kelola dan manajemen SPBE. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan indeks pada seluruh domain SPBE perlu dilakukan beberapa *best practices* yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1. Strategi Peningkatan Indeks SPBE

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
1	Indikator 1 sampai 10 terkait Kebijakan SPBE	1. Melakukan reviu atas regulasi eksisting yang terkait SPBE, memastikan cakupannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam pedoman evaluasi SPBE. 2. Regulasi telah diterapkan oleh seluruh perangkat daerah. 3. Melakukan revisi / perbaikan regulasi SPBE Daerah sesuai dengan perkembangan regulasi SPBE dari Pusat.	Tim Koordinasi SPBE
2	Indikator 11-13 terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Rencana Anggaran SPBE	1. Membuat Dokumen Perencanaan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2. Monitoring dan Evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sesuai dengan Kebijakan yang ada pada pusat . 3. Menuangkan substansi Peta Rencana SPBE ke dalam RKPD.	Tim Koordinasi SPBE
3	Indikator 14 terkait Inovasi Proses Bisnis SPBE	1. Membuat Dokumen Proses Bisnis Pemerintah Daerah 2. Membuat BPMN Proses Bisnis Pemerintah Daerah 3. Evaluasi Proses Bisnis Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi
4	Indikator 15 terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	1. Membuat Standarisasi Pengembangan Aplikasi 2. Membuat Dokumentasi Pengembangan Aplikasi 3. Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Indikator 16 terkait Layanan Pusat Data	1. Melakukan migrasi seluruh aplikasi internal ke Pusat Data / Server yang terpusat milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Diskominfo. 2. Server Pemerintah Daerah terintegrasi dengan jaringan Pusat Data Nasional. 3. Melakukan evaluasi atas operasional Pusat Data milik Pemerintah Daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Indikator 17 terkait Jaringan Intra Pemerintah	Mengembangkan konektivitas ke seluruh SKPD (Metro Area Network) yang terpusat di Diskominfo sebagai NOC nya. Memasang MRTG pada jaringan MAN Pemerintah Daerah. Memastikan seluruh ruangan SKPD tercover radius Access Point. Melakukan evaluasi atas operasional Jaringan Intra milik Pemerintah Daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Indikator 18 terkait Sistem Penghubung layanan Pemerintah	1. Mengembangkan SPL yang menjadi portal layanan data 2. Mengevaluasi pengembangan dan pelaksanaan SPL 3.	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Indikator 19 terkait Tim Koordinasi SPBE	1. Mendefinisikan tugas dan fungsi, Program Kerja Tim Koordinasi SPBE sesuai yang tertuang dalam peta rencana. 2. Melakukan pembaharuan tugas dan fungsi Program Kerja Tim Koordinasi SPBE sesuai kondisi yang akan datang.	Tim Koordinasi SPBE

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
9	Indikator 20 terkait Kolaborasi Penerapan SPBE	1. Melakukan kolaborasi dalam penerapan peta rencana SPBE dengan melibatkan seluruh perangkat daerah Pemerintah Daerah. 2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan peta rencana SPBE	Tim Koordinasi SPBE
10	Indikator 21 - 28 terkait Manajemen SPBE	1. Mengkaji manajemen SPBE dan menerapkannya di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan. 2. Melakukan kegiatan manajemen SPBE secara berkelanjutan. 3. Melakukan reviu dan perbaikan atas penerapan manajemen SPBE.	Tim Koordinasi SPBE
11	Indikator 29 - 31 terkait Audit TIK	Perencanaan Program Kerja dan Kegiatan Audit Aplikasi Infrastruktur dan Keamanan tertuang pada Peta Rencana SPBE Audit Aplikasi Infrastruktur dan Keamanan SPBE dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE (BRIN) Muatan pemeriksaan Audit Aplikasi Infrastruktur dan Keamanan: Audit Aplikasi Infrastruktur dan Keamanan SPBE IPPD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh IPPD, berkoordinasi dengan BRIN.	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat
12	Indikator 32 - 47 terkait Layanan SPBE	1. Mengidentifikasi 14 Aplikasi Layanan SPBE. 2. Melakukan Integrasi Aplikasi Layanan SPBE dengan Aplikasi Pusat maupun aplikasi daerah. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Layanan SPBE setiap tahunya.	Perangkat Daerah Terkait 14 Layanan SPBE

2.3. Inisiatif Strategis SPBE

Berdasarkan telaah visi SPBE Nasional dan visi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta analisis hasil evaluasi SPBE terakhir diperoleh sepuluh inisiatif sebagai prioritas pengembangan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu:

1. Reviu kebijakan terkait SPBE secara berkelanjutan;
2. Melakukan efisiensi proses bisnis dengan melakukan digitalisasi pada proses bisnis yang kompleks guna memberikan pelayanan administrasi internal maupun publik yang lebih prima;
3. Pengembangan aplikasi khusus guna mendukung implementasi layanan tematik SPBE, aplikasi internal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo setidaknya harus memenuhi syarat indeks layanan SPBE di level 4 (empat), dimana aplikasi khusus harus dapat terintegrasi dengan aplikasi lain baik yang dikelola oleh internal pemda maupun yang dikelola oleh instansi lain;
4. Pengembangan *platform* integrasi layanan elektronik yang sudah berjalan dengan menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan menjangkau seluruh perangkat daerah, seperti: optimalisasi berbagai SOP yang sudah ada terutama yang

berkaitan dengan pihak ketiga dan pelaksanaan berkelanjutan;

5. Peningkatan dan optimalisasi kapasitas (pusat data, jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah) untuk optimalisasi layanan elektronik di internal Pemerintah Kabupaten yang berkelanjutan;
6. Penyesuaian tim Koordinasi SPBE (terutama pembentukan delapan pokja);
7. Optimalisasi forum kolaborasi penerapan SPBE baik dengan internal maupun dengan instansi pusat;
8. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM dengan kualifikasi TI secara terencana dan berkesinambungan;
9. Menyusun pedoman, penerapan & optimalisasi delapan manajemen SPBE; dan
10. Melakukan audit atas operasional SPBE yang meliputi audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan secara berkala.

Bab III Analisa Kondisi *as-is* SPBE

3.1. Kebijakan & Manajemen

3.1.1.Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menerapkan beberapa layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik. Pengembangan layanan SPBE telah didukung oleh kebijakan internal SPBE yang terlihat pada hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024, dimana domain kebijakan memperoleh nilai 4,40 (penilaian kebijakan dasar untuk penerapan SPBE dinilai sudah optimal). Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan internal SPBE dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.1 Mandatori Kebijakan SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

No.	Mandatori	Keterangan
1.	Kebijakan Arsitektur SPBE	Sudah Ada
2.	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Sudah Ada
3.	Kebijakan Manajemen Data	Sudah Ada
4.	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Sudah Ada
5.	Kebijakan Layanan Pusat Data	Sudah Ada
6.	Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Sudah Ada
7.	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Sudah Ada
8.	Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	Sudah Ada
9.	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum Ada
10.	Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Sudah Ada

Berdasarkan 10 (sepuluh) mandatori kebijakan internal SPBE, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyusun 9 (sembilan) mandatori kebijakan internal SPBE.

Dalam rangka menjamin keterpaduan, efisiensi, dan kesinambungan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, ditetapkan prinsip-prinsip operasional arsitektur yang mengikat sebagai berikut :

1. Siklus Evaluasi dan Pemutakhiran Arsitektur Dokumen Arsitektur SPBE merupakan dokumen yang bersifat dinamis (living document) yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan proses bisnis dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, peninjauan ulang (review) dan pemutakhiran terhadap arsitektur serta katalog-katalog pendukungnya wajib dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali (annual review). Hal ini dilakukan untuk memastikan perencanaan tetap relevan dengan kebutuhan pelayanan publik.
2. Metode dan Indikator Evaluasi Evaluasi terhadap efektivitas penerapan Arsitektur SPBE dilakukan secara berkala melalui mekanisme pemantauan tahunan. Metode evaluasi berpedoman pada standar nasional yang ditetapkan dalam Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2023 (atau peraturan penggantinya), yang mencakup analisa mendalam terhadap 47

indikator tingkat kematangan SPBE. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai baseline untuk menentukan inisiatif perbaikan program pada tahun berikutnya.

3. Kewajiban Penggunaan Single Sign-On (SSO) Untuk meningkatkan kemudahan akses bagi pengguna dan keamanan informasi, setiap layanan digital wajib diintegrasikan melalui mekanisme Single Sign-On (SSO). Strategi ini diwujudkan melalui penggabungan berbagai aplikasi ke dalam satu portal layanan publik (super app) bagi masyarakat dan satu portal aparatur bagi ASN, guna menghindari penggunaan banyak akun dan aplikasi yang berbeda-beda untuk layanan yang serupa.
4. Mandatori Sistem Penghubung Layanan (SPL) Setiap pertukaran data dan interoperabilitas antar aplikasi wajib menggunakan Sistem Penghubung Layanan (SPL) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan merujuk pada standar SPLP Nasional. Penggunaan SPL ditujukan untuk menghilangkan ego sektoral dan praktik sistem silo, sehingga data dapat terbagi pakai secara aman dan standar di seluruh perangkat daerah.
5. Kolaborasi Lintas Daerah dan Pemerintah Daerah DIY Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kulon Progo mengedepankan prinsip kolaboratif dan sinergi lintas instansi. Hal ini mencakup kolaborasi aktif dalam penerapan peta rencana dengan seluruh perangkat daerah internal, serta integrasi infrastruktur dengan Pemerintah Daerah DIY (seperti penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah DIY) dan Instansi Pusat guna mendukung keterpaduan layanan digital nasional.
6. Persyaratan Integrasi Layanan dan Aplikasi Setiap pengembangan atau perubahan pada aplikasi khusus perangkat daerah harus memenuhi standar indeks layanan SPBE sekurang-kurangnya Level 4 (Terintegrasi). Artinya, aplikasi tidak boleh berdiri sendiri; aplikasi wajib memiliki kemampuan untuk berbagi data dan terintegrasi dengan aplikasi lain baik di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun dengan sistem instansi pemerintah lainnya.
7. Penyelarasan Usulan Program dengan Arsitektur SPBE Setiap usulan program, kegiatan, maupun pengembangan sistem informasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengacu pada dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Arsitektur SPBE digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SPBE yang terpadu. Usulan yang tidak selaras dengan arsitektur tidak dapat diproses lebih lanjut dalam tahap penganggaran guna mencegah terjadinya duplikasi inisiatif dan pemborosan anggaran.

3.1.2. Manajemen

Pengembangan dan penerapan SPBE tentu harus diimbangi dengan penerapan manajemen guna memastikan operasional SPBE dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ekspektasi. Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 khususnya pada domain manajemen SPBE memperoleh nilai 3.27. Layanan SPBE tanpa didukung dengan penerapan manajemen yang optimal dapat berimplikasi pada pelayanan yang kurang baik. Terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi SPBE, yakni: SDM (*people*) →Manajemen (*process*) →Layanan IT (*technology*). Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan mengenai pemenuhan penerapan manajemen yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.1. Mandatori Manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

No.	Mandatori	Keterangan
1.	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Sudah diterapkan
2.	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Sudah diterapkan
3.	Penerapan Manajemen Data	Belum diterapkan
4.	Penerapan Manajemen Aset TIK	Belum diterapkan
5.	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Sudah diterapkan
6.	Penerapan Manajemen Pengetahuan	Sudah diterapkan
7.	Penerapan Manajemen Perubahan	Sudah diterapkan
8.	Penerapan Manajemen Layanan Indikator SPBE	Sudah diterapkan

Berdasarkan dari 8 (Delapan) mandatori Manajemen SPBE, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah menerapkan 6 (enam) mandatori manajemen SPBE. Kedepannya perlu adanya peningkatan penerapan manajemen SPBE secara optimal dapat meningkatkan kualitas layanan publik, menghilangkan duplikasi data, membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi kompleksitas birokrasi, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah.

3.2. Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan SPBE yang optimal. Selain itu, Arsitektur SPBE ini digunakan sebagai dasar penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

3.2.1. Arsitektur Proses Bisnis

Secara umum, arsitektur proses bisnis menggambarkan kondisi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah sesuai ketugasan dan fungsi berdasarkan dokumen Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

3.2.1.1. Katalog Proses Bisnis

Katalog proses bisnis berisi deskripsi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan dimana Level 1,2, dan 3 mengacu pada Referensi Arsitektur Bisnis (RAB) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. **Metadata katalog proses bisnis yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dapat diakses pada link: https://bit.ly/MetadataSPBEKulonProgo di sheet Probis.**

Tabel 3.2.1.1.1. Cuplikan Katalog Proses Bisnis Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 01.01.03.01	Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	RAB.01 PERTAHANAN DAN LUAR NEGERI	RAB.01.01 PERTAHANAN	RAB.01.01.03 POTENSI PERTAHANAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAB 02.01.01.01	Perencanaan Pembangunan Industri	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAB 02.02.01.01	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan
KP-DAB 02.02.03.01	Pelaksanaan Metrologi Legal	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Dinas Perdagangan
KP-DAB 02.02.05.01	Promosi Dagang dan Misi Dagang Produk Ekspor	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.05 PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NASIONAL	Dinas Perdagangan
KP-DAB 02.03.02.01	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Pertanian dan Pangan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 02.03.02.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Mikro Organisme	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.03.07.01	Penyuluhan Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.07 PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.03.13.01	Pembangunan Prasarana Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.03.16.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.03.16.02	Pengembangan Prasarana Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.03.20.01	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.03.21.01	Pencapaian Target Konsumsi Pangan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.03.21.02	Penanganan Kerawanan Pangan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.03.22.01	Penyediaan Pangan Pokok/Pangan Lainnya	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.22 KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.03.22.02	Pengawasan Keamanan Pangan Segar	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.22 KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.04.03.01	Penanggulangan Bencana Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.04 PERKEBUNAN	RAB.02.04.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.05.01.01	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.05.02.01	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS PETERNAKAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.05.04.01	Penjaminan Kesehatan Hewan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Pertanian dan Pangan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 02.05.04.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.05.05.01	Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.05.05.02	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.05.05.03	Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAB 02.06.01.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAB 02.06.01.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAB 02.06.01.03	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAB 02.06.02.01	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAB 02.06.02.02	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAB 02.06.03.01	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAB 02.06.03.02	Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAB 02.06.04.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 02.08.01.01	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Elektronik	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAB 02.08.01.02	Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAB 02.08.01.03	Pemantauan perizinan berusaha berbasis risiko	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAB 02.08.01.04	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAB 02.08.01.05	Pembuatan Peta Potensi Investasi	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAB 02.08.01.06	Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAB 02.08.03.01	Promosi Penanaman Modal	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAB 02.08.04.01	Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAB 02.08.04.02	Bimtek Pelaku Usaha	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAB 02.08.04.03	Pengawasan Penanaman Modal	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAB 02.09.01.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.09 KOPERASI	RAB.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAB 02.09.04.01	Pengawasan Koperasi	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.09 KOPERASI	RAB.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 02.10.01.01	Pengembangan Usaha Mikro	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAB.02.10.01 USAHA MIKRO	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAB 02.10.02.01	Pemberdayaan Usaha Mikro	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAB.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAB 02.11.01.01	Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata
KP-DAB 02.11.02.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
KP-DAB 02.11.02.02	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
KP-DAB 02.11.02.03	Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
KP-DAB 02.11.04.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.04 PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata
KP-DAB 03.01.01.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.01.01.02	Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.01.01.03	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.01.01.04	Penyelenggaraan Jalan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.01.03.01	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 03.01.03.02	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.01.03.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.02.01.01	Penataan Persebaran Penduduk	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.02 TRANSMIGRASI	RAB.03.02.01 FASILITASI PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAB 03.03.02.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAB 03.03.03.01	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAB 03.03.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAB 03.03.02.03	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAB 03.03.03.02	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAB 03.03.04.01	Penyediaan Angkutan Umum	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAB 03.03.07.01	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.07 PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN	Dinas Perhubungan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 03.03.07.02	Persetujuan Andalalin	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.07 PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN	Dinas Perhubungan
KP-DAB 03.04.01.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.04.02.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.04.02.02	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.04.03.01	Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.04.03.02	Penyelenggaraan PSU Perumahan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.04.04.01	Penyediaan Rumah Korban Bencana/Relokasi	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.04.04.02	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.04.04.03	Pembangunan Rumah Korban Bencana/Relokasi	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.04.04.04	Pengelolaan Rumah Susun Umum/Rumah Khusus	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAB 03.05.05.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAB.03.05.05 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAB 03.06.01.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 03.06.01.02	Pemanfaatan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAB 03.06.01.03	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAB 03.06.08.01	Penggunaan Tanah	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAB 03.06.08.02	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAB 03.06.08.03	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAB 03.06.09.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.09 PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAB 03.06.09.02	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.09 PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAB 03.07.01.01	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAB 03.07.02.01	KIE Pengendalian Penduduk dan KB	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAB 03.07.02.02	Pengendalian Kebutuhan Alokon	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 03.07.02.03	Pendistribusian Kebutuhan Alokon	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAB 03.07.02.04	Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAB 03.07.02.05	Pemberdayaan Peran Serta Ormas	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAB 03.07.03.01	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAB 04.01.01.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAB 04.01.01.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAB 04.01.01.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAB 04.01.02.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
KP-DAB 04.01.04.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAB 04.01.04.02	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 04.01.04.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAB 04.01.06.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
KP-DAB 04.01.06.02	Pengembangan UKBM	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
KP-DAB 04.01.08.01	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
KP-DAB 04.01.08.02	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
KP-DAB 04.02.01.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.02.01.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.02.01.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.02.01.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.02.01.05	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.02.04.01	Pengumpulan Sumbangan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.02.04.02	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.02.04.03	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.02.05.01	Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
				KESEJAHTERAAN SOSIAL	
KP-DAB 04.02.04.04	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
KP-DAB 04.02.05.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.02.06.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAB 04.02.06.02	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAB 04.02.06.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAB 04.02.06.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAB 04.02.06.05	Penanganan B3 Kebakaran	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAB 04.02.06.06	Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan Kebakaran	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAB 04.02.06.07	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.02.06.08	Pemberdayaan Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.03.01.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.03.01.02	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.03.02.01	Pelembagaan PHA	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.02 PEMENUHAN HAK ANAK	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 04.03.03.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.03.03.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Perempuan Korban Kekerasan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.03.03.03	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.03.04.01	Penyediaan Layanan Anak Pemerlu Perlindungan Khusus	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 05.01.01.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.01 HUKUM	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Sekretariat DPRD
KP-DAB 05.01.02.01	Fasilitasi Hukum	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.01 HUKUM	RAB.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAB 05.02.01.01	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAB 05.02.01.02	Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAB 05.02.01.03	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
KP-DAB 05.02.02.01	Penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM	Satuan Polisi Pamong Praja
KP-DAB 06.01.01.01	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAB 06.01.02.01	Pengelolaan Pendidikan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
				USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	
KP-DAB 06.01.02.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAB 06.01.02.03	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAB 06.01.02.04	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAB 06.01.03.01	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.03 PENDIDIKAN NON FORMAL	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAB 06.01.05.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAB 06.02.01.01	Pelatihan Unit Kompetensi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAB 06.02.01.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAB 06.02.01.03	Pengukuran Produktivitas	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAB 06.02.02.01	Pembentukan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
				DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
KP-DAB 06.02.02.02	Pelayanan antar Kerja	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAB 06.02.02.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAB 06.02.03.01	Pengesahan PP dan PKB	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAB 06.02.03.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAB 06.03.02.01	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAB 06.04.01.01	Pemberdayaan Pemuda dan Kepemudaan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.04 PEMUDA	RAB.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAB 06.04.01.02	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.04 PEMUDA	RAB.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAB 06.04.02.01	Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.04 PEMUDA	RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAB 06.04.02.02	Pengembangan Organisasi Kepemudaan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.04 PEMUDA	RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAB 06.05.01.01	Pembinaan Olahraga Pendidikan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.05 OLAHRAGA	RAB.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 06.05.01.02	Pengembangan Olahraga Pendidikan	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.05 OLAHRAGA	RAB.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAB 06.05.02.01	Pembinaan Olahraga Prestasi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.05 OLAHRAGA	RAB.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAB 06.05.02.02	Pengembangan Olahraga Prestasi	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.05 OLAHRAGA	RAB.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAB 07.02.02.01	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.02 ENERGI	RAB.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Bagian Perekonomian dan SDA
KP-DAB 07.05.01.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAB 07.05.01.02	Pengawasan Usaha, Izin Lingkungan dan Izin PPLH	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAB 07.05.02.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAB 07.05.03.01	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAB 07.05.03.02	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAB 07.05.03.03	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAB 07.05.04.01	Pengelolaan Sampah	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAB 07.05.07.01	Penyuluhan Lingkungan Hidup Lembaga Kemasyarakatan	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.07 PENYELENGGARAAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 07.05.07.02	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat PPLH	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.07 PENYELENGGARAAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAB 08.02.01.01	Pengelolaan Kebudayaan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAB 08.02.01.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAB 08.02.01.03	Pengelolaan Taman Budaya	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAB 08.02.01.04	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAB 08.02.02.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.02 PENGELOLAAN PROGRAM KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAB 08.02.05.01	Pengembangan Bahan Pustaka	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAB 08.02.05.02	Pengelolaan Bahan Pustaka	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAB 08.02.05.03	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAB 08.02.06.01	Pengelolaan Perpustakaan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAB 08.02.06.02	Pengembangan Perpustakaan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAB 08.02.06.03	Pembinaan Perpustakaan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 08.02.06.04	Pengembangan Layanan Perpustakaan	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAB 08.02.06.05	Pembudayaan Gemar Membaca	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAB 09.01.01.01	Pembinaan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAB 09.01.04.01	Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAB 09.01.05.01	Pembahasan Kerja Sama Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sekretariat DPRD
KP-DAB 09.01.05.02	Fasilitasi Kerjasama Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Pemerintahan
KP-DAB 09.01.05.03	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan SDA
KP-DAB 09.01.05.04	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Administrasi Pembangunan
KP-DAB 09.01.07.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAB 09.01.07.02	Pelayanan Pencatatan Sipil	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAB 09.01.07.03	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAB 09.01.07.04	Pengumpulan Data Kependudukan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 09.01.07.05	Pemanfaatan Database Kependudukan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAB 09.01.07.06	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAB 09.01.07.07	Pembinaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAB 09.01.07.08	Pembentukan Profil Kependudukan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAB 09.02.02.01	Perencanaan Anggaran Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAB 09.02.02.02	Pengelolaan Keuangan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAB 09.02.03.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAB 09.02.04.01	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAB 09.02.06.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAB 09.02.07.01	Pembahasan Kebijakan Anggaran	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN	Sekretariat DPRD
KP-DAB 09.02.08.01	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAB 09.02.11.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAB 09.03.02.01	Pengelolaan e-Government	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 09.03.03.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAB 09.03.04.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAB 09.03.08.01	Persandian Pengamanan Informasi	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAB 09.03.08.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAB 09.05.01.01	Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAB 09.05.01.02	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAB 09.05.01.03	Perencanaan Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAB 09.05.01.04	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAB 09.05.02.01	Perencanaan dan Pendanaan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.02 PENGANGGARAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAB 09.05.03.01	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAB 09.06.01.01	Fasilitasi Tugas DPRD	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Sekretariat DPRD
KP-DAB 09.06.01.02	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Rumah Tangga
KP-DAB 09.06.01.03	Administrasi Tata Pemerintahan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Pemerintahan
KP-DAB 09.06.01.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Umum

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 09.06.02.01	Penataan Organisasi	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Bagian Organisasi
KP-DAB 09.06.02.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Bagian Organisasi
KP-DAB 09.06.03.01	Peningkatan Kapasitas DPRD	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Sekretariat DPRD
KP-DAB 09.06.03.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Sekretariat DPRD
KP-DAB 09.06.03.03	Pengadaan dan Pemberhentian ASN	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAB 09.06.03.04	Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAB 09.06.03.05	Mutasi dan Promosi ASN	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAB 09.06.03.06	Pengembangan Kompetensi ASN	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAB 09.06.03.07	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAB 09.06.04.01	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Sekretariat DPRD
KP-DAB 09.06.04.02	Penilaian Kinerja Aparatur	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAB 09.06.04.03	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN	Inspektorat

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
				AKUNTABILITAS KINERJA	
KP-DAB 09.06.04.04	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAB 09.06.04.05	Pendampingan dan Asistensi	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAB 09.06.04.06	Pembinaan Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAB 09.06.05.01	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat DPRD
KP-DAB 09.06.06.01	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAB 09.06.06.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAB 09.06.06.03	Pengelolaan Arsip Dinamis	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAB 09.06.06.04	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAB 09.06.06.05	Pengawasan Arsip Dinamis	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAB 09.06.06.06	Pengelolaan Arsip Statis	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAB 09.06.06.07	Pengolahan dan Akses Arsip Statis	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
KP-DAB 09.07.11.01	Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.07 KESEKRETARIATAN NEGARA	RAB.09.07.11 PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2.1.2.Analisis Katalog Proses Bisnis

Merujuk pada hasil pemetaan proses bisnis pada sub bab sebelumnya, dapat dianalisis pengelompokan Level 1 RAB Nasional sebagai berikut:

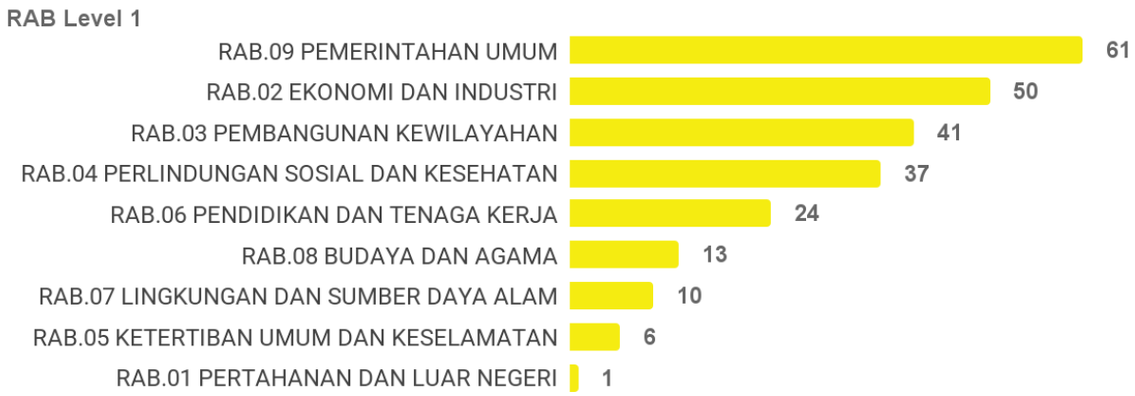

Grafik 3.2.1.2.1. Grafik Jumlah Proses Bisnis RAB berdasarkan Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Level 1 RAB Nasional, sebagian besar proses bisnis masuk dalam RAB 09 Pemerintahan Umum dan RAB 02 Ekonomi dan Industri. Kondisi ini tentunya bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan dan inovasi daftar metadata proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

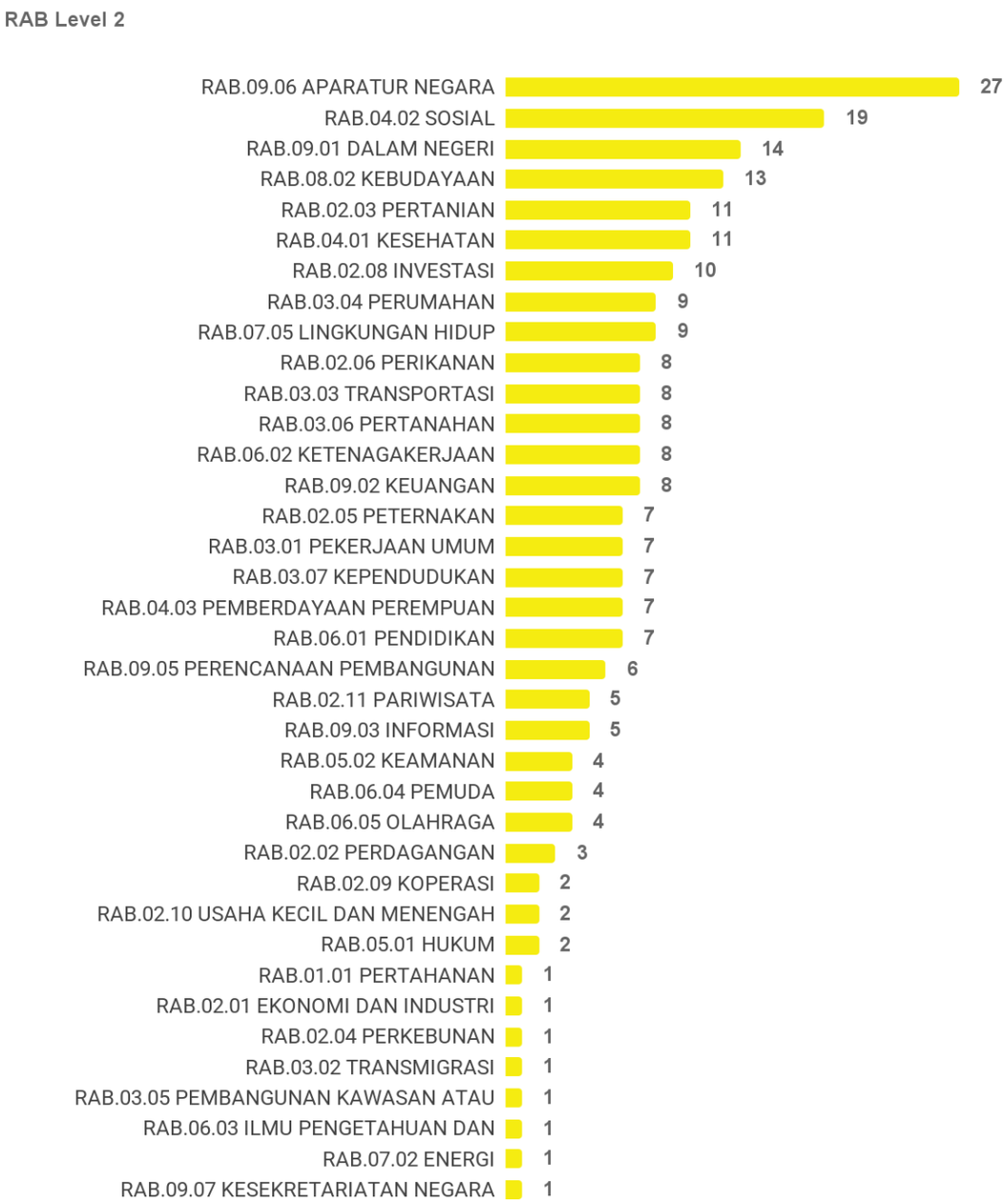

Grafik 3.2.1.2.2. Grafik Jumlah Proses Bisnis berdasarkan RAB Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan level 2 RAB nasional, kategori terbanyak terdapat pada RAB.09.06 Aparatur Negara sejumlah 27 proses bisnis, RAB.04.02 Sosial sejumlah 19 proses bisnis dan RAB.09.01 Dalam Negeri dengan jumlah 14 proses bisnis. Urusan proses bisnis dengan jumlah paling sedikit terdapat pada RAB.01.01 Pertahanan, RAB.02.01 Ekonomi dan Industri, RAB 02.04 Perkebunan, RAB 03.02 Transmigrasi, RAB 03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal, RAB.06.03 Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, RAB.07.02 Energi dan RAB.09.07 Kesekretariatan Negara dengan jumlah 1 proses bisnis. Tentunya varietas jumlah proses bisnis tergantung pada tipe perangkat daerah. Kondisi ini dapat berubah sesuai perkembangan dan inovasi daftar metadata probis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

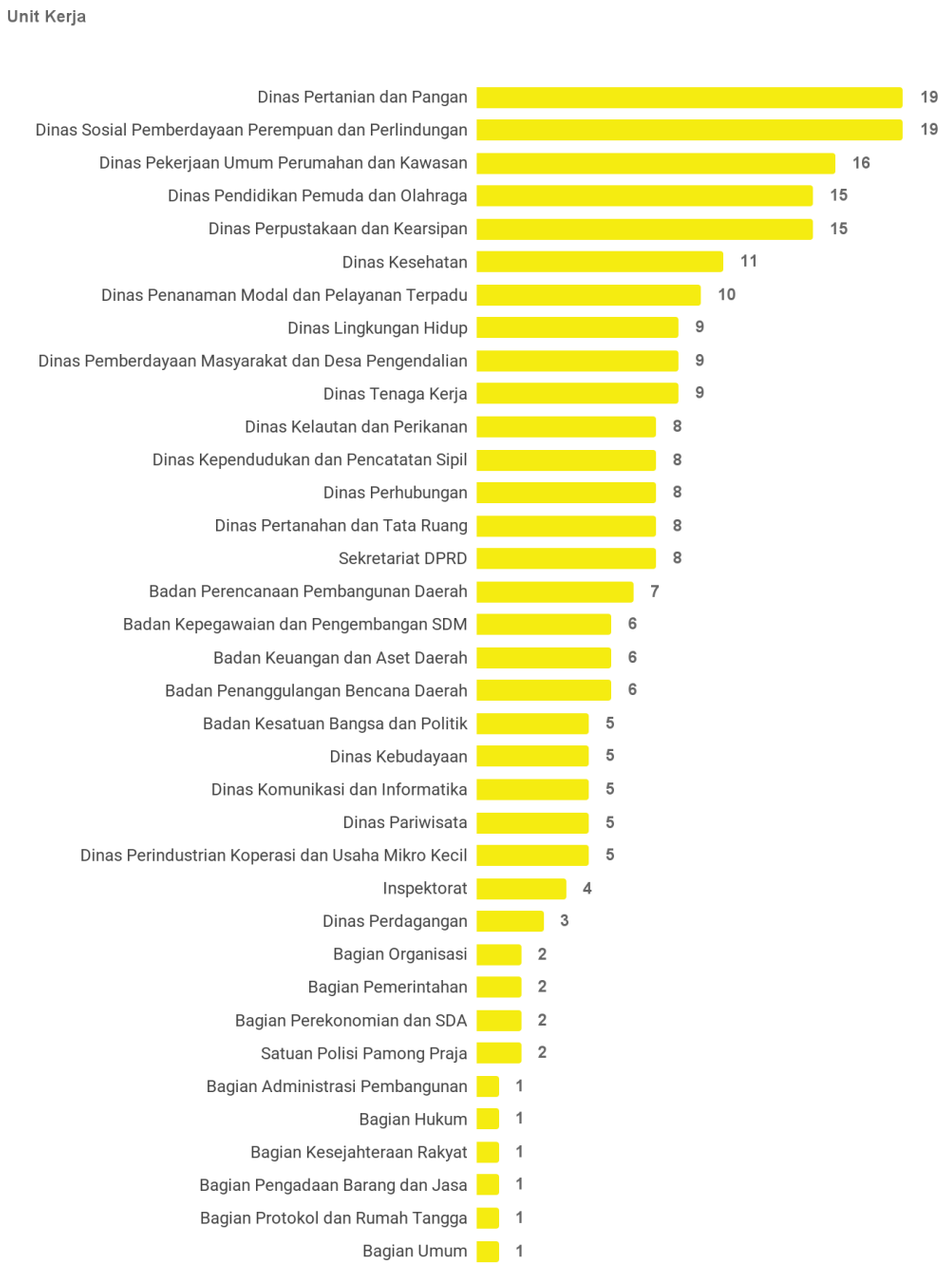

Grafik 3.2.1.2.3. Grafik Jumlah Proses Bisnis pada Perangkat Daerah

Berdasarkan Grafik 3.2.1.2.3. Kepemilikan proses bisnis didominasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan sejumlah 19 Proses Bisnis dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejumlah 19 proses bisnis. Sedangkan Unit Kerja yang memiliki proses bisnis paling sedikit terletak pada Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Protokol dan Rumah Tangga dan Bagian Umum yang memiliki 1 proses bisnis. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan proses bisnis pada perangkat daerah sangat beragam dan tergantung pada karakteristik serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini dapat terus bergerak dan berubah sesuai dengan perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

3.2.2. Arsitektur Data dan Informasi

Arsitektur data memberikan gambaran mengenai daftar data pokok yang dimiliki seluruh perangkat daerah. Daftar data ini perlu dikumpulkan, disimpan, diproses, dan disajikan secara elektronik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data dan informasi pemerintah dapat diakses dengan mudah, aman, dan terintegrasi secara efektif di antara lembaga pemerintah yang berbeda.

3.2.2.1. Katalog Data dan Informasi

Data dan Informasi dalam Arsitektur SPBE merupakan suatu kumpulan data pokok (*by name, by address*) hasil *output* dari pelayanan maupun pengelolaan pemerintahan. Setiap data yang dikelola berupa data yang bersifat publik, terbatas, dan rahasia berdasarkan dari hasil survei terhadap seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog disusun berdasarkan Referensi Arsitektur Data (RAD) Level 1,2, dan 3 mengacu pada referensi arsitektur data SPBE nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. **Metadata katalog data yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dapat diakses pada link: https://bit.ly/MetadataSPBEKulonProgo di sheet Data.**

Tabel 3.2.2.1.1. Cuplikan Katalog Data dan Informasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 02.01.01.00	Data Informasi Perindustrian	SIINas	Terbatas	Realtime	Perencanaan Pembangunan Industri	Layanan Informasi Industri Nasional	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 02.01.01.00	Data Sarana dan Prasarana Industri		Terbuka	Tahunan	Perencanaan Pembangunan Industri	Layanan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.01.01.00	Data Pelaku Industri	SIINas	Terbatas	Tahunan	Perencanaan Pembangunan Industri	Layanan Pendataan dan Registrasi Pelaku Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.01.01.00	Data Pengawasan dan Perlindungan Industri		Terbatas	Bulanan	Perencanaan Pembangunan Industri	Layanan Perlindungan dan Pengawasan Usaha Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.01.01.00	Data Sistem Informasi Industri		Terbatas	Tahunan	Perencanaan Pembangunan Industri	Layanan Sistem Informasi Industri Daerah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.01.02.00	Data Teknologi dan Inovasi Industri		Terbatas	Tahunan	Perencanaan Pembangunan Industri	Layanan Peningkatan	RAD.02 INFORMASI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.02 PENGUATAN IMPLEMENTASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
						Teknologi dan Inovasi Industri	EKONOMI DAN INDUSTRI		MAKING INDONESIA 4.0	Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.01.03.00	Data Sertifikasi Produk Industri		Terbatas	Tahunan	Perencanaan Pembangunan Industri	Layanan Sertifikasi dan Standarisasi Produk Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.03 PENINGKATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BARANG DAN JASA SERTA INDUSTRI HALAL DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.01.04.00	Data Promosi Produk Industri		Terbuka	Bulanan	Perencanaan Pembangunan Industri	Layanan Promosi dan Pemasaran Produk Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.04 PERLUASAN PENGUASAAN PASAR INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.01.05.00	Data Industri Kecil dan Menengah (IKM)		Terbatas	Tahunan	Perencanaan Pembangunan Industri	Layanan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.05 PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 02.01.05.00	Data Wirausaha Industri Baru		Terbatas	Tahunan	Perencanaan Pembangunan Industri	Layanan Pengembangan Wirausaha Industri Baru	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.05 PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.01.06.00	Data Sentra dan Kawasan Industri		Terbuka	Tahunan	Perencanaan Pembangunan Industri	Layanan Pengembangan Sentra Industri dan Kawasan Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.06 PEMERATAAN PERSEBARAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.02.01.00	Data Informasi Pedagang		Tertutup	Bulanan	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Pendataan Pedagang Pasar	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan
KP-DAD 02.02.01.00	Data Izin Dasaran Kios/Los/Bango		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Perizinan Penggunaan Kios/Los/Bango	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 02.02.01.00	Data Pantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Pasar Daerah	SIKEPOKU	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Informasi Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan
KP-DAD 02.02.01.00	Data Pantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Pasar Nasional	SP2KP	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Nasional	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan
KP-DAD 02.02.01.00	Data Pembayaran Retribusi		Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pembayaran Retribusi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan
KP-DAD 02.02.01.00	Data Penerbitan Perizinan (Surat Rekomendasi) Pusat Perbelanjaan	OSS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Rekomendasi Pendirian Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan Waralaba	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 02.02.01.00	Data Penerbitan Perizinan (Surat Rekomendasi) Toko Swalayan Waralaba	OSS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Rekomendasi Pendirian Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan Waralaba	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan
KP-DAD 02.02.01.00	Data Sarana Perdagangan	SISP	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Sistem Informasi Sarana Perdagangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan
KP-DAD 02.02.03.00	Data Tera/Tera Ulang UTTP	UML	Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Metrologi Legal	Layanan Tera/Tera Ulang	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Dinas Perdagangan
KP-DAD 02.02.03.00	Data Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol	OSS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Pemberian Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Dinas Perdagangan
KP-DAD 02.02.06.00	Data Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)	OSS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Rekomendasi	RAD.02 INFORMASI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.06 OPTIMALISASI	Dinas Perdagangan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
						Tanda Daftar Gudang (TDG)	EKONOMI DAN INDUSTRI		PERANAN PBK, SRG, DAN PLK	
KP-DAD 02.02.06.00	Data Penerbitan Perizinan Usaha (Surat Hasil Verifikasi)	OSS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.06 OPTIMALISASI PERANAN PBK, SRG, DAN PLK	Dinas Perdagangan
KP-DAD 02.03.08.00	Data Kelembagaan Petani	TaniKu	Terbuka	Realtime	Penyuluhan Pertanian	Layanan Informasi Kelembagaan Petani	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAD 02.03.11.00	Data Kios Sarana Produksi Pertanian	TaniKu	Terbuka	Realtime	Pengembangan Prasarana Pertanian	Layanan Informasi Kios Sarana Produksi Pertanian	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.11 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Pertanian dan Pangan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 02.03.13.00	Data Luasan dan Lokasi Lahan Cetak Sawah Baru	TaniKu	Terbatas	Realtime	Pembangunan Prasarana Pertanian	Layanan Cetak Sawah Baru	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAD 02.03.13.00	Data Luasan dan Lokasi Lahan Surjan		Terbatas	Realtime	Pembangunan Prasarana Pertanian	Layanan Lokasi Lahan Surjan Pertanian	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAD 02.03.16.00	Data Keterangan Beli BBM	TaniKu, BPH Xstar Migas	Terbatas	Realtime	Pengembangan Prasarana Pertanian	Layanan Rekomendasi BBM	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAD 02.03.20.00	Data Harga Pasar Komoditas Pertanian	TaniKu	Terbuka	Realtime	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Layanan Informasi Harga Komoditas Pertanian	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAD 02.05.04.00	Data Penyembelihan Hewan Qurban	TaniKu	Terbuka	Tahunan	Penjaminan Kesehatan Hewan	Layanan Pemotongan Hewan Qurban	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAD 02.05.04.00	Data Rekomendasi Hewan Qurban		Terbuka	Realtime	Penjaminan Kesehatan Hewan	Layanan Pemotongan Hewan Qurban	RAD.02 INFORMASI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN	Dinas Pertanian dan Pangan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							EKONOMI DAN INDUSTRI		KESEHATAN HEWAN	
KP-DAD 02.05.04.00	Data Kesehatan Hewan Ternak	TaniKu	Terbuka	Bulanan	Penjaminan Kesehatan Hewan	Layanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAD 02.05.04.00	Data Keterangan Praktek Dokter Hewan		Terbuka	Realtime	Penjaminan Kesehatan Hewan	Layanan Rekomendasi Ijin Praktek Dokter Hewan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAD 02.05.04.00	Data Lokasi Penyembelihan Hewan Qurban	TaniKu	Terbuka	Tahunan	Penjaminan Kesehatan Hewan	Layanan Pemotongan Hewan Qurban	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAD 02.06.02.00	Data Uji Kualitas Air		Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Layanan Uji Kualitas Air Perikanan Budidaya	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAD 02.06.03.00	Data Identitas dan Aktivitas Nelayan dan Pembudidaya	IKANKU	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Layanan Pendataan Nelayan dan Pembudidaya	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING	Dinas Kelautan dan Perikanan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
									PRODUK PERIKANAN	
KP-DAD 02.06.03.00	Data Penerima dan Distribusi Bantuan Sarpras Perikanan		Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Layanan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAD 02.06.03.00	Data Produksi Ikan Tangkap dan Budidaya		Terbuka	Bulanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Layanan Pelaporan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAD 02.06.03.00	Data Harga Pasar dan Saluran Distribusi Produk Perikanan	SETITI	Terbuka	Realtime	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Layanan Informasi Harga Ikan dan Pemasaran Produk Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAD 02.06.03.00	Data Alumni dan Program Pendidikan Kelautan dan Perikanan		Terbatas	Tahunan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 02.06.03.00	Data Penjualan Benih Ikan Gurami		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Layanan Penjualan Benih Ikan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAD 02.06.03.00	Data Register Kelompok Usaha Perikanan		Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Layanan Registrasi Kelompok Usaha Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAD 02.06.04.00	Data Hasil Pengawasan dan Pelanggaran di Wilayah Kelautan		Terbatas	Bulanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAD 02.06.04.00	Data Pendapatan Retribusi Bibit/Benih Ikan		Terbatas	Realtime	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Layanan Penerimaan Pendapatan Retribusi Bibit/Benih Ikan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAD 02.06.04.00	Data Pendapatan Retribusi TPI		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Tempat	Layanan Penerimaan	RAD.02 INFORMASI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN	Dinas Kelautan dan Perikanan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Pelelangan Ikan (TPI)	Pendapatan Retribusi TPI	EKONOMI DAN INDUSTRI		SUMBER DAYA PERIKANAN	
KP-DAD 02.06.04.00	Data Rekomendasi Kelayakan Pengolahan Ikan		Terbatas	Realtime	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Layanan Rekomendasi Kelayakan Pengolahan Ikan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAD 02.06.04.00	Data Surat Rekomendasi Pembelian BBM	IKANKU, BPH Xstar Migas	Terbatas	Realtime	Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Layanan Permohonan Rekomendasi Pembelian BBM	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAD 02.08.03.00	Data Peta Potensi Investasi		Terbatas	Realtime	Pembuatan Peta Potensi Investasi	Layanan Peta Potensi Investasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAD 02.08.06.00	Data Perizinan Berusaha	OSS	Terbatas	Realtime	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Elektronik	Layanan Perizinan Berusaha	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 02.08.06.00	Data Perizinan Non Berusaha	SICANTIK	Terbatas	Realtime	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Elektronik	Layanan Perizinan Non Berusaha	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAD 02.08.06.00	Data Tanda Bukti PBG	SIMBG	Terbatas	Realtime	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Elektronik	Layanan Perizinan PBG	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAD 02.08.06.00	Data Tanda Bukti RTB	SIMBG	Terbatas	Realtime	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Elektronik	Layanan Perizinan PBG	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAD 02.08.06.00	Data Tanda Bukti SBKBG	SIMBG	Terbatas	Realtime	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Elektronik	Layanan Perizinan PBG	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAD 02.08.06.00	Data Tanda Bukti SLF	SIMBG	Terbatas	Realtime	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Elektronik	Layanan Perizinan PBG	RAD.02 INFORMASI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							EKONOMI DAN INDUSTRI		BERUSAHA BERBASIS RISIKO	
KP-DAD 02.09.01.00	Data Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Pengawasan Koperasi	Terbatas	Realtime	Pengawasan Koperasi	Layanan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.09.03.00	Data Sosialisasi Pendirian Koperasi	AHU	Terbatas	Realtime	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Layanan Sosialisasi Pendirian Koperasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.09.04.00	Data Izin Usaha Simpan Pinjam KSP/USP	OSS	Terbatas	Realtime	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Layanan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.09.04.00	Data Draft AD/PAD	AHU	Terbatas	Realtime	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Layanan Fasilitasi Pencermatan dan Perubahan Anggaran Dasar	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 02.09.04.00	Data Keuangan Koperasi		Terbatas	Realtime	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Layanan Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.09.04.00	Data Koperasi	ODS	Terbatas	Realtime	Pengawasan Koperasi	Layanan ODS	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.09.04.00	Data Laporan Keuangan Triwulan KSP/USP		Terbatas	Tiga Bulanan	Pengawasan Koperasi	Layanan Pelaporan Keuangan Triwulan KSP/USP	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.10.02.00	Data UMKM	SIBAKUL, PAY ON PRO, SIDT	Terbatas	Realtime	Pengembangan Usaha Mikro	Layanan Promosi Produk UMKM	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAD.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.10.02.00	Data UMKM Legalitas Usaha	OSS	Terbatas	Realtime	Pengembangan Usaha Mikro	Layanan Fasilitasi Pendaftaran NIB	RAD.02 INFORMASI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAD.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas Perindustrian Koperasi dan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							EKONOMI DAN INDUSTRI			Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.10.03.00	Data UMKM Legalitas Halal	SIHALAL	Terbatas	Realtime	Pengembangan Usaha Mikro	Layanan Fasilitasi Pendaftaran Halal	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAD.02.10.03 KEWIRAUSAHAAN	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.10.03.00	Data UMKM HKI	DJKI	Terbatas	Realtime	Pengembangan Usaha Mikro	Layanan Fasilitasi Pendaftaran HKI	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAD.02.10.03 KEWIRAUSAHAAN	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAD 02.11.02.00	Data Calendar Of Event (COE)	Sambanggo	Terbuka	Bulanan	Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Layanan Informasi Kepariwisataan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
KP-DAD 02.11.02.00	Data Desa Wisata	Sambanggo	Terbuka	Bulanan	Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Layanan Informasi Kepariwisataan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 02.11.02.00	Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Sambanggo	Terbuka	Bulanan	Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Layanan Informasi Kepariwisataan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
KP-DAD 02.11.02.00	Data Kunjungan Wisatawan	Sambanggo	Terbuka	Bulanan	Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Layanan Informasi Kepariwisataan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
KP-DAD 02.11.02.00	Data Objek Wisata	Sambanggo	Terbuka	Bulanan	Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Layanan Informasi Kepariwisataan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
KP-DAD 02.11.02.00	Data Pelaku Wisata	Sambanggo	Terbuka	Bulanan	Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Layanan Informasi Kepariwisataan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
KP-DAD 02.11.02.00	Data Usaha Jasa Pariwisata	Sambanggo	Terbuka	Bulanan	Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Layanan Informasi Kepariwisataan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
KP-DAD 02.11.06.00	Data Izin Penggunaan Tempat		Terbuka	Bulanan	Peningkatan Kapasitas SDM	Layanan Izin Penggunaan Tempat	RAD.02 INFORMASI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.06 KEBIJAKAN	Dinas Pariwisata

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		EKONOMI DAN INDUSTRI		STRATEGIS PARIWISATA	
KP-DAD 03.01.01.00	Data Aset Irigasi	e-PAKSI	Tertutup	Tahunan	Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	Layanan Informasi Irigasi	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.01.01.00	Data Indeks Kinerja Sistem Irigasi	e-PAKSI	Tertutup	Tahunan	Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	Layanan Informasi Irigasi	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.01.01.00	Data Jaringan Perpipaan SPAM Perumda Air Minum	Prohamsan	Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Layanan Informasi SPAM (Air Minum)	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.01.01.00	Data Pemanfaatan Bagian Jalan Kabupaten		Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Jalan	Layanan Pemanfaatan Bagian Jalan Kabupaten	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 03.01.01.00	Data SPAM Perdesaan	Prohamsan	Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Layanan Informasi SPAM (Air Minum)	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.01.01.00	Data Pekerjaan Pembangunan Sambungan Rumah (SR)	Prohamsan	Tertutup	Realtime	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Layanan Informasi SPAM (Air Minum)	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.01.03.00	Data Dokumen Progres Konstruksi	JAKONKU	Terbatas	Bulanan	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Layanan Informasi Pekerjaan Konstruksi	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.01.05.00	Data Jenis Pengujian Laboratorium Konstruksi		Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Layanan Pengujian Laboratorium Konstruksi	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 03.01.05.00	Data Pemohon Penyedotan Lumpur Tinja		Tertutup	Realtime	Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	Layanan Penyedotan Lumpur Tinja	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.01.05.00	Data Penyedotan Lumpur Tinja		Tertutup	Realtime	Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	Layanan Penyedotan Lumpur Tinja	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.01.05.00	Data Sewa Alat Berat		Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Layanan Penyewaan Alat Berat	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.02.03.00	Data Pendaftaran Transmigran	SIBARDUK TRANS	Terbatas	Realtime	Penataan Persebaran Penduduk	Layanan Pendaftaran Transmigran	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.02 DATA TRANSMIGRASI	RAD.03.02.03 FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI	Dinas Tenaga Kerja

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
									KAWASAN TRANSMIGRASI	
KP-DAD 03.03.01.00	Data Berkas Izin Insidentil		Terbatas	Realtime	Penyediaan Angkutan Umum	Layanan Izin Angkutan Umum Insidentil	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAD 03.03.01.00	Data Izin Pengelolaan Parkir		Terbatas	Realtime	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Layanan Rekomendasi Parkir	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAD 03.03.01.00	Data Izin Pengelolaan Parkir Insidentil		Terbatas	Realtime	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Layanan Perizinan Parkir Insidentil	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAD 03.03.01.00	Data Izin Trayek		Terbatas	Realtime	Penyediaan Angkutan Umum	Layanan Rekomendasi Perizinan Angkutan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAD 03.03.02.00	Data Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Terbatas	Bulanan	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Layanan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN	Dinas Perhubungan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
									DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	
KP-DAD 03.03.02.00	Data Rekayasa Lalu Lintas		Terbatas	Bulanan	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Layanan Rekayasa Lalu Lintas	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAD 03.03.02.00	Data Pengawasan Perlintasan		Terbatas	Bulanan	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Layanan Pengawasan Perlintasan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAD 03.03.02.00	Data Keselamatan dan Pengawasan Transportasi		Terbatas	Bulanan	Persetujuan Andalalin	Layanan Keselamatan dan Pengawasan Transportasi	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAD 03.03.02.00	Data Sosialisasi dan Edukasi Keselamatan Transportasi		Terbuka	Tahunan	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Layanan Sosialisasi dan Edukasi Keselamatan Transportasi	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 03.03.02.00	Data Pengawasan Rekomendasi Andalalin		Terbatas	Bulanan	Persetujuan Andalalin	Layanan Pengawasan Rekomendasi Andalalin	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAD 03.03.02.00	Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji	PKB	Terbatas	Realtime	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Layanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAD 03.03.02.00	Data Sertifikat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	e-RFID	Terbatas	Realtime	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Layanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAD 03.03.03.00	Data Pengelolaan Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan		Terbuka	Tahunan	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Layanan Pengelolaan Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAD 03.03.03.00	Data Pengelolaan Terminal Tipe C		Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Layanan Pengelolaan Terminal Tipe C	RAD.03 INFORMASI	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN	Dinas Perhubungan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		PRASARANA TRANSPORTASI	
KP-DAD 03.03.04.00	Data BIS Sekolah		Terbuka	Tahunan	Penyediaan Angkutan Umum	Layanan BIS Sekolah	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAD 03.03.04.00	Data Retribusi Pengelolaan Parkir	e-Retribusi	Terbatas	Realtime	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Layanan Pembayaran Parkir Online	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAD 03.04.01.00	Data Pengajuan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	SIMBG	Terbuka	Tahunan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Layanan Pengajuan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.04.01.00	Data Kerusakan Bangunan Gedung		Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Layanan Informasi Bangunan Gedung	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 03.04.01.00	Data Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	SIMBG	Terbuka	Tahunan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Layanan Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.04.01.00	Data Riwayat Perbaikan Bangunan Gedung		Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Layanan Informasi Bangunan Gedung	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.04.04.00	Data Calon Penerima Bantuan Rumah Tangga Layak Huni		Terbuka	Bulanan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Bantuan Rumah Tangga Layak Huni	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Bagian Kesejahteraan Rakyat
KP-DAD 03.04.04.00	Data Jumlah Unit Terhuni		Terbuka	Realtime	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Layanan Penyewaan Unit Rusun	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.04.04.00	Data Kondisi Unit Hunian		Terbuka	Realtime	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Layanan Penyewaan Unit Rusun	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.04.04.00	Data Site Plan Perumahan		Terbatas	Bulanan	Peningkatan Kawasan	Layanan Pengesahan Site Plan Perumahan	RAD.03 INFORMASI	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Permukiman Kumuh		PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN			dan Kawasan Permukiman
KP-DAD 03.05.04.00	Data Akuntabilitas Kelurahan	SIPENTAS JAWARAKU	Terbatas	Realtime	Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Pelaksanaan Akuntabilitas dan Kinerja Kelurahan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAD 03.05.05.00	Data Aparatur Desa	SIAPDES	Terbuka	Realtime	Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Informasi Perangkat Desa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.05 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 03.05.07.00	Data Keuangan Desa	SIKUDESKU	Terbatas	Realtime	Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan Tata Kelola Keuangan Desa	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAD 03.06.01.00	Data Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail	SIMTARUKU	Terbuka	Tahunan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Layanan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW dan RDTR)	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAD 03.06.01.00	Data Pemanfaatan Ruang	SIMTARUKU	Terbatas	Tahunan	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Layanan Penetapan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAD 03.06.01.00	Data KKPR dan Rekomendasi Tata Ruang	SIMTARUKU	Terbatas	Tahunan	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Layanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
						Pemanfaatan Ruang (KKPR)				
KP-DAD 03.06.01.00	Data Penilaian Kesesuaian Tata Ruang	SIMTARUKU	Terbatas	Tahunan	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Layanan Penilaian Kesesuaian Tata Ruang dalam Perizinan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAD 03.06.01.00	Data Pelanggaran dan Pengawasan Tata Ruang	SIMTARUKU	Terbatas	Bulanan	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Layanan Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAD 03.06.01.00	Data Peta Tata Ruang Digital	SIMTARUKU	Terbuka	Tahunan	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Layanan Penyusunan dan Pemutakhiran Peta Rencana Tata Ruang	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAD 03.06.01.00	Data Database Pertanahan dan Tata Ruang	SIMTARUKU	Terbatas	Tahunan	Penggunaan Tanah	Layanan Penyusunan Database Pertanahan dan Tata Ruang Daerah	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 03.06.01.00	Data Pemanfaatan Tanah		Tertutup	Tahunan	Penggunaan Tanah	Layanan Izin Pemanfaatan Ruang Non-Berusaha	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAD 03.06.01.00	Data Tata Ruang		Terbuka	Tahunan	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Layanan Izin Keterangan Rencana Kabupaten	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAD 03.06.02.00	Data Informasi Geospasial	SIMTARUKU	Terbuka	Tahunan	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Layanan Pengelolaan dan Penyajian Informasi Geospasial	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.02 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAD 03.06.05.00	Data Pengadaan Tanah		Terbatas	Realtime	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Layanan Pembebasan dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 03.06.05.00	Data Penilaian Ganti Rugi Tanah		Terbatas	Realtime	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Layanan Penilaian dan Penghitungan Nilai Ganti Rugi Tanah	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAD 03.06.05.00	Data Rencana Pengadaan Tanah		Terbatas	Tahunan	Penggunaan Tanah	Layanan Penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan Tanah (RPT)	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAD 03.06.08.00	Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah		Terbatas	Tahunan	Penggunaan Tanah	Layanan Pendataan dan Inventarisasi Penguasaan dan Pemilikan Tanah	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAD 03.06.08.00	Data Izin Pemanfaatan Ruang Non-Berusaha	SIMTARUKU	Terbatas	Realtime	Pemanfaatan Ruang	Layanan Informasi Pemanfaatan Tanah	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 03.06.09.00	Data Konflik Pertanahan dan Sengketa Ruang		Terbatas	Realtime	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Layanan Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Sengketa Ruang	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.09 PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAD 03.07.01.00	Data Informasi Keluarga	SIGA	Terbuka	Realtime	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Layanan Informasi Keluarga	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAD 03.07.02.00	Data Alat dan Obat Kontrasepsi	SIRIKA	Terbatas	Realtime	Pendistribusian Kebutuhan Alokon	Layanan Permohonan Alkon	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 03.07.02.00	Data Kepesertaan KB (Keluarga Berencana)	SIRIKA	Terbuka	Realtime	Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Layanan Kepesertaan KB (Keluarga Berencana)	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAD 03.07.03.00	Data Pusat Pembelajaran Keluarga		Terbuka	Tahunan	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.01.01.00	Data Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	RENBUT	Terbatas	Tahunan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK	Layanan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.01.00	Data Pengelolaan SDM Kesehatan	SISDMK	Terbatas	Tahunan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan	Layanan Pengelolaan SDM Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Kompetensi Teknis SDMK		SOSIAL DAN KESEHATAN		SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
KP-DAD 04.01.01.00	Data Sertifikat Izin Praktek	SICANTIK	Terbatas	Realtime	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Layanan SIP NAKES	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.01.00	Data Surat izin Penyehat Tradisional	SICANTIK	Terbatas	Realtime	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Layanan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.02.00	Data Obat	SimoKu	Terbatas	Realtime	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	Layanan Kefarmasian	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Tradisional (UMOT)					
KP-DAD 04.01.03.00	Data Ketersediaan dan Distribusi Obat dan Alat Kesehatan	SimoKu, SMILE	Terbatas	Bulanan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Pengadaan dan Distribusi Obat dan Alkes	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.03.00	Data Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan	ASPAK, CAKRA BASKARA, PULANGGENI	Tertutup	Realtime	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Pengelolaan Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAD 04.01.03.00	Data Pendaftaran Online	SIP NAS	Terbuka	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Pendaftaran Online	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAD 04.01.03.00	Data Pengelola Alat Kesehatan	SIM RSUD Wates	Terbatas	Bulanan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Pengelola Alat Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	RSUD Wates

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.01.04.00	Data Perizinan Sarana Kesehatan	OSS	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Perizinan Fasilitas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.04.00	Data Peserta dan Cakupan Jaminan Kesehatan	SI DABU	Terbatas	Bulanan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Pengelolaan Jaminan Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.04.00	Data Profil Kesehatan Daerah		Terbatas	Tahunan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.04.00	Data Kesehatan Jemaah Haji	SISKOHATKES	Terbatas	Tahunan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pengelolaan Kesehatan Jemaah Haji	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.04.00	Data Sarpras Kesehatan	ASPAK	Terbuka	Tahunan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan	Layanan Sarana Prasarana Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Kesehatan UKM dan UKP		SOSIAL DAN KESEHATAN		PELAYANAN KESEHATAN	
KP-DAD 04.01.04.00	Data Gizi	SKDR	Terbatas	Tiga Bulanan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.04.00	Data Akreditasi Fasyankes	DFO	Terbatas	Tahunan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Akreditasi Fasyankes	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.04.00	Data Maternal Perinatal	MPDN	Terbatas	Bulanan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Maternal Perinatal	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.04.00	Data Hasil Lab Kesehatan		Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pelayanan UPT Lab Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.01.04.00	Data Izin Penelitian Dinas Kesehatan		Terbatas	Realtime	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Izin Penelitian Lingkungan Dinas Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.04.00	Data Rujukan Pelayanan Kesehatan	SISRUTE	Terbatas	Harian	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Rujukan Tingkat Lanjutan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.04.00	Data Jadwal Operasi	SIMRS	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Jadwal Operasi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAD 04.01.04.00	Data Jadwal Poliklinik	SIMRS	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Jadwal Poliklinik	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAD 04.01.04.00	Data Pelayanan Pendidikan dan Penelitian	SIPANDU	Terbatas	Realtime	Penyediaan Fasilitas Pelayanan	Layanan Lahan Praktek Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN	RSUD Nyi Ageng Serang

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Kesehatan UKM dan UKP		SOSIAL DAN KESEHATAN		PELAYANAN KESEHATAN	
KP-DAD 04.01.04.00	Data Pengelolaan Pelayanan Pasien	SIMRS, ASPAK	Tertutup	Realtime	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Supervisi Pelayanan Keperawatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAD 04.01.04.00	Data Permasalahan Insiden		Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pelaporan Insiden	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAD 04.01.04.00	Data Rujukan Pasien	SISRUTE	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Rujukan Pasien	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAD 04.01.04.00	Data TB RO	SIMRS	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pantauan TB RO (Resistant Obat)	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.01.04.00	Data Tim HIV	SIMRS	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Tim HIV	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAD 04.01.04.00	Data Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	SIMPEL LHK	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAD 04.01.04.00	Data Survei Kepuasan	PULANGGENI	Terbuka	Realtime	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Survei Kepuasan Pelanggan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAD 04.01.04.00	Data ERM	SIMRS	Tertutup	Realtime	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Manajemen Rumah Sakit (ERM)	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAD 04.01.04.00	Data Indikator Nasional Mutu		Terbatas	Realtime	Penyediaan Fasilitas Pelayanan	Layanan Pelaporan Indikator Nasional Mutu	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN	RSUD Nyi Ageng Serang

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Kesehatan UKM dan UKP		SOSIAL DAN KESEHATAN		PELAYANAN KESEHATAN	
KP-DAD 04.01.04.00	Data Klaim BPJS	e-KLAIM	Tertutup	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Penjaminan/Unit Klaim BPJS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Pendaftaran Pasien Online	SIMPONIKU, SIM RSUD Wates	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Pendaftaran Pasien Online RSUD Wates	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Kepuasan Pelanggan	SIPUAS	Terbuka	Realtime	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Kepuasan Pelanggan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Dokumen Laporan Indikator Mutu	SI IMUT	Terbatas	Realtime	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Indikator Mutu	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.01.04.00	Data Gawat Darurat	SIM RSUD Wates	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gawat Darurat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Rawat Jalan	SIM RSUD Wates	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Rawat Jalan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Rawat Inap	SIM RSUD Wates	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Rawat Inap	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Intensive Care	SIM RSUD Wates	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Intensive Care	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Bedah Sentral	SIM RSUD Wates	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan	Layanan Bedah Sentral	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN	RSUD Wates

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Kesehatan UKM dan UKP Rujukan		SOSIAL DAN KESEHATAN		PELAYANAN KESEHATAN	
KP-DAD 04.01.04.00	Data Penunjang Medik	SIM RSUD Wates	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Penunjang Medik	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Rehabilitasi Medik	SIM RSUD Wates	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Rehabilitasi Medik	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Hemodialisa		Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Hemodialisa	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Pemulasaraan Jenazah		Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pemulasaraan Jenazah	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.01.04.00	Data Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	SIM RSUD Wates	Terbatas	Bulanan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Sanitasi		Terbuka	Bulanan	Pengembangan UKBM	Layanan Sanitasi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Rekam Medis	SIM RSUD Wates	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Rekam Medis	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Teknologi Informasi Rumah Sakit	SIM RSUD Wates	Terbatas	Tahunan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Layanan Teknologi Informasi Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Pemasaran Rumah Sakit		Terbuka	Tahunan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan	Layanan Pemasaran Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN	RSUD Wates

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Kesehatan UKM dan UKP		SOSIAL DAN KESEHATAN		PELAYANAN KESEHATAN	
KP-DAD 04.01.04.00	Data Promosi Kesehatan Rumah Sakit		Terbuka	Tahunan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Unit Sterilisasi Sentral		Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Unit Sterilisasi Sentral	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Unit Laundry		Terbatas	Realtime	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Unit Laundry	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.04.00	Data Administrasi Kependudukan Bayi Baru Lahir	SIM RSUD Wates	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Administrasi Kependudukan Bayi Baru Lahir	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.01.05.00	Data Kasus Penyakit Tidak Menular (PTM)	SIPTM	Terbatas	Bulanan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.05.00	Data Kejadian Luar Biasa (KLB)		Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pelaporan dan Tindak Lanjut KLB	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.05.00	Data HIV AIDS	SIHA	Terbatas	Bulanan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan HIV AIDS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.05.00	Data TB	SITB	Terbatas	Bulanan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan TB	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.05.00	Data Penyakit Malaria	SISMAL	Terbatas	Bulanan	Penyediaan Layanan	Layanan Penyakit Malaria	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Kesehatan UKM dan UKP Rujukan		SOSIAL DAN KESEHATAN		PENGENDALIAN PENYAKIT	
KP-DAD 04.01.05.00	Data Pengelolaan Survelains Vektor	SILANTOR, e-STP	Terbatas	Bulanan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pengelolaan Survelains Vektor	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.05.00	Data Program Pengendalian Infeksi	PPI	Terbatas	Realtime	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Program Pengendalian Infeksi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	RSUD Wates
KP-DAD 04.01.06.00	Data Status Gizi Balita dan Ibu Hamil	SIGIZI Terpadu	Terbatas	Tiga Bulanan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Gizi Masyarakat dan Pencegahan Stunting	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.06.00	Data Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	SIM KIA	Terbatas	Bulanan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.01.06.00	Data Pelayanan Kesehatan Lansia dan Disabilitas	SIM KIA	Terbatas	Bulanan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Lansia dan Disabilitas	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.06.00	Data Materi Edukasi dan Statistik Kesehatan		Terbuka	Tahunan	Pengembangan UKBM	Layanan Informasi dan Edukasi Kesehatan Masyarakat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.06.00	Data Kesehatan Jiwa	SIMKESWA	Terbatas	Bulanan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pengelolaan Kesehatan Jiwa	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.06.00	Data Pelaporan Kesehatan Kerja Olahraga	SITKO	Terbatas	Tahunan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Pelaporan Kesehatan Kerja Olahraga	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.06.00	Data Cakupan Layanan Puskesmas	SIMPUS, SIMPEDU	Terbuka	Bulanan	Penyediaan Layanan	Layanan Kesehatan Dasar Puskesmas	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Kesehatan UKM dan UKP Rujukan		SOSIAL DAN KESEHATAN		KESEHATAN MASYARAKAT	
KP-DAD 04.01.06.00	Data Cakupan Imunisasi	SMILE, SIMUNDU	Terbuka	Bulanan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.07.00	Data Sosialisasi P4GN/Narkoba		Terbuka	Realtime	Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Layanan Sosialisasi P4GN/Narkoba	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAD 04.01.07.00	Data Kasus Gangguan Jiwa dan Napza		Tertutup	Bulanan	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Kesehatan Jiwa dan Napza	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.01.08.00	Data Monev Hygiene Sanitasi Pangan	e-Monev HSP	Terbatas	Tiga Bulanan	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market	Layanan Monitoring Evaluasi Hygiene Sanitasi Pangan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.08.00	Data Monev Tempat Fasilitas Umum	e-Monev TFU	Terbatas	Tiga Bulanan	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market	Layanan Monitoring Evaluasi Tempat Fasilitas Umum	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.08.00	Data Monev Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	e-Monev STBM	Terbatas	Tiga Bulanan	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market	Layanan Monitoring Evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.08.00	Data Penerbitan SPPIRT	SPIRT	Terbatas	Realtime	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Layanan Penerbitan SPPIRT	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
KP-DAD 04.01.08.00	Data Sertifikat Higiene Sanitasi Makanan	SLHS	Terbatas	Realtime	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah	Layanan Sertifikat Higiene Sanitasi Makanan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.08 PENGAWASAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Tangga dan Nomor P-IRT		SOSIAL DAN KESEHATAN		OBAT DAN MAKANAN	
KP-DAD 04.01.08.00	Data Pengelolaan Stok Obat	SIMOBAT	Terbatas	Realtime	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Pengelolaan Stok Obat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAD 04.02.01.00	Data Penyelesaian Aduan Masyarakat		Terbatas	Realtime	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Rujukan Terpadu Masyarakat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.01.00	Data Berita Acara Serah Terima Anak Terlantar		Tertutup	Realtime	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	Layanan Rekomendasi Penyerahan Anak Terlantar Panti	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.01.00	Data Berita Acara Serah Terima Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar		Terbatas	Realtime	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	"Layanan Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Orang Terlantar"	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.02.01.00	Data Surat Rekomendasi Adopsi Anak		Tertutup	Realtime	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	Layanan Rekomendasi Adopsi Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.01.00	Data Surat Rekomendasi Balai Rehabilitasi Anak Terlantar		Tertutup	Realtime	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	Layanan Rekomendasi Penyerahan Anak Terlantar Panti	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.01.00	Data Surat Rekomendasi Balai Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar		Terbatas	Realtime	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	"Layanan Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Orang Terlantar"	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.02.00	Data Jaminan Sosial Lanjut Usia		Terbatas	Tahunan	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar	Layanan Jaminan Sosial Lanjut Usia	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.02.02.00	Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN)	SIKS-NG, SI DABU	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Layanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN)	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.02.00	Data Surat Rekomendasi Penerima Bantuan Iuran APBD (Jamkesda)	SI DABU	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Layanan Usulan Penerima Bantuan PBI Pemda	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.02.00	Data Surat Rekomendasi Reaktivasi KIS PBI	SIKS-NG	Tertutup	Tahunan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Reaktivasi Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.03.00	Data Bantuan Pangan Non Tunai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (BPNT APBD)		Tertutup	Enam Bulanan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Bantuan Pangan Non Tunai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (BPNT APBD)	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.02.03.00	Data Penanganan Jenazah Terlantar	SuratKu	Tertutup	Realtime	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	Layanan Penanganan Jenazah Terlantar	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.03.00	Data Penerima Bantuan Kecelakaan Kerja Penderes	SuratKu	Tertutup	Realtime	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Bantuan Kecelakaan Kerja Penderes	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.03.00	Data Penerima Bantuan Sosial Permakanan Anak Balita Terlantar		Tertutup	Realtime	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	Layanan Bantuan Sosial Permakanan Anak Balita Terlantar	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.03.00	Data Penerima Bantuan Sosial Permakanan Klien Dampingan LKS		Tertutup	Tahunan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Layanan Bantuan Sosial Permakanan Klien Dampingan LKS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.02.03.00	Data Penerima Bantuan Sosial Psikotik		Tertutup	Tahunan	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Layanan Bantuan Sosial Psikotik	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.03.00	Data Surat Keabsahan Penerima Manfaat (SKPM)	Si Pemikat	Tertutup	Lainnya	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos)	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.04.00	Data Aduan Bantuan Sosial		Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Layanan Aduan Bansos/KKS/KIS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.04.00	Data Aduan Kartu Indonesia Sehat (KIS)		Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Layanan Aduan Bansos/KKS/KIS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.02.04.00	Data Aduan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)		Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Layanan Aduan Bansos/KKS/KIS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.04.00	Data Surat Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	SICANTIK	Terbatas	Realtime	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Layanan Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.04.00	Data Surat Rekomendasi Penolakan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	SICANTIK	Terbatas	Realtime	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Layanan Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.05.00	Data Terpadu Sosial Ekonomi Sosial (DTSEN)	SIKS-NG	Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Layanan Pengecekan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
									KESEJAHTERAAN SOSIAL	
KP-DAD 04.02.05.00	Data Surat Rekomendasi DTSEN Peserta Didik Baru	SIKS-NG	Terbatas	Tiga Tahunan	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Layanan Pengecekan DTSEN Penerimaan Peserta Didik Baru	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.06.00	Data Sosialisasi Kebencanaan Untuk Masyarakat		Terbuka	Tahunan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Layanan Sosialisasi Kebencanaan Untuk Masyarakat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAD 04.02.06.00	Data Sosialisasi dan Simulasi Bencana kebakaran		Terbuka	Tahunan	Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan Kebakaran	Layanan Sosialisasi dan Simulasi Bencana kebakaran	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAD 04.02.06.00	Data Evakuasi Korban Bencana		Terbatas	Realtime	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Layanan Evakuasi Korban Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							SOSIAL DAN KESEHATAN		PENANGGULANGAN BENCANA	
KP-DAD 04.02.06.00	Data Pemadaman Kebakaran		Terbuka	Realtime	Penanganan B3 Kebakaran	Layanan Pemadaman Kebakaran	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAD 04.02.06.00	Data Edukasi Dini Bahaya Kebakaran Kepada TK, Paud dan SD		Terbuka	Tahunan	Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan Kebakaran	"Layanan Edukasi Dini Bahaya Kebakaran Kepada TK, Paud dan SD"	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAD 04.02.06.00	Data Penanganan Kondisi Membahayakan Manusia		Terbatas	Realtime	Penanganan B3 Kebakaran	Layanan Penanganan Kondisi Membahayakan Manusia	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAD 04.02.06.00	Data Pembinaan Relawan Kebakaran		Terbuka	Enam Bulanan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Layanan Pembinaan Relawan Kebakaran	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.02.06.00	Data Peningkatan Kapasitas Aparatur Penanggulangan Bencana		Terbuka	Tahunan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Layanan Peningkatan Kapasitas Aparatur Penanggulangan Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAD 04.02.06.00	Data Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran		Terbuka	Tahunan	Penanganan B3 Kebakaran	Layanan Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAD 04.02.06.00	Data Kesiapsiagaan Bencana (Apel Siaga Relawan)		Terbuka	Tahunan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Layanan Kesiapsiagaan Bencana (Apel Siaga Relawan)	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAD 04.02.06.00	Data Estimasi Kerusakan		Terbatas	Tahunan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Layanan Rekomendasi Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.02.06.00	Data Kejadian Bencana	SIBELAKU	Terbuka	Tiga Bulanan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Layanan Informasi Kejadian Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAD 04.02.06.00	Data Korban Terdampak Bencana		Terbuka	Realtime	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Layanan Informasi Korban Terdampak Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAD 04.02.06.00	Data Lokasi Rawan Bencana		Terbuka	Realtime	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Layanan Informasi Rawan Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAD 04.02.06.00	Data Lokasi Terdampak Bencana		Terbatas	Tahunan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Layanan Rekomendasi Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAD 04.02.06.00	Data Pelatihan Mitigasi Bencana		Terbuka	Realtime	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Layanan Pelatihan Mitigasi Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							SOSIAL DAN KESEHATAN		PENANGGULANGAN BENCANA	
KP-DAD 04.02.06.00	Data Bantuan Korban Bencana		Terbatas	Realtime	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Layanan Penanganan Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.02.06.00	Data Korban Bencana		Terbatas	Realtime	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Layanan Penanganan Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.03.03.00	Data Penyedia Pemberdayaan Perempuan		Terbuka	Tahunan	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Layanan Penyedia Pemberdayaan Perempuan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.03.03.00	Data Surat Keterangan Hasil Konseling		Terbuka	Realtime	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Layanan Konseling Pemohon Dispensasi Kawin	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 04.03.05.00	Data Dokumen Laporan Hasil Pendampingan Korban Kekerasan	Simfoni PPA, SIGA KEMENPPPA, SIGA JOGJA PROV	Tertutup	Tahunan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Perempuan Korban Kekerasan	Layanan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAD 04.03.05.00	Data Surat Pengantar Permohonan Rujukan Lanjutan	Simfoni PPA, SIGA KEMENPPPA, SIGA JOGJA PROV	Tertutup	Tahunan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Perempuan Korban Kekerasan	Layanan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
									KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.	
KP-DAD 05.01.02.00	Data Monev Produk Hukum daerah		Terbatas	Tahunan	Fasilitasi Hukum	Layanan Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum daerah	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAD 05.01.02.00	Data Monev JDIH		Terbatas	Tahunan	Fasilitasi Hukum	Layanan Monitoring dan Evaluasi JDIH	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAD 05.01.02.00	Data Fasilitasi Keluarga Sadar Hukum		Terbatas	Tahunan	Fasilitasi Hukum	Layanan Fasilitasi Keluarga Sadar Hukum	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 05.01.02.00	Data Informasi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Kalurahan	JDIH, e-Monday, SID	Terbuka	Realtime	Fasilitasi Hukum	Layanan Produk Hukum Daerah	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAD 05.01.02.00	Data Konsultasi Perangkat Daerah		Terbatas	Realtime	Fasilitasi Hukum	Layanan Konsultasi Hukum Perangkat Daerah	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAD 05.01.02.00	Data MOU Perjanjian Kerjasama	sapaHAM	Terbatas	Realtime	Fasilitasi Hukum	Layanan Bantuan Hukum	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAD 05.01.02.00	Data Pembinaan Hukum	sapaHAM	Terbatas	Realtime	Fasilitasi Hukum	Layanan Bantuan Hukum	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAD 05.01.02.00	Data Penyelesaian Permasalahan Bantuan Hukum	sapaHAM	Terbatas	Realtime	Fasilitasi Hukum	Layanan Bantuan Hukum	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							UMUM DAN KESELAMATAN			
KP-DAD 05.01.02.00	Data Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemerintah Kalurahan	sapaHAM	Terbatas	Realtime	Fasilitasi Hukum	Layanan Bantuan Hukum	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAD 05.01.02.00	Data Penyelesaian Permasalahan Hukum Perangkat Daerah	sapaHAM	Terbatas	Realtime	Fasilitasi Hukum	Layanan Bantuan Hukum	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAD 05.01.02.00	Data Penyelesaian Permasalahan Penegakan Hukum	sapaHAM	Terbatas	Realtime	Fasilitasi Hukum	Layanan Bantuan Hukum	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAD 05.01.02.00	Data Penyelesaian Visum	sapaHAM	Terbatas	Realtime	Fasilitasi Hukum	Layanan Bantuan Hukum	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 05.01.02.00	Data Rencana Aksi Nasional (RanHAM)	sapaHAM	Terbatas	Realtime	Fasilitasi Hukum	Layanan Bantuan Hukum	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAD 05.01.02.00	Data Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD	JDIH DPRD	Terbuka	Realtime	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Sekretariat DPRD
KP-DAD 05.02.01.00	Data Organisasi Masyarakat (ORMAS)	BangsaKU	Terbuka	Realtime	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	"Layanan Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan Organisasi Masyarakat (ORMAS)"	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAD 05.02.01.00	Data Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik		Terbuka	Realtime	Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	Layanan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 05.02.01.00	Data Ketertiban Umum		Terbatas	Realtime	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Ketertiban Umum	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
KP-DAD 05.02.02.00	Data Pelanggaran Perda	SP4N-LAPOR	Terbatas	Realtime	Penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM	Satuan Polisi Pamong Praja
KP-DAD 05.02.02.00	Data Pengaduan Pelanggaran Perda	SP4N-LAPOR	Terbatas	Realtime	Penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM	Satuan Polisi Pamong Praja
KP-DAD 06.01.01.00	Data Guru	SIM PKB, SIMBAR, SIM TUN	Terbatas	Realtime	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Layanan Komunitas Guru	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAD 06.01.01.00	Data Guru Bersertifikat Pendidik	SIM PKB, SIMBAR, SIM TUN	Terbatas	Realtime	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Layanan Sertifikasi Guru	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 06.01.01.00	Data Komunitas Guru	SIM PKB, SIMBAR, SIM TUN	Terbatas	Realtime	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Layanan Komunitas Guru	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAD 06.01.02.00	Data Calon Peserta Didik PAUD, SD, SMP	SPMB	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAD 06.01.02.00	Data Izin Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 06.01.02.00	Data Pelaksanaan Pendidikan Karakter	SIM PendekarKu	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Pendidikan Karakter	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAD 06.01.02.00	Data Pendidik	DAPODIK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Data Pokok Pendidikan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAD 06.01.02.00	Data Pengesahan Dokumen Kurikulum SD, SMP		Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	"Layanan Pengesahan Dokumen Kurikulum SD, SMP"	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
									DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	
KP-DAD 06.01.02.00	Data Peserta Didik	DAPODIK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Data Pokok Pendidikan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAD 06.01.02.00	Data Peserta Didik Kurang Mampu	SIPINTAR	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAD 06.01.02.00	Data Profil Satuan Pendidikan	DAPODIK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Data Pokok Pendidikan	RAD.06 INFORMASI	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA		PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	
KP-DAD 06.01.02.00	Data Rekapitulasi Pengajuan Legalisir Ijazah		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Legalisir Ijazah	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAD 06.01.02.00	Data Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa	DAPODIK	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 06.01.02.00	Data Sarpras Pendidikan	DAPODIK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Data Pokok Pendidikan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAD 06.01.02.00	Data Satuan Kependidikan	Raport Pendidikan	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Rapor Pendidikan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAD 06.01.02.00	Data Tenaga Kependidikan	DAPODIK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Data Pokok Pendidikan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
									DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	
KP-DAD 06.01.05.00	Data Izin Pendirian Lembaga Pendidikan	DAPODIK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAD 06.01.05.00	Data Pelaporan Keuangan BOS	SIM ARKAS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan ARKAS Dana BOS	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAD 06.01.05.00	Data Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	DAPODIK	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 06.01.05.00	Data Penganggaran BOS	SIM ARKAS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan ARKAS Dana BOS	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAD 06.01.05.00	Data Perencanaan BOS	SIM ARKAS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan ARKAS Dana BOS	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAD 06.02.01.00	Data Pelatihan Kerja	SIAP KERJA	Terbuka	Realtime	Pengukuran Produktivitas	Layanan Pelatihan Kerja	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAD 06.02.01.00	Data Rekomendasi Izin Mendirikan LPKS/BLKK		Terbatas	Realtime	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Layanan Rekomendasi Izin Mendirikan Balai Latihan Kompetensi Kerja (BLKK)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Tenaga Kerja

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 06.02.02.00	Data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	SIAP KERJA	Terbatas	Realtime	Pelayanan antar Kerja	Layanan Rekomendasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAD 06.02.02.00	Data Pencari Kerja	SIAP KERJA	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Layanan Kartu Pencari Kerja	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAD 06.02.02.00	Data Penempatan Tenaga Kerja	SIAP KERJA	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Layanan Lowongan Kerja	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAD 06.02.03.00	Data Identifikasi Serikat Pekerja /		Terbatas	Realtime	Penyelesaian Perselisihan	Layanan Identifikasi Serikat	RAD.06 INFORMASI	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN	Dinas Tenaga Kerja

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
	Serikat Buruh (SP/SB)				Hubungan Industrial	Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)	PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA		HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	
KP-DAD 06.02.03.00	Data LKS Bipartit		Terbatas	Realtime	Pembentukan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Layanan Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAD 06.02.03.00	Data Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)		Terbatas	Realtime	Pengesahan PP dan PKB	Layanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAD 06.02.03.00	Data Peraturan Perusahaan	SISNAKER, SIAP KERJA	Terbatas	Realtime	Pengesahan PP dan PKB	Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN	Dinas Tenaga Kerja

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
									JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	
KP-DAD 06.02.03.00	Data Perjanjian Kerja Bersama	SISNAKER, SIAP KERJA	Terbatas	Realtime	Pengesahan PP dan PKB	Layanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAD 06.03.02.00	Data Klinik Inovasi Daerah		Terbuka	Tahunan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Layanan Klinik Inovasi Daerah	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAD.06.03.02 RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAD 06.03.02.00	Data Riset dan Teknologi Tepat Guna	Inovasi-ku	Terbatas	Realtime	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Layanan Kelitbangan Daerah	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAD.06.03.02 RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAD 06.03.02.00	Data Pengguna, Kapanewon, Perguruan Tinggi	Inovasi-ku	Tertutup	Harian	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Layanan Kelitbangan Daerah	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAD.06.03.02 RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 06.03.02.00	Data Rekom KKN	Inovasi-ku	Terbatas	Realtime	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Layanan Kelitbangan Daerah	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAD.06.03.02 RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAD 06.03.02.00	Data Rekomendasi Kerjasama	Inovasi-ku	Tertutup	Harian	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Layanan Kelitbangan Daerah	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAD.06.03.02 RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAD 06.04.01.00	Data Calon Ketua Osis	e-Pemilos	Terbuka	Realtime	Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Layanan Pemilihan Osis	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.04 DATA PEMUDA	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAD 06.04.01.00	Data Ketua Osis Terpilih	e-Pemilos	Terbuka	Realtime	Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Layanan Pemilihan Osis	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.04 DATA PEMUDA	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAD 06.04.01.00	Data Siswa Pemilih	e-Pemilos	Terbuka	Realtime	Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Layanan Pemilihan Osis	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.04 DATA PEMUDA	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAD 06.04.01.00	Data Pembentukan Calon Paskibraka	Paskibraka	Terbuka	Realtime	Pembinaan Ideologi Pancasila	Layanan Pembentukan Calon Paskibraka	RAD.06 INFORMASI	RAD.06.04 DATA PEMUDA	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					dan Karakter Kebangsaan		PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA			
KP-DAD 07.05.01.00	Data Dokumen Laporan UKL-UPL	e-LingKu	Terbatas	Bulanan	Pengawasan Usaha, Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Layanan Pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAD 07.05.01.00	Data Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup	AMDALNET	Terbatas	Realtime	Pengawasan Usaha, Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Layanan Penerbitan Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAD 07.05.01.00	Data Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah/Emisi dan Standar Layak Operasi	AMDALNET	Terbatas	Realtime	Pengawasan Usaha, Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Layanan Persetujuan Teknis dan Standar Layak Operasi	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAD 07.05.01.00	Data Instalasi Pemanenan Air Hujan		Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Layanan Instalasi Pemanenan Air Hujan	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							SUMBER DAYA ALAM		HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	
KP-DAD 07.05.01.00	Data Uji Kelayakan Air		Terbatas	Bulanan	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Layanan Uji Kelayakan Air	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAD 07.05.01.00	Data Uji Kelayakan Tanah		Terbatas	Bulanan	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Layanan Uji Kelayakan Tanah	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAD 07.05.01.00	Data Uji Kelayakan Udara		Terbatas	Bulanan	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Layanan Uji Kelayakan Udara	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAD 07.05.02.00	Data Keanekaragaman Hayati		Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Layanan Keanekaragaman Hayati	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 07.05.02.00	Data Reboisasi		Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Layanan Reboisasi	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAD 07.05.04.00	Data Informasi Bank Sampah	SIKOMPAS	Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Sampah	Layanan Informasi Bank Sampah	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAD 07.05.04.00	Data Timbulan Sampah	SIKOMPAS	Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Sampah	Layanan Informasi Bank Sampah	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAD 07.05.04.00	Data Pengelolaan Sampah	SIKOMPAS	Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Sampah	Layanan Pengelolaan Sampah	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAD 08.01.01.00	Data Fasilitasi MTQ/STQ		Terbuka	Tahunan	Pelaksanaan Kebijakan	Layanan Fasilitasi MTQ/STQ	RAD.08 INFORMASI	RAD.08.01 DATA AGAMA	RAD.08.01.01 PEMAHAMAN DAN	Bagian Kesejahteraan Rakyat

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Kesejahteraan Rakyat		BUDAYA DAN AGAMA		LAYANAN KEAGAMAAN	
KP-DAD 08.01.02.00	Data Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah	FKUB	Terbuka	Realtime	Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Layanan Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.01 DATA AGAMA	RAD.08.01.02 PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAD 08.01.02.00	Data Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama		Terbuka	Realtime	Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Layanan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.01 DATA AGAMA	RAD.08.01.02 PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAD 08.01.02.00	Data Penerima Bantuan Rumah Ibadah		Terbuka	Tahunan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Bantuan Rumah Ibadah	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.01 DATA AGAMA	RAD.08.01.02 PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	Bagian Kesejahteraan Rakyat
KP-DAD 08.01.08.00	Data Fasilitasi Hari Santri		Terbuka	Tahunan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Fasilitasi Hari Santri	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.01 DATA AGAMA	RAD.08.01.08 PENINGKATAN MUTU PESANTREN	Bagian Kesejahteraan Rakyat
KP-DAD 08.01.09.00	Data Fasilitasi Haji		Terbatas	Tahunan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Fasilitasi Haji	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.01 DATA AGAMA	RAD.08.01.09 PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARA	Bagian Kesejahteraan Rakyat

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
									AN HAJI DAN UMRAH	
KP-DAD 08.02.01.00	Data Akte Kelompok Kesenian		Terbuka	Realtime	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Layanan Akte Kelompok Kesenian	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAD 08.02.01.00	Data Peminjaman Taman Budaya		Terbuka	Realtime	Pengelolaan Taman Budaya	Layanan Pengelolaan Taman Budaya Kulon Progo	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAD 08.02.01.00	Data Permohonan Fasilitasi		Terbuka	Realtime	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Layanan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kesenian	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAD 08.02.01.00	Data Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Benda dan Takbenda		Terbuka	Tahunan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Layanan Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Benda dan Takbenda	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 08.02.01.00	Data Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Kebudayaan		Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Kebudayaan	Layanan Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Kebudayaan	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAD 08.02.01.00	Data Pokok Kebudayaan Daerah	BUDAYAKU	Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Kebudayaan	Layanan Pengelolaan Data Pokok Kebudayaan Daerah	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAD 08.02.01.00	Data Edukasi Kebudayaan		Terbuka	Tahunan	Pengelolaan Kebudayaan	Layanan Edukasi Kebudayaan	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAD 08.02.02.00	Data Pelestarian Bahasa Daerah dan Sastra Tradisional		Terbuka	Tahunan	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Layanan Pelestarian Bahasa Daerah dan Sastra Tradisional	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.02 PENGELOLAAN PROGRAM KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAD 08.02.06.00	Data Mimpi Kurcaci		Terbuka	Tahunan	Pembudayaan Gemar Membaca	Layanan Minggu Pagi Kulonprogo Bercerita Membaca dan Mewarnai (MIMPI KURCACI)	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 08.02.06.00	Data Paket Pinjam Buku (PAPIKU)		Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Bahan Pustaka	Layanan Paket Pinjam Buku (PAPIKU)	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAD 08.02.06.00	Data Jemput Bola Tunanetra		Terbatas	Bulanan	Pengembangan Layanan Perpustakaan	Layanan Jemput Bola Tunanetra	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAD 08.02.06.00	Data Pengunjung PELITAKU		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Layanan Pendidikan Literasi Anak Usia Dini (PELITAKU)	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAD 08.02.06.00	Data Pengunjung Perpustakaan Keliling		Terbatas	Realtime	Pembinaan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan Keliling	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAD 08.02.06.00	Data Pengunjung POCADI		Terbatas	Realtime	Pembudayaan Gemar Membaca	Layanan Pojok Baca DIgital (POCADI)	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAD 08.02.06.00	Data Pengunjung Wisata Buku		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Bahan Pustaka	Layanan Wisata Buku	RAD.08 INFORMASI	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.06 PENINGKATAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							BUDAYA DAN AGAMA		KUALITAS PERPUSTAKAAN	
KP-DAD 08.02.06.00	Data Sirkulasi Perpustakaan	INLISLite	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAD 08.02.06.00	Data Sirkulasi Perpustakaan Digital	iKulonprogo	Terbatas	Realtime	Pembinaan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan Digital	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAD 09.01.01.00	Data Organisasi Politik (ORPOL)	BangsaKU	Terbuka	Realtime	Pembinaan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	Layanan Pendataan Organisasi Politik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAD 09.01.01.00	Data Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila		Terbuka	Realtime	Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Layanan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAD 09.01.01.00	Data Sosialisasi FPK (Forum		Terbuka	Realtime	Pembinaan Ketahanan	Layanan Sosialisasi FPK (Forum	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.01 POLITIK DAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
	Pembauran Kebangsaan)				Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Pembauran Kebangsaan)	PEMERINTAHAN UMUM		PEMERINTAHAN UMUM	
KP-DAD 09.01.01.00	Data Aspirasi Masyarakat		Terbatas	Realtime	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Layanan Jaring Aspirasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Sekretariat DPRD
KP-DAD 09.01.01.00	Data Audiensi DPRD		Terbatas	Realtime	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Layanan Audiensi DPRD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Sekretariat DPRD
KP-DAD 09.01.01.00	Data Informasi Kegiatan DPRD		Terbuka	Realtime	Fasilitasi Tugas DPRD	Layanan Informasi Kegiatan DPRD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Sekretariat DPRD
KP-DAD 09.01.02.00	Data Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri		Terbatas	Realtime	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Layanan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.02 OTONOMI DAERAH	Bagian Pemerintahan
KP-DAD 09.01.05.00	Data Dokumen Debitur Potensial KUR		Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Bagian Perekonomian dan SDA

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
									DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
KP-DAD 09.01.05.00	Data Dokumen Kerja Pola Pengelolaan Keuangan BLUD		Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Layanan Pembinaan BUMD dan BLUD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan SDA
KP-DAD 09.01.05.00	Data Dokumen Laporan Hasil Monev Kebijakan BUMD/BLUD		Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Layanan Pembinaan BUMD dan BLUD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan SDA
KP-DAD 09.01.05.00	Data Dokumen Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Layanan Pembinaan BUMD dan BLUD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan SDA

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.01.05.00	Data Dokumen Laporan Kinerja Lembaga Keuangan Daerah	SiTPAKD	Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan SDA
KP-DAD 09.01.05.00	Data Dokumen Laporan Tim Monev KUR		Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan SDA
KP-DAD 09.01.05.00	Data Dokumen Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	SiTPAKD	Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan SDA
KP-DAD 09.01.05.00	Data Kegiatan Monitoring	TPIN	Terbatas	Tiga Bulanan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Layanan Perencanaan dan	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN	Bagian Perekonomian dan SDA

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
	Pengendalian Inflasi					Pengawasan Ekonomi Mikro	PEMERINTAHAN UMUM		PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	
KP-DAD 09.01.05.00	Data Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	SiTPAKD	Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan SDA
KP-DAD 09.01.05.00	Data Penilaian Kinerja BUMD		Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Layanan Pembinaan BUMD dan BLUD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan SDA
KP-DAD 09.01.07.00	Data Administrasi Kependudukan Kelurahan (Akurad)		Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Administrasi Kependudukan Kelurahan (Akurad)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.01.07.00	Data Administrasi Kependudukan Siswa Semanak		Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Administrasi Kependudukan Siswa (Semanak)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Akta Kelahiran	SIAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Penerbitan Akta Kelahiran (Bela Aktaku)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Akta Kematian	SIAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Penerbitan Akta Kematian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Akta Perceraian	SIAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Penerbitan Akta Perceraian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Akta Perkawinan	SIAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Kolaborasi Dokumen Pasca	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
						Pernikahan (Kado Nikah)	PEMERINTAHAN UMUM		PENCATATAN SIPIL	
KP-DAD 09.01.07.00	Data Informasi Kependudukan (Gemati)	SIDUTAKU	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Informasi Kependudukan (Gemati)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Kartu Identitas Anak (KIA)	SIAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Kartu Keluarga	SIAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Penerbitan Kartu Keluarga	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	SIAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.01.07.00	Data Kehilangan Dokumen Kependudukan	LakonKU	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Perubahan/Kehilangan Dokumen Kependudukan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Kutipan Akta Pengakuan Anak	SIAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Penerbitan Akta Pengakuan Anak	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Kutipan Akta Pengesahan Anak	SIAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Penerbitan Akta Pengesahan Anak	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Kutipan Catatan Pinggir Akta Kelahiran	SIAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Legalisasi Dokumen Kependudukan		Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Legalisasi Dokumen Kependudukan	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							PEMERINTAHAN UMUM		PENCATATAN SIPIL	
KP-DAD 09.01.07.00	Data Pemohon Informasi Penduduk		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Permohonan Informasi Penduduk	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Perubahan Dokumen Kependudukan	LakonKU	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Perubahan/Kehilangan Dokumen Kependudukan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Perubahan Status Kewarganegaraan	SIAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Perubahan Status Kewarganegaraan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Surat Keterangan Pembatalan Akta Perceraian	SIAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perceraian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.01.07.00	Data Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan	SIAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.01.07.00	Data Surat Keterangan Pindah	SIAK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAD 09.02.02.00	Data Anggaran Pendapatan dan Belanja	SIMRS, PANCANAKA	Terbatas	Realtime	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	Layanan Pengelolaan Keuangan RS	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAD 09.02.03.00	Data Pajak Restoran, Hotel, Hiburan	e-SPTPD, e-Layanan, SIMPATDA	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAD 09.02.03.00	Data Pajak Reklame	SIMPATDA	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pajak Reklame	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							PEMERINTAHAN UMUM		PENDAPATAN NEGARA	
KP-DAD 09.02.03.00	Data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	SIMPATDA	Terbatas	Tiga Bulanan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAD 09.02.03.00	Data Pajak Air Tanah	SIMPATDA	Terbatas	Tiga Bulanan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pajak Air Tanah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAD 09.02.03.00	Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	e-SPTPD, e-SPPT	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pajak PBB dan BPHTB	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAD 09.02.03.00	Data Wajib BPHTB	e-BPHTB, e-Layanan	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pajak PBB dan BPHTB	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.02.03.00	Data Wajib PBB	SISMIOP, MyPBB	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Mobil Layanan Pajak Daerah Kulon Progo (MOLAPADAKU), Layanan Pajak PBB dan BPHTB	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAD 09.02.04.00	Data Perhitungan Bagi Hasil Desa	SIPD RI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pencairan Bagi Hasil Desa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAD 09.02.04.00	Data Penganggaran APBD	SIPD RI	Terbatas	Realtime	Perencanaan Anggaran Daerah	Layanan Penganggaran APBD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAD 09.02.06.00	Data Aset	SIM-Aset	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.02.06.00	Data Persediaan	SIM-Persediaan	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Persediaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAD 09.02.08.00	Data Dokumen Laporan Keuangan Pemda (LKPD)	SIPD RI	Terbatas	Realtime	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Layanan Penyusunan Laporan Keuangan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAD 09.02.08.00	Data Pencairan dan Bukti Transfer Dana Ke Desa	SIPD RI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAD 09.02.08.00	Data Pendapatan Daerah	SIPD RI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAD 09.02.08.00	Data Penganggaran Daerah	SIPD RI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAD 09.02.08.00	Data Pengelolaan Keuangan Daerah	SIPD RI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							PEMERINTAHAN UMUM		PELAPORAN KEUANGAN	
KP-DAD 09.02.11.00	Data Monitoring Pengadaan	ePBJKU	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Monitoring Data Pengadaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAD 09.02.11.00	Data Pelaku Pengadaan	SiKAP, SPSE	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Verifikasi Pelaku Usaha, Layanan Pembuatan dan Perubahan Akun Pelaku Pengadaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAD 09.02.11.00	Data Pengadaan Barang/Jasa	SPSE, SiRUP, Toko Daring, e-Katalog	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAD 09.02.11.00	Data Layanan Konsultasi		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Konsultasi Pengadaan Elektronik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.03.01.00	Data User Aplikasi	JendelaKU	Terbatas	Realtime	Pengelolaan e-Government	Layanan Portal Aplikasi Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.01.00	Data User Jaringan Intra	Single Sign In Jaringan Intra/Internet Pemda	Tertutup	Realtime	Persandian Pengamanan Informasi	Layanan Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.01.00	Data User Pusat Data Pemda		Tertutup	Realtime	Persandian Pengamanan Informasi	Layanan Penyediaan Pusat Data (Data Center)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.01.00	Data Aduan Jaringan Intra	Single Sign In Jaringan Intra/Internet Pemda	Tertutup	Realtime	Persandian Pengamanan Informasi	Layanan Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.01.00	Data Menara Telekomunikasi	SIDALMENTEL	Tertutup	Bulanan	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Layanan Pengelolaan	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
						Menara Telekomunikasi	PEMERINTAHAN UMUM		DAN PERANGKAT INFORMATIKA	
KP-DAD 09.03.02.00	Data API Aplikasi	JendelaKU	Terbatas	Realtime	Pengelolaan e-Government	Layanan Portal Aplikasi Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.02.00	Data Aplikasi Pusat Data Pemda		Tertutup	Realtime	Persandian Pengamanan Informasi	Layanan Penyediaan Pusat Data (Data Center)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.02.00	Data Domain dan Subdomain	Trouble Ticketing System (TTS)	Tertutup	Realtime	Pengelolaan e-Government	Layanan Helpdesk TIK	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.02.00	Data Pembuatan Email Dinas		Tertutup	Realtime	Pengelolaan e-Government	Layanan Pembuatan Email Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.02.00	Data Pembuatan Website Pemerintah		Tertutup	Realtime	Pengelolaan e-Government	Layanan Pembuatan Website Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.03.02.00	Data Pengajuan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	BeID	Tertutup	Realtime	Persandian Pengamanan Informasi	Layanan Pengajuan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.02.00	Data Pengembangan Aplikasi	JendelaKU	Terbatas	Realtime	Pengelolaan e-Government	Layanan Portal Aplikasi Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.02.00	Data Sertifikat Elektronik (Digital Signature)	BeID	Terbatas	Realtime	Persandian Pengamanan Informasi	Layanan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.02.00	Data Pengaduan Insiden Keamanan Informasi		Terbatas	Realtime	Persandian Pengamanan Informasi	Layanan Pengaduan Insiden Keamanan Informasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.03.00	Data Permohonan Informasi Publik		Terbuka	Realtime	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Informasi Publik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Bagian Umum

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.03.03.00	Data Informasi Publik		Terbuka	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Permohonan Informasi Publik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.03.00	Data Peliputan dan Dokumentasi		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Peliputan dan Dokumentasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.03.00	Data Informasi dan Publikasi		Terbuka	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Informasi dan Publikasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.03.00	Data Analitik Informasi	Media Analitik IKPS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Analitik Informasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.03.00	Data Dashboard Pimpinan	Dashboard Pimpinan	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Dashboard Pimpinan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.03.04.00	Data Statistik Sektoral	SATUDATA	Terbuka	Tahunan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Layanan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							PEMERINTAHAN UMUM			
KP-DAD 09.04.02.00	Data Keluhan Aplikasi dan Internet	Trouble Ticketing System (TTS)	Tertutup	Realtime	Pengelolaan e-Government	Layanan Helpdesk TIK	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI	RAD.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.04.02.00	Data Aduan Masyarakat	SP4N-LAPOR	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Pengaduan Masyarakat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI	RAD.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.04.02.00	Data Aduan Lingkungan Hidup Masyarakat	SP4N-LAPOR	Terbuka	Realtime	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat PPLH	Layanan Aduan Masyarakat Lingkungan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI	RAD.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAD 09.05.01.00	Data Fasilitasi CSR Perusahaan	CSRKU	Terbatas	Tahunan	Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Fasilitasi CSR Perusahaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAD 09.05.01.00	Data Informasi Pengelolaan Geopark	Geopark Jogja	Terbuka	Lainnya	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Layanan Wadah Informasi Geopark	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.05.01.00	Data Renja	SIPD RI	Terbuka	Tahunan	Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAD 09.05.01.00	Data Renstra	SIPD RI	Terbuka	Tahunan	Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAD 09.05.01.00	Data RKPD	SIPD RI	Terbuka	Tahunan	Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAD 09.05.01.00	Data RPJMD	SIPD RI	Terbuka	Tahunan	Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAD 09.05.01.00	Data RPJPD	SIPD RI	Terbuka	Tahunan	Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAD 09.05.02.00	Data Perencanaan dan Monitoring DAK	Krisna	Terbatas	Realtime	Analisis Data Perencanaan	Layanan Kolaborasi Perencanaan dan	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN	RAD.09.05.02 PENGANGGARAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Pembangunan Daerah	Kinerja Anggaran DAK	PEMERINTAHAN UMUM	PEMBANGUNAN NASIONAL		Pembangunan Daerah
KP-DAD 09.05.02.00	Data Perencanaan Penganggaran	SIPPa	Terbatas	Realtime	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Layanan Penyusunan Program Anggaran	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.02 PENGANGGARAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAD 09.05.03.00	Data Dokumen Laporan Kegiatan Pembangunan	Monev-ku	Terbatas	Realtime	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Monitoring Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAD 09.05.03.00	Data Stunting dan Anggaran	AKSI BANGDA	Terbuka	Bulanan	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Layanan Monitoring Stunting	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAD 09.05.03.00	Data Monitoring Program Pembangunan	siMPel	Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Layanan Monitoring Program Pembangunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Bagian Administrasi Pembangunan
KP-DAD 09.05.03.00	Data Kontrak Paket Pekerjaan	siMPel	Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Layanan Monitoring	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN	RAD.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Bagian Administrasi Pembangunan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
						Program Pembangunan	PEMERINTAHAN UMUM	PEMBANGUNAN NASIONAL		
KP-DAD 09.05.03.00	Data Progres Pekerjaan	siMPel	Terbatas	Realtime	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Layanan Monitoring Program Pembangunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Bagian Administrasi Pembangunan
KP-DAD 09.06.01.00	Data Nomor Surat Keluar		Terbatas	Realtime	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Penomoran Surat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Umum
KP-DAD 09.06.01.00	Data Proposal Lembaga Masyarakat		Terbuka	Realtime	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Penerimaan Proposal Bantuan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Umum
KP-DAD 09.06.01.00	Data Peminjaman Ruangan		Terbatas	Realtime	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Layanan Peminjaman Ruangan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Rumah Tangga
KP-DAD 09.06.01.00	Data Agenda Pimpinan	SIMAGENDA	Terbatas	Realtime	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Layanan Pengelolaan Agenda Pimpinan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Rumah Tangga

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.06.01.00	Data Naskah Sambutan Pimpinan		Terbatas	Realtime	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Layanan Pembuatan Naskah Sambutan Pimpinan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Rumah Tangga
KP-DAD 09.06.01.00	Data Kendaraan Dinas Pimpinan Daerah	SIMKD	Terbuka	Realtime	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Layanan Pengelolaan Kendaraan Dinas Pimpinan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Rumah Tangga
KP-DAD 09.06.01.00	Data Publikasi Dokumentasi Kegiatan Pimpinan		Terbuka	Realtime	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Layanan Fasilitasi Publikasi Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Rumah Tangga
KP-DAD 09.06.02.00	Data Evaluasi Kelembagaan dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah		Terbatas	Tahunan	Penataan Organisasi	Layanan Evaluasi Kelembagaan dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Bagian Organisasi
KP-DAD 09.06.02.00	Data Analisis Jabatan	ANJAB ABK	Terbatas	Realtime	Penataan Organisasi	Layanan Analisis Jabatan dan Beban Kerja	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Bagian Organisasi
KP-DAD 09.06.03.00	Data Informasi Kegiatan BKPP		Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Informasi Sekretariat BPKPSDM	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA	Badan Kepegawaian dan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							PEMERINTAHAN UMUM		MANUSIA APARATUR	Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Informasi Pelayanan BKPP		Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Informasi Sekretariat BPKPSDM	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Kenaikan Pangkat ASN	SIASN	Tertutup	Enam Bulanan	Mutasi dan Promosi ASN	Layanan Kenaikan Pangkat ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	e-LHKPN	Tertutup	Tahunan	Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Manajemen Talenta ASN	EMT	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN	Layanan Manajemen Talenta ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.06.03.00	Data Pelanggaran Disiplin Pegawai	I'DIS BKN	Tertutup	Bulanan	Penilaian Kinerja Aparatur	Layanan Pelanggaran Disiplin Pegawai	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Pengadaan CASN	SSCASN	Terbuka	Lainnya	Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Layanan Pengadaan CASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Pengajuan Cuti	SIMASNEG	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Cuti Pegawai	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Pengajuan Pensiun	SIASN	Terbatas	Bulanan	Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Layanan Pengajuan Pensiun	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Pengajuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)	e-SPJ	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Pengajuan Surat	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA	Badan Kepegawaian dan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
						Pertanggungjawaban (SPJ)	PEMERINTAHAN UMUM		MANUSIA APARATUR	Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Pengajuan Tugas Belajar	SIDIK	Terbatas	Bulanan	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Layanan Pengajuan Tugas Belajar	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Pertimbangan Teknis Mutasi ASN	SIASN, SIMOLEK	Terbatas	Bulanan	Mutasi dan Promosi ASN	Layanan Mutasi ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Presensi ASN	e-PRESENSI	Terbatas	Realtime	Penilaian Kinerja Aparatur	Layanan Presensi ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Presensi ASN Tenaga Guru	PRISCILA	Terbatas	Realtime	Penilaian Kinerja Aparatur	Layanan Presensi Berbasis Lokasi (GPS)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.06.03.00	Data Presensi Tenaga Kesehatan	PRISCILA	Terbatas	Realtime	Penilaian Kinerja Aparatur	Layanan Presensi Berbasis Lokasi (GPS)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Profil ASN	e-PROFIL	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Profil Kepegawaian ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Profil Non ASN	SINONAKU	Tertutup	Tahunan	Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Profil Kepegawaian Non ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Riwayat Pengembangan Kompetensi Pegawai	SIDIK	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN	Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data SK Mutasi ASN	SIMUDAH	Terbatas	Lainnya	Mutasi dan Promosi ASN	Layanan Mutasi ASN	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA	Badan Kepegawaian dan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
							PEMERINTAHAN UMUM		MANUSIA APARATUR	Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)		Terbuka	Realtime	Penilaian Kinerja Aparatur	Layanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Usulan Kartu Istri (Karis)	SEMAR BKN KANREG 1 Yogyakarta	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Kartu Istri/Kartu Suami (Karis/Karsu)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Usulan Kartu Suami (Karsu)	SEMAR BKN KANREG 1 Yogyakarta	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Kartu Istri/Kartu Suami (Karis/Karsu)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Usulan Pengembangan Kompetensi	SIDIK	Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi ASN	Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.06.03.00	Data Reward dan Punishment	ERP	Terbatas	Tahunan	Penilaian Kinerja Aparatur	Layanan Reward dan Punishment	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Kinerja ASN	e-TPP, e-Kinerja BKN	Terbatas	Bulanan	Penilaian Kinerja Aparatur	Layanan Kinerja ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.03.00	Data Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	SIOLA	Terbatas	Enam Bulanan	Penilaian Kinerja Aparatur	Layanan Pengajuan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAD 09.06.04.00	Data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monev-ku	Terbatas	Bulanan	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Pencapaian Kinerja Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.06.04.00	Data Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	ESR Menpan	Terbatas	Realtime	Penataan Organisasi	Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Bagian Organisasi
KP-DAD 09.06.04.00	Data Evaluasi Kinerja Kapanewon	SIJAKA	Terbatas	Realtime	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Layanan Penilaian Kinerja Kapanewon	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Bagian Pemerintahan
KP-DAD 09.06.04.00	Data Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	SIGAP REKOM	Terbatas	Realtime	Administrasi Tata Pemerintahan	Layanan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN,	Bagian Pemerintahan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
									DAN AKUNTABILITAS KINERJA	
KP-DAD 09.06.04.00	Data Regulasi Tata Kelola Smart City	Tauval Kemenpan RB	Terbuka	Tahunan	Pengelolaan e-Government	Layanan Tata Kelola Smart City	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.06.04.00	Data Regulasi Tata Kelola SPBE	Tauval Kemenpan RB	Terbuka	Tahunan	Pengelolaan e-Government	Layanan Tata Kelola SPBE	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAD 09.06.04.00	Data Aduan Berindikasi Korupsi	WBS	Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Aduan Berindikasi Korupsi	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS	Inspektorat

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
					Dengan Tujuan Tertentu		PEMERINTAHAN UMUM		REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	
KP-DAD 09.06.04.00	Data Dokumen Laporan Gratifikasi	UPG-Ku	Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Layanan Pelaporan Tindakan Gratifikasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAD 09.06.04.00	Data Manajemen Risiko		Terbatas	Tahunan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Evaluasi Manajemen Risiko	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.06.04.00	Data Pengawasan APIP		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Pengawasan APIP	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAD 09.06.04.00	Data SPIP	SPIP Terintegrasi	Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan SPIP	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAD 09.06.04.00	Data Status Tindak Lanjut Pengawasan	SIPTL	Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Layanan Tindak Lanjut Pengawasan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN,	Inspektorat

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
									DAN AKUNTABILITAS KINERJA	
KP-DAD 09.06.04.00	Data Angka Kredit dan Diklat APIP	SIBIJAK	Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan Angka Kredit dan Diklat APIP	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAD 09.06.04.00	Data Daftar Konsultasi Pelayanan Pemerintah	Pojok Kopiku	Tertutup	Realtime	Pendampingan dan Asistensi	Layanan Konsultasi Pelayanan Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAD 09.06.05.00	Data Penyusunan Standar		Terbuka	Tahunan	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Layanan Penyusunan Standar	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS	Bagian Organisasi

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
	Operasional Prosedur (SOP)					Operasional Prosedur (SOP)	PEMERINTAHAN UMUM		PELAYANAN PUBLIK	
KP-DAD 09.06.05.00	Data Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik		Terbatas	Tahunan	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Layanan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Bagian Organisasi
KP-DAD 09.06.05.00	Data Survey Kepuasan Masyarakat	SKMKU	Terbatas	Realtime	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Bagian Organisasi
KP-DAD 09.06.06.00	Data Pengunjung		Terbuka	Realtime	Pengolahan dan Akses Arsip Statis	Layanan Akses Arsip	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAD 09.06.06.00	Data Buku Pinjam Arsip		Terbuka	Realtime	Pengolahan dan Akses Arsip Statis	Layanan Akses Arsip	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Data	Nama Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	Proses Bisnis	Layanan	RAD Level 1	RAD Level 2	RAD Level 3	Penanggung Jawab Data/ Wali Data
KP-DAD 09.06.06.00	Data Arsip Dinamis Digital	SRIKANDI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Dinamis	Layanan Pengelolaan Arsip Dinamis Digital	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAD 09.06.06.00	Data Arsip Statis Digital	SIKN	Terbatas	Harian	Pengelolaan Arsip Statis	Layanan Pengelolaan Arsip Statis Digital	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAD 09.06.06.00	Data Informasi Arsip	SIKN	Terbuka	Harian	Pengelolaan Arsip Statis	Layanan Informasi Kearsipan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAD 09.06.06.00	Data Pengelolaan Arsip OPD		Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Arsip Statis	Layanan Akses Daftar Arsip Aktif-Inaktif	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3.2.2.2. Analisis Katalog Data dan Informasi

Merujuk pada hasil pemetaan data dan informasi pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut.

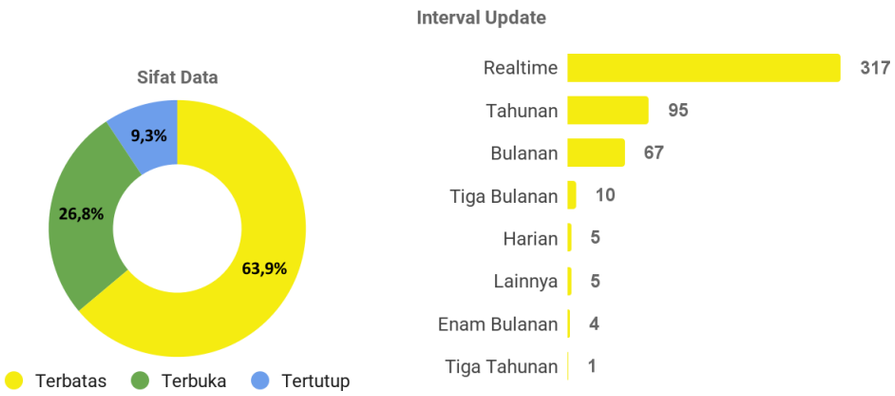

Grafik 3.2.2.2.1. Grafik Jumlah Daftar Data dan Informasi Berdasarkan Sifat dan Interval Update

Berdasarkan grafik 3.2.2.2.1. menunjukkan bahwa terdapat 504 data pokok *eksisting* yang berada di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan 322 data (63.9%) merupakan data yang bersifat terbatas, 135 Data (26.8%) merupakan data yang bersifat terbuka, 47 Data (9.3%) merupakan data yang bersifat tertutup. Merujuk grafik di atas dapat dilihat bahwa mayoritas data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki sifat terbatas atau dapat diartikan bahwa pemilik data hanya dapat membagikan data tersebut dengan akses data yang terbatas.

Adapun dari 504 data pokok mayoritas, sebanyak 317 data merupakan data dengan interval *update* Realtime, 67 data merupakan data dengan interval *update* Bulanan, dan 95 data merupakan data dengan interval *update* Tahunan, serta Interval *update d*ata terendah dengan interval *update* Tiga Tahunan sejumlah 1 *data.* Secara umum, mayoritas data di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus di *update* secara *realtime* sehingga diperlukan digitalisasi proses bisnis untuk memudahkan pemrosesan pengolahan data.

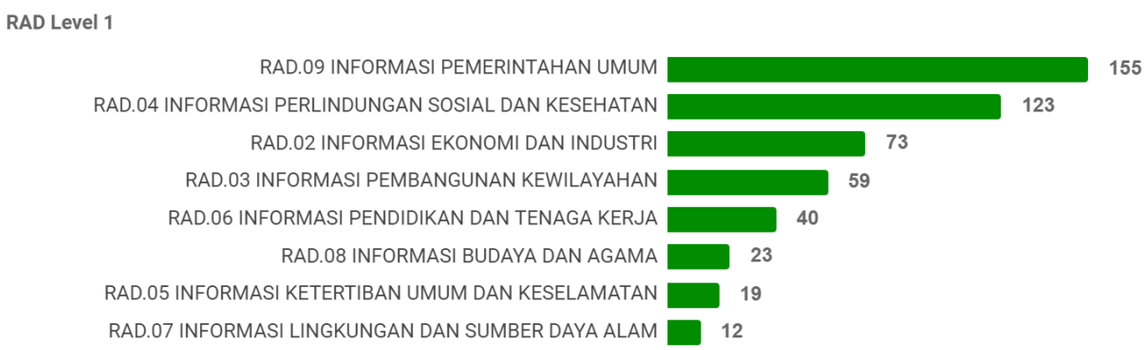

Grafik 3.2.2.2.2. Grafik Jumlah Daftar Data berdasarkan RAD Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Grafik 3.2.2.2.2. mayoritas data didominasi oleh RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum sejumlah 155 Data, RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan sejumlah 123 Data dan RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri sejumlah 73 Data. Sedangkan RAD yang paling sedikit

yaitu pada RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam dengan jumlah 12 Data. Kondisi ini tentu bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan dan inovasi daftar metadata arsitektur data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

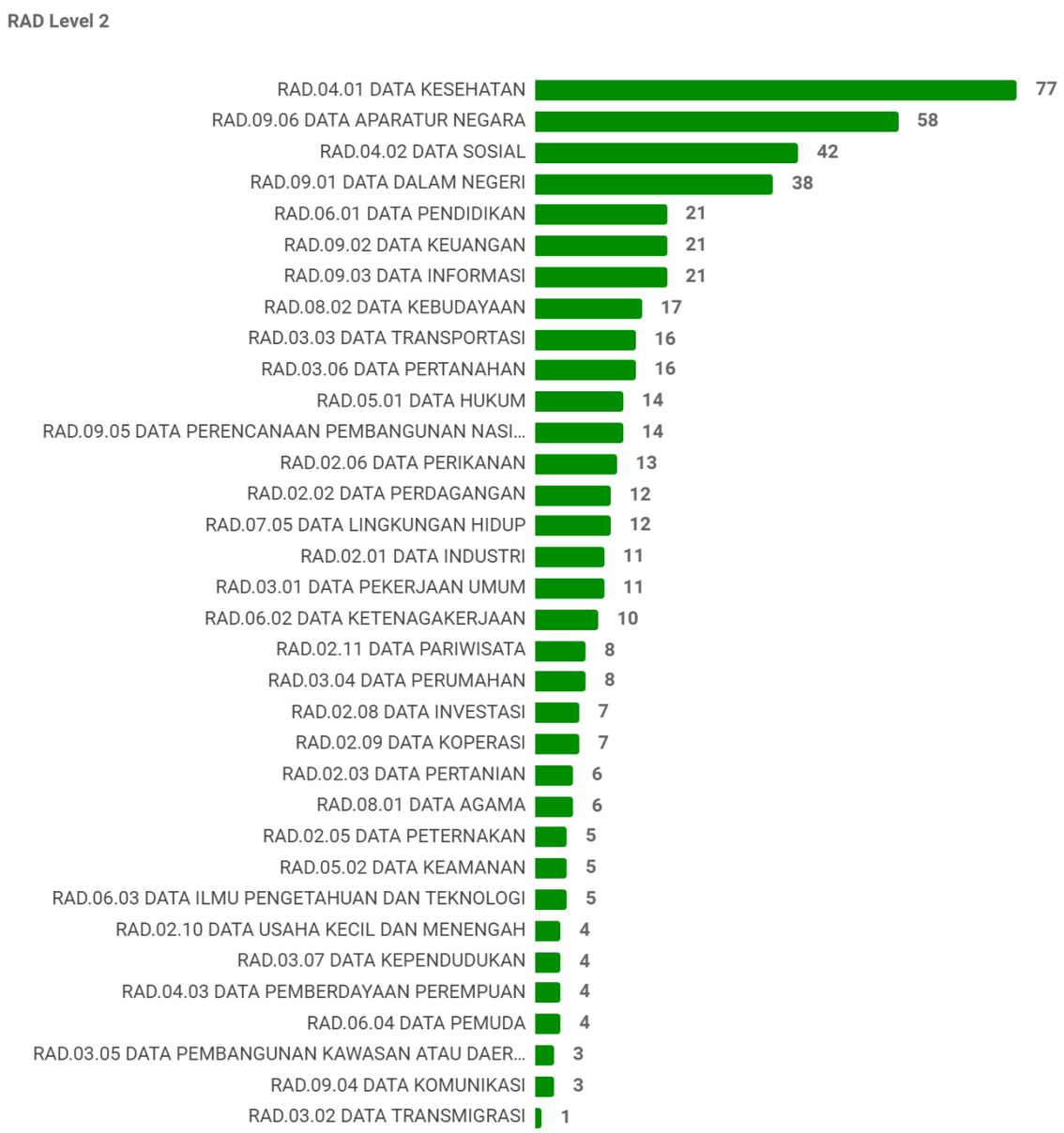

Grafik 3.2.2.2.3. Grafik Jumlah Daftar Data berdasarkan RAD Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Grafik 3.2.2.2.3. menunjukkan bahwa RAD level 2 didominasi oleh, RAD.04.01 Data Kesehatan sejumlah 77 data, RAD.09.06 Data Aparatur Negara sejumlah 58 data. Sedangkan paling sedikit, yaitu RAD.09.04 Data Komunikasi sejumlah 3 data dan RAD.03.02 Data Transmigrasi sejumlah 1 data. Merujuk pada referensi arsitektur data Nasional yang berjumlah 49 referensi, referensi arsitektur data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 34 Referensi Arsitektur Data Nasional, sementara 15 referensi lainnya bukan merupakan referensi/urusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

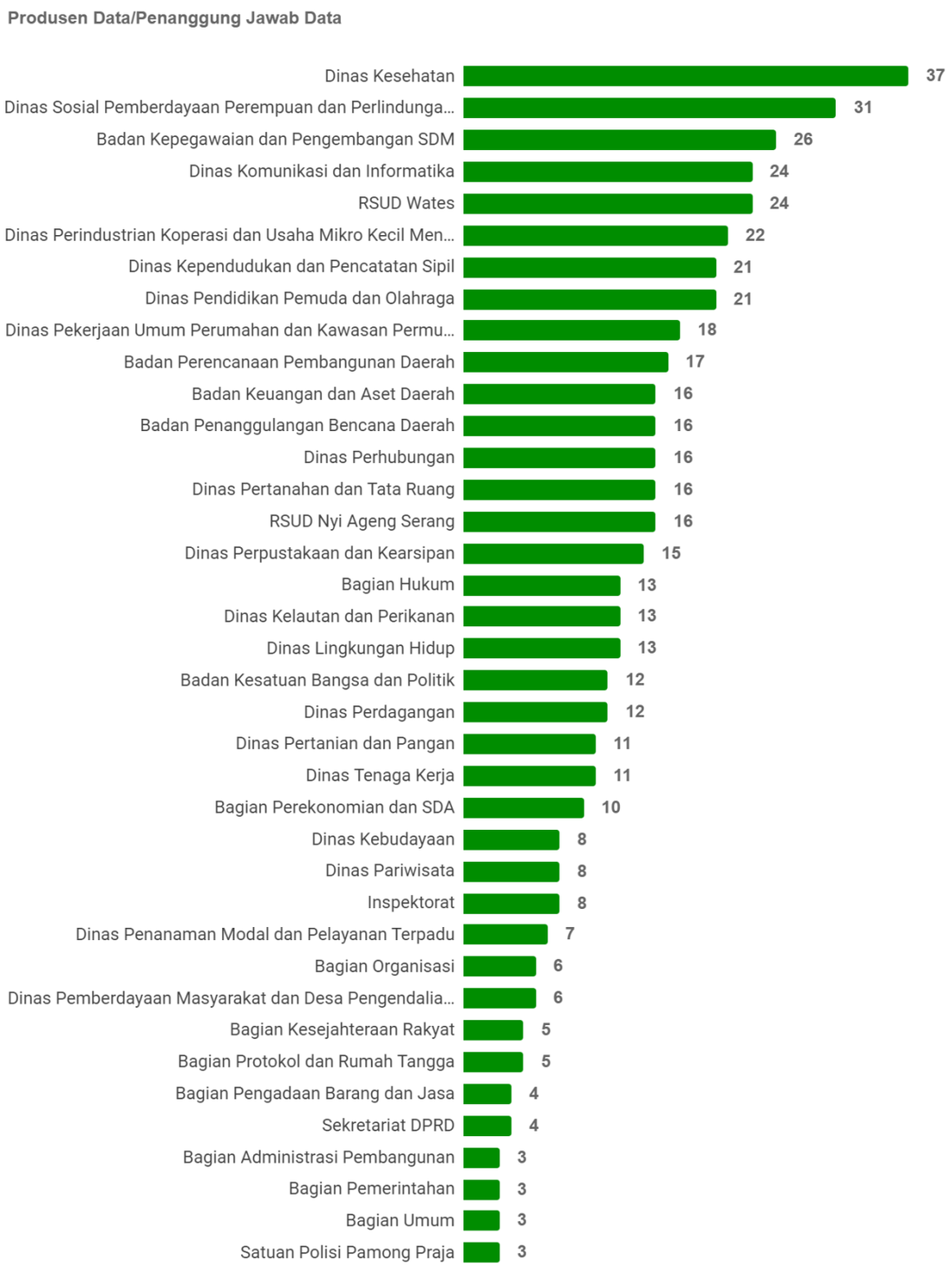

Grafik 3.2.2.2.4. Grafik Jumlah Daftar Data di Perangkat Daerah

Berdasarkan Grafik 3.2.2.2.4. menunjukkan bahwa mayoritas data terbanyak dimiliki oleh Dinas Kesehatan dengan jumlah 37 data. Data paling sedikit yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki jumlah 3 data. Oleh karena itu, perlu evaluasi dan inventarisasi data di masing-masing perangkat daerah untuk memvalidasi apakah data yang dimiliki telah sesuai.

3.2.3. Arsitektur Layanan SPBE

Layanan SPBE dapat memberikan manfaat seperti mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan, serta memberikan akses yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan layanan. Secara umum, arsitektur layanan menggambarkan kondisi mengenai layanan yang dihadirkan pada masing-masing perangkat daerah sesuai proses bisnis utamanya.

3.2.3.1. Katalog Layanan

Katalog ini berisi layanan merupakan proses pemerintahan yang memiliki pelanggan (*customer*), baik itu internal (perangkat daerah, ASN) maupun eksternal (instansi luar, swasta dan masyarakat). Berdasarkan hasil survei telah terinventarisir sejumlah 429 layanan dimana 258 layanan (60,14%) telah terdigitalisasi. Katalog disusun berdasarkan Referensi Arsitektur Layanan (RAL) Level 1,2, dan 3 mengacu pada referensi arsitektur layanan SPBE nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog layanan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. **Metadata katalog layanan yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dapat diakses pada link:https://bit.ly/MetadataSPBEKulonProgo di sheet Layanan.**

Tabel 3.2.3.1.1. Cuplikan Katalog Layanan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.05.01.01	Layanan Informasi Industri Nasional	Bisnis	Data Informasi Perindustrian	SIINas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.05.01.02	Layanan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Industri	Bisnis	Data Sarana dan Prasarana Industri		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.05.01.03	Layanan Pendataan dan Registrasi Pelaku Industri	Bisnis	Data Pelaku Industri	SIINas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.05.01.04	Layanan Perlindungan dan Pengawasan Usaha Industri	Bisnis	Data Pengawasan dan Perlindungan Industri		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.05.01.05	Layanan Sistem Informasi Industri Daerah	Bisnis	Data Sistem Informasi Industri		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.05.02.01	Layanan Peningkatan Teknologi dan Inovasi Industri	Bisnis	Data Teknologi dan Inovasi Industri		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.02 PENGUATAN IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.05.03.01	Layanan Sertifikasi dan Standarisasi Produk Industri	Bisnis	Data Sertifikasi Produk Industri		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.03 PENINGKATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BARANG DAN JASA SERTA INDUSTRI HALAL DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.05.04.01	Layanan Promosi dan Pemasaran Produk Industri	Bisnis	Data Promosi Produk Industri		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.04 PERLUASAN PENGUASAAN PASAR INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.05.05.01	Layanan Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Bisnis	Data Industri Kecil dan Menengah (IKM)		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.05 PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.05.05.02	Layanan Pengembangan Wirausaha Industri Baru	Bisnis	Data Wirausaha Industri Baru		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.05 PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.05.06.01	Layanan Pengembangan Sentra Industri dan Kawasan Industri	Bisnis	Data Sentra dan Kawasan Industri		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.06 PEMERATAAN PERSEBARAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.06.01.01	Layanan Informasi Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Bisnis	Data Pantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Pasar Daerah	SIKEPOKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan
KP-DAL 01.06.01.02	Layanan Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Nasional	Bisnis	Data Pantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Pasar Nasional	SP2KP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan
KP-DAL 01.06.01.03	Layanan Pendataan Pedagang Pasar	Bisnis	Data Informasi Pedagang		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.06.01.04	Layanan Perizinan Penggunaan Kios/Los/Bango	Bisnis	Data Izin Dasaran Kios/Los/Bango		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan
KP-DAL 01.06.01.05	Layanan Rekomendasi Pendirian Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan Waralaba	Bisnis	Data Penerbitan Perizinan (Surat Rekomendasi) Pusat Perbelanjaan, Data Penerbitan Perizinan (Surat Rekomendasi) Toko Swalayan Waralaba	OSS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan
KP-DAL 01.06.01.06	Layanan Sistem Informasi Sarana Perdagangan	Bisnis	Data Sarana Perdagangan	SISP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan
KP-DAL 01.06.03.01	Layanan Tera/Tera Ulang	Bisnis	Data Tera/Tera Ulang UTTP	UML	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Dinas Perdagangan
KP-DAL 01.06.03.02	Layanan Pemberian Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol	Bisnis	Data Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol	OSS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	Dinas Perdagangan
KP-DAL 01.06.06.01	Layanan Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)	Bisnis	Data Penerbitan Perizinan Usaha (Surat Hasil Verifikasi), Data Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)	OSS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.06 OPTIMALISASI PERANAN PBK, SRG, DAN PLK	Dinas Perdagangan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.07.08.01	Layanan Informasi Kelembagaan Petani	Masyarakat	Data Kelembagaan Petani	TaniKu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAL 01.07.11.01	Layanan Informasi Kios Sarana Produksi Pertanian	Masyarakat	Data Kios Sarana Produksi Pertanian	TaniKu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.11 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAL 01.07.13.01	Layanan Cetak Sawah Baru	Masyarakat	Data Luasan dan Lokasi Lahan Cetak Sawah Baru	TaniKu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAL 01.07.13.02	Layanan Lokasi Lahan Surjan Pertanian	Masyarakat	Data Luasan dan Lokasi Lahan Surjan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAL 01.07.16.01	Layanan Rekomendasi BBM	Masyarakat	Data Keterangan Beli BBM	TaniKu, BPH Xstar Migas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAL 01.07.20.01	Layanan Informasi Harga Komoditas Pertanian	Masyarakat	Data Harga Pasar Komoditas Pertanian	TaniKu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAL 01.09.04.01	Layanan Pemotongan Hewan Qurban	Masyarakat	Data Penyembelihan Hewan Qurban, Data Rekomendasi Hewan Qurban, Data Lokasi	TaniKu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Pertanian dan Pangan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
			Penyembelihan Hewan Qurban					
KP-DAL 01.09.04.02	Layanan Rekomendasi Ijin Praktek Dokter Hewan	Masyarakat	Data Keterangan Praktek Dokter Hewan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAL 01.09.04.03	Layanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan	Masyarakat	Data Kesehatan Hewan Ternak	TaniKu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN	Dinas Pertanian dan Pangan
KP-DAL 01.10.02.01	Layanan Uji Kualitas Air Perikanan Budidaya	Masyarakat	Data Uji Kualitas Air		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAL 01.10.03.01	Layanan Penjualan Benih Ikan	Masyarakat	Data Penjualan Benih Ikan Gurami		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAL 01.10.03.02	Layanan Registrasi Kelompok Usaha Perikanan	Masyarakat	Data Register Kelompok Usaha Perikanan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAL 01.10.03.03	Layanan Pendataan Nelayan dan Pembudidaya	Masyarakat	Data Identitas dan Aktivitas Nelayan dan Pembudidaya	IKANKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAL 01.10.03.04	Layanan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan	Masyarakat	Data Penerima dan Distribusi Bantuan Sarpras Perikanan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.10.03.05	Layanan Pelaporan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Masyarakat	Data Produksi Ikan Tangkap dan Budidaya		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAL 01.10.03.06	Layanan Informasi Harga Ikan dan Pemasaran Produk Perikanan	Masyarakat	Data Harga Pasar dan Saluran Distribusi Produk Perikanan	SETITI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAL 01.10.03.07	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Masyarakat	Data Alumni dan Program Pendidikan Kelautan dan Perikanan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAL 01.10.04.01	Layanan Penerimaan Pendapatan Retribusi Bibit/Benih Ikan	Masyarakat	Data Pendapatan Retribusi Bibit/Benih Ikan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAL 01.10.04.02	Layanan Penerimaan Pendapatan Retribusi TPI	Masyarakat	Data Pendapatan Retribusi TPI		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAL 01.10.04.03	Layanan Permohonan Rekomendasi Pembelian BBM	Masyarakat	Data Surat Rekomendasi Pembelian BBM	IKANKU, BPH Xstar Migas	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAL 01.10.04.04	Layanan Rekomendasi Kelayakan Pengolahan Ikan	Masyarakat	Data Rekomendasi Kelayakan Pengolahan Ikan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN	Dinas Kelautan dan Perikanan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							SUMBER DAYA PERIKANAN	
KP-DAL 01.10.04.05	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Masyarakat	Data Hasil Pengawasan dan Pelanggaran di Wilayah Kelautan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAL 01.12.03.01	Layanan Peta Potensi Investasi	Bisnis	Data Peta Potensi Investasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAL 01.12.06.01	Layanan Perizinan Berusaha	Bisnis	Data Perizinan Berusaha	OSS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAL 01.12.06.02	Layanan Perizinan Non Berusaha	Bisnis	Data Perizinan Non Berusaha	SICANTIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAL 01.12.06.03	Layanan Perizinan PBG	Bisnis	Data Tanda Bukti PBG, Data Tanda Bukti RTB, Data Tanda Bukti SBKBG, Data Tanda Bukti SLF	SIMBG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
KP-DAL 01.13.01.01	Layanan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Bisnis	Data Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Pengawasan Koperasi	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.01 PEMBINAAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.13.03.01	Layanan Sosialisasi Pendirian Koperasi	Bisnis	Data Sosialisasi Pendirian Koperasi	AHU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							KOPERASI	
KP-DAL 01.13.04.01	Layanan Pelaporan Keuangan Triwulan KSP/USP	Bisnis	Data Laporan Keuangan Triwulan KSP/USP		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.04 PENGAWASAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.13.04.02	Layanan Fasilitasi Pencermatan dan Perubahan Anggaran Dasar	Bisnis	Data Draft AD/PAD	AHU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.04 PENGAWASAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.13.04.03	Layanan Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	Bisnis	Data Keuangan Koperasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.04 PENGAWASAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.13.04.04	Layanan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam	Bisnis	Data Izin Usaha Simpan Pinjam KSP/USP	OSS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.04 PENGAWASAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.13.04.05	Layanan ODS	Bisnis	Data Koperasi	ODS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.04 PENGAWASAN KOPERASI	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.14.02.01	Layanan Promosi Produk UMKM	Bisnis	Data UMKM	SIBAKUL, PAY ON PRO, SIDT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.14.02.02	Layanan Fasilitasi Pendaftaran NIB	Bisnis	Data UMKM Legalitas Usaha	OSS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.14.03.01	Layanan Fasilitasi Pendaftaran HKI	Bisnis	Data UMKM HKI	DJKI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.03 KEWIRAUSAHAAN	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.14.03.02	Layanan Fasilitasi Pendaftaran Halal	Bisnis	Data UMKM Legalitas Halal	SIHALAL	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.03 KEWIRAUSAHAAN	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAL 01.15.02.01	Layanan Informasi Kepariwisataan	Bisnis	Data Desa Wisata, Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Data Usaha Jasa Pariwisata, Data Pelaku Wisata, Data Kunjungan Wisatawan, Data Calendar Of Event (COE), Data Objek Wisata	Sambanggo	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.02 DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
KP-DAL 01.15.06.01	Layanan Izin Penggunaan Tempat	Bisnis	Data Izin Penggunaan Tempat		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.06 KEBIJAKAN STRATEGIS PARIWISATA	Dinas Pariwisata
KP-DAL 01.17.01.01	Layanan Informasi Irigasi	Masyarakat	Data Aset Irigasi, Data Indeks Kinerja Sistem Irigasi	e-PAKSI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAL 01.17.01.02	Layanan Informasi SPAM (Air Minum)	Masyarakat	Data SPAM Perdesaan, Data Jaringan Perpipaan SPAM Perumda Air Minum, Data Pekerjaan Pembangunan Sambungan Rumah (SR)	Prohamsan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.17.01.03	Layanan Pemanfaatan Bagian Jalan Kabupaten	Masyarakat	Data Pemanfaatan Bagian Jalan Kabupaten		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAL 01.17.03.01	Layanan Informasi Pekerjaan Konstruksi	Masyarakat	Data Dokumen Progres Konstruksi	JAKONKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAL 01.17.05.01	Layanan Pengujian Laboratorium Konstruksi	Masyarakat	Data Jenis Pengujian Laboratorium Konstruksi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAL 01.17.05.02	Layanan Penyedotan Lumpur Tinja	Masyarakat	Data Pemohon Penyedotan Lumpur Tinja, Data Penyedotan Lumpur Tinja		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAL 01.17.05.03	Layanan Penyewaan Alat Berat	Masyarakat	Data Sewa Alat Berat		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAL 01.18.03.01	Layanan Pendaftaran Transmigran	Masyarakat	Data Pendaftaran Transmigran	SIBARDUK TRANS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.18 TRANSMIGRASI	RAL.01.18.03 FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.19.01.01	Layanan Izin Angkutan Umum Insidentil	Masyarakat	Data Berkas Izin Insidentil		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.01 PELAYANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAL 01.19.01.02	Layanan Perizinan Parkir Insidentil	Masyarakat	Data Izin Pengelolaan Parkir Insidentil		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.01 PELAYANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAL 01.19.01.03	Layanan Rekomendasi Parkir	Masyarakat	Data Izin Pengelolaan Parkir		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.01 PELAYANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAL 01.19.01.04	Layanan Rekomendasi Perizinan Angkutan	Masyarakat	Data Izin Trayek		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.01 PELAYANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAL 01.19.02.01	Layanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Masyarakat	Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji, Data Sertifikat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	PKB, e-RFID	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAL 01.19.02.02	Layanan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Masyarakat	Data Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAL 01.19.02.03	Layanan Rekayasa Lalu Lintas	Masyarakat	Data Rekayasa Lalu Lintas		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAL 01.19.02.04	Layanan Pengawasan Perlintasan	Masyarakat	Data Pengawasan Perlintasan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN	Dinas Perhubungan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							KEAMANAN TRANSPORTASI	
KP-DAL 01.19.02.05	Layanan Keselamatan dan Pengawasan Transportasi	Masyarakat	Data Keselamatan dan Pengawasan Transportasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAL 01.19.02.06	Layanan Sosialisasi dan Edukasi Keselamatan Transportasi	Masyarakat	Data Sosialisasi dan Edukasi Keselamatan Transportasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAL 01.19.02.07	Layanan Pengawasan Rekomendasi Andalalin	Masyarakat	Data Pengawasan Rekomendasi Andalalin		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAL 01.19.03.01	Layanan Pengelolaan Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan	Masyarakat	Data Pengelolaan Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAL 01.19.03.02	Layanan Pengelolaan Terminal Tipe C	Masyarakat	Data Pengelolaan Terminal Tipe C		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAL 01.19.04.01	Layanan Pembayaran Parkir Online	Masyarakat	Data Retribusi Pengelolaan Parkir	e-Retribusi	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS	Dinas Perhubungan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							TRANSPORTASI	
KP-DAL 01.19.04.02	Layanan BIS Sekolah	Masyarakat	Data BIS Sekolah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
KP-DAL 01.20.01.01	Layanan Informasi Bangunan Gedung	Masyarakat	Data Kerusakan Bangunan Gedung, Data Riwayat Perbaikan Bangunan Gedung		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAL 01.20.01.02	Layanan Pengajuan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Masyarakat	Data Pengajuan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	SIMBG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAL 01.20.01.03	Layanan Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Masyarakat	Data Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	SIMBG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAL 01.20.04.01	Layanan Bantuan Rumah Tangga Layak Huni	Masyarakat	Data Calon Penerima Bantuan Rumah Tangga Layak Huni		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Bagian Kesejahteraan Rakyat
KP-DAL 01.20.04.02	Layanan Pengesahan Site Plan Perumahan	Masyarakat	Data Site Plan Perumahan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAL 01.20.04.03	Layanan Penyewaan Unit Rusun	Masyarakat	Data Jumlah Unit Terhuni, Data Kondisi Unit Hunian		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.21.04.01	Layanan Pelaksanaan Akuntabilitas dan Kinerja Kelurahan	Masyarakat	Data Akuntabilitas Kelurahan	SIPENTAS JAWARAKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAL 01.21.05.01	Layanan Informasi Perangkat Desa	Masyarakat	Data Aparatur Desa	SIAPDES	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.05 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAL 01.21.07.01	Layanan Tata Kelola Keuangan Desa	Masyarakat	Data Keuangan Desa	SIKUDESKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAL 01.22.01.01	Layanan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW dan RDTR)	Masyarakat	Data Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAL 01.22.01.02	Layanan Penetapan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Masyarakat	Data Pemanfaatan Ruang	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.22.01.03	Layanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Masyarakat	Data KKPR dan Rekomendasi Tata Ruang	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAL 01.22.01.04	Layanan Penilaian Kesesuaian Tata Ruang dalam Perizinan	Masyarakat	Data Penilaian Kesesuaian Tata Ruang	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAL 01.22.01.05	Layanan Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Masyarakat	Data Pelanggaran dan Pengawasan Tata Ruang	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAL 01.22.01.06	Layanan Penyusunan dan Pemutakhiran Peta Rencana Tata Ruang	Masyarakat	Data Peta Tata Ruang Digital	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAL 01.22.01.07	Layanan Penyusunan Database Pertanahan dan Tata Ruang Daerah	Masyarakat	Data Database Pertanahan dan Tata Ruang	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAL 01.22.01.08	Layanan Izin Keterangan Rencana Kabupaten	Masyarakat	Data Tata Ruang		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.22.01.09	Layanan Izin Pemanfaatan Ruang Non-Berusaha	Masyarakat	Data Pemanfaatan Tanah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAL 01.22.02.01	Layanan Pengelolaan dan Penyajian Informasi Geospasial	Masyarakat	Data Informasi Geospasial	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.02 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAL 01.22.05.01	Layanan Pembebasan dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Masyarakat	Data Pengadaan Tanah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAL 01.22.05.02	Layanan Penilaian dan Penghitungan Nilai Ganti Rugi Tanah	Masyarakat	Data Penilaian Ganti Rugi Tanah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAL 01.22.05.03	Layanan Penyusunan Dokumen Rencana Pengadaan Tanah (RPT)	Masyarakat	Data Rencana Pengadaan Tanah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAL 01.22.08.01	Layanan Informasi Pemanfaatan Tanah	Masyarakat	Data Izin Pemanfaatan Ruang Non-Berusaha	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.22.08.02	Layanan Pendataan dan Inventarisasi Penguasaan dan Pemilikan Tanah	Masyarakat	Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAL 01.22.09.01	Layanan Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Sengketa Ruang	Masyarakat	Data Konflik Pertanahan dan Sengketa Ruang		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.09 PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
KP-DAL 01.23.01.01	Layanan Informasi Keluarga	Masyarakat	Data Informasi Keluarga	SIGA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.01 PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAL 01.23.02.01	Layanan Kepesertaan KB (Keluarga Berencana)	Masyarakat	Data Kepesertaan KB (Keluarga Berencana)	SIRIKA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAL 01.23.02.02	Layanan Permohonan Alkon	Masyarakat	Data Alat dan Obat Kontrasepsi	SIRIKA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAL 01.23.03.01	Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga	Masyarakat	Data Pusat Pembelajaran Keluarga		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.25.01.01	Layanan SIP NAKES	Masyarakat	Data Sertifikat Izin Praktek	SICANTIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.01.02	Layanan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	Masyarakat	Data Surat izin Penyehat Tradisional	SICANTIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.01.03	Layanan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	Masyarakat	Data Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	RENBUT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.01.04	Layanan Pengelolaan SDM Kesehatan	Masyarakat	Data Pengelolaan SDM Kesehatan	SISDMK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.02.01	Layanan Kefarmasian	Masyarakat	Data Obat	SimoKu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.03.01	Layanan Pengadaan dan Distribusi Obat dan Alkes	Masyarakat	Data Ketersediaan dan Distribusi Obat dan Alat Kesehatan	SimoKu, SMILE	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.03.02	Layanan Pengelolaan Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan	Masyarakat	Data Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan	CAKRA BASKARA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.25.03.03	Layanan Pendaftaran Online	Masyarakat	Data Pendaftaran Online	SIP NAS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAL 01.25.03.04	Layanan Pengelolaan Alat Kesehatan Sarana dan Prasarana	Masyarakat	Data Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan	ASPAK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAL 01.25.03.05	Layanan Perencanaan Alat Kesehatan	Masyarakat	Data Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan	ASPAK, PULANGGENI, CAKRA BASKARA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAL 01.25.03.06	Layanan Pengelola Alat Kesehatan	Masyarakat	Data Pengelola Alat Kesehatan	SIM RSUD Wates	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.01	Layanan Izin Penelitian Lingkungan Dinas Kesehatan	Masyarakat	Data Izin Penelitian Dinas Kesehatan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.04.02	Layanan Pelayanan UPT Lab Kesehatan	Masyarakat	Data Hasil Lab Kesehatan	Satu Pintu LabkesKu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.04.03	Layanan Rujukan Tingkat Lanjutan	Masyarakat	Data Rujukan Pelayanan Kesehatan	SISRUTE	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.04.04	Layanan Perizinan Fasilitas Kesehatan	Masyarakat	Data Perizinan Sarana Kesehatan	OSS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.25.04.05	Layanan Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Masyarakat	Data Peserta dan Cakupan Jaminan Kesehatan	SI DABU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.04.06	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Masyarakat	Data Profil Kesehatan Daerah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.04.07	Layanan Pengelolaan Kesehatan Jemaah Haji	Masyarakat	Data Kesehatan Jemaah Haji	SISKOHATKES	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.04.08	Layanan Sarana Prasarana Kesehatan	Masyarakat	Data Sarpras Kesehatan	ASPAK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.04.09	Layanan Jadwal Operasi	Masyarakat	Data Jadwal Operasi	SIMRS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAL 01.25.04.10	Layanan Jadwal Poliklinik	Masyarakat	Data Jadwal Poliklinik	SIMRS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAL 01.25.04.11	Layanan Lahan Praktek Kesehatan	Masyarakat	Data Pelayanan Pendidikan dan Penelitian	SIPANDU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.25.04.12	Layanan Pantauan TB RO (Resistant Obat)	Masyarakat	Data TB RO	SIMRS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAL 01.25.04.13	Layanan Pelaporan Insiden	Masyarakat	Data Permasalahan Insiden		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAL 01.25.04.14	Layanan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	Masyarakat	Data Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	SIMPEL LHK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAL 01.25.04.15	Layanan Rujukan Pasien	Masyarakat	Data Rujukan Pasien	SISRUTE	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAL 01.25.04.16	Layanan Supervisi Pelayanan Keperawatan	Masyarakat	Data Pengelolaan Pelayanan Pasien	SIMRS, ASPAK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAL 01.25.04.17	Layanan Tim HIV	Masyarakat	Data Tim HIV	SIMRS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAL 01.25.04.18	Layanan Manajemen Rumah Sakit (ERM)	Masyarakat	Data ERM	SIMRS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.25.04.19	Layanan Survei Kepuasan Pelanggan	Masyarakat	Data Survei Kepuasan	PULANGGENI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAL 01.25.04.20	Layanan Pelaporan Indikator Nasional Mutu	Masyarakat	Data Indikator Nasional Mutu		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAL 01.25.04.21	Layanan Pendaftaran Pasien Online RSUD Wates	Masyarakat	Data Pendaftaran Pasien Online	SIMPONIKU, SIM RSUD Wates	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.22	Layanan Penjaminan/Unit Klaim BPJS	Masyarakat	Data Klaim BPJS	e-KLAIM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.23	Layanan Kepuasan Pelanggan	Masyarakat	Data Kepuasan Pelanggan	SIPUAS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.24	Layanan Indikator Mutu	Masyarakat	Data Dokumen Laporan Indikator Mutu	SI IMUT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.25	Layanan Gizi	Masyarakat	Data Gizi	SKDR	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.25.04.26	Layanan Akreditasi Fasyankes	Masyarakat	Data Akreditasi Fasyankes	DFO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.04.27	Layanan Maternal Perinatal	Masyarakat	Data Maternal Perinatal	MPDN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.04.28	Layanan Gawat Darurat	Masyarakat	Data Gawat Darurat	SIM RSUD Wates	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.29	Layanan Rawat Jalan	Masyarakat	Data Rawat Jalan	SIM RSUD Wates	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.30	Layanan Rawat Inap	Masyarakat	Data Rawat Inap	SIM RSUD Wates	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.31	Layanan Intensive Care	Masyarakat	Data Intensive Care	SIM RSUD Wates	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.32	Layanan Bedah Sentral	Masyarakat	Data Bedah Sentral	SIM RSUD Wates	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.25.04.33	Layanan Penunjang Medik	Masyarakat	Data Penunjang Medik	SIM RSUD Wates	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.34	Layanan Rehabilitasi Medik	Masyarakat	Data Rehabilitasi Medik	SIM RSUD Wates	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.35	Layanan Hemodialisa	Masyarakat	Data Hemodialisa		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.36	Layanan Pemulasaraan Jenazah	Masyarakat	Data Pemulasaraan Jenazah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.37	Layanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Masyarakat	Data Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	SIM RSUD Wates	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.38	Layanan Sanitasi	Masyarakat	Data Sanitasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.39	Layanan Rekam Medis	Masyarakat	Data Rekam Medis	SIM RSUD Wates	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.25.04.40	Layanan Teknologi Informasi Rumah Sakit	Masyarakat	Data Teknologi Informasi Rumah Sakit	SIM RSUD Wates	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.41	Layanan Pemasaran Rumah Sakit	Masyarakat	Data Pemasaran Rumah Sakit		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.42	Layanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Masyarakat	Data Promosi Kesehatan Rumah Sakit		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.43	Layanan Unit Sterilisasi Sentral	Masyarakat	Data Unit Sterilisasi Sentral		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.44	Layanan Unit Laundry	Masyarakat	Data Unit Laundry		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.04.45	Layanan Administrasi Kependudukan Bayi Baru Lahir	Masyarakat	Data Administrasi Kependudukan Bayi Baru Lahir	SIM RSUD Wates	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.05.01	Layanan HIV AIDS	Masyarakat	Data HIV AIDS	SIHA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.25.05.02	Layanan TB	Masyarakat	Data TB	SITB	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.05.03	Layanan Penyakit Malaria	Masyarakat	Data Penyakit Malaria	SISMAL	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.05.04	Layanan Pengelolaan Survelains Vektor	Masyarakat	Data Pengelolaan Survelains Vektor	SILANTOR, e-STP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.05.05	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Masyarakat	Data Kasus Penyakit Tidak Menular (PTM)	SIPTM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.05.06	Layanan Pelaporan dan Tindak Lanjut KLB	Masyarakat	Data Kejadian Luar Biasa (KLB)		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.05.07	Layanan Program Pengendalian Infeksi	Masyarakat	Data Program Pengendalian Infeksi	PPI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	RSUD Wates
KP-DAL 01.25.06.01	Layanan Kesehatan Dasar Puskesmas	Masyarakat	Data Cakupan Layanan Puskesmas	SIMPUS, SIMPEDU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.25.06.02	Layanan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	Masyarakat	Data Cakupan Imunisasi	SMILE, SIMUNDU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.06.03	Layanan Gizi Masyarakat dan Pencegahan Stunting	Masyarakat	Data Status Gizi Balita dan Ibu Hamil	SIGIZI Terpadu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.06.04	Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Masyarakat	Data Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	SIM KIA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.06.05	Layanan Kesehatan Lansia dan Disabilitas	Masyarakat	Data Pelayanan Kesehatan Lansia dan Disabilitas	SIM KIA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.06.06	Layanan Informasi dan Edukasi Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	Data Materi Edukasi dan Statistik Kesehatan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.06.07	Layanan Pengelolaan Kesehatan Jiwa	Masyarakat	Data Kesehatan Jiwa	SIMKESWA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.06.08	Layanan Pelaporan Kesehatan Kerja Olahraga	Masyarakat	Data Pelaporan Kesehatan Kerja Olahraga	SITKO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.25.07.01	Layanan Sosialisasi P4GN/Narkoba	Masyarakat	Data Sosialisasi P4GN/Narkoba		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAL 01.25.07.02	Layanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Masyarakat	Data Kasus Gangguan Jiwa dan Napza		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.08.01	Layanan Sertifikat Higiene Sanitasi Makanan	Masyarakat	Data Sertifikat Higiene Sanitasi Makanan	SLHS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.08.02	Layanan Penerbitan SPPIRT	Masyarakat	Data Penerbitan SPPIRT	SPIRT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.08.03	Layanan Monitoring Evaluasi Hygiene Sanitasi Pangan	Masyarakat	Data Monev Hygiene Sanitasi Pangan	e-Monev HSP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.08.04	Layanan Monitoring Evaluasi Tempat Fasilitas Umum	Masyarakat	Data Monev Tempat Fasilitas Umum	e-Monev TFU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.08.05	Layanan Monitoring Evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Masyarakat	Data Monev Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	e-Monev STBM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Dinas Kesehatan
KP-DAL 01.25.08.06	Layanan Pengelolaan Stok Obat	Masyarakat	Data Pengelolaan Stok Obat	SIMOBAT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	RSUD Nyi Ageng Serang

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.26.01.01	Layanan Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Orang Terlantar	Masyarakat	"Data Surat Rekomendasi Balai Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar", "Data Berita Acara Serah Terima Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar"		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.01.02	Layanan Rekomendasi Adopsi Anak	Masyarakat	Data Surat Rekomendasi Adopsi Anak		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.01.03	Layanan Rekomendasi Penyerahan Anak Terlantar Panti	Masyarakat	Data Berita Acara Serah Terima Anak Terlantar, Data Surat Rekomendasi Balai Rehabilitasi Anak Terlantar		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.01.04	Layanan Rujukan Terpadu Masyarakat	Masyarakat	Data Penyelesaian Aduan Masyarakat		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.02.01	Layanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN)	Masyarakat	Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN)	SIKS-NG, SI DABU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.02.02	Layanan Reaktivasi Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan	Masyarakat	Data Surat Rekomendasi Reaktivasi KIS PBI	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
	Iuran							Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.02.03	Layanan Usulan Penerima Bantuan PBI Pemda	Masyarakat	Data Surat Rekomendasi Penerima Bantuan Iuran APBD (Jamkesda)	SI DABU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.02.04	Layanan Jaminan Sosial Lanjut Usia	Masyarakat	Data Jaminan Sosial Lanjut Usia		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.03.01	Layanan Bantuan Kecelakaan Kerja Penderes	Masyarakat	Data Penerima Bantuan Kecelakaan Kerja Penderes	SuratKu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.03.02	Layanan Bantuan Pangan Non Tunai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (BPNT APBD)	Masyarakat	Data Bantuan Pangan Non Tunai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (BPNT APBD)		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.03.03	Layanan Bantuan Sosial Permakanan Anak Balita Terlantar	Masyarakat	Data Penerima Bantuan Sosial Permakanan Anak Balita Terlantar		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.03.04	Layanan Bantuan Sosial Permakanan Klien Dampingan LKS	Masyarakat	Data Penerima Bantuan Sosial Permakanan Klien Dampingan LKS		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.03.05	Layanan Bantuan Sosial Psikotik	Masyarakat	Data Penerima Bantuan Sosial Psikotik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN	Dinas Sosial Pemberdayaan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							PERLINDUNGAN SOSIAL	Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.03.06	Layanan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos)	Masyarakat	Data Surat Keabsahan Penerima Manfaat (SKPM)	Si Pemikat	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.03.07	Layanan Penanganan Jenazah Terlantar	Masyarakat	Data Penanganan Jenazah Terlantar	SuratKu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.04.01	Layanan Aduan Bansos/KKS/KIS	Masyarakat	Data Aduan Bantuan Sosial, Data Aduan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Data Aduan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.04.02	Layanan Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	Masyarakat	Data Surat Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial, Data Surat Rekomendasi Penolakan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	SICANTIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.05.01	Layanan Pengecekan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	Masyarakat	Data Terpadu Sosial Ekonomi Sosial (DTSEN)	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							SOSIAL	
KP-DAL 01.26.05.02	Layanan Pengecekan DTSEN Penerimaan Peserta Didik Baru	Masyarakat	Data Surat Rekomendasi DTSEN Peserta Didik Baru	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.26.06.01	Layanan Informasi Kejadian Bencana	Masyarakat	Data Kejadian Bencana	SIBELAKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAL 01.26.06.02	Layanan Informasi Korban Terdampak Bencana	Masyarakat	Data Korban Terdampak Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAL 01.26.06.03	Layanan Informasi Rawan Bencana	Masyarakat	Data Lokasi Rawan Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAL 01.26.06.04	Layanan Sosialisasi Kebencanaan Untuk Masyarakat	Masyarakat	Data Sosialisasi Kebencanaan Untuk Masyarakat		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAL 01.26.06.05	Layanan Sosialisasi dan Simulasi Bencana kebakaran	Masyarakat	Data Sosialisasi dan Simulasi Bencana kebakaran		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAL 01.26.06.06	Layanan Evakuasi Korban Bencana	Masyarakat	Data Evakuasi Korban Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							PENANGGULANGAN BENCANA	
KP-DAL 01.26.06.07	Layanan Pemadaman Kebakaran	Masyarakat	Data Pemadaman Kebakaran		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAL 01.26.06.08	Layanan Edukasi Dini Bahaya Kebakaran Kepada TK, Paud dan SD	Masyarakat	"Data Edukasi Dini Bahaya Kebakaran Kepada TK, Paud dan SD"		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAL 01.26.06.09	Layanan Penanganan Kondisi Membahayakan Manusia	Masyarakat	Data Penanganan Kondisi Membahayakan Manusia		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAL 01.26.06.10	Layanan Pembinaan Relawan Kebakaran	Masyarakat	Data Pembinaan Relawan Kebakaran		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAL 01.26.06.11	Layanan Peningkatan Kapasitas Aparatur Penanggulangan Bencana	Masyarakat	Data Peningkatan Kapasitas Aparatur Penanggulangan Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAL 01.26.06.12	Layanan Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran	Masyarakat	Data Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAL 01.26.06.13	Layanan Kesiapsiagaan Bencana (Apel Siaga Relawan)	Masyarakat	Data Kesiapsiagaan Bencana (Apel Siaga Relawan)		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							BENCANA	
KP-DAL 01.26.06.14	Layanan Pelatihan Mitigasi Bencana	Masyarakat	Data Pelatihan Mitigasi Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAL 01.26.06.15	Layanan Rekomendasi Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	Masyarakat	Data Estimasi Kerusakan, Data Lokasi Terdampak Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAL 01.26.06.16	Layanan Penanganan Bencana	Masyarakat	Data Korban Bencana, Data Bantuan Korban Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.27.03.01	Layanan Konseling Pemohon Dispensasi Kawin	Masyarakat	Data Surat Keterangan Hasil Konseling		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAL.01.27.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.27.03.02	Layanan Penyedia Pemberdayaan Perempuan	Masyarakat	Data Penyedia Pemberdayaan Perempuan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAL.01.27.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAL 01.27.05.01	Layanan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Masyarakat	Data Dokumen Laporan Hasil Pendampingan Korban Kekerasan, Data Surat Pengantar Permohonan Rujukan Lanjutan	Simfoni PPA, SIGA KEMENPPPA, SIGA JOGJA PROV	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAL.01.27.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL	
KP-DAL 01.28.02.01	Layanan Bantuan Hukum	Masyarakat	Data Penyelesaian Permasalahan Penegakan Hukum, Data Penyelesaian Permasalahan Hukum Perangkat Daerah, Data Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemerintah Kalurahan, Data Penyelesaian Permasalahan Bantuan Hukum, Data Penyelesaian Visum, Data MOU Perjanjian Kerjasama, Data Pembinaan Hukum, Data Rencana Aksi Nasional (RanHAM)	sapaHAM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAL 01.28.02.02	Layanan Produk Hukum Daerah	Masyarakat	Data Informasi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Kalurahan	JDIH, e-Monday, SID	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAL 01.28.02.03	Layanan Konsultasi Hukum Perangkat Daerah	Masyarakat	Data Konsultasi Perangkat Daerah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.28.02.04	Layanan Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum daerah	Masyarakat	Data Monev Produk Hukum daerah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAL 01.28.02.05	Layanan Monitoring dan Evaluasi JDIH	Masyarakat	Data Monev JDIH		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAL 01.28.02.06	Layanan Fasilitasi Keluarga Sadar Hukum	Masyarakat	Data Fasilitasi Keluarga Sadar Hukum		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum
KP-DAL 01.28.02.07	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD	Masyarakat	Data Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD	JDIH DPRD	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Sekretariat DPRD
KP-DAL 01.29.01.01	Layanan Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan Organisasi Masyarakat (ORMAS)	Masyarakat	Data Organisasi Masyarakat (ORMAS)	BangsaKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAL 01.29.01.02	Layanan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Masyarakat	Data Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAL 01.29.01.03	Layanan Ketertiban Umum	Masyarakat	Data Ketertiban Umum		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja
KP-DAL 01.29.02.01	Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda	Masyarakat	Data Pengaduan Pelanggaran Perda, Data Pelanggaran	SP4N-LAPOR	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.02 PENEGAKAN HUKUM	Satuan Polisi Pamong Praja

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
			Perda					
KP-DAL 01.31.01.01	Layanan Komunitas Guru	Masyarakat	Data Guru, Data Komunitas Guru	SIM PKB, SIMBAR, SIM TUN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAL 01.31.01.02	Layanan Sertifikasi Guru	Masyarakat	Data Guru Bersertifikat Pendidik	SIM PKB, SIMBAR, SIM TUN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAL 01.31.02.01	Layanan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP)	Masyarakat	Data Peserta Didik Kurang Mampu	SIPINTAR	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAL 01.31.02.02	Layanan Data Pokok Pendidikan	Masyarakat	Data Peserta Didik, Data Pendidik, Data Tenaga Kependidikan, Data Sarpras Pendidikan, Data Profil Satuan Pendidikan	DAPODIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAL 01.31.02.03	Layanan Legalisir Ijazah	Masyarakat	Data Rekapitulasi Pengajuan Legalisir Ijazah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							MENENGAH	
KP-DAL 01.31.02.04	Layanan Pendidikan Karakter	Masyarakat	Data Pelaksanaan Pendidikan Karakter	SIM PendekarKu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAL 01.31.02.05	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah	Masyarakat	Data Izin Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAL 01.31.02.06	Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru	Masyarakat	"Data Calon Peserta Didik PAUD, SD, SMP"	SPMB	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAL 01.31.02.07	Layanan Pengesahan Dokumen Kurikulum SD, SMP	Masyarakat	"Data Pengesahan Dokumen Kurikulum SD, SMP"		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.31.02.08	Layanan Rapor Pendidikan	Masyarakat	Data Satuan Kependidikan	Raport Pendidikan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAL 01.31.02.09	Layanan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa	Masyarakat	Data Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa	DAPODIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAL 01.31.05.01	Layanan ARKAS Dana BOS	Masyarakat	Data Pelaporan Keuangan BOS, Data Penganggaran BOS, Data Perencanaan BOS	SIM ARKAS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAL 01.31.05.02	Layanan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan	Masyarakat	Data Izin Pendirian Lembaga Pendidikan	DAPODIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAL 01.31.05.03	Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	Masyarakat	Data Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	DAPODIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.32.01.01	Layanan Rekomendasi Izin Mendirikan Balai Latihan Kompetensi Kerja (BLKK)	Masyarakat	Data Rekomendasi Izin Mendirikan LPKS/BLKK		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAL 01.32.01.02	Layanan Pelatihan Kerja	Masyarakat	Data Pelatihan Kerja	SIAP KERJA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAL 01.32.02.01	Layanan Kartu Pencari Kerja	Masyarakat	Data Pencari Kerja	SIAP KERJA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAL 01.32.02.02	Layanan Lowongan Kerja	Masyarakat	Data Penempatan Tenaga Kerja	SIAP KERJA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAL 01.32.02.03	Layanan Rekomendasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Masyarakat	Data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	SIAP KERJA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAL 01.32.03.01	Layanan Identifikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)	Masyarakat	Data Identifikasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB)		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN	Dinas Tenaga Kerja

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	
KP-DAL 01.32.03.02	Layanan Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit	Masyarakat	Data LKS Bipartit		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAL 01.32.03.03	Layanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Masyarakat	Data Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAL 01.32.03.04	Layanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Masyarakat	Data Perjanjian Kerja Bersama	SISNAKER, SIAP KERJA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAL 01.32.03.05	Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Masyarakat	Data Peraturan Perusahaan	SISNAKER, SIAP KERJA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.33.02.01	Layanan Kelitbangan Daerah	Masyarakat	"Data Pengguna, Kapanewon, Perguruan Tinggi", Data Rekom KKN, Data Rekomendasi Kerjasama, Data Riset dan Teknologi Tepat Guna	Inovasi-ku	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAL.01.33.02 RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAL 01.33.02.02	Layanan Klinik Inovasi Daerah	Masyarakat	Data Klinik Inovasi Daerah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAL.01.33.02 RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAL 01.34.01.01	Layanan Pemilihan Osis	Masyarakat	Data Calon Ketua Osis, Data Ketua Osis Terpilih, Data Siswa Pemilih	e-Pemilos	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.34 PEMUDA	RAL.01.34.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAL 01.34.01.02	Layanan Pembentukan Calon Paskibraka	Masyarakat	Data Pembentukan Calon Paskibraka	Paskibraka	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.34 PEMUDA	RAL.01.34.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAL 01.40.01.01	Layanan Pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL	Masyarakat	Data Dokumen Laporan UKL-UPL	e-LingKu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAL 01.40.01.02	Layanan Penerbitan Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	Data Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup	AMDALNET	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAL 01.40.01.03	Layanan Persetujuan Teknis dan Standar	Masyarakat	Data Persetujuan Teknis Pemenuhan	AMDALNET	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PENATAAN	Dinas Lingkungan Hidup

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
	Layak Operasi		Baku Mutu Air Limbah/Emisi dan Standar Layak Operasi				LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	
KP-DAL 01.40.01.04	Layanan Instalasi Pemanenan Air Hujan	Masyarakat	Data Instalasi Pemanenan Air Hujan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAL 01.40.01.05	Layanan Uji Kelayakan Air	Masyarakat	Data Uji Kelayakan Air		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAL 01.40.01.06	Layanan Uji Kelayakan Tanah	Masyarakat	Data Uji Kelayakan Tanah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAL 01.40.01.07	Layanan Uji Kelayakan Udara	Masyarakat	Data Uji Kelayakan Udara		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAL 01.40.02.01	Layanan Keanekaragaman Hayati	Masyarakat	Data Keanekaragaman Hayati		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAL 01.40.02.02	Layanan Reboisasi	Masyarakat	Data Reboisasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.40.04.01	Layanan Informasi Bank Sampah	Masyarakat	Data Timbulan Sampah, Data Informasi Bank Sampah	SIKOMPAS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAL 01.40.04.02	Layanan Pengelolaan Sampah	Masyarakat	Data Pengelolaan Sampah	SIKOMPAS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.04 PENGELOLAAN SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAL 01.41.01.01	Layanan Fasilitasi MTQ/STQ	Masyarakat	Data Fasilitasi MTQ/STQ		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.41 AGAMA	RAL.01.41.01 PEMAHAMAN DAN LAYANAN KEAGAMAAN	Bagian Kesejahteraan Rakyat
KP-DAL 01.41.02.01	Layanan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama	Masyarakat	Data Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.41 AGAMA	RAL.01.41.02 PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAL 01.41.02.02	Layanan Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah	Masyarakat	Data Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah	FKUB	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.41 AGAMA	RAL.01.41.02 PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAL 01.41.02.03	Layanan Bantuan Rumah Ibadah	Masyarakat	Data Penerima Bantuan Rumah Ibadah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.41 AGAMA	RAL.01.41.02 PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	Bagian Kesejahteraan Rakyat
KP-DAL 01.41.08.01	Layanan Fasilitasi Hari Santri	Masyarakat	Data Fasilitasi Hari Santri		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.41 AGAMA	RAL.01.41.08 PENINGKATAN MUTU PESANTREN	Bagian Kesejahteraan Rakyat
KP-DAL 01.41.09.01	Layanan Fasilitasi Haji	Masyarakat	Data Fasilitasi Haji		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.41 AGAMA	RAL.01.41.09 PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN	Bagian Kesejahteraan Rakyat

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							HAJI DAN UMRAH	
KP-DAL 01.42.01.01	Layanan Akte Kelompok Kesenian	Masyarakat	Data Akte Kelompok Kesenian		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAL 01.42.01.02	Layanan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Kesenian	Masyarakat	Data Permohonan Fasilitasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAL 01.42.01.03	Layanan Pengelolaan Taman Budaya Kulon Progo	Masyarakat	Data Peminjaman Taman Budaya		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAL 01.42.01.04	Layanan Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Benda dan Takbenda	Masyarakat	Data Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Benda dan Takbenda		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAL 01.42.01.05	Layanan Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Kebudayaan	Masyarakat	Data Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Kebudayaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAL 01.42.01.06	Layanan Pengelolaan Data Pokok Kebudayaan Daerah	Masyarakat	Data Pokok Kebudayaan Daerah	BUDAYAKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAL 01.42.01.07	Layanan Edukasi Kebudayaan	Masyarakat	Data Edukasi Kebudayaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM	Dinas Kebudayaan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							KEBUDAYAAN	
KP-DAL 01.42.02.01	Layanan Pelestarian Bahasa Daerah dan Sastra Tradisional	Masyarakat	Data Pelestarian Bahasa Daerah dan Sastra Tradisional		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.02 PENGELOLAAN PROGRAM KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAL 01.42.06.01	Layanan Pendidikan Literasi Anak Usia Dini (PELITAKU)	Masyarakat	Data Pengunjung PELITAKU		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAL 01.42.06.02	Layanan Perpustakaan	Masyarakat	Data Sirkulasi Perpustakaan	INLISLite	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAL 01.42.06.03	Layanan Perpustakaan Digital	Masyarakat	Data Sirkulasi Perpustakaan Digital	iKulonprogo	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAL 01.42.06.04	Layanan Perpustakaan Keliling	Masyarakat	Data Pengunjung Perpustakaan Keliling		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAL 01.42.06.05	Layanan Minggu Pagi Kulonprogo Bercerita Membaca dan Mewarnai (MIMPI KURCACI)	Masyarakat	Data Mimpi Kurcaci		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.42.06.06	Layanan Paket Pinjam Buku (PAPIKU)	Masyarakat	Data Paket Pinjam Buku (PAPIKU)		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAL 01.42.06.07	Layanan Jemput Bola Tunanetra	Masyarakat	Data Jemput Bola Tunanetra		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAL 01.42.06.08	Layanan Pojok Baca DIgital (POCADI)	Masyarakat	Data Pengunjung POCADI		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAL 01.42.06.09	Layanan Wisata Buku	Masyarakat	Data Pengunjung Wisata Buku		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAL 01.43.01.01	Layanan Pengelolaan Menara Telekomunikasi	Masyarakat	Data Menara Telekomunikasi	SIDALMENTEL	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.43.01.02	Layanan Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	Masyarakat	Data User Jaringan Intra, Data Aduan Jaringan Intra	Single Sign In Jaringan Intra/Internet Pemda	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.43.02.01	Layanan Pengaduan Insiden Keamanan Informasi	Masyarakat	Data Pengaduan Insiden Keamanan Informasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.43.02.02	Layanan Pembuatan Email Pemerintah	Masyarakat	Data Pembuatan Email Dinas		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.43.02.03	Layanan Pembuatan Website Pemerintah	Masyarakat	Data Pembuatan Website Pemerintah	Website Pemerintahan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.43.02.04	Layanan Penyediaan Pusat Data (Data Center)	Masyarakat	Data User Pusat Data Pemda, Data Aplikasi Pusat Data Pemda		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.43.02.05	Layanan Pengajuan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	Masyarakat	Data Pengajuan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	BeID	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.43.02.06	Layanan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	Masyarakat	Data Sertifikat Elektronik (Digital Signature)	BeID	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.43.02.07	Layanan Portal Aplikasi Pemerintah	Masyarakat	Data User Aplikasi, Data API Aplikasi, Data Pengembangan Aplikasi	JendelaKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.43.03.01	Layanan Informasi Publik	Masyarakat	Data Permohonan Informasi Publik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Bagian Umum
KP-DAL 01.43.03.02	Layanan Peliputan dan Dokumentasi	Masyarakat	Data Peliputan dan Dokumentasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 01.43.03.03	Layanan Permohonan Informasi Publik	Masyarakat	Data Informasi Publik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.43.03.04	Layanan Informasi dan Publikasi	Masyarakat	Data Informasi dan Publikasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.43.03.05	Layanan Analitik Informasi	Masyarakat	Data Analitik Informasi	Media Analitik IKPS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.43.03.06	Layanan Dashboard Pimpinan	Masyarakat	Data Dashboard Pimpinan	Dashboard Pimpinan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.43.04.01	Layanan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Masyarakat	Data Statistik Sektoral	SATUDATA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	RAL.01.43.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.44.02.01	Layanan Pengaduan Masyarakat	Masyarakat	Data Aduan Masyarakat	SP4N-LAPOR	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.44 KOMUNIKASI	RAL.01.44.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.44.02.02	Layanan Helpdesk TIK	Masyarakat	Data Keluhan Aplikasi dan Internet, Data Domain dan Subdomain	Trouble Ticketing System (TTS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.44 KOMUNIKASI	RAL.01.44.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 01.44.02.03	Layanan Aduan Masyarakat Lingkungan	Masyarakat	Data Aduan Lingkungan Hidup Masyarakat	SP4N-LAPOR	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.44 KOMUNIKASI	RAL.01.44.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAL 02.01.01.01	Layanan Pendataan Organisasi Politik	Pemerintah	Data Organisasi Politik (ORPOL)	BangsaKU	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 02.01.01.02	Layanan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila	Pemerintah	Data Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAL 02.01.01.03	Layanan Sosialisasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	Pemerintah	Data Sosialisasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAL 02.01.01.04	Layanan Audiensi DPRD	Pemerintah	Data Audiensi DPRD		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Sekretariat DPRD
KP-DAL 02.01.01.05	Layanan Informasi Kegiatan DPRD	Pemerintah	Data Informasi Kegiatan DPRD		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Sekretariat DPRD
KP-DAL 02.01.01.06	Layanan Jaring Aspirasi	Pemerintah	Data Aspirasi Masyarakat		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Sekretariat DPRD
KP-DAL 02.01.02.01	Layanan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Pemerintah	Data Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.02 OTONOMI DAERAH	Bagian Pemerintahan
KP-DAL 02.01.05.01	Layanan Pembinaan BUMD dan BLUD	Pemerintah	Data Dokumen Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Data Dokumen Kerja Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, Data Penilaian Kinerja BUMD, Data Dokumen Laporan Hasil Monev Kebijakan BUMD/BLUD		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan SDA

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 02.01.05.02	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Pemerintah	Data Kegiatan Monitoring Pengendalian Inflasi, Data Dokumen Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Data Dokumen Laporan Tim Monev KUR, Data Dokumen Laporan Kinerja Lembaga Keuangan Daerah, Data Dokumen Debitur Potensial KUR, Data Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	TPIN, SiTPAKD	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Perekonomian dan SDA
KP-DAL 02.01.07.01	Layanan Administrasi Kependudukan Kelurahan (Akurad)	Pemerintah	Data Administrasi Kependudukan Kelurahan (Akurad)		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.02	Layanan Administrasi Kependudukan Siswa (Semanak)	Pemerintah	Data Administrasi Kependudukan Siswa Semanak		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.03	Layanan Informasi Kependudukan (Gemati)	Pemerintah	Data Informasi Kependudukan (Gemati)	SIDUTAKU	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.04	Layanan Kolaborasi Dokumen Pasca Pernikahan (Kado Nikah)	Pemerintah	Data Akta Perkawinan	SIAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 02.01.07.05	Layanan Legalisasi Dokumen Kependudukan	Pemerintah	Data Legalisasi Dokumen Kependudukan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.06	Layanan Penerbitan Akta Kelahiran (Bela Aktaku)	Pemerintah	Data Akta Kelahiran	SIAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.07	Layanan Penerbitan Akta Kematian	Pemerintah	Data Akta Kematian	SIAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.08	Layanan Penerbitan Akta Pengakuan Anak	Pemerintah	Data Kutipan Akta Pengakuan Anak	SIAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.09	Layanan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak	Pemerintah	Data Kutipan Catatan Pinggir Akta Kelahiran	SIAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.10	Layanan Penerbitan Akta Pengesahan Anak	Pemerintah	Data Kutipan Akta Pengesahan Anak	SIAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.11	Layanan Penerbitan Akta Perceraian	Pemerintah	Data Akta Perceraian	SIAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.12	Layanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pemerintah	Data Kartu Identitas Anak (KIA)	SIAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.13	Layanan Penerbitan Kartu Keluarga	Pemerintah	Data Kartu Keluarga	SIAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.14	Layanan Penerbitan Surat Keterangan	Pemerintah	Data Surat Keterangan Pembatalan Akta	SIAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
	Pembatalan Akta Perceraian		Perceraian		PEMERINTAHAN		PENCATATAN SIPIL	
KP-DAL 02.01.07.15	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan	Pemerintah	Data Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan	SIAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.16	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar	Pemerintah	Data Surat Keterangan Pindah	SIAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.17	Layanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Pemerintah	Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	SIAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.18	Layanan Permohonan Informasi Penduduk	Pemerintah	Data Pemohon Informasi Penduduk		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.19	Layanan Perubahan Status Kewarganegaraan	Pemerintah	Data Perubahan Status Kewarganegaraan	SIAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.01.07.20	Layanan Perubahan/Kehilangan Dokumen Kependudukan	Pemerintah	Data Kehilangan Dokumen Kependudukan, Data Perubahan Dokumen Kependudukan	LakonKU	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.01 DALAM NEGERI	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAL 02.02.01.01	Layanan Penganggaran APBD	Pemerintah	Data Penganggaran APBD	SIPD RI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	Badan Keuangan dan Aset Daerah

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 02.02.02.01	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah	Data Pengelolaan Keuangan Daerah, Data Pendapatan Daerah, Data Penganggaran Daerah	SIPD RI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAL 02.02.02.02	Layanan Pengelolaan Keuangan RS	Pemerintah	Data Anggaran Pendapatan dan Belanja	SIMRS, PANCANAKA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAL 02.02.03.01	Layanan Mobil Layanan Pajak Daerah Kulon Progo (MOLAPADAKU)	Pemerintah	Data Wajib PBB	SISMIOP	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAL 02.02.03.02	Layanan Pajak PBB dan BPHTB	Pemerintah	Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Data Wajib PBB, Data Wajib BPHTB	e-SPPT, e-SPTPD, e-Layanan, e-BPHTB, SISMIOP, MyPBB, myPOTENSI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAL 02.02.03.03	Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Pemerintah	"Data Pajak Restoran, Hotel, Hiburan"	e-SPTPD, e-Layanan, SIMPATDA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAL 02.02.03.04	Layanan Pajak Reklame	Pemerintah	Data Pajak Reklame	SIMPATDA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAL 02.02.03.05	Layanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pemerintah	Data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	SIMPATDA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 02.02.03.06	Layanan Pajak Air Tanah	Pemerintah	Data Pajak Air Tanah	SIMPATDA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAL 02.02.03.07	Layanan Pembayaran Retribusi	Pemerintah	Data Pembayaran Retribusi		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Dinas Perdagangan
KP-DAL 02.02.04.01	Layanan Pencairan Bagi Hasil Desa	Pemerintah	Data Perhitungan Bagi Hasil Desa	SIPD RI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAL 02.02.06.01	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah	Data Aset	SIM-Aset	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAL 02.02.06.02	Layanan Pengelolaan Persediaan	Pemerintah	Data Persediaan	SIM-Persediaan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAL 02.02.08.01	Layanan Penyusunan Laporan Keuangan	Pemerintah	Data Dokumen Laporan Keuangan Pemda (LKPD)	SIPD RI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAL 02.02.10.01	Layanan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Pemerintah	Data Pencairan dan Bukti Transfer Dana Ke Desa	SIPD RI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.10 PENGELOLAAN FISKAL LAINNYA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAL 02.02.11.01	Layanan Konsultasi Pengadaan Elektronik	Pemerintah	Data Layanan Konsultasi		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 02.02.11.02	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik	Pemerintah	Data Pengadaan Barang/Jasa	SPSE, SiRUP, Toko Daring, e-Katalog	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAL 02.02.11.03	Layanan Verifikasi Pelaku Usaha	Pemerintah	Data Pelaku Pengadaan	SiKAP, SPSE	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAL 02.02.11.04	Layanan Pembuatan dan Perubahan Akun Pelaku Pengadaan	Pemerintah	Data Pelaku Pengadaan	SPSE	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAL 02.02.11.05	Layanan Monitoring Data Pengadaan	Pemerintah	Data Monitoring Pengadaan	ePBJKU	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	RAL.02.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAL 02.03.01.01	Layanan Wadah Informasi Geopark	Pemerintah	Data Informasi Pengelolaan Geopark	Geopark Jogja	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAL 02.03.01.02	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Pemerintah	Data Renja, Data Renstra, Data RKPD, Data RPJMD, Data RPJPD	SIPD RI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAL 02.03.01.03	Layanan Fasilitasi CSR Perusahaan	Pemerintah	Data Fasilitasi CSR Perusahaan	CSRKU	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 02.03.02.01	Layanan Kolaborasi Perencanaan dan Kinerja Anggaran DAK	Pemerintah	Data Perencanaan dan Monitoring DAK	Krisna	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.02 PENGANGGARAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAL 02.03.02.02	Layanan Penyusunan Program Anggaran	Pemerintah	Data Perencanaan Penganggaran	SIPPa	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.02 PENGANGGARAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAL 02.03.03.01	Layanan Monitoring Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan	Pemerintah	Data Dokumen Laporan Kegiatan Pembangunan	Monev-ku	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAL 02.03.03.02	Layanan Monitoring Stunting	Pemerintah	Data Stunting dan Anggaran	AKSI BANGDA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAL 02.03.03.03	Layanan Pencapaian Kinerja Daerah	Pemerintah	Data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monev-ku	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAL 02.03.03.04	Layanan Monitoring Program Pembangunan	Pemerintah	Data Kontrak Paket Pekerjaan, Data Progres Pekerjaan, Data Monitoring Program Pembangunan	siMPel	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAL.02.03.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Bagian Administrasi Pembangunan
KP-DAL 02.04.01.01	Layanan Peminjaman Ruangan	Pemerintah	Data Peminjaman Ruangan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Rumah Tangga

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 02.04.01.02	Layanan Penerimaan Proposal Bantuan	Pemerintah	Data Proposal Lembaga Masyarakat		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Umum
KP-DAL 02.04.01.03	Layanan Penomoran Surat	Pemerintah	Data Nomor Surat Keluar		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Umum
KP-DAL 02.04.01.04	Layanan Pengelolaan Agenda Pimpinan	Pemerintah	Data Agenda Pimpinan	SIMAGENDA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Rumah Tangga
KP-DAL 02.04.01.05	Layanan Pembuatan Naskah Sambutan Pimpinan	Pemerintah	Data Naskah Sambutan Pimpinan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Rumah Tangga
KP-DAL 02.04.01.06	Layanan Pengelolaan Kendaraan Dinas Pimpinan Daerah	Pemerintah	Data Kendaraan Dinas Pimpinan Daerah	SIMKD	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Rumah Tangga
KP-DAL 02.04.01.07	Layanan Fasilitasi Publikasi Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	Pemerintah	Data Publikasi Dokumentasi Kegiatan Pimpinan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Rumah Tangga
KP-DAL 02.04.02.01	Layanan Evaluasi Kelembagaan dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Pemerintah	Data Evaluasi Kelembagaan dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Bagian Organisasi
KP-DAL 02.04.02.02	Layanan Analisis Jabatan dan Beban Kerja	Pemerintah	Data Analisis Jabatan	ANJAB ABK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN	Bagian Organisasi
KP-DAL 02.04.03.01	Layanan Cuti Pegawai	ASN/Pegawai	Data Pengajuan Cuti	SIMASNEG	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 02.04.03.02	Layanan Informasi Sekretariat BPKPSDM	ASN/Pegawai	Data Informasi Kegiatan BKPP, Data Informasi Pelayanan BKPP		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.03	Layanan Kartu Istri/Kartu Suami (Karis/Karsu)	ASN/Pegawai	Data Usulan Kartu Istri (Karis), Data Usulan Kartu Suami (Karsu)	SEMAR BKN KANREG 1 Yogyakarta	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.04	Layanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	ASN/Pegawai	Data Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.05	Layanan Kenaikan Pangkat ASN	ASN/Pegawai	Data Kenaikan Pangkat ASN	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.06	Layanan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	ASN/Pegawai	Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	e-LHKPN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.07	Layanan Manajemen Talenta ASN	ASN/Pegawai	Data Manajemen Talenta ASN	EMT	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.08	Layanan Mutasi ASN	ASN/Pegawai	Data SK Mutasi ASN, Data Pertimbangan Teknis Mutasi ASN	SIMUDAH, SIMOLEK, SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 02.04.03.09	Layanan Pengadaan CASN	ASN/Pegawai	Data Pengadaan CASN	SSCASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.10	Layanan Pelanggaran Disiplin Pegawai	ASN/Pegawai	Data Pelanggaran Disiplin Pegawai	I'DIS BKN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.11	Layanan Reward dan Punishment	ASN/Pegawai	Data Reward dan Punishment	ERP	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.12	Layanan Pengajuan Pensiun	ASN/Pegawai	Data Pengajuan Pensiun	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.13	Layanan Pengajuan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	ASN/Pegawai	Data Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	SIOLA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.14	Layanan Pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	ASN/Pegawai	Data Pengajuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)	e-SPJ	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.15	Layanan Pengajuan Tugas Belajar	ASN/Pegawai	Data Pengajuan Tugas Belajar	SIDIK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 02.04.03.16	Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai	ASN/Pegawai	Data Riwayat Pengembangan Kompetensi Pegawai, Data Usulan Pengembangan Kompetensi	SIDIK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.17	Layanan Presensi ASN	ASN/Pegawai	Data Presensi ASN	e-PRESENSI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.18	Layanan Presensi Berbasis Lokasi (GPS)	ASN/Pegawai	Data Presensi ASN Tenaga Guru, Data Presensi Tenaga Kesehatan	PRISCILA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.19	Layanan Profil Kepegawaian ASN	ASN/Pegawai	Data Profil ASN	e-PROFIL	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.20	Layanan Profil Kepegawaian Non ASN	ASN/Pegawai	Data Profil Non ASN	SINONAKU	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.03.21	Layanan Kinerja ASN	ASN/Pegawai	Data Kinerja ASN	e-TPP, e-Kinerja BKN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAL 02.04.04.01	Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pemerintah	Data Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	ESR Menpan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI,	Bagian Organisasi

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	
KP-DAL 02.04.04.02	Layanan Penilaian Kinerja Kapanewon	Pemerintah	Data Evaluasi Kinerja Kapanewon	SIJAKA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Bagian Pemerintahan
KP-DAL 02.04.04.03	Layanan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Pemerintah	Data Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	SIGAP REKOM	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Bagian Pemerintahan
KP-DAL 02.04.04.04	Layanan Tata Kelola Smart City	Pemerintah	Data Regulasi Tata Kelola Smart City	Tauval Kemenpan RB	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAL 02.04.04.05	Layanan Tata Kelola SPBE	Pemerintah	Data Regulasi Tata Kelola SPBE	Tauval Kemenpan RB	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 02.04.04.06	Layanan Aduan Berindikasi Korupsi	Pemerintah	Data Aduan Berindikasi Korupsi	WBS	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAL 02.04.04.07	Layanan Angka Kredit dan Diklat APIP	Pemerintah	Data Angka Kredit dan Diklat APIP	SIBIJAK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAL 02.04.04.08	Layanan Evaluasi Manajemen Risiko	Pemerintah	Data Manajemen Risiko		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAL 02.04.04.09	Layanan Pelaporan Tindakan Gratifikasi	Pemerintah	Data Dokumen Laporan Gratifikasi	UPG-Ku	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAL 02.04.04.10	Layanan Konsultasi Pelayanan Pemerintah	Pemerintah	Data Daftar Konsultasi Pelayanan Pemerintah	Pojok Kopiku	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI	Inspektorat

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
							BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	
KP-DAL 02.04.04.11	Layanan Pengawasan APIP	Pemerintah	Data Pengawasan APIP		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAL 02.04.04.12	Layanan SPIP	Pemerintah	Data SPIP	SPIP Terintegrasi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAL 02.04.04.13	Layanan Tindak Lanjut Pengawasan	Pemerintah	Data Status Tindak Lanjut Pengawasan	SIPTL	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Inspektorat
KP-DAL 02.04.05.01	Layanan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pemerintah	Data Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Bagian Organisasi

ID Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
KP-DAL 02.04.05.02	Layanan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Pemerintah	Data Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Bagian Organisasi
KP-DAL 02.04.05.03	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	Pemerintah	Data Survey Kepuasan Masyarakat	SKMKU	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Bagian Organisasi
KP-DAL 02.04.06.01	Layanan Akses Arsip	Pemerintah	Data Pengunjung, Data Buku Pinjam Arsip		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAL 02.04.06.02	Layanan Akses Daftar Arsip Aktif-Inaktif	Pemerintah	Data Pengelolaan Arsip OPD		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAL 02.04.06.03	Layanan Informasi Kearsipan	Pemerintah	Data Informasi Arsip	SIKN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAL 02.04.06.04	Layanan Pengelolaan Arsip Dinamis Digital	Pemerintah	Data Arsip Dinamis Digital	SRIKANDI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAL 02.04.06.05	Layanan Pengelolaan Arsip Statis Digital	Pemerintah	Data Arsip Statis Digital	SIKN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	RAL.02.04.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3.2.3.2. Analisis Diagram Layanan

Merujuk pada hasil pemetaan layanan pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data *eksisting* dapat dijabarkan sebagai berikut:

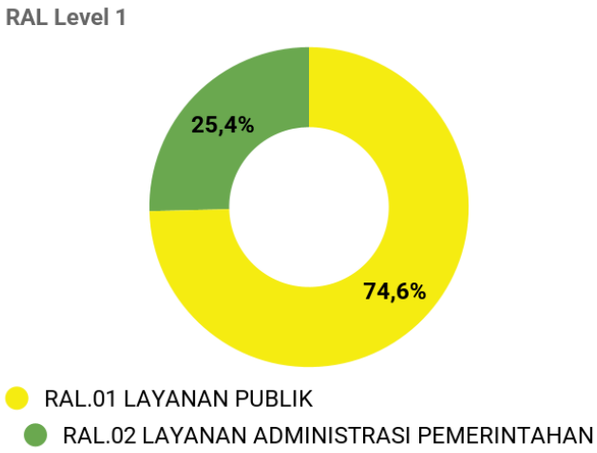

Grafik 3.2.3.2.1. Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan RAL Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan grafik 3.2.3.2.1 serta mengacu pada Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional (RAL Level 1) dari total 429 layanan yang dimiliki, terdapat 74.6% (320 Layanan) merupakan RAL.01 Layanan Publik dan sebesar 25.4% (109 Layanan) merupakan RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan. Mengacu pada referensi arsitektur ini, mayoritas layanan yang ada merupakan layanan publik untuk masyarakat dimana Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat menjadikannya sebagai panduan untuk memfasilitasi kerjasama antara instansi pemerintah/perangkat daerah dalam pengembangan layanan publik dan juga membantu pemerintah dalam merancang dan mengembangkan sistem administrasi pemerintahan yang terintegrasi, efisien, dan transparan.

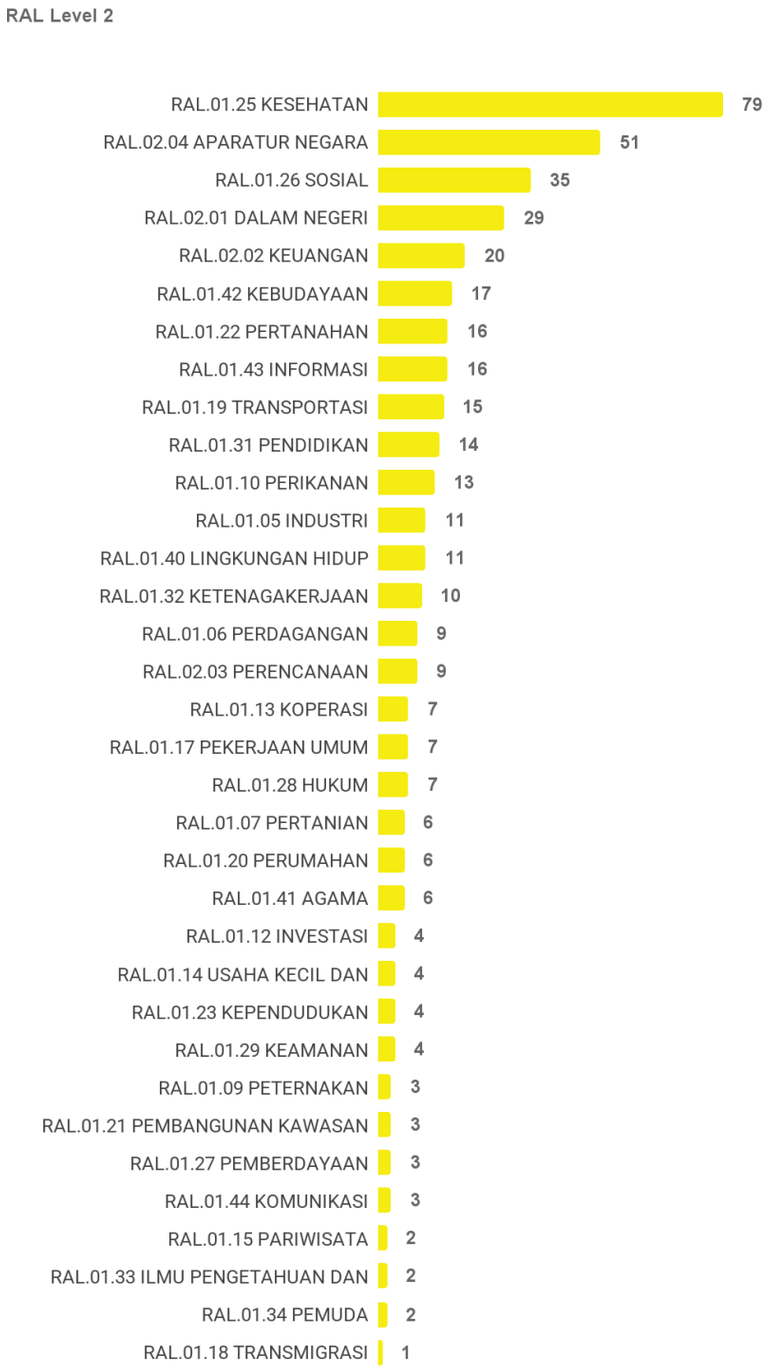

Grafik 3.2.3.2.2 Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan RAL Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Grafik 3.2.3.2.2 dapat dilihat RAL Level 2 yang paling banyak adalah RAL.01.25 Kesehatan sejumlah 79 layanan, RAL.02.04 Aparatur Negara sejumlah 51 layanan dan RAL.01.26 Sosial sejumlah 35 layanan. Referensi Arsitektur Layanan Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mencakup 34 Referensi dari 52 Arsitektur Layanan Nasional. Perbedaan pada jumlah layanan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah menyesuaikan pada tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini tentunya bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

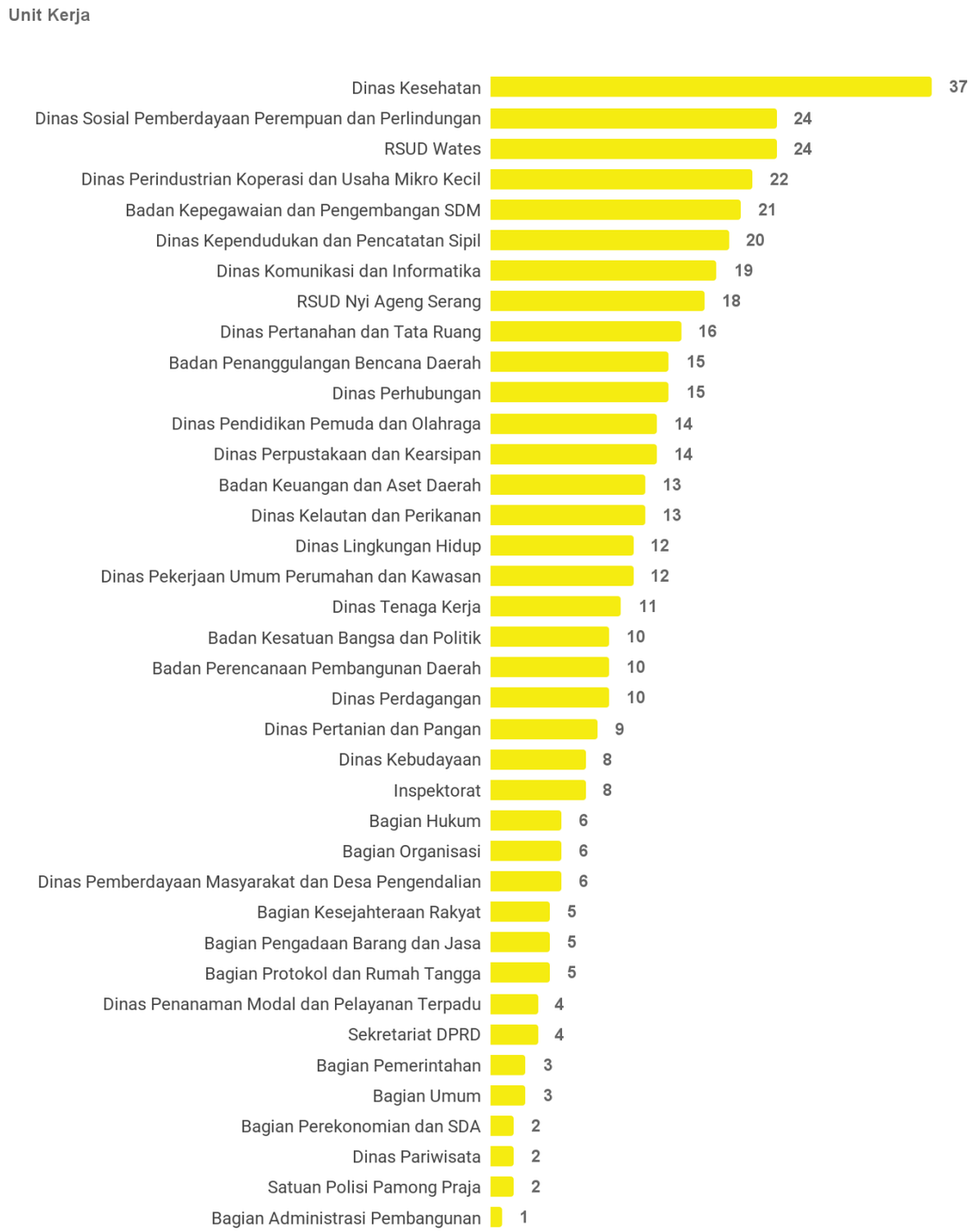

Grafik 3.2.3.2.3. Grafik Jumlah Layanan pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan grafik 3.2.3.2.3. menunjukkan bahwa layanan paling banyak dimiliki oleh Dinas Kesehatan sejumlah 37 layanan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejumlah 24 layanan. Sedangkan paling sedikit berada pada Bagian Administrasi Pembangunan yang hanya memiliki 1 layanan. Berdasarkan hasil survei, keseluruhan layanan yang dimiliki oleh perangkat daerah memerlukan verifikasi agar layanan dapat terstandarisasi serta memastikan layanan tersebut berjalan optimal.

3.2.4. Arsitektur Aplikasi

Arsitektur aplikasi berisi gambaran mengenai berbagai komponen seperti nama aplikasi, basis aplikasi, basis data. Arsitektur layanan juga menggambarkan keterkaitan antara aplikasi dengan layanan dan output datanya. Arsitektur ini disusun bertujuan untuk menyediakan panduan dan struktur untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat berfungsi secara optimal, memiliki keamanan yang memadai, dan terintegrasi dengan aplikasi lainnya.

3.2.4.1. Katalog Aplikasi

Aplikasi dalam Arsitektur SPBE Nasional merupakan sebuah aplikasi internal daerah maupun instansi pusat yang digunakan dalam menunjang layanan seluruh perangkat daerah. Berikut ini disajikan daftar aplikasi *eksisting* yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo baik aplikasi dari instansi pusat maupun aplikasi internal daerah. Katalog disusun berdasarkan Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) Level 1 dan 2 mengacu pada referensi arsitektur aplikasi SPBE nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog aplikasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. **Metadata katalog aplikasi yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dapat diakses pada link: https://bit.ly/MetadataSPBEKulon Progo di sheet Aplikasi.**

Tabel 3.2.4.1.1. Cuplikan Katalog Aplikasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 01.01.01	SIMASNEG	Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara	http://simasneg.kulonprogokab.go.id/simasneg/	Layanan Cuti Pegawai	Data Pengajuan Cuti	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 01.01.02	e-BPHTB	Sistem Informasi Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak BPHTB	http://mapatda.kulonprogokab.go.id/ebphtb/	Layanan Pajak PBB dan BPHTB	Data Wajib BPHTB	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Keuangan dan Aset Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 01.01.03	e-Layanan	Sistem Informasi Pengajuan BPHTB dan PBB P2	https://elayananpbb.kulonprogokab.go.id/	Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Layanan Pajak PBB dan BPHTB	"Data Pajak Restoran, Hotel, Hiburan", Data Wajib BPHTB	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 01.01.04	e-SPPT	Sistem Informasi SPPT Elektronik (Salah satu bentuk pemutakhiran dan pengembangan aplikasi SISMIOP adalah aplikasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik (e-SPPT)	https://esppt.kulonprogokab.go.id/	Layanan Pajak PBB dan BPHTB	Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 01.01.05	siMPel	Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah		Layanan Monitoring Program Pembangunan	Data Monitoring Program Pembangunan, Data Kontrak Paket Pekerjaan, Data Progres Pekerjaan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Bagian Administrasi Pembangunan
KP-DAA 01.01.06	MyPBB	Sistem Informasi Pembayaran Pajak Bumi Bangunan		Layanan Mobil Layanan Pajak Daerah Kulon Progo (MOLAPADAKU)	Data Wajib PBB	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Keuangan dan Aset Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 01.01.07	SISMIOP	Sistem Informasi Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak PBB		Layanan Mobil Layanan Pajak Daerah Kulon Progo (MOLAPADAKU)	Data Wajib PBB	Desktop	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 01.01.08	SIBELAKU	Sistem Informasi Bencana Alam Kulon Progo	sibelaku.kulonprogokab.go.id	Layanan Informasi Kejadian Bencana	Data Kejadian Bencana	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAA 01.01.09	Geopark Jogja	Sistem informasi geosait (situs warisan geologi), Biosait (situs keragaman hayati), Kultursait (situs warisan/keragaman budaya), serta situs keaneka ragaman geologi yg masuk dalam kawasan geopak(taman bumi Jogya)	https://geoparkjogja.jogjaprov.go.id/	Layanan Wadah Informasi Geopark	Data Informasi Pengelolaan Geopark	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAA 01.01.10	SKMKU	Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat Kulon Progo	https://skmku.kulonprogokab.go.id/production/index.php	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	Data Survey Kepuasan Masyarakat	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Bagian Organisasi
KP-DAA 01.01.11	SETITI	Sistem Pengawasan Ikan Anti Formalin		Layanan Informasi Harga Ikan dan Pemasaran Produk Perikanan	Data Harga Pasar dan Saluran Distribusi Produk Perikanan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kelautan dan Perikanan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 01.01.12	SIPTM	Portal pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan primer dari Kementerian Kesehatan.	https://sehatindonesiaku.kemkes.go.id/auth/login	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Data Kasus Penyakit Tidak Menular (PTM)	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
KP-DAA 01.01.13	SI DABU	Aplikasi e-Daftar Badan Usaha (e-DABU) milik BPJS Kesehatan.	edabu.bpjs-kesehatan.go.id	Layanan Pengelolaan Jaminan Kesehatan, Layanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN), Layanan Usulan Penerima Bantuan PBI Pemda	Data Peserta dan Cakupan Jaminan Kesehatan, Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN), Data Surat Rekomendasi Penerima Bantuan Iuran APBD (Jamkesda)	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
KP-DAA 01.01.14	SIMPUS	Sistem Informasi Data Kunjungan dan Diagnosa Pasien		Layanan Kesehatan Dasar Puskesmas	Data Cakupan Layanan Puskesmas	Desktop	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
KP-DAA 01.01.15	SIMPEDU	Sistem Informasi Puskesmas Terpadu		Layanan Kesehatan Dasar Puskesmas	Data Cakupan Layanan Puskesmas	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
KP-DAA 01.01.16	SP4N-LAPOR	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional /	https://www.lapor.go.id	Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Pengaduan	Data Aduan Masyarakat, Data Pengaduan Pelanggaran Perda,	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat		Pelanggaran Perda, Layanan Aduan Masyarakat Lingkungan	Data Pelanggaran Perda, Data Aduan Lingkungan Hidup Masyarakat					
KP-DAA 01.01.17	JendelaKU	Sistem Informasi Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan dalam Satu Portal	jendelaku.kulonprogokab.go.id	Layanan Portal Aplikasi Pemerintah	Data User Aplikasi, Data API Aplikasi, Data Pengembangan Aplikasi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAA 01.01.18	SATUDATA	Sistem Informasi Portal Digital Data Terbuka	satudata.kulonprogokab.go.id	Layanan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data Statistik Sektoral	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAA 01.01.19	DJKI	Sistem Informasi DJKI	dgip.go.id	Layanan Fasilitasi Pendaftaran HKI	Data UMKM HKI	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAA 01.01.20	ODS	Sistem Informasi Koperasi Aktif dan Tidak Aktif	ods.kemenkop.go.id	Layanan ODS	Data Koperasi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAA 01.01.21	OSS	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha	https://oss.go.id/	Layanan Perizinan Fasilitas Kesehatan, Layanan Fasilitasi Pendaftaran NIB, Layanan Fasilitasi Izin Usaha Simpan	Data Perizinan Sarana Kesehatan, Data Izin Usaha Simpan Pinjam KSP/USP, Data UMKM Legalitas Usaha,	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Pinjam, Layanan Perizinan Berusaha, Layanan Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG), Layanan Rekomendasi Pendirian Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan Waralaba, Layanan Pemberian Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol	Data Perizinan Berusaha, Data Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG), Data Penerbitan Perizinan Usaha (Surat Hasil Verifikasi), Data Penerbitan Perizinan (Surat Rekomendasi) Pusat Perbelanjaan, Data Penerbitan Perizinan (Surat Rekomendasi) Toko Swalayan Waralaba, Data Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol					
KP-DAA 01.01.22	SICANTIK	Sistem Informasi Perizinan Non Berusaha	https://sicantik.go.id/	Layanan Perizinan Non Berusaha, Layanan Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial, Layanan	Data Perizinan Non Berusaha, Data Surat Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial,	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				SIP NAKES, Layanan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	Data Surat Rekomendasi Penolakan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial, Data Surat izin Penyehat Tradisional, Data Sertifikat Izin Praktek					
KP-DAA 01.01.23	SPMB	Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru	https://kulonprogo.spmb.id/#/	Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru	"Data Calon Peserta Didik PAUD, SD, SMP"	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAA 01.01.24	SIKEPOKU	Sistem Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Kulon Progo	https://sikepoku.kulonprogokab.go.id/	Layanan Informasi Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Data Pantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Pasar Daerah	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perdagangan
KP-DAA 01.01.25	SP2KP	Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok	https://sp2kp.kemendag.go.id/	Layanan Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Nasional	Data Pantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Pasar Nasional	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perdagangan
KP-DAA 01.01.26	e-Retribusi	Sistem Informasi Pelaporan Transaksi Keuangan Pengujian Kendaraan Bermotor	saget.bpddiy.co.id	Layanan Pembayaran Parkir Online	Data Retribusi Pengelolaan Parkir	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perhubungan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 01.01.27	SIKN	Sistem Informasi Kearsipan Nasional	https://sikn.go.id	Layanan Informasi Kearsipan, Layanan Pengelolaan Arsip Statis Digital	Data Informasi Arsip, Data Arsip Statis Digital	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAA 01.01.28	BPH Xstar Migas	Portal resmi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.	https://www.bphmigas.go.id/	Layanan Rekomendasi BBM, Layanan Permohonan Rekomendasi Pembelian BBM	Data Keterangan Beli BBM, Data Surat Rekomendasi Pembelian BBM	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Kelautan dan Perikanan
KP-DAA 01.01.29	Simfoni PPA	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA).	https://kekerasan.kemenpppa.go.id	Layanan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Data Dokumen Laporan Hasil Pendampingan Korban Kekerasan, Data Surat Pengantar Permohonan Rujukan Lanjutan	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAA 01.01.30	SIAP KERJA	Sistem Informasi Aplikasi Pencari Kerja	siapkerja.kemnaker.go.id	Layanan Rekomendasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Layanan Pelatihan Kerja, Layanan Kartu Pencari Kerja, Layanan Lowongan Kerja,	Data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Data Pelatihan Kerja, Data Pencari Kerja, Data Penempatan Tenaga Kerja, Data Peraturan Perusahaan, Data Perjanjian	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Tenaga Kerja

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), Layanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Kerja Bersama					
KP-DAA 01.01.31	WBS	Sistem Informasi Website Pelaporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana	http://wbs.kulonprogokab.go.id/wbs	Layanan Aduan Berindikasi Korupsi	Data Aduan Berindikasi Korupsi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Inspektorat
KP-DAA 01.01.32	Pojok Kopiku	Sistem Informasi Pojok Konsultasi Pengawasan Intern Kulon Progo	https://inspektorat.kulonprogokab.go.id/detil/1546/pojok-kopi-ku	Layanan Konsultasi Pelayanan Pemerintah	Data Daftar Konsultasi Pelayanan Pemerintah	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Inspektorat
KP-DAA 01.01.33	Media Analitik IKPS	Platform Analitik IKPS		Layanan Analitik Informasi	Data Analitik Informasi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAA 01.02.01	I'DIS BKN	Sistem informasi pelaporan proses pelanggaran disiplin secara terintegrasi dengan sistem SAPK BKN	https://idis-siasn.bkn.go.id/	Layanan Pelanggaran Disiplin Pegawai	Data Pelanggaran Disiplin Pegawai	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 01.02.02	e-TPP	Sistem Informasi Menampilkan Hasil Kerja Aparatur	https://etpp.kulonprogokab.go.id/login.php?psn=1	Layanan Kinerja ASN	Data Kinerja ASN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		Sipil Negara							PEMERINTAHAN	SDM
KP-DAA 01.02.03	e-SPJ	Sistem Informasi internal Penatausahaan Keuangan BKPP Kab. Kulon Progo		Layanan Pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	Data Pengajuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 01.02.04	SEMAR BKN KANREG 1 Yogyakarta	Sistem Informasi Manajemen ASN ter-Rekonsiliasi	http://semar.kanreg1bkn.id/semar/	Layanan Kartu Istri/Kartu Suami (Karis/Karsu)	Data Usulan Kartu Istri (Karis), Data Usulan Kartu Suami (Karsu)	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 01.02.05	SIMUDAH	Sistem Informasi Mutasi Daerah		Layanan Mutasi ASN	Data SK Mutasi ASN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 01.02.06	e-LHKPN	Sistem Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	https://elhkpn.kpk.go.id/	Layanan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Web Based	Oracle	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 01.02.07	SIMOLEK	Sistem Informasi Layanan Mutasi Masuk Elektronik	https://simolek.kulonprogokab.go.id/	Layanan Mutasi ASN	Data Pertimbangan Teknis Mutasi ASN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 01.02.08	SIOLA	Sistem Informasi Online Layanan Administrasi	https://siasn-instansi.bkn.go.id	Layanan Pengajuan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	Data Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 01.02.09	SIASN	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	https://siasn.bkn.go.id/	Layanan Kenaikan Pangkat ASN, Layanan Pengajuan Pensiun, Layanan Mutasi ASN	Data Kenaikan Pangkat ASN, Data Pengajuan Pensiun, Data Pertimbangan Teknis Mutasi ASN	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 01.02.10	e-PRESENSI	Sistem Informasi Presensi Digital Aparatur Sipil Negara	https://epresensi.kulonprogokab.go.id/login.php?psn=1	Layanan Presensi ASN	Data Presensi ASN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 01.02.11	SSCASN	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	https://sscasn.bkn.go.id/	Layanan Pengadaan CASN	Data Pengadaan CASN	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 01.02.12	SINONAKU	Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian Non ASN	https://sinonaku.kulonprogokab.go.id/production/login	Layanan Profil Kepegawaian Non ASN	Data Profil Non ASN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 01.02.13	e-PROFIL	Sistem Informasi Data dan Riwayat Kepegawaian Aparatur Sipil Negara	http://simasneg.kulonprogokab.go.id	Layanan Profil Kepegawaian ASN	Data Profil ASN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 01.02.14	PRISCILA	Sistem Informasi Presensi Digital	http://simasneg.kulonprogokab.go.id	Layanan Presensi Berbasis Lokasi (GPS)	Data Presensi ASN Tenaga Guru, Data Presensi Tenaga Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 01.02.15	EMT	Electronic Management	http://simasneg.kulonprogokab.go.i	Layanan Manajemen	Data Manajemen Talenta ASN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI	Badan Kepegawaian dan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		Talenta	d/simasneg/	Talenta ASN					ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Pengembangan SDM
KP-DAA 01.02.16	e-Kinerja BKN	Elektronik Kinerja BKN	https://kinerja.bkn.go.id/	Layanan Kinerja ASN	Data Kinerja ASN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 01.02.17	SIM-Aset	Sistem Informasi Manajemen Aset	http://aset.kulonprogokab.go.id	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data Aset	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 01.02.18	SIM-Persediaan	Sistem Informasi Persediaan	http://persediaan.kulonprogokab.go.id	Layanan Pengelolaan Persediaan	Data Persediaan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 01.02.19	e-SPTPD	Sistem Informasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	https://esptpd.kulonprogokab.go.id/	Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Layanan Pajak PBB dan BPHTB	"Data Pajak Restoran, Hotel, Hiburan", Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 01.02.20	SIMPATDA	Sistem Informasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB dan Sistem Aplikasi Pengelola Administrasi Pendapatan	simpatda.kulonprogokab.go.id	Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Layanan Pajak Reklame, Layanan Pajak Mineral Bukan Logam dan	"Data Pajak Restoran, Hotel, Hiburan", Data Pajak Reklame, Data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Data Pajak	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		Daerah		Batuan, Layanan Pajak Air Tanah	Air Tanah					
KP-DAA 01.02.21	Monev-ku	Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Perencanaan Pembanguan Daerah	http://monevku.kulonprogokab.go.id/	Layanan Monitoring Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan	Data Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Data Dokumen Laporan Kegiatan Pembangunan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAA 01.02.22	Inovasi-ku	Sistem Informasi Penelitian Pembangunan Kabupaten Kulon Progo	https://inovasiku.mgsilabs.com/	Layanan Kelitbangan Daerah	Data Riset dan Teknologi Tepat Guna	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAA 01.02.23	Krisna	Sistem Informasi Proses Perencanaan Penganggaran, serta Pelaporan Informasi Kinerja Daerah	https://kulonprogokab.krisna.systems/gov2login.php?cmd=login	Layanan Kolaborasi Perencanaan dan Kinerja Anggaran DAK	Data Perencanaan dan Monitoring DAK	Web Based	Oracle	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAA 01.02.24	SIPD RI	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	https://sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Layanan Pencairan Bagi Hasil Desa, Layanan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Layanan	Data RPJMD, Data Renstra, Data RPJPD, Data Renja, Data RKPD, Data Perhitungan Bagi Hasil Desa, Data Pencairan dan Bukti Transfer Dana Ke Desa,	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Penganggaran APBD, Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah, Layanan Penyusunan Laporan Keuangan	Data Penganggaran APBD, Data Pengelolaan Keuangan Daerah, Data Pendapatan Daerah, Data Penganggaran Daerah, Data Dokumen Laporan Keuangan Pemda (LKPD)					
KP-DAA 01.02.25	JDIH	Sistem Informasi Produk Hukum Daerah dan Dokumentasi Hukum lainnya	jdih.kulonprogokab.go.id	Layanan Produk Hukum Daerah	Data Informasi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Kalurahan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Hukum
KP-DAA 01.02.26	sapaHAM	Sistem Informasi Bantuan Hukum dan HAM	https://sapaham.kemenkumham.go.id/	Layanan Bantuan Hukum	Data Penyelesaian Permasalahan Penegakan Hukum, Data Penyelesaian Permasalahan Hukum Perangkat Daerah, Data Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemerintah Kalurahan, Data Penyelesaian Permasalahan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Hukum

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Bantuan Hukum, Data Penyelesaian Visum, Data MOU Perjanjian Kerjasama, Data Pembinaan Hukum, Data Rencana Aksi Nasional (RanHAM)					
KP-DAA 01.02.27	ePBJKU	Aplikasi pengadaan barang/jasa untuk internal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.	https://e-pbjku.kulonprogokab.go.id/	Layanan Monitoring Data Pengadaan	Data Monitoring Pengadaan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAA 01.02.28	SID	Subportal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk regulasi tingkat kalurahan di Kabupaten Kulon Progo.	https://jdih.kulonprogokab.go.id/kalurahan	Layanan Produk Hukum Daerah	Data Informasi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Kalurahan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Hukum
KP-DAA 01.02.29	e-Monday	Sistem Informasi Koordinasi Hukum	monday.sapamonday.web.id	Layanan Produk Hukum Daerah	Data Informasi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Kalurahan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Hukum

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 01.02.30	ESR Menpan	Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Secara Elektronik	https://esr.menpan.go.id/	Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Data Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Organisasi
KP-DAA 01.02.31	ANJAB ABK	Aplikasi resmi Kemendagri untuk penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) secara elektronik oleh pemerintah daerah.	https://anjababk-simona.kemendagri.go.id/home/monitoring	Layanan Analisis Jabatan dan Beban Kerja	Data Analisis Jabatan	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Organisasi
KP-DAA 01.02.32	SIGAP REKOM	Sistem Informasi Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban	https://pemerintahanku.kulonprogokab.go.id/sigap-rekom/	Layanan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Data Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pemerintahan
KP-DAA 01.02.33	SIJAKA	Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Kapanewon	https://pemerintahanku.kulonprogokab.go.id/sijaka/login	Layanan Penilaian Kinerja Kapanewon	Data Evaluasi Kinerja Kapanewon	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pemerintahan
KP-DAA 01.02.34	e-Katalog	Sistem Informasi Belanja Online	e-katalog.lkpp.go.id	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik	Data Pengadaan Barang/Jasa	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 01.02.35	SiKAP	Sistem Informasi Kinerja Penyedia	sikap.lkpp.go.id	Layanan Verifikasi Pelaku Usaha	Data Pelaku Pengadaan	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAA 01.02.36	SiRUP	Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan	sirup.lkpp.go.id	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik	Data Pengadaan Barang/Jasa	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAA 01.02.37	Toko Daring	Sistem Informasi e-Purchasing Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang Bekerjasama Dengan PPMSE	tokodaring.lkpp.go.id	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik	Data Pengadaan Barang/Jasa	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAA 01.02.38	SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik	lpse.kulonprogokab.go.id	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik, Layanan Verifikasi Pelaku Usaha, Layanan Pembuatan dan Perubahan Akun Pelaku Pengadaan	Data Pengadaan Barang/Jasa, Data Pelaku Pengadaan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAA 01.02.39	SiTPAKD	Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	https://sitpakd.ojk.go.id/	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Data Dokumen Laporan Kinerja Lembaga Keuangan Daerah, Data Dokumen	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Perekonomian dan SDA

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Data Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah					
KP-DAA 01.02.40	TPIN	Sistem Informasi terkait Laporan Pengendalian Inflasi	https://tpin.id/	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Data Kegiatan Monitoring Pengendalian Inflasi	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Perekonomian dan SDA
KP-DAA 01.02.41	SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	https://web.dukcapil.kemendagri.go.id/web/	Layanan Penerbitan Kartu Keluarga, Layanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Layanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar, Layanan Penerbitan Akta Kelahiran (Bela	Data Kartu Keluarga, Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Data Kartu Identitas Anak (KIA), Data Surat Keterangan Pindah, Data Akta Kelahiran, Data Akta Kematian, Data Akta Perkawinan, Data Surat	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Aktaku), Layanan Penerbitan Akta Kematian, Layanan Kolaborasi Dokumen Pasca Pernikahan (Kado Nikah), Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan, Layanan Penerbitan Akta Perceraian, Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perceraian, Layanan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak, Layanan Penerbitan Akta Pengakuan Anak, Layanan Penerbitan Akta Pengesahan Anak,	Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan, Data Akta Perceraian, Data Surat Keterangan Pembatalan Akta Perceraian, Data Kutipan Catatan Pinggir Akta Kelahiran, Data Kutipan Akta Pengakuan Anak, Data Kutipan Akta Pengesahan Anak, Data Perubahan Status Kewarganegaraan					

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Layanan Perubahan Status Kewarganegaraan						
KP-DAA 01.02.42	LakonKU	Sistem Informasi Pendukung Permohonan Pelayanan Admin Kependudukan	lakonku.dukcapil.kulonprogokab.go.id	Layanan Perubahan/Kehilangan Dokumen Kependudukan	Data Perubahan Dokumen Kependudukan, Data Kehilangan Dokumen Kependudukan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAA 01.02.43	SIDUTAKU	Sistem Informasi Agregat Data Kependudukan	https://data.dukcapil.kulonprogokab.go.id/	Layanan Informasi Kependudukan (Gemati)	Data Informasi Kependudukan (Gemati)	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KP-DAA 01.02.44	Tauval Kemenpan RB	Sistem Informasi Kerangka Acuan Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja SPBE dan Smart City	tauval.spbe.go.id	Layanan Tata Kelola SPBE, Layanan Tata Kelola Smart City	Data Regulasi Tata Kelola SPBE, Data Regulasi Tata Kelola Smart City	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAA 01.02.45	SIINas	Sistem Informasi Industri Nasional	https://siinas.kemenperin.go.id/	Layanan Informasi Industri Nasional, Layanan Pendataan dan Registrasi Pelaku Industri	Data Informasi Perindustrian, Data Pelaku Industri	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAA 01.02.46	SRIKANDI	Aplikasi Kearsipan Dinamis	srikandi.arsip.go.id	Layanan Pengelolaan Arsip Dinamis Digital	Data Arsip Dinamis Digital	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 01.02.47	SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (Kemensos)	siks.kemensos.go.id	Layanan Pengecekan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Layanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN), Layanan Pengecekan DTSEN Penerimaan Peserta Didik Baru, Layanan Reaktivasi Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran	Data Terpadu Sosial Ekonomi Sosial (DTSEN), Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN), Data Surat Rekomendasi DTSEN Peserta Didik Baru, Data Surat Rekomendasi Reaktivasi KIS PBI	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAA 01.02.48	SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut BPK RI	https://eauditee.bpk.go.id/	Layanan Tindak Lanjut Pengawasan	Data Status Tindak Lanjut Pengawasan	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Inspektorat
KP-DAA 01.02.49	UPG-Ku	Sistem Informasi Unit Pengendalian Gratifikasi Kulon Progo	https://inspektorat.kulonprogokab.go.id/	Layanan Pelaporan Tindakan Gratifikasi	Data Dokumen Laporan Gratifikasi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Inspektorat
KP-DAA 01.02.50	SIBIJAK	Sistem Informasi Manajemen Angka	https://sibijak.bpkp.go.id/	Layanan Angka Kredit dan Diklat	Data Angka Kredit dan Diklat APIP	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI	Inspektorat

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		Kredit dan Diklat APIP		APIP					ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
KP-DAA 01.02.51	SPIP Terintegrasi	Sistem Informasi Evaluasi SPIP	https://spipterintegrasi.bpkp.go.id/	Layanan SPIP	Data SPIP	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Inspektorat
KP-DAA 01.02.52	JDIH DPRD	Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	https://jdih.dprd-kulonprogokab.go.id	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD	Data Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Sekretariat DPRD
KP-DAA 01.02.53	SIKOMPAS	Sistem Informasi Kompensasi dan Penghargaan ASN Kulon Progo.	https://sikompas.kulonprogokab.go.id/	Layanan Informasi Bank Sampah, Layanan Pengelolaan Sampah	Data Informasi Bank Sampah, Data Timbulan Sampah, Data Pengelolaan Sampah	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAA 01.02.54	BUDAYAKU	Sistem Informasi Data Pokok Kebudayaan Kulon Progo		Layanan Pengelolaan Data Pokok Kebudayaan Daerah	Data Pokok Kebudayaan Daerah	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAA 02.01.01	ERP	Sistem Informasi Reward and Pusihment		Layanan Reward dan Punishment	Data Reward dan Punishment	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
KP-DAA 02.01.02	SIDIK	Sistem Informasi Diklat	http://simasneg.kulonprogokab.go.id/simasneg/	Layanan Pengajuan Tugas Belajar, Layanan Pengembangan Kompetensi	Data Pengajuan Tugas Belajar, Data Riwayat Pengembangan Kompetensi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Pegawai	Pegawai, Data Usulan Pengembangan Kompetensi					
KP-DAA 02.01.03	Paskibraka	Portal resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk seleksi dan pembinaan Paskibraka.	https://paskibraka.bpip.go.id/	Layanan Pembentukan Calon Paskibraka	Data Pembentukan Calon Paskibraka	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAA 02.01.04	SIPPa	Sistem Informasi Keterpaduan Insfrastuktur Pemukiman	https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa/	Layanan Penyusunan Program Anggaran	Data Perencanaan Penganggaran	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAA 02.01.05	AKSI BANGDA	Sistem Informasi Monitoring Data Stunting (Anggaran dan Stunting)	https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/	Layanan Monitoring Stunting	Data Stunting dan Anggaran	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAA 02.01.06	SimoKu	Sistem Informasi Pengelola Obat	simoku.kulonprogokab.go.id	Layanan Kefarmasian, Layanan Pengadaan dan Distribusi Obat dan Alkes	Data Obat, Data Ketersediaan dan Distribusi Obat dan Alat Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.01.07	IKANKU	Sistem Informasi Perikanan dan Kelautan Kulon Progo	https://ikanku.kulonprogokab.go.id/	Layanan Permohonan Rekomendasi Pembelian BBM,	Data Surat Rekomendasi Pembelian BBM, Data Identitas dan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kelautan dan Perikanan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Layanan Pendataan Nelayan dan Pembudidaya	Aktivitas Nelayan dan Pembudidaya					
KP-DAA 02.01.08	SIGIZI Terpadu	Sistem Informasi Gizi Terpadu dari Kementerian Kesehatan.	https://sigiziterpadu.kemkes.go.id/	Layanan Gizi Masyarakat dan Pencegahan Stunting	Data Status Gizi Balita dan Ibu Hamil	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.01.09	SIM KIA	Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak		Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Layanan Kesehatan Lansia dan Disabilitas	Data Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Data Pelayanan Kesehatan Lansia dan Disabilitas	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.01.10	SISKOHATKES	Sistem Informasi Kesehatan Haji Terintegrasi milik Kementerian Kesehatan.	https://siskohatkes.kemkes.go.id/authenticate/login	Layanan Pengelolaan Kesehatan Jemaah Haji	Data Kesehatan Jemaah Haji	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.01.11	SIMKESWA	Sistem Informasi Kesehatan Jiwa milik Kemenkes.	https://simkeswa.kemkes.go.id/login	Layanan Pengelolaan Kesehatan Jiwa	Data Kesehatan Jiwa	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.01.12	SKDR	Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons Kementerian Kesehatan.	https://skdr.surveilans.id/auth	Layanan Monitoring Evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Data Monev Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.01.13	MPDN	Aplikasi Monitoring dan	https://mpdn.kemkes.go.id/masuk	Layanan Maternal Perinatal	Data Maternal Perinatal	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		Pelaporan Dana Non-Fisik Bidang Kesehatan.							TERTENTU	
KP-DAA 02.01.14	SLHS	Sistem Informasi Layanan Hygiane Sanitasi		Layanan Sertifikat Higiene Sanitasi Makanan	Data Sertifikat Higiene Sanitasi Makanan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.01.15	SIMUNDU	Sistem Informasi Imunisasi Dasar Lanjutan Terpadu		Layanan Imunisasi Dasar dan Lanjutan	Data Cakupan Imunisasi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.01.16	SMILE	Sistem logistik imunisasi nasional milik Kemenkes.	https://imunisasi-logistik.kemkes.go.id/	Layanan Imunisasi Dasar dan Lanjutan, Layanan Pengadaan dan Distribusi Obat dan Alkes	Data Cakupan Imunisasi, Data Ketersediaan dan Distribusi Obat dan Alat Kesehatan	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.01.17	SIHA	Sistem Informasi HIV AIDS dan Pengobatan IMS (versi 2).	https://sihapims2.kemkes.go.id/login	Layanan HIV AIDS	Data HIV AIDS	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.01.18	SITB	Sistem Informasi Tuberkulosis versi regional Sumatera.	https://sumatera.sitb.id/sitb2024/app	Layanan TB	Data TB	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.01.19	SISMAL	Sistem Informasi Surveilans Malaria.	https://sismal.kemkes.go.id/	Layanan Penyakit Malaria	Data Penyakit Malaria	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.01.20	SILANTOR	Sistem Informasi Pelaporan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan	https://silantor.kemkes.go.id/	Layanan Pengelolaan Survelains Vektor	Data Pengelolaan Survelains Vektor	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		Tindak Lanjut Laboratorium.								
KP-DAA 02.01.21	SPIRT	Sistem Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga milik BPOM.	https://sppirt.pom.go.id/	Layanan Penerbitan SPPIRT	Data Penerbitan SPPIRT	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.01.22	PKB	Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	192.168.26.201/pkb_kulonprogo/index.php	Layanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Perhubungan
KP-DAA 02.01.23	BeID	Sistem Informasi Sertifikat Elektronik (Digital Signature)	portal-bsre.bssn.go.id	Layanan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian, Layanan Pengajuan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	Data Sertifikat Elektronik (Digital Signature), Data Pengajuan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAA 02.01.24	Single Sign In Jaringan Intra/Internet Pemda	Sistem Jaringan Intra Pemerintah		Layanan Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	Data User Jaringan Intra, Data Aduan Jaringan Intra	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAA 02.01.25	Trouble Ticketing System (TTS)	Sistem Informasi Data Aduan Jaringan	tts.kulonprogokab.go.id	Layanan Helpdesk TIK	Data Keluhan Aplikasi dan Internet, Data Domain dan Subdomain	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 02.01.26	SIDALMENTEL	Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi	http://sidalmentel.kulonprogokab.go.id/	Layanan Pengelolaan Menara Telekomunikasi	Data Menara Telekomunikasi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAA 02.01.27	SIBAKUL	Sistem kurasi produk UMKM	https://sibakuljogja.jogjaprov.go.id/markethub/	Layanan Promosi Produk UMKM	Data UMKM	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAA 02.01.28	SIHALAL	Sistem Informasi Pendaftaran Halal	ptsp.halal.go.id	Layanan Fasilitasi Pendaftaran Halal	Data UMKM Legalitas Halal	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAA 02.01.29	Pengawasan Koperasi	Sistem Informasi Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	https://pengawasankoperasi.kemenkopukm.go.id	Layanan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Data Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAA 02.01.30	AHU	Sistem Informasi Pendidiran Koperasi	www.ahu.go.id	Layanan Sosialisasi Pendirian Koperasi, Layanan Fasilitasi Pencermatan dan Perubahan Anggaran Dasar	Data Sosialisasi Pendirian Koperasi, Data Draft AD/PAD	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAA 02.01.31	AMDALNET	Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	https://amdalnet.menlhk.go.id	Layanan Penerbitan Persetujuan	Data Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Lingkungan Hidup

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Layanan Persetujuan Teknis dan Standar Layak Operasi	Lingkungan Hidup, Data Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah/Emisi dan Standar Layak Operasi					
KP-DAA 02.01.32	JAKONKU	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kulon Progo	https://fixitindo.com/demo/jakonku/app/login_rekanan.php	Layanan Informasi Pekerjaan Konstruksi	Data Dokumen Progres Konstruksi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAA 02.01.33	e-PAKSI	Sistem Informasi Pengambilan Data Survey Inventarisasi Aset Jaringan Irigasi, Aset Non Jaringan Irigasi, serta Kinerja Aset Irigasi	http://103.211.51.198/loginpaksi.html	Layanan Informasi Irigasi	Data Aset Irigasi, Data Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAA 02.01.34	SIMBG	Sistem Informasi Bangunan Gedung	https://simbg.pu.go.id/	Layanan Pengajuan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Layanan Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Layanan Perizinan	Data Pengajuan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Data Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Data Tanda Bukti PBG, Data Tanda Bukti	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				PBG	RTB, Data Tanda Bukti SBKBG, Data Tanda Bukti SLF					
KP-DAA 02.01.35	SIAPDES	Sistem Informasi Aparatur Pemerintah Desa	http://siapdes.kulonprogokab.go.id/	Layanan Informasi Perangkat Desa	Data Aparatur Desa	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAA 02.01.36	SIGA	Sistem Informasi Keluarga	https://siga.bkkbn.go.id/	Layanan Informasi Keluarga	Data Informasi Keluarga	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAA 02.01.37	SIRIKA	Sistem Informasi Rantai Pasok Alkon	http://sirika.bkkbn.go.id/	Layanan Kepesertaan KB (Keluarga Berencana), Layanan Permohonan Alkon	Data Alat dan Obat Kontrasepsi, Data Kepesertaan KB (Keluarga Berencana)	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 02.01.38	DAPODIK	Sistem Informasi Data Satuan Pendidikan	https://https://dapo.kemdikbud.go.id	Layanan Data Pokok Pendidikan, Layanan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa, layanan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan, Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	Data Peserta Didik, Data Pendidik, Data Tenaga Kependidikan, Data Sarpras Pendidikan, Data Profil Satuan Pendidikan, Data Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa, Data Izin Pendirian Lembaga Pendidikan, Data Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAA 02.01.39	SIPINTAR	Sistem Informasi Indonesia Pintar	https://https://pip.kemdikbud.go.id/home_v1	Layanan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP)	Data Peserta Didik Kurang Mampu	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAA 02.01.40	Raport Pendidikan	Sistem InformasiHasil Asesmen dan Survey Nasional Satuan Pendidikan dan Daerah.	https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id	Layanan Rapor Pendidikan	Data Satuan Kependidikan	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAA 02.01.41	SIM PendekarKu	Sistem Informasi Kegiatan	http://pendekarku.kulonprogokab.go.	Layanan Pendidikan	Data Pelaksanaan Pendidikan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI	Dinas Pendidikan Pemuda dan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		Pelaksanaan dan Pengamalan Pancasila di Satuan Pendidikan	id	Karakter	Karakter				TERTENTU	Olahraga
KP-DAA 02.01.42	SIM ARKAS	Sistem Informasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah	https://https://arkas.kemdikbud.go.id	Layanan ARKAS Dana Bos	Data Perencanaan BOS, Data Penganggaran BOS, Data Pelaporan Keuangan BOS	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAA 02.01.43	SIM PKB	Portal akses layanan bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK).	https://paspor-gtk.simpkb.id/	Layanan Komunitas Guru, Layanan Sertifikasi Guru	Data Guru, Data Guru Bersertifikat Pendidik, Data Komunitas Guru	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAA 02.01.44	SIMBAR	Sistem Informasi Manajemen Beban Ajar dan Rombel.	https://simbar.gtk.kemdikbud.go.id/	Layanan Komunitas Guru, Layanan Sertifikasi Guru	Data Guru, Data Guru Bersertifikat Pendidik, Data Komunitas Guru	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
KP-DAA 02.01.45	SIM TUN	Sistem Tunjangan Guru Pendidikan Dasar dan Menengah.	https://simtun.gtk.dikdasmen.go.id/	Layanan Komunitas Guru, Layanan Sertifikasi Guru	Data Guru, Data Guru Bersertifikat Pendidik, Data Komunitas Guru	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 02.01.46	SISP	Sistem Informasi Sarana Perdagangan	https://sisp.kemendag.go.id/	Layanan Sistem Informasi Sarana Perdagangan	Data Sarana Perdagangan	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Perdagangan
KP-DAA 02.01.47	UML	Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal	https://metrologi.kemendag.go.id/pelaporan_ttu/web/home	Layanan Tera/Tera Ulang	Data Tera/Tera Ulang UTTP	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Perdagangan
KP-DAA 02.01.48	e-RFID	Sistem Informasi Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berbasis RFID		Layanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Sertifikat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Desktop	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Perhubungan
KP-DAA 02.01.49	INLISLite	Sistem Informasi Otomasi Perpustakaan	https://inlis.kulonprogokab.go.id	Layanan Perpustakaan	Data Sirkulasi Perpustakaan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAA 02.01.50	Dashboard Pimpinan	Dashboard Big Data Pimpinan Daerah		Layanan Dashboard Pimpinan	Data Dashboard Pimpinan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAA 02.01.51	SIGA KEMENPPPA	Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian PPPA.	https://siga.kemenpppa.go.id	Layanan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Data Dokumen Laporan Hasil Pendampingan Korban Kekerasan, Data Surat Pengantar Permohonan Rujukan Lanjutan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 02.01.52	SIGA JOGJA PROV	Portal Sistem Informasi Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.	https://www.siga.jogjaprov.go.id	Layanan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Data Dokumen Laporan Hasil Pendampingan Korban Kekerasan, Data Surat Pengantar Permohonan Rujukan Lanjutan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAA 02.01.53	SISNAKER	Sistem Informasi Ketenagakerjaan	https://kemnaker.go.id/	Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), Layanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Data Peraturan Perusahaan, Data Perjanjian Kerja Bersama	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAA 02.01.54	SIBARDUK TRANS	Sistem Informasi Data Kependudukan dan Transmigrasi.	https://sibarduktrans.transmigrasi.go.id/	Layanan Pendaftaran Transmigran	Data Pendaftaran Transmigran	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAA 02.01.55	SIPUAS	Sistem Informasi Kepuasan Pelanggan	http://info.rsudwates.id/sipuas/	Layanan Kepuasan Pelanggan	Data Kepuasan Pelanggan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Wates
KP-DAA 02.01.56	SI IMUT	Sistem Informasi Pencatatan Indikator Mutu	info.rsudwates.id/imut	Layanan Indikator Mutu	Data Dokumen Laporan Indikator Mutu	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Wates
KP-DAA 02.01.57	PPI	Sistem Informasi Program Pengendalian Infeksi	info.rsudwates.id/ppi	Layanan Program Pengendalian Infeksi	Data Program Pengendalian Infeksi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Wates

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 02.01.58	e-KLAIM	Sistem Informasi Klaim BPJS	https://pcarejkn.bpjs-kesehatan.go.id/eclaim/login	Layanan Penjaminan/Unit Klaim BPJS	Data Klaim BPJS	Web Based	Oracle	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Wates
KP-DAA 02.01.59	SIMPONIKU	Sistem Informasi Online Registration Information System		Layanan Pendaftaran Pasien Online RSUD Wates	Data Pendaftaran Pasien Online	Mobile	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	RSUD Wates
KP-DAA 02.01.60	CSRKU	Corporate Social Responsibility Kulon Progo		Layanan Fasilitasi CSR Perusahaan	Data Fasilitasi CSR Perusahaan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAA 02.02.01	e-Pemilos	Sistem Informasi Pemilihan Ketua Osis	https://pemilos.kulonprogokab.go.id/	Layanan Pemilihan Osis	Data Calon Ketua Osis, Data Ketua Osis Terpilih, Data Siswa Pemilih	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAA 02.02.02	FKUB	Sistem Informasi Pemberian Rekomendasi atas Pendirian Rumah Ibadah/Tempat Ibadah	http://103.135.180.16/fkub/public/	Layanan Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah	Data Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAA 02.02.03	BangsaKU	Sistem Informasi Registrasi Ormas Kulon Progo	https://bangsaku.kulonprogokab.go.id/assets_frontend/about.html	"Layanan Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan Organisasi Masyarakat (ORMAS)", Layanan	Data Organisasi Masyarakat (ORMAS), Data Organisasi Politik (ORPOL)	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Pendataan Organisasi Politik						
KP-DAA 02.02.04	SITKO	Sistem Informasi Tata Kelola Organisasi Kesehatan.	https://sitko.kemkes.go.id/auth/login	Layanan Pelaporan Kesehatan Kerja Olahraga	Data Pelaporan Kesehatan Kerja Olahraga	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.02.05	ASPAK	Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Kemenkes.	https://aspak.kemkes.go.id/aplikasi/	Layanan Sarana Prasarana Kesehatan, Layanan Perencanaan Alat Kesehatan, Layanan Pengelolaan Alat Kesehatan Sarana dan Prasarana, Layanan Supervisi Pelayanan Keperawatan	Data Sarpras Kesehatan, Data Pengelolaan Pelayanan Pasien, Data Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.02.06	RENBUT	Sistem Perencanaan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan.	https://renbut.kemkes.go.id/	Layanan Sarana Prasarana Kesehatan	Data Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.02.07	SISDMK	Sistem Informasi SDM Kesehatan Nasional.	https://sisdmk.kemkes.go.id/login	Layanan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	Data Pengelolaan SDM Kesehatan	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.02.08	e-Monev HSP	Sistem TPP Kesehatan dalam	https://tpm.kemkes.go.id/rbi/tpp/	Layanan Pengelolaan SDM	Data Monev Hygiene Sanitasi	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		kerangka Tata Pamong Mutu Pelayanan (TPM).		Kesehatan	Pangan				TERTENTU	
KP-DAA 02.02.09	e-Monev TFU	Aplikasi layanan Tim Fasilitasi Unit untuk pengelolaan pembangunan dan pengadaan bidang kesehatan.	https://tfu.sintragiat.co.id/masuk.html	Layanan Monitoring Evaluasi Hygiene Sanitasi Pangan	Data Monev Tempat Fasilitas Umum	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.02.10	e-Monev STBM	Halaman masuk alternatif ke sistem TPM TPP.	https://tpm.kemkes.go.id/rbi/tpp/login	Layanan Monitoring Evaluasi Tempat Fasilitas Umum	Data Monev Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.02.11	DFO	Portal pengelolaan akun dan akses sistem informasi pelayanan kesehatan Kemenkes.	https://akun-yankes.kemkes.go.id/	Layanan Akreditasi Fasyankes	Data Akreditasi Fasyankes	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.02.12	e-STP	Sistem Kinerja Pegawai Kementerian Kesehatan.	https://skp.kemkes.go.id/	Layanan Pengelolaan Survelains Vektor	Data Pengelolaan Survelains Vektor	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.02.13	SIMTARUKU	Sistem Informasi Tata Ruang Kulon Progo	https://simtaruku.kulonprogokab.go.id/	Layanan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW dan RDTR), Layanan Penetapan dan	Data Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail, Data Pemanfaatan Ruang, Data KKPR dan Rekomendasi Tata	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Layanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Layanan Penilaian Kesesuaian Tata Ruang dalam Perizinan, Layanan Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang, Layanan Penyusunan dan Pemutakhiran Peta Rencana Tata Ruang, Layanan Pengelolaan dan Penyajian Informasi Geospasial, Layanan Penyusunan Database Pertanahan dan	Ruang, Data Penilaian Kesesuaian Tata Ruang, Data Pelanggaran dan Pengawasan Tata Ruang, Data Peta Tata Ruang Digital, Data Informasi Geospasial, Data Database Pertanahan dan Tata Ruang, Data Izin Pemanfaatan Ruang Non-Berusaha					

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Tata Ruang Daerah, Layanan Informasi Pemanfaatan Tanah						
KP-DAA 02.02.14	Website Pemerintahan			Layanan Pembuatan Website Pemerintah	Data Pembuatan Website Pemerintah	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAA 02.02.15	PAY ON PRO	Aplikasi e-payment dan pencatatan keuangan berbasis unit kerja Pemkab Kulon Progo.	https://pay-onpro.kulonprogokab.go.id	Layanan Promosi Produk UMKM	Data UMKM	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAA 02.02.16	SIDT	Sistem Informasi Profil Umkm	https://satudata.umkm.go.id/login	Layanan Promosi Produk UMKM	Data UMKM	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
KP-DAA 02.02.17	e-LingKu	Sistem Informasi Lingkungan Kulonprogo	https://elingku.kulonprogokab.go.id/	Layanan Pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL	Data Dokumen Laporan UKL-UPL	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Lingkungan Hidup
KP-DAA 02.02.18	Sambanggo	Portal integrasi aduan dan layanan publik Kabupaten Kulon Progo.	https://sambanggo.kulonprogokab.go.id/	Layanan Informasi Kepariwisataan	Data Calendar Of Event (COE), Data Desa Wisata, Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Data Kunjungan Wisatawan,	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Pariwisata

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Data Objek Wisata, Data Pelaku Wisata, Data Usaha Jasa Pariwisata					
KP-DAA 02.02.19	Prohamsan	Sistem Informasi Monitoring Pelaksanaan program Hibah Air Minum Perdesaan	http://prohamsan.pu.go.id/	Layanan Informasi SPAM (Air Minum)	Data SPAM Perdesaan, Data Jaringan Perpipaan SPAM Perumda Air Minum, Data Pekerjaan Pembangunan Sambungan Rumah (SR)	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
KP-DAA 02.02.20	SIPENTAS JAWARAKU	Sistem Informasi Penilaian Akuntabilitas,dan Kinerja Pemerintahan Kalurahan Kabupaten Kulon Progo	https://jawaraku.kulonprogokab.go.id/	Layanan Pelaksanaan Akuntabilitas dan Kinerja Kelurahan	Data Akuntabilitas Kelurahan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
KP-DAA 02.02.21	SIKUDESKU	Sistem Keuangan Desa Kabupaten Kulon Progo	https://sikudesku.kulonprogokab.go.id/	Layanan Tata kelola Keuangan Desa	Data Keuangan Desa	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
										Berencana
KP-DAA 02.02.22	myPOTENSI			Layanan Pajak PBB dan BPHTB	Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Data Wajib BPHTB, Data Wajib PBB	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 02.02.23	iKulonprogo	Sistem Informasi Layanan Perpustakaan Digital	https://ikulonprogo.moco.co.id	Layanan Perpustakaan Digital	Data Sirkulasi Perpustakaan Digital	Mobile	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
KP-DAA 02.02.24	TaniKu	Sistem Informasi Data Pertanian	taniku.kulonprogokab.go.id	Layanan Informasi Harga Komoditas Pertanian, Layanan Informasi Kelembagaan Petani, Layanan Informasi Kios Sarana Produksi Pertanian, Layanan Rekomendasi BBM, Layanan Cetak Sawah Baru, Layanan Pemotongan	Data Penyembelihan hewan Qurban, Data Kesehatan Hewan Ternak, Data Luasan dan Lokasi Lahan Surjan, Data Harga Pasar Komoditas Pertanian, Data Kelembagaan Petani, Data Kios Sarana Produksi Pertanian	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Pertanian dan Pangan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Hewan Qurban, Layanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan						
KP-DAA 02.02.25	SuratKu	Sistem Informasi Persuratan Elektronik	https://suratku.kulonprogokab.go.id/login	Layanan Penanganan Jenazah Terlantar, Layanan Bantuan Kecelakaan Kerja Penderes	Data Penanganan Jenazah Terlantar, Data Penerima Bantuan Kecelakaan Kerja Penderes	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAA 02.02.26	Si Pemikat	Sistem informasi Pelayanan Jaminan Kesehatan	https://si-pemikat.jogjaprov.go.id/	Layanan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos)	Data Surat Keabsahan Penerima Manfaat (SKPM)	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAA 02.02.27	PULANGGENI	Sistem Informasi Survey Kepuasan Pelanggan Elektronik	http://103.144.167.46/survey/	Layanan Survei Kepuasan Pelanggan	Data Survei Kepuasan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAA 02.02.28	SIPANDU	Sistem Informasi Pendidikan dan Penelitian Terpadu	https://rsnas.infosa-media.my.id/login	Layanan Lahan Praktek Kesehatan	Data Pelayanan Pendidikan dan Penelitian	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAA 02.02.29	SIP NAS	Sistem Informasi Pendaftaran Online RSUD NAS	https://rsudnas.com/	Layanan Pendaftaran Online	Data Pendaftaran Online	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAA 02.02.30	SIMPEL LHK	Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup	https://simpel.menlhk.go.id/2023/login	Layanan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	Data Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Nyi Ageng Serang

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
KP-DAA 02.02.31	SISRUTE	Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi	https://sisrute.kemkes.go.id/	Layanan Rujukan Pasien, Layanan Rujukan Tingkat Lanjutan	Data Pengelolaan Pelayanan Pasien, Data Rujukan Pasien, Data Rujukan Pelayanan Kesehatan	Web Based	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAA 02.02.32	CAKRA BASKARA	Sistem Informasi Cara Kelola dan Rawat Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Berdasarkan atas Sistem Kelola Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Secara Reformatif dan Adatif		Layanan Pengelolaan Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan	Data Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan	Desktop	PostgreSQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAA 02.02.33	SIMRS	Sistem Informasi Pengelolaan Data Pasien RSUD Nyi Ageng Serang		Layanan Manajemen Rumah Sakit (ERM), Layanan Supervisi Pelayanan Keperawatan, Layanan Pantauan TB RO (Resistant Obat), Layanan Tim HIV, Layanan Jadwal Poliklinik, Layanan Jadwal Operasi,	Data ERM, Data Pengelolaan Pelayanan Pasien, Data Anggaran Pendapatan Dan Belanja, Data Jadwal Operasi, Data Jadwal Poliklinik, Data Tim HIV, Data TB RO	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Nyi Ageng Serang

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Layanan Pengelolaan Keuangan RS						
KP-DAA 02.02.34	SIM RSUD Wates	Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Wates		Layanan Gawat Darurat, Layanan Rawat Jalan, Layanan Rawat Inap, Layanan Intensive Care, Layanan Bedah Sentral, Layanan Penunjang Medik, Layanan Rehabilitasi Medik, Layanan Pengelola Alat Kesehatan, Layanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Layanan Rekam Medls, Layanan Teknologi Informasi Rumah Sakit, Layanan Administrasi Kependudukan	Data Gawat Darurat, Data Rawat Jalan, Data Rawat Inap, Data Intensive Care, Data Bedah Sentral, Data Penunjang Medik, Data Rehabilitasi Medik, Data Pengelola Alat Kesehatan, Data Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Data Rekam Medls, Data Teknologi Informasi Rumah Sakit, Data Administrasi Kependudukan Bayi Baru Lahir, Data Pendaftaran Pasien Online	Desktop	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Wates

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Bayi Baru Lahir, Layanan Pendaftaran Pasien Online RSUD Wates						
KP-DAA 02.02.35	SIMOBAT	Sistem Informasi Manajamen Obat		Layanan Pengelolaan Stok Obat	Data Pengelolaan Stok Obat	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAA 02.02.36	SIMAGENDA	Sistem Informasi Manajemen Agenda Pimpinan Daerah		Layanan Pengelolaan Agenda Pimpinan	Data Agenda Pimpinan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Bagian Protokol dan Rumah Tangga
KP-DAA 02.02.37	SIMKD	Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Dinas Pimpinan Daerah		Layanan Pengelolaan Kendaraan Dinas Pimpinan Daerah	Data Kendaraan Dinas Pimpinan Daerah	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Bagian Protokol dan Rumah Tangga
KP-DAA 02.02.38	Satu Pintu LabkesKu			Layanan Pelayanan UPT Lab Kesehatan	Data Hasil Lab Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.02.39	PANCANAKA	Sistem Informasi Manajemen Keuangan RSUD Nyi Ageng Serang		Layanan Pengelolaan Keuangan RS	Data Anggaran Pendapatan Dan Belanja	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Nyi Ageng Serang

3.2.4.2. Analisis Diagram Aplikasi

Merujuk pada hasil pemetaan aplikasi pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data *eksisting* dapat dijabarkan sebagai berikut:

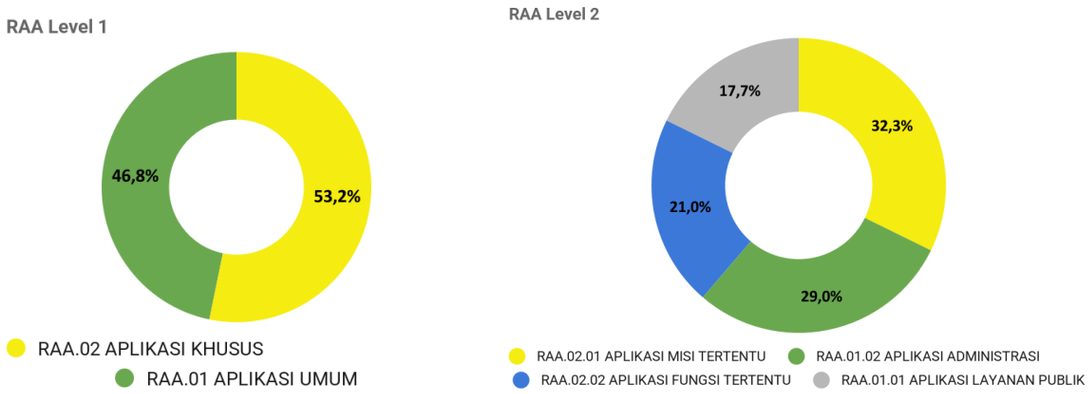

Grafik 3.2.4.2.1. Grafik Jumlah Aplikasi Berdasarkan RAA Level 1 & 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Aplikasi umum didefinisikan sebagai sebuah aplikasi bersama yang digunakan dalam proses administrasi di seluruh perangkat daerah, sedangkan aplikasi khusus merupakan aplikasi yang hanya digunakan oleh suatu perangkat daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi utamanya. Merujuk pada grafik 3.2.4.2.1. dan mengacu pada referensi Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional (RAA Level 1) dari total 186 Aplikasi, 87 Aplikasi (46.8%) merupakan RAA.01 Aplikasi Umum dan 99 Aplikasi (53.2%) merupakan RAA.02 Aplikasi Khusus.

Sedangkan untuk RAA Level 2 terkait RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik sejumlah 33 Aplikasi (17,7%), RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan sejumlah 54 aplikasi (29,0%), RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu sejumlah 39 aplikasi (21,0%) dan RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu sejumlah 60 aplikasi (32,3%) Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jenis aplikasi yang paling banyak digunakan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah jenis Aplikasi Administrasi Misi Tertentu sehingga diperlukan pengelolaan interoperabilitas data, baik untuk internal maupun untuk instansi pusat.

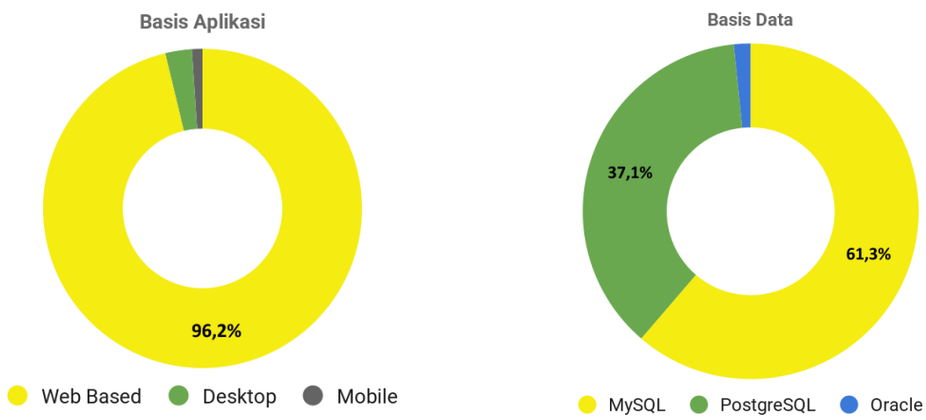

Grafik 3.2.4.2.2. Grafik Jumlah Aplikasi Berdasarkan dari Basis Aplikasi dan Basis Datanya

Berdasarkan grafik 3.2.4.2.2. menunjukkan bahwa terdapat 186 Aplikasi (96.2%) memiliki basis aplikasi Web Based, Desktop jumlah 5 aplikasi (2.7%) dan Mobile 2 Aplikasi (1.1%) . Hal ini menunjukkan bahwa kedepan perlu dipastikan jumlah *web programmer* pemeliharaan aplikasi yang ada. Sedangkan, kepemilikan untuk basis data MySQL 61.3% (114 aplikasi), basis data PostgreSQL Server 37.1% (69 Aplikasi) dan Oracle 1.6% (3 Aplikasi). Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk menjadikan *MySQL* sebagai dasar dalam standar pengembangan aplikasi selanjutnya.

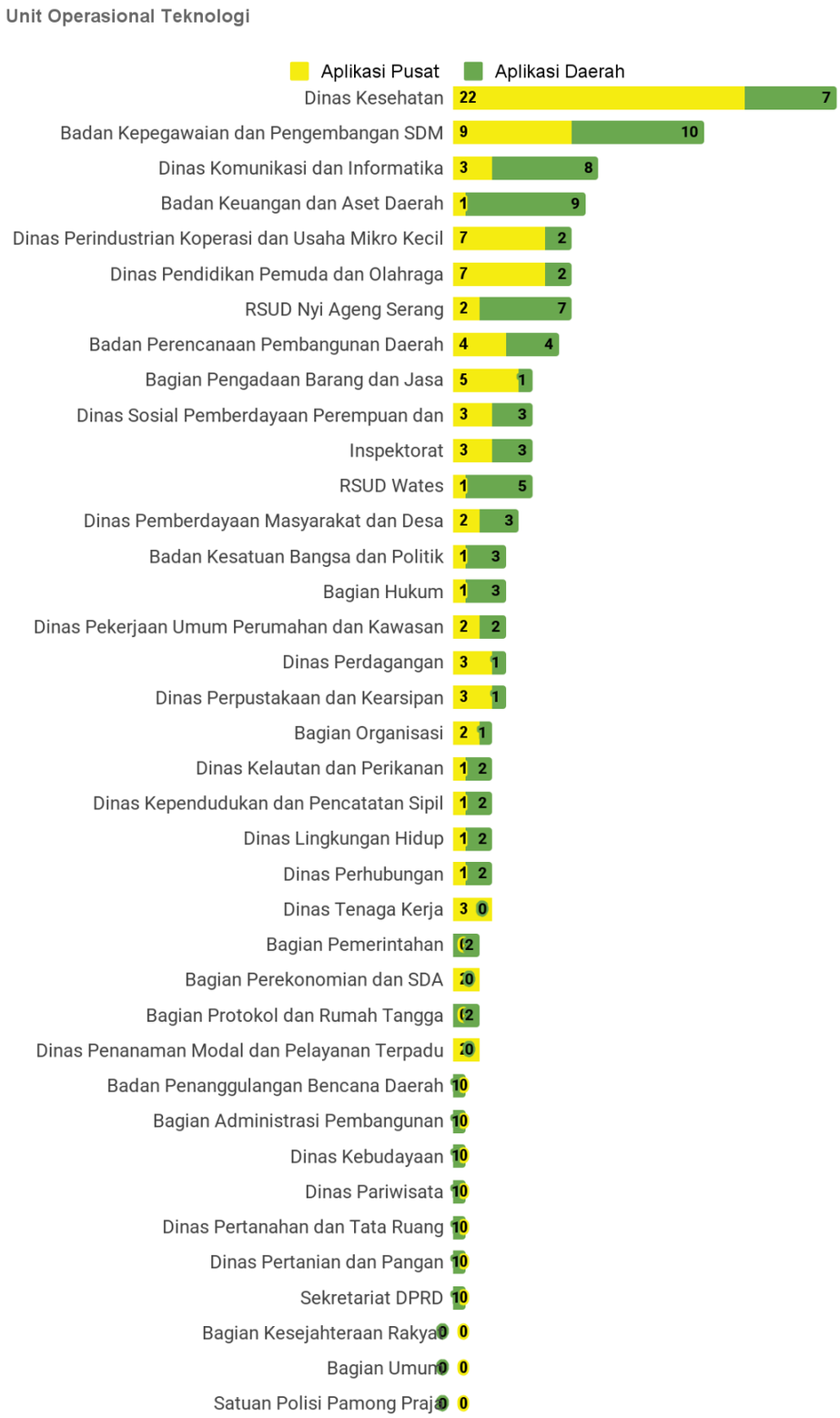

Grafik 3.2.4.2.3. Grafik Jumlah Aplikasi yang digunakan di Perangkat Daerah

Berdasarkan grafik 3.2.4.2.3. menunjukkan bahwa perangkat daerah yang paling banyak dalam melakukan digitalisasi yaitu Dinas Kesehatan. Hal ini disebabkan karena Dinas tersebut diberikan mandatori untuk menggunakan aplikasi dari Kementerian.

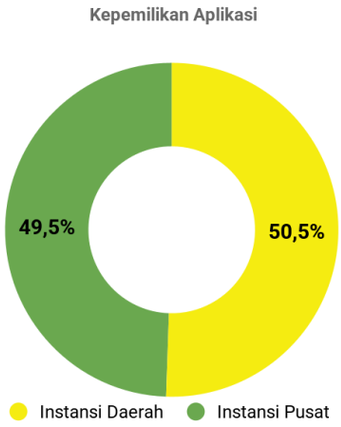

Grafik 3.2.4.2.4. Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi *Eksisting*

Berdasarkan grafik 3.2.4.2.4. menjelaskan bahwa dari total 186 aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sejumlah 49.5% (92 Aplikasi) aplikasi milik Instansi Pusat dan 50.5% (94 Aplikasi) aplikasi milik Instansi Daerah. Berdasarkan grafik diatas perlu dievaluasi terkait aplikasi milik daerah apakah sudah sesuai dengan kebutuhan digitalisasi Layanan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

3.2.5. Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur Infrastruktur SPBE merupakan kerangka kerja yang menggambarkan komponen-komponen teknologi informasi dan interkoneksi jaringan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional aplikasi SPBE. Infrastruktur SPBE yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi: ruang pusat data, jaringan intra pemerintah yang didalamnya terdapat jaringan data lokal (Local Area Network - LAN) kantor OPD/UPT, dan sistem penghubung layanan untuk berbagi pakai data antar aplikasi. Berikut ini adalah uraian dari arsiterktur infrastruktur SPBE.

3.2.5.1. Pusat Komputasi (Pusat Data)

A. Lokasi Pusat Data

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Pusat Komputasi (Pusat Data) yang berlokasi di Komplek Kantor Bupati Gedung Binangun IV B lantai 2, Jalan Tamtama No. 3, Wates, Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651.

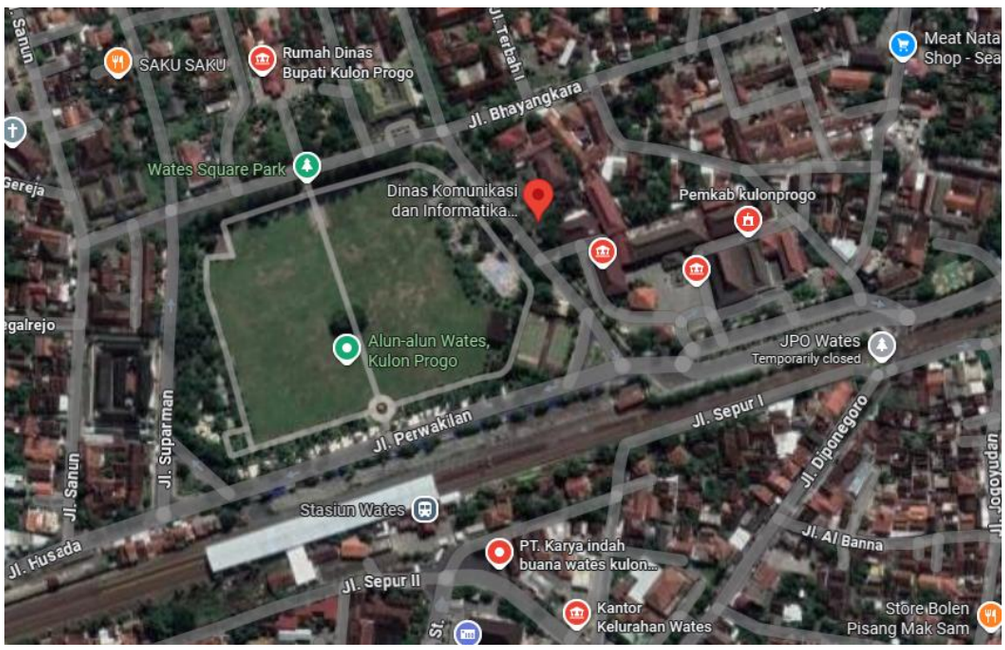

Gambar 3.2.5.1.1. Lokasi Pusat Komputasi Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Adapun kondisi saat ini terkait lokasi yang digunakan pusat komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Terdapat 3 (tiga) kriteria yang diajukan yaitu:

- Aman dari rentan bencana alam;
- Aman dari area atau lokasi huru-hara; dan
- Aman dari jalur transportasi.

Tabel 3.2.5.1.1. Kriteria Lokasi Pusat Data

No	Kriteria Lokasi Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Aman dari rentan bencana alam	Ya
2	Aman dari area atau lokasi huru-hara	Tidak
3	Aman dari jalur transportasi	Ya

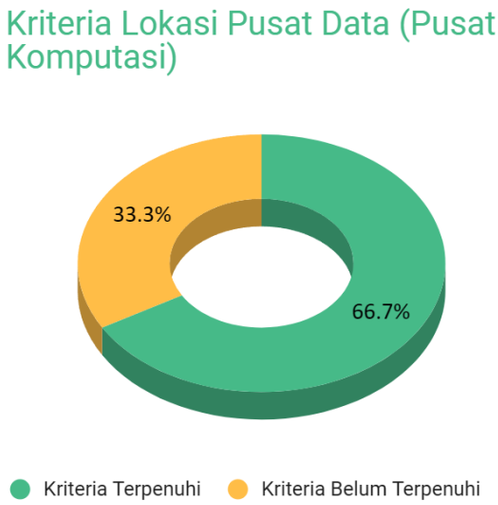

Grafik 3.2.5.1.1. Kriteria Lokasi Pusat Data (Pusat Komputasi) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Dari grafik 3.2.5.1.1. dapat diperoleh informasi bahwa dari 3 (tiga) kriteria standar lokasi pusat komputasi, mengacu pada SNI 8799-1 Pusat Data, pusat komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah memenuhi 2 (dua) kriteria.

B. Tata Ruang Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

Tata Ruang Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

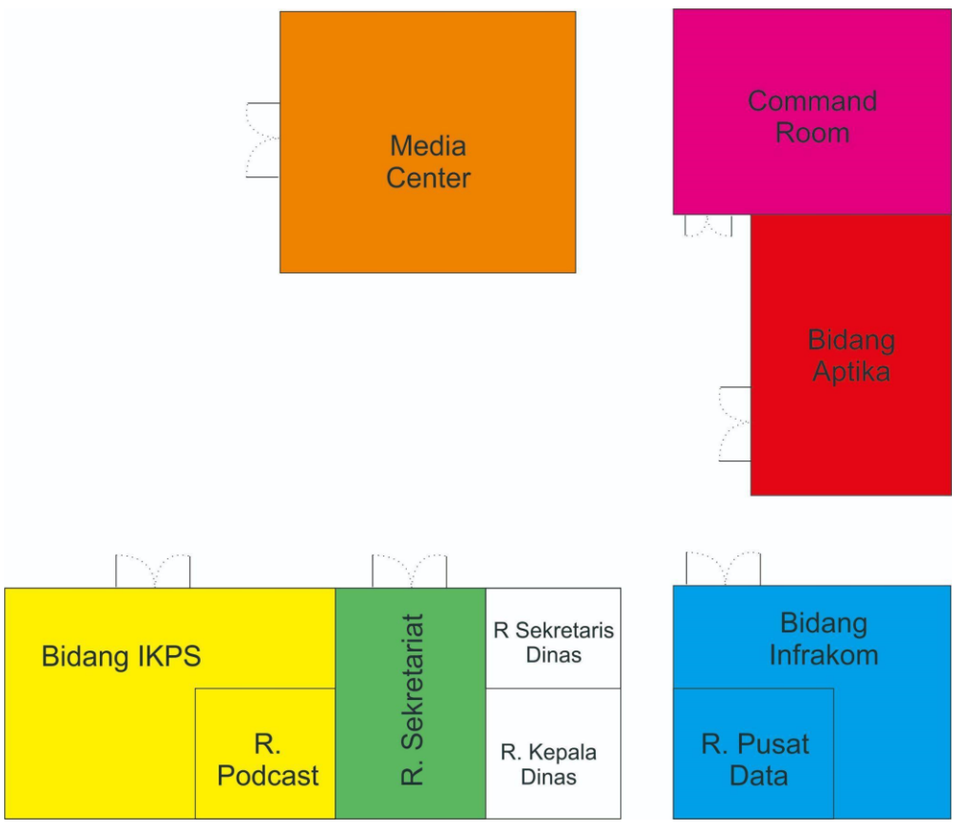

Gambar 3.2.5.1.2. Tata Ruang Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

Tata ruang kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dirancang untuk mendukung fungsi utama organisasi melalui pembagian ruang kerja yang terstruktur sesuai bidang tugasnya.

- **Ruang Media Center (Orange)** berfungsi sebagai pusat informasi, publikasi, dan penyebaran berita melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital.
- **Command Room (Ungu)** menjadi pusat kendali dan monitoring sistem, yang digunakan untuk pengawasan, pengendalian data, serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis teknologi.
- **Bidang Aplikasi Informatika (Merah)** terdiri dari ruang kerja staf dan ruang Kepala Bidang Aptika. Bidang ini berfokus pada pengembangan, pengelolaan, serta pemeliharaan aplikasi informatika yang mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
  Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi, dan Persandian (Biru) mencakup ruang kerja staf, ruang Kepala Bidang Infrakom, serta **Ruang Pusat Data**. Ruang ini menjadi pusat pengelolaan infrastruktur digital, keamanan informasi, serta persandian, yang mendukung ketersediaan dan keandalan layanan berbasis teknologi informasi.
- **Ruang Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kominfo (Putih)** berfungsi sebagai pusat kepemimpinan, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dinas.
- **Ruang Sekretariat (Hijau)** ditempati oleh Sekretariat, Kasubag Umum dan Kepegawaian, serta Kasubag Perencanaan Keuangan. Ruang ini menjadi pusat administrasi, tata usaha, dan pengelolaan keuangan serta perencanaan program.
- **Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik (Kuning)** terdiri dari ruang kerja staf, ruang Kepala Bidang IKPS, serta **Ruang Podcast**. Bidang ini berperan dalam penyebarluasan informasi publik, pengelolaan data statistik, serta inovasi komunikasi publik melalui media digital.

Ruang kerja (ruang area fungsi) telah tersedia, Berdasarkan kriteria yang diajukan terkait ruang area fungsi pada pusat komputasi, kondisinya sebagai berikut:

Tabel 3.2.5.1.2. Tabel Pemenuhan Standar Topologi Ruangan mengacu SNI 8799-1 Pusat Data

No	Area Fungsi Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Terdapat Ruang Data Center (Computer room)	Ya
2	Terdapat Ruang untuk Access Provider	Tidak
3	Terdapat Ruang Operasi Personel TI	Tidak
4	Terdapat Staging area (Tempat konfigurasi perangkat untuk System Administrator dan Network Engineer sebelum perangkat beroperasi)	Tidak
5	Terdapat Ruang Elektrikal/UPS	Tidak
6	Terdapat Ruang Generator	Ya
7	Terdapat Ruang Administrasi Kunjungan	Tidak
8	Terdapat Ruang Gudang untuk menempatkan datangnya perangkat baru	Tidak
9	Terdapat Ruang Gudang untuk menempatkan perangkat yang tidak berfungsi dan tidak terpakai	Tidak
10	Terdapat Area Bongkar Muat	Tidak

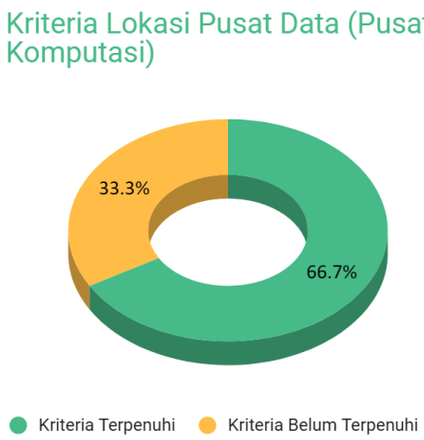

Grafik 3.2.5.1.2. Area Fungsi Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Dari tabel 3.2.5.1.2. dapat diperoleh informasi bahwa dari 10 (sepuluh) kriteria area fungsi pusat komputasi (Pusat Data) yang ada, area fungsi Pusat Data Kabupaten Kulon Progo baru memenuhi 2 (dua) kriteria yang ada.

C. Rack Server

Kondisi saat ini terdapat beberapa rak khusus untuk menempatkan perangkat server seperti terlihat gambar di bawah ini.

Gambar 3.2.5.1.3. Rak dan Perangkat Server

D. Sistem Pemadam Kebakaran

Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo saat ini belum dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran yang memadai, belum tersedia juga Perangkat Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di dalam ruang Pusat Komputasi.

Berikut ini disajikan tabel pemenuhan standar sistem pemadam kebakaran di Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan SNI Pusat Data.

Tabel 3.2.5.1.3. Tabel Pemenuhan Standar Sistem Pemadam Kebakaran sesuai SNI Pusat Data

No	Sistem Pemadam Kebakaran	Kriteria Terpenuhi
1	Tersedia pintu darurat di area pusat data yang dapat dibuka keluar	Tidak
2	Tersedia lampu darurat sebagai penanda keluar darurat ketika terjadi bencana seperti kebakaran.	Tidak
3	Bahan bangunan di ruang pusat data tidak mudah terbakar api	Tidak
4	Penerapan sistem deteksi asap bangunan yang diintegrasikan ke satu alarm Bersama.	Tidak
5	Di area pusat tersedia sistem pemadam kebakaran otomatis dan dapat juga diaktifkan secara manual.	Tidak
6	Pemeliharaan rutin dan tercatat pada alat-alat pengendali kebakaran.	Tidak
7	Pelatihan pengendalian api terjadwal kepada personel TI	Tidak
8	Bangunan pusat data dilengkapi dengan sistem proteksi petir untuk menanggulangi kebakaran	Tidak

Grafik 3.2.5.1.3. Sistem Pemadam Kebakaran

Dari tabel dan grafik di atas diperoleh informasi bahwa Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo belum memenuhi kriteria sistem pemadam kebakaran dari 8 (delapan) kriteria yang ada.

E. Catu Daya Listrik Cadangan

Pusat Data dilengkapi dengan catu daya listrik cadangan untuk menjaga ketersediaan aliran listrik pada saat sumber listrik utama PLN mengalami gangguan (pemadaman). Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah dilengkapi dengan perangkat catu daya listrik cadangan berupa Genset dan UPS.

Tabel 3.2.5.1.4. Perangkat Catu Daya Listrik Cadangan

No.	Merek	Jumlah Daya	Status Aktif
1	Generator	30 KVA	3 detik dari listrik mati
2	8 UPS	3 KVA	Dapat aktif selama 60 menit

Berikut ini disajikan tabel pemenuhan standar sistem catu daya listrik di Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan SNI Pusat Data.

Tabel 3.2.5.1.5. Tabel Status Pemenuhan Standar Catu Daya Listrik Cadangan sesuai SNI yang ada di Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

No	Penyediaan Catu Daya	Kriteria Terpenuhi
1	Pengukuran daya listrik utama yang paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak pusat data	Tidak
2	Sumber listrik diantisipasi dari dua sumber yang berbeda, Misal dari dua trafo yang berbeda.	Tidak
3	Pengelola Listrik menyediakan catu daya listrik alternatif berupa generator.	Ya
4	Generator dapat menyala otomatis oleh sensor ketika terjadi listrik PLN mati, kurang dari 10 detik.	Ya
5	UPS mampu memasok daya ke Data Center ketika listrik PLN mati	Ya
6	Pergantian sumber listrik dari PLN ke Genset atau sebaliknya menggunakan sistem ATS (Automatic Transfer switch) dan didukung Sistem AMF (*Automatic Main Failure*) untuk menyalakan mesin genset.	Ya
7	Komputer kerja personil pusat data disediakan alternatif catu daya	Ya Sebagian Kecil

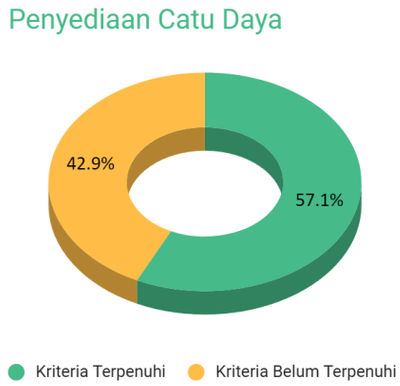

Grafik 3.2.5.1.4. Penyediaan Catu Daya

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diperoleh informasi bahwa Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memenuhi 4 (empat) kriteria sistem kelistrikan dari 7 (tujuh) kriteria yang ada.

F. Sistem Pendingin Ruangan

Perangkat yang ada di ruangan server mengeluarkan panas sehingga ruangan server perlu diberikan sistem pendingin untuk menjaga kinerja dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat teknologi informasi karena suhu yang tinggi (panas). Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah dilengkapi dengan sistem pendingin yakni *Air Conditioning (AC).*

Berikut ini disajikan tabel pemenuhan standar sistem pendingin ruangan di Ruang Server Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan SNI Pusat Data.

Tabel 3.2.5.1.6. Tabel Status Pemenuhan Standar Pendingin Ruangan Ruang Server sesuai SNI

No	Sistem Pendingin, Suhu dan Kelembaban Ruang Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Terdapat alat pengkondisi suhu dan kelembaban udara	Tidak
2	Terdapat alat pemantau suhu dan kelembaban ruang pusat data	Tidak
3	Suhu dingin di ruang pusat data terkontrol antara 18°C-24°C	Ya
4	Kelembaban udara di ruang pusat data terkontrol antara 40%-60% RH (Relative Humidity).	Tidak
5	Sistem pendingin udara (AC) pusat data dihubungkan dengan daya utama (listrik PLN) satu sumber dengan pusat data.	Ya
6	Sistem pendingin udara pusat data dihubungkan ke catu daya alternative (seperti generator).	Ya
7	Sistem Pendingin menggunakan AC presisi atau HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning)	Tidak

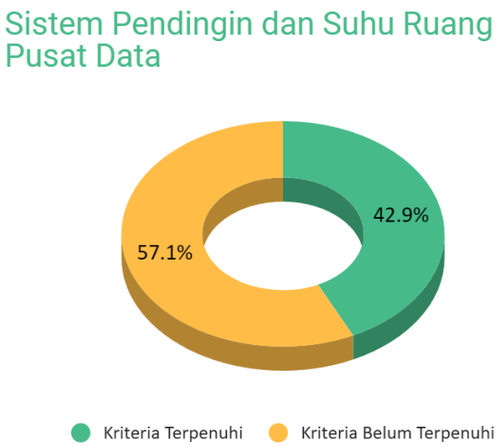

Grafik 3.2.5.1.5. Sistem Pendingin

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diperoleh informasi bahwa Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah memenuhi kriteria Sistem Pendingin dan Suhu Ruang Pusat Data dari 7 (tujuh) kriteria yang ada.

G. Manajemen Kabel

Kabel data digunakan untuk Interkoneksi antar perangkat teknologi informasi di Pusat Data yang terdiri dari kabel UTP dan *Fiber Optic*. Selain itu juga terhadap kabel listrik. Untuk menjaga keamanan kabel data dan listrik maka perlu dibuatkan jalur kabel khusus data dan listrik *(cable tray)* dan diberikan penanda (label) pada kabel tersebut.

Berikut ini disajikan tabel pemenuhan standar manajemen kabel di Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan SNI Pusat Data.

Tabel 3.2.5.1.7. Tabel pemenuhan standar manajemen kabel sesuai SNI Pusat Data

No	Manajemen Kabel di Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Kabel daya (Kabel listrik) dan kabel data tembaga (UTP/STP) diberi jarak antara 30-60cm	Tidak
2	Kabel yang berada di rack cabinet diatur dengan rapi	Tidak

3	Kabel data (kabel jaringan) yang melewati dinding sebagian besar sudah menggunakan pelindung kabel (cable duct).	Tidak
4	Kabel-kabel di pusat data diberikan jalur (cable pathways) menggunakan *cable tray*.	Tidak
5	Kabel jaringan di pusat data telah diberikan label identifikasi (Terkoneksi ke ….)	Ya Sebagian Besar
6	Setiap Rak perangkat diberikan label informasi terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak	Tidak
7	Terdapat raised floor atau lantai yang ditinggikan	Ya

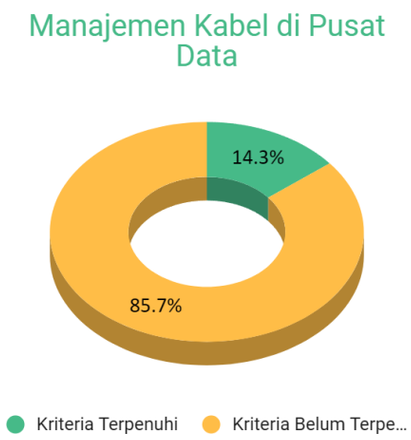

Grafik 3.2.5.1.6. Manajemen Kabel

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diperoleh informasi bahwa Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo baru memenuhi 1 (satu) kriteria manajemen kabel dari 7 (tujuh) kriteria yang ada.

H. Sistem Pemantauan Server dan Jaringan

Fasilitas dan perangkat teknologi informasi di pusat data perlu selalu dipantau sebagai langkah pencegahan atau preventif untuk menjaga ketersediaan, dan kinerja dari pusat data. Kondisi saat ini belum ada ruang untuk melakukan pemantauan mengenai perangkat server maupun perangkat jaringan.

Berikut ini disajikan tabel pemenuhan standar sistem monitoring sumber daya Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan SNI Pusat Data.

Tabel 3.2.5.1.8. Tabel pemenuhan standar Pemantauan Sumber Daya Pusat Data sesuai SNI Pusat Data

No	Sistem Monitoring Sumber Daya Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
1	Tersedia Sistem Monitoring status (hidup, mati) dan ketersediaan sumber daya (RAM, CPU, HDD) Server	Tidak
2	Tersedia Sistem Monitoring status (hidup, mati) dan ketersediaan sumber daya (RAM, CPU, HDD) jaringan	Tidak
3	Tersedia Sistem Monitoring Keamanan Server (Security Information and Event Management)	Ya
4	Tersedia Sistem Monitoring Keamanan Jaringan (Security Information Event Management)	Tidak
5	Tersedia Sistem Monitoring Keamanan Aplikasi (Security Information Event Management)	Ya
6	Tersedia Sistem Monitoring dan Alert kondisi Udara di Pusat Data	Tidak
7	Tersedia Sistem Monitoring pada UPS dan Genset untuk Pusat Data	Tidak
8	Tersedia Sistem Monitoring pada BBM genset untuk Pusat Data	Tidak

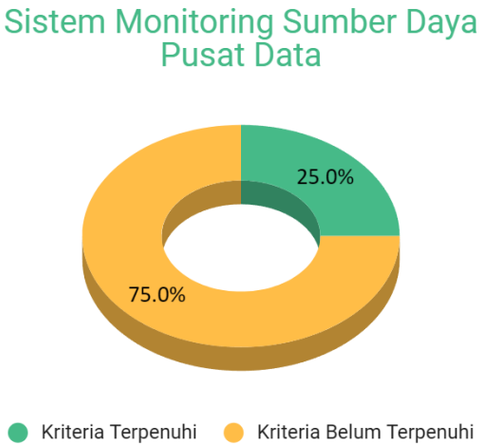

Grafik 3.2.5.1.7. Sistem Monitoring

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diperoleh informasi bahwa Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo baru memenuhi 2 (dua) kriteria sistem *monitoring* sumber daya pusat data dari 8 (delapan) kriteria yang ada.

I. Keamanan Lingkungan

Keamanan Pusat Data meliputi keamanan fisik luar dan dalam lingkungan pusat data seperti adanya petugas keamanan fisik (*security)*, alat pemantau lingkungan (CCTV), dan lainnya. Terdapat 6 (enam) lapis keamanan lingkungan yakni:

1. area pintu masuk kawasan pusat data;
2. area gedung dan parkir kendaraan;
3. area pintu masuk gedung pusat data;
4. area menuju pintu masuk ruang *data center*;
5. pintu utama ruang *data center*; dan
6. ruang utama *data center* (*rack server*).

Berikut ini disajikan tabel pemenuhan standar keamanan lingkungan di Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan SNI Pusat Data.

Tabel 3.2.5.1.9. Tabel Pemenuhan Standar Keamanan Lingkungan sesuai SNI Pusat Data

No	Pengamanan Area Gedung Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
Penerapan Six Layer Security pada area Pusat Komputasi		
1	Layer 1, perimeter defense (Area pintu utama kawasan data center)	
1.1	a. Terdapat CCTV pemantau	Tidak
1.2	b. Pagar	Tidak
1.3	c. Petugas keamanan	Tidak
2	Layer 2, clear zone. (Area Gedung dan parkir kendaraan)	
2.1	a. Tempat parkir untuk pengunjung dan karyawan	Tidak

No	Pengamanan Area Gedung Pusat Data	Kriteria Terpenuhi
2.2	b. Terdapat CCTV pemantau	Tidak
2.3	c. Lampu pencahayaan yang mengarah ke pintu masuk Gedung pusat data	Tidak
2.4	d.Terdapat sensor pendeteksi gangguan	Tidak
3	Layer 3, reception area (Area pintu masuk Gedung Data Center)	
3.1	a. Terdapat CCTV Pemantau	Tidak
3.2	b. Sistem pengunci manual	Tidak
3.3	c. Sistem pengunci biometrik (finger,kartu,retina)	Tidak
3.4	d. Pos jaga Satpam	Tidak
4	Layer 4, hallway/gray space (Area menuju pintu utama ruang data center)	
4.1	a. Terdapat sistem manajemen pengunjung	Tidak
4.2	b. Pintu akses ke ruang pusat data	Tidak
4.3	c. Sistem pengunci manual dan biometric sebagai pengontrol akses.	Tidak
5	Layer 5, Data center room/white space. (Pintu utama ruang data center)	
5.1	a. Terdapat video pemantau (CCTV)	Ya
5.2	b. Sistem pengunci multi. biometric dan manual	Ya
5.3	c. Tidak terdapat label Ruang Pusat Data	Ya
6	Layer 6, data center cabinet/white space. (Area utama di rak cabinet data center)	
6.1	a. Terdapat CCTV Dome, memantau 360°	Tidak
6.2	b. Terdapat pintu dan pengunci pada rak cabinet.	Ya

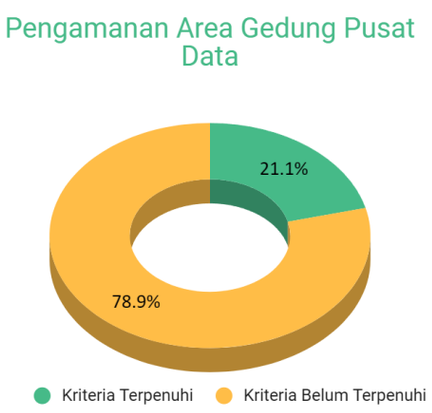

Grafik 3.2.5.1.8. Pengamanan Area Gedung Pusat Data

Berdasarkan tabel dan grafik di atas diperoleh informasi bahwa Pusat Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo baru memenuhi 4 (empat) kriteria dari 19 (sembilan belas) kriteria keamanan lingkungan pusat data.

J. Katalog Pusat Data/Komputasi

Katalog infrastruktur (fasilitas komputasi - pusat data) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (fasilitasi komputasi - pusat data) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.1.10. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Fasilitas Komputasi - Pusat Data

ID	Nama Fasilitas	Kode Model Referensi SPBE	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan	Unit Kerja Penanggung jawab	Klasifikasi Tier Fasilitas	Sistem Pengamanan Fasilitas	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
KP-DAI.01.01.03.01	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		Up To 10 Gbps	Telkom: 1 Gbps UII Net: 1,2 Gbps Provinsi: 800 Mbp	Gedung kominfo Kabupaten Kulon Progo, Jl. Tamtama no 3, Wates, Kulon Progo	Sendiri	Diskominfo	Non Tier		RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.01 PUSAT DATA	RAI.01.01.03 PUSAT DATA INSTANSI DAERAH
KP-DAI.01.01.03.02	Pusat Komputasi Dukcapil					Sendiri	Dinas Dukcapil	Non Tier		RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.01 PUSAT DATA	RAI.01.01.03 PUSAT DATA INSTANSI DAERAH
KP-DAI.01.01.03.03	Pusat Komputasi BKAD					Sendiri	BKAD	Non Tier		RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.01 PUSAT DATA	RAI.01.01.03 PUSAT DATA INSTANSI DAERAH

3.2.5.2. Sistem Integrasi

A. Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah (JIP) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dikelola oleh Diskominfo untuk melayani jaringan antar komputer di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), akses ke server, dan akses jaringan internet. Berikut ini gambar topologi Jaringan di Gedung Diskominfo Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

1. Topologi Jaringan

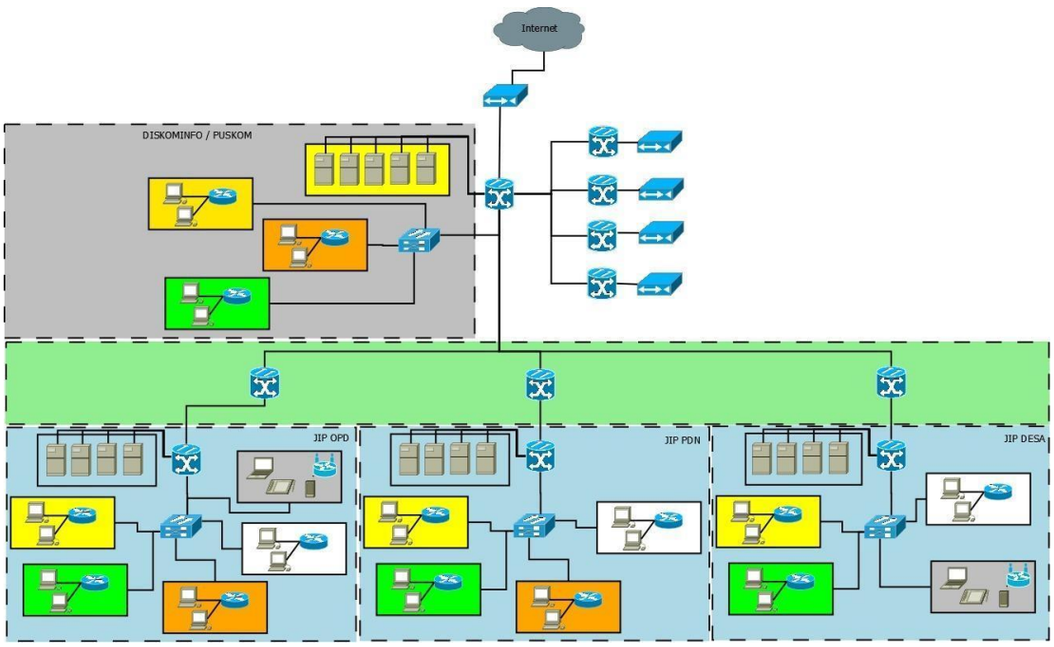

Gambar 3.2.5.2.1. Topologi Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh informasi bahwa peta jaringan di Pusat Data Gedung Dinas kominfo Kabupaten Kulon Progo bisa dibagi menjadi beberapa zona yakni:

- Zona Internet

Zona internet adalah zona yang terhubung langsung ke internet melalui penyedia jasa layanan internet (*Internet Service Provider* - ISP). Kondisi saat ini koneksi internet disediakan oleh 2 (dua) vendor yaitu Global Prima Utama dengan kapasitas bandwidth sebesar 1200 Mbps serta PT.Telkom dengan kapasitas bandwidth sebesar 1000 Mbps.

- Zona Jaringan Area Kabupaten (MAN)

Jaringan area metropolitan atau *Metropolitan Area Network* merupakan jaringan untuk menghubungkan lokasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke Pusat Komputasi atau Pusat Kendali. Kondisi saat ini sebanyak 130 OPD sudah terhubung ke Jaringan Intra Pemerintah mendapatkan sumber internet dari Dishubkominfo dengan menggunakan media transmisi kabel baik kabel *fiber optic* (FO) maupun kabel UTP dan wireless.

Tabel 3.2.5.2.1.. Sebaran Jaringan Intra Pemerintah/MAN

No	Nama Instansi	Kategori Instansi	Status
1	INSPEKTORAT DAERAH	Badan	Terhubung
2	SEKRETARIAT DAERAH	Badan	Terhubung
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	Badan	Terhubung
4	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Badan	Terhubung
5	SEKRETARIAT DPRD	Badan	Terhubung
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan	Terhubung
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Badan	Terhubung
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan	Terhubung
9	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Dinas	Terhubung
10	DINAS KESEHATAN	Dinas	Terhubung
11	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Dinas	Terhubung
12	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas	Terhubung
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas	Terhubung
14	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Dinas	Terhubung
15	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	Dinas	Terhubung
16	DINAS TENAGA KERJA	Dinas	Terhubung
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas	Terhubung
18	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas	Terhubung
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Dinas	Terhubung
20	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	Dinas	Terhubung
21	DINAS PARIWISATA	Dinas	Terhubung
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas	Terhubung
23	DINAS PERDAGANGAN	Dinas	Terhubung
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Dinas	Terhubung
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Dinas	Terhubung
26	DINAS PERHUBUNGAN	Dinas	Terhubung
27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas	Terhubung
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Dinas	Terhubung
29	RSUD WATES	Dinas	Terhubung
30	RSUD NYI AGENG SERANG	Dinas	Terhubung
31	KAPANEWON TEMON	Kecamatan/Kapanewon	Terhubung
32	KAPANEWON WATES	Kecamatan/Kapanewon	Terhubung
33	KAPANEWON PANJATAN	Kecamatan/Kapanewon	Terhubung
34	KAPANEWON GALUR	Kecamatan/Kapanewon	Terhubung
35	KAPANEWON LENDAH	Kecamatan/Kapanewon	Terhubung
36	KAPANEWON SENTOLO	Kecamatan/Kapanewon	Terhubung
37	KAPANEWON PENGASIH	Kecamatan/Kapanewon	Terhubung
38	KAPANEWON KOKAP	Kecamatan/Kapanewon	Terhubung
39	KAPANEWON GIRIMULYO	Kecamatan/Kapanewon	Terhubung
40	KAPANEWON NANGGULAN	Kecamatan/Kapanewon	Terhubung
41	KAPANEWON SAMIGALUH	Kecamatan/Kapanewon	Terhubung
42	KAPANEWON KALIBAWANG	Kecamatan/Kapanewon	Terhubung
43	KARANGSARI	Kalurahan	Terhubung

No	Nama Instansi	Kategori Instansi	Status
44	PENGASIH	Kalurahan	Terhubung
45	PANJATAN	Kalurahan	Terhubung
46	WAHYUHARJO	Kalurahan	Terhubung
47	KARANGWULUH	Kalurahan	Terhubung
48	TEMON KULON	Kalurahan	Terhubung
49	KEBONREJO	Kalurahan	Terhubung
50	JANTEN	Kalurahan	Terhubung
51	KALIDENGEN	Kalurahan	Terhubung
52	GLAGAH	Kalurahan	Terhubung
53	GIRIPURWO	Kalurahan	Terhubung
54	BENDUNGAN	Kalurahan	Terhubung
55	KULWARU	Kalurahan	Terhubung
56	SOGAN	Kalurahan	Terhubung
57	KARANGWUNI	Kalurahan	Terhubung
58	WATES	Kelurahan	Terhubung
59	PURWOHARJO	Kalurahan	Terhubung
60	GERBOSARI	Kalurahan	Terhubung
61	PAGERHARJO	Kalurahan	Terhubung
62	TRIHARJO	Kalurahan	Terhubung
63	BROSOT	Kalurahan	Terhubung
64	HARGOREJO	Kalurahan	Terhubung
65	DEMEN	Kalurahan	Terhubung
66	*BANARAN*	Kalurahan	Terhubung
67	*KARANGSEWU*	Kalurahan	Terhubung
68	KRANGGAN	Kalurahan	Terhubung
69	NOMPOREJO	Kalurahan	Terhubung
70	PANDOWAN	Kalurahan	Terhubung
71	BANJARARUM	Kalurahan	Terhubung
72	BANJARSARI	Kalurahan	Terhubung
73	BANJARHARJO	Kalurahan	Terhubung
74	GULUREJO	Kalurahan	Terhubung
75	NGENTAKREJO	Kalurahan	Terhubung
76	SIDOREJO	Kalurahan	Terhubung
77	BOJONG	Kalurahan	Terhubung
78	BUGEL	Kalurahan	Terhubung
79	CERME	Kalurahan	Terhubung
80	DEPOK	Kalurahan	Terhubung
81	GARONGAN	Kalurahan	Terhubung
82	GOTAKAN	Kalurahan	Terhubung
83	KANOMAN	Kalurahan	Terhubung
84	KREMBANGAN	Kalurahan	Terhubung
85	PLERET	Kalurahan	Terhubung
86	TAYUBAN	Kalurahan	Terhubung
87	KEDUNGSARI	Kalurahan	Terhubung
88	DEMANGREJO	Kalurahan	Terhubung
89	SRIKAYANGAN	Kalurahan	Terhubung
90	JANGKARAN	Kalurahan	Terhubung
91	KALIGINTUNG	Kalurahan	Terhubung
92	KULUR	Kalurahan	Terhubung
93	PALIHAN	Kalurahan	Terhubung
94	PLUMBON	Kalurahan	Terhubung
95	SINDUTAN	Kalurahan	Terhubung
96	GIRIPENI	Kalurahan	Terhubung
97	NGESTIHARJO	Kalurahan	Terhubung
98	KEDUNDANG	Kalurahan	Terhubung
99	TEMON WETAN	Kalurahan	Terhubung
100	TIRTORAHAYU	Kalurahan	Terhubung
101	BUMIREJO	Kalurahan	Terhubung

No	Nama Instansi	Kategori Instansi	Status
102	JATIREJO	Kalurahan	Terhubung
103	TUKSONO	Kalurahan	Terhubung
104	SALAMREJO	Kalurahan	Terhubung
105	SUKORENO	Kalurahan	Terhubung
106	KALIAGUNG	Kalurahan	Terhubung
107	SENTOLO	Kalurahan	Terhubung
108	BANGUNCIPTO	Kalurahan	Terhubung
109	SENDANGSARI	Kalurahan	Terhubung
110	SIDOMULYO	Kalurahan	Terhubung
111	MARGOSARI	Kalurahan	Terhubung
112	TAWANGSARI	Kalurahan	Terhubung
113	KALIREJO	Kalurahan	Terhubung
114	HARGOMULYO	Kalurahan	Terhubung
115	HARGOWILIS	Kalurahan	Terhubung
116	HARGOTIRTO	Kalurahan	Terhubung
117	JATIMULYO	Kalurahan	Terhubung
118	PENDOWOREJO	Kalurahan	Terhubung
119	PURWOSARI	Kalurahan	Terhubung
120	BANYUROTO	Kalurahan	Terhubung
121	DONOMULYO	Kalurahan	Terhubung
122	WIJIMULYO	Kalurahan	Terhubung
123	TANJUNGHARJO	Kalurahan	Terhubung
124	JATISARONO	Kalurahan	Terhubung
125	KEMBANG	Kalurahan	Terhubung
126	KBONHARJO	Kalurahan	Terhubung
127	SIDOHARJO	Kalurahan	Terhubung
128	NGARGOSARI	Kalurahan	Terhubung
129	BANJARASRI	Kalurahan	Terhubung
130	BANJAROYO	Kalurahan	Terhubung

- Zona DeMilitarized Zone (DMZ)

Zona DMZ untuk penempatan server - server aplikasi. Switch server langsung terhubung dengan Router Firewall. Akses dari internal maupun eksternal akan disaring (filter) oleh Router Firewall.

B. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Diskominfo saat ini sedang merencanakan untuk mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan (SPL) yang disediakan oleh Komdigi dan berikut merupakan katalog Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

C. Katalog Jaringan Intra Pemerintah

Katalog infrastruktur (jaringan intra pemerintah) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Jaringan Intra Pemerintah (JIP) yang digunakan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Jaringan ini dirancang khusus untuk menghubungkan perangkat daerah seperti Dinas, Badan, UPT, Kabupaten, Kecamatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. JIP beroperasi sebagai jaringan Area Kabupaten (MAN) yang mencakup area tertentu di dalam Kabupaten. Bertindak sebagai pengelola jaringan. JIP memiliki tujuan untuk mendukung pertukaran data dan komunikasi yang efisien antara perangkat daerah. Dengan adanya jaringan ini, kolaborasi dan koordinasi antara unit-unit pemerintah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat terjalin dengan baik untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi.

Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.2.2. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Sistem Integrasi - JIP

ID	Nama Jaringan Intra Pemerintah	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Nama Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
KP-DAI.02.01.03.01	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menghubungkan Dinas, Badan, UPT yang ada di Kabupaten Kulon Progo	Wired (Kabel)	Sendiri	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Diskominfo Kabupaten Kulon Progo	2,2 Gbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH	RAI.02.01.03 JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH
KP-DAI.02.01.03.02	Jaringan Intra Pemerintah Metro	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menghubungkan, Kelurahan dan Kapanewon	Wired (Kabel)	Pihak Ketiga	PT. Telkom	PT. Telkom	1,3 Gbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH	RAI.02.01.03 JARINGAN INTRA PEMERINTAH

ID	Nama Jaringan Intra Pemerintah	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Nama Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
												DAERAH
KP-DAI.02.01.03.03	Jaringan Intra Pemerintah Daerah DIY	Jaringan Intra Pemerintah Daerah DIY yang menghubungkan Kabupaten Kulon Progo	Wired (Kabel)	Instansi Pemerintah Lain	Pemerintah Daerah DIY	Diskominfo Pemda DIY	800 Mbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH	RAI.02.01.03 JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH

D. Katalog Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Katalog infrastruktur (sistem penghubung layanan pemerintah) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (sistem penghubung layanan pemerintah) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.2.3. Referensi Arsitektur Infrastruktur - *Sistem Penghubung Layanan Pemerintah*

ID	Nama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Deskripsi Sistem Penghubung	Jenis SPL [Kode Referensi Infrastruktur]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)	Aplikasi (Dependency)	Data dan Informasi (Dependensi)

KP-DAI.02.02.01.01	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan		Sendiri	Diskominfo		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.02 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	RAI.02.02.01 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	-SIMASNEG -SURATKU -SIMOK -JDIH Kelurahan -JDIH Kabupaten	
KP-DAI.02.02.01.02	Inaproc Service Bus	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Kulon Progo		Instansi Pemerintah Lain	LKPP		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.02 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	RAI.02.02.01 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo		
KP-DAI.02.02.01.03	SPLP Nasional	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan		Instansi Pemerintah Lain	Komdigi		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.02 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	RAI.02.02.01 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	-e-BPHTB	

3.2.5.3. Platform

A. Pusat Komputasi Awan

Katalog infrastruktur (pusat komputasi awan) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (pusat komputasi awan) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Hanya saja untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo belum menggunakan teknologi komputasi awan baik dari jenis *infrastructure as a service, software as a services.*

Tabel 3.2.5.3.1. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Pusat Komputasi Awan

ID	Nama Government Cloud	Deskripsi Government Cloud	Tipe Cloud [Mengacu Kode Referensi Infrastruktur]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Biaya Layanan	Unit Pengembang Government Cloud	Unit Operasional Government Cloud	Jangka Waktu Pelayanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.03.02.01	Belum ada									RAI.03 PLATFORM	RAI.03.02 KOMPUTASI AWAN	RAI.03.02.02 IAAS	Diskominfo

B. Perangkat Keras Server

Katalog infrastruktur (perangkat keras server) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat keras server) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.3.2. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform Server

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.01.01	DNS Server - DNS Server1	Server yang digunakan untuk layanan DNS	Domain Name Server		Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	4	Low End	1 x 80 GB	Non Raid	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.02	Voip Server - Server Voice Over IP	Server yang digunakan untuk layanan VoIP	Server VoiP		Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupat	4	Low End	1 x 80 GB	Non Raid	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
								en Kulon Progo								
KP-DAI.03.01.01.03	Network Server - Bandwidth Management	Server yang digunakan untuk NMS (Network Management System)			Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	16	Mid End	2 x 1.2 TB	Raid 1	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.04	App Server - Simasneg	Server yang digunakan untuk aplikasi kepegawaian		- PROFILE - E-LAYANAN - SIMASNEG - PRESENSI ONLINE	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	8	Mid End	1 x 1 TB	Non Raid	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.05	App Server - Aplikasi SIM Keuangan BPKP	Server yang digunakan untuk aplikasi SIM Keuangan BPKP		- SIMDA KEUANGAN	Sendiri	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	12	Low End	2 x 146 GB	Raid 1	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.06	App Server - Aplikasi Geoportal	Server yang digunakan untuk aplikasi		- GEOPORTAL	Sendiri	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah	2	Low End	1 x 250 GB	Non Raid	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		Geoportal						Kabupaten Kulon Progo								
KP-DAI.03.01.01.07	App Server - Aplikasi Kearsipan	Server yang digunakan untuk aplikasi Kearsipan		- KEARSIPAN	Sendiri	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	16	Low End	1 x 900 GB	Non Raid	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.08	App Server - Hosting e-Plan, e-Monev	Server yang digunakan untuk aplikasi Bapedda		- E-RENCANAKU - E-MONEVKU	Sendiri	Badan Perencanaan Daerah	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	16	Mid End	1 x 1.8 TB	Non Raid	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.09	App Server - Hosting	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi berbasis web		- SIMO	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	16	Mid End	2 x 1 TB	Raid 1	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.10	VM 01 - Hosting Web Desa	Server yang digunakan untuk hosting		- WEB DESA	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah	16	Low End	2 x 1 TB	Raid 1	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		web desa						Kabupaten Kulon Progo								
KP-DAI.03.01.01.11	VM 02 - Hosting Aplikasi	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi berbasis web		- SURATKU - JENDELAKU - BANGSAKU - E-UMKM - SINONAKU - TTS - TANIKU - SIPENTASJAWARAKU - SIJAKA - FKUB - ELINGKU - IKANKU - SIBAKU - SIGAPREKOM - STTPDKU - PAMDALKU	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	32	Mid End	2 x 1.2 TB	Raid 1	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.12	VM 03 - Hosting aplikasi Dinas Kesehatan	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi berbasis web		- CBT UPKP - MENARAKU - SATUDATA - SIG KULON PROGO - SIJARIKU - WEBSITE SMART CITY	Sendiri	Dinas Kesehatan	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	16	Mid End	2 x 1 TB	Raid 1	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.13	VM 04 - Hosting	Server yang digunakan untuk hosting		- GSB - JAMKESSOS - JDIH - KALURAHANKU - KULANTIK	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah	16	Low End	2 x 1 TB	Raid 1	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		aplikasi berbasis web		- SIAPIK - SIBANGKU - SIKEPOKU - SKNKU - SIMOLEK - MATAHATIKU				Kabupaten Kulon Progo								
KP-DAI.03.01.01.14	VM 05 - Mirroring Aplikasi SIM Pengelolaan Keuangan BPKP Hosting	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi SIM Pengelolaan Keuangan BPKP		- SIKUDES - SIMPKD	Sendiri	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	16	Low End	2 x 1 TB	Raid 1	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.15	VM 06 - Hosting Inlislite	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi Perpustakaan		- GEOPORTAL - E-LAYANAN - E-PRESENSI - E-TPP - INLISLITE	Sendiri	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	16	Mid End	1x1TB	Non Raid	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.16	VM 07 - Hosting	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi berbasis		- BELAJARKU - E-PAK - SATUDATA (CEKAN)	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon	48	Mid End	2 x 1.2 TB	Raid 1	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		web						Progo								
KP-DAI.03.01.01.17	VM 08 - Hosting	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi berbasis web		- E-PEMILOS	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	16	Mid End	2 x 1.2 TB	Raid 1	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.18	VM 09 - SPSE Mirror	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi SPSE		- GITLAB	Sendiri	Sekretariat Daerah - Bag. Layanan Pengadaan	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	128	Mid End	8 x 1.2 TB	Raid 10	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.19	VM 10 - Hosting App Keuangan Desa	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi Keuangan Desa		- SIKUDES - GUACAMOLE	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	64	Low End	4 x 1.2 TB	Raid 10	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.20	Hosting Server - C-Panel Hosting	Server yang digunakan untuk hosting		- BACKUP WEBSITE OPD	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah	48	Mid End	3 x 1.2 TB	Raid 10	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		aplikasi berbasis web						Kabupaten Kulon Progo								
KP-DAI.03.01.01.21	App Server - Aplikasi SPSE	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi SPSE		- SPSE	Sendiri	Sekretariat Daerah - Bag. Layanan Pengadaan	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	16	Mid End	4 x 300 GB	Raid 1	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.22	SPSE - Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP		- SPSE	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	256	Mid End	6 X 1.2 TB	Raid 10	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.23	VM11 - Hosting app PU	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi Dinas PU		- KONTRUKSIKU	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	256	Mid End	3x1.2 TB	Raid 1	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.01.24	VM12 - Hosting app Pertarung	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi Tata ruang		- SINTARU	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	192	Mid End	2 x 1.2 TB	Raid 1	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.25	(SIMPATDA,e-SPTPD, eLAYANAN,e-SPPT) - Hosting app BKAD	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi layanan pajak		- SIMPATDA - TSTPD - E-LAYANAN - E-SPPT	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	64	Mid End	3x1.2 TB	Raid 1	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.26	(Aset dan persediaan) - Hosting app BKAD	Server yang digunakan untuk hosting aplikasi aset		- SIMASET - SIMPERSEDIAAN	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	128	Mid End	4x1.2 TB	Raid 10	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo
KP-DAI.03.01.01.27	new-CPANEL - C-Panel Hosting_NEW	Server yang digunakan untuk hosting website OPD		- WEB OPD LITE	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon	128	Mid End	4x1.2 TB	Raid 10	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
								Progo								
KP-DAI.03.01.01.28	- NMS Farm	Server yang digunakan untuk aplikasi monitoring aset TIK		- GSB	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	Pusat Komputasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	128	Mid End	4x1.2 TB	Raid 10	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.01 SERVER	Diskominfo

C. Perangkat Keras Storage

Katalog infrastruktur (perangkat keras storage) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat keras storage) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.3.3. Referensi Arsitektur Infrastruktur - *Platform* Perangkat Keras Storage

ID	Nama Media Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang Digunakan[Data Input]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Lokasi Storage [Mengacu Metadata Fasilitas Komutasi]	Perangkat Lunak yang Digunakan	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	Instansi(Dependency)
KP-DAI.03.01.02.01													

D. Perangkat Keras Jaringan

Katalog infrastruktur (perangkat keras jaringan) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat keras jaringan) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.3.4. Referensi Arsitektur Infrastruktur - *Platform* Perangkat keras jaringan

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.03.01	Router Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Router Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.03.02	Router Badan Keuangan dan Aset Daerah	Router Badan Keuangan dan Aset Daerah	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.03	Router Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Router Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.04	Router Inspektorat Daerah	Router Inspektorat Daerah	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.05	Router Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Router Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.06	Router Dinas Kesehatan	Router Dinas Kesehatan	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.07	Router RSUD Wates	Router RSUD Wates	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.08	Router RSUD Nyi Ageng Serang	Router RSUD Nyi Ageng Serang	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.09	Router Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Router Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.10	Router Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Router Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.03.11	Router Satuan Polisi Pamong Praja	Router Satuan Polisi Pamong Praja	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.12	Router Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Router Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.13	Router Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Router Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.14	Router Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Router Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.15	Router Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Router Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.16	Router Dinas Lingkungan Hidup	Router Dinas Lingkungan Hidup	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.17	Router Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Router Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.18	Router Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan	Router Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
	Keluarga Berencana	Keluarga Berencana								
KP-DAI.03.01.03.19	Router Dinas Perhubungan	Router Dinas Perhubungan	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.20	Router Dinas Komunikasi dan Informasi	Router Dinas Komunikasi dan Informasi	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.21	Router Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Router Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.22	Router Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Router Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.23	Router Dinas Kebudayaan	Router Dinas Kebudayaan	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.24	Router Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Router Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.25	Router Dinas Kelautan dan Perikanan	Router Dinas Kelautan dan Perikanan	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.26	Router Dinas Pariwisata	Router Dinas Pariwisata	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.03.27	Router Dinas Pertanian dan Pangan	Router Dinas Pertanian dan Pangan	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.28	Router Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Router Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.29	Router Sekretariat Daerah	Router Sekretariat Daerah	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.30	Router Sekretariat DPRD	Router Sekretariat DPRD	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.31	Router Kapanewon Temon	Router Kapanewon Temon	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.32	Router Kapanewon Wates	Router Kapanewon Wates	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.33	Router Kapanewon Panjatan	Router Kapanewon Panjatan	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.34	Router Kapanewon Galur	Router Kapanewon Galur	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.35	Router Kapanewon Lendah	Router Kapanewon Lendah	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.36	Router Kapanewon Sentolo	Router Kapanewon Sentolo	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.03.37	Router Kapanewon Pengasih	Router Kapanewon Pengasih	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.38	Router Kapanewon Kokap	Router Kapanewon Kokap	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.39	Router Kapanewon Girimulyo	Router Kapanewon Girimulyo	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.40	Router Kapanewon Nanggulan	Router Kapanewon Nanggulan	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.41	Router Kapanewon Samigaluh	Router Kapanewon Samigaluh	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.42	Router Kapanewon Kalibawang	Router Kapanewon Kalibawang	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.43	Router Kalurahan JANGKARAN	Router Kalurahan JANGKARAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.44	Router Kalurahan SINDUTAN	Router Kalurahan SINDUTAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.45	Router Kalurahan PALIHAN	Router Kalurahan PALIHAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.46	Router Kalurahan GLAGAH	Router Kalurahan GLAGAH	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.03.47	Router Kalurahan KALIDENGEN	Router Kalurahan KALIDENGEN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.48	Router Kalurahan PLUMBON	Router Kalurahan PLUMBON	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.49	Router Kalurahan KEDUNDANG	Router Kalurahan KEDUNDANG	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.50	Router Kalurahan DEMEN	Router Kalurahan DEMEN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.51	Router Kalurahan KULUR	Router Kalurahan KULUR	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.52	Router Kalurahan KALIGINTUNG	Router Kalurahan KALIGINTUNG	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.53	Router Kalurahan TEMON WETAN	Router Kalurahan TEMON WETAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.54	Router Kalurahan TEMON KULON	Router Kalurahan TEMON KULON	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.55	Router Kalurahan KEBONREJO	Router Kalurahan KEBONREJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.56	Router Kalurahan JANTEN	Router Kalurahan JANTEN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.03.57	Router Kalurahan KARANGWULUH	Router Kalurahan KARANGWULUH	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.58	Router Kalurahan KARANGWUNI	Router Kalurahan KARANGWUNI	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.59	Router Kalurahan SOGAN	Router Kalurahan SOGAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.60	Router Kalurahan KULWARU	Router Kalurahan KULWARU	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.61	Router Kalurahan NGESTIHARJO	Router Kalurahan NGESTIHARJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.62	Router Kalurahan BENDUNGAN	Router Kalurahan BENDUNGAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.63	Router Kalurahan TRIHARJO	Router Kalurahan TRIHARJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.64	Router Kalurahan GIRIPENI	Router Kalurahan GIRIPENI	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.65	Router Kelurahan WATES	Router Kelurahan WATES	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.66	Router Kalurahan GARONGAN	Router Kalurahan GARONGAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.03.67	Router Kalurahan PLERET	Router Kalurahan PLERET	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.68	Router Kalurahan BUGEL	Router Kalurahan BUGEL	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.69	Router Kalurahan KANOMAN	Router Kalurahan KANOMAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.70	Router Kalurahan DEPOK	Router Kalurahan DEPOK	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.71	Router Kalurahan BOJONG	Router Kalurahan BOJONG	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.72	Router Kalurahan TAYUBAN	Router Kalurahan TAYUBAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.73	Router Kalurahan GOTAKAN	Router Kalurahan GOTAKAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.74	Router Kalurahan PANJATAN	Router Kalurahan PANJATAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.75	Router Kalurahan CERME	Router Kalurahan CERME	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.76	Router Kalurahan KREMBANGAN	Router Kalurahan KREMBANGAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.03.77	Router Kalurahan BANARAN	Router Kalurahan BANARAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.78	Router Kalurahan KRANGGAN	Router Kalurahan KRANGGAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.79	Router Kalurahan NOMPOREJO	Router Kalurahan NOMPOREJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.80	Router Kalurahan KARANGSEWU	Router Kalurahan KARANGSEWU	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.81	Router Kalurahan TIRTORAHAYU	Router Kalurahan TIRTORAHAYU	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.82	Router Kalurahan PANDOWAN	Router Kalurahan PANDOWAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.83	Router Kalurahan BROSOT	Router Kalurahan BROSOT	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.84	Router Kalurahan WAHYUHARJO	Router Kalurahan WAHYUHARJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.85	Router Kalurahan BUMIREJO	Router Kalurahan BUMIREJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.86	Router Kalurahan JATIREJO	Router Kalurahan JATIREJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.03.87	Router Kalurahan SIDOREJO	Router Kalurahan SIDOREJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.88	Router Kalurahan GULUREJO	Router Kalurahan GULUREJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.89	Router Kalurahan NGENTAKREJO	Router Kalurahan NGENTAKREJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.90	Router Kalurahan DEMANGREJO	Router Kalurahan DEMANGREJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.91	Router Kalurahan SRIKAYANGAN	Router Kalurahan SRIKAYANGAN	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.92	Router Kalurahan TUKSONO	Router Kalurahan TUKSONO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.93	Router Kalurahan SALAMREJO	Router Kalurahan SALAMREJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.94	Router Kalurahan SUKORENO	Router Kalurahan SUKORENO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.95	Router Kalurahan KALIAGUNG	Router Kalurahan KALIAGUNG	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.96	Router Kalurahan SENTOLO	Router Kalurahan SENTOLO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.03.97	Router Kalurahan BANGUNCIPTO	Router Kalurahan BANGUNCIPTO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.98	Router Kalurahan TAWANGSARI	Router Kalurahan TAWANGSARI	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.99	Router Kalurahan KARANGSARI	Router Kalurahan KARANGSARI	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.100	Router Kalurahan KEDUNGSARI	Router Kalurahan KEDUNGSARI	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.101	Router Kalurahan MARGOSARI	Router Kalurahan MARGOSARI	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.102	Router Kalurahan PENGASIH	Router Kalurahan PENGASIH	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.103	Router Kalurahan SENDANGSARI	Router Kalurahan SENDANGSARI	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.104	Router Kalurahan SIDOMULYO	Router Kalurahan SIDOMULYO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.105	Router Kalurahan HARGOMULYO	Router Kalurahan HARGOMULYO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.106	Router Kalurahan HARGOREJO	Router Kalurahan HARGOREJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.03.107	Router Kalurahan HARGOWILIS	Router Kalurahan HARGOWILIS	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.108	Router Kalurahan KALIREJO	Router Kalurahan KALIREJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.109	Router Kalurahan HARGOTIRTO	Router Kalurahan HARGOTIRTO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.110	Router Kalurahan JATIMULYO	Router Kalurahan JATIMULYO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.111	Router Kalurahan GIRIPURWO	Router Kalurahan GIRIPURWO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.112	Router Kalurahan PENDOWOREJO	Router Kalurahan PENDOWOREJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.113	Router Kalurahan PURWOSARI	Router Kalurahan PURWOSARI	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.114	Router Kalurahan BANYUROTO	Router Kalurahan BANYUROTO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.115	Router Kalurahan DONOMULYO	Router Kalurahan DONOMULYO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.116	Router Kalurahan WIJIMULYO	Router Kalurahan WIJIMULYO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.03.117	Router Kalurahan TANJUNGHARJO	Router Kalurahan TANJUNGHARJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.118	Router Kalurahan JATISARONO	Router Kalurahan JATISARONO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.119	Router Kalurahan KEMBANG	Router Kalurahan KEMBANG	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.120	Router Kalurahan KEBONHARJO	Router Kalurahan KEBONHARJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.121	Router Kalurahan BANJARSARI	Router Kalurahan BANJARSARI	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.122	Router Kalurahan PURWOHARJO	Router Kalurahan PURWOHARJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.123	Router Kalurahan SIDOHARJO	Router Kalurahan SIDOHARJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.124	Router Kalurahan GERBOSARI	Router Kalurahan GERBOSARI	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.125	Router Kalurahan NGARGOSARI	Router Kalurahan NGARGOSARI	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.126	Router Kalurahan PAGERHARJO	Router Kalurahan PAGERHARJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.03.127	Router Kalurahan BANJARARUM	Router Kalurahan BANJARARUM	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.128	Router Kalurahan BANJARASRI	Router Kalurahan BANJARASRI	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.129	Router Kalurahan BANJARHARJO	Router Kalurahan BANJARHARJO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.130	Router Kalurahan BANJAROYO	Router Kalurahan BANJAROYO	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.131	UPT Taman Budaya	UPT Taman Budaya	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.03.132	UPT Balai Latihan Kerja	UPT Balai Latihan Kerja	Router	Sendiri	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINGAN	Dinas Kominfo

E. Perangkat Keras Keamanan

Katalog infrastruktur (perangkat keras keamanan) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat keras keamanan) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.3.5. Referensi Arsitektur Infrastruktur - *Platform* Perangkat Keras Keamanan

ID	Nama Perangkat Keamanan	Deskripsi Security Device	Tipe Keamanan Device	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.04.01	Firewall Sangfor	Firewall untuk Jaringan FO	Firewall	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.04 PERANGKAT KERAS KEAMANAN	Diskominfo

F. Perangkat Periferal

Katalog infrastruktur (perangkat keras periferal) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat keras periferal) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.3.6. Referensi Arsitektur Infrastruktur - *Platform* Perangkat Periferal

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-	Mouse	Perangkat untuk	Input	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA	RAI.03.01.05	Diskominfo

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
DAI.03.01.05.01		menjalankan kursor					INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	PERIPHERAL	
KP-DAI.03.01.05.02	Keyboard	Perangkat untuk mengetik	Output	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Diskominfo
KP-DAI.03.01.05.03	Monitor	Perangkat untuk menampilkan desktop komputer	Output	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Diskominfo
KP-DAI.03.01.05.04	Alat Pemadam Kebakaran	Alat pemadam Kebakaran untuk persiapan penanggulangan kebakaran	Output	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Diskominfo
KP-DAI.03.01.05.05	Thermometer	Perangkat untuk mengawasi suhu udara di ruang Data Center	Output	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Diskominfo
KP-DAI.03.01.05.06	Higrometer	Perangkat untuk mengawasi kelembaban udara di ruang Data Center	Output	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Diskominfo
KP-DAI.03.01.05.07	Generator	Pembangkit tenaga listrik cadangan jika listrik PLN mengalami gangguan	Output	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Diskominfo
KP-DAI.03.01.05.08	UPS	Media penyimpanan tenaga listrik jika listrik PLN mengalami	Output	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Diskominfo

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		gangguan							
KP-DAI.03.01.05.09	Door Access	Sensor sidik jari untuk membuka/menutup akses ke dalam ruangan Data Center	Input	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Diskominfo
KP-DAI.03.01.05.10	CCTV	Kamera untuk mengawasi keadaan ruangan Data Center	Input	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Diskominfo
KP-DAI.03.01.05.11	DVR	Pemroses video dari kamera CCTV	Output	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Diskominfo
KP-DAI.03.01.05.12	DoorLock	sistem pengunci pada sebuah pintu, yang berfungsi untuk mengamankan dan membatasi akses ke suatu ruangan	Input	Diskominfo	Diskominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Diskominfo

G. Perangkat Lunak

Katalog infrastruktur (perangkat lunak) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat lunak) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.5.3.7. Referensi Arsitektur Infrastruktur - *Platform* Perangkat Lunak

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Perangkat Sistem Operasi	Jenis Perangkat Sistem Utilitas	Jenis Perangkat Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi [Tanggal Berakhirnya Lisensi]	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
KP-DAI.03.01.06.01	DEBIAN	Sistem operasi server berbasis Linux	Sistem Operasi				Kode Sumber Terbuka	GPL		RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.07 PERANGKAT LUNAK PLATFORM	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.06.02	CENTOS	Sistem operasi server berbasis Linux	Sistem Operasi				Kode Sumber Terbuka	GPL		RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.07 PERANGKAT LUNAK PLATFORM	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.06.03	UBUNTU	Sistem operasi server berbasis Linux	Sistem Operasi				Kode Sumber Terbuka	GPL		RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.07 PERANGKAT LUNAK PLATFORM	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.06.04	DEBIAN	Sistem operasi server berbasis Linux	Sistem Operasi				Kode Sumber Terbuka	GPL		RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.07 PERANGKAT LUNAK PLATFORM	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.06.05	CENTOS	Sistem operasi server berbasis Linux	Sistem Operasi				Kode Sumber Terbuka	GPL		RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.07 PERANGKAT LUNAK PLATFORM	Dinas Kominfo
KP-DAI.03.01.06.06	UBUNTU	Sistem operasi server berbasis Linux	Sistem Operasi				Kode Sumber Terbuka	GPL		RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.07 PERANGKAT LUNAK PLATFORM	Dinas Kominfo

3.2.6. Arsitektur Keamanan

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan *(non-repudiation)* sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan.

Mengacu pada Rancangan Lampiran Peraturan Presiden Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 2021, ada tiga hal yang perlu dilakukan pengecekan kondisi saat ini yaitu;

1. Standar keamanan
2. Penerapan keamanan
3. Kelaikan keamanan

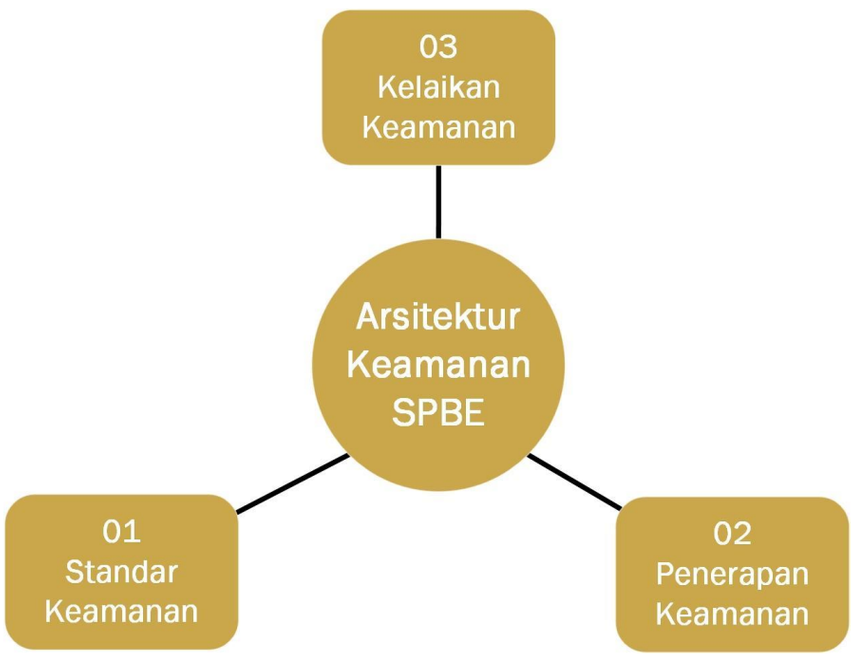

Gambar 3.2.6.1 Komponen Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Domain arsitektur keamanan selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE yang ditetapkan.

Secara umum, taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional pada tingkat 1 terdapat 3 domain keamanan yaitu: (1) Standar Keamanan, (2) Penerapan Keamanan, (3) Kelaikan keamanan.

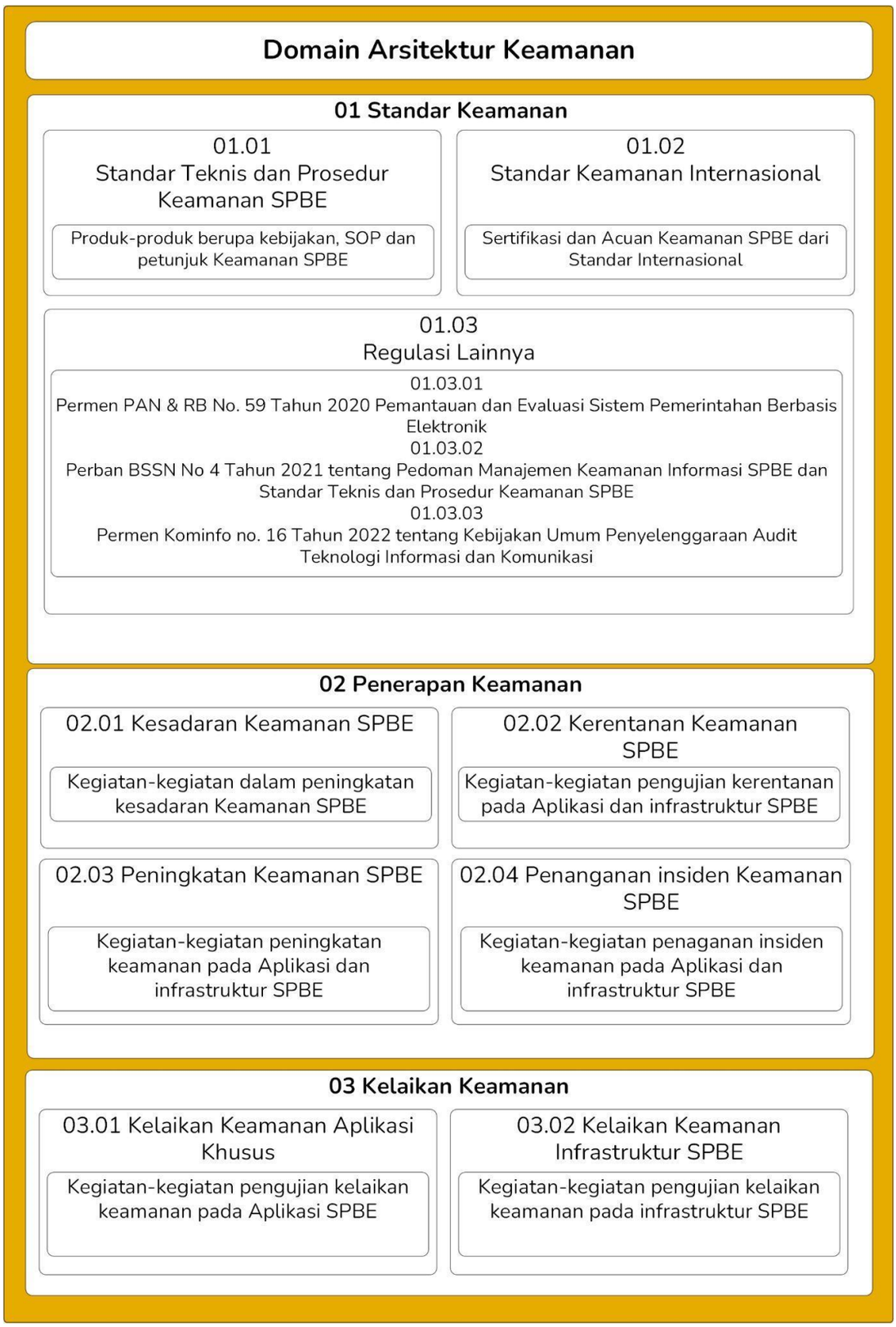

Gambar 3.2.6.2. Domain Arsitektur Keamanan

3.2.6.1. Standar Keamanan

Standar keamanan berdasarkan Peraturan Presiden no 132 tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional terdapat 3 (tiga) hal yaitu:

1. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
2. Standar Keamanan Internasional
3. Regulasi lainnya.

Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Kulon Progo saat ini telah menyediakan kebijakan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.6.1.1 Daftar Peraturan Terkait Keamanan Informasi

ID	Nama Standar Keamanan	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	→ RAK Level 1 (Dependency)	→ RAK Level 2 (Dependency)
KP-DAK.01.01.01	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2025	Peraturan Pemerintah Daerah		2021		RAK.01 STANDAR KEAMANAN	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
KP-DAK.01.01.02	SOP penanganan insiden dan masalah TIK	Standar Operasional Prosedur				RAK.01 STANDAR KEAMANAN	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
KP-DAK.01.01.03	SOP pengelolaan aset TIK	Standar Operasional Prosedur				RAK.01 STANDAR KEAMANAN	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
KP-DAK.01.01.04	SOP Pengendalian Hak Akses Akun	Standar Operasional Prosedur				RAK.01 STANDAR KEAMANAN	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
KP-DAK.01.01.05	Prosedur Colocation (Penitipan Server)	Standar Operasional Prosedur				RAK.01 STANDAR KEAMANAN	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
KP-DAK.01.01.06	Prosedur penilaian keamanan sistem Informasi	Standar Operasional Prosedur				RAK.01 STANDAR KEAMANAN	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE

ID	Nama Standar Keamanan	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	→ RAK Level 1 (Dependency)	→ RAK Level 2 (Dependency)
KP-DAK.01.01.07	Prosedur Pengelolaan Aset TIK	Standar Operasional Prosedur				RAK.01 STANDAR KEAMANAN	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE

3.2.6.2. Penerapan Keamanan

Penerapan keamanan sebagai bentuk program kerja Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan oleh Diskominfo sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur dari setiap IPPD masing-masing. Program kerja Keamanan SPBE yang telah diterapkan meliputi:

1. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
2. Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE
3. Peningkatan Keamanan SPBE
4. Penanganan Insiden Keamanan SPBE
5. Audit Keamanan SPBE

A. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Katalog keamanan (edukasi kesadaran keamanan) berisi deskripsi mengenai upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (edukasi kesadaran keamanan) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.6.2.1. Referensi Arsitektur Keamanan - Edukasi Kesadaran Keamanan

ID	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	→ RAK Level 1 (Dependency)	→ RAK Level 2 (Dependency)
KP-DAK.02.01.01	Sosialisasi keamanan informasi dan aktivasi keamanan firewall	Kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang keamanan informasi dan optimalisasi firewall	11 Oktober 2023	RAK.02 PENERAPAN KEAMANAN	RAK.02.01 EDUKASI KESADARAN KEAMANAN SPBE

ID	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	→ RAK Level 1 (Dependency)	→ RAK Level 2 (Dependency)
KP-DAK.02.01.02	Sosialisasi penerbitan sertifikat elektronik	Kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang sertifikat elektronik	7 Oktober 2020	RAK.02 PENERAPAN KEAMANAN	RAK.02.01 EDUKASI KESADARAN KEAMANAN SPBE

B. Identifikasi Keamanan SPBE

Katalog keamanan (identifikasi keamanan) berisi deskripsi mengenai langkah-langkah identifikasi dan pengelolaan risiko keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (identifikasi keamanan) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.6.2.2.. Referensi Arsitektur Keamanan - Identifikasi Keamanan

ID	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	RAK Level 1 (Dependency)	RAK Level 2 (Dependency)	→ Aplikasi (Dependency)
KP-DAK.02.02.01	Bug bounty	Pencarian bug pada aplikasi berbasis web di Kabupaten Kulon Progo	2021-2023	RAK.02 PENERAPAN KEAMANAN	RAK.02.02 IDENTIFIKASI KERENTANAN KEAMANAN SPBE	

C. Peningkatan Keamanan SPBE

Katalog keamanan (peningkatan keamanan) berisi deskripsi mengenai upaya penguatan sistem, prosedur, dan teknologi keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (peningkatan keamanan) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan

dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.6.2.3. Referensi Arsitektur Keamanan - Peningkatan Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Keamanan Siber	→ RAK Level 1 (Dependency)	→ RAK Level 2 (Dependency)

D. Penanganan Insiden Keamanan SPBE

Katalog keamanan (penanganan insiden keamanan) berisi deskripsi mengenai prosedur, mekanisme, dan sistem yang diterapkan dalam menangani insiden keamanan siber di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (penanganan insiden keamanan) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.6.2.4. Referensi Arsitektur Keamanan - Penanganan Insiden Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Penangan Insiden Siber	→ Aplikasi (Dependency)
KP-DAK.02.04.01	Penanganan insiden pada serangan slot gacor	Penangan insiden pada website pemerintah akibat serangan Web Defacement	30 Mei 2023 - 27 Oktober 2023		

E. Audit Keamanan SPBE

Katalog keamanan (audit keamanan) berisi deskripsi mengenai proses evaluasi dan pemeriksaan terhadap penerapan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sehingga katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (audit keamanan) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 3.2.6.2.5. Referensi Arsitektur Keamanan - Audit Keamanan

ID	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Hasil Audit Keamanan SPBE	Jenis Audit Keamanan	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan	Tindak lanjut Audit Keamanan	→ Aplikasi (Dependency)	→ Infrastruktur (Dependency)
KP-DAK.02.05.01	Audit internal SPBE pada domain keamanan informasi	c. perlu peningkatan	Internal	31 Maret 2023	a. belum ditindaklanjuti		

F. Standar Teknis Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Berikut ini ditampilkan tabel pemenuhan standar teknis keamanan jaringan intra pemerintah sesuai dengan Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 3.2.6.2.6. Pemenuhan Standar Teknis Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Aspek administrasi keamanan jaringan intra	1.1.	Menyusun dan mengevaluasi dokumen arsitektur Jaringan Intra	Ya	
Aspek administrasi keamanan jaringan intra	1.2	Mengidentifikasi seluruh aset infrastruktur jaringan	Ya	
Aspek administrasi keamanan jaringan intra	1.3	Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur terkait	Ya	
Aspek administrasi keamanan jaringan intra	1.4	Membuat laporan pengawasan keamanan jaringan secara periodik	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.1	Menempatkan perangkat infrastruktur jaringan yang menyediakan layanan Jaringan Intra pada zona terpisah	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.2	Menggunakan autentikasi untuk mengakses Jaringan Intra	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.3	Menerapkan pembatasan akses dalam Jaringan Intra	Ya	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Kontrol akses dan autentikasi	2.4	Mematikan atau membatasi protocol, port, dan layanan yang tidak digunakan	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.5	Menerapkan penyaringan tautan dan memblokir akses ke situs berbahaya	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.6	Menerapkan fungsi honeypot untuk menganalisis celah keamanan berdasarkan jenis serangan	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.7	Menerapkan virtual private network dan mengaktifkan fungsi enkripsi pada jalur komunikasi yang digunakan	Ya	Jika diperlukan
Kontrol akses dan autentikasi	2.8	Memberikan kewenangan hanya kepada administrator untuk menginstal perangkat lunak dan/atau mengubah konfigurasi sistem dalam Jaringan Intra	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.9	Menerapkan secure endpoints	Tidak	
Kontrol akses dan autentikasi	2.10	Memblokir layanan yang tidak dikenal	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.11	Menerapkan secure socket layer atau transport layer security versi terkini pada jalur akses Jaringan Intra	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.12	Menerapkan server perantara saat client mengakses server database dalam rangka pemeliharaan	Tidak	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.1	Menggunakan perangkat security information and event management untuk network logging dan monitoring	Ya	Wazuh
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.2	Menerapkan sistem deteksi dini kerentanan keamanan perangkat jaringan	Ya	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.3	Menggunakan perangkat firewall	Ya	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.4	Menggunakan perangkat intrusion detection systems dan intrusion prevention systems	Ya	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.5	Menerapkan virtual private network terenkripsi untuk penggunaan akses jarak jauh secara terbatas	Ya	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.6	Menerapkan kontrol update patching pada infrastruktur Jaringan Intra dan sistem komputer	Ya	Beberapa
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.7	Menggunakan perangkat web application firewall	Ya	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.8	Menggunakan perangkat load balancer untuk menjaga ketersediaan akses terhadap jaringan dan aplikasi	Ya	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.9	Perbarui teknologi keamanan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meminimalisasi celah peretas	Tidak	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.10	Mengunduh perangkat lunak melalui enterprise software distribution	Ya	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.11	Menerapkan sertifikat elektronik	Ya	
Kontrol keamanan gateway	4.1	Menerapkan content filtering	Tidak	
Kontrol keamanan gateway	4.2	Menerapkan inspection packet filtering untuk memeriksa paket yang masuk pada Jaringan Intra	Tidak	
Kontrol keamanan gateway	4.3	Menerapkan kontrol keamanan pada fitur akses jarak jauh perangkat gateway	Tidak	
Kontrol keamanan gateway	4.4	Memastikan perangkat gateway yang menghubungkan antar Jaringan Intra tidak terkoneksi langsung dengan jaringan publik	Tidak	
Kontrol keamanan gateway	4.5	Melaksanakan manajemen traffic gateway	Tidak	
Kontrol keamanan gateway	4.6	Memastikan port tidak dibuka secara default	Ya	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.1	Menerapkan protokol keamanan access point nirkabel dan teknologi enkripsi terkini	Ya	
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.2	Menerapkan media access control pada address filtering	Ya	
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.3	Menerapkan dedicated service set identifier	Tidak	
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.4	Menerapkan pembatasan jangkauan radio transmisi dan pengguna jaringan	Ya	
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.5	Menerapkan pembatasan terkait penambahan perangkat nirkabel yang dipasang secara tidak sah	Ya	
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.6	Menerapkan manajemen vulnerability secara berkala dan berkelanjutan	Ya	
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.7	Melakukan patching firmware secara rutin	Ya	

G. Standar Teknis Keamanan Aplikasi Web

Berikut ini ditampilkan tabel pemenuhan standar teknis keamanan aplikasi web sesuai dengan Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 3.2.6.2.7. Pemenuhan Standar Teknis Keamanan Aplikasi Web

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Autentikasi	1.1	Menggunakan manajemen kata sandi untuk proses autentikasi	Ya	
Autentikasi	1.2	Menerapkan verifikasi kata sandi pada sisi server	Ya	
Autentikasi	1.3	Mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi	Ya	
Autentikasi	1.4	Mengatur jumlah maksimum kesalahan dalam pemasukan kata sandi	Tidak	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Autentikasi	1.5	Mengatur mekanisme pemulihan kata sandi	Ya	
Autentikasi	1.6	Menjaga kerahasiaan kata sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi	Ya	
Autentikasi	1.7	Menggunakan jalur komunikasi yang diamankan untuk proses autentikasi	Ya	SSL
Manajemen sesi	2.1	Menggunakan pengendali sesi untuk proses manajemen sesi	Ya	
Manajemen sesi	2.2	Menggunakan pengendali sesi yang disediakan oleh kerangka kerja aplikasi	Ya	
Manajemen sesi	2.3	Mengatur pembuatan dan keacakan token sesi yang dihasilkan oleh pengendali sesi	Ya	
Manajemen sesi	2.4	Mengatur kondisi dan jangka waktu habis sesi	Ya	
Manajemen sesi	2.5	Validasi dan pencantuman session id	Tidak	
Manajemen sesi	2.6	Perlindungan terhadap lokasi dan pengiriman token untuk sesi terautentikasi	Tidak	
Manajemen sesi	2.7	Perlindungan terhadap duplikasi dan mekanisme persetujuan pengguna	Tidak	
Persyaratan kontrol akses	3.1	Menetapkan otorisasi pengguna untuk membatasi kontrol akses	Ya	
Persyaratan kontrol akses	3.2	Mengatur peringatan terhadap bahaya serangan otomatis apabila terjadi akses yang bersamaan atau akses yang terus menerus pada fungsi	Tidak	
Persyaratan kontrol akses	3.3	Mengatur antarmuka pada sisi administrator	Tidak	
Persyaratan kontrol akses	3.4	Mengatur verifikasi kebenaran token ketika mengakses data dan informasi yang dikecualikan	Tidak	
Validasi Input	4.1	Menerapkan fungsi validasi input pada sisi server	Ya	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Validasi Input	4.2	Menerapkan mekanisme penolakan input jika terjadi kesalahan validasi	Ya	
Validasi Input	4.3	Memastikan runtime environment aplikasi tidak rentan terhadap serangan validasi input	Tidak	
Validasi Input	4.4	Melakukan validasi positif pada seluruh input	Ya	
Validasi Input	4.5	Melakukan filter terhadap data yang tidak dipercaya	Ya	
Validasi Input	4.6	Menggunakan fitur kode dinamis	Tidak	
Validasi Input	4.7	Melakukan perlindungan terhadap akses yang mengandung konten skrip	Ya	
Validasi Input	4.8	Melakukan perlindungan dari serangan injeksi basis data	Ya	
Kriptografi pada verifikasi statis	5.1	Menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protokol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ya	
Kriptografi pada verifikasi statis	5.2	Melakukan autentikasi data yang dienkripsi	Ya	
Kriptografi pada verifikasi statis	5.3	Menerapkan manajemen kunci kriptografi	Tidak	
Kriptografi pada verifikasi statis	5.4	Membuat angka acak yang menggunakan generator angka acak kriptografi	Tidak	
Penanganan error dan pencatatan log	6.1	Mengatur konten pesan yang ditampilkan ketika terjadi kesalahan	Ya	
Penanganan error dan pencatatan log	6.2	Menggunakan metode penanganan error untuk mencegah kesalahan terprediksi dan tidak terduga serta menangani seluruh pengecualian yang tidak ditangani	Ya	
Penanganan error dan pencatatan log	6.3	Tidak mencantumkan informasi yang dikecualikan dalam pencatatan log	Ya	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Penanganan error dan pencatatan log	6.4	Mengatur cakupan log yang dicatat untuk mendukung upaya penyelidikan ketika terjadi insiden	Ya	
Penanganan error dan pencatatan log	6.5	Mengatur perlindungan log aplikasi dari akses dan modifikasi yang tidak sah	Ya	
Penanganan error dan pencatatan log	6.6	Melakukan enkripsi pada data yang disimpan untuk mencegah injeksi log	Tidak	
Penanganan error dan pencatatan log	6.7	Melakukan sinkronisasi sumber waktu sesuai dengan zona waktu dan waktu yang benar	Ya	
Proteksi data	7.1	Melakukan identifikasi dan penyimpanan salinan informasi yang dikecualikan	Tidak	
Proteksi data	7.2	Melakukan perlindungan dari akses yang tidak sah terhadap informasi yang dikecualikan yang disimpan sementara dalam aplikasi	Tidak	
Proteksi data	7.3	Melakukan pertukaran, penghapusan, dan audit informasi yang dikecualikan	Ya	
Proteksi data	7.4	Melakukan penentuan jumlah parameter	Tidak	
Proteksi data	7.5	Memastikan data disimpan dengan aman	Ya	
Proteksi data	7.6	Menentukan metode untuk menghapus dan mengekspor data sesuai permintaan pengguna	Tidak	
Proteksi data	7.7	Membersihkan memori setelah tidak diperlukan	Tidak	
Keamanan komunikasi	8.1	Menggunakan komunikasi terenkripsi	Ya	
Keamanan komunikasi	8.2	Mengatur koneksi masuk dan keluar yang aman dan terenkripsi dari sisi pengguna	Ya	
Keamanan komunikasi	8.3	Mengatur jenis algoritma yang digunakan dan alat pengujiannya	Tidak	
Keamanan komunikasi	8.4	Mengatur aktivasi dan konfigurasi sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik	Ya	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Pengendalian Kode Berbahaya	9.1	Menggunakan analisis kode dalam kontrol kode berbahaya	Ya	
Pengendalian Kode Berbahaya	9.2	Memastikan kode sumber aplikasi dan pustaka tidak mengandung kode berbahaya dan fungsionalitas lain yang tidak diinginkan	Ya	
Pengendalian Kode Berbahaya	9.3	Mengatur izin terkait fitur atau sensor terkait privasi	Ya	
Pengendalian Kode Berbahaya	9.4	Mengatur perlindungan integritas	Ya	
Pengendalian Kode Berbahaya	9.5	Mengatur mekanisme fitur pembaruan	Ya	
Logika bisnis	10.1	Memproses alur logika bisnis dalam urutan langkah dan waktu yang realistis;	Ya	
Logika bisnis	10.2	Memastikan logika bisnis memiliki batasan dan validitas	Tidak	
Logika bisnis	10.3	Memonitor aktivitas yang tidak biasa	Ya	
Logika bisnis	10.4	Membantu dalam kontrol anti otomatisasi	Ya	
Logika bisnis	10.5	Memberikan peringatan ketika terjadi serangan otomatis atau aktivitas yang tidak biasa	Ya	
File	11.1	mengatur jumlah file untuk setiap pengguna dan kuota ukuran file yang diunggah	Ya	
File	11.2	Melakukan validasi file sesuai dengan tipe konten yang diharapkan	Ya	
File	11.3	Melakukan perlindungan terhadap metadata input dan metadata file	Ya	
File	11.4	Melakukan pemindaian file yang diperoleh dari sumber yang tidak dipercaya	Ya	
File	11.5	Melakukan konfigurasi server untuk mengunduh file sesuai ekstensi yang ditentukan	Ya	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Keamanan API dan web service	12.1	melakukan konfigurasi layanan web	Ya	
Keamanan API dan web service	12.2	Verifikasi uniform resource identifier API tidak menampilkan informasi yang berpotensi sebagai celah keamanan	Ya	
Keamanan API dan web service	12.3	Membuat keputusan otorisasi	Ya	
Keamanan API dan web service	12.4	Menampilkan metode RESTful hyperteKulon Progot transfer protocol apabila input pengguna dinyatakan valid	Tidak	Tidak tahu
Keamanan API dan web service	12.5	Menggunakan validasi skema dan verifikasi sebelum menerima input	Ya	
Keamanan API dan web service	12.6	Menggunakan metode perlindungan layanan berbasis web	Ya	
Keamanan API dan web service	12.7	Menerapkan kontrol anti otomatisasi	Tidak	
Keamanan konfigurasi	13.1	Mengkonfigurasi server sesuai rekomendasi server aplikasi dan kerangka kerja aplikasi yang digunakan	Ya	
Keamanan konfigurasi	13.2	Mendokumentasi, menyalin konfigurasi, dan semua dependensi	Ya	
Keamanan konfigurasi	13.3	Menghapus fitur, dokumentasi, sampel, dan konfigurasi yang tidak diperlukan	Ya	
Keamanan konfigurasi	13.4	Memvalidasi integritas aset jika aset aplikasi diakses secara eksternal	Tidak	
Keamanan konfigurasi	13.5	Menggunakan respons aplikasi dan konten yang aman	Ya	

H. Standar Teknis Keamanan Aplikasi *Mobile*

Berikut ini ditampilkan tabel pemenuhan standar teknis keamanan aplikasi *mobile* sesuai dengan Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 3.2.6.2.8. Pemenuhan Standar Teknis Keamanan Aplikasi *Mobile*

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.1	Menyimpan seluruh data dan informasi yang dikecualikan hanya dalam fasilitas penyimpanan kredensial sistem	Tidak	
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.2	Membatasi pertukaran data dan informasi yang dikecualikan dengan third party	Tidak	
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.3	Menonaktifkan cache keyboard pada saat memasukkan data dan informasi yang dikecualikan	Tidak	
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.4	Melindungi informasi yang dikecualikan saat terjadi inter process communication	Tidak	
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.5	Melindungi data dan informasi yang dikecualikan yang dimasukkan melalui antarmuka pengguna	Tidak	
Kriptografi	2.1	Menghindari penggunaan kriptografi simetrik dengan	Tidak	
Kriptografi	2.2	Mengimplementasikan metode kriptografi yang sudah teruji sesuai kebutuhan	Tidak	
Kriptografi	2.3	Menghindari penggunaan protokol kriptografi atau algoritma kriptografi yang obsolet	Tidak	
Kriptografi	2.4	Menghindari penggunaan kunci kriptografi yang sama	Tidak	
Kriptografi	2.5	Menggunakan pembangkit kunci acak yang memenuhi kriteria keacakan kunci	Tidak	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.1	Menerapkan autentikasi pada remote endpoint terhadap aplikasi yang menyediakan akses pengguna untuk layanan jarak jauh	Tidak	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.2	Menggunakan session identifier yang acak tanpa perlu mengirimkan kredensial pengguna apabila menggunakan stateful manajemen sesi	Tidak	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.3	Memastikan server menyediakan token yang telah ditandatangani menggunakan algoritme yang aman apabila menggunakan autentikasi stateless berbasis toke	Tidak	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Autentikasi dan manajemen sesi	3.4	Memastikan remote endpoint memutus sesi yang ada saat pengguna log out	Tidak	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.5	Menerapkan pengaturan sandi pada remote endpoint	Tidak	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.6	Membatasi jumlah percobaan log in pada remote endpoint	Tidak	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.7	Menentukan masa berlaku sesi dan masa kadaluarsa token pada remote endpoint	Tidak	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.8	Melakukan otorisasi pada remote endpoint	Tidak	
Komunikasi Jaringan	4.1	Menerapkan secure socket layer atau transport layer security yang tidak obsolet secara konsisten	Tidak	
Komunikasi Jaringan	4.2	Memverifikasi sertifikat remote endpoint	Tidak	
Interaksi Platform	5.1	Memastikan aplikasi hanya meminta akses terhadap sumber daya yang diperlukan	Tidak	
Interaksi Platform	5.2	Melakukan validasi terhadap seluruh input dari sumber eksternal dan pengguna	Tidak	
Interaksi Platform	5.3	Menghindari pengiriman fungsionalitas sensitif melalui skema custom uniform resource locator dan fasilitas inter process communication;	Tidak	
Interaksi Platform	5.4	Menghindari penggunaan JavaScript dalam WebView	Tidak	Tergantung kebutuhan
Interaksi Platform	5.5	menggunakan protokol hypertext transfer protocol secure pada WebView	Tidak	
Interaksi Platform	5.6	Mengimplementasikan penggunaan serialisasi API yang aman	Tidak	
Kualitas kode dan	6.1	Menandatangani aplikasi dengan sertifikat yang valid	Tidak	
Kualitas kode dan	6.2	Memastikan aplikasi dalam mode rilis	Tidak	
Kualitas kode dan	6.3	Menghapus simbol debugging dari native binary	Tidak	

Fungsi		Prosedur	Kriteria Terpenuhi	Keterangan
Kualitas kode dan	6.4	Menghapus kode debugging dan kode bantuan pengembang	Tidak	
Kualitas kode dan	6.5	Mengidentifikasi kelemahan seluruh komponen third party	Tidak	
Kualitas kode dan	6.6	Menentukan mekanisme penanganan error	Tidak	
Kualitas kode dan	6.7	Mengelola memori secara aman	Tidak	
Kualitas kode dan	6.8	Mengaktifkan fitur keamanan yang tersedia	Tidak	
Ketahanan	7.1	Mencegah aplikasi berjalan pada perangkat yang telah dilakukan modifikasi yang tidak sah	Tidak	
Ketahanan	7.2	Mendeteksi dan merespons debugger	Tidak	
Ketahanan	7.3	Mencegah eKulon Progoecutable file melakukan perubahan pada sumber daya perangkat	Tidak	
Ketahanan	7.4	Mendeteksi dan merespons keberadaan perangkat reverse engineering	Tidak	
Ketahanan	7.5	Mencegah aplikasi berjalan dalam emulator	Tidak	
Ketahanan	7.6	Mendeteksi perubahan kode dan data di ruang memo	Tidak	
Ketahanan	7.7	Menerapkan fungsi device binding dengan menggunakan properti unik pada perangkat	Tidak	Saat ini belum diimplementasikan
Ketahanan	7.8	Melindungi seluruh file dan library pada aplikasi	Tidak	
Ketahanan	7.9	Menerapkan metode obfuscation	Tidak	

Laporan Arsitektur Kondisi Eksisting SPBE ini disusun guna memberikan gambaran sementara kondisi saat ini di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang kemudian dibandingkan antara dengan kondisi ideal yang perlu dilakukan dalam penerapan SPBE. Secara umum, kondisi eksisting SPBE di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bisa disimpulkan telah terstandar dan mayoritas aplikasi internal yang ada sudah terintegrasi dengan aplikasi internal lainnya maupun dengan aplikasi instansi pusat. Sehingga Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat memberikan layanan internal dan layanan publik yang lebih efisien, efektif, dan transparan kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif seluruh perangkat daerah dalam proses pemerintahan secara elektronik. Hal ini memberikan manfaat besar bagi kemajuan daerah dan kemudahan akses informasi serta layanan publik di era digital saat ini.

Kedepannya, dalam SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu adanya peningkatan pada domain tata kelola dan manajemen serta integrasi beberapa sarana infrastruktur internal daerah dengan infrastruktur nasional dalam mendukung operasional SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Kondisi yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari analisa formulir kuesioner yang disebar ke perangkat daerah, hasil *interview* terhadap seluruh perangkat daerah yang berperan sebagai koordinator dalam tim koordinasi SPBE, maupun data sekunder (referensi dan pengalaman konsultan di institusi sejenis). Substansi dalam laporan Kondisi *Eksisting* ini selanjutnya dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan kondisi ideal/target layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selama 5 (lima) tahun mendatang.

2025

BUKU 2

Kondisi Target Arsitektur

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Daftar Isi

Bab I Konsep Solusi SPBE **5**
1.1. Kondisi Ideal Tata Kelola SPBE 6
1.1.1. Kondisi Ideal Kelembagaan 6
1.1.1.1. Kelompok Kerja (Pokja) SPBE 8
1.1.1.2. Tim Digital Transformation 13
1.1.1.3. Kebijakan SPBE 18
1.1.2. Penganggaran SPBE 18
1.2. Tata Kelola SPBE 20
1.2.1. Tata Kelola Arsitektur SPBE 20
1.2.2. Tata Kelola Kebijakan SPBE 23
1.2.3. Tata Kelola Proses Bisnis 24
1.2.4. Tata Kelola Data 27
1.2.5. Tata Kelola Layanan 31
1.2.6. Tata Kelola Aplikasi 35
1.2.6.1. Prinsip Pengembangan Aplikasi 37
1.2.6.2. Tren Teknologi Pengembangan Aplikasi 38
1.2.7. Tata Kelola Infrastruktur 41
1.2.7.1. Pusat Data 42
1.2.7.2. Jaringan Intra Pemerintah 43
1.2.7.3. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 44
1.2.8. Tata Kelola Keamanan 46
1.2.8.1. Arsitektur Keamanan Sistem Informasi 46
1.2.8.2. Arsitektur Keamanan Infrastruktur Layanan 47
1.2.8.3. Arsitektur Keamanan Infrastruktur: Aturan Pusat dan Operasi 47
1.3. Manajemen SPBE 48
1.3.1. Manajemen Risiko SPBE 49
1.3.2. Manajemen Keamanan Informasi 52
1.3.3. Manajemen Data 58
1.3.4. Manajemen Aset TIK 65
1.3.5. Manajemen SDM 67
1.3.6. Manajemen Pengetahuan 69
1.3.7. Manajemen Perubahan 72
1.3.8. Manajemen Layanan 75
1.3.9. Audit TIK 81
Bab II Arsitektur Target SPBE **83**
2.1. Arsitektur Proses Bisnis Target 84
2.1.1. Katalog Proses Bisnis Target 84
2.1.2. Analisis Katalog Proses Bisnis Target 88
2.2. Arsitektur Data dan Informasi Target 90
2.2.1. Katalog Data dan Informasi Target 90
2.2.2. Analisis Katalog Data dan Informasi Target 99
2.3. Arsitektur Layanan Target 102
2.4.1. Katalog Layanan Target 102

2.4.2. Analisis Katalog Layanan Target 108
2.4. Arsitektur Aplikasi Target 111
2.4.1. Desain Arsitektur Aplikasi 111
2.4.2. Integrasi Aplikasi 112
2.4.3. Arsitektur Aplikasi Target 113
2.4.3.1. Katalog Aplikasi Target 113
2.4.3.2. Analisis Diagram Aplikasi Target 120
2.4.3.3. Analisis Effort Impact 121
2.4.4. Portal Layanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 122
2.4.5. Master Slave Database Arsitektur 130
2.5. Arsitektur Infrastruktur dan Keamanan Target 133
2.5.1. Tren Teknologi dan Praktek Terbaik (Best Practice) 133
2.5.1.1. Teknologi Virtualisasi 133
2.5.1.2. DevOps 137
2.5.1.3. Microservices 144
2.5.1.4. OWASP 10 - 2021 147
2.5.1.5. Security Operation Center (SOC) 149
A. Triad SOC 149
B. SOC – People 150
C. SOC – Process 151
D. SOC – Technology 152
E. SIEM 153
F. ELK 155
2.5.2. Infrastruktur SPBE To Be 158
2.5.2.1. Prinsip-prinsip Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi 159
2.5.2.2. Pusat Data 160
A. Usulan Topologi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana (DRC) 199
B. Katalog Pusat Data/Komputasi 201
2.5.2.3. Platform 202
2.5.2.4. Jaringan Intra Pemerintah 214
A. Topologi Jaringan 215
B. Berjenjang atau hirarki (3-Tier Hierarchy) 215
C. Zonasi (Zoning) 218
D. Redudansi (Redundancy) 220
E. Keamanan (Security) 220
F. Kondisi Eksisting Jaringan Intra Pemerintah 222
G. Usulan Infrastruktur Jaringan Data 223
H. Metadata Jaringan Intra Pemerintah To Be 227
2.5.2.5. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 228
A. Integrasi Data 229
B. Integrasi Presentasi 231
C. Integrasi Fungsional (Proses Bisnis) 232
D. Kondisi Eksisting Sistem Penghubung Layanan 232
E. Usulan Pengembangan Sistem Penghubung Layanan 232
F. Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah To Be 238
2.5.3. Arsitektur Keamanan To-Be 239
2.5.3.1. Kondisi Eksisting Keamanan SPBE 239
2.5.3.2. Arsitektur Keamanan SPBE 239
2.5.3.3. Manajemen Keamanan Informasi SPBE 240
A. Pilar Manajemen dan Standar Teknis Keamanan SPBE 241

B. SNI ISO 27001:2022 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi 242
2.5.3.4. Standar Teknis dan Prosedur 245
A. Keamanan Data dan Informasi 245
B. Keamanan Aplikasi SPBE 247
C. Keamanan Sistem Penghubung Layanan 252
D. Keamanan Jaringan Intra Pemerintah 253
E. Keamanan Pusat Data 256
2.5.3.5. Aktivitas Keamanan Informasi 257
A. Identifikasi (Identify) 257
B. Proteksi (Protect) 258
C. Deteksi (Detect) 258
D. Respon (Respond) 258
E. Pemulihan (Recover) 258
2.5.3.6. Metadata Arsitektur Keamanan Target 259
A. Standar Keamanan 260
B. Penerapan Keamanan 260
1. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE 261
2. Identifikasi Keamanan SPBE 261
3. Peningkatan Keamanan SPBE 262
4. Penanganan Insiden Keamanan SPBE 262
5. Audit Keamanan SPBE 263
Bab III Penutup **264**

Bab I Konsep Solusi SPBE

Kondisi Ideal Tata Kelola SPBE

Analisa kondisi ideal dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kondisi yang dapat dicapai dari penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah. Analisa kondisi ideal ini disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, tren teknologi informasi saat ini, dan tren teknologi informasi yang akan datang. Sesuai dengan amanat Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam paragraf tujuan pengembangan SPBE, tiga tujuan utama SPBE, yaitu:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

Kerangka fungsi teknologi informasi tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan *driver of change* atau agen yang memicu terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian semua tujuan tersebut merupakan perwujudan dari kondisi ideal di mana pemerintah dengan dukungan teknologi informasi mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat, dunia usaha, maupun layanan antar lembaga pemerintahan. Tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, secara umum, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menganut prinsip-prinsip dasar sebagai pemicu kesuksesan implementasi SPBE.

1.1.1. Kondisi Ideal Kelembagaan

Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan sumber daya SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah perpaduan model sentralisasi. Model sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol penerapan SPBE di masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, dalam penerapan SPBE perlu dibentuk sebuah Tim Koordinasi SPBE, dimana Tim Koordinasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Adapun tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

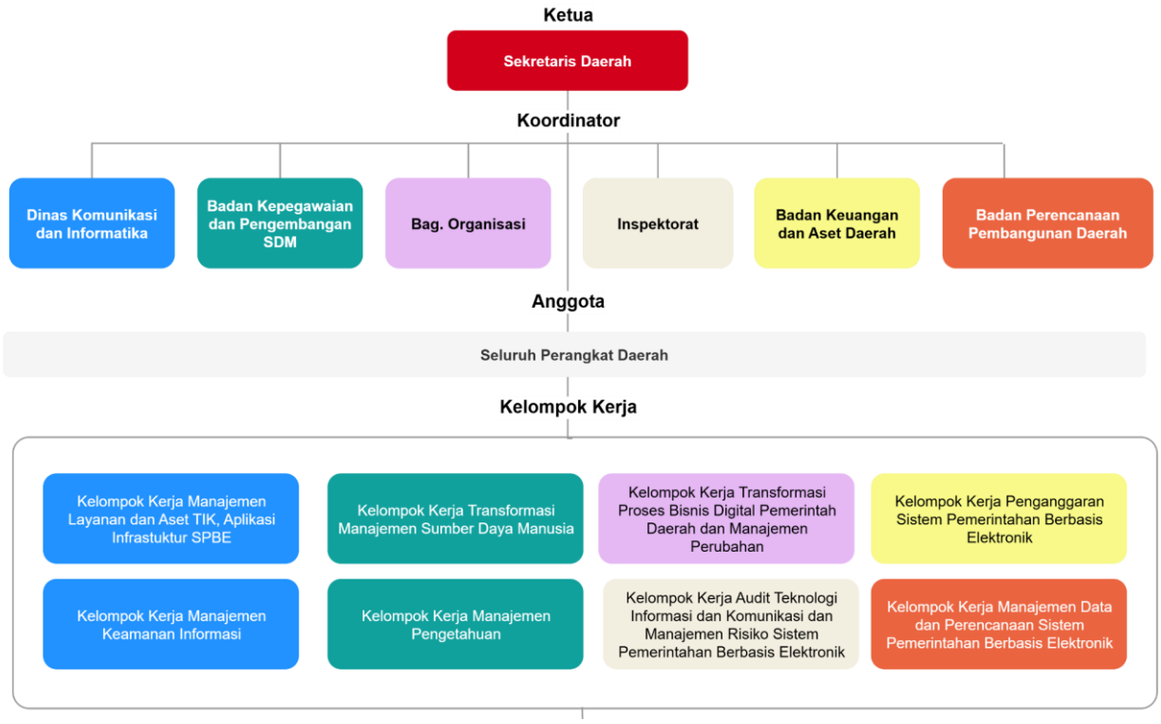

Gambar 1.1.1.1. Struktur Tim Koordinasi SPBE Ideal (rekomendasi)

Berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa kondisi ideal dalam struktur Tim Koordinator SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terdiri atas Koordinator dan Anggota. Koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas:

a. Memberikan arahan dan validasi terhadap seluruh inisiatif program dan kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, khususnya yang bersifat kebijakan dan anggaran/investasi;
b. Memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE antar unit;
c. Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan SPBE; dan
e. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE.

Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari seluruh perangkat daerah yang terdiri dari sebagai berikut.

1. Sekretariat Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Dinas Kebudayaan
5. Dinas Kelautan dan Perikanan
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Pariwisata

11. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
14. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
15. Dinas Perdagangan
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
19. Dinas Pertanian dan Pangan
20. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21. Dinas Tenaga Kerja
22. RSUD Nyi Ageng Serang
23. RSUD Wates
24. Satuan Polisi Pamong Praja
25. Sekretariat DPRD

Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari seluruh perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab terhadap layanan, data, aplikasi, infrastruktur maupun keamanan informasi. Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas:

a. Melaksanakan arahan program dan kegiatan SPBE yang telah diputuskan oleh Koordinator;
b. Melakukan optimalisasi proses bisnis;
c. Melakukan integrasi data dalam aplikasi dalam rangka penerapan SPBE yang optimal;
d. Mengelola jaringan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi dan keamanan informasi yang berkelanjutan; dan
e. Menerapkan manajemen SPBE sebagai budaya kerja.

1.1.1.1. Kelompok Kerja (Pokja) SPBE

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE dan membaginya ke dalam delapan kelompok kerja SPBE. Delapan kelompok kerja SPBE ini merupakan kepanjangan tangan dari kelompok kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional. Adapun kedelapan kelompok kerja dijelaskan sebagai berikut.

1. Pokja Perencanaan SPBE (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) :
    a. melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah, melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan SPBE
    b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Daerah dalam pelaksanaan SPBE
    c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Daerah dalam pelaksanaan SPBE, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Pokja Transformasi Proses Bisnis Digital Pemerintah Daerah (Bagian Organisasi) :
    a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penyusunan proses bisnis digital pemerintah daerah
    b. melakukan monitoring dan evaluasi proses bisnis digital pemerintah daerah .

3. Pokja Penganggaran SPBE (Badan Keuangan dan Aset Daerah) :
    a. merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja SPBE
    b. menyelenggarakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penyusunan anggaran SPBE dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah
    c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penganggaran SPBE

4. Pokja Aplikasi dan Infrastruktur SPBE (Dinas Komunikasi dan Informatika):
    a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE, melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan pengelolaan infrastruktur SPBE
    b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan asistensi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPBE,
    c. merumuskan pemberian pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang menggunakan kode sumber tertutup, merumuskan kebijakan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi dalam SPBE
    d. melakukan koordinasi penyiapan pembangunan repositori aplikasi SPBE dalam pelaksanaan SPBE
    e. merumuskan kebijakan standar teknis dan prosedur pengembangan aplikasi dalam pelaksanaan SPBE
    f. merumuskan pedoman manajemen layanan dalam pelaksanaan SPBE, serta koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan manajemen layanan dalam pelaksanaan SPBE.

5. Pokja Manajemen Risiko (Inspektorat) :
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah sebagai unit pemilik risiko
    b. menetapkan konteks risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang meliputi: inventarisasi informasi umum, identifikasi sasaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menentukan struktur pelaksana manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, identifikasi pemangku kepentingan, identifikasi Peraturan Perundang-undangan, menetapkan kategori risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menetapkan area dampak risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menetapkan kriteria risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menetapkan matriks analisis risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menetapkan level risiko Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik, menetapkan selera risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

c. melakukan analisis risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
d. melakukan evaluasi risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
e. menetapkan rencana penanganan risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
f. melaporkan proses dan hasil penilaian risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Ketua Tim Pelaksana;

6. Pokja Manajemen Layanan (Dinas Komunikasi dan Informatika) :
    a. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan
    b. melakukan perumusan standar interoperabilitas antar layanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE
    c. melakukan perumusan kebijakan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE
    d. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan asistensi penerapan kebijakan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE

7. Pokja Manajemen Aset TIK (Badan Keuangan dan Aset Daerah) :
    a. merumuskan kebijakan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE
    b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE,
    c. melakukan monitoring dan evaluasi manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE

8. Pokja Manajemen Data (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) :
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah sebagai pemilik data;
    b. melakukan serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data;
    c. melaporkan proses dan hasil pelaksanaan manajemen data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Ketua Tim Pelaksana;

9. Pokja Manajemen Keamanan Informasi (Dinas Komunikasi dan Informatika) :
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah sebagai penyelenggara sistem elektronik;
    b. menetapkan ruang lingkup, menetapkan penanggung jawab, merencanakan mendukung pengoperasian, mengevaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
    c. melaporkan proses dan hasil manajemen keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Ketua Tim Pelaksana;

10. Pokja Manajemen Sumber Daya Manusia (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM) :
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah sebagai pemilik sumber daya manusia;
    b. melakukan serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
    c. melaporkan proses dan hasil pelaksanaan manajemen sumber daya manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Ketua Tim Pelaksana;

11. Pokja Manajemen Pengetahuan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM) :
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah sebagai unit pelaksana manajemen pengetahuan
    b. melakukan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, alih pengetahuan dan teknologi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
    c. melaporkan proses dan hasil pelaksanaan manajemen pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Ketua Tim Pelaksana

12. Pokja Manajemen Perubahan (Bagian Organisasi)
    a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah sebagai unit pelaksana manajemen perubahan
    b. melakukan serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
    c. melaporkan proses dan hasil pelaksanaan manajemen perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Ketua Tim Pelaksana

13. Pokja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Inspektorat)
    a. melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika
    b. merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE, serta koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit TIK dalam pelaksanaan SPBE.

1.1.1.2. Tim *Digital Transformation*

Berikut ini dijelaskan kebutuhan Tim *Digital Transformation* untuk mendukung pengembangan aplikasi di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo setiap tahunnya. Standar salary menyesuaikan dengan Penetapan ini berdasarkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024.

Tabel 1.1.1.1. Kebutuhan Anggaran Tim *Digital Transformation*

Kebutuhan Anggaran SDM TIK			**Tahun**									
No	**Position**	**Salary/Month**	**2025**		**2026**		**2027**		**2028**		**2029**	
			Person	Budget	Person	Budget	Person	Budget	Person	Budget	Person	Budget
1	System Analyst	Rp4.000.000	1	Rp56.000.000	1	Rp 56.000.000	1	Rp 56.000.000	1	Rp 56.000.000	1	Rp 56.000.000
2	Data Scientist/Engineer	Rp5.500.000	0	Rp0	0	Rp 0	1	Rp 77.000.000	1	Rp 77.000.000	1	Rp 77.000.000
3	UI/UX Designer	Rp4.500.000	1	Rp63.000.000	1	Rp 63.000.000	1	Rp 63.000.000	1	Rp 63.000.000	1	Rp 63.000.000
4	Front-End Web Developer	Rp5.000.000	2	Rp140.000.000	2	Rp 140.000.000	2	Rp 140.000.000	2	Rp 140.000.000	3	Rp 210.000.000
5	Front-End Mobile Developer	Rp5.000.000	1	Rp70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	1	Rp 70.000.000	2	Rp 140.000.000
6	Back-End Developer	Rp5.500.000	1	Rp77.000.000	2	Rp 154.000.000	1	Rp 77.000.000	1	Rp 77.000.000	1	Rp 77.000.000
7	Network Operation Centre	Rp4.000.000	0	Rp0	1	Rp 56.000.000	2	Rp 112.000.000	2	Rp 112.000.000	2	Rp 112.000.000
8	Quality Assurance	Rp3.500.000	0	Rp0	0	Rp 0	0	Rp 0	1	Rp 49.000.000	1	Rp 49.000.000
	Budget Need / Year		**6**	**Rp406.000.000**	**8**	**Rp 539.000.000**	**9**	**Rp 595.000.000**	**10**	**Rp 644.000.000**	**12**	**Rp 784.000.000**
	Total	**Rp 2.968.000.000**										
	Note : Standar Salary Menyesuaikan UMK Kabupaten Kulon Progo (Rp 2.351.239.) dan Standar Perusahaan IT Swasta											

Adapun kompetensi minimum yang dibutuhkan dalam Tim *Digital Transformation* Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengadopsi standar dari bursa kerja yang dijelaskan sebagai berikut:

A. *System Analyst*

1. Persyaratan

- Memiliki *background* pendidikan TI/Ilmu Komputer;
- Menguasai *SDLC* dan *Agile* dalam pengembangan aplikasi;
- Memahami logika pemrograman dan *business process modelling*;
- Mampu menganalisis *DFD, Use Case*, dan *ERD*;
- Berpengalaman dalam *programming* dan integrasi data menggunakan *API* serta mendokumentasikannya; dan
- Berpengalaman dalam mendesain *mockup* dan *functional specification document.*

2. Deskripsi Pekerjaan

- Melakukan analisis kebutuhan aplikasi dalam mengembangkan aplikasi berbasis *cloud* pada *platform* dan aplikasi di dalam Tim *Developer* Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan menghitung dan mengidentifikasi kerentanan atau potensi kegagalan dan ketidaklayakan implementasi aplikasi;
- Berkoordinasi dengan Tim *Programmer*, Tim Data, Tim Produk, Tim Operasional dan *Stakeholder* dalam proses identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan aplikasi berbasis *Cloud* pada *platform* dan aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; dan
- Mendokumentasikan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan pengembangan aplikasi berbasis *cloud* pada *platform* dan aplikasi dalam bentuk dokumentasi teknis yang menjelaskan *flowchart*, *database* dan spesifikasi teknis lainnya yang dapat dipahami oleh Tim *Programmer*, sebagai acuan untuk proses pengembangan aplikasi.

B. Data *Scientist/Engineer*

1. Persyaratan

- Lulusan gelar sarjana di bidang teknik, matematika, statistik, riset operasi, atau disiplin terkait lainnya;
- Membuat dan memelihara *data pipeline Architecture* yang optimal;
- Mengotomatiskan proses manual, mengoptimalkan pengiriman data, mendesain ulang;
- Membangun infrastruktur yang diperlukan untuk pemuatan data yang optimal dari berbagai sumber data menggunakan teknologi *SQL* dan *NOSQL*;
- Bekerja sama dengan Tim *Digital Transformation* dalam pengembangan aplikasi untuk membantu masalah teknis terkait data dan mendukung kebutuhan infrastruktur data; dan
- Menguasai *Python, Bigquery, MySQL, PostgreSQL,* dan *Airflow*. Opsional: *MongoDB, elasticSearch, Cloud Platform (eg: GCP),* dan *Gitlab*.

2. Deskripsi Pekerjaan

- Identifikasi sumber data yang berkualitas dan otomatisasi proses pengumpulan;
- Melakukan *preprocessing* data terstruktur dan tidak terstruktur;
- Menganalisis keperluan data untuk pengembangan aplikasi;

- Menyajikan informasi menggunakan teknik visualisasi data;
- Mengusulkan solusi dan strategi untuk tren pengembangan aplikasi; dan
- Berkolaborasi dengan Tim Internal *Developer*.

C. *Front-End Developer (Web* dan *Mobile)*

1. Persyaratan
   - Lulusan minimum S1 Ilmu Komputer atau Teknik Informatika;
   - Menguasai pengembangan *front end* dengan *javascript*;
   - Memahami konsep *DOM, HoC, Promise, Async/Await, Event Delegation,* dan *Event Bubbling*;
   - Menguasai konsep *UI/UX design pattern* dan responsif desain pada *web* dan *mobile*;
   - Familiar menggunakan *code repository management*, seperti: *Git/Gitlab;*
   - Memahami penggunaan HTML sesuai *best practice;*
   - Memiliki kemampuan untuk membangun aplikasi dengan bahasa pemrograman *javascript* atau *typescript*;
   - Memiliki kemampuan dalam menggunakan *CSS/Less/Sass* dengan baik;
   - Memiliki kemampuan pengembangan produk menggunakan *Bootstrap/Tailwind/Vuetify/MUI/Framework7/Ant Design*;
   - Memiliki kemampuan dalam membangun produk menggunakan *ReactJS,NextJS/Gatsby,* dan *library/framework* berbasis *ReactJS* lainnya;
   - Memiliki kemampuan dalam membangun produk menggunakan *VueJS,NuxJS/Gridsome,* dan *Library/framework* berbasis *VueJS*; dan
   - Memiliki kemampuan yang baik dalam memahami konsep, dasar, dan cara menggunakan beberapa jenis *web service/API*, khususnya *REST API*.
2. Deskripsi Pekerjaan
   - Membangun dan merancang aplikasi *front end* sebuah aplikasi/fitur;
   - Memastikan kelayakan teknis desain *UI/UX*;
   - Memastikan semua *input user* tervalidasi dan terkirim ke *backend*;
   - Mengatasi berbagai *bug* dan *error* pada sisi *front end*;
   - Menerapkan prinsip pengembangan *front end* yang sesuai (*best practice*) dan memastikan bahwa *front end* dapat berjalan dengan baik di semua perangkat;
   - Melakukan *maintenance* dan pembaharuan aplikasi *front end* yang sudah ada;
   - Mendukung siklus pengembangan (konsep, desain, pengujian, rilis, operasional);
   - Bekerja sama dengan tim untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas dan performa aplikasi;
   - Berkolaborasi dengan tim infrastruktur dan tim *programmer* yang berspesialisasi dalam *DevOps, Backend, QA, System Analyst, Product Owner, UI/UX Designer*; dan
   - Berkontribusi dalam membantu pembuatan dokumentasi teknis atau secara manual.

D. *Back-End Developer*

1. Persyaratan

- Merupakan lulusan S1 Teknik Informatika;
- Memiliki minimum 2 tahun pengalaman terkait bidang pemrograman atau pembangunan aplikasi;
- Memiliki pemahaman yang kuat terkait konsep OOP dan MVC;
- Berpengalaman dalam penggunaan PHP dan *framework* yang relevan *(Laravel, Yii, CI, dll)/C# .Net/ASP.Net;*
- Memahami bahasa pemrograman *SQL (SQL pusat data/PostgreSQL/MySQL);*
- Memahami konsep manajemen *source code* seperti *Git*;
- Memahami dan dapat mengimplementasikan *web service/API*;
- Bersedia untuk belajar *framework*, teknologi, atau bahasa pemrograman yang berbeda;
- Dapat membaca dokumen kebutuhan aplikasi; dan
- Memiliki jiwa yang kreatif, berorientasi pada detail dan memiliki *skill* komunikasi yang baik.

2. Deskripsi Pekerjaan

- Melakukan perancangan *database;*
- Melakukan *update* atau pembaharuan struktur data yang telah ada;
- Membuat perancangan alur aplikasi;
- Melakukan pembangunan aplikasi dan *testing* di sisi *backend;*
- Mengatur keamanan aplikasi dan memastikan aplikasi memiliki tingkat keamanan yang baik;
- Melakukan *maintenance/*menemukan *bug* pada aplikasi dan memperbaikinya; dan
- Berkoordinasi dengan tim *frontend* untuk melakukan riset dan evaluasi terkait tampilan desain aplikasi agar sesuai dengan struktur *database* yang dibangun.

E. *Network Operation Centre*

1. Persyaratan

- Pendidikan: Gelar sarjana di bidang Teknologi Informasi, Ilmu Komputer, atau bidang terkait.
- Sertifikasi: Memiliki sertifikasi seperti Cisco Certified atau Mikrotik Certified atau sertifikasi lainnya yang relevan.
- Pengalaman: Pengalaman kerja di bidang jaringan komputer, baik sebagai Network Engineer atau posisi terkait.
- Keterampilan Teknis: Memahami protokol jaringan (TCP/IP, DNS, DHCP), teknologi nirkabel, dan sistem operasi jaringan.
- Keterampilan Analitis: Kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah secara efektif.
- Komunikasi: Keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan tim dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Deskripsi Pekerjaan

- Perancangan Jaringan: Membuat rencana dan desain jaringan yang mencakup topologi, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan organisasi.
- Implementasi Jaringan: Menginstal dan mengkonfigurasi perangkat jaringan seperti router, switch, firewall, dan perangkat lainnya.
- Pemeliharaan Jaringan: Memantau kinerja jaringan secara terus-menerus dan melakukan pemeliharaan preventif untuk mencegah gangguan.
- Keamanan Jaringan: Menerapkan kebijakan keamanan dan solusi untuk melindungi data dan sumber daya jaringan dari ancaman dan serangan.
- Troubleshooting: Mendiagnosis dan memperbaiki masalah jaringan dengan cepat untuk meminimalkan waktu henti dan dampak terhadap operasional.
- Dokumentasi: Menyusun dan memperbarui dokumentasi teknis terkait jaringan, termasuk diagram, konfigurasi perangkat, dan prosedur operasional.
- Kolaborasi: Bekerja sama dengan tim IT lainnya untuk memastikan integritas sistem dan aplikasi yang efektif dalam jaringan.
- Pengujian dan Evaluasi: Melakukan pengujian pada sistem jaringan dan mengevaluasi teknologi baru untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi.

F. *Quality Assurance*

1. Persyaratan
   - S1 Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer;
   - Minimal 1 tahun di bidang QA, pengujian perangkat lunak;
   - Memiliki kemampuan teknis Manual Testing (UAT, Functional Testing, Regression Testing).
   - Memiliki kemampuan teknis Automated Testing (menggunakan tools seperti Selenium, Appium, Katalon, atau Cypress);
   - Familiar dengan Tools Git; dan
   - Memiliki kemampuan teknis melakukan pengujian API menggunakan tools Postman/SoapUI..
2. Deskripsi Pekerjaan
   - Membuat dan mengelola test plan dan test case;
   - Melakukan pengujian manual maupun otomatis;
   - Melaporkan bug dan bekerja sama dengan tim Developer untuk memperbaikinya;
   - Melakukan regression testing setelah perbaikan bug;.
   - Menyusun laporan hasil pengujian dan memberikan rekomendasi.

1.1.1.3. Kebijakan SPBE

Reviu kebijakan perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan, penggunaan, maupun pemeliharaan sumber daya TIK. Daftar kebijakan yang perlu direviu, yaitu:

a. Kebijakan internal arsitektur SPBE;
b. Kebijakan internal peta rencana SPBE;
c. Kebijakan internal manajemen data SPBE;

d. Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE;
e. Kebijakan internal layanan pusat data;
f. Kebijakan internal layanan jaringan intra Pemerintah;
g. Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah;
h. Kebijakan internal manajemen keamanan informasi;
i. Kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
j. Kebijakan internal tim koordinasi SPBE.

1.1.2. Penganggaran SPBE

Anggaran dan belanja SPBE disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang kemudian dituangkan dalam Peta Rencana SPBE. Anggaran dan belanja SPBE kemudian disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran dan belanja perangkat daerah. Penyusunan anggaran dan belanja SPBE dikoordinasikan oleh Bappeda dan dibantu dengan Diskominfo. Koordinasi dalam proses penyusunan anggaran dan belanja SPBE dilakukan dengan cara melakukan peninjauan terhadap rencana anggaran dan belanja SPBE untuk memastikan keterpaduan perencanaan anggaran dan belanja SPBE di seluruh perangkat daerah.

Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bertugas untuk memastikan kesesuaian rencana anggaran dan belanja SPBE dengan perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Anggaran dan belanja SPBE harus mendapatkan persetujuan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang melakukan peninjauan terhadap realisasi penggunaan anggaran dan belanja SPBE secara berkala. Lebih jauh, hasil peninjauan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja SPBE periode selanjutnya.

Dalam upaya meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penganggaran menjadi salah satu elemen krusial untuk memastikan setiap inisiatif teknologi dan digitalisasi berjalan optimal. Proses penganggaran SPBE yang efektif melibatkan beberapa tahapan mulai dari perencanaan awal, pengajuan, hingga evaluasi dan clearance melalui aplikasi Evaluasi Anggaran (EGA) SPBE.

Pada tahap ini, setiap perangkat daerah diharapkan melakukan pelaporan secara akurat dan tepat waktu, sehingga evaluasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Setelah proses evaluasi selesai, clearance diberikan, menandai bahwa pengelolaan anggaran SPBE telah berjalan sesuai prosedur.

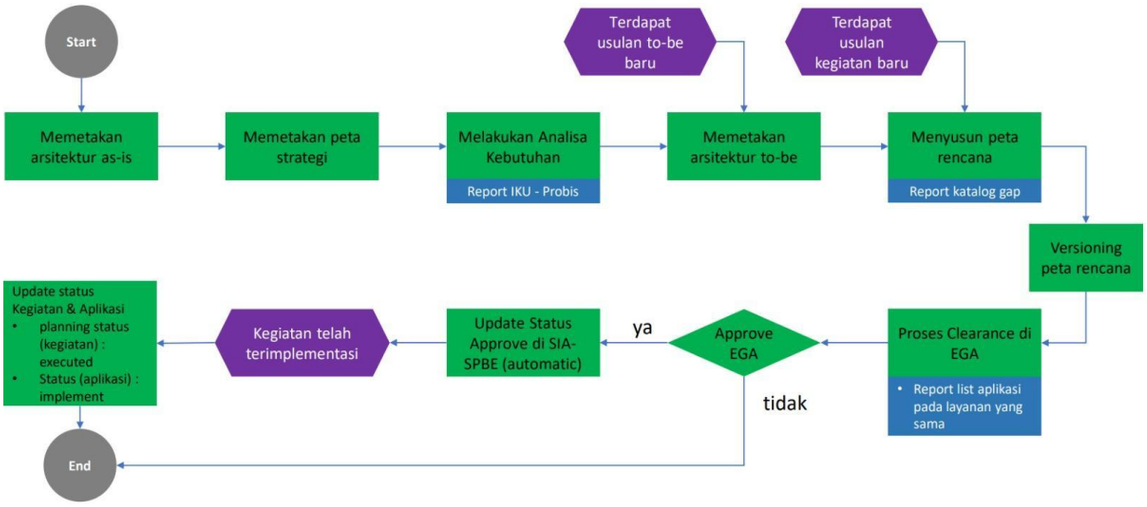

Gambar 1.1.2.1. Mekanisme Proses Perencanaan hingga Clearance Penganggaran SPBE.

Sesuai pada gambar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa melalui proses yang terstruktur, penggunaan anggaran SPBE dapat dipantau secara efisien, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi. Aplikasi Evaluasi Anggaran SPBE memainkan peran penting dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap pengeluaran SPBE dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Tata Kelola SPBE

1.2.1. Tata Kelola Arsitektur SPBE

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE merupakan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu. Arsitektur memuat beberapa domain yang dijelaskan sebagai berikut:

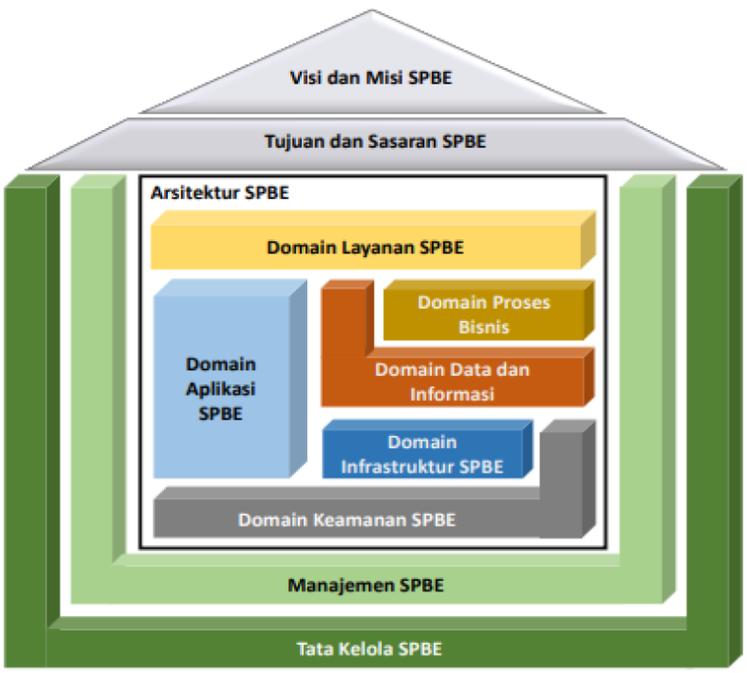

Gambar 1.2.1.1. Domain Arsitektur SPBE (i)

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari kelima aspek tersebut didukung oleh manajemen yang dikelola dengan baik dan tata kelola yang disusun secara rinci serta terarah. Setiap domain yang disebutkan dalam kerangka SPBE memiliki detail masing-masing yang saling terkait dan dapat mendorong keberhasilan domain-domain lainnya. Detail dari masing-masing domain dijelaskan dalam Gambar 1.2.1.2. Domain Arsitektur SPBE (ii).

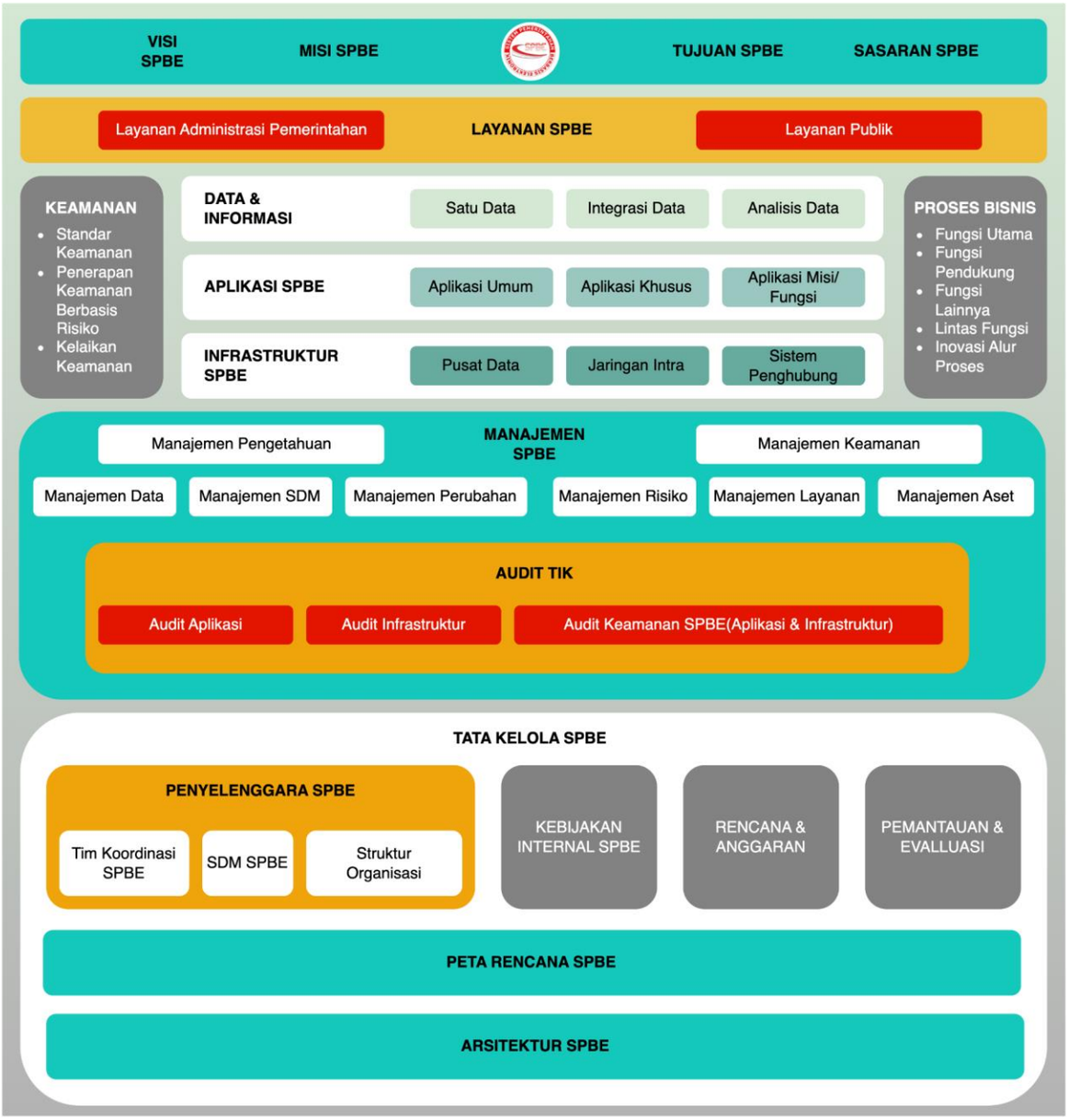

Gambar 1.2.1.2. Domain Arsitektur SPBE (ii)

Proses penyusunan dokumen arsitektur SPBE diawali dengan domain tata kelola. Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan kegiatan dalam Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan dari institusi. Dalam hal ini, pengembangan arsitektur SPBE bidang tata kelola dimulai dengan membentuk tim koordinasi, menentukan kebijakan, dan menyusun rencana serta anggaran.

Langkah kedua dalam membangun arsitektur SPBE adalah dengan menentukan bentuk-bentuk manajemen yang akan dilakukan dalam proses pengembangan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Manajemen adalah sebuah cara untuk mengarahkan Tim Koordinasi SPBE untuk mencapai tujuan utama melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien.

Adapun 8 (delapan) proses manajemen dalam SPBE mencakup:

1. Manajemen Resiko;
2. Manajemen Perubahan;
3. Manajemen Data;
4. Manajemen SDM;
5. Manajemen Aset TIK;
6. Manajemen Layanan;
7. Manajemen Pengetahuan; dan
8. Manajemen Keamanan Informasi.

Lebih jauh, arsitektur SPBE pada domain SPBE yang perlu dikelola pertama adalah domain proses bisnis. Proses bisnis dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan alur organisasi internal serta pelayanan paling efektif dan efisien. Domain proses bisnis selanjutnya dapat menjadi acuan dalam pembangunan aplikasi pada domain aplikasi. Dalam hal ini, aplikasi dapat berupa portal yang mendukung layanan dan telah terintegrasi dengan aplikasi lain. Beberapa portal layanan yang dapat dibangun antara lain:

1. Portal layanan administrasi pemerintahan; dan
2. Portal layanan publik.

Berdasarkan penggunaannya, aplikasi dapat dibagi menjadi aplikasi yang bersifat khusus dan aplikasi yang bersifat umum. Setiap pembangunan aplikasi tidak lepas dari adanya integrasi data antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Integrasi data tidak hanya antar perangkat daerah saja tetapi juga dapat dilakukan integrasi ke portal data nasional. Selain itu, domain lain yang dikembangkan dalam proses pembangunan SPBE adalah domain infrastruktur. Domain ini dikembangkan sebagai bentuk penanganan alat yang digunakan dalam pelayanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Domain infrastruktur dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: infrastruktur jaringan dan infrastruktur pusat data. Infrastruktur jaringan adalah hal-hal mengenai pengelolaan koneksi yang ada pada instansi, termasuk didalamnya pusat pengendalian dan jaringan, jaringan intra instansi pusat, jaringan intra instansi pemda, dan jaringan pita lebar. Selanjutnya untuk pusat data nasional didalamnya terdapat *cloud services* dan repositori aplikasi/data. Domain terakhir yang digunakan dalam peningkatan layanan instansi adalah domain keamanan informasi. Aspek keamanan informasi adalah aspek-aspek yang dilingkupi dan melingkupi keamanan informasi dalam sebuah aplikasi informasi. Aspek-aspek ini meliputi privasi/kerahasiaan khususnya dalam menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak, kecuali yang memiliki kewenangan.

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo disusun oleh Tim Koordinasi SPBE dan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur SPBE dan peta rencana perlu ditinjau secara berkala minimal satu tahun sekali dan perlu dilakukan perubahan ketika terjadi perubahan terhadap arsitektur SPBE Nasional, dokumen perencanaan pembangunan dan kondisi penerapan SPBE di

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ditahun 2022 menyatakan perlu adanya perubahan substansi kondisi arsitektur SPBE agar disesuaikan dengan Arsitektur SPBE Nasional. Peninjauan tersebut dilakukan oleh Tim Koordinator SPBE. Hasil peninjauan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam mengubah arsitektur SPBE dan peta rencana di Tahun 2023 ini.

1.2.2. Tata Kelola Kebijakan SPBE

Penyusunan kebijakan perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan dan operasional SPBE. Rekomendasi kebijakan yang perlu dibuat mengacu pada Perpres 95/2018 dan pembuatan kebijakan berdasarkan analisis domain, aspek, dan indikator untuk peningkatan nilai indeks evaluasi SPBE. Adapun rekomendasi kebijakan terkait tata kelola dan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

A. Kebijakan internal arsitektur SPBE

1. Menetapkan kebijakan internal arsitektur SPBE yang memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi arsitektur dan domain arsitektur SPBE (proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, serta layanan SPBE); dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal arsitektur SPBE.

B. Kebijakan internal peta rencana SPBE

1. Menetapkan kebijakan internal terkait peta rencana SPBE yang telah mengatur seluruh muatan peta rencana SPBE secara lengkap (tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, dan audit TIK); dan
2. Membuat jadwal reviu dan melakukan evaluasi secara periodik pada kebijakan internal peta rencana SPBE.

C. Kebijakan internal manajemen data SPBE

1. Menetapkan kebijakan manajemen data yang mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal manajemen data.

D. Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE

1. Menetapkan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE yang mengatur siklus pembangunan aplikasi SPBE dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE.

E. Kebijakan internal layanan pusat data

1. Menetapkan konsep kebijakan internal terkait layanan pusat data yang mengatur interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data Nasional dan/atau mengatur penggunaan layanan pusat data Nasional; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal Layanan Pusat Data.

F. Kebijakan internal layanan jaringan intra Pemerintah

1. Menetapkan konsep kebijakan internal terkait layanan jaringan intra yang mengatur interkoneksi layanan jaringan intra Pemerintah; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal layanan jaringan intra Pemerintah.

G. Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah

1. Menetapkan konsep kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan yang mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh perangkat daerah dan keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal layanan sistem penghubung layanan Pemerintah.

H. Kebijakan internal manajemen keamanan informasi

1. Menetapkan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi yang mengatur penerapan untuk seluruh perangkat daerah; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal layanan manajemen keamanan informasi.

I. Kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi

1. Menetapkan kebijakan internal terkait audit TIK yang telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK (audit infrastruktur SPBE audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE); dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal layanan audit teknologi informasi dan komunikasi.

J. Kebijakan internal tim koordinasi SPBE

1. Menetapkan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE yang telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh perangkat daerah; dan
2. Menjadwalkan dan melakukan reviu secara periodik kebijakan internal tim koordinasi SPBE.

1.2.3. Tata Kelola Proses Bisnis

Proses bisnis pemerintahan perlu dipetakan secara berkala minimal 5 tahun sekali ke dalam bentuk peta proses bisnis yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Dewasa ini, digitalisasi dapat membantu mengoptimalkan proses bisnis pemerintah yang kompleks menjadi lebih efisien dan efektif, sebagai contoh proses evaluasi SPBE yang yang didalamnya terdapat 10 aktivitas dan dilakukan secara manual. Selanjutnya ketika dilakukan digitalisasi dalam proses evaluasi SPBE tersebut terdapat beberapa aktivitas yang bisa di simplifikasi dari 10 aktivitas menjadi 7 aktivitas. Adapun ilustrasi digitalisasi untuk simplifikasi proses bisnis ditunjukkan pada gambar berikut:

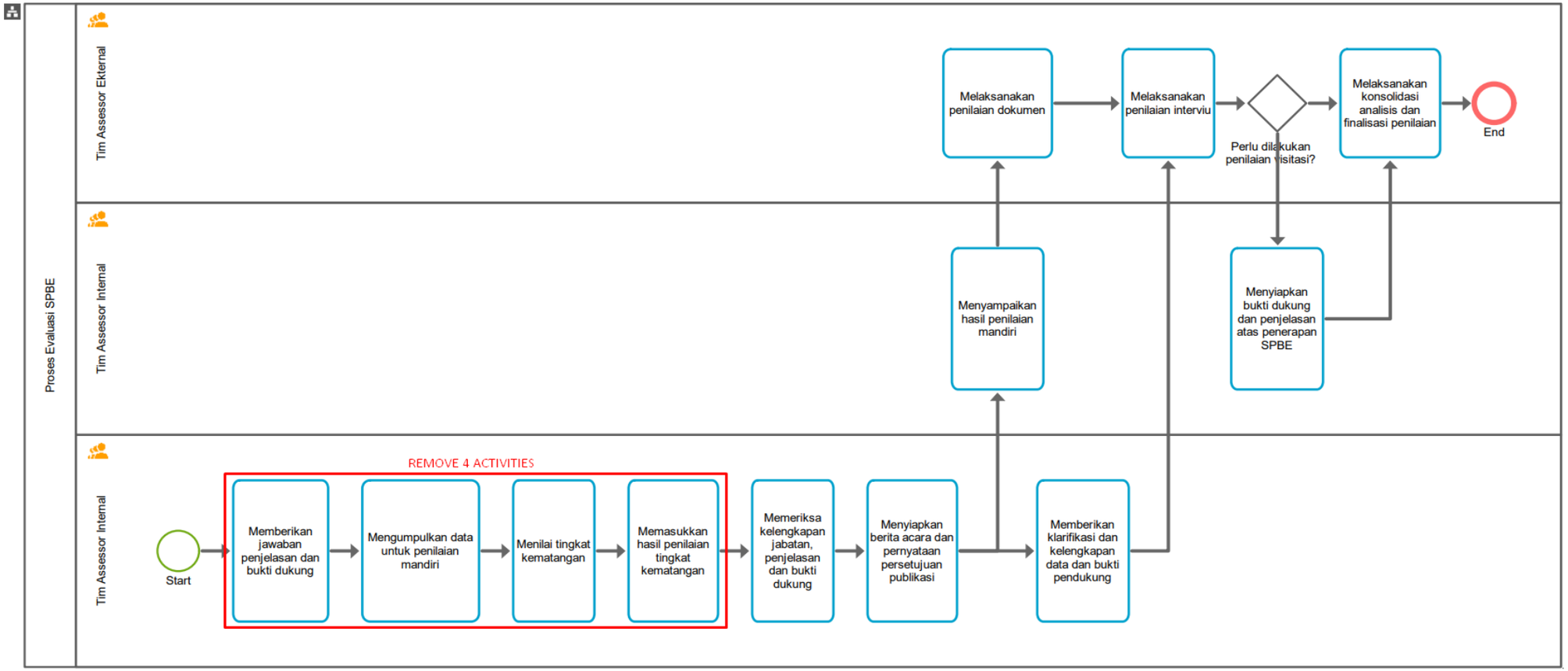

Gambar 1.2.3.1. Ilustrasi Simplifikasi Proses Evaluasi SPBE As-Is

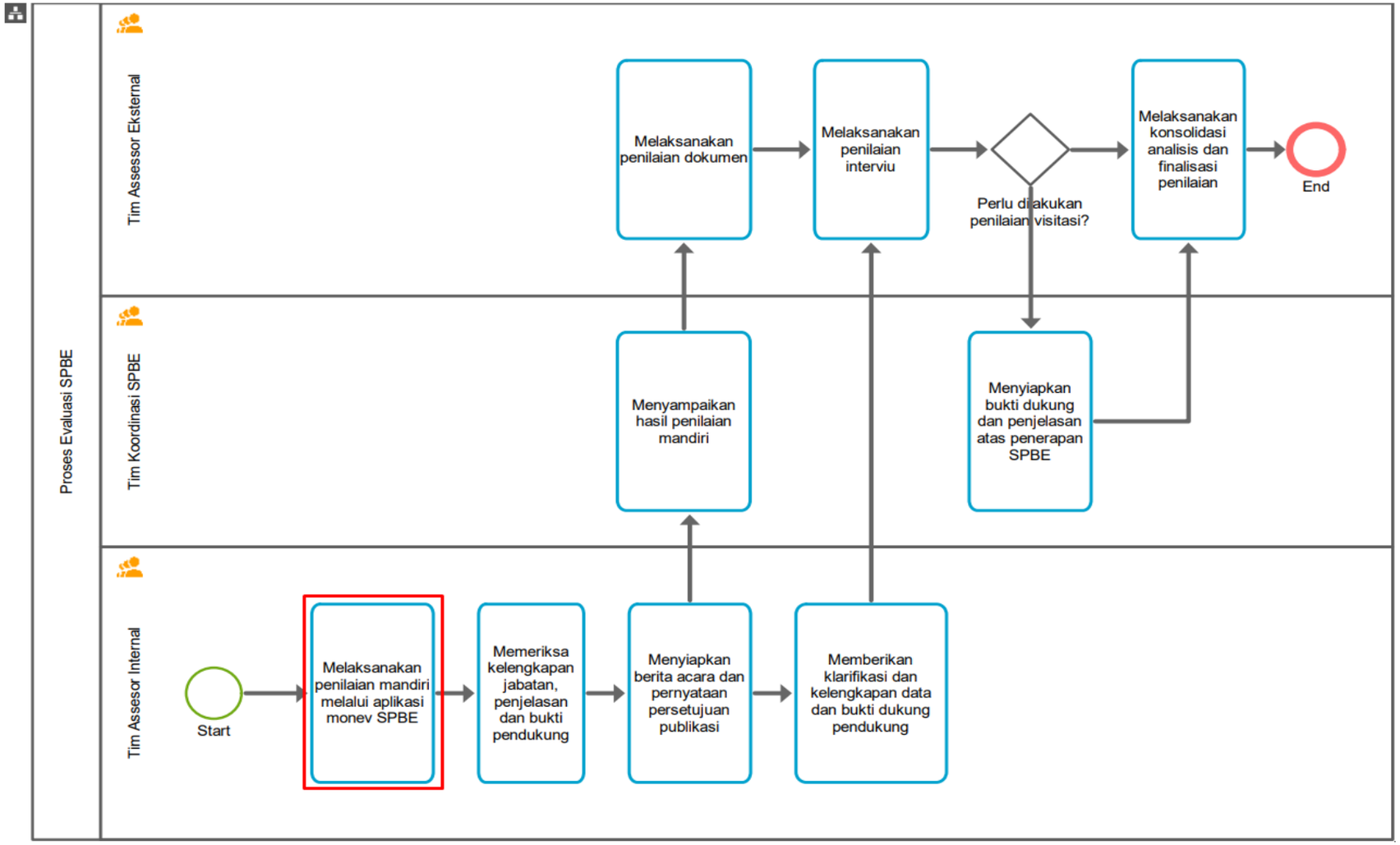

Gambar 1.2.3.2. Ilustrasi Simplifikasi Proses Evaluasi SPBE To-Be

1.2.4. Tata Kelola Data

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara Instansi Pusat dengan Instansi Daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019). Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
2. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Standar data statistik dan data geospasial ditetapkan oleh pembina data yang merupakan salah satu perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Secara khusus, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus menetapkan standar data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan oleh pembina data. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata yang informasinya mengikuti struktur dan format baku yang merujuk pada bagian informasi serta spesifikasi atau standar teknis dari metadata. Adapun standar metadata Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yaitu:

Tabel 1.2.4.1 Standar Metadata

Elemen	Keterangan
Sumber	Nama instansi pemilik data
Author	Bidang di perangkat daerah selaku produsen data
Last Updated	Tanggal data di *update*
Created	Tanggal data dibuat
Nama Berkas	Nama berkas digital
Ekstensi	Format file (*xls, doc, ppt, pdf)*

Salah satu elemen penting dalam pengelolaan tersebut adalah standarisasi data. Standarisasi data adalah proses menetapkan format, struktur, dan aturan yang seragam dalam mengelola,

menyimpan, dan mengakses data pada sebuah aplikasi. Standarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua data yang dihasilkan atau digunakan oleh aplikasi memiliki konsistensi yang tinggi dan dapat dengan mudah dipahami, diberbagai pakaikan, serta diintegrasikan antar sistem. Dengan standarisasi, instansi dapat mengurangi kesalahan input data, meningkatkan akurasi informasi, dan mempermudah proses analisis yang lebih akurat. Ketika data yang digunakan tidak memiliki standar yang jelas, berbagai masalah bisa muncul seperti :

- Kesulitan Integrasi Data

  Untuk menggabungkan data dari berbagai aplikasi, diperlukan upaya ekstra dalam memetakan atribut yang berbeda ini. Proses transformasi data akan memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan, terutama jika data yang dikelola sangat besar.
- Ketidaksesuaian Data

  Saat data dari aplikasi yang berbeda digabungkan untuk tujuan pelaporan, format yang tidak konsisten dapat menghasilkan laporan yang tidak akurat. Misalnya data "jenis kelamin" yang menggunakan berbagai format dapat menghambat pembuatan statistik yang benar.
- Menurunnya Efisiensi Operasional

  Sistem yang tidak memiliki standarisasi data membuat proses berbagi informasi antar aplikasi menjadi tidak efisien. *User* harus membuat penyesuaian manual, yang meningkatkan biaya dan waktu operasional, serta menghambat kecepatan pengambilan keputusan.

Data yang belum distandarisasi mengacu pada data yang tidak memiliki format, struktur, atau aturan yang seragam, sehingga setiap bagian sistem atau pengguna dapat menginterpretasikannya secara berbeda seperti gambar berikut :

Gambar 1.2.3.2. Ilustrasi Perbedaan Standar Data pada Beberapa Aplikasi

Standarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua data yang digunakan oleh aplikasi memiliki konsistensi yang tinggi, dapat dengan mudah dipahami, dipertukarkan, serta diintegrasikan antar sistem. Dengan standarisasi, sebuah instansi dapat mengurangi kesalahan input data, meningkatkan akurasi informasi, dan mempermudah proses analisis yang lebih akurat.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat menetapkan struktur dan format yang baku untuk data yang pemanfaatannya memenuhi kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi

yang telah ditetapkan oleh pembina data. Data dari produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data. Adapun kaidah interoperabilitas data harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan

1. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Panduan dasar yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan berkaitan dengan data. Adapun panduan data yang dapat diikuti untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

A. Forum Satu Data Indonesia

Mengacu pada Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Pasal 10 Ayat (3) huruf a, Forum Satu Data Indonesia akan menyepakati:

1. Kode referensi dan/atau data induk; dan
2. Perangkat daerah yang menjadi produsen data atas kode referensi dan/atau data induk tersebut.

B. Penyelenggara Satu Data Indonesia

Penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:

1. Pembina Data Tingkat Kabupaten;
2. Walidata Tingkat Kabupaten;
3. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten; dan
4. Produsen Data Tingkat Kabupaten.

C. Dewan Pengarah Satu Data Indonesia

Tugas Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, yaitu:

1. Mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia; dan
4. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia.

D. Komposisi Dewan Pengarah Satu Data Indonesia

Dewan Pengarah Satu Data Indonesia terdiri dari:

1. Ketua merangkap anggota, yaitu Sekda; dan
2. Anggota, terdiri atas Kepala Dinas dari masing-masing perangkat daerah.

E. Pembina Data Tingkat Daerah

Tugas Pembina Data Tingkat Daerah, yaitu:

1. Menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Daerah;
2. Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Daerah;
3. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
4. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan
5. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Produsen Data

Tugas produsen data tingkat daerah, yaitu:

1. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia;
3. Membantu pembina data dalam membina produsen data;
4. Memberikan masukan kepada pembina data dan Kepala Dinas mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
5. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
6. Menyampaikan data dan metadata kepada produsen data.

Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:

1. Standar data;
2. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
3. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data yang selanjutnya disampaikan kepada produsen data.

G. Pelaksana Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Pelaksana Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilakukan oleh:

1. Pembina data tingkat daerah;
2. Produsen data tingkat daerah;
3. Produsen data pendukung; dan
4. Produsen data tingkat daerah.

Dari panduan dasar untuk implementasi Satu Data Indonesia di atas, maka didapatkan alur koordinasi aktor yang dapat dilihat pada Gambar berikut ini :

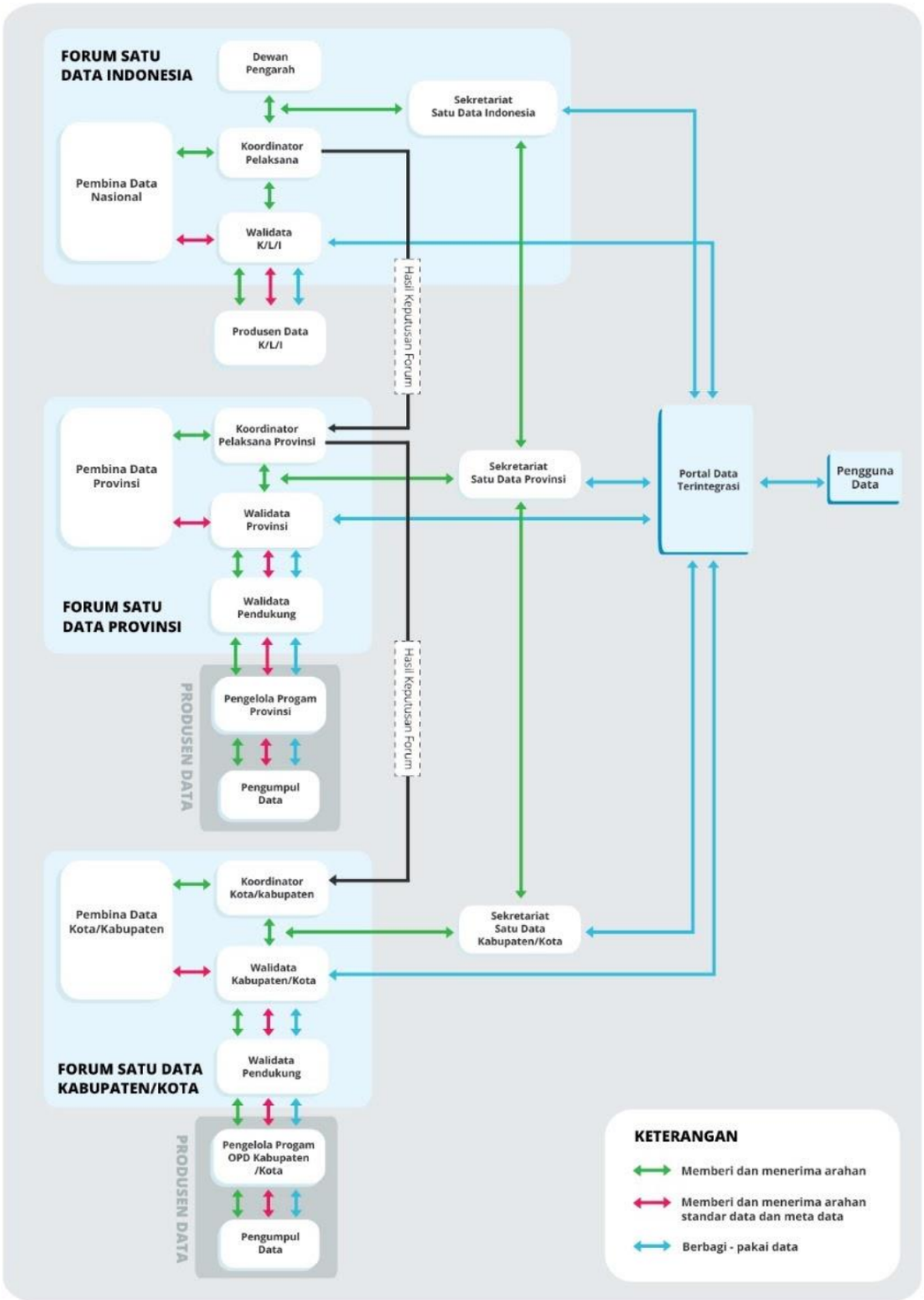

Gambar 1.2.4.1. Alur Koordinasi Aktor Forum Satu Data

1.2.5. Tata Kelola Layanan

Tata kelola layanan SPBE merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola penyediaan layanan pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Proses tata kelola layanan ini meliputi 3 (tiga) tahap diantaranya perencanaan, operasional, dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan guna memastikan layanan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam tata kelola layanan SPBE yang bertujuan untuk menyusun strategi, kebijakan, dan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan layanan.

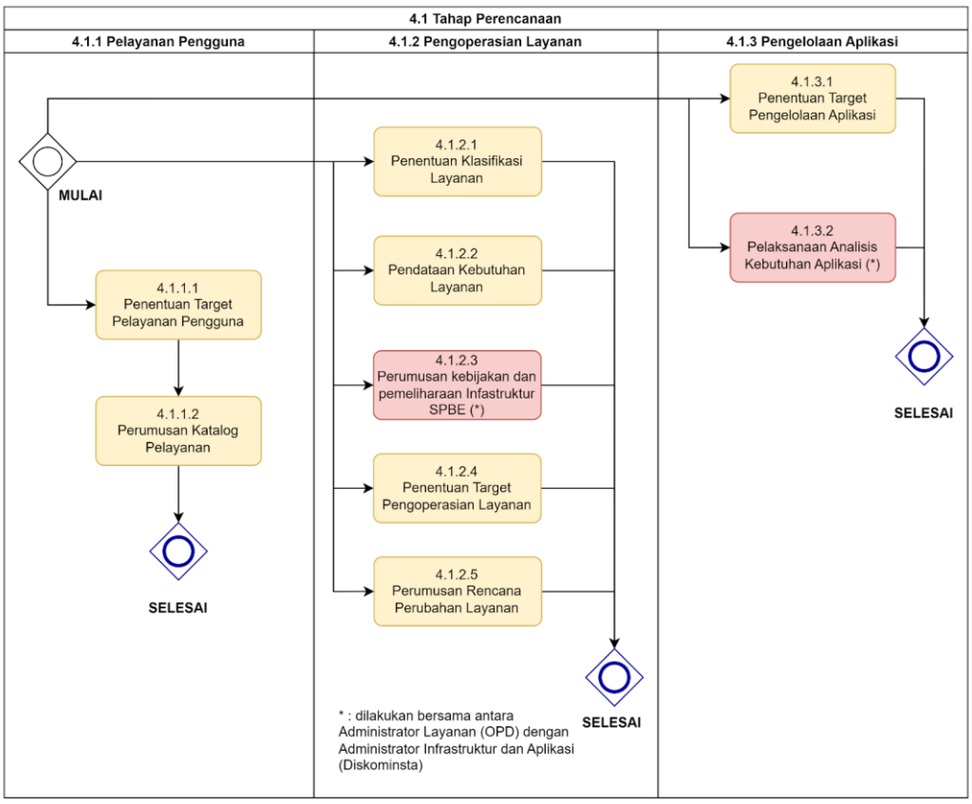

Gambar 1.2.5.1. Tahap Perencanaan Tata Kelola Layanan

Beberapa aspek penting dalam perencanaan antara lain:

- Identifikasi Kebutuhan: Menentukan jenis layanan yang dibutuhkan berdasarkan regulasi, kebijakan nasional dan daerah, serta masukan dari masyarakat.
- Penyusunan Kebijakan dan SOP: Menyusun regulasi, standar operasional prosedur (SOP), serta pedoman yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan.
- Penganggaran dan Sumber Daya: Menyediakan anggaran, tenaga kerja, teknologi, serta infrastruktur pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan.
- Perencanaan Teknologi dan Integrasi: Jika layanan berbasis teknologi, perlu dirancang sistem yang mendukung proses layanan secara efisien, termasuk aspek keamanan data dan integrasi dengan layanan lain.

b. Operasional

Tahap operasional merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun, mencakup pelaksanaan layanan, pengawasan, serta koordinasi dengan pihak terkait.

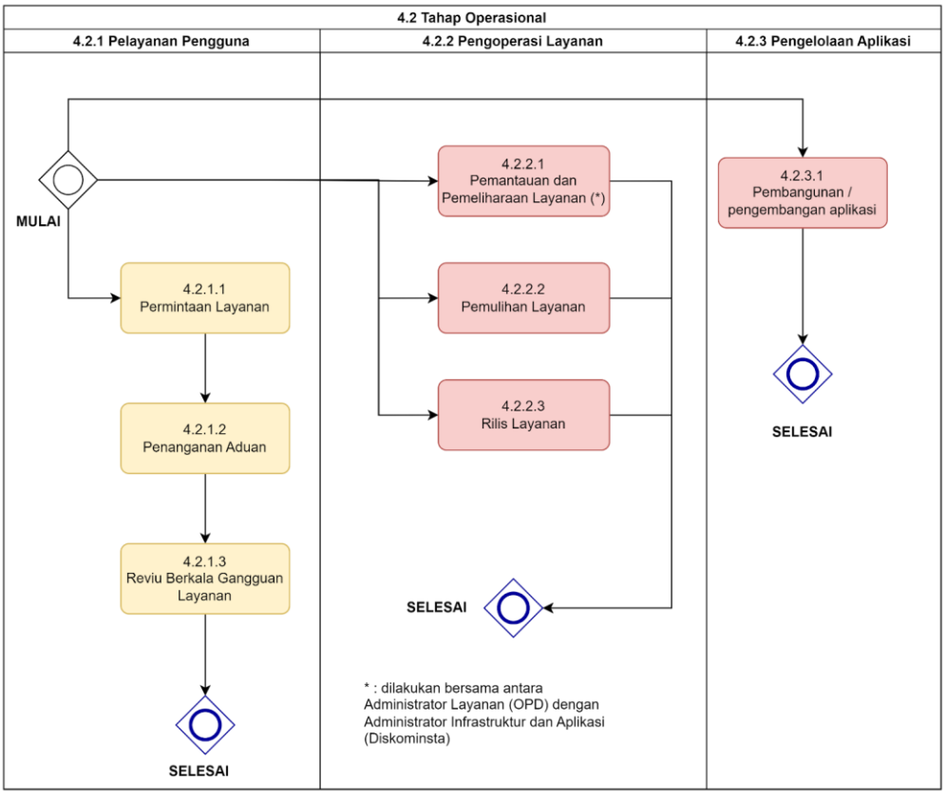

Gambar 1.2.5.2. Tahap Operasional Tata Kelola Layanan

Beberapa langkah utama dalam operasional layanan meliputi:

- Pelaksanaan Layanan: Memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- Monitoring dan Pengendalian: Mengawasi jalannya layanan secara berkala untuk memastikan layanan berjalan dengan baik serta melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan.
- Koordinasi dan Komunikasi: Menjalin kerja sama antara perangkat daerah, instansi terkait, serta masyarakat agar layanan dapat berjalan dengan lancar.
- Penggunaan Teknologi: Jika layanan berbasis digital, dilakukan pemeliharaan sistem secara berkala untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal.

c. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi layanan serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

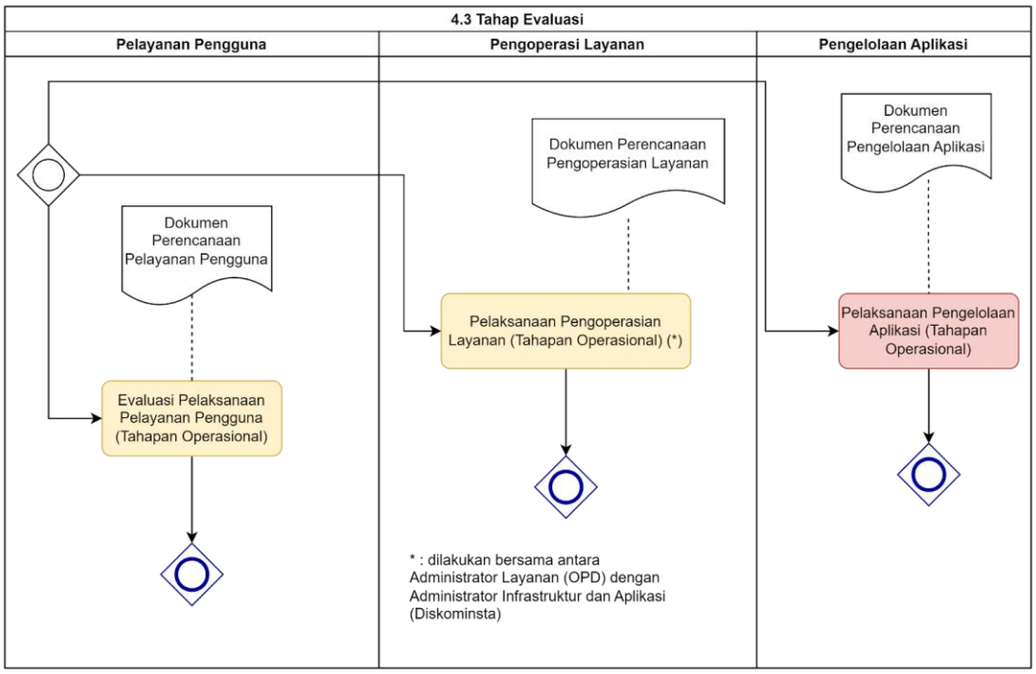

Gambar 1.2.5.3. Tahap Evaluasi Tata Kelola Layanan

Beberapa aspek yang diperhatikan dalam evaluasi antara lain:

- Pengukuran Kinerja: Menilai efektivitas layanan berdasarkan indikator kinerja utama (KPI) dan standar yang telah ditetapkan.
- Umpan Balik dari Masyarakat: Mengumpulkan saran dan masukan dari masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan.
- Audit dan Kepatuhan: Memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
- Penyempurnaan dan Inovasi: Melakukan perbaikan berkelanjutan serta inovasi dalam penyelenggaraan layanan agar lebih efektif dan efisien.
- Melalui proses tata kelola layanan yang sistematis dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat memberikan layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan transformasi digital nasional Perpres 82 Tahun 2023, portal layanan *as-is* (kondisi eksisting) dan *to-be* (kondisi target) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu diselaraskan dengan ekosistem 9 (sembilan) layanan prioritas nasional diatas guna meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat akses layanan publik, serta memastikan keterpaduan sistem administrasi pemerintahan secara nasional. Berikut merupakan gambaran portal layanan digital terpadu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Gambar 1.2.5.1 Tata Kelola Layanan SPBE

1.2.6. Tata Kelola Aplikasi

Secara umum, saat ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membangun solusi TI dalam beberapa aplikasi yang terpisah/silo, bukan dalam satu kesatuan aplikasi. Hal ini dikarenakan usulan aplikasi biasanya terbagi berdasarkan perangkat daerah, atau berdasarkan proses bisnis yang ada. Hal ini tentunya dapat menimbulkan beberapa masalah ketika terjadi perubahan pada proses bisnis maka perlu menyesuaikan pada beberapa aplikasi terkait. Kedepan, alternatif digitalisasi proses bisnis harus dapat meminimalisir banyaknya aplikasi internal yang ada di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai contoh praktik terbaik yaitu adanya sebuah aplikasi layanan kepegawaian milik BKD yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan kepegawaian, seperti: *profiling* pegawai, presensi, izin cuti-sakit, kinerja pegawai, dan lain sebagainya.

Selain itu, masifnya pembangunan aplikasi yang akan dibangun menjadi tantangan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode untuk menentukan prioritas aplikasi yang akan diakomodasi. Pemilihan prioritas salah satunya dapat menggunakan *matrix impact-implementation*. Cara membaca tabel prioritas yaitu dimulai dari kanan atas (aplikasi yang mudah diimplementasikan dan memiliki *impact* tinggi) ke bawah, dilanjutkan dengan aplikasi dengan implementasi dan *impact* sedang menuju ke bagian *impact* tinggi. Aplikasi-aplikasi yang akan dibangun, baik usulan dari perangkat daerah, maupun inisiatif dari Diskominfo dipetakan dalam matriks sebagai berikut.

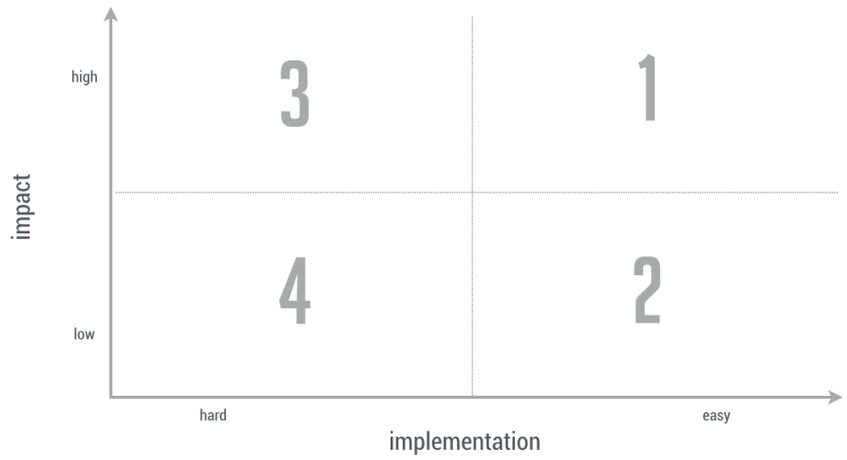

Gambar 1.2.6.1. *Matrix Easy Implementation*

Pengembangan aplikasi dikategorikan mudah (*easy*) jika:

1. Aplikasi telah ada/pernah digunakan di perangkat daerah lain sebelumnya;
2. Biaya pengembangan aplikasi sama dengan atau lebih kecil dari rata-rata biaya pengembangan aplikasi;
3. *Platform* aplikasi relevan dengan kualifikasi SDM TIK di Diskominfo/perangkat daerah; dan
4. Proses kerja aplikasi tidak terlalu kompleks.

Aplikasi dikategorikan memiliki *impact* yang besar (*high impact*) jika:

1. Aplikasi yang langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (G2C);
2. Aplikasi diusulkan oleh lebih dari satu perangkat daerah;
3. Aplikasi dapat digunakan oleh lebih dari satu perangkat daerah; dan
4. Aplikasi pesanan langsung dari pimpinan (*strategic decision maker*).

Selain menggunakan *matrix impact-implementation* di atas, proses penentuan prioritas pengembangan aplikasi juga dilakukan dengan menggunakan strategi yang digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 1.2.6.2. Bagan Strategi Prioritasisasi Pengembangan Aplikasi

Aplikasi yang sifatnya mendukung pelayanan publik dan menyentuh jajaran eksekutif/pimpinan perlu diprioritaskan pengembangannya. Jika hal tersebut telah terpenuhi, prioritas selanjutnya ditujukan untuk aplikasi-aplikasi yang mengefisiensikan proses kolaborasi antar perangkat

daerah. Terakhir, aplikasi yang diprioritaskan merupakan aplikasi yang sifatnya untuk kalangan bisnis dan investor. Prioritas pengembangan aplikasi tersebut mempertimbangkan kesiapan internal perangkat daerah dari sisi SDM dan anggaran, serta adanya dukungan pimpinan perangkat daerah terhadap pengembangan Layanan SPBE.

Pengembangan aplikasi dapat diinisiasi melalui berbagai kegiatan seperti: 1) penyusunan panduan integrasi antar aplikasi perangkat daerah, 2) pengembangan dan pemeliharaan *platform* integrasi aplikasi (*web services*), 3) pengembangan dan pemeliharaan *data warehouse* dan aplikasi *dashboard*, 4) pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, dan 5) *penetration testing* aplikasi. Secara keseluruhan, kebutuhan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dilakukan berdasarkan perkembangan kesiapan proses bisnis.

Gambar 1.2.6.3. Inisiatif Pengembangan Aplikasi

Sebagai langkah untuk mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi, terdapat 4 (empat) inisiatif utama sebagai berikut:

1. Penguatan aplikasi *eksisting* untuk meningkatkan reliabilitas aplikasi dan akuntabilitas data;
2. Pengembangan *platform* integrasi berbasis layanan *(services)* guna memastikan tiap perangkat daerah memiliki rujukan untuk interoperabilitas aplikasi maupun data;
3. Kolaborasi bersama dengan inisiatif pengembangan aplikasi di perangkat daerah agar bisa dimanfaatkan pada level nasional; dan
4. Pengembangan *mobile applications* untuk menyajikan layanan publik yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat.

1.2.6.1. Prinsip Pengembangan Aplikasi

Prinsip-prinsip pengembangan aplikasi di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus meliputi aspek: *Sustainable, Mobile, Agile, Reliability, Transparency* (SMART).

A. *Sustainability*

Aplikasi yang dikembangkan dapat ditingkatkan secara terus menerus (*continuous improvement*) dan berkembang menyesuaikan kebutuhan. Konsep ini dikenal dengan istilah *System Development Life Cycle* (SDLC).

B. Mobile

Aplikasi yang dikembangkan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus dapat meningkatkan fleksibilitas pemanfaatan teknologi dan kemudahan bagi masyarakat.

C. Agile

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo cepat tanggap dalam merespon kebutuhan maupun permasalahan dalam implementasi SPBE.

D. *Reliability*

Aplikasi yang akan dikembangkan harus bisa diandalkan, dalam hal ketepatan proses dan ketepatan informasi.

E. *Transparency*

Aplikasi yang dikembangkan harus dapat mendukung budaya transparansi di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar tercipta pelayanan prima kepada masyarakat.

1.2.6.2. Tren Teknologi Pengembangan Aplikasi

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam pengembangan aplikasi, baik dalam sektor pemerintahan. Pengembangan aplikasi modern tidak lagi hanya berfokus pada fungsionalitas dasar, tetapi juga menekankan aspek efisiensi, skalabilitas, keamanan, serta pengalaman pengguna (user experience) yang optimal. Adapun beberapa tren teknologi utama yang mendominasi dunia pengembangan aplikasi saat ini adalah sebagai berikut:

A. Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)

Integrasi AI dalam aplikasi memungkinkan sistem untuk belajar dari data, mengenali pola, dan memberikan rekomendasi secara otomatis. Dalam pemerintahan, teknologi ini digunakan untuk membangun chatbot layanan publik Kabupaten Kulon Progo, sistem analitik kebijakan berbasis data, dan deteksi anomali dalam anggaran atau pengaduan masyarakat.

B. Pengembangan Berbasis Cloud (Cloud Computing)

Cloud computing menjadi pondasi penting dalam pengembangan aplikasi modern, karena memberikan fleksibilitas dalam penyimpanan dan pemrosesan data. Aplikasi berbasis cloud memungkinkan pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengakses data dan sistem secara real-time, tanpa terbatas oleh perangkat atau lokasi fisik tertentu.

C. Penggunaan Arsitektur Microservices

Arsitektur microservices memungkinkan pengembangan aplikasi secara modular, di mana setiap komponen atau layanan dapat dikembangkan, diuji, dan ditingkatkan secara terpisah. Ini memberikan kemudahan dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut tanpa mengganggu keseluruhan sistem.

D. Penguatan Keamanan Aplikasi (Application Security)

Meningkatnya ancaman siber mendorong pengembang untuk memprioritaskan keamanan sejak tahap awal pengembangan (security by design). Teknologi seperti enkripsi end-to-end, autentikasi multi-faktor (multi-factor authentication), dan pemantauan anomali berbasis AI kini menjadi standar dalam pengembangan aplikasi, terutama dalam pengelolaan data publik.

E. Pengembangan Aplikasi Berbasis Mobile dan Web Responsif

Dengan meningkatnya penggunaan perangkat mobile, aplikasi yang dikembangkan saat ini cenderung bersifat responsif dan adaptif terhadap berbagai ukuran layar. Platform *Progressive Web App (PWA)* juga menjadi pilihan karena mampu menggabungkan keunggulan aplikasi web dan mobile dalam satu sistem yang ringan dan mudah diakses.

F.Bahasa Pemrograman dan *Tools*

Terdapat banyak ragam teknologi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak saat ini. Beberapa di antaranya termasuk:

Gambar 1.2.6.2.1. Ragam Bahasa Pemrograman

1. Bahasa Pemrograman Umum:
   - Python
   - Java
   - C#
   - JavaScript
   - Ruby
   - Go
   - Swift
   - Kotlin
   - Rust
2. Bahasa Pemrograman untuk Aplikasi *Web*:
   - HTML
   - CSS
   - JavaScript
   - PHP
   - Ruby on Rails
   - ASP.NET
   - Node.js
3. Bahasa Pemrograman untuk Aplikasi *Mobile*:
   - Java (untuk Android)
   - *Swift* (untuk iOS)
   - Kotlin (untuk Android)
   - *React Native* (JavaScript *framework* untuk pengembangan aplikasi mobile lintas *platform*)
4. *Relational Database Management System* (RDBMS):
   - Oracle Database
   - Microsoft SQL Server

- MySQL/MariaDB
- PostgreSQL.

Berdasarkan hasil survei aplikasi internal di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa mayoritas aplikasi merupakan berbasis *web* yang berjumlah 223 aplikasi (93,3%). Pemilihan *platform web* merupakan hal yang umum mengingat *platform* ini dapat diakses dari *personal* komputer maupun *smartphone* sehingga memberikan kemudahan bagi para pengguna aplikasi dalam mengakses sebuah layanan pemerintah.

Aplikasi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tentunya akan terus diarahkan dan diproyeksikan menjadi sebuah aplikasi yang mampu mendukung bisnis proses dasar dan pendukung yang ada. Teknologi yang terus berkembang dapat menjawab tantangan kompleksitas bisnis proses agar lebih efisien dengan adanya otomasi. Namun dibalik pesatnya perkembangan teknologi terdapat tantangan yang dihadapi yaitu banyaknya ragam teknologi yang ada perlu didukung dengan SDM yang menguasai teknologi tersebut. Dari kondisi riil aplikasi internal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo saat ini terhadap penggunaan teknologi yang marak digunakan dan kompetensi programmer yang ada maka perlu ditetapkan standar teknologi yang dapat digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 1.2.6.2.1. Pilihan Teknologi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

No	*Platform*	Teknologi
1	*Front End Web*	HTML, CSS, Js, Vue JS
	Back End Web	PHP
2	*Front End Mobile*	Flutter, Kotlin
	Back End Mobile	PHP
3	*Desktop*	C#, Java
4	RDBMS	MySQL, PostgreSQL
5	*Interoperability*	JSON

G. Integrasi ***Data dengan Platform Interoperabilitas***

WSO2 merupakan *platform* interoperabilitas berlisensi terbuka (*open source*) yang mendukung berbagai jenis layanan integrasi. WSO2 menawarkan keuntungan *platform middleware* berbasis *Service Oriented Architecture* (SOA) yang mudah untuk diintegrasikan dan mendukung layanan berbasis *cloud* serta menyediakan *helpdesk* di dalam produknya. Republik Moldova merupakan salah satu negara yang telah menerapkan WSO2 di dalam penyelenggaraan layanan pemerintah berbasis e-Government guna keperluan *identity management*, *authentication* dan *authorization transaction* untuk berbagai *electronic devices* dan *mobile apps*.

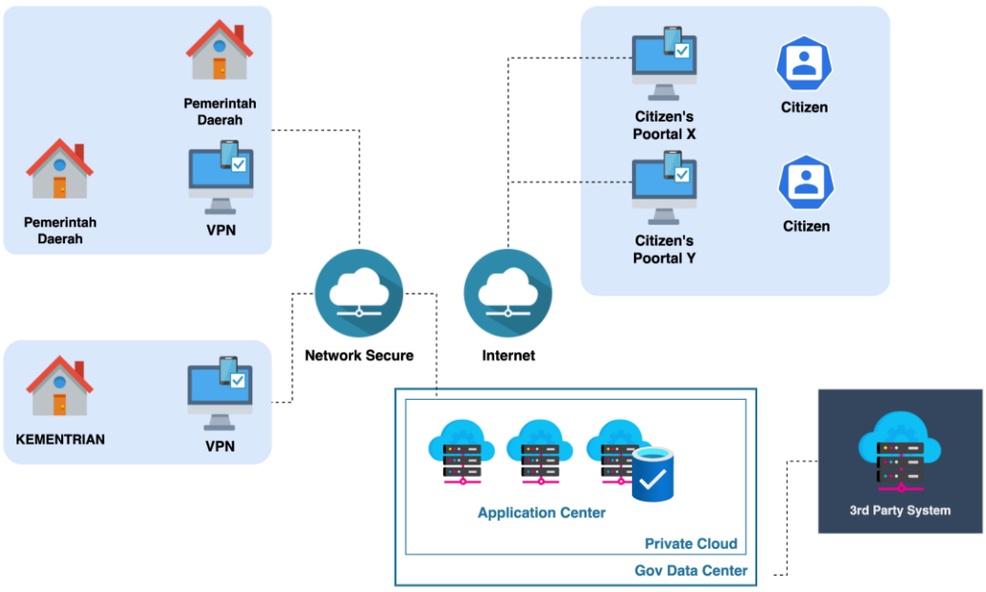

Gambar 1.2.6.2.2. Integrasi Data dengan *Platform Interoperabilitas*

Gambar di atas mengilustrasikan integrasi data dan pertukaran informasi antar perangkat daerah di dalam mengelola layanannya melalui *secure network* dan menyediakan media penyampaian informasi publik melalui portal masyarakat berdasarkan pusat data pemerintahan.

1.2.7. Tata Kelola Infrastruktur

Infrastruktur SPBE terdiri dari Pusat Data Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pusat Data Kementerian atau Lembaga dapat menjadi Pusat Data Nasional jika memenuhi SNI: 9799-1: 2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data dan SNI: 9799-2: 2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data. Pada Pusat Data terdapat beberapa komponen antara lain *pusat data*, *storage*, perangkat pendukung pusat data, dan teknologi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi.

1.2.7.1. Pusat Data

Gambar 1.2.7.1.1. SNI No: 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data

A. SNI No: 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi teknis pusat data.

1. Spesifikasi gedung

   Pemilihan lokasi gedung pusat data tidak boleh terletak di wilayah rawan bencana. Referensi wilayah rawan bencana dapat mengacu pada Katalog BMKG melalui *https://cdn.bmkg.go.id/Web/Katalog-Gempabumi-Signifikan-dan-Merusak-1821-2018.pdf* serta Dokumen Risiko Bencana Indonesia (RBI) dari BNPB melalui *https://bnpb.go.id/uploads/24/buku-rbi-1.pdf*.

   - Ketahanan gempa;
   - Ketahanan beban gempa;
   - Pembagian ruangan;
   - Ketahanan material gedung; dan
   - Sistem monitoring gedung.

2. Spesifikasi sistem kelistrikan:
   - Catu daya listrik;
   - Sistem kelistrikan berkesinambungan;
   - Persediaan bahan bakar;
   - *Uninterruptible Power Supply* (UPS);
   - Analisis sistem listrik;
   - Konstruksi panel listrik;
   - Jalur kabel listrik;
   - Pembumian; dan
   - Efisiensi pemakaian listrik pada pusat data (*Power Usage Effectiveness*).

3. Spesifikasi sistem pendinginan:
   - Spesifikasi sistem jaringan data;
   - Spesifikasi sistem pemadam kebakaran;
   - Spesifikasi sistem monitoring lingkungan pusat data; dan
   - Spesifikasi sistem keamanan akses fisik.

B. SNI-No: 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat data.

Gambar 1.2.7.1.2. SNI-No 8799-1:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data

1. Perencanaan
    - Analisis kebutuhan
    - Manajemen risiko dan kesesuaian
2. Operasional
    - Organisasi penyelenggara pusat data
    - Sistem manajemen layanan operasional pusat data
    - Infrastruktur
3. Manajemen layanan
    - Sistem manajemen layanan tingkat lanjut (STML)
    - Manajemen keselamatan
    - Manajemen keamanan
    - Manajemen proyek
4. Manajemen SDM
    - Pengelolaan kompetensi
    - Pelatihan
    - Manajemen kinerja
5. *Monitoring*, pelaporan dan pengendalian
6. Manajemen keberlangsungan
    - Manajemen keberlangsungan kegiatan
    - Manajemen keberlangsungan lingkungan

C. SNI No: 8799-3:2019 beserta amandemennya tentang Panduan Audit Pusat Data

1. Program audit.
2. Kegiatan audit.
3. Penyiapan, pengesahan dan penyampaian laporan audit.
4. Kompetensi auditor.

1.2.7.2. Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan intra pemerintah adalah jaringan yang digunakan oleh pemerintah untuk berbagi informasi dan komunikasi antar *stakeholder*. Jaringan ini umumnya tersedia untuk layanan basis data, berbagi dokumen, dan berbagi informasi dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah lainnya. Jaringan intra pemerintah juga dapat digunakan untuk mengatur akses ke layanan administratif, seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan keuangan.

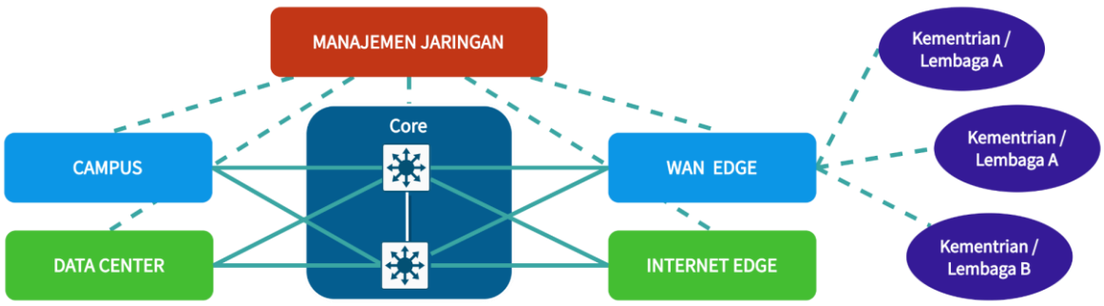

Gambar 1.2.7.2.1. Arsitektur Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Dari gambar arsitektur di atas diperoleh informasi bahwa untuk koneksi jaringan intra pemerintah antara jaringan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Kementerian/Lembaga Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota/Kabupaten melalui *WAN Edge* dengan menggunakan koneksi yang aman dan terenkripsi. *WAN Edge* di dukung oleh perangkat *router WAN* dan *Next-Generation Firewall WAN.*

1.2.7.3. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Sistem penghubung layanan pemerintah adalah sistem yang menyediakan akses ke berbagai layanan pemerintah dari satu tempat. Sistem ini dapat berupa portal layanan pemerintah atau antarmuka berbasis *web* yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, seperti pelayanan fiskal, sosial, pengawasan, dan lainnya. Sistem ini menyediakan berbagai fitur seperti verifikasi, pelaporan, dan pemantauan untuk memastikan bahwa layanan yang ditawarkan oleh pemerintah dapat diakses oleh masyarakat,

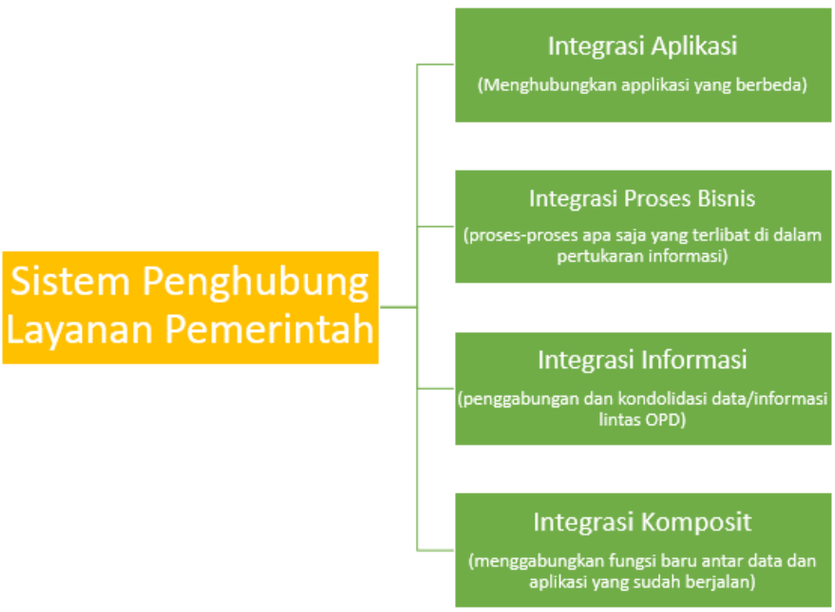

Gambar 1.2.7.3.1. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

A. Application Programming Interface (API)

API adalah sekumpulan kode pemrograman yang membantu *developer* melakukan integrasi data antara dua aplikasi berbeda secara bersamaan. *API* memungkinkan *developer* untuk membuat aplikasi dengan berbagai elemen seperti *function, protocols* dan *tools* lain. *API* dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai bahasa pemrograman.

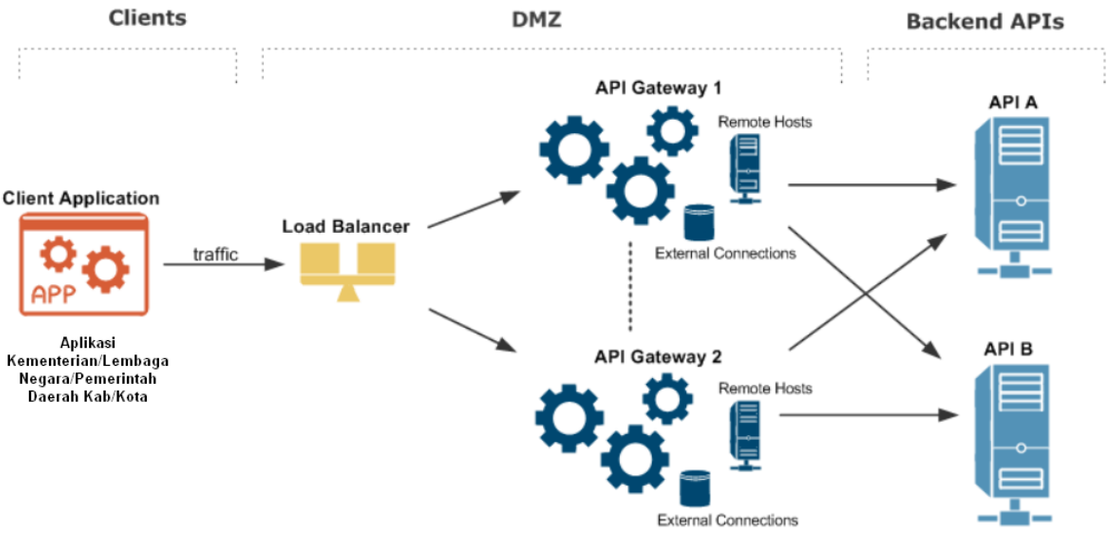

Gambar 1.2.7.3.2. Arsitektur *API Gateway* dengan konfigurasi *High Availability*

Berikut ini adalah penjelasan dari gambar Arsitektur *API Gateway* diatas dengan *konfigurasi High Availability* (HA) sebagai berikut.

1. Aplikasi klien eksternal membuat panggilan masuk melalui protokol pengangkutan pesan tertentu (misalnya, *HTTP, JMS*, atau *FTP*) ke penyeimbang beban.
2. Penyeimbang beban melakukan pemeriksaan pada setiap *instance API Gateway*, dan mendistribusikan beban pesan ke *port* di setiap instance *API Gateway* (*default*-nya adalah 8080).
3. Setiap *instance API Gateway* harus memiliki Koneksi Eksternal ke sistem pihak ketiga. Termasuk *database* seperti *Oracle* dan *MySQL*, dan *Authentication Repositories seperti CA SiteMinder, Oracle Access Manager, pusat data Local Directory Access Protocol (LDAP),* dan sebagainya.
4. Setiap *instance API Gateway* direplikasi menggunakan sistem *caching* berdasarkan Ehcache.
5. Setiap *instance API Gateway* memiliki antarmuka *Host* Jarak Jauh yang menentukan koneksi keluar sistem API *backend*.
6. Setiap *instance API Gateway* berisi *database Apache Cassandra* yang disematkan dan digunakan oleh fitur-fitur tertentu untuk penyimpanan data persisten, dimana setiap *instance API Gateway* memiliki kemampuan HA-nya sendiri.
7. Setiap *instance API Gateway* berisi sistem pesan *Apache ActiveMQ* tertanam, yang dapat dikonfigurasi untuk HA dalam sistem file bersama.
8. Setiap *API backend* juga direplikasi untuk memastikan tidak ada kegagalan di tingkat pusat data.
9. *Traffic* manajemen yang digunakan oleh *Admin Node Manager, API Gateway Manager*, dan *Policy Studio* ditangani secara terpisah di *port* yang berbeda (*default* 8090).

1.2.8. Tata Kelola Keamanan

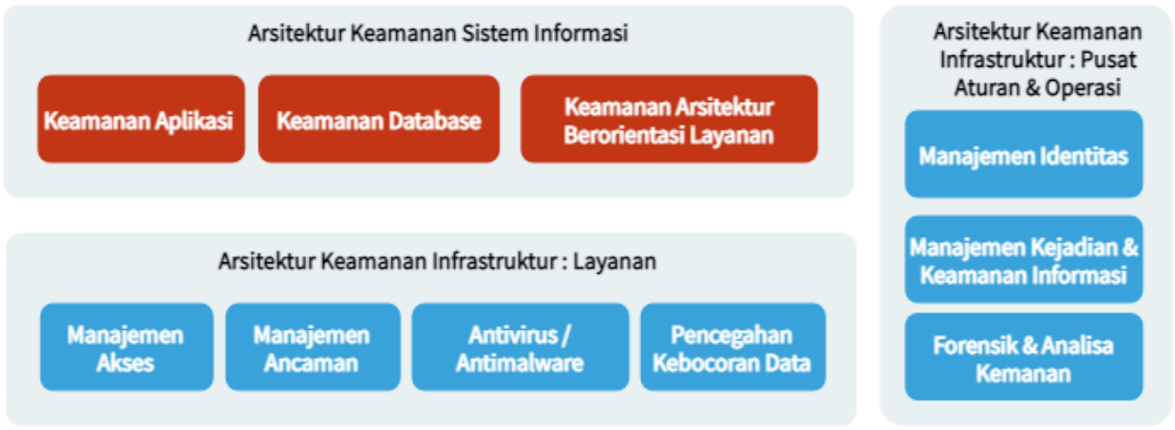

Gambar 1.2.8.1 Keamanan SPBE

Tata Kelola Keamanan SPBE terdapat beberapa komponen yang mencakup didalamnya, seperti Arsitektur Keamanan Sistem Informasi yang terdiri atas keamanan aplikasi, keamanan *database*, dan keamanan arsitektur berorientasi layanan. Selain itu, juga terdapat arsitektur keamanan infrastruktur: layanan yang didalamnya mencakup manajemen akses, manajemen ancaman, antivirus/antimalware dan pencegahan kebocoran data.

1.2.8.1. Arsitektur Keamanan Sistem Informasi

Arsitektur Keamanan Sistem Informasi terdiri dari keamanan aplikasi, keamanan *database*, dan keamanan arsitektur berorientasi layanan. Setiap data dan informasi yang dikelola oleh satuan kerja wajib dilakukan *backup* secara terpusat dan berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan data dan informasi. Pusat Data dan Informasi melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme *backup* dan *restore* data dan informasi untuk memastikan integritas dan validitas prosedur. Tata cara *backup* dan *restore* data dan informasi telah tertuang dalam SOP dan ditetapkan. Kepastian keamanan data dan informasi, perlu dilakukan manajemen keamanan informasi melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

1.2.8.2. Arsitektur Keamanan Infrastruktur Layanan

Arsitektur Keamanan Infrastruktur Layanan meliputi manajemen akses, manajemen ancaman, antivirus/anti malware, dan pencegah kebocoran data. Dalam memastikan keamanan Infrastruktur SPBE, dilakukan audit keamanan Infrastruktur SPBE. Audit keamanan Infrastruktur SPBE dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun dengan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh Badan Siber Sandi Negara.

1.2.8.3. Arsitektur Keamanan Infrastruktur: Aturan Pusat dan Operasi

Arsitektur Keamanan Infrastruktur: Aturan Pusat dan Operasi terdiri dari manajemen identitas, manajemen kejadian dan keamanan informasi, dan forensik dan analisa keamanan. Pelaksanaan terhadap Keamanan SPBE mencakup:

1. Penjaminan kerahasiaan.
2. Penjaminan keutuhan.
3. Penjaminan ketersediaan.
4. Penjaminan kenirsangkalan.

Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Manajemen SPBE

Manajemen SPBE perlu adanya manajemen dalam implementasi SPBE dan mengakomodir proses operasional SPBE yang mengacu dari Perpres 95/2018. Secara keseluruhan dalam manajemen SPBE terdapat beberapa lingkup yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.3.1. Lingkup Manajemen SPBE

No	Lingkup	Referensi	Kegiatan (Disesuaikan dengan Kegiatan Peta Rencana)	Penanggung Jawab
a.	Manajemen Risiko	PermenpanRB 05/2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, International Standardization Organization (ISO) 31000 tentang *Risk Management*, 27005 tentang I*nformation technology– Security techniques – Information security risk management*	1. Pembentukan komite manajemen risiko 2. Penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen risiko SPBE 3. Penyusunan pedoman manajemen risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE 4. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko 5. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh inspektorat 6. Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, fgd 7. Penetapan konteks risiko SPBE 8. Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak 9. Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & penyusunan evaluasi risiko SPBE 10. Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya 11. Penyusunan laporan evaluasi manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental	Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
b.	Manajemen Keamanan Informasi	ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan	1. Pembentukan tim keamanan informasi 2. Penyusunan SOP keamanan informasi mengacu pada Peraturan BSSN No. 4 Tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Lingkup	Referensi	Kegiatan (Disesuaikan dengan Kegiatan Peta Rencana)	Penanggung Jawab
		Informasi, Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2021 3. Membuat postingan keamanan informasi pada media informasi 4. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen keamanan informasi	
c.	Manajemen Data	Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, Permen PPN 16/2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SNI 8799:2019 tentang Pusat Data, International Standardization Organization (ISO) 11179 tentang *Metadata Registry*	1. Pembentukan tim satu data 2. Penyusunan pedoman manajemen data 3. Pembaharuan arsitektur data 4. Pengumpulan data sektoral di masing-masing unit kerja 5. Pemeriksaan pemenuhan data sektoral 6. Penyebarluasan data sektoral 7. Pembaruan data sektoral secara berkala 8. Penyimpanan data pada portal open data 9. Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
d.	Manajemen Aset TIK	*International Standardization Organization* (ISO) 19770-5 tentang Sistem Manajemen Aset TIK	1. Menginventarisasi aset SPBE (aplikasi dan infrastruktur) 2. Penyusunan SOP perencanaan aset TIK 3. Penyusunan SOP pengadaan aset TIK 4. Penyusunan SOP atas penghapusan aset TIK 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen aset TIK	Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
e.	Manajemen SDM	PermenPANRB 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, *Skills Framework for the Information Age* (SFIA) *Framework*, ISO 30400 tentang *Human Resource Management*, Peta Okupasi TIK	1. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK 2. Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM TIK 3. Evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM TIK	Bagian Organisasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
f.	Manajemen Pengetahuan	*Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*	1. Pembentukan komite manajemen pengetahuan 2. Penyusunan pedoman manajemen pengetahuan (kebijakan dan SOP manajemen pengetahuan) 3. Pelaksanaan manajemen pengetahuan dengan aplikasi 4. Evaluasi dan perbaikan manajemen pengetahuan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
g.	Manajemen Perubahan	*Change Management* (ITIL) COBIT 2019	1. Pembentukan komite manajemen perubahan 2. Penyusunan pedoman / SOP manajemen perubahan SPBE 3. Penyusunan form log manajemen perubahan 4. Pelaksanaan manajemen perubahan SPBE 5. Evaluasi dan perbaikan manajemen perubahan	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Organisasi
h.	Manajemen Layanan	*Information Technology Infrastructure Library* (ITIL)	1. Pembentukan tim helpdesk TIK 2. Pengembangan aplikasi ticketing layanan TIK 3. Evaluasi dan perbaikan kinerja tim helpdesk	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Lingkup	Referensi	Kegiatan (Disesuaikan dengan Kegiatan Peta Rencana)	Penanggung Jawab
			TIK	

1.3.1. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko SPBE merupakan sebuah langkah strategis dalam rangka membangun pondasi kebijakan manajemen SPBE yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan manajemen risiko SPBE pada instansi pemerintah. Manajemen risiko SPBE mengidentifikasi, memahami, mengukur, mengelola, dan memantau risiko yang dihadapi dalam implementasi SPBE. Selain itu, dalam manajemen risiko juga dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, menilai tingkat risiko, mencari cara untuk mengurangi risiko, serta mengawasi risiko secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai, serta agar proses dan pengukuran dalam Manajemen Risiko SPBE dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan tata kelola Manajemen Risiko SPBE yang mengatur tugas dan tanggung jawab dari struktur Manajememen Risiko SPBE.

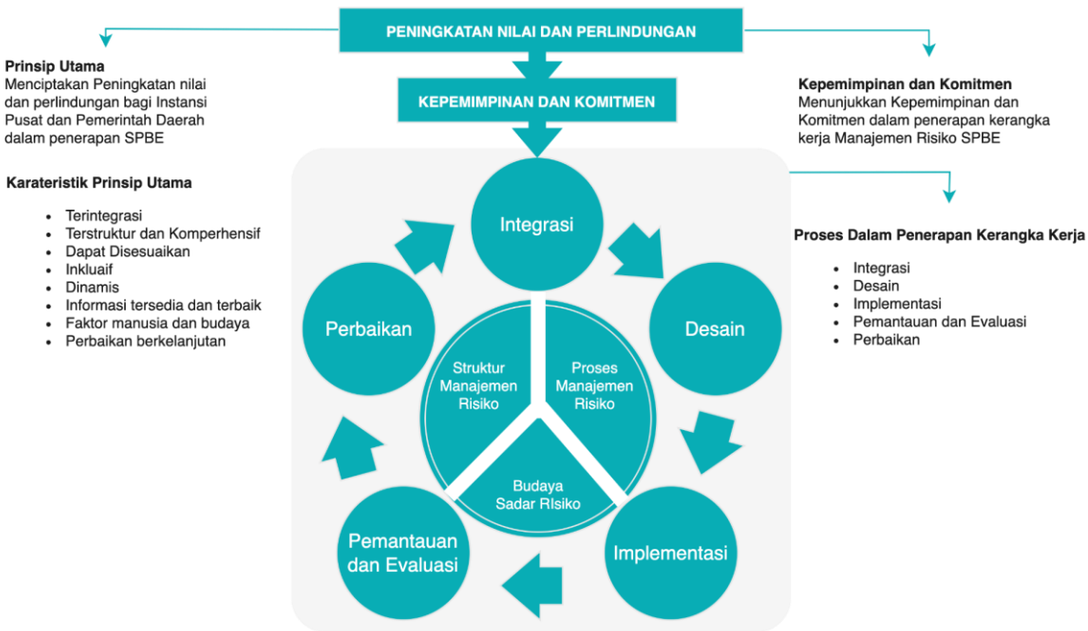

Gambar 1.3.1.1. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen risiko saat ini telah menjadi rujukan utama dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini bisa berupa upaya dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko terkait SPBE secara terus-menerus dalam tingkat toleransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Mengacu pada Permen PAN RB 05/2020 tentang pedoman Manajemen Risiko SPBE, tujuan dari Manajemen Risiko SPBE adalah :

1. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.
2. Memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan melalui penyajian informasi Risiko SPBE yang memadai di Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.

3. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE di Instansi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.
4. Meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE.
5. Menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE.

Manfaat dari penerapan Manajemen Risiko SPBE dalam penerapan SPBE adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE di Instansi Pemerintah Daerah.
2. Mewujudkan penerapan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Daerah.
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan di Instansi Pemerintah Daerah.
4. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan kepada Pemerintah Daerah.
5. Mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas di Pemerintah Daerah.

Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu menyusun struktur manajemen risiko SPBE sebagaimana yang telah tertuang dalam PermenpanRB No. 05/2020 dan dijelaskan sebagai berikut :

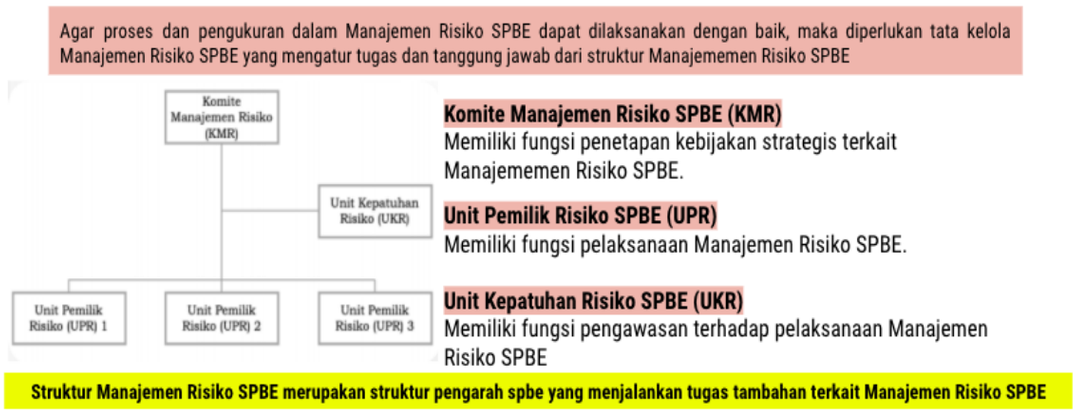

Gambar 1.3.1.2. Pedoman Struktur Manajemen Risiko SPBE Daerah

Mengacu pada gambar di atas maka susunan untuk struktur manajemen risiko SPBE di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dijelaskan sebagai berikut :

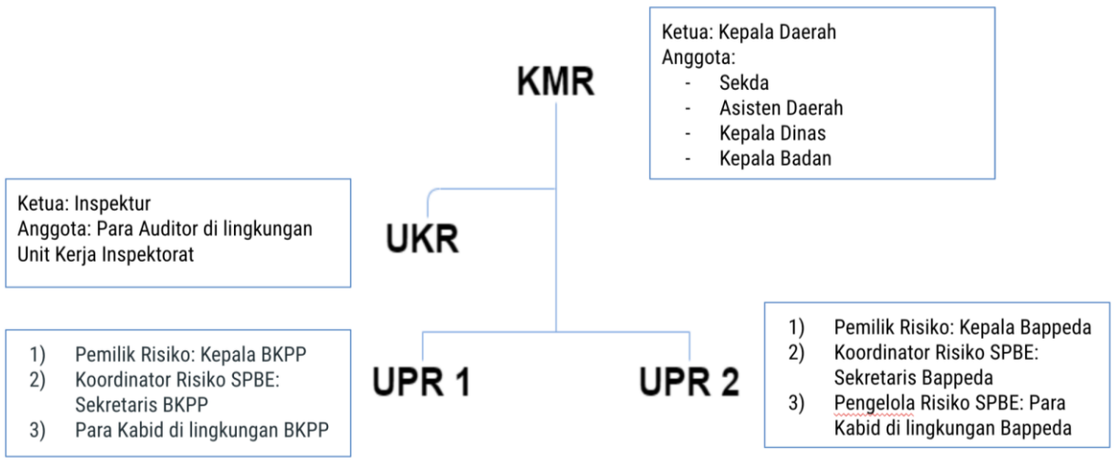

Gambar 1.3.1.3. Struktur Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Merujuk pada *best practices* yang ada dalam PermenpanRB 05/2020 terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya menjalankan manajemen risiko SPBE yang dijelaskan sebagai berikut :

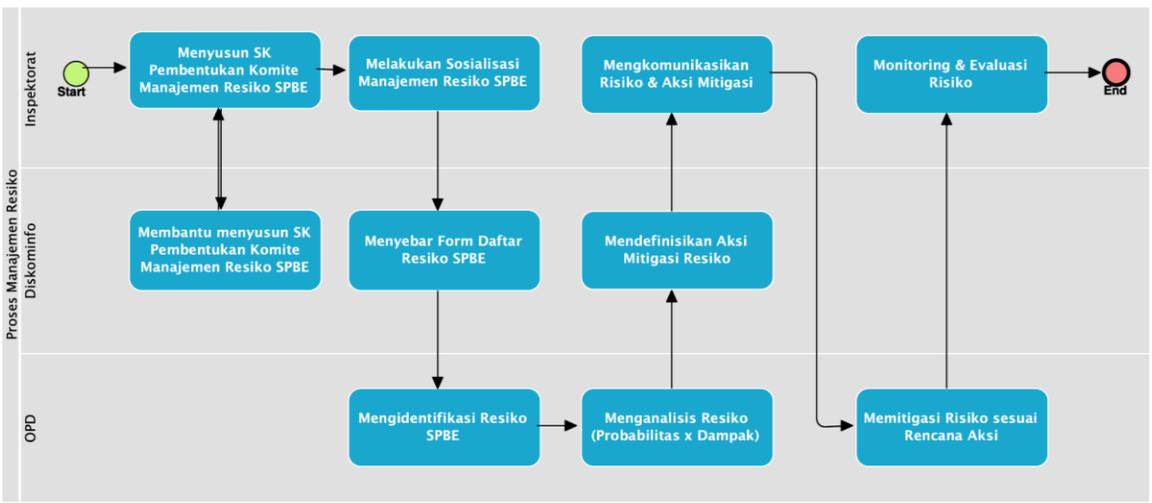

Gambar 1.3.1.4. Alur Proses Manajemen Risiko SPBE

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun SOP dan dokumen terkait manajemen risiko dengan lingkup sebagai berikut :

SOP Manajemen Risiko SPBE oleh setiap perangkat daerah; dan

1. Kajian Manajemen Risiko.

1.3.2. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi merupakan kegiatan pengelolaan yang menyediakan pelindungan keamanan informasi pada SPBE. Manajemen keamanan informasi termasuk dalam identifikasi, penetapan, implementasi, dan pemeliharaan kontrol dan prosedur keamanan yang menyediakan perlindungan terhadap penggunaan, distribusi, dan perlindungan informasi yang

tersimpan dalam SPBE. Secara umum, ruang lingkup dalam manajemen keamanan informasi meliputi: data/informasi SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan jaringan SPBE di setiap instansi pemerintah.

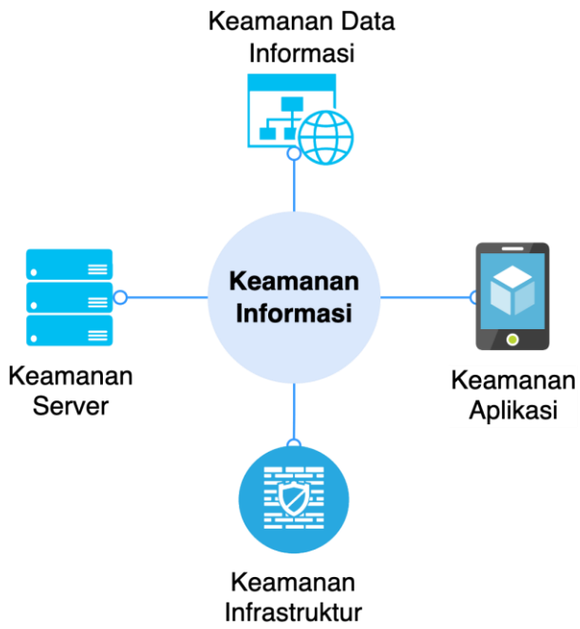

Gambar 1.3.2.1. Domain Keamanan Informasi

Secara umum terdapat empat domain keamanan SPBE yaitu :

1. Keamanan Data/Informasi

   Keamanan data atau informasi adalah proses memastikan bahwa data atau informasi yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan melalui sistem informasi dapat diakses, dirahasiakan, dan digunakan hanya oleh orang-orang yang berwenang. Tujuannya adalah untuk melindungi data atau informasi dari ancaman keamanan seperti kebocoran, peningkatan, pencurian, dan sabotase. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara termasuk penyimpanan data, enkripsi data dan akses yang diatur.

2. Keamanan Aplikasi

   Seperangkat prinsip, standar, prosedur, dan operasi yang digunakan untuk melindungi data dan informasi pada aplikasi dari ancaman keamanan. Kontrol keamanan aplikasi bertujuan untuk mencegah atau mereduksi risiko. Secara umum, kontrol keamanan aplikasi, meliputi: enkripsi data, *authentication*, *authorization*, *access control*, *logging* & *monitoring*, *and code review* dan *testing.*

3. Keamanan Jaringan

   Suatu proses yang dimaksudkan untuk melindungi jaringan komputer dari serangan yang berbahaya dengan mengatur akses ke sistem informasi dan jaringan komputer. Secara umum, *software* keamanan jaringan digunakan untuk melakukan autentikasi *user* dan pengguna yang akan mengakses jaringan melalui sistem enkripsi.

4. Keamanan Infrastruktur

   Keamanan infrastruktur mengacu pada *best practices* COBIT 2019. Berikut aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dalam manajemen keamanan informasi yaitu:

a. Menentukan ruang lingkup dan batas-batas manajemen keamanan informasi dalam hal karakteristik organisasi, lokasi, aset dan teknologi.
b. Menetapkan manajemen keamanan informasi sesuai dengan kebijakan instansi dan konteks dimana instansi beroperasi.
c. Menyelaraskan manajemen keamanan informasi dengan pendekatan organisasional secara keseluruhan pada manajemen keamanan.
d. Mendapatkan otorisasi dari pejabat struktural untuk menerapkan dan mengoperasikan atau mengubah manajemen keamanan informasi.
e. Mempersiapkan dan memelihara pernyataan penerapan yang menggambarkan ruang lingkup manajemen keamanan informasi.
f. Menetapkan serta mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi.
g. Mengkomunikasikan pendekatan manajemen keamanan informasi.

1.3.2.1. Urgensi Keamanan

Gambar 1.3.2.1.1. Manajemen Keamanan Informasi

Setiap instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah diwajibkan menyelenggarakan SPBE. Transformasi digital pada setiap layanan menjadi salah satu bentuk penerapan SPBE oleh pemerintah. Namun demikian, penyelenggaraan SPBE tidak terlepas dari berbagai tantangan baru salah satunya pada keamanan informasi. Beberapa masalah yang muncul dalam keamanan informasi antara lain: tingginya risiko penyerangan siber dan minimnya penerapan keamanan SPBE yang didasari pada rendahnya kemampuan SDM pemerintah dalam menangani keamanan informasi SPBE. Berdasarkan kondisi yang ada, BSSN menyusun strategi dan menetapkan kebijakan manajemen serta standar teknis terkait keamanan SPBE agar dapat menjadi panduan dan acuan instansi pemerintah dalam mengimplementasikan keamanan SPBE. Dengan adanya kebijakan manajemen keamanan SPBE menjadikan teknologi yang digunakan lebih aman serta selaras dengan proses bisnis sesuai dengan persyaratan tugas pekerjaan.

1.3.2.2. Manajemen Keamanan SPBE

Mengacu dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat pedoman dalam melakukan manajemen keamanan informasi SPBE. Manajemen keamanan informasi SPBE dilakukan oleh instansi pusat dan daerah. Adapun proses manajemen keamanan informasi meliputi:

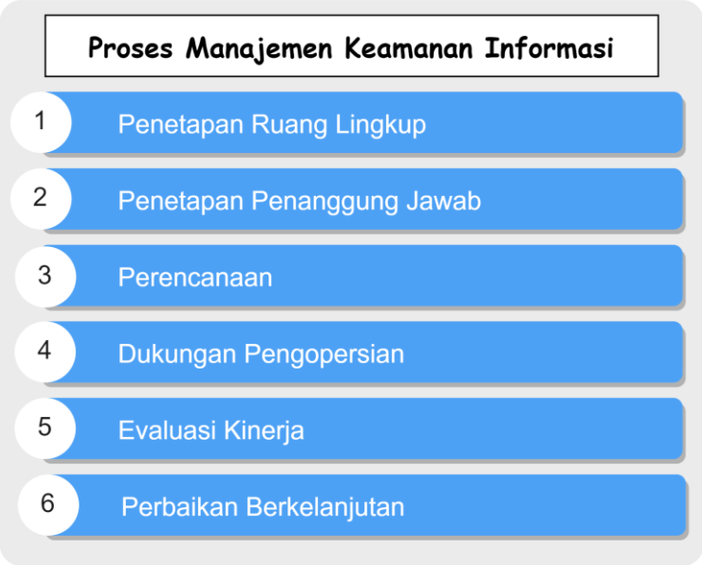

Gambar 1.3.2.2.1. Proses Manajemen Keamanan Informasi

1. Penetapan ruang lingkup

   Penetapan ruang lingkup manajemen keamanan SPBE dilakukan oleh setiap pimpinan instansi pusat atau Kepala Daerah. Dalam menetapkan ruang lingkup keamanan *cyber* dapat dilakukan berdasarkan 2 hal yaitu isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi dan isu eksternal keamanan informasi SPBE. Isu internal keamanan informasi SPBE adalah area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE. Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE setidaknya meliputi:

   - Data dan informasi SPBE;
   - Aplikasi SPBE;
   - Aset Infrastruktur SPBE; dan
   - Kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki.

   Sedangkan isu eksternal menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penetapan penanggung jawab

   Penetapan penanggung jawab pada manajemen keamanan SPBE dilakukan oleh kepala daerah. Penanggung jawab Kelompok Kerja Manajemen Keamanan Informasi dalam Tim Koordinasi SPBE adalah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya, Kelompok Kerja Manajemen keamanan informasi akan menetapkan pelaksana teknis keamanan SPBE yang terdiri dari:

   a. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan Informasi ~~TIK~~; dan

b. Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.

3. Perencanaan

Perencanaan dalam manajemen keamanan SPBE dilakukan oleh pelaksana teknis keamanan SPBE. Tahap perencanaan terdiri dari dua bagian yaitu program kerja keamanan SPBE dan target realisasi program kerja keamanan SPBE. Adapun program kerja yang dilakukan meliputi:

a. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

CONTOH

Gambar 1.3.2.2.2. Contoh Sosialisasi dan Pelatihan

Gambar 1.3.2.2.2. merupakan salah satu contoh dari sosialisasi atau *spread awareness* yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai bentuk dari manajemen keamanan informasi melalui berbagai kegiatan seperti: informasi tips menghindari serangan *man in the middle attack* di *wifi public* dan tips menghindari penipuan atau *scam (phising)* melalui sosial media.

b. Pengukuran Nilai Kerentanan Keamanan SPBE

Adapun tahapan pengukuran nilai kerentanan keamanan SPBE dapat dilakukan dengan cara:

- Menginventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur;
- Mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE; dan
- Mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.

c. Peningkatan Keamanan SPBE

Adapun upaya dalam peningkatan keamanan SPBE dapat dilakukan dengan cara:

- Menerapkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE; dan

- Menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen keamanan informasi dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Akses Ruang Pusat Data.
2. SOP *Backup* dan *Restore Data*.
3. SOP Hak Akses TIK.
4. SOP Penanganan Gangguan TIK.
5. SOP Pengajuan Jaringan Baru.
6. SOP Pengembangan Sistem Informasi.
7. SOP Penitipan dan Pengembalian pusat data.
8. SOP Evaluasi Keamanan SPBE.

d. Penanganan Insiden Keamanan SPBE

1. Mengidentifikasi sumber serangan;
2. Menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
3. Memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
4. Mendokumentasi bukti insiden yang terjadi; dan
5. Memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE.

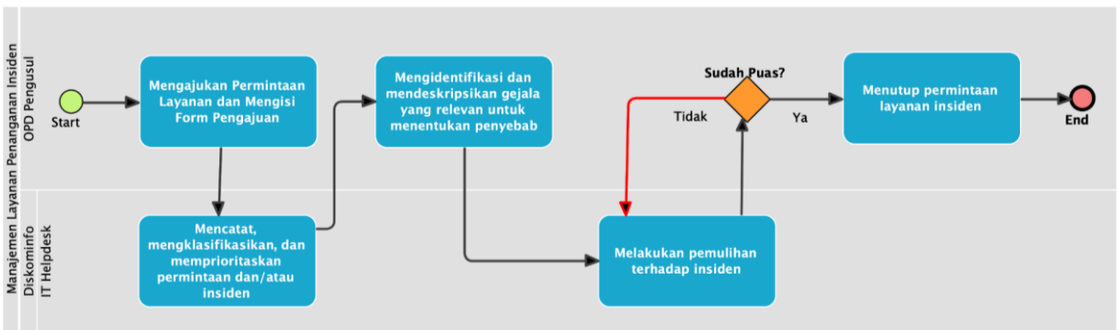

Gambar 1.3.2.2.3. Alur Proses Penanganan Insiden SPBE

e. Audit Keamanan SPBE.

Audit keamanan SPBE perlu dilakukan 2 tahun sekali sesuai dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara nomor 4 tahun 2021 tentang manajemen keamanan informasi, sedangkan untuk target realisasi program kerja ditetapkan oleh masing-masing instansi.

4. Dukungan Pengoperasian

Dukungan pengoperasian dalam kelompok kerja manajemen keamanan informasi harus menyediakan SDM yang berkompeten dan anggaran keamanan SPBE. Kelompok kerja manajemen keamanan informasi harus menyediakan SDM keamanan SPBE yang memiliki kompetensi dalam bidang infrastruktur TIK dan juga keamanan aplikasi. Diperlukan pelatihan atau bimtek untuk SDM yang belum kompeten. Selain itu, anggaran keamanan SPBE yang akan disediakan harus didasarkan pada perencanaan yang telah disusun.

5. Evaluasi Kinerja

Evaluasi dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun oleh kelompok kerja manajemen keamanan informasi. Evaluasi kinerja keamanan SPBE dapat mencakup hal-hal berikut ini:

a. mengidentifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan keamanan SPBE;
b. menetapkan indikator kinerja pada setiap area proses;
c. memformulasi pelaksanaan keamanan SPBE dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
d. menganalisis efektifitas pelaksanaan keamanan SPBE; dan
e. mendukung dan merealisasikan program audit keamanan SPBE.

6. Perbaikan Berkelanjutan

Perbaikan berkelanjutan dilakukan oleh pelaksana teknis keamanan SPBE. Perbaikan berkelanjutan merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja. Perbaikan berkelanjutan mencakup:

a. Solusi permasalahan dalam pelaksanaan keamanan SPBE; dan
b. Perbaikan pelaksanaan keamanan SPBE secara periodik.

Setiap instansi pemerintahan baik Instansi Pusat maupun Instansi Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan SPBE termasuk didalamnya dalam hal keamanan informasi. Dalam penerapannya, keamanan SPBE juga harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang diatur melalui Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

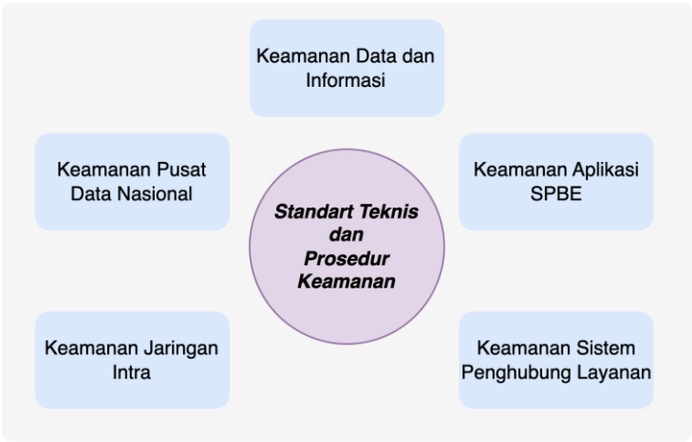

Gambar 1.3.2.2.4. Standar Teknis dan prosedur keamanan

1.3.3. Manajemen Data

Manajemen data merupakan serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Manajemen data SPBE memungkinkan pemerintah untuk menyimpan, menganalisis, dan memanfaatkan data sehingga memudahkan pemerintah untuk mengakses dan mengelola data secara efektif, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Manajemen data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Adapun sasaran manajemen data SPBE bagi instansi pusat maupun pemerintah daerah yaitu :

1. memahami kebutuhan data;
2. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas data;
3. meningkatkan kualitas data secara terus menerus; dan
4. memaksimalkan penggunaan data dan memberikan hasil yang efektif.

Tujuan Satu Data Indonesia untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian manajemen data SPBE. Secara umum, penyelenggaraan Satu Data Indonesia merupakan bagian dari penyelenggaraan manajemen data SPBE. Hal tersebut tertuang dalam Permen PPN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Pusat.

Menurut Permen PPN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Pusat, terdapat empat komponen utama yang harus dilakukan dalam melakukan manajemen data khususnya manajemen data SPBE. Komponen tersebut adalah manajemen arsitektur data, manajemen data induk dan data referensi, manajemen basis data, dan manajemen kualitas data.

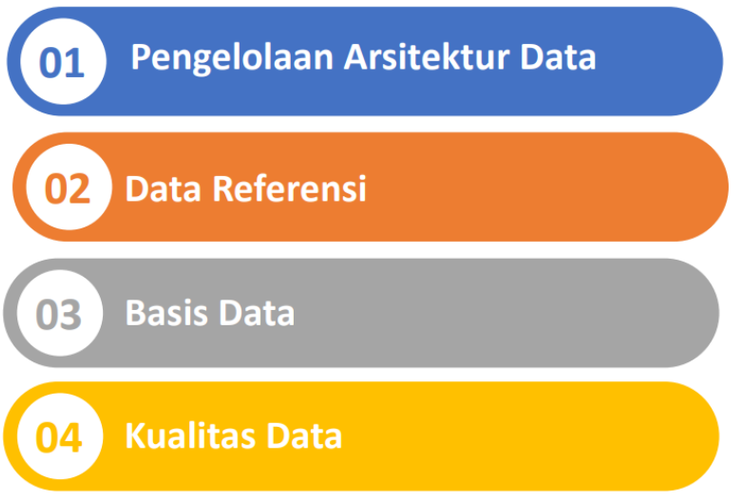

Gambar 1.3.3.1. Manajemen Basis Data

1. Manajemen Arsitektur Data

Arsitektur data didefinisikan sebagai model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE. Sedangkan, manajemen arsitektur data merupakan rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen arsitektur data. Manajemen arsitektur data memungkinkan pemerintah untuk membangun dan mengelola data untuk mengakses informasi, serta mengintegrasikan data dan informasi antar aplikasi yang diperlukan untuk menyediakan layanan yang bermanfaat bagi warga. Selain itu, manajemen arsitektur data juga bermanfaat dalam mengelola pemeliharaan dan peningkatan serta keamanan data.

Arsitektur data sangat penting untuk manajemen data. Data pemerintahan perlu direpresentasikan pada tingkat abstraksi yang berbeda sehingga mudah dipahami dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Artefak Arsitektur Data mencakup spesifikasi yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang ada, menentukan persyaratan data, memandu integrasi data, dan mengontrol aset data seperti yang dituangkan dalam strategi data. Arsitektur Data organisasi dijelaskan melalui kumpulan dokumen desain induk yang terintegrasi pada

berbagai tingkat abstraksi, termasuk standar yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diatur, digunakan, dan dihapus. Arsitektur data juga diklasifikasikan berdasarkan deskripsi semua wadah dan jalur yang diambil data melalui sistem Pemerintah Daerah.

Manajemen arsitektur data terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi data (format dan struktur baku untuk data induk dan referensi) dan ketentuan data (tata perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan spesifikasi data). Tujuan manajemen arsitektur data untuk menyediakan data berkualitas tinggi, mengidentifikasi, merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data. Kegiatan manajemen arsitektur data meliputi penyusunan dan penetapan, penyebarluasan, dan reviu.

2. Manajemen Data Referensi

Data referensi merupakan komponen yang mendeskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain. Lebih jauh, manajemen data referensi didefinisikan sebagai rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data referensi. Manajemen data referensi SPBE memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi yang relevan, memperbarui informasi yang ada, dan berbagi informasi secara efisien. Data referensi SPBE juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan operasional pemerintahan. Data referensi dapat mencakup hal-hal seperti undang-undang, peraturan, program pemerintah, dan lain sebagainya.

Tujuan manajemen data dari data referensi adalah menyediakan data yang sesuai struktur dan format baku, dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan, serta menghindari duplikasi. Kegiatan dalam manajemen data referensi, meliputi: perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pembaruan data.

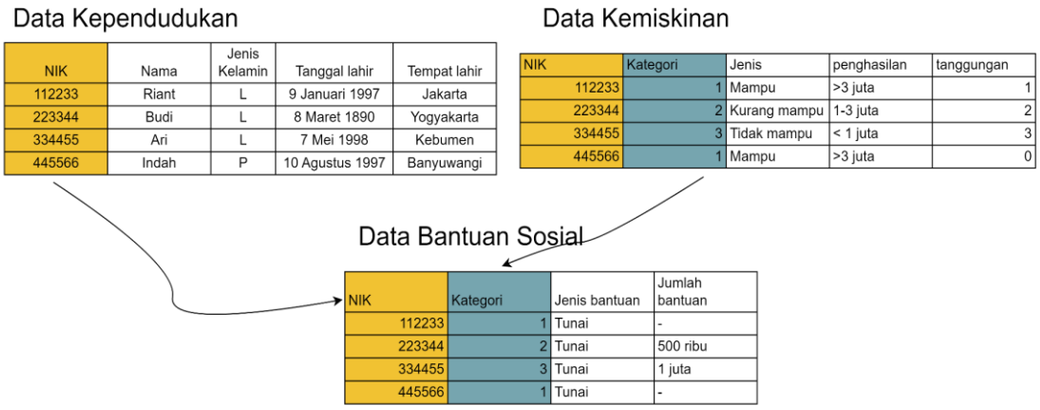

Gambar 1.3.3.2. Ilustrasi Manajemen Data

Gambar di atas merupakan contoh dari data bantuan sosial. Data bantuan sosial diperoleh dari data kependudukan dan data kemiskinan. Data kependudukan dan data kemiskinan merupakan data referensi yang diambil oleh data bantuan sosial. Data kependudukan untuk mengetahui data diri penerima bantuan sosial dan data kemiskinan untuk mengetahui kategori dan penghasilan penerima bantuan sosial. Adapun beberapa Kegiatan manajemen data yaitu :

1. Memenuhi persyaratan data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Beberapa area dalam Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memerlukan akses ke kumpulan data yang sama, dengan keyakinan bahwa kumpulan data tersebut lengkap, terkini, dan konsisten. Data induk sering menjadi dasar kumpulan data (misalnya, menentukan apakah suatu analisis mencakup semua perangkat daerah bergantung pada penerapan definisi perangkat daerah secara konsisten).
2. Mengelola kualitas data: inkonsistensi data, masalah kualitas, dan kesenjangan, menyebabkan keputusan yang salah atau kehilangan peluang, Manajemen data induk mengurangi risiko kurangnya kualitas data dengan mengaktifkan representasi yang konsisten dari entitas penting di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
3. Mengelola biaya integrasi: Biaya integrasi sumber data baru ke dalam lingkungan yang sudah kompleks menjadi lebih tinggi tanpa adanya data induk. Hal ini mengurangi variasi dalam menentukan dan mengidentifikasi entitas penting.
4. Mengurangi risiko: data induk dapat memungkinkan penyederhanaan arsitektur berbagi data untuk mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan lingkungan yang kompleks.

3. Manajemen Basis Data

Manajemen basis data didefinisikan sebagai proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat data nasional. Manajemen basis data SPBE merupakan sebuah cara untuk mengelola dan menyimpan data yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem informasi pemerintahan. Hal ini termasuk membangun dan mengatur struktur data, membuat kebijakan dan prosedur untuk memastikan data tersedia untuk pembuatan keputusan, mengatur hak akses pengguna, dan memantau kinerja sistem.

Tujuan manajemen basis data adalah menjamin penyimpanan data yang akurat, mutakhir dapat dibagi pakaikan, menjamin ketersediaan akses data yang terus menerus, dan menjaga keamanan data. Kegiatannya meliputi mendefinisikan kebutuhan walidata dan produsen data untuk

basis data, mengelola basis data di Pusat Data Nasional serta menyebarluaskan basis data melalui portal SDI. Ketentuan penyimpanan data diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

4. Manajemen Kualitas Data

Manajemen kualitas data didefinisikan sebagai proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Manajemen kualitas data SPBE merupakan sebuah proses untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan kualitas data yang diterima oleh sistem, termasuk dalam hal ini penilaian data, memeriksa konsistensi data, mengevaluasi standar data, memverifikasi integritas data, melacak dan menganalisis masalah kualitas data, dan mengidentifikasi tren kualitas data. Selain itu, proses manajemen kualitas data termasuk dalam mengidentifikasi sumber data dan memahami kontribusi yang diberikan oleh sumber data tersebut.

Tujuan dari manajemen kualitas data adalah untuk menjamin bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data memenuhi prinsip SDI dan diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data. Kegiatan manajemen kualitas data meliputi pengembangan dan promosi kesadaran kualitas, menentukan persyaratan kualitas data, menetapkan profil, menganalisis, dan menilai kualitas data serta menentukan matriks kualitas data.

Kualitas data dapat dideskripsikan menjadi 6 bagian yaitu :

- Kelengkapan : Proporsi data yang disimpan terhadap potensi 100%.
- Keunikan : Tidak ada instance entitas (benda) yang akan direkam lebih dari satu kali berdasarkan bagaimana benda tersebut diidentifikasi.
- Ketepatan Waktu : Sejauh mana data mewakili kenyataan dari titik waktu yang diperlukan.
- Validitas : Data valid jika sesuai dengan sintaks (*format, type, range*) definisinya.
- Akurasi : Sejauh mana data dengan benar menggambarkan objek atau peristiwa "dunia nyata" yang dijelaskan.
- Konsistensi : Tidak adanya perbedaan, ketika membandingkan dua atau lebih representasi dari suatu hal terhadap definisi.

Mengacu pada Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam Penerapan Manajemen Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu menyusun struktur forum satu data seperti berikut :

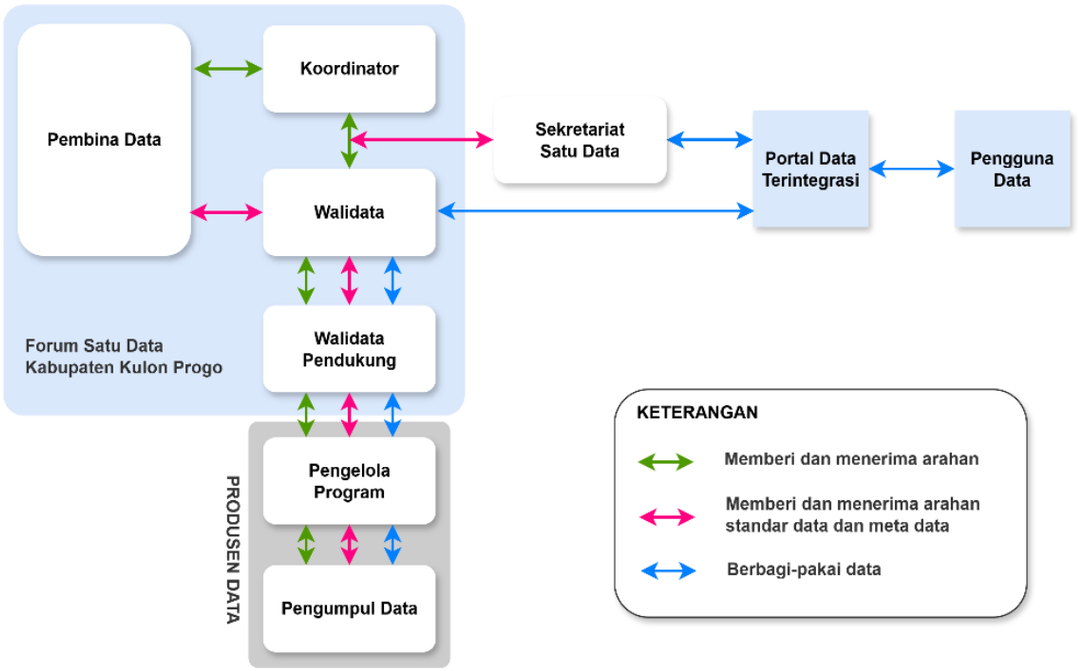

Gambar 1.3.3.3. Kelembagaan Forum Satu Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Penugasan:

Koordinator	Sekretaris Daerah
Pembina Data	Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Walidata	Dinas Komunikasi dan Informatika
Walidata Pendukung	Unsur perangkat daerah/instansi
Produsen Data	Unsur perangkat daerah/instansi

Tugas Pembina Data:

1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
2. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Wali Data Tingkat Kabupaten:

1. bertanggung jawab dalam pengelolaan simpul jaringan;
2. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial (IG);
3. bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan IG;
4. mengoordinasikan simpul jaringan dalam hal penyelenggaraan jaringan IG;
5. bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
6. bertanggung jawab dalam penyebarluasan data dan metadata melalui portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;

7. membantu Pembina Data tingkat Kabupaten dalam membina produsen data tingkat Kabupaten; dan
8. berperan aktif dalam simpul jaringan, Forum Satu Data Pembangunan dan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

Tugas Produsen Data Tingkat Kabupaten:

1. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Kabupaten mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
2. bertanggung jawab dalam pelaksanaan produksi data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
3. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penggunaan DG dan IG *berikut* metadatanya, serta pembaruan DG dan IG;
4. bertanggung jawab dalam penyampaian data *berikut* metadata kepada Walidata tingkat Kabupaten melalui walidata pendukung tingkat Kabupaten di masing-masing perangkat daerah; dan
5. berperan aktif dalam Simpul Jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

Berdasarkan *best practices* di atas, alur pengelolaan implementasi Satu Data Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat dilaksanakan seperti berikut ini :

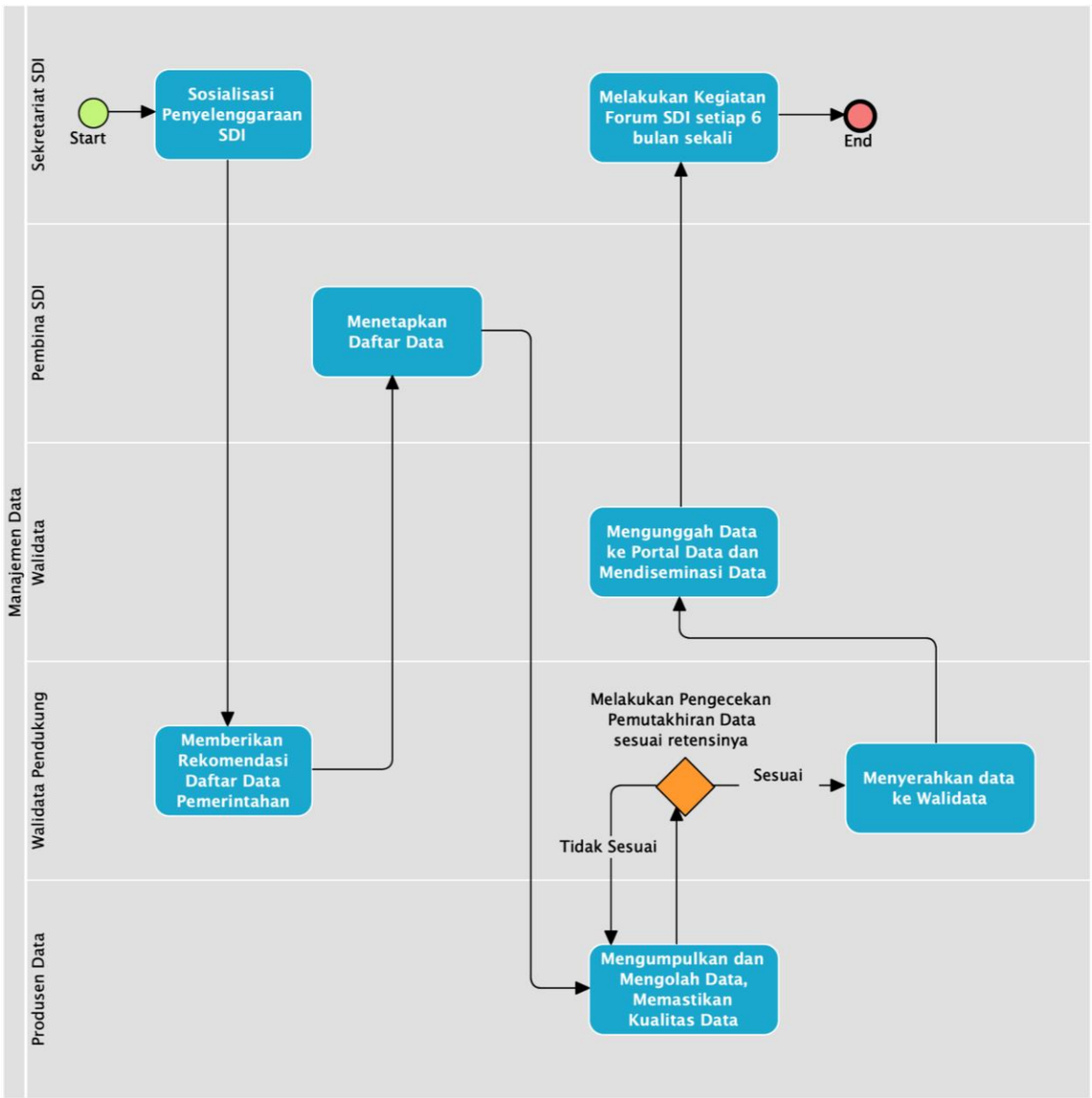

Gambar 1.3.3.4. Alur Koordinasi Satu Data

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen data dengan lingkup sebagai berikut :

1. Arsitektur Data yang berisi kamus data dan kewenangan wali data;
2. SOP Validasi dan verifikasi data sebelum masuk ke data *warehouse;*
3. SOP Pengumpulan data;
4. SOP Penyebarluasan data;
5. SOP Pemanfaatan data;
6. SOP Penentuan walidata dan produsen data; dan
7. SOP Pembuatan dan perubahan kamus data metadata.

1.3.4. Manajemen Aset TIK

Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen aset TIK melibatkan pengelolaan kebutuhan dan kebutuhan yang

berubah, mengurangi biaya keseluruhan, dan memastikan ketersediaan sistem yang dibutuhkan. Manajemen aset TIK yang efektif dapat memastikan bahwa layanan teknologi informasi pemerintah berjalan dengan lancar dan berkinerja tinggi. Contoh kasus dalam mengelola pusat data perlu memastikan perangkat terpelihara, terlindungi dengan baik (tersedia *power supply* saat listrik mati, ditempatkan di ruangan ber AC agar tidak *overheat*) serta melakukan peremajaan terhadap perangkat sesuai dengan *life-time*. Mengacu pada *best practices* dalam *ISO/IEC 19770-5* tentang *IT Asset Management*, berikut aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dalam manajemen Aset TIK :

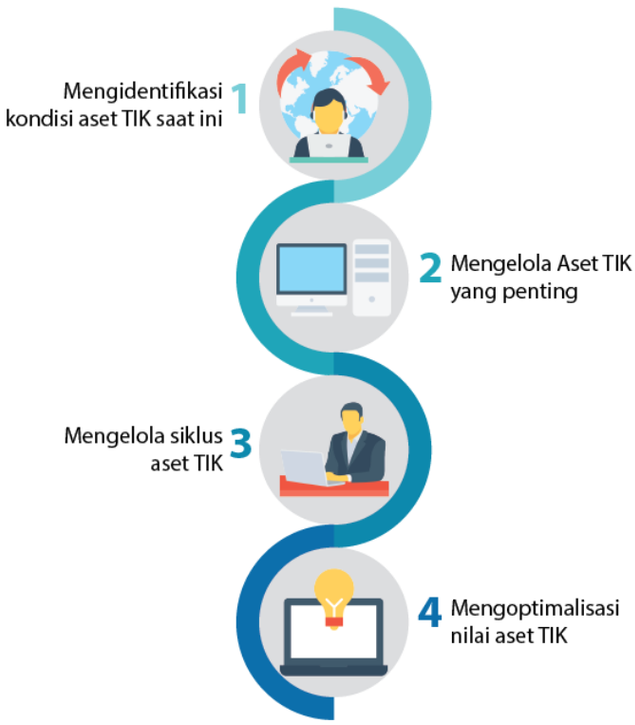

Gambar 1.3.4.1. Manajemen Aset TIK

A. Mengidentifikasi kondisi aset TIK saat ini

Mencatat seluruh aset TIK *(software* dan *hardware*) beserta kondisi dan *lifetime* nya. Selain itu, *software* berbayar perlu dipastikan lisensinya sudah terbayar.

B. Mengelola aset TIK yang penting

Memastikan aset TIK selalu tersedia dan dapat diandalkan untuk dapat digunakan dalam menunjang operasional SPBE.

C. Mengelola siklus aset TIK

Mengelola aset mulai dari pengadaan hingga pembuangan dalam arti ketika sudah habis masa pakainya *lifetime* perlu dilakukan pembaharuan aset. Pastikan aset digunakan seefektif dan seefisien mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi secara fisik sampai akhir *lifetime*.

D. Mengoptimalisasi nilai aset TIK

Meninjau aset serta mengidentifikasi bagaimana cara mengoptimalkan aset sesuai kebutuhan proses bisnis SPBE.

Berdasarkan *best practices* di atas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam alur proses pengelolaan manajemen aset TIK nya dapat merujuk pada gambar berikut ini :

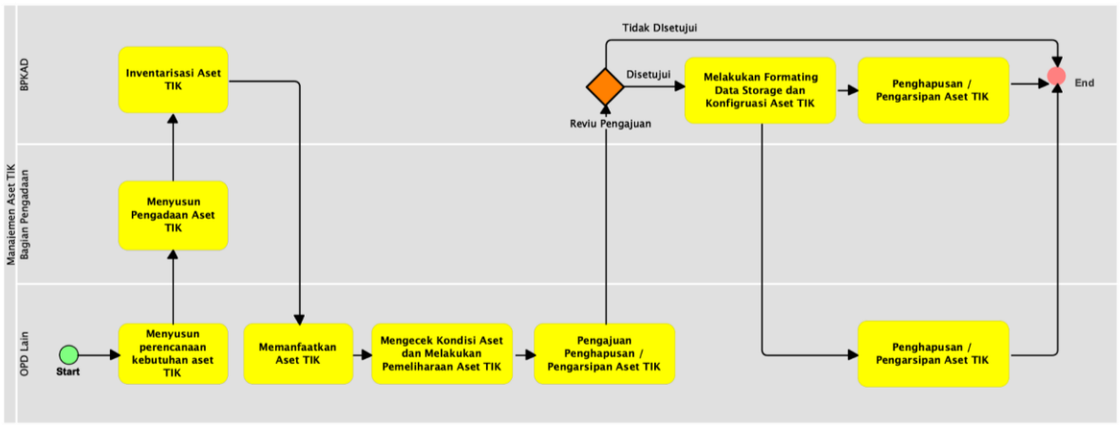

Gambar 1.3.4.2. Alur Pengelolaan Manajemen Aset TIK

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen Aset TIK dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Pembuatan dan Perubahan Pengkodean Aset TIK.
2. SOP Inventarisasi dan konfigurasi Aset TIK.
3. SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Aset TIK.
4. SOP Penghapusan Aset TIK.

1.3.5. Manajemen SDM

Manajemen SDM merupakan serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE. Manajemen SDM membantu mengelola sumber daya manusia, memberikan dukungan teknis, dan memonitor aktivitas. Selain itu, manajemen SDM membantu dalam melacak kemampuan dan kompetensi pegawai, mengatur tugas dan pekerjaan, menganalisis kinerja, mengatur jadwal, meningkatkan efisiensi operasional, memberikan informasi yang akurat tentang kesiapan SDM TIK, memungkinkan manajemen TIK untuk mengambil keputusan yang tepat dan memastikan bahwa semua aspek dari SDM TIK berfungsi dengan baik.

Manajemen SDM perlu dilakukan guna menjamin keberlangsungan peningkatan mutu layanan SPBE dan memastikan ketersediaan kompetensi SPBE. Mengacu pada Permen PANRB 38/2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan beberapa aktivitas berikut ini:

1. Perencanaan Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Promosi dan/atau Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
9. Kelompok Rencana Suksesi *(talent pool)* Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada kondisi ideal setiap perangkat daerah diharapkan memiliki SDM TIK yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi kedinasan masing-masing pegawai. Jenis dan keahlian TIK yang dituntut sangat beragam tergantung posisi dan tugas yang diberikan. Adapun keahlian TIK yang dibutuhkan, meliputi:

1. Kebijakan SPBE: Profesional dalam bidang ini berfokus pada penyusunan kebijakan, dan regulasi terkait penggunaan dan pengembangan SPBE di pemerintahan.
2. Manajemen SPBE: Melibatkan perencanaan strategis, pengembangan kebijakan, pengelolaan anggaran, dan pengawasan keseluruhan aspek SPBE dalam lingkungan pemerintahan.
3. *Enterprise Architect*: Ahli transformasi digital berfokus pada merombak proses administratif dan layanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
4. *Project Manager*: Spesialis pengelolaan proyek TIK bertanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengelola proyek pengembangan atau peningkatan sistem TIK.
5. *System Analyst*: Profesional TIK dengan keahlian dalam menganalisis kebutuhan sistem informasi, merancang solusi berbasis teknologi, dan mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi.
6. *Programmer*: Ahli pengembangan perangkat lunak di pemerintahan bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi perangkat lunak yang mendukung berbagai tugas administratif dan layanan publik.
7. *Network Engineer*: Keahlian dalam merancang, mengelola, dan memelihara infrastruktur jaringan, server, dan sistem penyimpanan yang mendasari operasi teknologi di pemerintahan.
8. *IT Security*: Professional keamanan informasi bekerja untuk melindungi data sensitif dan infrastruktur TIK pemerintahan dari ancaman siber dan pelanggaran keamanan.
9. *Application Support*: Tim dukungan teknis menyediakan bantuan dan solusi teknis bagi pengguna dalam mengatasi masalah perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan.
10. *Data Scientist*: Ahli dalam pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan visualisasi data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data di pemerintahan.

Peningkatan kemampuan SDM TIK dibutuhkan dan disesuaikan dengan tugas dan kewajiban dari personil yang terlibat. Peningkatan kemampuan personel dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan maupun studi tingkat lanjut. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap sistem semakin lama akan semakin ahli pada bidangnya dan akan semakin bermanfaat jika ia tetap pada pekerjaannya. Dalam hal peningkatan SDM TIK, diperlukan bentuk penghargaan yang berbeda sehingga perlu adanya tenaga ahli TIK di masing-masing perangkat daerah yang bertugas mengelola TIK.

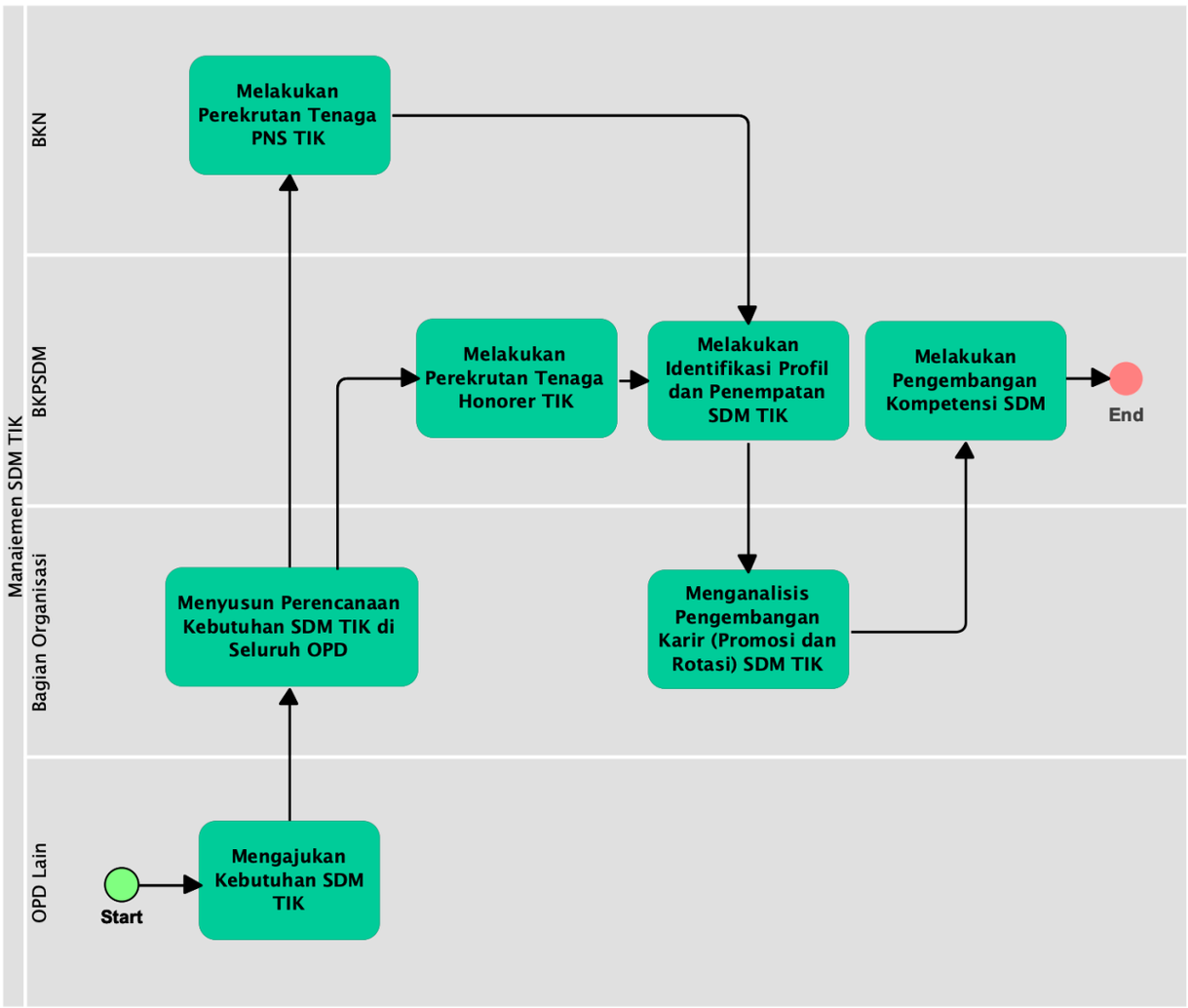

Gambar 1.3.5.1. Alur Prosedur Manajemen SDM

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen SDM dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Permintaan Kebutuhan SDM TIK Perangkat Daerah.
2. SOP Pengadaan dan Pengelolaan SDM TIK non ASN.
3. SOP Permintaan Kebutuhan Training, Sertifikasi dan Peningkatan Kompetensi SDM TIK.

1.3.6. Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Aktivitas dalam manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual instansi pemerintah daerah. Manajemen pengetahuan menjadi penting karena memuat hasil pekerjaan yang berasal dari pengetahuan yang diterapkan, tumbuhnya *knowledge economies*, pengembangan SDM yang profesional, perlunya berbagi pengetahuan lintas bagian dalam organisasi, serta risiko pergantian pegawai terhadap organisasi. Adapun struktur komite manajemen pengetahuan SPBE sebagai berikut.

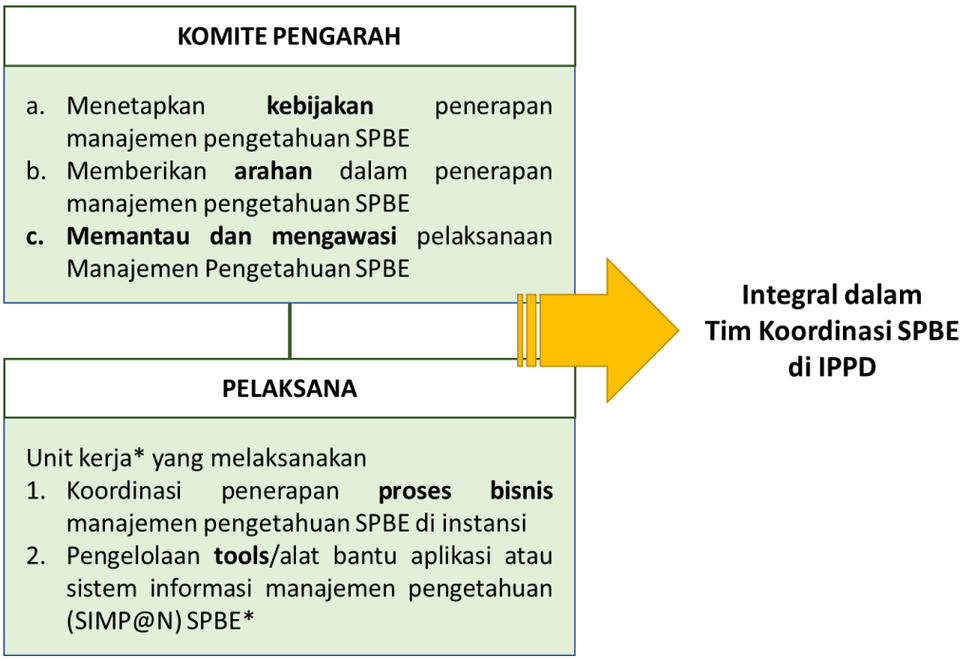

Gambar 1.3.6.1. Struktur Komite Manajemen Pengetahuan

Mekanisme alur proses manajemen pengetahuan SPBE yang perlu ada di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dijelaskan pada gambar berikut ini.

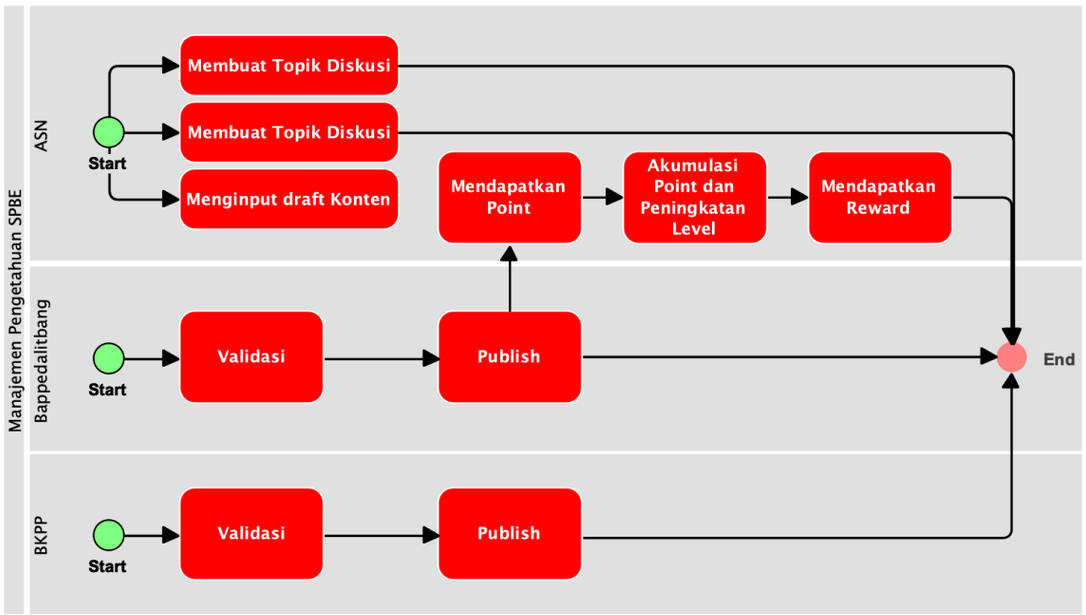

Gambar 1.3.6.2. Alur Proses Manajemen Pengetahuan

Implementasi SPBE perlu melakukan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan manajemen pengetahuan SPBE perlu mempersiapkan serangkaian proses :

1. Mensosialisasikan pentingnya manajemen pengetahuan;
2. Membentuk kelompok kerja implementasi manajemen pengetahuan;
3. Menjabarkan visi dan misi dalam implementasi manajemen pengetahuan melalui sosialisasi secara berkala;
4. Merencanakan *Quick-Win* untuk mengatasi keraguan dan resistensi;

5. Melakukan konsolidasi manfaat yang sudah tercapai, untuk mendapatkan momentum; dan
6. Menerapkan budaya "*sharing* dan *re-use*" sebagai cara bekerja yg efektif dan efisien.

Gambar 1.3.6.3. Manajemen Pengetahuan

Manfaat dari manajemen pengetahuan SPBE sebagai berikut :

1. Mengurangi duplikasi upaya untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau cara kerja.
2. Mengurangi biaya dan waktu operasi layanan SPBE.
3. Meningkatkan kompetensi operator layanan SPBE.
4. Memberdayakan operator, penerima manfaat SPBE, staf TIK dan analis proses bisnis
5. Meningkatkan kualitas layanan SPBE.

Pada manajemen pengetahuan terdapat siklus hidup yang dimulai dari proses identifikasi, pencatatan, pemrosesan, penyimpanan. Adapun siklus manajemen pengetahuan digambarkan sebagai berikut.

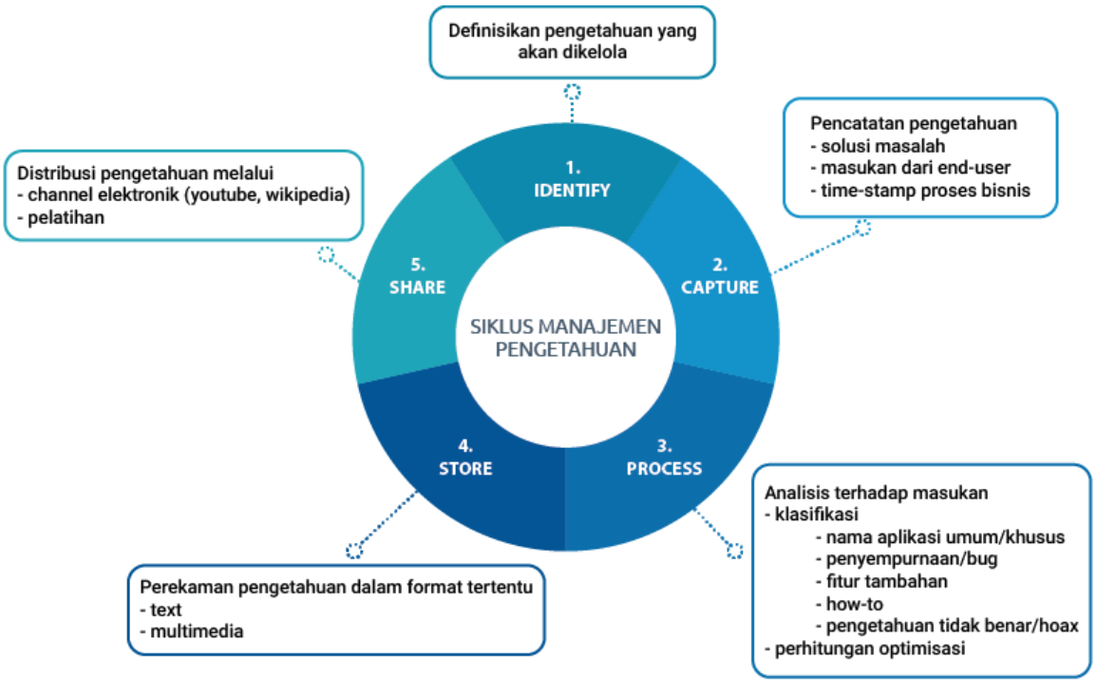

Gambar 1.3.6.4. Siklus Manajemen Pengetahuan

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen pengetahuan dengan lingkup SOP Pencatatan pengalaman & *lesson learned* untuk setiap perangkat daerah.

1.3.7. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan merupakan sebuah pendekatan siklus, dan sistematis pada transisi organisasi, program, dan kegiatan dari keadaan saat ini menuju keadaan masa depan dengan target manfaat perubahan yang diharapkan. Manajemen perubahan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan merespon perubahan yang dihadapi. Selain itu, dalam manajemen perubahan digunakan untuk mengidentifikasi perubahan, mengevaluasi dampak perubahan, mengembangkan dan melaksanakan rencana perubahan, dan memonitoring dan mengevaluasi efektivitas perubahan. Oleh karena itu, dalam manajemen perubahan diperlukan sebuah komite manajemen perubahan yang bertanggung jawab untuk membuat rekomendasi, menentukan strategi, dan menciptakan kebijakan untuk memastikan bahwa perubahan berhasil diimplementasikan dengan sukses. Adapun skema komite manajemen perubahan sebagai berikut.

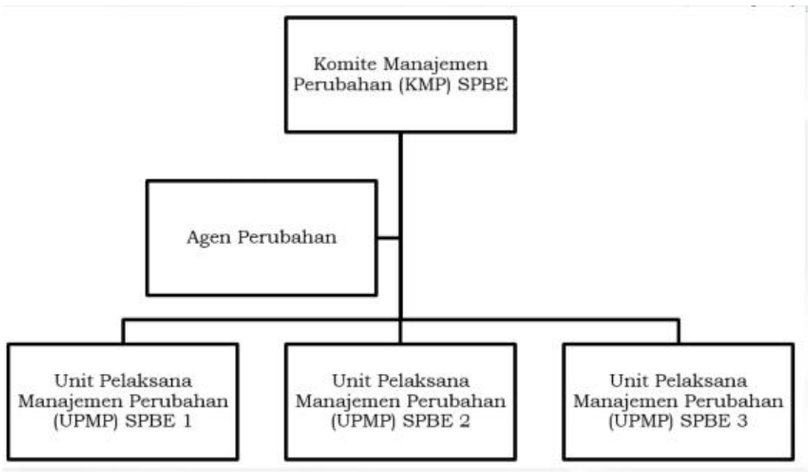

Gambar 1.3.7.1. Komite Manajemen Perubahan SPBE

Setiap perubahan yang terdapat pada visi dan misi/kebijakan/SOTK berimplikasi dengan perubahan pada layanan. Layanan harus mampu mengadopsi perubahan tersebut dengan melakukan manajemen perubahan pada bisnis proses, aplikasi maupun infrastrukturnya. Mekanisme alur perubahan layanan SPBE yang perlu ada di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dijelaskan pada gambar berikut ini:

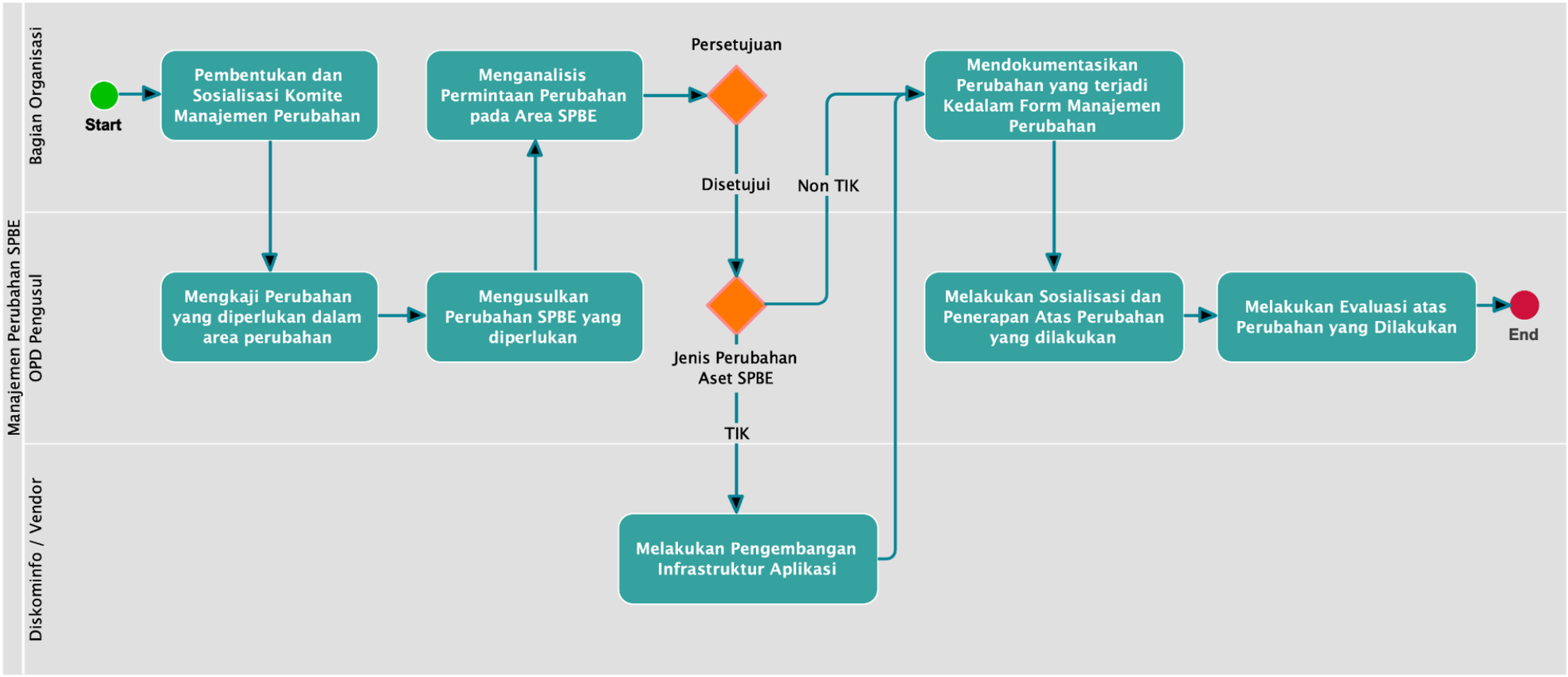

Gambar 1.3.7.2. Alur Proses Manajemen Perubahan SPBE

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen perubahan dengan lingkup SOP Manajemen Perubahan.

1.3.8. Manajemen Layanan

Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas. Manajemen layanan SPBE membantu pemerintah dalam menyediakan layanan yang lebih cepat, tepat, dan efisien kepada masyarakat. Manajemen layanan SPBE memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemantauan, pengujian, dan verifikasi data secara *real-time* sehingga memastikan bahwa layanan yang diberikan tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Standar Teknis Persyaratan Keberlangsungan Layanan :

1. Pelayanan Pengguna meliputi :
    a. Pelayanan Pengguna untuk bantuan proses bisnis aplikasi SPBE yang dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pemilik Proses Bisnis dari Aplikasi SPBE
    b. Pelayanan Pengguna untuk bantuan teknis aplikasi SPBE dilakukan oleh
        i. Menteri
        ii. Instansi Pusat atau Pemerintah daerah sebagai pemilik Proses Bisnis dari aplikasi SPBE
        iii. Pihak ketiga Pengembang aplikasi SPBE
    c. Pelayanan Pengguna untuk bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE disediakan dalam bentuk helpdesk
    d. Helpdesk untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE menyediakan pertanyaan yang sering diajukan (Frequently Asked Questions)
    e. Helpdesk untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait aplikasi SPBE menyediakan berbagai pilihan saluran sesuai dengan persyaratan pengguna.
2. Pelayanan Pengoperasian Aplikasi SPBE :
    a. Pengelolaan Risiko untuk meminimalkan dampak risiko aplikasi SPBE
    b. pendayagunaan sumber daya manusia untuk peningkatan dan pemeliharaan aplikasi SPBE
    c. pengendalian perubahan untuk peningkatan dan pemeliharaan aplikasi SPBE
    d. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan keadaan darurat dari layanan jika sistem aplikasi mengalami masalah atau gangguan
    e. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan pemulihan Aplikasi SPBE dari keadaan darurat
    f. Penyalinan (Backup) data dan aplikasi SPBE dilakukan secara berkala
    g. pelaksanaan audit aplikasi SPBE secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kerangka Kerja Manajemen Layanan SPBE mendeskripsikan kegiatan mendasar melandasi landasan penerapan manajemen Layanan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah

Tujuan dari kerangka kerja manajemen Layanan SPBE adalah untuk membantu instansi pusat dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan manajemen layanan SPBE ke dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah daerah.

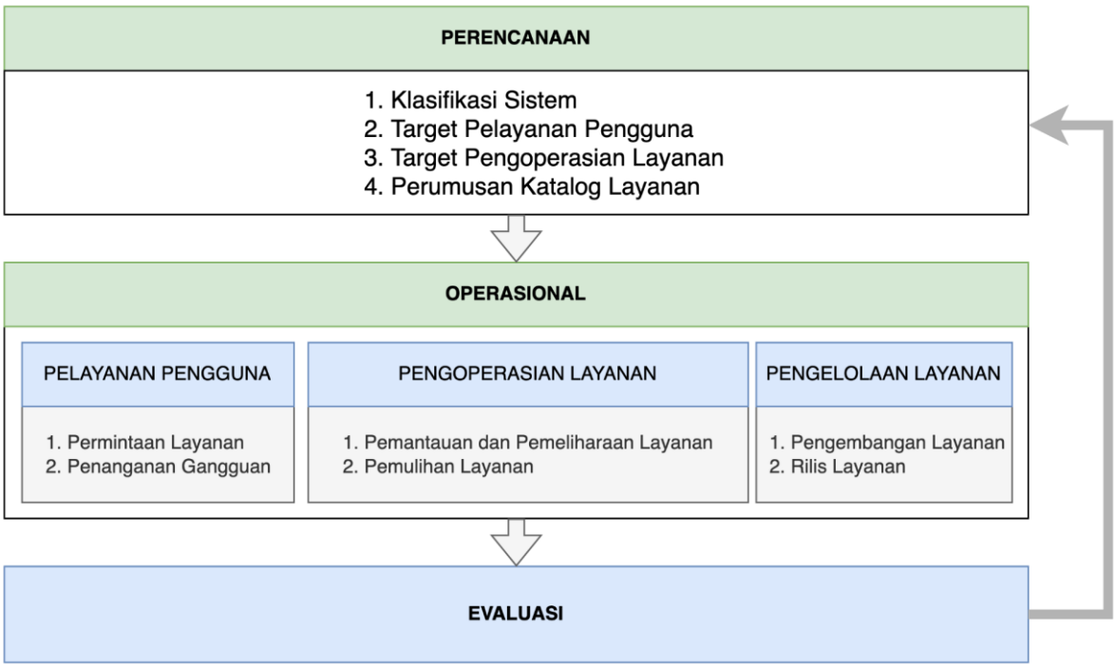

Gambar 1.3.8.1. Kerangka Kerja Manajemen Layanan SPBE

1. Struktur Manajemen Layanan SPBE

   Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE merupakan tanggung jawab bersama antara unit pengelola TIK dan Unit Penyedia Layanan di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Unit Pengelola TIK Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Unit Penyedia Layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Struktur Manajemen Layanan SPBE
Koordinator Layanan	Koordinator Layanan	Penyedia Layanan
Koordinator Pemulihan	Koordinator Pemulihan	Pengelola Layanan
Pengelola Teknis	Pengelola Teknis	Pengelola Teknis

Gambar 1.3.8.2. Struktur Manajemen Layanan SPBE

Proses Manajemen Layanan SPBE

a. Perencanaan

   Bertujuan untuk mengidentifikasi ruang lingkup penerapan Layanan SPBE yang harus dikelola dalam manajemen layanan SPBE. Proses Perencanaan dilakukan oleh koordinator Layanan, berkoordinasi dengan penyedia Layanan

   - Klasifikasi Sistem
   - Target Pelayanan Pengguna
   - Target Operasional Layanan
   - Perumusan Katalog Layanan (Nama Layanan, Deskripsi Layanan, Penyedia Layanan, Pengelola Layanan, Pengelola Teknis, Cara Akses Layanan, Target Ketersediaan

Layanan, Kontak Ketersediaan Layanan, Kontak Permintaan Bantuan, Waktu Pelayanan Bantuan, Target Pemenuhan Layanan, Ketersediaan Layanan)

b. Pelayanan Pengguna
   - Umum
   - Permintaan Layanan
   - Penanganan Gangguan

c. Pengoprasian Layanan
   - Umum
   - Pemantauan dan Pemeliharaan Layanan
   - Pemulihan Layanan

d. Pengelolaan Layanan
   - Umum
   - Pengembalian Layanan
   - Rilis Layanan

e. Evaluasi
   - Umum
   - Laporan Evaluasi

Implementasi SPBE perlu memastikan portofolio layanan SPBE terpelihara dengan baik dengan berbagai cara. Mengacu pada *best practices* yang terdapat dalam pedoman ITIL v.4, terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan seperti:

Gambar 1.3.8.3. Manajemen Layanan

1. Mengelola gangguan dengan menyediakan *platform helpdesk* TIK disertai dengan *ticketing* dan monitoring *Service Level Agreement (SLA).*
2. Melakukan pemeliharaan aplikasi dan infrastruktur TIK secara berkala dan sesuai dengan prioritas risiko.
3. Berpedoman pada metodologi baku seperti ITIL v4 terkait standar manajemen layanan IT.

Berdasarkan *best practices* di atas Diskominfo dapat melakukan pemberian dukungan layanan TI terkait (a.) layanan pengembangan aplikasi dan (b). layanan penanganan insiden yang dijelaskan pada gambar berikut ini :

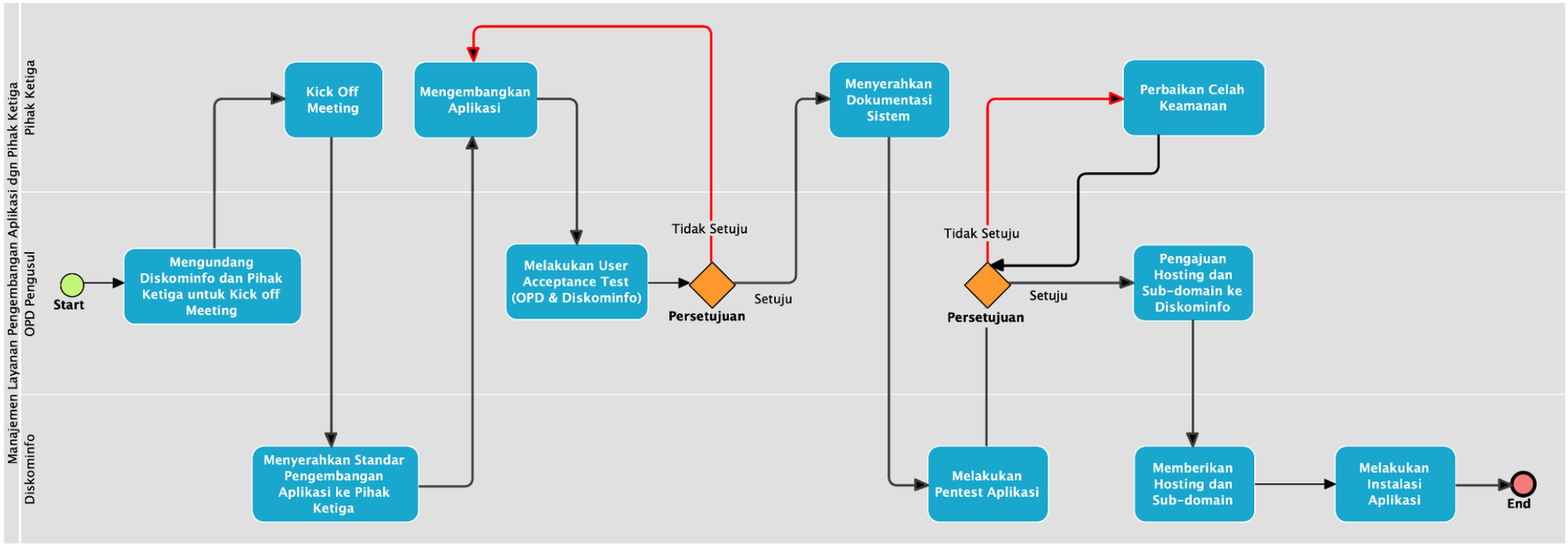

Gambar 1.3.8.2. Layanan Pengembangan Aplikasi

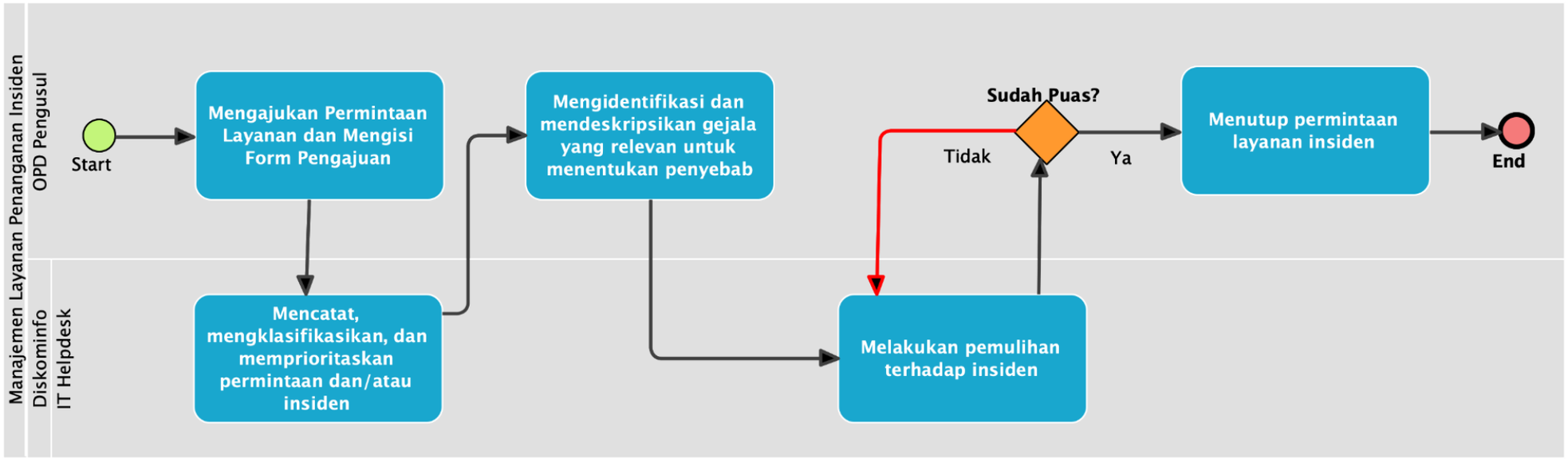

Gambar 1.3.8.3. Layanan Penanganan Insiden

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan/SOP terkait manajemen layanan dengan lingkup SOP Pengajuan layanan (*Helpdesk*) dan SOP Pengembangan Aplikasi dengan pihak ketiga.

1.3.9. Audit TIK

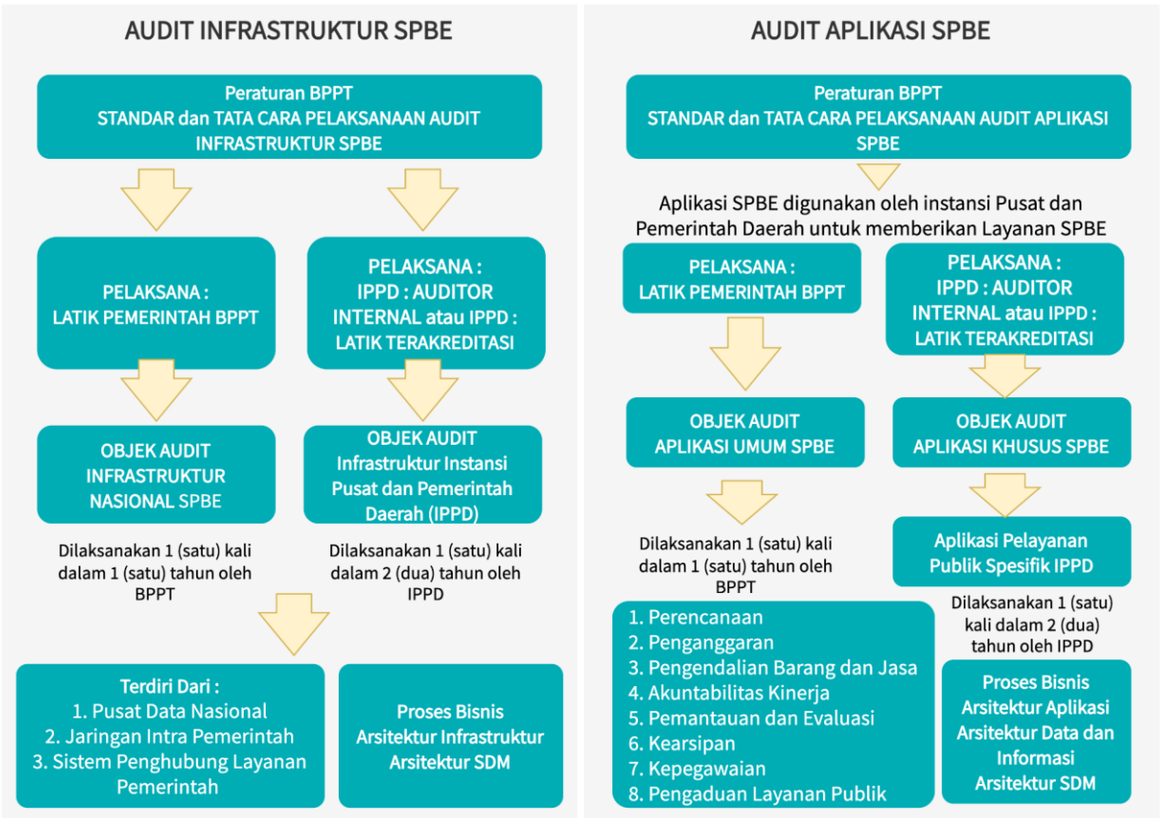

Gambar 1.3.9.1. Lingkup Audit TIK

(sumber: Paparan KemenpanRB)

Audit TIK merupakan evaluasi secara sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor teknologi terhadap aset teknologi dalam rangka memberikan nilai tambah (manfaat) kepada pihak yang diaudit atau pemilik kepentingan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi.
2. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi.
3. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan.
4. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam audit teknologi informasi yaitu:

A. Audit infrastruktur SPBE, merujuk pada Perpres 95/2018 pasal 55 disebutkan:
    1. Infrastruktur SPBE Nasional diaudit setiap tahun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
    2. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diaudit setiap dua tahun oleh lembaga audit TIK tersertifikasi atau terdaftar di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
    3. Koordinasi dengan Kementerian Kominfo.

B. Audit Aplikasi SPBE dilakukan dengan mengaudit aplikasi umum setiap tahun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sedangkan audit aplikasi khusus dilakukan setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK yang berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo.

C. Audit Keamanan Informasi pada infrastruktur SPBE Nasional dan aplikasi umum dilakukan setiap tahun oleh BSSN, sedangkan untuk audit keamanan pada infrastruktur SPBE dan aplikasi khusus di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dilakukan setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK atau perusahaan audit TIK.

    Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Audit TIK dijabarkan sebagai berikut :

    1. Menyusun Rencana Prosedur Audit Teknologi Informasi;
    2. Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi;
    3. Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi;
    4. Melaksanakan Prosedur Audit atas Pengembangan Teknologi Informasi;
    5. Melaksanakan Prosedur Audit atas Operasional Teknologi Informasi;
    6. Melaksanakan Prosedur Audit atas Pemantauan Teknologi Informasi;
    7. Melaksanakan Prosedur Audit atas Aplikasi Teknologi Informasi;
    8. Melaksanakan Prosedur Audit atas Infrastruktur Teknologi Informasi;
    9. Mengawasi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi;
    10. Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi;
    11. Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi;
    12. Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi;
    13. Mengidentifikasi Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi; dan
    14. Memverifikasi Kelayakan Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi.

Bab II Arsitektur Target SPBE

2.1. Arsitektur Proses Bisnis Target

Secara umum, arsitektur proses bisnis menggambarkan kondisi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah sesuai ketugasan dan fungsi berdasarkan dokumen Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

2.1.1. Katalog Proses Bisnis Target

Katalog proses bisnis to-be merupakan kondisi ideal atau target yang ingin dicapai di masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog disusun berdasarkan peta proses bisnis eksisting Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan terdapat kondisi target yang ingin dicapai, dan dimana Level 1,2, dan 3 mengacu pada Referensi Arsitektur Bisnis (RAB) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog proses bisnis to-be Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. **Metadata katalog proses bisnis To Be yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE**, dapat diakses pada link: **https://bit.ly/MetadataSPBEKulonProgo** di sheet Probis.

Tabel 2.1.1.1. Daftar Proses Bisnis yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

ID Proses Bisnis	Status Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	RAB Level 1	RAB Level 2	RAB Level 3	Unit Kerja
KP-DAB 04.02.05.02	Metadata Upgrade (to-be)	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KP-DAB 04.02.06.04	Metadata Upgrade (to-be)	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAB 05.01.02.01	Metadata Upgrade (to-be)	Fasilitasi Hukum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.01 HUKUM	RAB.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Bagian Hukum

KP-DAB 05.02.01.01	Metadata Upgrade (to-be)	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAB 06.02.01.02	Metadata Upgrade (to-be)	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Menurunnya Pengangguran	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAB 06.02.03.01	Metadata Upgrade (to-be)	Pengesahan PP dan PKB	Menurunnya Pengangguran	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
KP-DAB 06.03.02.01	Metadata Upgrade (to-be)	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAB 08.02.01.01	Metadata Upgrade (to-be)	Pengelolaan Kebudayaan	Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAB 09.01.01.01	Metadata Upgrade (to-be)	Pembinaan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAB 09.01.05.04	Metadata Upgrade (to-be)	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bagian Administrasi Pembangunan

KP-DAB 09.02.03.01	Metadata Upgrade (to-be)	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAB 09.02.06.01	Metadata Upgrade (to-be)	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAB 09.02.11.01	Metadata Upgrade (to-be)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAB 09.03.02.01	Metadata Upgrade (to-be)	Pengelolaan e-Government	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAB 09.03.03.01	Metadata Upgrade (to-be)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAB 09.05.01.01	Metadata Upgrade (to-be)	Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KP-DAB 09.05.03.01	Metadata Upgrade (to-be)	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAB 09.06.01.02	Metadata Upgrade (to-be)	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA	Bagian Protokol dan Rumah Tangga

2.1.2. Analisis Katalog Proses Bisnis Target

Merujuk pada hasil pemetaan proses bisnis pada sub bab sebelumnya, dapat dianalisis pengelompokan Level 1 RAB Nasional sebagai berikut:

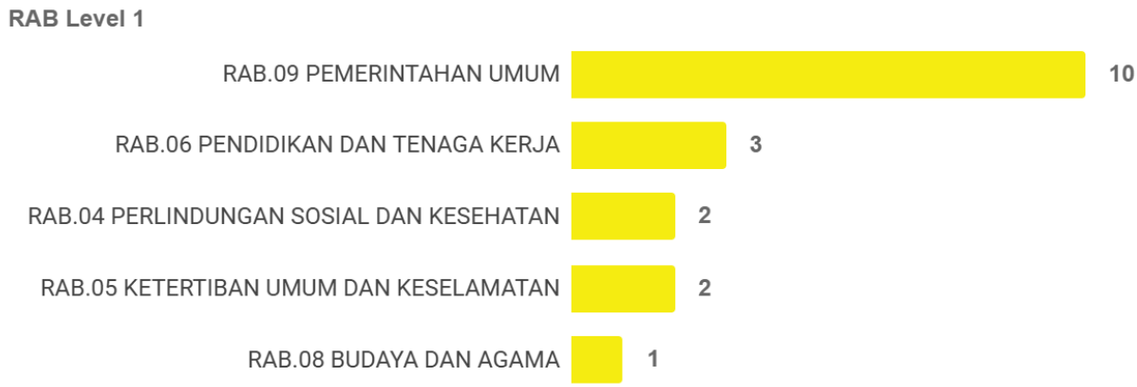

Grafik 2.1.2.1. Grafik Jumlah Proses Bisnis RAB berdasarkan Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Level 1 RAB Nasional, sebagian besar proses bisnis masuk dalam RAB.09 Pemerintahan Umum dan RAB.09 Pemerintahan Umum Kondisi ini tentunya bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan dan inovasi daftar metadata proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

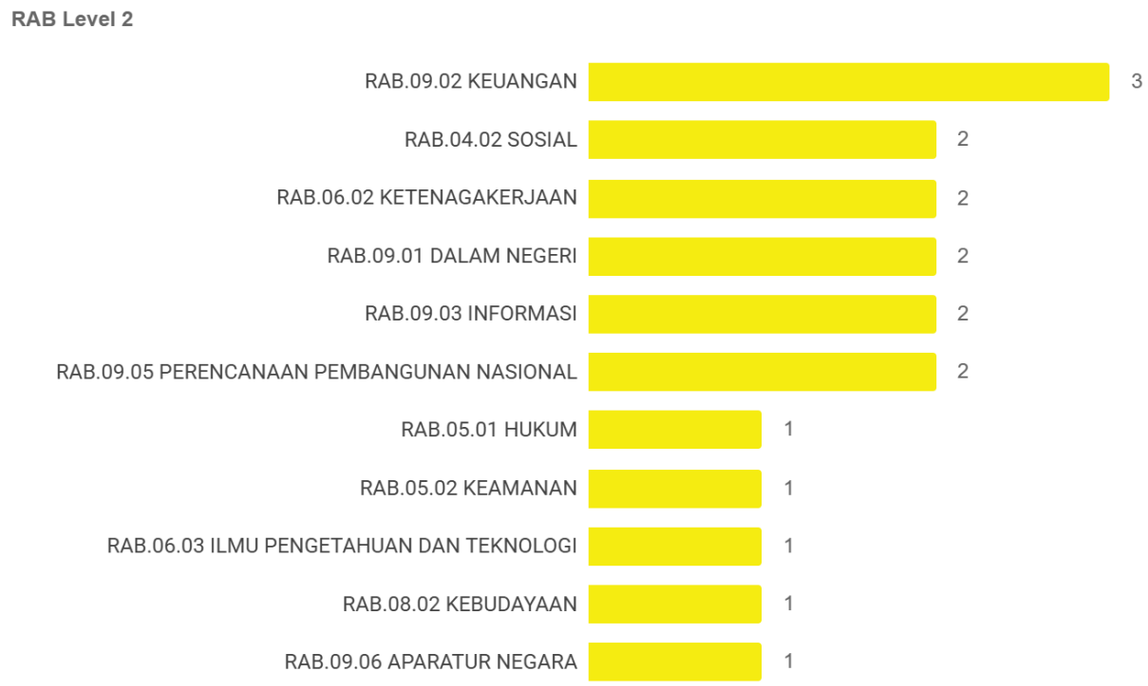

Grafik 2.1.2.2. Grafik Jumlah Proses Bisnis berdasarkan RAB Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan level 2 RAB nasional, kategori terbanyak terdapat pada RAB.09.02. Keuangan sejumlah 3 proses bisnis. Urusan proses bisnis dengan jumlah paling sedikit terdapat pada RAB.09.06 Aparatur Negara dengan jumlah 1 proses bisnis. Tentunya varietas jumlah proses bisnis tergantung pada tipe perangkat daerah. Kondisi ini dapat berubah sesuai perkembangan dan inovasi daftar metadata probis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

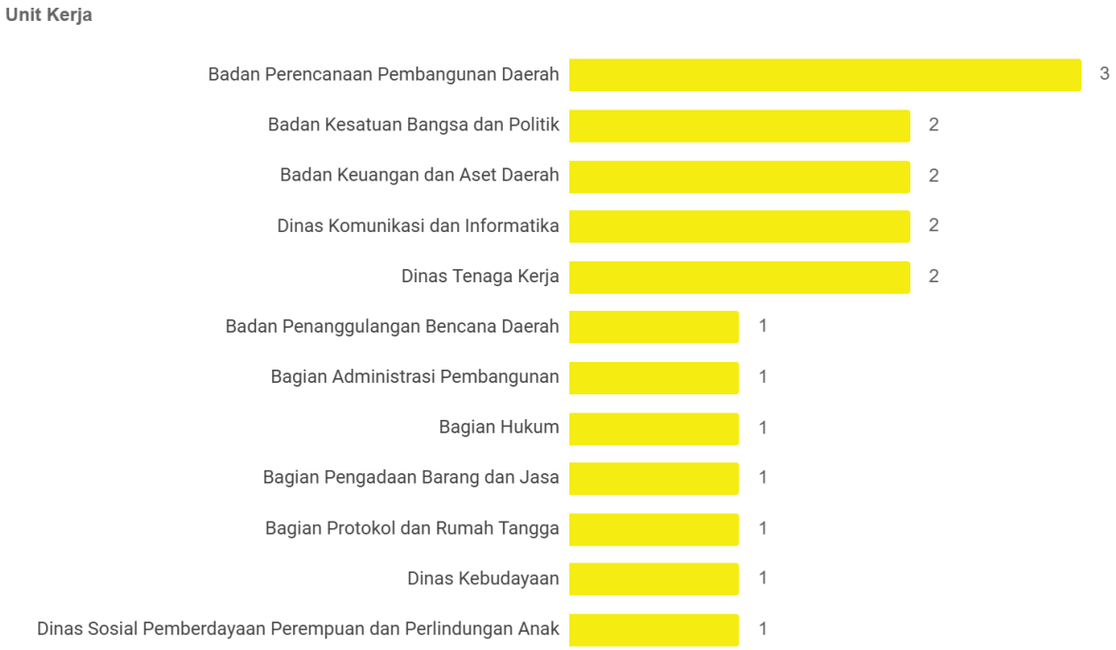

Grafik 2.1.2.3. Grafik Jumlah Proses Bisnis pada Perangkat Daerah

Berdasarkan Grafik 2.1.2.3. Kepemilikan proses bisnis didominasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sejumlah 3 Proses Bisnis. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan proses bisnis pada perangkat daerah sangat beragam dan tergantung pada karakteristik serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini dapat terus bergerak dan berubah sesuai dengan perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Arsitektur Data dan Informasi Target

Arsitektur data memberikan gambaran mengenai daftar data pokok yang dimiliki seluruh perangkat daerah. Daftar data ini perlu dikumpulkan, disimpan, diproses, dan disajikan secara elektronik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data dan informasi pemerintah dapat diakses dengan mudah, aman, dan terintegrasi secara efektif di antara lembaga pemerintah yang berbeda.

2.2.1. Katalog Data dan Informasi Target

Data dan Informasi to-be merupakan kondisi ideal atau target yang ingin dicapai agar arsitektur data dapat mendefinisikan bagaimana data seharusnya dikelola, dibagikan, dan dimanfaatkan oleh instansi pemerintah dalam ekosistem digital pemerintahan. Domain Data dan Informasi Arsitektur SPBE merupakan suatu kumpulan data pokok (by name, by address) hasil output dari pelayanan maupun pengelolaan pemerintahan. Katalog disusun berdasarkan Referensi Arsitektur Data (RAD) Level 1,2, dan 3 mengacu pada referensi arsitektur data SPBE nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog data dan informasi to-be Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. **Metadata katalog data dan informasi to-be yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE**, dapat diakses pada link: **https://bit.ly/MetadataSPBEKulonProgo** di sheet Data.

Tabel 2.2.1.1 Daftar Data dan Informasi yang dikelola oleh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

ID Data							
Status Data dan Informasi	Nama Data		**Layanan**		Validitas Data	RAD Level 1	
KP-DAD 02.11.02.00							
Metadata Upgrade (to-be)	Data Calendar Of Event (COE)	Sambanggo	Layanan Informasi Kepariwisataan	Terbuka	Bulanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	
KP-DAD 02.11.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Desa Wisata	Sambanggo	Layanan Informasi Kepariwisataan	Terbuka	Bulanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI D INDUSTRI
KP-DAD 02.11.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Sambanggo	Layanan Informasi Kepariwisataan	Terbuka	Bulanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI D INDUSTRI
KP-DAD 02.11.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Kunjungan Wisatawan	Sambanggo	Layanan Informasi Kepariwisataan	Terbuka	Bulanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI D INDUSTRI

KP-DAD 02.11.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Objek Wisata	Sambanggo	Layanan Informasi Kepariwisataan	Terbuka	Bulanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI D INDUSTRI
KP-DAD 02.11.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Pelaku Wisata	Sambanggo	Layanan Informasi Kepariwisataan	Terbuka	Bulanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI D INDUSTRI
KP-DAD 02.11.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Usaha Jasa Pariwisata	Sambanggo	Layanan Informasi Kepariwisataan	Terbuka	Bulanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI D INDUSTRI
KP-DAD 03.03.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji	PKB	Layanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terbatas	Realtime	RAD.03 INFORMASI PEMBANGU KEWILAYA
KP-DAD 03.03.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Sertifikat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	e-RFID	Layanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terbatas	Realtime	RAD.03 INFORMASI PEMBANGU KEWILAYA
KP-DAD 03.06.01.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail	SIMTARUKU	Layanan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW dan RDTR)	Terbuka	Tahunan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGU KEWILAYA
KP-DAD 03.06.01.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Pemanfaatan Ruang	SIMTARUKU	Layanan Penetapan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terbatas	Tahunan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGU KEWILAYA
KP-DAD 03.06.01.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data KKPR dan Rekomendasi Tata Ruang	SIMTARUKU	Layanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Terbatas	Tahunan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGU KEWILAYA
KP-DAD 03.06.01.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Penilaian Kesesuaian Tata Ruang	SIMTARUKU	Layanan Penilaian Kesesuaian Tata Ruang dalam Perizinan	Terbatas	Tahunan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGU KEWILAYA

KP-DAD 03.06.01.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Pelanggaran dan Pengawasan Tata Ruang	SIMTARUKU	Layanan Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Terbatas	Bulanan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGU KEWILAYAI
KP-DAD 03.06.01.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Peta Tata Ruang Digital	SIMTARUKU	Layanan Penyusunan dan Pemutakhiran Peta Rencana Tata Ruang	Terbuka	Tahunan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGU KEWILAYAI
KP-DAD 03.06.01.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Database Pertanahan dan Tata Ruang	SIMTARUKU	Layanan Penyusunan Database Pertanahan dan Tata Ruang Daerah	Terbatas	Tahunan	RAD.03 INFORMASI PEMBANGU KEWILAYAI
KP-DAD 04.01.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Obat	SimoKu	Layanan Kefarmasian	Terbatas	Realtime	RAD.04 INFORMASI PERLINDUN SOSIAL DAN KESEHATAN
KP-DAD 04.01.03.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Ketersediaan dan Distribusi Obat dan Alat Kesehatan	SimoKu, SMILE	Layanan Pengadaan dan Distribusi Obat dan Alkes	Terbatas	Bulanan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUN SOSIAL DAN KESEHATAN
KP-DAD 04.01.04.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Hasil Lab Kesehatan		Layanan Pelayanan UPT Lab Kesehatan	Terbatas	Realtime	RAD.04 INFORMASI PERLINDUN SOSIAL DAN KESEHATAN
KP-DAD 04.01.08.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Pengelolaan Stok Obat	SIMOBAT	Layanan Pengelolaan Stok Obat	Terbatas	Realtime	RAD.04 INFORMASI PERLINDUN SOSIAL DAN KESEHATAN
KP-DAD 04.02.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Surat Rekomendasi Penerima Bantuan Iuran APBD (Jamkesda)	SI DABU	Layanan Usulan Penerima Bantuan PBI Pemda	Terbatas	Realtime	RAD.04 INFORMASI PERLINDUN SOSIAL DAN KESEHATAN
KP-DAD 04.02.05.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Terpadu Sosial Ekonomi Sosial (DTSEN)	SIKS-NG	Layanan Pengecekan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	Terbatas	Lainnya	RAD.04 INFORMASI PERLINDUN SOSIAL DAN KESEHATAN

KP-DAD 04.02.05.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Surat Rekomendasi DTSEN Peserta Didik Baru	SIKS-NG	Layanan Pengecekan DTSEN Penerimaan Peserta Didik Baru	Terbatas	Tiga Tahunan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUN SOSIAL DAN KESEHATAN
KP-DAD 04.02.06.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Kejadian Bencana	SIBELAKU	Layanan Informasi Kejadian Bencana	Terbuka	Tiga Bulanan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUN SOSIAL DAN KESEHATAN
KP-DAD 05.01.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Informasi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Kalurahan	JDIH, e-Monday, SID	Layanan Produk Hukum Daerah	Terbuka	Realtime	RAD.05 INFORMASI KETERTIBA UMUM DAN KESELAMA
KP-DAD 05.02.01.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Organisasi Masyarakat (ORMAS)	BangsaKU	"Layanan Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan Organisasi Masyarakat (ORMAS)"	Terbuka	Realtime	RAD.05 INFORMASI KETERTIBA UMUM DAN KESELAMA
KP-DAD 06.02.01.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Rekomendasi Izin Mendirikan LPKS/BLKK		Layanan Rekomendasi Izin Mendirikan Balai Latihan Kompetensi Kerja (BLKK)	Terbatas	Realtime	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKA TENAGA KE
KP-DAD 06.02.03.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Peraturan Perusahaan	SISNAKER, SIAP KERJA	Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Terbatas	Realtime	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKA TENAGA KE
KP-DAD 06.02.03.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Perjanjian Kerja Bersama	SISNAKER, SIAP KERJA	Layanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Terbatas	Realtime	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKA TENAGA KE
KP-DAD 06.03.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Riset dan Teknologi Tepat Guna	Inovasi-ku	Layanan Kelitbangan Daerah	Terbatas	Realtime	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKA TENAGA KE

KP-DAD 06.03.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Pengguna, Kapanewon, Perguruan Tinggi	Inovasi-ku	Layanan Kelitbangan Daerah	Tertutup	Harian	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKA TENAGA KE
KP-DAD 06.03.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Rekom KKN	Inovasi-ku	Layanan Kelitbangan Daerah	Terbatas	Realtime	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKA TENAGA KE
KP-DAD 06.03.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Rekomendasi Kerjasama	Inovasi-ku	Layanan Kelitbangan Daerah	Tertutup	Harian	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKA TENAGA KE
KP-DAD 08.02.01.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Pokok Kebudayaan Daerah	BUDAYAKU	Layanan Pengelolaan Data Pokok Kebudayaan Daerah	Terbuka	Tahunan	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DA AGAMA
KP-DAD 09.01.01.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Organisasi Politik (ORPOL)	BangsaKU	Layanan Pendataan Organisasi Politik	Terbuka	Realtime	RAD.09 INFORMASI PEMERINTA UMUM
KP-DAD 09.02.03.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	e-SPTPD, e-SPPT	Layanan Pajak PBB dan BPHTB	Terbatas	Realtime	RAD.09 INFORMASI PEMERINTA UMUM
KP-DAD 09.02.03.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Wajib PBB	SISMIOP, MyPBB	Layanan Mobil Layanan Pajak Daerah Kulon Progo (MOLAPADA KU), Layanan Pajak PBB dan BPHTB	Terbatas	Realtime	RAD.09 INFORMASI PEMERINTA UMUM
KP-DAD 09.02.06.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Aset	SIM-Aset	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terbatas	Realtime	RAD.09 INFORMASI PEMERINTA UMUM
KP-DAD 09.02.06.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Persediaan	SIM-Persediaan	Layanan Pengelolaan Persediaan	Terbatas	Realtime	RAD.09 INFORMASI PEMERINTA UMUM
KP-DAD 09.02.11.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Monitoring Pengadaan	ePBJKU	Layanan Monitoring Data Pengadaan	Terbatas	Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTA UMUM

KP-DAD 09.03.02.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Pembuatan Website Pemerintah		Layanan Pembuatan Website Pemerintah	Tertutup	Realtime	RAD.09 INFORMASI PEMERINTA UMUM
KP-DAD 09.03.03.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Analitik Informasi	Media Analitik IKPS	Layanan Analitik Informasi	Terbatas	Realtime	RAD.09 INFORMASI PEMERINTA UMUM
KP-DAD 09.03.03.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Dashboard Pimpinan	Dashboard Pimpinan	Layanan Dashboard Pimpinan	Terbatas	Realtime	RAD.09 INFORMASI PEMERINTA UMUM
KP-DAD 09.05.01.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Fasilitasi CSR Perusahaan	CSRKU	Layanan Fasilitasi CSR Perusahaan	Terbatas	Tahunan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTA UMUM
KP-DAD 09.05.03.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Dokumen Laporan Kegiatan Pembangunan	Monev-ku	Layanan Monitoring Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan	Terbatas	Realtime	RAD.09 INFORMASI PEMERINTA UMUM
KP-DAD 09.05.03.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Monitoring Program Pembangunan	siMPel	Layanan Monitoring Program Pembangunan	Terbatas	Realtime	RAD.09 INFORMASI PEMERINTA UMUM
KP-DAD 09.05.03.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Kontrak Paket Pekerjaan	siMPel	Layanan Monitoring Program Pembangunan	Terbatas	Realtime	RAD.09 INFORMASI PEMERINTA UMUM
KP-DAD 09.05.03.00	Metadata Upgrade (to-be)	Data Progres Pekerjaan	siMPel	Layanan Monitoring Program Pembangunan	Terbatas	Realtime	RAD.09 INFORMASI PEMERINTA UMUM

Analisis Katalog Data dan Informasi Target

Merujuk pada hasil pemetaan data dan informasi pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut.

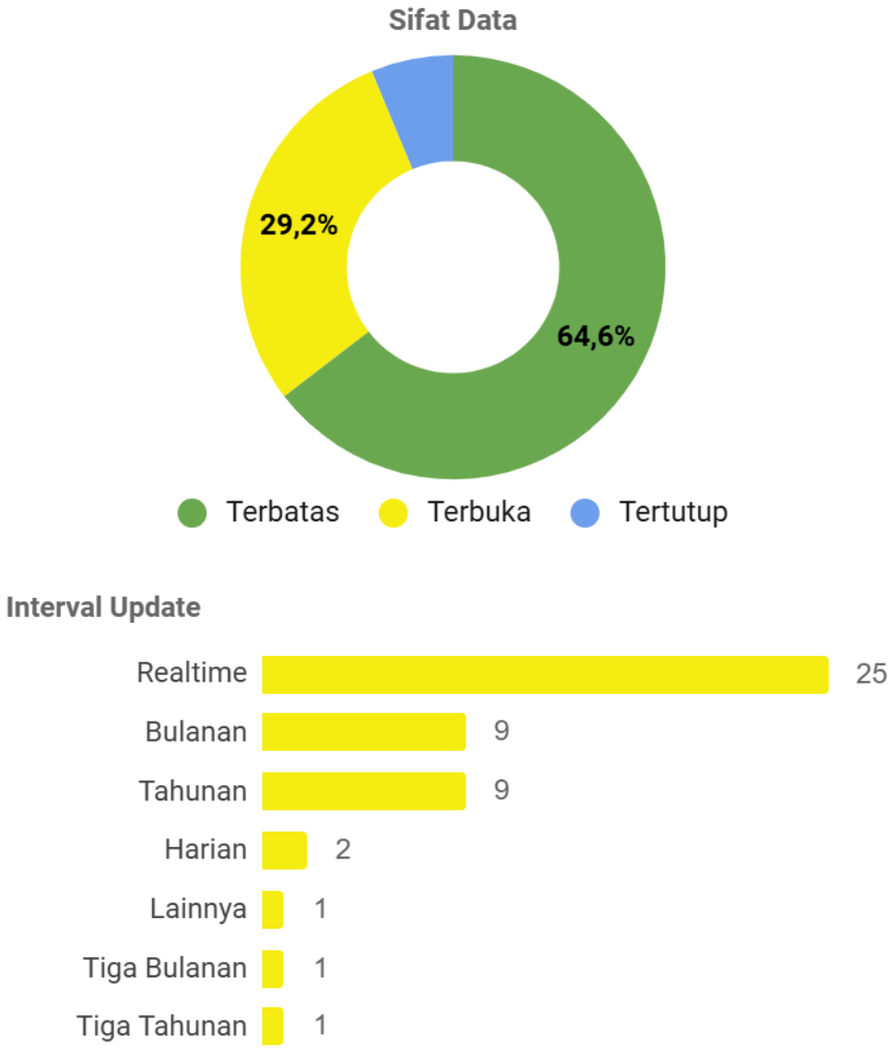

Grafik 2.2.2.1. Grafik Jumlah Daftar Data dan Informasi To Be Berdasarkan Sifat dan Interval Update

Berdasarkan grafik 2.2.2.1. menunjukkan bahwa terdapat 48 data pokok *to be* yang berada di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan 31 data (64,6%) merupakan data yang bersifat terbatas, 14 Data (29,2%) merupakan data yang bersifat terbuka dan 3 Data (6,3%) bersifat tertutup.. Merujuk grafik di atas dapat dilihat bahwa mayoritas data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki sifat terbatas atau data yang bisa dibagi pakaikan antar instansi terkait.

Adapun dari 48 data pokok mayoritas, sebanyak 25 data merupakan data dengan interval *update Realtime*, 9 data merupakan data dengan interval *update Bulanan*, dan 9 data merupakan data dengan interval *update Tahunan*, serta Interval *update d*ata terendah dengan interval *update Tiga Tahunan sejumlah 1 data.* Secara umum, mayoritas data di Kabupaten Kulon Progo harus di *update* secara *realtime* sehingga diperlukan digitalisasi proses bisnis untuk memudahkan pemrosesan pengolahan data.

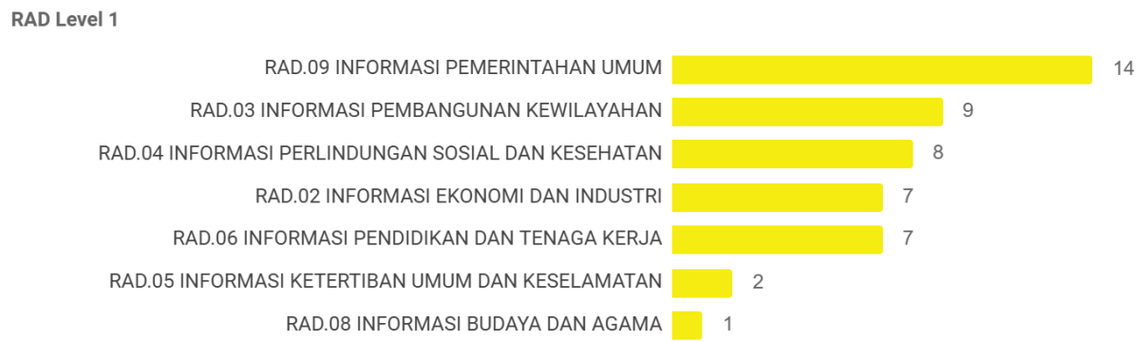

Grafik 2.2.2.2. Grafik Jumlah Daftar Data berdasarkan RAD Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Grafik 2.2.2.2. mayoritas data didominasi oleh RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum sejumlah 14 data. Sedangkan RAD yang paling sedikit yaitu pada RAD.08 Informasi Budaya dan Agama dengan jumlah 1. Data. Kondisi ini tentu bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan dan inovasi daftar metadata arsitektur data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

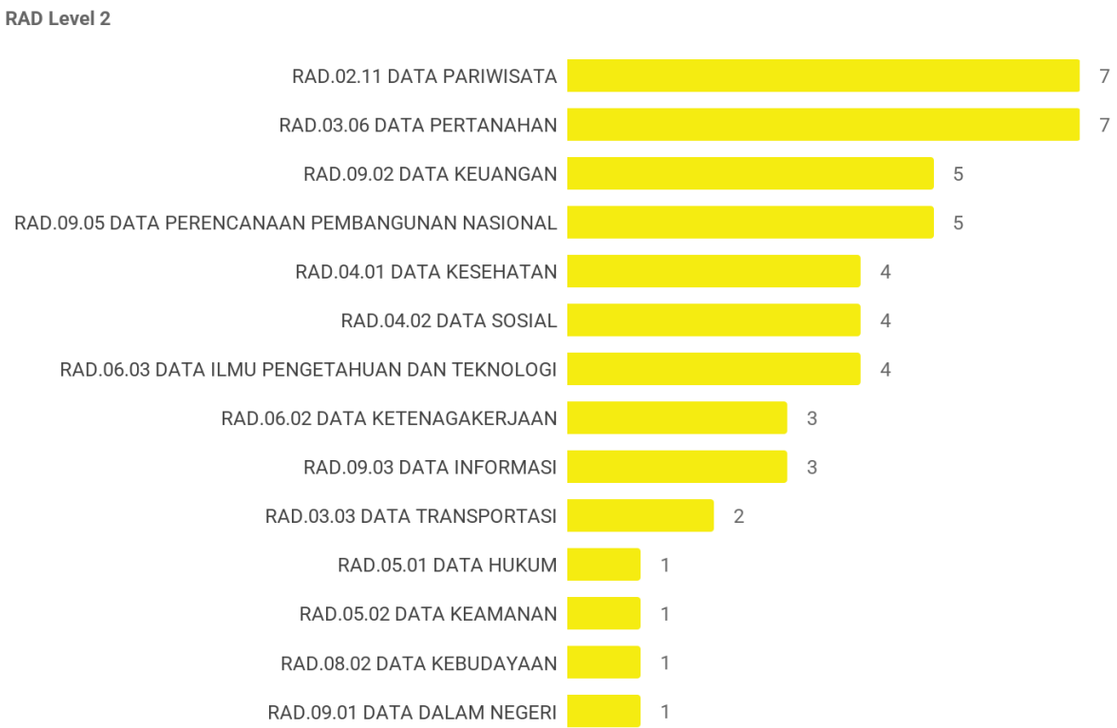

Grafik 2.2.2.3 Grafik Jumlah Daftar Data berdasarkan RAD Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Grafik 2.2.2.3. menunjukkan bahwa RAD level 2 didominasi oleh, RAD.02.11 Data Pariwisata sejumlah 7 data, RAD.03.06 Data Pertanahan sejumlah 7 data. Sedangkan paling sedikit, yaitu RAD.09.01 Data Dalam Negeri sejumlah 1 data. Merujuk pada referensi arsitektur data Nasional yang berjumlah 49 referensi, referensi arsitektur data Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 14 Referensi Arsitektur Data Nasional, sementara 35 referensi lainnya bukan merupakan referensi/urusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

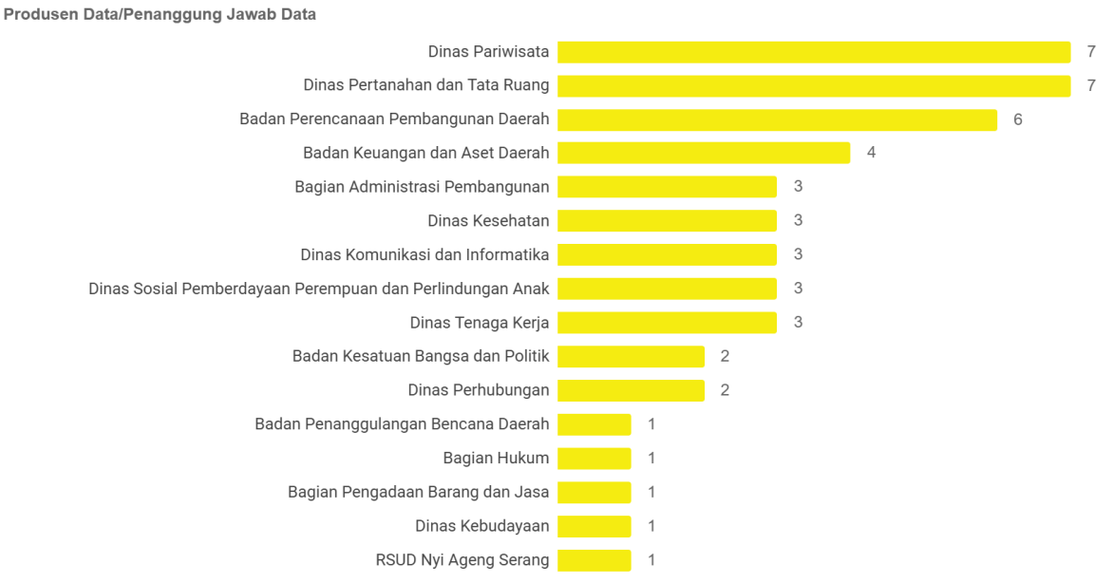

Grafik 2.2.2.4 Grafik Jumlah Daftar Data di Perangkat Daerah

Berdasarkan Grafik 2.2.2.4. menunjukkan bahwa mayoritas data terbanyak dimiliki oleh Dinas Pariwisata dengan jumlah 7 data. Data paling sedikit yaitu pada RSUD Nyi Ageng Serang yang memiliki jumlah 1 data. Oleh karena itu, perlu evaluasi dan inventarisasi data di masing-masing perangkat daerah untuk memvalidasi apakah data yang dimiliki telah sesuai.

Arsitektur Layanan Target

Layanan SPBE dapat memberikan manfaat seperti mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan, serta memberikan akses yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan layanan. Secara umum, arsitektur layanan menggambarkan kondisi mengenai layanan yang dihadirkan pada masing-masing perangkat daerah sesuai proses bisnis utamanya.

2.4.1. Katalog Layanan Target

Katalog layanan To-be merupakan kondisi ideal atau target yang ingin dicapai untuk mendukung efisiensi, efektivitas, dan integrasi layanan pemerintahan berbasis TI. Katalog Layanan to-be merupakan proses pemerintahan yang memiliki pelanggan (customer), baik itu internal (perangkat daerah, ASN) maupun eksternal (instansi luar, swasta dan masyarakat). Katalog disusun berdasarkan Referensi Arsitektur Layanan (RAL) Level 1,2, dan 3 mengacu pada referensi arsitektur layanan SPBE nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog layanan to-be Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. **Metadata katalog layanan To Be yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE**, dapat diakses pada link: **https://bit.ly/MetadataSPBEKulonProgo** di sheet Layanan.

Tabel 2.3.1.1 Katalog Layanan yang dikelola oleh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

ID Layanan	Status Layanan	Nama Layanan	Target Layanan	Data	Aplikasi	RAL Level 1
KP-DAL 01.15.02.01	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Informasi Kepariwisataan	Bisnis	Data Desa Wisata, Data Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Data Usaha Jasa Pariwisata, Data Pelaku Wisata, Data Kunjungan Wisatawan, Data Calendar Of Event (COE), Data Objek Wisata	Sambanggo	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.19.02.01	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Masyarakat	Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji, Data Sertifikat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	PKB, e-RFID	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.22.01.01	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW dan RDTR)	Masyarakat	Data Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.22.01.02	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Penetapan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Masyarakat	Data Pemanfaatan Ruang	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.22.01.03	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Masyarakat	Data KKPR dan Rekomendasi Tata Ruang	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK

KP-DAL 01.22.01.04	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Penilaian Kesesuaian Tata Ruang dalam Perizinan	Masyarakat	Data Penilaian Kesesuaian Tata Ruang	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.22.01.05	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Masyarakat	Data Pelanggaran dan Pengawasan Tata Ruang	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.22.01.06	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Penyusunan dan Pemutakhiran Peta Rencana Tata Ruang	Masyarakat	Data Peta Tata Ruang Digital	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.22.01.07	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Penyusunan Database Pertanahan dan Tata Ruang Daerah	Masyarakat	Data Database Pertanahan dan Tata Ruang	SIMTARUKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.25.02.01	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Kefarmasian	Masyarakat	Data Obat	SimoKu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.25.03.01	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pengadaan dan Distribusi Obat dan Alkes	Masyarakat	Data Ketersediaan dan Distribusi Obat dan Alat Kesehatan	SimoKu, SMILE	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.25.04.02	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pelayanan UPT Lab Kesehatan	Masyarakat	Data Hasil Lab Kesehatan	Satu Pintu LabkesKu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.25.08.06	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pengelolaan Stok Obat	Masyarakat	Data Pengelolaan Stok Obat	SIMOBAT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.26.02.03	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Usulan Penerima Bantuan PBI Pemda	Masyarakat	Data Surat Rekomendasi Penerima Bantuan Iuran APBD (Jamkesda)	SI DABU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.26.05.01	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pengecekan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	Masyarakat	Data Terpadu Sosial Ekonomi Sosial (DTSEN)	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.26.05.02	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pengecekan DTSEN Penerimaan Peserta Didik Baru	Masyarakat	Data Surat Rekomendasi DTSEN Peserta Didik Baru	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.26.06.01	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Informasi Kejadian Bencana	Masyarakat	Data Kejadian Bencana	SIBELAKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.28.02.02	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Produk Hukum Daerah	Masyarakat	Data Informasi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Kalurahan	JDIH, e-Monday, SID	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.29.01.01	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan Organisasi Masyarakat (ORMAS)	Masyarakat	Data Organisasi Masyarakat (ORMAS)	BangsaKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK

KP-DAL 01.32.01.01	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Rekomendasi Izin Mendirikan Balai Latihan Kompetensi Kerja (BLKK)	Masyarakat	Data Rekomendasi Izin Mendirikan LPKS/BLKK		RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.32.03.04	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Masyarakat	Data Perjanjian Kerja Bersama	SISNAKER, SIAP KERJA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.32.03.05	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Masyarakat	Data Peraturan Perusahaan	SISNAKER, SIAP KERJA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.33.02.01	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Kelitbangan Daerah	Masyarakat	"Data Pengguna, Kapanewon, Perguruan Tinggi", Data Rekom KKN, Data Rekomendasi Kerjasama, Data Riset dan Teknologi Tepat Guna	Inovasi-ku	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.42.01.06	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pengelolaan Data Pokok Kebudayaan Daerah	Masyarakat	Data Pokok Kebudayaan Daerah	BUDAYAKU	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.43.02.03	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pembuatan Website Pemerintah	Masyarakat	Data Pembuatan Website Pemerintah	Website Pemerintahan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.43.03.05	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Analitik Informasi	Masyarakat	Data Analitik Informasi	Media Analitik IKPS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 01.43.03.06	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Dashboard Pimpinan	Masyarakat	Data Dashboard Pimpinan	Dashboard Pimpinan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
KP-DAL 02.01.01.01	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pendataan Organisasi Politik	Pemerintah	Data Organisasi Politik (ORPOL)	BangsaKU	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KP-DAL 02.02.03.01	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Mobil Layanan Pajak Daerah Kulon Progo (MOLAPADAKU)	Pemerintah	Data Wajib PBB	SISMIOP	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KP-DAL 02.02.03.02	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pajak PBB dan BPHTB	Pemerintah	Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Data Wajib PBB, Data Wajib BPHTB	e-SPPT, e-SPTPD, e-Layanan, e-BPHTB, SISMIOP, MyPBB, myPOTENSI	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KP-DAL 02.02.03.03	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Pemerintah	"Data Pajak Restoran, Hotel, Hiburan"	e-SPTPD, e-Layanan, SIMPATDA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KP-DAL 02.02.06.01	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah	Data Aset	SIM-Aset	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KP-DAL 02.02.06.02	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pengelolaan Persediaan	Pemerintah	Data Persediaan	SIM-Persediaan	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KP-DAL 02.02.11.05	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Monitoring Data Pengadaan	Pemerintah	Data Monitoring Pengadaan	ePBJKU	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KP-DAL 02.03.01.03	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Fasilitasi CSR Perusahaan	Pemerintah	Data Fasilitasi CSR Perusahaan	CSRKU	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KP-DAL 02.03.03.01	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Monitoring Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan	Pemerintah	Data Dokumen Laporan Kegiatan Pembangunan	Monev-ku	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KP-DAL 02.03.03.04	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Monitoring Program Pembangunan	Pemerintah	Data Kontrak Paket Pekerjaan, Data Progres Pekerjaan, Data Monitoring Program Pembangunan	siMPel	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KP-DAL 02.04.01.04	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pengelolaan Agenda Pimpinan	Pemerintah	Data Agenda Pimpinan	SIMAGENDA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KP-DAL 02.04.01.06	Metadata Upgrade (to-be)	Layanan Pengelolaan Kendaraan Dinas Pimpinan Daerah	Pemerintah	Data Kendaraan Dinas Pimpinan Daerah	SIMKD	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Analisis Katalog Layanan Target

Merujuk pada hasil pemetaan layanan pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data *eksisting* dapat dijabarkan sebagai berikut:

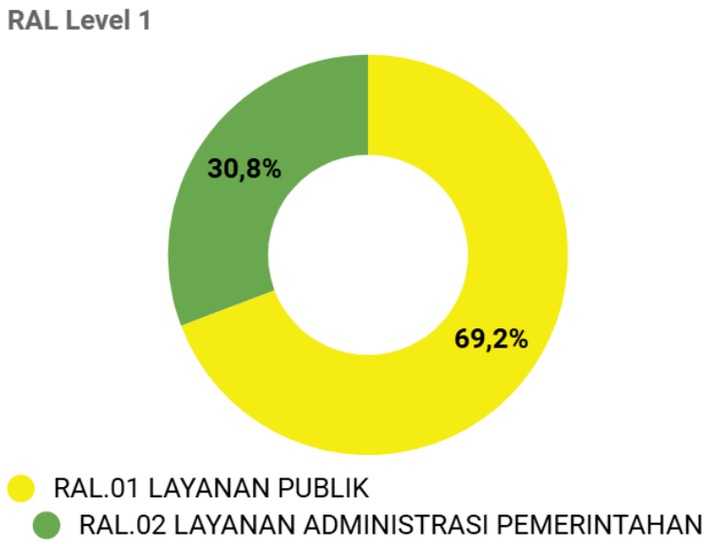

Grafik 2.3.2.1. Grafik Jumlah Layanan To Be Berdasarkan RAL Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan grafik 2.3.2.1 serta mengacu pada Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional (RAL Level 1) dari total 39 layanan To Be yang dimiliki, terdapat 69,2% (27 Layanan) merupakan RAL.01 Layanan Publik dan sebesar 30,8% (12 Layanan) merupakan RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan. Mengacu pada referensi arsitektur ini, mayoritas layanan yang ada merupakan layanan publik untuk masyarakat dimana Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat menjadikannya sebagai panduan untuk memfasilitasi kerjasama antara instansi perangkat daerah dalam pengembangan layanan publik dan juga membantu pemerintah dalam merancang dan mengembangkan sistem administrasi pemerintahan yang terintegrasi, efisien, dan transparan.

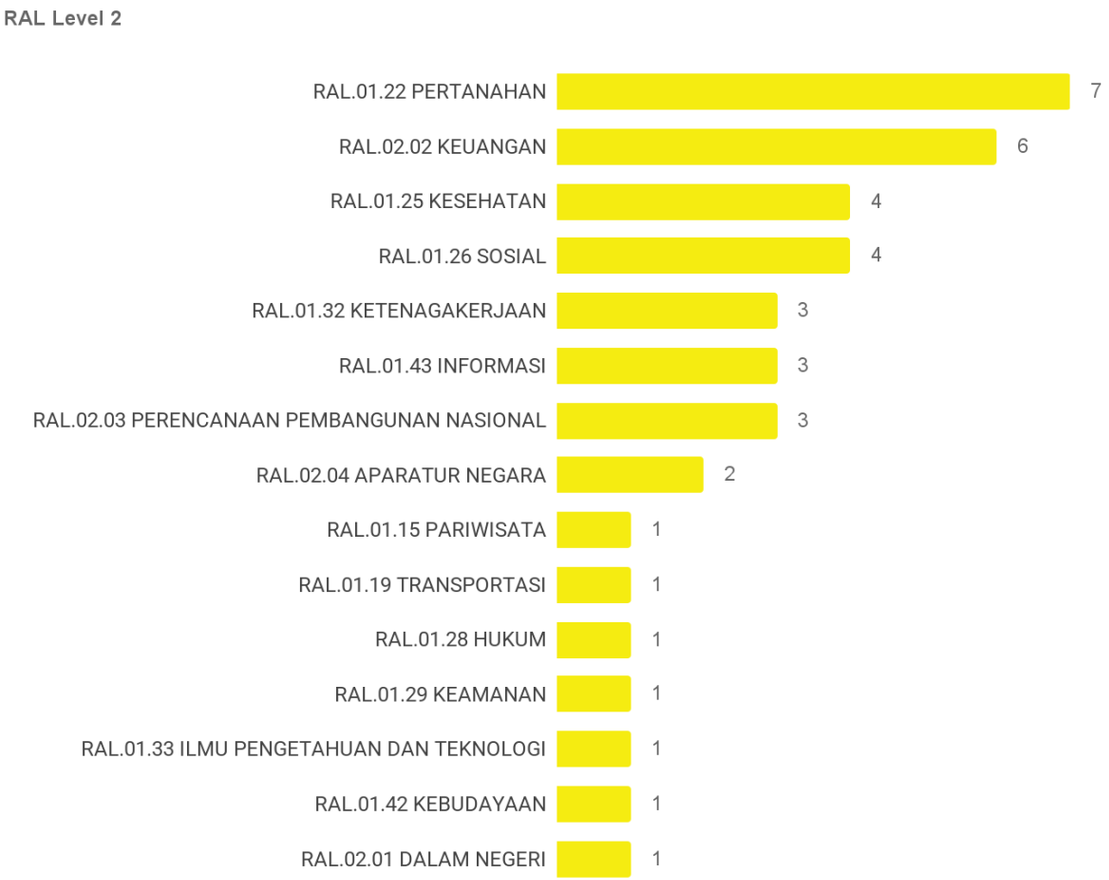

Grafik 2.3.2.2 Grafik Jumlah Layanan To Be Berdasarkan RAL Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Grafik 2.3.2.2 dapat dilihat RAL Level 2 yang paling banyak adalah RAL.01.22 Pertanahan sejumlah 7 layanan dan RAL.02.02 Keuangan sejumlah 7 layanan. Referensi Arsitektur Layanan Nasional di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mencakup 15 Referensi dari 52 Arsitektur Layanan Nasional. Perbedaan pada jumlah layanan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah menyesuaikan pada tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini tentunya bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

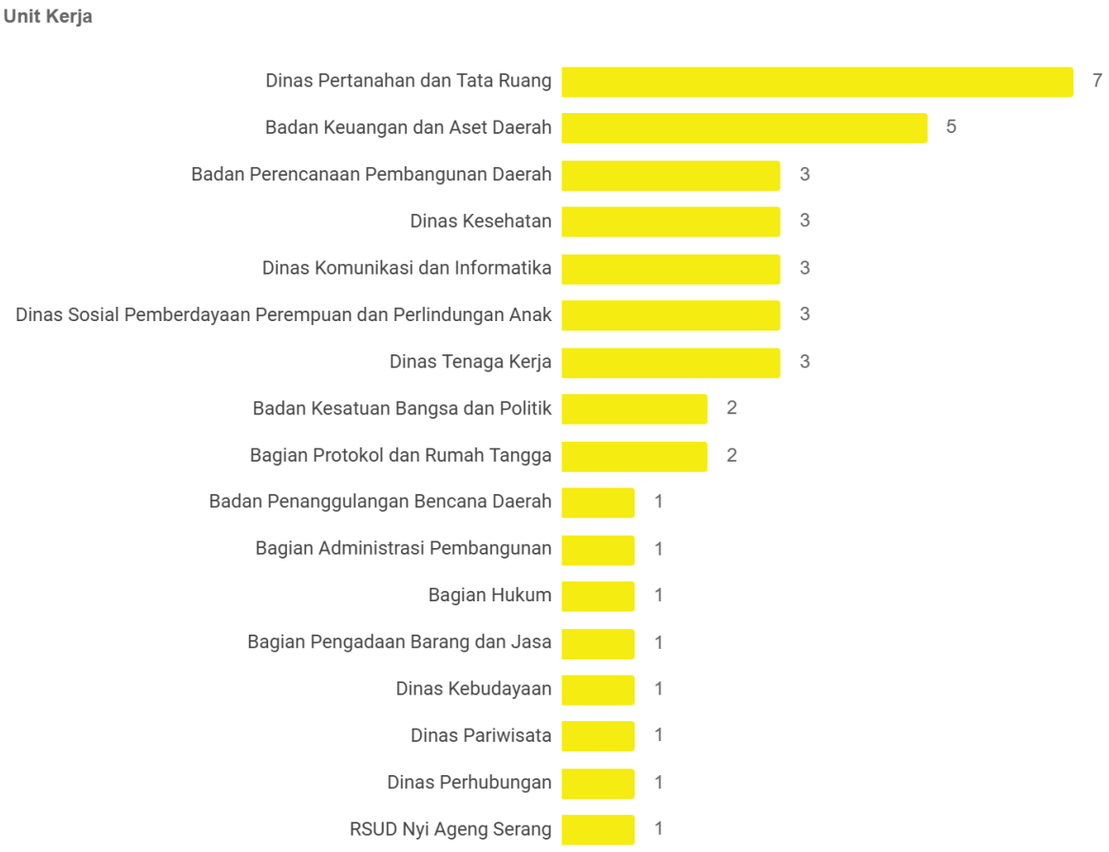

Grafik 2.3.2.3. Grafik Jumlah Layanan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan grafik 2.3.2.3. menunjukkan bahwa layanan paling banyak dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sejumlah 7 layanan. Sedangkan paling sedikit berada pada RSUD Nyi Ageng Serang hanya memiliki 1 layanan. Berdasarkan hasil survei, keseluruhan layanan yang dimiliki oleh perangkat daerah memerlukan verifikasi agar layanan dapat terstandarisasi serta memastikan layanan tersebut berjalan optimal.

2.2. Arsitektur Aplikasi Target

2.4.1. Desain Arsitektur Aplikasi

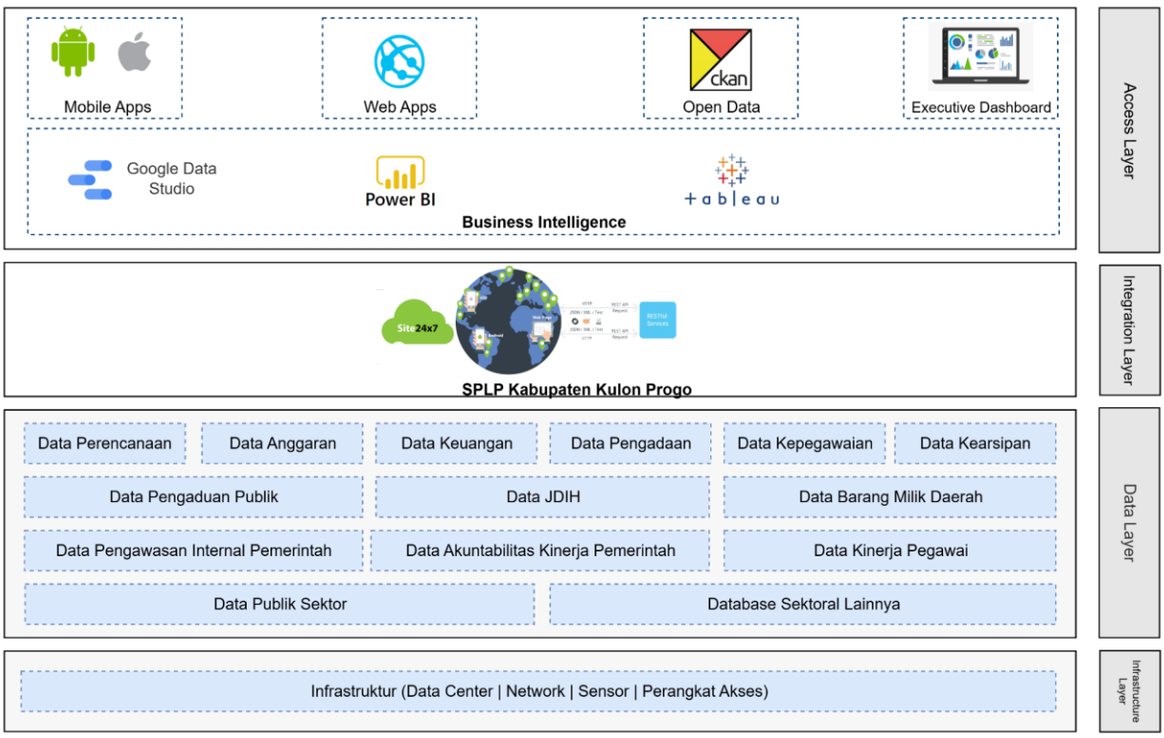

Gambar 2.4.1.1.. Desain Arsitektur Aplikasi

Desain arsitektur aplikasi SPBE dijabarkan sebagai berikut:

Access *Layer*

Bagian ini akan terdapat aplikasi-aplikasi yang akan mendukung perangkat daerah dalam proses operasional utama di perangkat daerah. Masing-masing perangkat daerah akan memiliki aplikasi dengan alur probis (proses bisnis) yang beragam sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut. Selain itu juga perangkat daerah perlu belajar untuk memanfaatkan *tools business intelligence* dengan tujuan untuk memvisualisasikan data sebagai rangkaian dalam penerapan satu data Indonesia.

- *Integration* *Layer*

  Bagian ini ditujukan untuk aplikasi, *platform*, *module*, *services* yang berfungsi sebagai jembatan antara *layer* data dengan *layer* access. Proses pengaturan terhadap akses data juga dikelola oleh layanan pada *layer* ini. Pada *layer* ini akan terdapat *API gateway* yang terhubung dengan masing-masing aplikasi yang berjalan guna mengelola akses integrasi data antar aplikasi.

- *Data* *Layer*

  Bagian data *layer* ini berisi *database* dari data-data pemerintahan sektoral yang berasal dari berbagai aplikasi. Secara umum *DBMS* yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu *MySQL*.

- *Layer* Arsitektur

  Bagian ini terdapat perangkat jaringan, pusat data dan CCTV guna mendukung operasional aplikasi 24x7 jam.

2.4.2. Integrasi Aplikasi

Permasalahan integrasi merupakan kendala yang cukup kompleks dalam implementasi SPBE. Kurang adanya integrasi antar aplikasi berdampak pada ketidak efisiennya layanan operasional pemerintahan dan rentan terjadinya duplikasi data. Aplikasi yang dikembangkan harus dapat diintegrasikan dengan menggunakan teknologi *Application Programming Interface* (*API*).

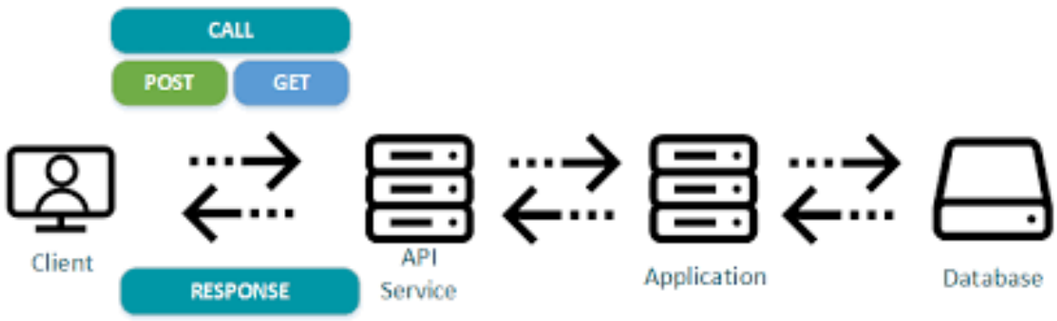

Gambar 2.4.2.1. Skema Alur Kerja *API*

API adalah kumpulan fungsi-fungsi untuk menggantikan bahasa yang digunakan dalam *system call* dengan bahasa yang terstruktur. *API* menyediakan fungsi untuk menghubungkan koneksi antar aplikasi. Secara umum *API* mampu menerima respon data dalam format *JSON* dan *XML*. Sebagai contoh, data kependudukan (DUKCAPIL), data bencana alam (BPBD), dan data bantuan sosial (DINSOS) saling terintegrasi sebagai dasar penyusunan laporan alokasi bantuan sosial untuk korban bencana alam.

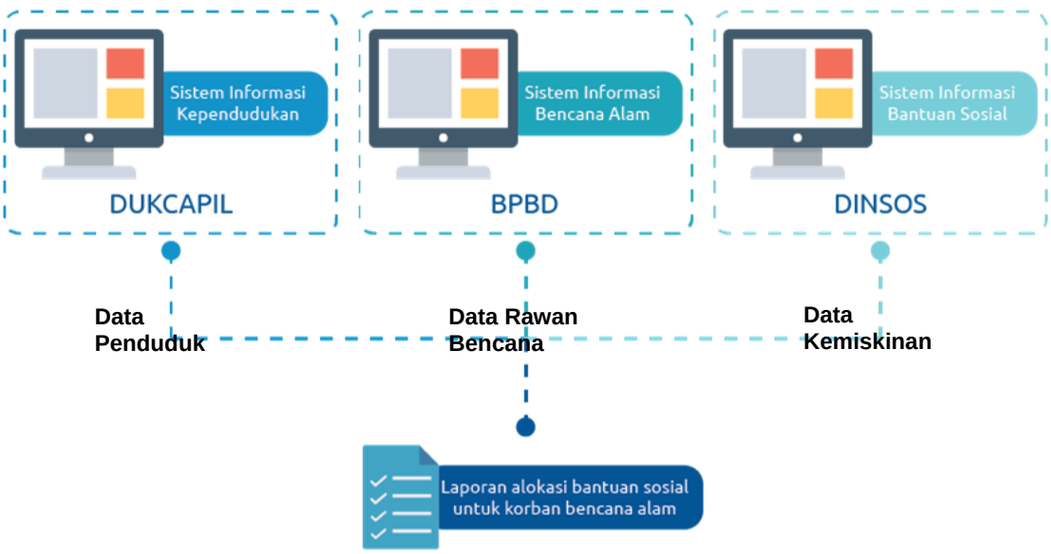

Gambar 2.4.2.2. Ilustrasi Integrasi antar Aplikasi

2.4.3. Arsitektur Aplikasi Target

Katalog Aplikasi Target

Aplikasi to-be dalam arsitektur SPBE adalah representasi dari kondisi ideal aplikasi digital pemerintah di masa depan, yang dibangun ataupun dikembangkan kembali untuk mendukung keterpaduan sistem, efisiensi birokrasi, dan pelayanan publik berbasis digital. Aplikasi to-be menjadi bagian penting dalam strategi transformasi digital pemerintahan yang terarah dan terstandarisasi. Berikut ini disajikan daftar aplikasi to-be yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog disusun berdasarkan Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) Level 1 dan 2 mengacu pada referensi arsitektur aplikasi SPBE nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog aplikasi to-be Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Adapun dikarenakan keterbatasan ukuran kertas, maka tabel yang disajikan hanya menampilkan informasi yang menjadi kebutuhan utama. **Metadata katalog aplikasi to-be yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE**, dapat diakses pada link: **https://bit.ly/MetadataSPBEKulonProgo** di sheet Aplikasi.

Tabel 2.4.3.1.1 Katalog Aplikasi Usulan

ID Aplikasi	Status Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	RAA Level 1	Framework Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Layanan	Data yang Digunakan	RAA Level 2	Unit Operasional Teknologi
KP-DAA 02.02.03	Metadata Upgrade (to-be)	BangsaKU	Sistem Informasi Registrasi Ormas Kulon Progo	https://bangsaku.kulonprogokab.go.id/assets_frontend/about.html	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	Laravel	PHP	"Layanan Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan Organisasi Masyarakat (ORMAS)", Layanan Pendataan Organisasi Politik	Data Organisasi Masyarakat (ORMAS), Data Organisasi Politik (ORPOL)	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KP-DAA 01.01.02	Metadata Upgrade (to-be)	e-BPHTB	Sistem Informasi Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak BPHTB	http://mapatda.kulonprogokab.go.id/ebphtb/	RAA.01 APLIKASI UMUM	Codeigniter	PHP	Layanan Pajak PBB dan BPHTB	Data Wajib BPHTB	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KP-DAA 01.01.03	Metadata Upgrade (to-be)	e-Layanan	Sistem Informasi Pengajuan BPHTB dan PBB P2	https://elayananpbb.kulonprogokab.go.id/	RAA.01 APLIKASI UMUM	Codeigniter	PHP	Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Layanan Pajak PBB dan BPHTB	"Data Pajak Restoran, Hotel, Hiburan", Data Wajib BPHTB	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 01.01.04	Metadata Upgrade (to-be)	e-SPPT	Sistem Informasi SPPT Elektronik (Salah satu bentuk pemutakhiran dan pengembangan aplikasi SISMIOP adalah aplikasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik (e-SPPT)	https://esppt.kulonprogokab.go.id/	RAA.01 APLIKASI UMUM	Codeigniter	PHP	Layanan Pajak PBB dan BPHTB	Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 01.01.05	Metadata Upgrade (to-be)	siMPel	Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah		RAA.01 APLIKASI UMUM	Laravel	PHP	Layanan Monitoring Program Pembangunan	Data Monitoring Program Pembangunan, Data Kontrak Paket Pekerjaan, Data Progres Pekerjaan	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Bagian Administrasi Pembangunan
KP-DAA 01.01.06	Metadata Upgrade (to-be)	MyPBB	Sistem Informasi Pembayaran Pajak Bumi Bangunan		RAA.01 APLIKASI UMUM	Laravel	PHP	Layanan Mobil Layanan Pajak Daerah Kulon Progo (MOLAPADAKU)	Data Wajib PBB	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 01.01.07	Metadata Upgrade (to-be)	SISMIOP	Sistem Informasi Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak PBB		RAA.01 APLIKASI UMUM	Codeigniter	Delphi	Layanan Mobil Layanan Pajak Daerah Kulon Progo (MOLAPADAK	Data Wajib PBB	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Keuangan dan Aset Daerah

								U)			
KP-DAA 01.02.17	Metadata Upgrade (to-be)	SIM-Aset	Sistem Informasi Manajemen Aset	http://aset.kulonprogokab.go.id	RAA.01 APLIKASI UMUM	Codeigniter	PHP	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data Aset	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 01.02.18	Metadata Upgrade (to-be)	SIM-Persediaan	Sistem Informasi Persediaan	http://persediaan.kulonprogokab.go.id	RAA.01 APLIKASI UMUM	Codeigniter	PHP	Layanan Pengelolaan Persediaan	Data Persediaan	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 01.02.19	Metadata Upgrade (to-be)	e-SPTPD	Sistem Informasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	https://esptpd.kulonprogokab.go.id/	RAA.01 APLIKASI UMUM	Codeigniter	PHP	Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Layanan Pajak PBB dan BPHTB	"Data Pajak Restoran, Hotel, Hiburan", Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 01.02.20	Metadata Upgrade (to-be)	SIMPATDA	Sistem Informasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB dan Sistem Aplikasi Pengelola Administrasi Pendapatan Daerah	simpatda.kulonprogokab.go.id	RAA.01 APLIKASI UMUM	Codeigniter	PHP	Layanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Layanan Pajak Reklame, Layanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Layanan Pajak Air Tanah	"Data Pajak Restoran, Hotel, Hiburan", Data Pajak Reklame, Data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Data Pajak Air Tanah	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 01.01.08	Metadata Upgrade (to-be)	SIBELAKU	Sistem Informasi Bencana Alam Kulon Progo	sibelaku.kulonprogokab.go.id	RAA.01 APLIKASI UMUM	Laravel	PHP	Layanan Informasi Kejadian Bencana	Data Kejadian Bencana	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KP-DAA 01.02.22	Metadata Upgrade (to-be)	Inovasi-ku	Sistem Informasi Penelitian Pembangunan Kabupaten Kulon Progo	https://inovasiku.mgsilabs.com/	RAA.01 APLIKASI UMUM	Node.js	PHP	Layanan Kelitbangan Daerah	Data Riset dan Teknologi Tepat Guna	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KP-DAA 01.02.25	Metadata Upgrade (to-be)	JDIH	Sistem Informasi Produk Hukum Daerah dan Dokumentasi Hukum lainnya	jdih.kulonprogokab.go.id	RAA.01 APLIKASI UMUM	Codeigniter	PHP	Layanan Produk Hukum Daerah	Data Informasi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Kalurahan	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Hukum
KP-DAA 01.02.27	Metadata Upgrade (to-be)	ePBJKU	Aplikasi pengadaan barang/jasa untuk internal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.	https://e-pbjku.kulonprogokab.go.id/	RAA.01 APLIKASI UMUM	Codeigniter	PHP	Layanan Monitoring Data Pengadaan	Data Monitoring Pengadaan	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
KP-DAA 02.01.06	Metadata Upgrade (to-be)	SimoKu	Sistem Informasi Pengelola Obat	simoku.kulonprogokab.go.id	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	Codeigniter	PHP	Layanan Kefarmasian, Layanan Pengadaan dan Distribusi Obat dan Alkes	Data Obat, Data Ketersediaan dan Distribusi Obat dan Alat Kesehatan	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
KP-DAA 02.01.22	Metadata Upgrade (to-be)	PKB	Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	192.168.26.201/pkb_kulonprogo/index.php	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	Codeigniter	PHP	Layanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Perhubungan

KP-DAA 02.02.13	Metadata Upgrade (to-be)	SIMTARUKU	Sistem Informasi Tata Ruang Kulon Progo	https://simtaruku.kulonprogokab.go.id/	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	Codeigniter	PHP	Layanan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW dan RDTR), Layanan Penetapan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Layanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Layanan Penilaian Kesesuaian Tata Ruang dalam Perizinan, Layanan Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang, Layanan Penyusunan dan Pemutakhiran Peta Rencana Tata Ruang, Layanan Pengelolaan dan Penyajian Informasi Geospasial, Layanan Penyusunan Database Pertanahan dan Tata Ruang Daerah,	Data Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail, Data Pemanfaatan Ruang, Data KKPR dan Rekomendasi Tata Ruang, Data Penilaian Kesesuaian Tata Ruang, Data Pelanggaran dan Pengawasan Tata Ruang, Data Peta Tata Ruang Digital, Data Informasi Geospasial, Data Database Pertanahan dan Tata Ruang, Data Izin Pemanfaatan Ruang Non-Berusaha	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

								Layanan Informasi Pemanfaatan Tanah			
KP-DAA 02.02.14	Metadata Baru (to-be)	Website Pemerintahan			RAA.02 APLIKASI KHUSUS	Laravel	PHP	Layanan Pembuatan Website Pemerintah	Data Pembuatan Website Pemerintah	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAA 02.02.22	Metadata Baru (to-be)	myPOTENSI			RAA.02 APLIKASI KHUSUS	Laravel	PHP	Layanan Pajak PBB dan BPHTB	Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Data Wajib BPHTB, Data Wajib PBB	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Badan Keuangan dan Aset Daerah
KP-DAA 02.01.50	Metadata Baru (to-be)	Dashboard Pimpinan	Dashboard Big Data Pimpinan Daerah		RAA.02 APLIKASI KHUSUS	Laravel	PHP	Layanan Dashboard Pimpinan	Data Dashboard Pimpinan	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Dinas Komunikasi dan Informatika

KP-DAA 01.01.33	Metadata Baru (to-be)	Media Analitik IKPS	Platform Analitik IKPS		RAA.01 APLIKASI UMUM	Laravel	PHP	Layanan Analitik Informasi	Data Analitik Informasi	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
KP-DAA 01.02.54	Metadata Baru (to-be)	BUDAYAKU	Sistem Informasi Data Pokok Kebudayaan Kulon Progo		RAA.01 APLIKASI UMUM	Laravel	PHP	Layanan Pengelolaan Data Pokok Kebudayaan Daerah	Data Pokok Kebudayaan Daerah	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Kebudayaan
KP-DAA 02.02.35	Metadata Baru (to-be)	SIMOBAT	Sistem Informasi Manajamen Obat		RAA.02 APLIKASI KHUSUS	Laravel	PHP	Layanan Pengelolaan Stok Obat	Data Pengelolaan Stok Obat	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	RSUD Nyi Ageng Serang
KP-DAA 02.02.36	Metadata Baru (to-be)	SIMAGENDA	Sistem Informasi Manajemen Agenda Pimpinan Daerah		RAA.02 APLIKASI KHUSUS	Laravel	PHP	Layanan Pengelolaan Agenda Pimpinan	Data Agenda Pimpinan	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Bagian Protokol dan Rumah Tangga
KP-DAA 02.02.37	Metadata Baru (to-be)	SIMKD	Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Dinas Pimpinan Daerah		RAA.02 APLIKASI KHUSUS	Laravel	PHP	Layanan Pengelolaan Kendaraan Dinas Pimpinan Daerah	Data Kendaraan Dinas Pimpinan Daerah	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Bagian Protokol dan Rumah Tangga
KP-DAA 02.01.60	Metadata Upgrade (to-be)	CSRKU	Corporate Social Responsibility Kulon Progo		RAA.02 APLIKASI KHUSUS	Laravel	PHP	Layanan Fasilitasi CSR Perusahaan	Data Fasilitasi CSR Perusahaan	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KP-DAA 02.02.38	Metadata Baru (to-be)	Satu Pintu LabkesKu			RAA.02 APLIKASI KHUSUS	Laravel	PHP	Layanan Pelayanan UPT Lab Kesehatan	Data Hasil Lab Kesehatan	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan

Analisis Diagram Aplikasi Target

Analisa terhadap kondisi aplikasi usulan dapat dijabarkan sebagai berikut:

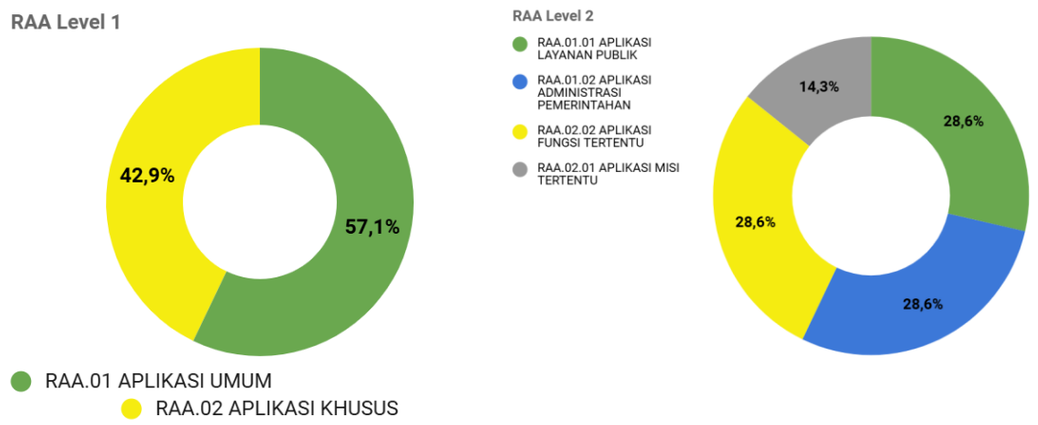

Grafik 2.4.3.2.1. Referensi Arsitektur Aplikasi Nasional

Merujuk pada Grafik 2.4.3.2.1. menunjukkan referensi arsitektur aplikasi usulan pada RAA Level 1 dan RAA Level 2. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sesuai dengan Referensi Arsitektur Nasional Level 1 terdapat 57,1% (16 Aplikasi) merupakan RAA.01 Aplikasi Umum dan 42,9% (12 Aplikasi) merupakan RAA.02 Aplikasi Khusus, selanjutnya Referensi Arsitektur Nasional Level 2 Aplikasi usulan terbagi menjadi 4 yaitu 28,6% (8 Aplikasi) merupakan RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik, 28,6% (8 Aplikasi) merupakan RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan, 28,6% (8 Aplikasi) merupakan RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu, serta 14,3% (4 Aplikasi) merupakan RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu. RAA Nasional didominasi pada RAA.01 Aplikasi Umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis aplikasi diusulkan dominan aplikasi khusus yang menunjang layanan di perangkat daerah.

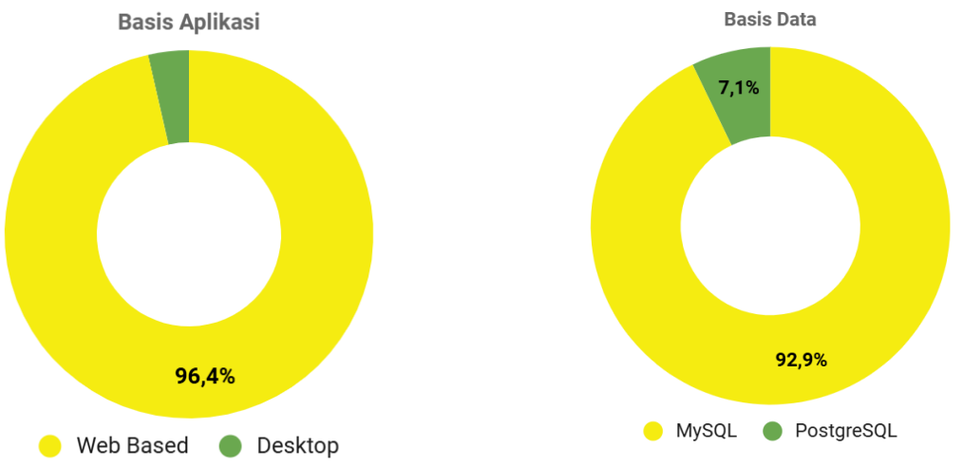

Grafik 2.4.3.2.2. Teknologi Platform Aplikasi Usulan

Berdasarkan basis aplikasi yang digunakan dalam aplikasi usulan 96,4% (27 Aplikasi) merupakan Web Based sedangkan 3,6% (1 Aplikasi) merupakan Desktop, sedangkan basis data yang digunakan dalam aplikasi usulan 92,9% (26 Aplikasi) merupakan MySQL, 7,1% (2 Aplikasi) merupakan PostgreSQL.

Berdasarkan kondisi aplikasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah hampir semuanya berbasis website, karena mudah untuk di akses di berbagai platform, selanjutnya perlu dipastikan jumlah web programmer dapat mengakomodir pengembangan aplikasi tersebut.

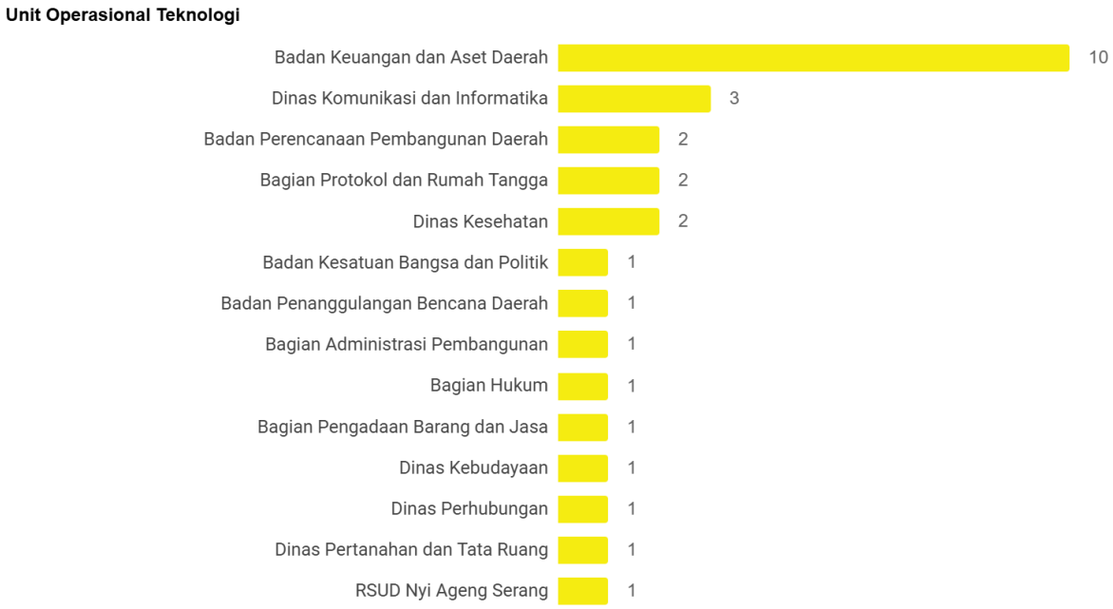

Grafik 2.4.3.2.3. Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi Usulan

Merujuk pada grafik tersebut dapat dilihat Perangkat Daerah yang paling banyak dalam melakukan usulan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan usulan pengembangan 10 Aplikasi. Hal ini perlu dilakukan agar layanan di Perangkat Daerah tersebut bisa terdigitalisasi dan terdapat beberapa Perangkat Daerah yang tidak membutuhkan pengembangan aplikasi untuk 5 tahun kedepan.

2.4.3.1. Analisis *Effort Impact*

Usulan aplikasi yang direkomendasikan dapat dijadikan dasar untuk pengelolaan SPBE yang sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan memberikan arah bagi pengembangan teknologi informasi yang mampu memberikan kontribusi positif bagi penyelesaian berbagai permasalahan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan usulan kebutuhan aplikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk strategi implementasinya dengan pertimbangan arahan strategis dan kapabilitas anggaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Secara umum dalam implementasi perencanaan SPBE kedepan diprioritaskan ke dalam 4 kuadran utama, yaitu: Kuadran 1 (*High Impact-Low Effort*), Kuadran 2 (*High Impact-High Effort*), Kuadran 3 (*Low Impact-Low Effort*), Kuadran 4 (*Low Impact-High Effort*). Prioritas pengembangan aplikasi disusun menggunakan *matriks Effort-Impact*, seperti ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

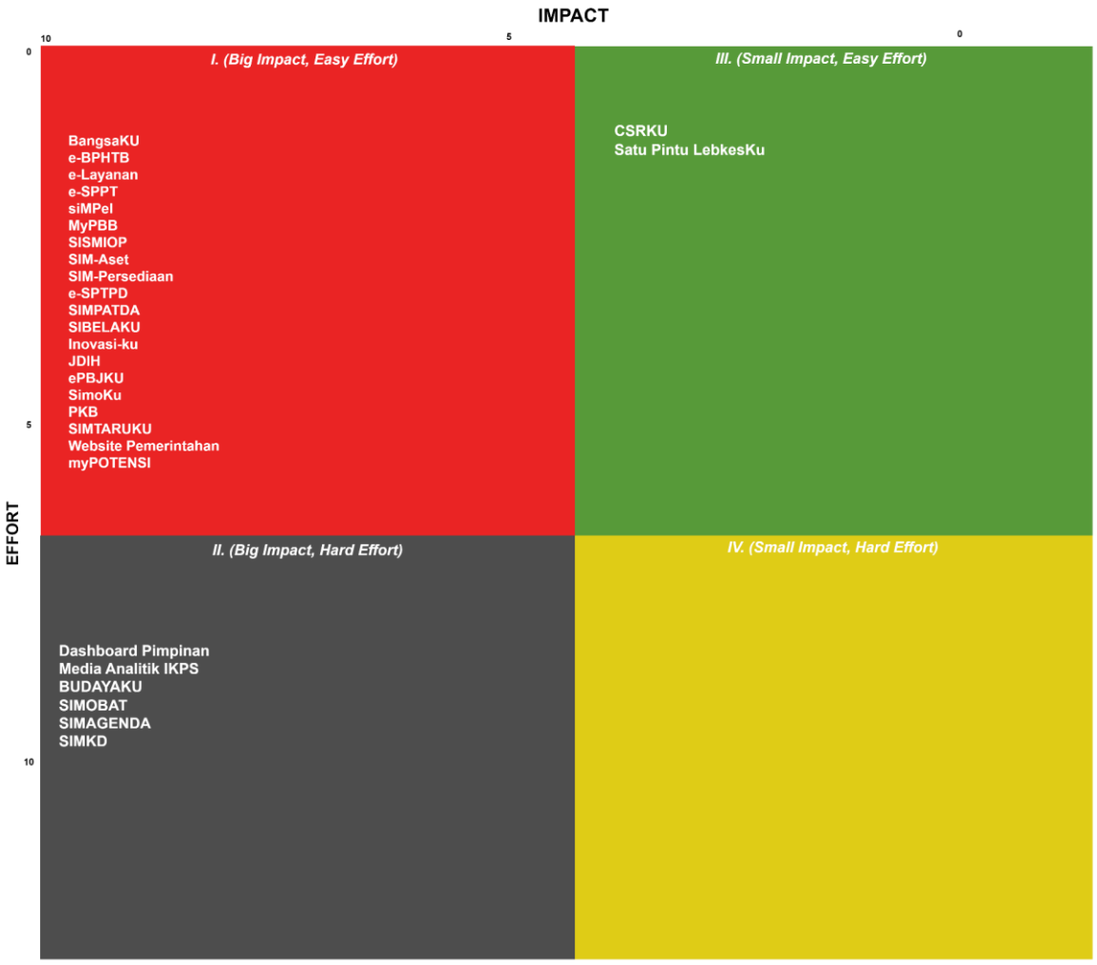

Gambar 2.4.3.3.1. *Matriks Effort-Impact*

2.4.4. Portal Layanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Proses transformasi layanan SPBE merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendigitalkan layanan yang ada untuk mendukung visi, misi dan tujuan SPBE. Portal Layanan Digital Terpadu yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo nantinya mencakup berbagai layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik dimana dalam proses transformasi layanan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pengembangan portal harus se-inline dengan strategi pemerintah dalam mewujudkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga dalam hal ini INA Digital berperan dalam mengakselerasi penggunaan teknologi digital di sektor pemerintahan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan daya saing nasional di era digital.

INA Digital merupakan bagian dari BUMN PERURI, yang mana INA Digital bukanlah sebuah aplikasi, portal, ataupun platform, melainkan penyelenggara ekosistem layanan digital pemerintahan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

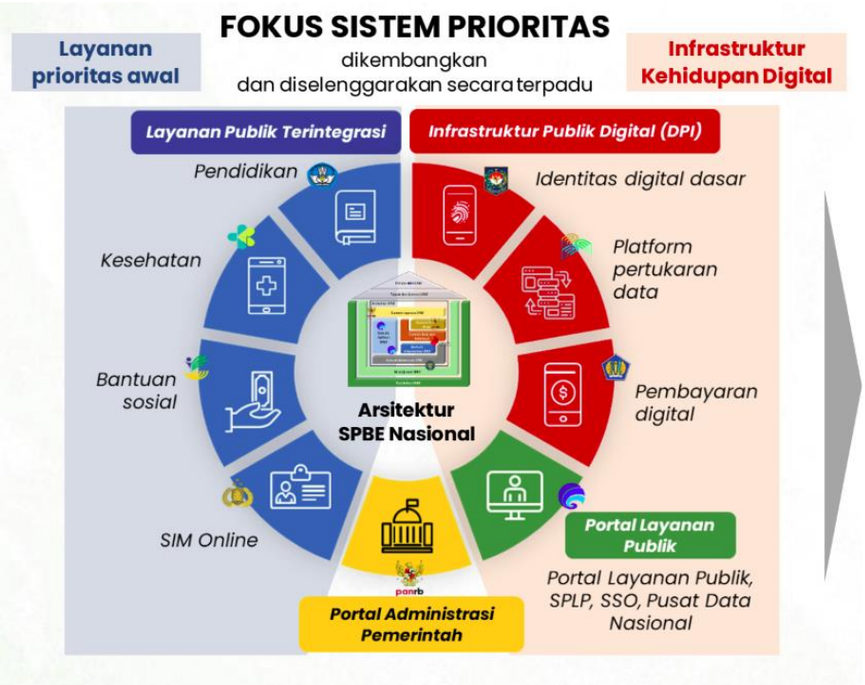

Gambar 2.4.4.1. Portal Layanan Prioritas Nasional

Mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional, INA Digital berperan dalam mengembangkan dan menyelenggarakan sistem prioritas yang mencakup 9 (sembilan) layanan utama. Layanan-layanan tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

a. **Portal Infrastruktur Publik Digital (INA Pas)**, portal yang terdiri atas sistem identitas digital, platform pertukaran data, serta sistem pembayaran digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.

b. **Portal Administrasi Pemerintahan (INA Gov)**, portal yang mendukung tata kelola pemerintahan, meliputi aspek pengelolaan keuangan, perencanaan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, serta layanan internal lainnya guna meningkatkan efektivitas birokrasi.

c. **Portal Layanan Publik Terintegrasi (INA Ku)**, portal yang mencakup berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, layanan administrasi kependudukan, serta layanan perizinan berbasis elektronik, termasuk SIM online. Untuk memastikan keterpaduan layanan, portal ini mengadopsi beberapa komponen utama, yaitu SPLP (Sistem Penghubung Layanan Publik), SSO *(Single Sign-On)*, dan PDN (Pusat Data Nasional).

- SPLP (Sistem Penghubung Layanan Publik)

  SPLP berfungsi sebagai mekanisme interoperabilitas antar layanan publik yang memungkinkan berbagai sistem pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk saling terhubung. Dengan SPLP, setiap instansi dapat berbagi data dan layanan secara efisien tanpa perlu membangun sistem baru secara terpisah, sehingga mengurangi redudansi dan meningkatkan efisiensi layanan.

- SSO *(Single Sign-On)*

  SSO memungkinkan masyarakat dan aparatur sipil negara untuk mengakses berbagai layanan digital dengan satu akun tunggal. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk membuat akun terpisah di setiap platform layanan, sehingga

meningkatkan pengalaman pengguna dan keamanan sistem. Implementasi SSO juga membantu mengurangi risiko keamanan akibat penggunaan kata sandi yang lemah atau berulang.

- PDN (Pusat Data Nasional)

  PDN merupakan infrastruktur utama dalam transformasi digital pemerintahan yang menyediakan layanan komputasi awan (cloud computing) dan penyimpanan data terpusat. Dengan adanya PDN, data layanan publik yang sebelumnya tersebar di berbagai server lokal dapat dikonsolidasikan dalam satu ekosistem yang lebih aman, efisien, dan mudah dikelola. PDN juga memastikan bahwa seluruh layanan digital memiliki standar keamanan dan ketersediaan yang tinggi.

Dengan Adanya Percepatan Transformasi Digital pada Pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib melaksanakan identifikasi portal layanan dan fokus pada 9 Layanan Prioritas. Pemerintah Daerah wajib memetakan terkait digitalisasi tersebut, Banyak manfaat yang akan diterima oleh pemerintah daerah, dengan adanya pengembangan portal layanan pengingat pengguna harus membuka laman *web* dan akun login yang begitu banyak. Dengan adanya portal layanan yang mengumpulkan berbagai layanan digital, memudahkan masyarakat dan juga ASN Internal untuk mengakses berbagai layanan hanya dalam satu portal saja. Gambar dibawah merupakan portal layanan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dapat dibuat untuk menyatukan berbagai layanan yang sudah terintegrasi.

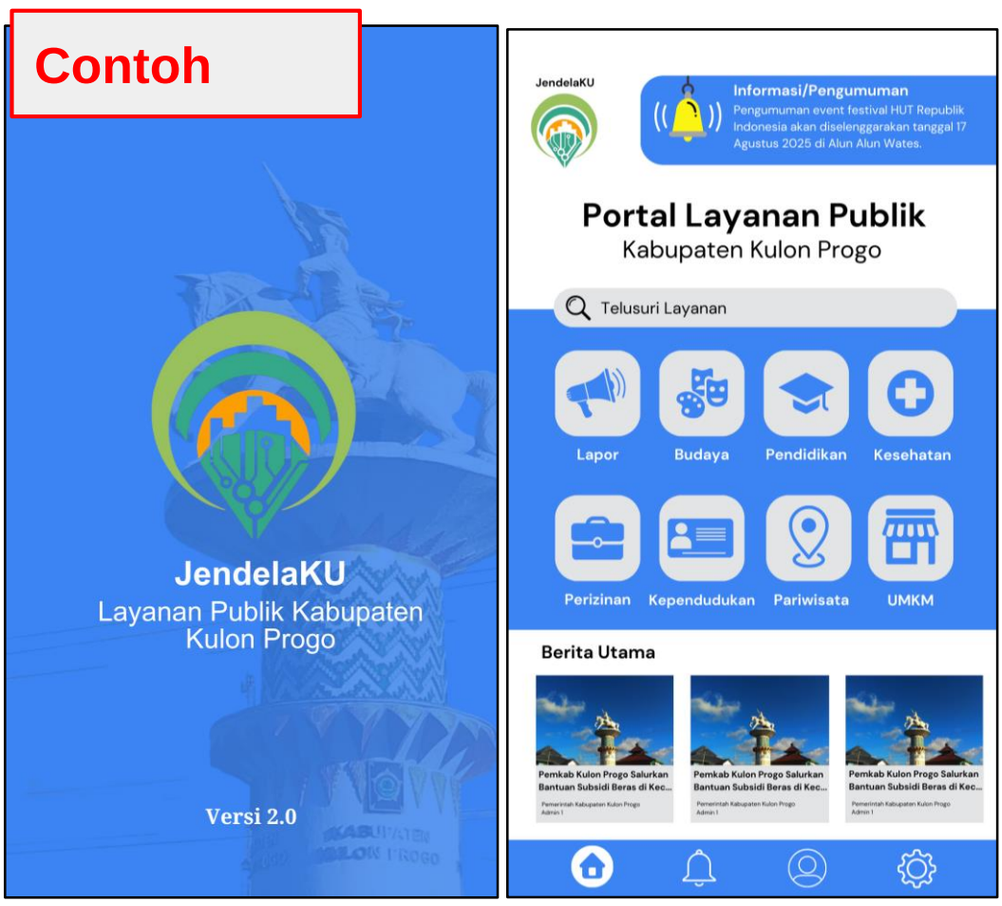

Gambar 2.4.4.2. Aplikasi JendelaKU (Contoh)

Tabel 2.4.4.3.. Daftar Layanan JendelaKU (Contoh)

#	Layanan	Sub Layanan	Aplikasi
	Layanan Publik		
1	Administrasi Kependudukan	Pembuatan KTP-el	LakonKU
		Kartu Keluarga	LakonKU
		Akta Kelahiran	LakonKU
		Akta Kematian	LakonKU
		Surat Pindah Domisili	LakonKU
		Statistik Kependudukan	SIDUTAKU
2	Perizinan & Non Perizinan	PBG (IMB)	SIMBG
		RBA	OSS RBA
		Non RBA	SICANTIK
		Pelayanan Perizinan	-
		Mall Pelayanan Publik	-
3	Pajak Daerah & Retribusi	PBB	e-Layanan MyPBB
		BPHTB	e-Layanan e-BPHTB
		Pajak Daerah Lainnya	e-Layanan
		Retribusi Daerah	e-SPTPD
4	Kesehatan Masyarakat	Pendaftaran BPJS	e-KLAIM
		Jadwal Dokter	-
		Layanan Pasien	-
5	Pendidikan & Beasiswa	Pendaftaran Sekolah	SPMB
		Beasiswa Daerah	SIPINTAR
		Sertifikat Pendidikan Non Formal	-
6	Ketenagakerjaan	Kartu Kuning AK1	SIAP KERJA
		Pendaftaran Job Fair	SIAP KERJA
		Portal Pelatihan Ketenagakerjaan	SIAP KERJA
7	UMKM	Fasilitasi UMKM	SIBAKUL
		Sertifikasi Profesi	-
8	Sosial & Bantuan Masyarakat	PKH	SIKS-NG

		Bantuan Sembako	-
		Bantuan Disabilitas	-
		Bantuan Kemiskinan	-
9	Pengaduan & Aspirasi Masyarakat	Pengaduan Umum	SP4N Lapor!
		Pengaduan Daerah	-
10	Transportasi & Perhubungan	CCTV Online	CCTV Kulon Progo
		Uji KIR	PKB
11	Layanan Hukum	Konsultasi Hukum Gratis	-
12	Investasi & Ekonomi Daerah	Portal Investasi	-
		Katalog Produk UMKM	SIBAKUL
		Fasilitasi Investor	-
13	Dashboard Kinerja Daerah	Dashboard RPJMD	-
		Dashboard Anggaran	-
		Capaian Smart City	-
14	Open Data & Satu Data Daerah	Dataset Statistik Terbuka	Satu Data Kulon Progo
		Dataset Geospasial	Geoportal Kulon Progo
15	AI Chatbot & Asisten Digital	Chatbot Layanan Publik	-
		Chatbot Pengaduan Masyarakat	-
16	Layanan Aplikasi Mobile Pemerintah	QRIS Daerah	-
		e-Signature Daerah	-
17	Layanan Informasi Daerah	Berita dan Informasi	Website Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo
		PPID	PPID Kabupaten Kulon Progo
		SKM	SKMKU
		Pariwisata Daerah	Sambanggo
		Streaming	
Layanan Administrasi Pemerintahan			
1	Administrasi Persuratan & Arsip	Arsip Statis	SIKN
		Manajemen Surat Masuk/Keluar	SRIKANDI
2	Administrasi Kepegawaian	Kinerja Pegawai	SIMASNEG
		Presensi	e-PRESENSI PRISCILA
		Kompetensi ASN	SIDIK
		KGB	SIMASNEG
		Cuti Online	SIMASNEG
3	Pengelolaan Keuangan &	Penganggaran	SIPD RI

	Anggaran		SIKD
		Penatausahaan	SIPD
4	Perencanaan & Evaluasi	Perencanaan	SIPD
		Monitoring & Evaluasi Pembangunan	Monev-ku
5	Evaluasi Kelembagaan	Akuntabilitas Kinerja	ESR Menpan
6	Pengadaan Barang & Jasa	e-Procurement (LPSE)	SPSE Kabupaten Kulon Progo
		e-Catalog Daerah	INAPROC
7	Pengelolaan Aset & Inventaris	Perencanaan Aset	SIM-Aset
		Inventarisasi Aset	SIM-Aset
8	Layanan TIK & Keamanan Informasi	Helpdesk TIK Internal	-
		Pengajuan VPN, VPS, Email	-
9	Pengelolaan Data & Statistik	Satu Data Internal	Satu Data Kulon Progo
		Portal Statistik OPD	Satu Data Kulon Progo
		Data Warehouse	-
10	Kolaborasi & Knowledge Management	Portal Knowledge Sharing	-
		Forum Diskusi Internal	-
		e-Library	iKulonprogo
11	Layanan Hukum & Regulasi	Portal SOP, SK, Perda, Perbup Internal	JDIH
		Konsultasi Hukum OPD	-
12	Inovasi & Smart Office	Dashboard Kinerja Pegawai	-
		Portal Inovasi Daerah	-
13	Layanan Pengaduan & Permintaan Internal	Ticketing Helpdesk Internal	-
		Permintaan Logistik	-
		Permintaan Perbaikan Fasilitas	-

JendelaKU perlu dikembangkan secara bertahap dan dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Pengembangan JendelaKU disesuaikan dengan dependensi dari berbagai aplikasi yang sudah ada. Selain itu dalam proses perancangan, desain ini harus disusun prioritas berdasarkan dari analisis kompleksitas data dan fitur di masing-masing layanan. Pengembangan tahap pertama dimulai dengan mengembangan *platform* dasar portal layanan. Tahap kedua mengintegrasikan layanan digital yang sudah didukung dengan *API*. Tahap ketiga membuat *API* dari layanan digital yang belum didukung dengan *API*. Tahap keempat terus melakukan *continous improvement* dengan melakukan penambahan layanan-layanan baru yang dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

JendelaKU berperan sebagai aplikasi satelit *(satellite app)/aggregator* guna memindahkan *user interface* di sisi pengguna yang ada di masing-masing aplikasi utama (*main apps*) ke dalam portal. Portal tersebut menggunakan teknologi *Single Sign On* (SSO) seperti: *Lightweight Directory Access Protocol* (LDAP)/*Keycloak* agar memudahkan pengguna yang terbagi menjadi 4 (empat) *roles*: admin, ASN Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, warga Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan warga non Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dijelaskan pada gambar dibawah ini :

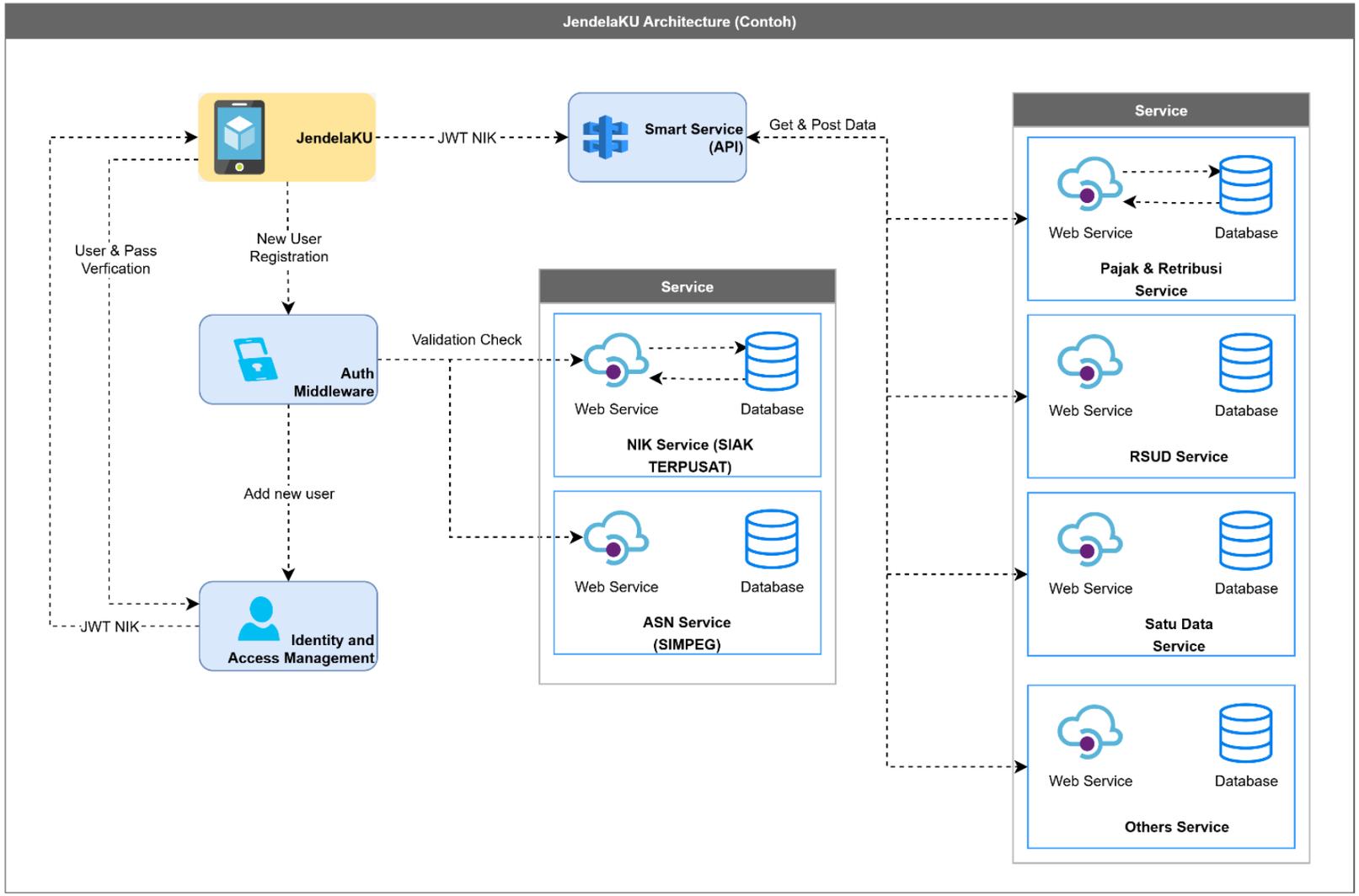

Gambar 2.4.4.4. Arsitektur JendelaKU (Contoh)

2.4.5. Master Slave Database Arsitektur

Dalam pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengelolaan basis data merupakan salah satu aspek yang sangat krusial karena menyangkut keberlangsungan layanan publik, keamanan informasi, serta integritas data yang digunakan dalam proses administrasi negara. Basis data berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi yang mengelola seluruh transaksi dan interaksi antara sistem dengan pengguna, baik dari sisi internal pemerintah maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan strategi arsitektur basis data yang tidak hanya mampu mendukung kinerja tinggi, tetapi juga menjamin skalabilitas dan keandalan layanan.

Salah satu arsitektur yang banyak diterapkan adalah Master-Slave Database Architecture. Pada arsitektur ini terdapat satu server utama yang disebut master database dan satu atau lebih server pendukung yang disebut slave database. Master database bertugas menangani seluruh operasi penulisan data (write operations), seperti input data kependudukan, pencatatan transaksi pelayanan publik, maupun perubahan data administratif. Sementara itu, slave database difokuskan untuk menangani operasi pembacaan data (read operations), misalnya ketika pengguna aplikasi melakukan pencarian informasi, menampilkan laporan, hingga mendukung analisis data.

Dengan cara ini, beban kerja database dapat dibagi dengan jelas:

- Master fokus pada keakuratan dan konsistensi data yang baru dimasukkan.
- Slave memastikan akses data menjadi lebih cepat, efisien, dan dapat melayani banyak pengguna sekaligus.

Pembagian peran ini memungkinkan terwujudnya efisiensi kinerja sistem. Master database dapat lebih fokus dalam menjaga konsistensi dan keakuratan data baru, sedangkan slave database mengoptimalkan kecepatan akses data, sehingga mampu melayani jumlah pengguna yang besar secara bersamaan. Dengan cara ini, beban kerja server dapat tersebar secara lebih seimbang dan risiko penurunan performa sistem akibat permintaan pengguna yang tinggi dapat diminimalkan.

Selain untuk mengoptimalkan performa, arsitektur master-slave juga memiliki kontribusi penting dalam mendukung kehandalan layanan (service reliability). Jika salah satu slave mengalami gangguan, sistem tetap dapat berjalan dengan memanfaatkan slave lain atau langsung mengakses master database. Lebih jauh lagi, slave database sering difungsikan sebagai media replikasi data yang dapat dijadikan cadangan (*backup*) dalam mendukung skenario Disaster Recovery Plan (DRP). Dengan demikian, arsitektur ini tidak hanya memberikan manfaat teknis, tetapi juga menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kontinuitas layanan publik berbasis digital.

Namun demikian, penerapan master-slave database bukan tanpa kelemahan. Tantangan utama dari arsitektur ini adalah adanya *single point of failure* pada master database. Jika master mengalami kegagalan, maka seluruh proses penulisan data akan terhenti meskipun proses pembacaan masih dapat dilayani oleh slave. Kondisi ini dapat berimplikasi serius terhadap pelayanan publik yang membutuhkan pencatatan data secara real-time. Oleh sebab itu, mekanisme failover, sistem replikasi yang lebih canggih, atau penerapan arsitektur modern seperti multi-master cluster perlu disiapkan untuk memastikan ketersediaan layanan tetap terjamin.

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan tantangan tersebut, Master-Slave Database Architecture dapat dikategorikan sebagai salah satu best practice dalam pembangunan infrastruktur basis data SPBE. Arsitektur ini tidak hanya mendukung peningkatan kinerja dan skalabilitas, tetapi juga memperkuat aspek keandalan serta kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai skenario gangguan layanan. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi arsitektur ini akan memberikan dampak positif dalam bentuk layanan digital pemerintahan yang lebih responsif, aman, dan dapat diandalkan oleh masyarakat luas.

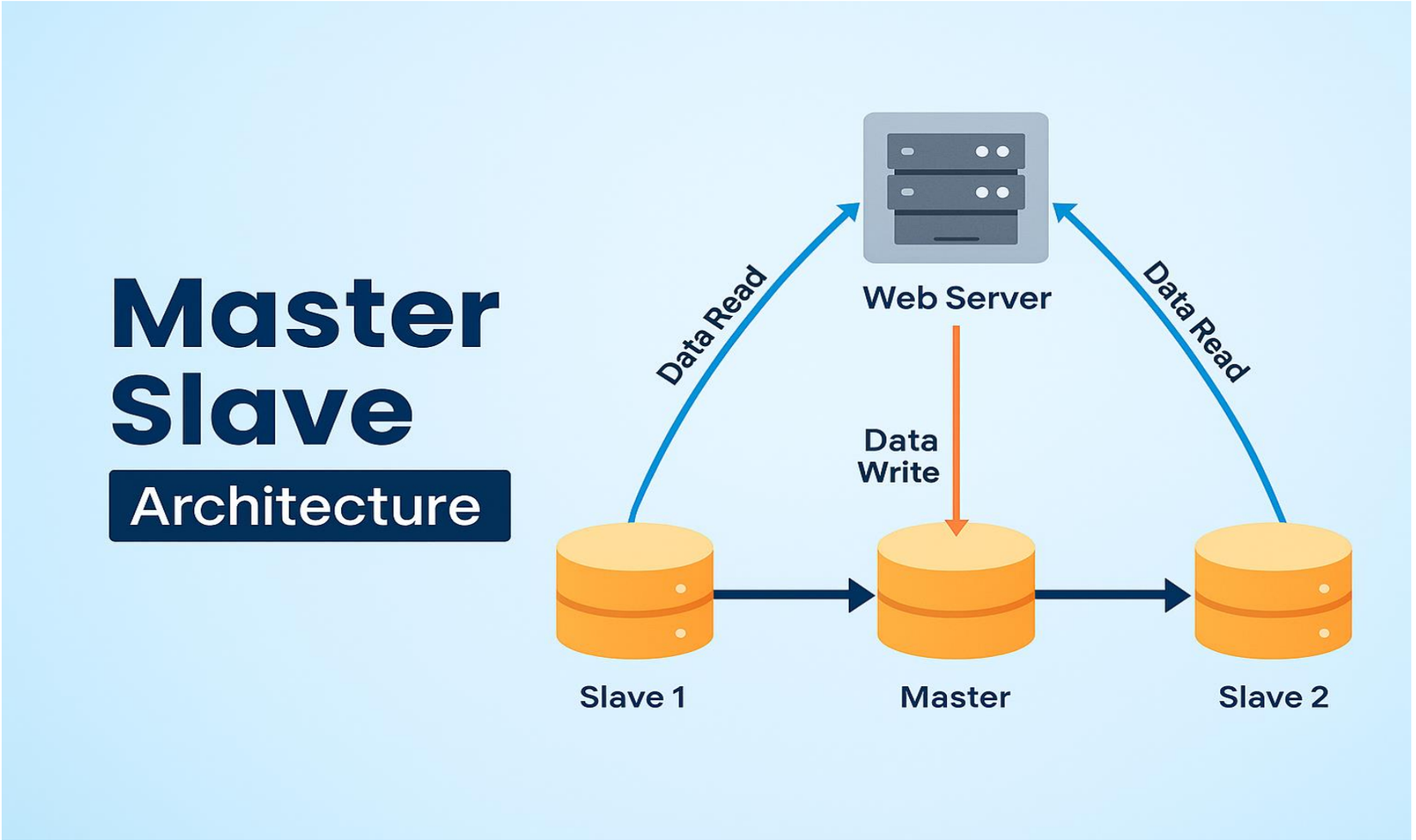

Gambar 2.4.5.1. Master Slave Database Arsitektur

2.3. Arsitektur Infrastruktur dan Keamanan Target

2.5.1. Tren Teknologi dan Praktek Terbaik (*Best Practice*)

2.5.1.1. Teknologi Virtualisasi

Virtualisasi merupakan pembagian pusat data fisik menjadi beberapa *virtual* pusat data yang lebih kecil dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan *resource* pusat data fisik. Dalam virtualisasi pusat data, *resource* dari pusat data fisik disembunyikan dari pengguna virtual pusat data, dan hanya admin yang bisa melihat *resource* asli dari pusat data fisik. Perbedaan arsitektur pusat data modern dengan pust data tradisional (lama) adalah virtualisasi pusat data menggunakan *hypervisor* yang digunakan untuk membagi *resource* pusat data fisik ke dalam banyak *Virtual Environment* (VE) atau yang sering disebut *Virtual Private pusat data* (VPS), *Guests*, *Instance*, *Container* atau *Emulation*.

Sebuah server fisik bisa dibuat banyak virtual pusat data, *VPS*, *host* dengan spesifikasi *hardware* yang bisa ditentukan (asal tidak melebihi *resource* fisik) mulai dari jumlah c*ore CPU, RAM, Network Interface, Storage, BIOS* dll. Dengan menggunakan teknologi virtualisasi *resource* pusat data fisik dapat dimanfaatkan secara optimal karena kita bisa meng-*install* beberapa sistem operasi yang akan dikonfigurasi menjadi pusat data sesuai kebutuhan tanpa membeli *hardware* baru.

Agar dapat mendukung implementasi virtualisasi pusat data, *CPU* dari sebuah pusat data harus mendukung teknologi virtualisasi, dan *hardware* saat ini sudah mendukung teknologi virtualisasi bahkan untuk komputer biasa pun sudah mendukung teknologi virtualisasi. Pada teknologi virtualisasi, sebuah pusat data dipecah ke dalam *virtual environment* dan setiap *virtual environment* dapat di-*install* sistem operasi yang berbeda dari sistem operasi pusat data fisik atau sistem operasi dari *virtual environment* lainnya. Ketika v*irtual environment* berjalan *resource* yang digunakan tidak dapat diidentifikasi sehingga dalam teknologi virtualisasi diperlukan sebuah *Hypervisor* yang mengkoordinasi komunikasi dan instruksi antara *virtual environment* dengan *resource* fisik/*physical resource*. *Hypervisor* inilah yang dipegang oleh administrator dari sebuah pusat data yang mengimplementasikan teknologi virtualisasi untuk mengatur *virtual environment*.

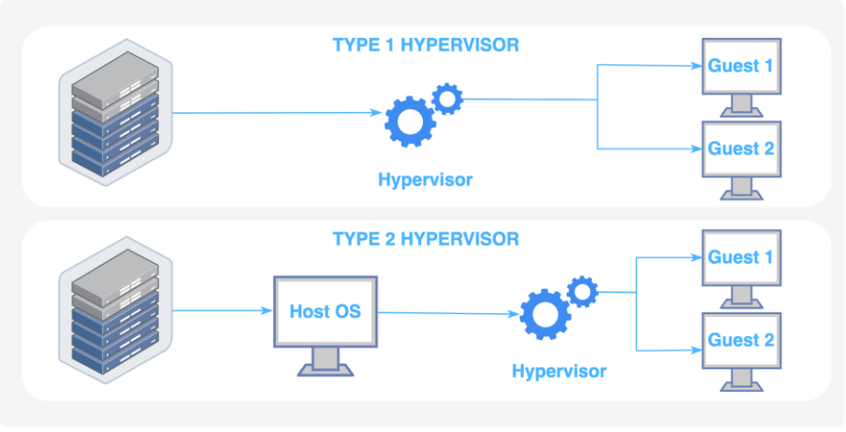

Gambar 2.5.1.1.1 Dua Jenis *Hypervisor*

Terdapat 2 jenis h*ypervisor* dalam dunia virtualisasi saat ini:

- *Hypervisor Type 1 (Bare Metal Hypervisor)*

Hypervisor ini mengakses langsung *hardware* fisik tanpa bantuan sistem operasi, dan biasanya untuk menggunakan *hypervisor* tipe 1 kita harus menginstall *hypervisor* sebagai sistem operasi bukan diinstall dalam sistem operasi. Contoh *Hypervisor* Type 1 diantaranya: KVM, *Red hat Enterprise Virtualisation (RHEV), XEN/Citrix* Xenpusat data, *Hyper-V,V Mware vSphere/ESXi*.

- *Hypervisor Tipe 2 (Hosted Hypervisor)*

  Jenis *hypervisor* ini memerlukan sistem operasi untuk berjalan, karena jenis *hyper visor* ini berjalan di atas sistem operasi. Contoh *Hypervisor Type 2 d*iantaranya: *Vmware Work station, VMware Player*, dan *Virtualbox*.

Perkembangan implementasi dari teknologi virtualisasi meliputi pusat data, *storage*, DC dan DRC, serta perkembangan terakhir yakni *container*.

1. Virtualisasi pusat data

   Adalah penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan untuk memecah *resource* fisik pusat data kedalam beberapa virtual pusat data yang nantinya akan diinstall berbagai macam sistem operasi sesuai kebutuhan atau bisa juga virtual pusat data ini dijual/disewakan oleh pihak *hosting*. Kita sering mendengarnya dengan istilah VPS (*Virtual Private pusat data*) *hosting*.

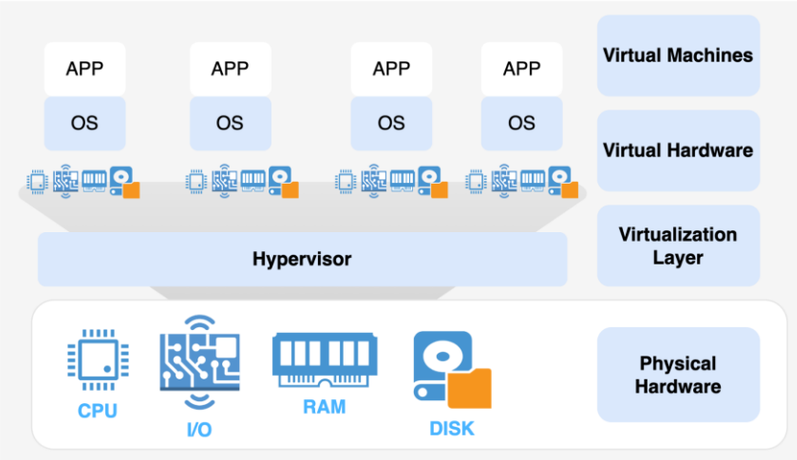

Gambar 2.5.1.1.2. Lapisan-lapisan Teknologi Virtualisasi pusat data

Virtualisasi pusat data adalah melakukan konsolidasi dan melakukan pengurangan jumlah pusat data dalam bentuk fisik, dengan menciptakan mesin virtual dalam jumlah banyak yang ditempatkan di beberapa *host* fisik, menggunakan *storage* dan jaringan.

Virtualisasi memudahkan dalam perancangan pusat data dengan tingkat ketersediaan yang tinggi (*high-availability*) dengan teknik *clustering*, redudansi, dan replikasi.

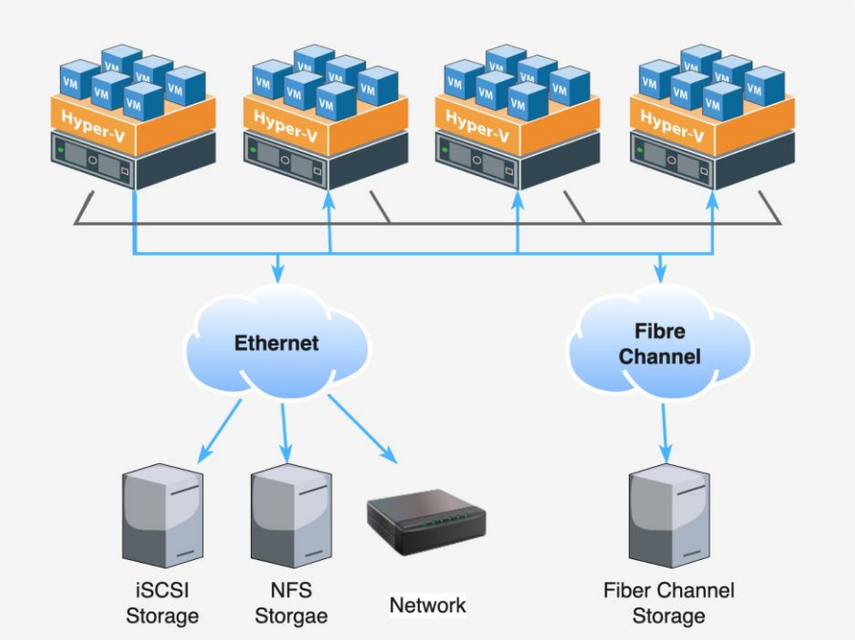

Gambar 2.5.1.1.3 Topologi *Virtualisasi Pusat Data* dan *Storage* di Pusat Data

2. *Virtualisasi Storage*

Virtualisasi storage menyediakan media penyimpan (*storage*) yang terisolasi (terpisah dari *resource* fisik), aman dan mudah dalam *failover* dan *backup*. Salah satu contoh implementasi virtualisasi *storage* yang gampang kita lihat adalah fasilitas *cloud storage*, seperti: *DropBox* dan *Google drive* yang menyediakan/menyewakan *cloud storage* bagi pelanggannya dengan menawarkan *flexibilitas* dimana pengguna bisa mengakses *storage* kapanpun dan dimanapun.

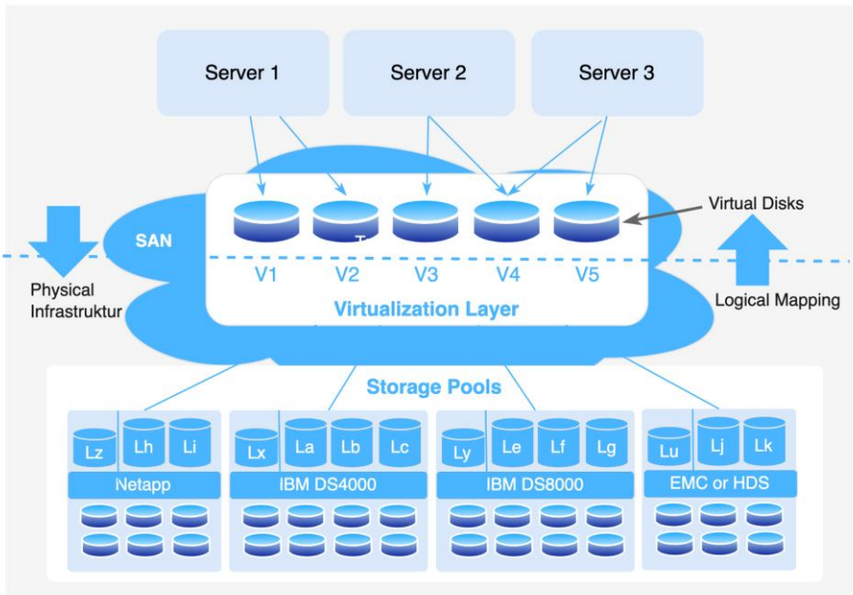

Gambar 2.5.1.1.4 *Virtualisasi Storage*

3. Virtualisasi *DC-DRC*

Penggunaan teknologi virtualisasi di pusat data dan *DRC* akan memudahkan dalam proses *backup*, replikasi, dan migrasi pusat data dan aplikasi. Virtualisasi juga memudahkan dalam melakukan *scale-up* atau *scale-down* pusat data sesuai dengan kebutuhan bisnis.

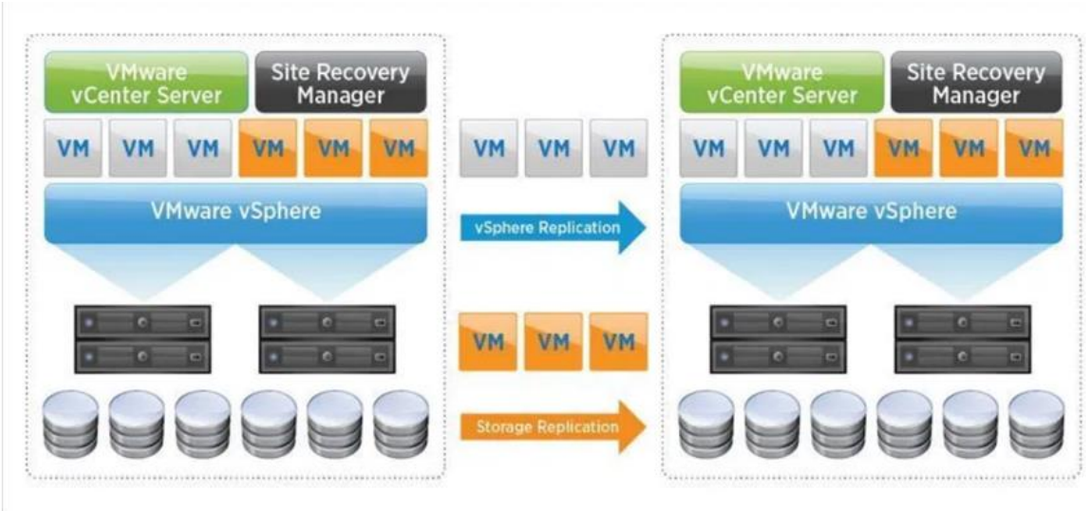

Gambar 2.5.1.1.5 Replikasi Pusat Data dengan Teknologi *Virtualisasi*

4. *Container*

Perkembangan dari teknologi virtualisasi yakni *container* yang menyatukan aplikasi dengan dependensinya sehingga dapat memberikan sistem yang terisolasi (*isolated environment*) pada level *OS* yang dijalankan pada satu induk *linux kernel (host).* Teknologi *container* merubah cara mengembangkan, mendistribusikan dan menyebarkan perangkat lunak.

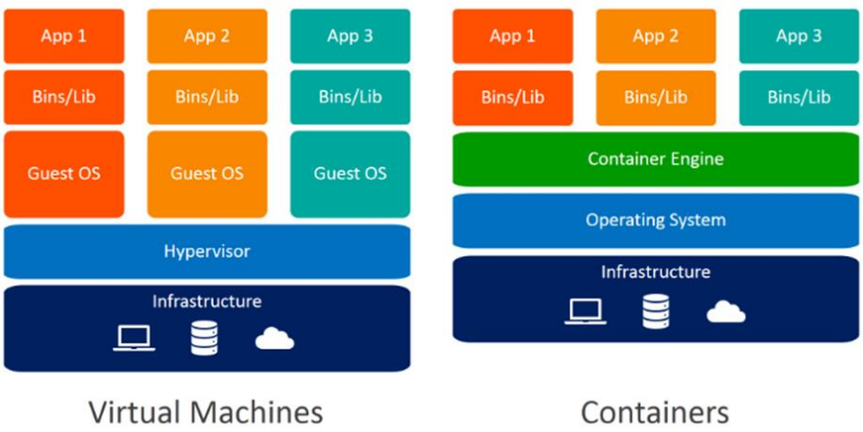

Gambar 2.5.1.1.6 Perbandingan Teknologi *Virtual Machines* dan *Containers*

Saat ini terdapat 2 jenis *container* yang umum dapat kita pergunakan, yaitu:

a. *Container* berbasis sistem operasi (*OS Container*), yakni *container* yang memberikan isolasi pada level sistem operasi dan memanfaatkan kernel yang sama dari suatu induk, contohnya adalah L*XC, OpenVZ, Linux Vpusat data, BSD Jails* and *Solaris zones*.
b. *Container* berbasis aplikasi (*Application Container*), yakni *container* yang memberikan isolasi pada level aplikasi dengan memanfaatkan beberapa komponen yang ada pada sistem operasi induk, serta beberapa komponen pada *container-container* lain yang menjadi basis dari berjalannya sebuah aplikasi, contohnya adalah *Docker* dan *Rocket* (rkt).

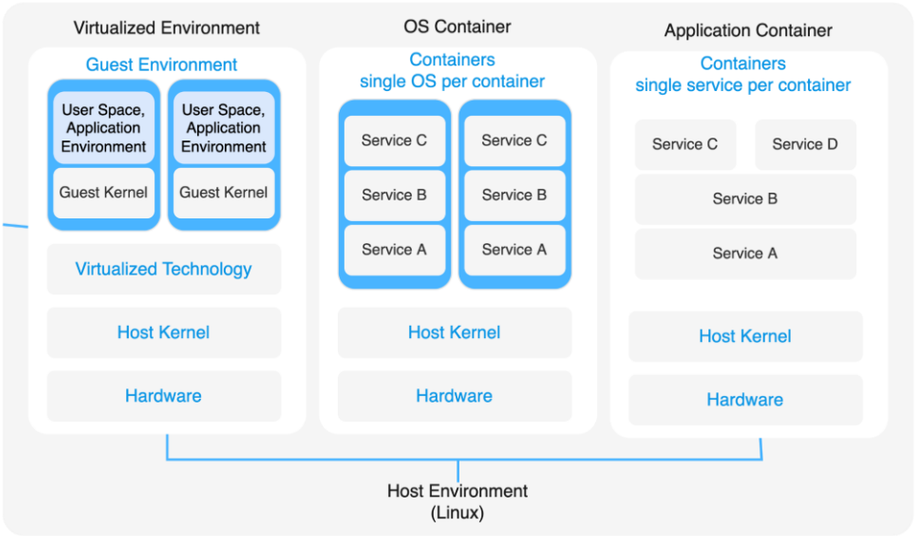

Gambar 2.5.1.1.7 Perbandingan Teknologi *Virtualisasi* dan *Container*
(sumber:*https://blog.andi.dirgantara.co/teknologi-kontainer-pengantar-pengenalan-docker-706eafe03269)*

Penggunaan teknologi *container* mempunyai banyak keuntungan, antara lain:

a. Ringan

Container menyediakan virtualisasi yang berbeda konsep dengan virtualisasi perangkat keras yang tersedia di mesin virtual (*Virtual Machine*). Menggunakan *host* dan kernel yang sama *container* berbagi manajemen memori, *management* proses, I/O dll, sementara proses pada tiap *container* terisolasi dan mempunyai dependensi terpisah.

b. Kinerja Maksimal

Karena *container* dikelola pada *host* yang sama, proses pada *container* dijalankan dengan kinerja sama seperti *host*, setiap proses yang dijalankan dalam container sebenarnya adalah proses dalam *host* yang di isolasi.

c. Konsumsi Sumber Daya Lebih Rendah

Karena *container* tidak membutuhkan virtualisasi perangkat keras yang penuh, satu host dapat mempunyai banyak *container* dibanding VM.

d. Cepat

Proses perjalanan penyalaan *server* (*booting)* dalam *container* hampir sama dengan proses *booting* pada *host*, dibanding *virtual machine* yang menjalankan proses tunggal namun harus melakukan *booting* pada sistem operasi secara penuh.

2.5.1.2. DevOps

1. Pengertian

DevOps adalah kombinasi dari budaya, praktik, dan alat untuk meningkatkan kemampuan sebuah perusahaan agar proses *delivery* aplikasi dapat dilakukan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada proses pengembangan aplikasi secara tradisional. Sesuai dengan namanya, istilah *DevOps* adalah gabungan dari kata *Development* dan *Operations*. Jadi secara garis besar metodologi *DevOps* akan menguraikan proses pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang berkualitas tinggi dengan mengotomatiskan dan mengintegrasikan aktivitas dari tim *Development* (pengembang) dan tim *IT Operations* (operasi). Di bawah model *DevOps* ini, tim pengembang dan operasi akan bekerja bersama di seluruh tahapan daur hidup pengembangan aplikasi (*software*

development life cycle) untuk menghasilkan produk digital yang berkualitas secara efektif dan efisien.

2. Tujuan dan Manfaat

DevOps dirancang untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi yakni kecepatan dalam pemenuhan permintaan klien, dan faktor keamanan yang kadang diabaikan, dengan cara mengintegrasikan semua orang yang terkait dengan *software development* dan *deployment* baik itu *business users, developers, test engineers, security engineers, system administrators*, dan lain-lain. Tim ini akan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan fokus utama yaitu *delivery* produk/*software* berkualitas tinggi yang dapat memenuhi semua user requirements namun tetap mampu menjaga integritas dan stabilitas seluruh sistem. Berikut ini beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan yang telah mengimplementasikan *DevOps*:

A. Perusahaan dapat bergerak dengan cepat

Praktik *DevOps* memungkinkan perusahaan dapat bergerak cepat dalam berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Dengan demikian, praktik ini mampu mendorong bisnis agar bisa berkembang dengan cepat.

B. Delivery yang cepat

Praktik *DevOps* dapat membantu perusahaan untuk dapat merilis produk dengan waktu yang lebih cepat. Dengan cara ini, perusahaan memiliki peluang untuk bisa lebih unggul dari kompetitor.

C. Keandalan

DevOps bekerja seperti pada praktik *CI/CD* (*Continuous Integration*/*Continuous Delivery*) yang dapat membantu tim memastikan bahwa produk yang dikembangkan memiliki kualitas yang tinggi. Di sisi lain, tim juga dapat mengirim produk yang andal dengan kecepatan tinggi.

D. Kolaborasi tim yang lebih baik

Di bawah model *DevOps*, tim pengembang dan tim operasi akan berkolaborasi, berbagi tanggung jawab, dan menggabungkan alur kerja mereka. Cara ini dapat membantu tim untuk bekerja secara efektif dan efisien.

E. Aman

Tim dapat mengadopsi model *DevOps* tanpa perlu mengorbankan keamanan dengan menggunakan alat pengujian keamanan terintegrasi dan otomatis.

3. DevOps Pipeline

Pipeline DevOps adalah sekumpulan proses yang memungkinkan tim *developer* dan tim *IT operations* dapat bekerja sama untuk membangun dan menerapkan kode ke lingkungan produksi (*production environment*). Secara garis besar fase D*evOps pipeline* meliputi:

A. Plan

Fase ini melibatkan perencanaan untuk seluruh alur kerja yang dibutuhkan sebelum tim pengembang mulai menulis kode. Dalam tahap ini, manajer produk dan manajer proyek akan memainkan peran penting. Mereka akan bekerjasama untuk mengumpulkan *requirements* dan *feedback* dari klien ataupun *stakeholders*. Informasi tersebut kemudian akan dikumpulkan untuk membangun lini masa produk untuk memandu proses pengembangan yang akan dilakukan.

B. *Code*

Setelah rencana dibuat, tim *developer* dapat mulai menulis kode yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk. Tim *developer* biasanya akan menggunakan seperangkat *plugin* standar yang dipasang di lingkungan pengembangan mereka untuk membantu proses pengembangan, membantu menerapkan gaya kode yang konsisten, serta menghindari kelemahan keamanan umum dan anti-*pattern*.

C. *Build*

Setelah tim *developer* selesai menulis kode yang dibutuhkan, mereka akan memasukan kode tersebut ke dalam *shared code repository*.*Developer* akan mengirimkan *pull request*, setelah *developer* yang lain akan mereview perubahan yang telah dilakukan. Jika kode tidak memiliki masalah, maka *developer* tersebut akan menyetujui *pull request* yang telah dikirim sebelumnya.

D. *Test*

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian. Jika ada masalah yang ditemukan pada fase ini, maka masalah tersebut akan dikirim kembali ke tim developer untuk diselesaikan.

E. *Release*

Fase *release* menjadi tonggak penting dalam *DevOps pipeline*. Pada tahap ini, setiap perubahan kode telah melewati serangkaian pengujian dan tim *IT operations* telah memastikan bahwa masalah yang merusak dan regresi sudah teratasi dengan baik.

F. *Deploy*

Tahap selanjutnya adalah deployment. Setelah *production environment* dibuat dan dikonfigurasi maka versi terakhir dari pengembangan yang telah dilakukan akan diterapkan.

G. Monitor

Pada tahap terakhir ini, tim *IT operations* akan terus bekerja keras untuk memantau infrastruktur, sistem, dan aplikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau aplikasi yang dikembangkan dapat berjalan dengan lancar. Mereka juga mengumpulkan data-data penting dari log, analitik, sistem monitoring, serta melihat *feedback* dari pengguna untuk mengetahui jika ada masalah pada kinerja aplikasi.

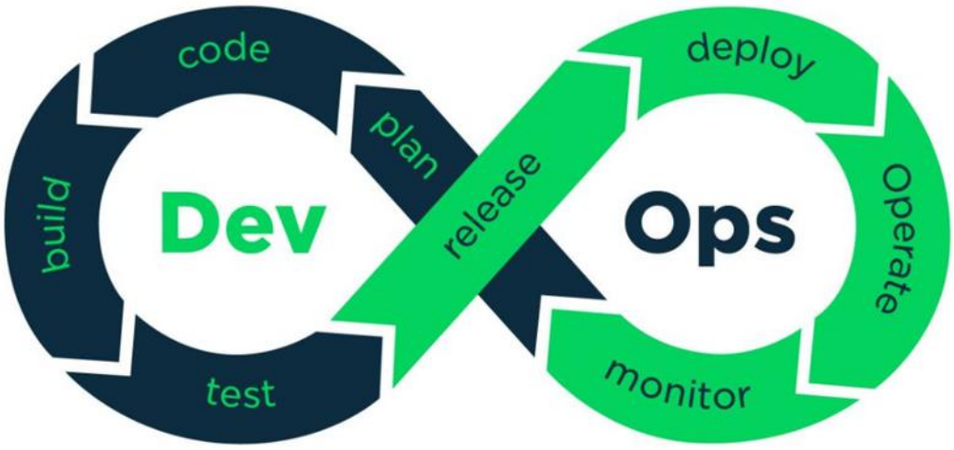

Gambar 2.5.1.2.1. *DevOps Pipeline* (Sumber: blog.isostech.com)

4. Praktik Terbaik untuk *DevOps* yang Efektif

Untuk menjalankan *DevOps* secara efektif terdapat beberapa praktik yang dapat diterapkan, yaitu:

1. *Continuous Integration* (CI)

   Continuous Integration adalah praktik dalam *software development* dimana tim developer akan secara rutin menggabungkan pembaruan kode ke dalam *central repository*. Tujuan utama dari *CI* adalah menemukan dan mengatasi *bug* lebih cepat, meningkatkan kualitas perangkat lunak, dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memvalidasi dan merilis pembaruan perangkat lunak yang baru.

2. *Continuous Delivery* (CD)

   Continuous Delivery adalah praktik dalam *software development* yang memastikan bahwa kode selalu dalam status "*deployable*". Artinya, setiap perubahan yang ada di dalam kode seperti penambahan fitur, perbaikan *bug*, perubahan konfigurasi, atau yang lain, akan selalu siap untuk diterapkan ke dalam *production environment* atau bahkan ke tangan *user* dengan cepat, aman, dan berkelanjutan.

3. *Microservices*

   Microservice adalah gaya arsitektur yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan aplikasi yang kompleks. Implementasi arsitektur ini memungkinkan aplikasi yang sedang dikembangkan menjadi sangat mudah dipelihara dan "*testable*".

4. *Infrastructure as Code* (IaC)

Infrastructure as Code adalah sebuah pendekatan untuk mengelola *data center server, storage*, dan infrastruktur jaringan. *IaC* digunakan untuk menyederhanakan konfigurasi dan manajemen skala besar secara signifikan.

5. *Monitoring* dan *logging*

Monitoring dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan cepat sehingga dapat mencegah munculnya masalah lain yang lebih besar. Dengan cara ini, tim mampu mengukur kinerja aplikasi/*software* dan memastikan sistem tetap bekerja secara stabil.

Selain itu, tim juga akan menganalisis *log* yang dihasilkan oleh aplikasi. Dengan demikian, tim *DevOps* dapat lebih memahami bagaimana perubahan atau pembaruan perangkat lunak yang telah dilakukan dapat memengaruhi *user*.

5. Peta Jalan (Road Map) *DevOps*

Implementasi *DevOps* tidak bisa dilakukan secara langsung tetapi harus melalui beberapa tahapan karena *DevOps* akan merubah pola atau budaya kerja. Peta jalan perlu disusun untuk memudahkan dalam pemantauan dan kontrol.

Gambar 2.5.1.2.2. Peta Jalan Implementasi *DevOps*

6. Tools DevOps

Untuk mengimplementasikan *DevOps* diperlukan aplikasi pendukung (tools) antara lain:

1. *Version Control*
    a. *Github*
    b. *Bitbucket*
    c. *GitLab*
2. *Container Management tools*
    a. *Docker*
    b. *Kubernetes*
    c. *Mesos*
3. *Application Performance Monitoring tools*
    a. *Prometheus*
    b. *Dynatrace*
    c. *AppDynamics*
4. *Deployment* dan *Server Monitoring tools*
    a. *Datadog*
    b. *Sensu*
5. *Configuration Management tools*
    a. *Chef*
    b. *Puppet*
    c. *Ansible*
6. *CI / Deployment Automation tools*
    a. *Bamboo*
    b. *Jenkins*
    c. *IBM UrbanCode*
7. *Test Automation tools*
    a. *Test.ai*
    b. *Ranorex*
    c. *Selenium*
8. *Artifact Management tools*
    a. *JFRog Artifactory*
    b. *Sonatype NEXUS*
9. *Codeless Test Automation tools*
    a. *Testim.io*
    b. *AccelQ*

7. Transformasi Tim

Terdapat beberapa metodologi untuk topologi implementasi *DevOps* khususnya transformasi tim.

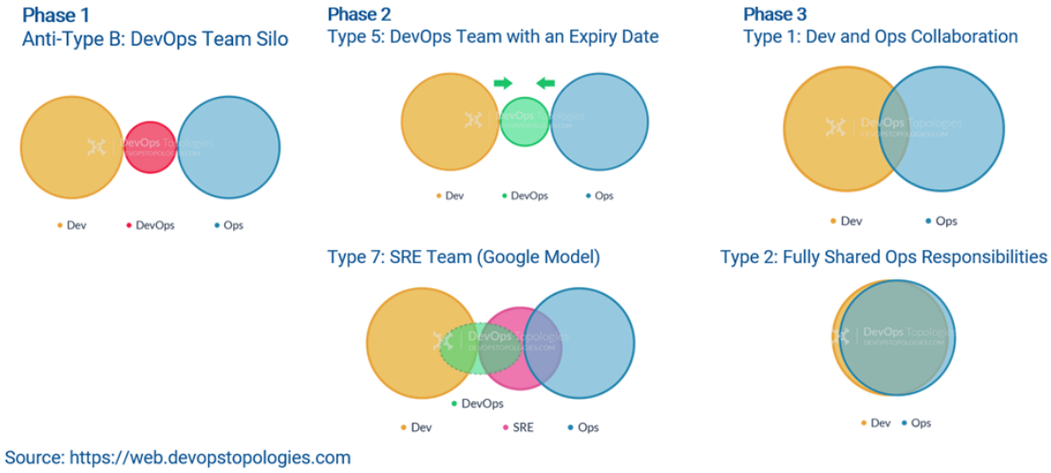

Gambar 2.5.1.2.3. Transformasi Tim *DevOps*

2.5.1.3. Microservices

Secara sederhana, arsitektur aplikasi *microservices* menggunakan desain yang memecah aplikasi berdasarkan fungsinya secara spesifik. Aplikasi *microservices* tidak sekedar memisahkan berdasarkan *user-role* atau subdomain saja, tetapi aplikasi akan di *breakdown* lebih rinci lagi dari sisi fungsionalitasnya. Aplikasi akan dirancang agar setiap fungsi bekerja secara independen. Setiap fungsi dapat menggunakan teknologi *stack* yang sesuai dengan kebutuhan, walaupun artinya akan terdapat teknologi yang berbeda-beda dalam satu aplikasi besar. Setiap *microservices* merupakan aplikasi kecil yang memiliki arsitektur heksagonal sendiri yang terdiri dari logika beserta berbagai adapternya (bahasa pemrograman, dll).

Pola arsitektur *microservices* secara signifikan mempengaruhi hubungan antara aplikasi dan database. Berbagai skema *database* tunggal dengan *services* lainnya memiliki skema *database* tersendiri. Pendekatan ini bertentangan dengan gagasan model data *enterprise-wide* yang sering kali menghasilkan duplikasi beberapa data. Memiliki skema *database* per *service* sangat penting jika ingin mendapatkan keuntungan dari layanan *microservice*. Masing-masing *service* memiliki *database* sendiri. Selain itu, *services* dapat menggunakan jenis *database* dan bahasa pemrograman yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Microservices membagi *service* ke bagian yang lebih kecil dimana *service-service* tersebut saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, dalam setiap *services* yang dibuat bisa menggunakan teknologi yang berbeda. Sedangkan untuk implementasi ke *web*, *android*, *iOS* dll tidak bisa secara langsung, pengembang harus membuat terlebih dahulu yang namanya *API Gateway*. *API Gateway* memiliki tugas seperti *load balancing, caching, access controll , API metering*, dan monitoring.

Aplikasi yang dibangun dengan menggunakan arsitektur *microservices* pada setiap modul memerlukan *engine* seperti *web server* serta basis data (*micro database*) yang akan berdampak terhadap peningkatan kinerja aplikasi yang signifikan. Di samping itu keamanan aplikasi akan lebih terjamin dengan melakukan pengamanan melalui *REST API*, sehingga transaksi dan pertukaran data yang dilakukan akan lebih terjaga.

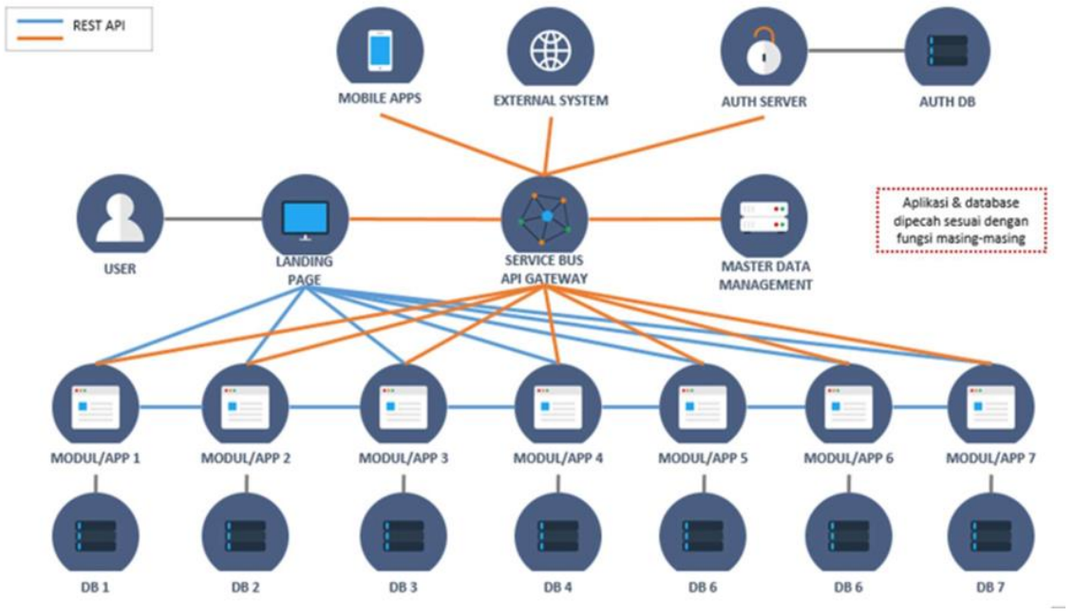

Gambar 2.5.1.3.1. Arsitektur *Microservices*

Arsitektur *microservices* mempunyai kelebihan sebagai berikut:

A. Komponen Terpisah

Pertama, semua layanan dapat digunakan dan diperbarui secara independen, sehingga memberikan lebih banyak fleksibilitas. Kedua, *bug* dalam satu *microservices* berdampak pada layanan tertentu dan tidak memengaruhi keseluruhan aplikasi. Selain itu, jauh lebih mudah untuk menambahkan fitur-fitur baru ke aplikasi yang dikembangkan dengan arsitektur *microservices* daripada aplikasi yang menggunakan arsitektur monolitik.

B. Pemahaman yang Lebih Mudah

Arsitektur aplikasi dengan *microservices* lebih mudah dipahami dan dikelola karena aplikasi dibagi menjadi komponen yang lebih kecil dan sederhana. Hal ini memungkinkan pengembang aplikasi untuk fokus hanya pada layanan spesifik yang terkait dengan tujuan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya.

C. Skalabilitas yang Lebih Baik

Keuntungan lain dari pendekatan *microservices* adalah bahwa setiap elemen dapat diskalakan secara independen sehingga proses lebih efektif baik dari segi biaya dan waktu dibandingkan dengan dengan pendekatan *monolitik* dimana seluruh komponen pembentuk aplikasi harus ditingkatkan meskipun hal tersebut tidak diperlukan. Selain itu, setiap arsitektur monolitik memiliki batasan dalam hal skalabilitas komponen infrastruktur servernya, sehingga semakin kompleks elemen, maka semakin banyak masalah yang berpotensi muncul.

Selain memiliki keuntungan, arsitektur *microservices* memiliki beberapa kekurangan sebagai berikut :

A. Kompleksitas Ekstra

Arsitektur layanan *microservices* merupakan sistem terdistribusi dengan kompleksitas ekstra sehingga harus memilih dan mengatur koneksi antara semua modul dan *database*. Lebih

lanjut, aplikasi tersebut termasuk layanan independen, semuanya harus dikerahkan secara independen.

B. Distribusi Sistem

Arsitektur layanan *microsoft* adalah sistem kompleks dari banyak modul dan basis data sehingga semua koneksi harus ditangani dengan hati-hati.

C. Fungsi Lintas Sektoral *(Cross-Functional)* Bertambah

Saat membuat aplikasi *microservices*, pengembang harus berurusan dengan sejumlah masalah lintas sektoral termasuk konfigurasi eksternal, *logging*, metrik, pemeriksaan kesehatan, dan lainnya.

D. Pengujian

Sebagian besar komponen yang dapat digunakan secara terpisah membuat pengujian solusi berbasis layanan jauh lebih sulit.

Arsitektur Pangkalan Data (Database) *Microservices*

Arsitektur basis data yang akan diterapkan pada arsitektur aplikasi *microservices* -menggunakan *two-tier architecture*, dimana dalam setiap modul aplikasi tersebut memiliki pangkalan data masing-masing sesuai dengan perannya, seperti: terlihat pada gambar berikut:

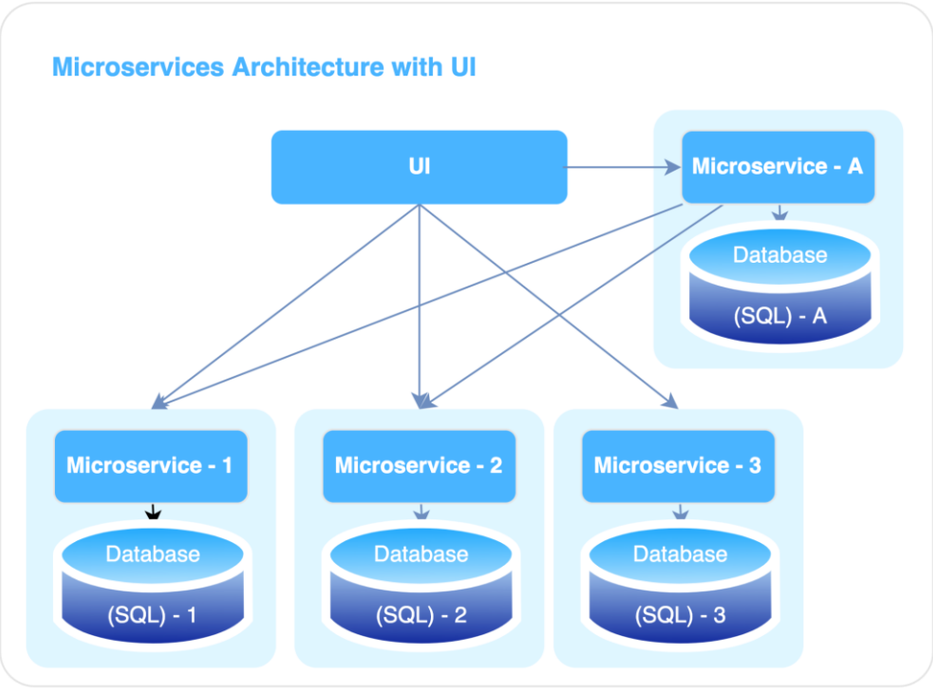

Gambar 2.5.1.3.2. Arsitektur Pangkalan Data *Microservices*

2.5.1.4. OWASP 10 - 2021

OWASP TOP 10 atau yang biasa disebut *OWASP* 10 adalah sebuah daftar teratas kerentanan keamanan yang dapat mengancam keamanan suatu *website* yang dirilis oleh komunitas OWASP *(Open Web Application Security Project)*. Daftar ini terus berkembang dan berubah-ubah mengikuti perkembangan teknologi *website*/aplikasi *web* yang terus berkembang dan versi terakhir adalah 2021. OWASP Top 10 adalah sebuah panduan bagi para *developers* dan *security team* tentang kelemahan-

kelemahan pada *web apps* yang mudah diserang dan harus segera disiasati. Berikut daftar *OWASP Top* 10:2021:

A. A01:2021-*Broken Access Control*

Aplikasi tidak akan bekerja dengan baik sesuai fungsinya jika penerapan otorisasi hak akses tidak berjalan efektif. Misalnya, apabila pengguna aplikasi (*user*) berhasil melewati halaman *login*, selanjutnya pengguna dapat bebas menjalankan operasi apabila mengakses tautan web tertentu dalam halaman admin, padahal mereka tidak memiliki akses.

Access control atau lebih sering disebut sebagai otorisasi, adalah suatu proses pemberian akses fungsi atau konten kepada beberapa pengguna, dan tidak kepada pengguna lain dalam suatu aplikasi. Proses ini terjadi setelah pengguna berhasil melakukan otentikasi atau lebih umum dikenal dengan proses *login*. *Access Control* seringkali tidak didefinisikan, dibentuk dan didesain secara keseluruhan pada awal pembuatan aplikasi, melainkan berkembang seiring dengan perkembangan aplikasi itu sendiri. Pada setiap fungsi baru yang ditambahkan, aturan *access control* akan disisipkan. Hal ini menyebabkan aturan *access control* yang terkumpul akhirnya menjadi rumit dan sulit dipahami.

B. A02:2021-*Cryptographic Failures*

Implementasi enkripsi atau kriptografi yang buruk pada sebuah data sensitif, sehingga mengakibatkan permasalahan terhadap perlindungan dan kerahasiaan data, baik saat pengiriman data maupun ketika data disimpan. Permasalahan pada konsep kriptografi yang buruk sering menyebabkan maraknya data *breach*, karena data yang tidak terenkripsi kerap kali dimanfaatkan oleh *attacker* untuk mengakses data yang lebih tinggi lagi.

C. A03:2021-*Injection*

Sistem/program memproses sebuah data yang tidak valid, yang mengakibatkan peretas (*hacker*) yakni orang dengan kemampuan teknis komputer tertentu yang dapat menerobos masuk ke dalam aplikasi *web* suatu organisasi, dengan cara memecahkan kode-kode atau sandi-sandi melalui jaringan komputer atau internet. Peretas dapat menginputkan kode tertentu kepada program lalu kode tersebut akan membuat program menjalankan perintah yang salah.

D. A04:2021-*Insecure Design*

Insecure Design merujuk pada salah satu daftar kerentanan keamanan yang dirilis oleh *OWASP* (*Open Web Application Security Project*). Kerentanan ini mengacu pada kelemahan yang terkait dengan desain atau arsitektur aplikasi atau sistem yang memungkinkan serangan atau pelanggaran keamanan. Hal ini dapat terjadi karena pengembang tidak memperhatikan keamanan dalam tahap perancangan atau desain sistem. Dengan demikian pengembang perlu menerapkan prinsip keamanan salah satunya *Secure By Design* pada tahapan awal desain program atau aplikasi. *Secure By Design* dalam dunia *software engineering* adalah sebuah *software* yang seharusnya memiliki kapabilitas *design* yang cukup aman secara fundamental.

Setiap *attacker* mendapatkan sebuah informasi sensitif yang terdapat pada pesan *error*, hal tersebut dapat terjadi karena pengembang tidak menggunakan *error handler* dengan baik.

Hal tersebut sering terjadi ketika pengguna salah mengisi *input* seperti tidak sesuainya tipe data yang diminta, kurang nya jumlah *character,* atau pengguna tidak sengaja mengisi null pada sebuah *input request.*

E. A05:2021-*Security Misconfiguration*

Security Misconfiguration merupakan kerentanan keamanan yang terjadi karena konfigurasi atau pengaturan sistem yang tidak tepat pada suatu aplikasi atau infrastruktur teknologi informasi. Hal ini dapat terjadi ketika pengembang tidak melakukan konfigurasi atau pengaturan dengan benar, atau tidak memperbarui dan memperbaiki konfigurasi yang sudah ada. Akibatnya, peretas dapat dengan mudah menemukan celah keamanan dan memanfaatkannya untuk melakukan serangan ke sistem atau aplikasi yang rentan tersebut.

F. A06:2021-*Vulnerable and Outdated Components*

Kondisi dimana pengembang masih menggunakan sebuah aplikasi, *framework, library,* atau komponen versi lawas (*outdated*), dan pengembang tidak melakukan pengecekan apakah aplikasi sudah dilakukan *patching,* atau *updating*.

G. A07:2021-*Identification and Authentication Failures*

Sebuah kerentanan yang terjadi pada aktivitas pengidentifikasian serta autentikasi. Kerentanan ini disebabkan karena sistem pengidentifikasian dan autentikasi gagal mengidentifikasi pengguna, nantinya akan menyebabkan pengguna dapat terautentikasi sebagai pengguna lain, secara sengaja maupun tidak di sengaja.

H. A08:2021-*Software and Data Integrity Failures*

Gagalnya sebuah *software*/aplikasi memeriksa integritas sebuah data, yang disebabkan tidak terimplementasinya *development life cycle* dengan benar, yang mana beberapa pengembang sering melewatkan proses tes integritas sebuah data sebelum *release*, atau tidak melakukan *code review/static analysis* pada aplikasi yang akan di *deploy* dan di *release* untuk memastikan tidak ada *malicious code* yang tertanam pada *software*/aplikasi.

I. A09:2021-*Security Logging and Monitoring Failures*

Kondisi ketika pusat data/aplikasi tidak terpantau dengan baik, biasanya disebabkan karena manajemen rekam jejak (*log management)* yang buruk dan *log* yang tidak terformat dengan baik. Selain itu juga terdapat faktor kesalahan manusia (*human error)*, yakni ketika tim *Security Operation Center* (SOC) tidak melakukan pemeriksaan lanjutan atau melakukan analisis *log* secara proaktif terhadap *alert*.

J. A10:2021-*Side Request Forgery*

Kondisi kerentanan saat sebuah aplikasi *web* meminta *remote resource* tanpa melakukan validasi URL. Hal ini menyebabkan *hacker* dapat memaksa aplikasi untuk mengirim *crafted request* ke destinasi yang tidak diharapkan, meskipun sudah dilindungi oleh *firewall*, VPN, atau tipe lain.

2.5.1.5. Security Operation Center (SOC)

Meningkatnya serangan dan insiden siber mendorong Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengimplementasikan berbagai solusi keamanan TI yang mencakup banyak bidang area. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu lembaga yang menjadi target untuk banyak jenis serangan, sehingga perlu mengetahui kondisi keseluruhan postur keamanan saat ini dan melindunginya. Unit *Security Operation Center* (SOC) dibentuk untuk melakukan pemantauan dan perlindungan terhadap aset Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dari serangan siber. *SOC* menyediakan fungsi penting dalam memantau dan mendeteksi setiap kejadian yang dapat mengancam, dimana hal ini sangat penting bagi keamanan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Fungsi – fungsi umum yang dilakukan oleh *SOC* meliputi :

1. Pengelolaan *log*
2. Pemantauan Proaktif berkelanjutan
3. Peringkat dan manajemen peringatan
4. Investigasi penyebab insiden
5. Respon ancaman
6. Penyempurnaan dan peningkatan keamanan
7. Pemulihan dan remediasi
8. Manajemen kepatuhan

A. Triad SOC

Triad SOC yang mencakup yakni:

- *People* untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan berbagai fungsi;
- *Technology* berupa produk keamanan yang berbeda; dan
- *Process* terdiri dari berbagai proses dan prosedur.

Gambar 2.5.1.5.1. *Triad SOC*

Perangkat keamanan TI yang telah dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo seperti firewall, *Intrusion Prevention System* (IPS), *Web Application Firewall* (WAF), *Antivirus* dan lain – lain memiliki fungsi utama untuk melindungi aset Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dari jenis serangan siber tertentu. Karena dengan banyaknya solusi keamanan TI yang tersedia dan diimplementasikan, ada kebutuhan untuk mengkonsolidasikan dan mengatur semua solusi tersebut untuk manajemen keamanan yang lebih baik. Solusi *Security Information and Events Management* (SIEM) untuk mendapatkan informasi tentang kondisi keamanan TI secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat mendeteksi dan bereaksi lebih baik dan lebih cepat terhadap serangan siber.

B. SOC – People

Operasional *SOC* dapat dibagi menjadi 4 (empat) tingkat atau level yakni:

- *Tier 1* (*Frontliner*)
  Monitoring dan menganalisa alert, monitoring sensor keamanan dan endpoint, mengumpulkan data penting untuk di eskalasikan ke Tier 2.
- *Tier 2* (*Incident Responder*)
  Melakukan analisa insiden secara mendalam dengan menghubungkan data dari berbagai sumber, menentukan jika ada sistem atau data yang terkena *impact*,

memberi saran terkait remediasi, menyediakan metode analisa untuk mendeteksi ancaman.

- *Tier 3* (*SME/Hunter*)

  Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai jaringan, *endpoint*, *threat intelligence*, forensik, dan m*alware reverse engineering*, melakukan threat hunting, melakukan *tuning* dan implementasi *threat detection analytics*.

- *Tier 4* (*SOC Manager*)

  Mengelola sumber daya termasuk personil, anggaran, penjadwalan shift, dan strategi teknologi untuk memenuhi *SLA*.

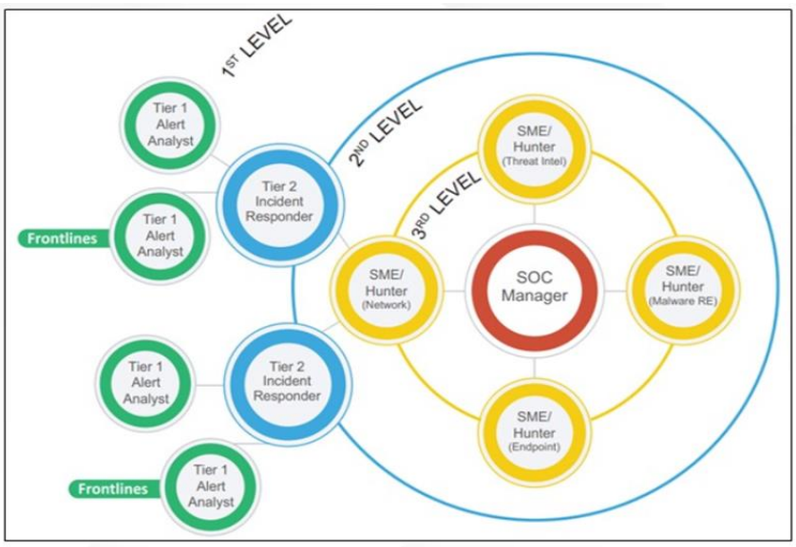

Gambar 2.5.1.5.2. Hirarki Tugas dan Tanggung Jawab *SOC*

Untuk pemenuhan SDM untuk operasional *SOC* diperlukan pengetahuan dan kompetensi seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.1.5.1. Pengetahuan dan Kompetensi SDM untuk *SOC*

Knowledge & Skill Level	Tier-1	Tier-2	Tier-3
Basic	• CompTIA Security+ • MITRE ATTACK Framework (fundamental)	• CompTIA Security + • MITRE ATTACK Framework (fundamental)	• CompTIA Security+ • MITRE ATTACK Framework (fundamental)
Intermediate		• CompTIA CySA+ • CompTIA PenTest+ • MITRE ATTACK Framework (Intermediate)	• CompTIA CySA+ • CompTIA PenTest+ • MITRE ATTACK Framework (Intermediate)
Advance		• Cyber Intrusion Detection and Analysis • Incident Response	• CompTIA CASP+ • Incident Response

C. SOC – Process

Tahapan kegiatan yang ada di *SOC* terdiri dari:

A. Deteksi (*Detection*), meliputi aktivitas:

- Pengumpulan dan Manajemen aset;
- Pemantauan perilaku sistem secara berkelanjutan (anomali dan kejadian);
- Pemeliharaan *log* aktivitas;
- Proses deteksi;

B. Proteksi (*Protection*), meliputi aktivitas:

- Akses kontrol
- Pemantauan sistem
- Rekam cadang (*backup*) dan pemulihan (*recovery*)
- *Threat hunting*
- Keamanan data

C. Respon (*Respond*), meliputi aktivitas:

- Rencana respon
- Komunikasi
- Remediasi
- Investigasi/analisa retrospektif

D. Pencegahan (*Prevention*), meliputi aktivitas:

- Riset
- Pengembangan sistem
- Pemeliharaan pembaruan sistem
- Pelatihan staf *SOC*
- *Threat intelligence*

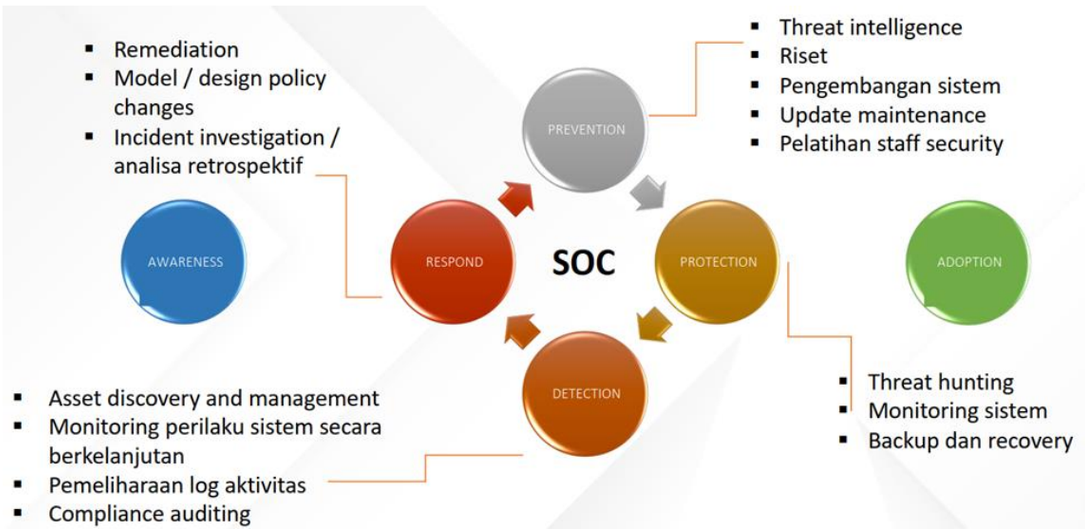

Gambar 2.5.1.5.3. Tahapan Kegiatan di *SOC*

D. *SOC – Technology*

SOC mengumpulkan data – data dari perangkat jaringan, server, dan lainnya seperti :

- *Network Device* (*Firewall*, *router*)
- *Security tools*
- SaaS (Microsoft 365, Gsuite)

- *User device* (*laptop, PC*)
- *Server / virtual machine*
- *Workstation*
- *Active Directory, LDAP, DHCP*
- *Web application*
- *Digital asset* (*Domain, company name, Brand name, VIP email*, etc)

Pilihan teknologi yang dapat diimplementasikan di *SOC* antara lain :

- SIEM (*Security Information & Event Management*)
- IDPS
- *Security Monitoring* dan *Analytic*
- *Security Incident Management*
- SOAR (*Security Orchestration, Automation, Response*)
- *Threat Intelligence*
- *Threat Hunting*
- *Vulnerability management*
- *Log data management*

E. SIEM

SIEM (*Security Information and Event Management*) pada dasarnya menyediakan analisis real-time dari *security alert* yang dihasilkan oleh aplikasi, *server*, perangkat security dan network. Dengan memiliki data (berbentuk *logs* dan *events*) dari berbagai perangkat IT, *SIEM* dapat digunakan untuk deteksi dini terhadap *targeted attack* dan pencurian data, serta untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, menyelidiki dan melaporkan data kejadian untuk respons insiden, forensik dan kepatuhan terhadap peraturan (*regulatory compliance*). Cara *SIEM* melakukan fungsi di atas adalah dengan menggabungkan data yang relevan dari berbagai sumber, mengidentifikasi penyimpangan dari data normal dan mengambil tindakan yang tepat (peringatan dan pelaporan). Untuk mencapai tujuan utamanya, *SIEM* perlu melakukan beberapa tugas dan fungsi yang menjadi kemampuan utamanya, yaitu :

A. *Log Management*

Manajemen *log* dari semua data yang dikumpulkan dari berbagai perangkat, seperti *server*, *database*, aplikasi dan perangkat *security*.

B. *Data aggregation*

Log Management mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk *network, security, database* dan aplikasi, menyediakan kemampuan untuk mengkonsolidasi data yang dimonitor, sehingga membantu untuk mencegah hilangnya data/*event* yang penting.

C. *Correlation*

Mencari atribut yang bersifat umum, dan menghubungkan peristiwa bersama menjadi informasi yang bermakna. Teknologi ini menyediakan kemampuan untuk melakukan berbagai teknik korelasi untuk mengintegrasikan berbagai sumber, untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Korelasi biasanya merupakan fungsi dari bagian Manajemen Event Keamanan dari solusi *SIEM* penuh.

D. *Alerting*

Analisis otomatis dari sebuah kejadian yang terkait dan membuat peringatan, untuk memberi tahu kepada pihak yang terkait dengan segera. *Alert* dapat ditampilkan ke *dashboard*, atau dikirim melalui saluran pihak ketiga seperti *email*, *telegram*.

E. *Dashboards*

Perangkat *SIEM* dapat mengambil data peristiwa dan mengubahnya menjadi informasi berbentuk grafik untuk membantu dalam melihat pola, atau mengidentifikasi aktivitas diluar pola standar.

F. *Compliance*

Perangkat *SIEM* dapat digunakan untuk mengotomatisasi pengumpulan data terkait kepatuhan (*compliance*), menghasilkan laporan yang beradaptasi dengan proses keamanan, tata kelola dan audit yang ada.

G. *Searching*

Mencari ke semua log berdasarkan bermacam kriteria untuk tujuan analisa forensik dan melihat data lampau.

H. *Retention*

Menyediakan penyimpanan data historis jangka panjang untuk memfasilitasi korelasi data dari waktu ke waktu, dan untuk menyediakan retensi yang diperlukan untuk persyaratan kepatuhan. Retensi data log jangka panjang sangat penting dalam penyelidikan forensik karena amat jarang untuk menemukan pelanggaran jaringan akan terjadi pada saat pelanggaran terjadi.

I. *Security & Forensic analysis*: Kemampuan untuk mencari di *log* pada berbagai *node* dan periode waktu berdasarkan kriteria tertentu. Ini mengurangi beban, dimana harus mencari melalui ribuan bahkan jutaan log.

J. Berdasarkan uraian di atas *SIEM* memegang peran penting dalam implementasi dan operasi dari *Security Operation Center* (CSOC). Bersama dengan alat pemantauan, forensik dan analisis lain seperti *network forensic* dan *End Point Detection and Response* (EDR), analis keamanan di *SOC* akan melakukan pemantauan dan analisis postur

keamanan organisasi, untuk menemukan ancaman apa pun yang mungkin membahayakan dan melakukan mitigasi yang diperlukan.

K. Terdapat beberapa solusi *proprietary platform SIEM* seperti *LogRhytm, Splunk*, dan *ArcSight*. Solusi ini cukup mahal, khususnya untuk pemakaian jangka panjang dan organisasi yang besar. Selain itu juga tersedia solusi open source platform antara lain *AlienVault OSSIM, ELK Stack, OSSEC, Wazuh, SIEMOnster*, dan lain – lain.

F. ELK

ELK terdiri dari 3 jenis perangkat lunak: *Elasticsearch, Logstash* dan *Kibana*. Semua perangkat lunak itu akan berkolaborasi satu sama lain secara *native*, mulai dari menerima log dan informasi dari berbagai sumber, sampai melaporkan, memberikan *alert* serta memvisualisasikan hasilnya. Komponen pertama yang menerima informasi adalah *Logstash*. *Logstash* adalah seperti pipa pengolahan data (server-dise) yang menerima data dari banyak sumber secara bersamaan, mengubahnya sesuai keinginan, dan kemudian mengirimkannya ke "penyimpanan" favorit. *Logstash* mendukung berbagai *input* yang mengambil *event* dari banyak sumber yang umum, semua secara *realtime*. *Logstash* juga dapat dengan mudah menerima data berbentuk *log*, metrik, aplikasi web, *data stores*, secara terus menerus, secara *streaming*. Ketika data berpindah dari sebuah sumber ke tempat lain, *Logstash* memfilter dan mengurai setiap peristiwa, mengidentifikasi *named fields* untuk membuat *structure*, dan mengubahnya menjadi kumpulan format yang umum untuk tujuan analisis, dan mendapatkan nilai bisnis yang lebih mudah dan lebih cepat.

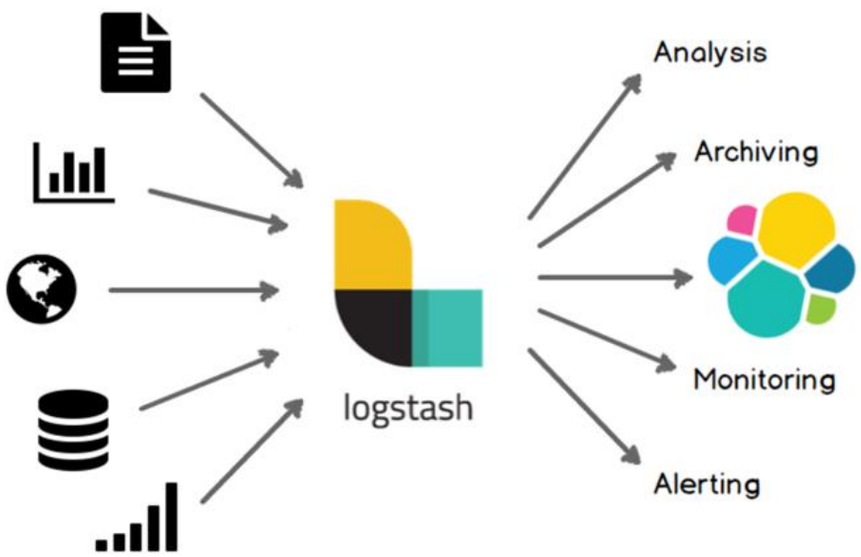

Gambar 2.5.1.5.4. *Logstash*

Setelah menerima, mengurai, dan mengubah data, *Logstash* akan mengirim data ke tujuan dan format apa pun. *Logstash* memiliki berbagai output yang memungkinkan mengirimkan data kemana saja, memberikan fleksibilitas untuk banyak *use-case*.Setelah *log* diterima, diubah dan diformat ulang oleh *Logstash*, akan mengirim *output* ke *Elasticsearch. Elasticsearch* adalah mesin pencarian dan analisis terdetail, berbasis *RESTfu*l, yang mampu

memecahkan semakin banyak *use-case*. Sebagai inti dari *Elastic Stack*, Elasticsearch menyimpan data secara tersentralisasi, sehingga dapat menemukan data yang diinginkan dan mengungkap data tak terduga. *Elasticsearch* dapat digunakan untuk mencari semua jenis dokumen. *Elasticsearch* dapat melakukan dan menggabungkan banyak jenis pencarian - terstruktur, tidak terstruktur, geometrik, dan lain sebagainya.

Stack ELK terakhir sebagai *SIEM* dan alat *Log Management* adalah Kibana. Kibana adalah platform *analytics* dan *visualization* berbasis *OSS* yang dirancang untuk bekerja dengan *Elasticsearch*. Dengan Kibara dapat memvisualisasikan data *Elasticsearch* dan menavigasi *Elastic Stack*. Kibana untuk mencari, melihat, dan berinteraksi dengan data yang disimpan dalam indeks *Elasticsearch*.

Gambar 2.5.1.5.5. Hubungan antar *Stack* pada *ELK*

2.5.2. Infrastruktur SPBE To Be

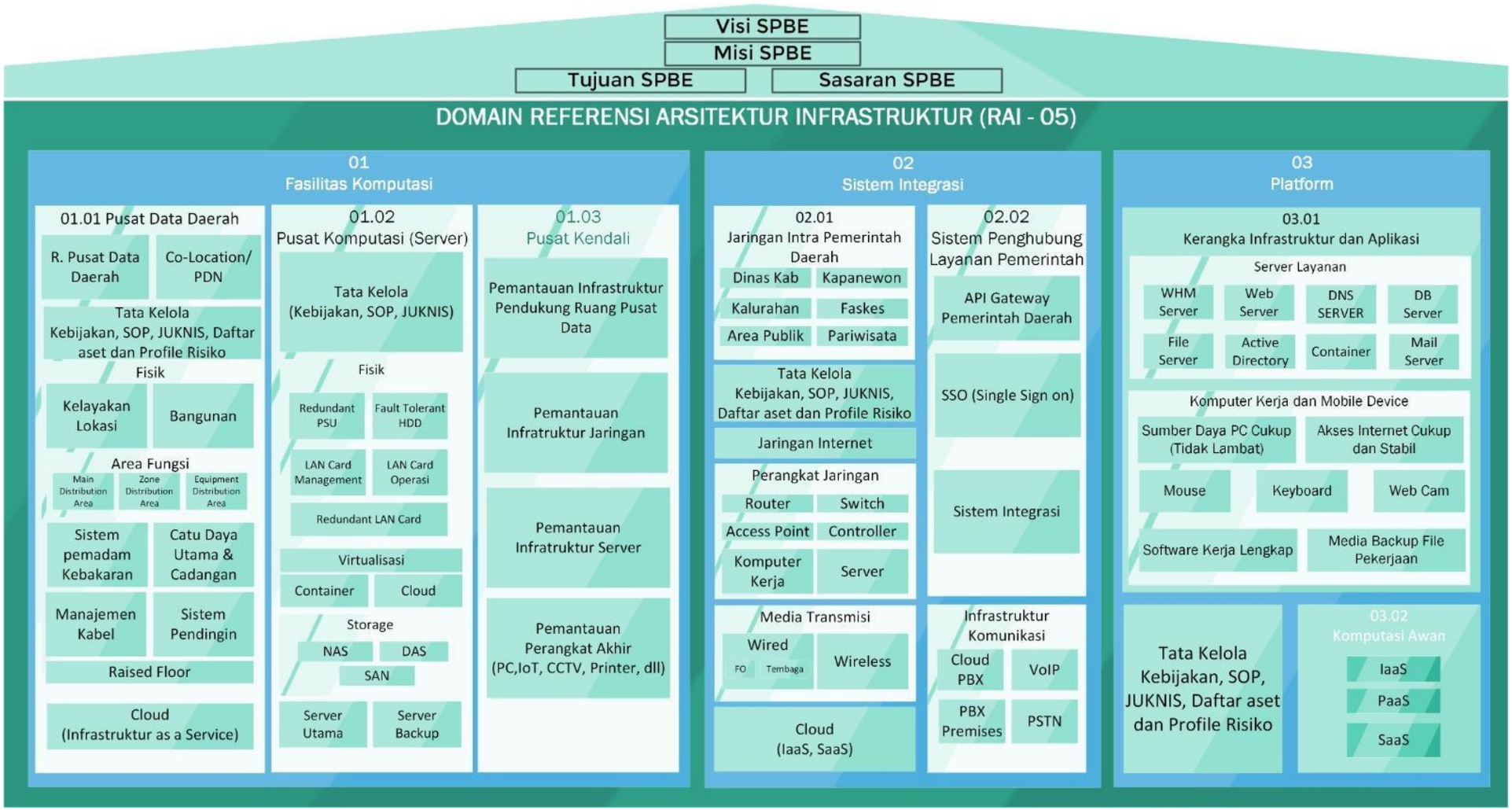

Gambar 2.5.2.1. Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

2.5.2.1. Prinsip-prinsip Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur TI merupakan tulang punggung dalam integrasi proses kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai media transfer data dari pusat data ke pengguna data atau dari sumber data ke pusat data. Untuk menjamin data terkirim dengan baik dan aman, maka pengembangan infrastruktur TI harus memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu:

Gambar 2.5.2.1.1 Prinsip Pengembangan Infrastruktur SPBE

A. Peningkatan Kapasitas (*Scalable)*

Kemampuan infrastruktur TI Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menangani pertumbuhan beban kerja dengan lancar. Data, proses, dan pengguna seiring berjalannya waktu akan semakin bertambah besar dan kompleks sehingga menuntut infrastruktur TI untuk beradaptasi dengan tuntutan bisnis tersebut.

B. Kemudahan Pengelolaan (*Manageable*)

Pengelolaan infrastruktur TI oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan mudah dilakukan melalui alat pengelolaan infrastruktur TI maupun dengan mempelajari infrastruktur yang ada di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Salah satu contoh kemudahan dalam pengelolaan adalah pengalokasian *IP Address* menggunakan *DHCP* (*Domain Host Control Protocol*) oleh sistem administrator, sehingga memudahkan dalam mengatur *IP Address* komputer pengguna dalam jumlah besar.

C. Tingkat Ketersediaan Tinggi (*Available*)

Infrastruktur TI Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat beroperasi sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah disepakati atau ditarget. Pencegahan terhadap kegagalan, komponen infrastruktur TI dapat memanfaatkan *redundancy*. *Redundancy* merupakan mekanisme penduplikasian komponen kritis pada infrastruktur TI, sehingga ketika komponen utama mengalami kegagalan fungsinya dapat digantikan oleh komponen cadangan.

D. Kemudahan dalam Perbaikan (*Serviceable*)

Kemampuan infrastruktur TI Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam kemudahan perbaikan infrastruktur sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. SLA terkadang mencantumkan persyaratan *downtime* dari sebuah komponen infrastruktur TI, sehingga kemudahan dalam perbaikan sangat diperlukan untuk mempertahankan SLA tersebut.

Kemudahan dalam perbaikan infrastruktur TI (*server, storage*, dll) jika terjadi kerusakan dapat diperoleh dengan memilih teknologi teruji di industri dan memiliki dukungan teknis dari *vendor* yang dapat diandalkan.

E. Keamanan (*Secure*)

Infrastruktur TI Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hendaknya dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data maupun sistem. Keamanan tidak hanya melibatkan pencegahan akses yang tidak sah, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memastikan bahwa data yang dikirim melalui infrastruktur TI terjaga keasliannya. Sebagai contoh, pengguna harus melewati proses otentikasi dan otorisasi sebelum mengakses sistem, dan digital signature dapat digunakan untuk memastikan bahwa data dikirim dengan benar dan tidak berubah selama proses transfer.

2.5.2.2. Pusat Data

Infrastruktur *server, storage,* perangkat jaringan, dan perangkat keamanan jaringan perlu ditempatkan, disimpan pada suatu lokasi yang terstandarisasi untuk sistem elektronik maupun pengolahan data yang disebut pusat data. Selain itu juga untuk menjaga keberlangsungan layanan dan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia maka diperlukan Pusat Pemulihan Bencana (*disaster recovery center*).

Berikut ini adalah prinsip dan kriteria dalam perancangan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana antara lain adalah:

A. Ketersediaan (*Availability*)

Pusat data dibuat untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi suatu perusahaan baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan yang berarti atau tidak. Pusat data harus dibuat sebisa mungkin menghindari kegagalan (*zero-failure*) untuk seluruh komponennya.

B. Skalabilitas (*Scalability*)

Pusat data harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika ada servis baru yang harus disediakan oleh pusat data tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi pusat data secara keseluruhan. Selain itu juga kemudahan dalam implementasi tanpa perlu membeli komponen infrastruktur tambahan, dan aplikasi.

C. Keamanan (*Security*)

Pusat data menyimpan berbagai aset perusahaan yang berharga berupa aset fisik (*tangible*) seperti perangkat pusat data, jaringan, dan lain - lain maupun non fisik *(intangible)* yakni data data dan informasi. Oleh karenanya sistem pengamanan pusat data dibuat seketat mungkin meliputi pengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik.

D. Kemudahan *Backup dan Recovery*

Pusat data yang ada mudah untuk di *backup* termasuk seluruh konfigurasi sistem. Jika terjadi *crash* atau kerusakan pada *pusat data* maka mudah untuk di *recovery* tanpa perlu instalasi dan konfigurasi sehingga hemat waktu, tenaga dan sumber daya.

E. Kemudahan *Deployment*

Pusat data dapat digandakan (*cloning*) dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi sehingga mempercepat proses implementasi suatu sistem.

F. Fleksibel (*Flexibility*)

Kemudahan dalam pengelolaan pusat data seperti ketika ingin memindah, merubah *resource* bahkan ketika kita ingin melakukan *live migration* atau memindahkan pusat data dalam keadaan hidup tanpa mengalami *down*. Apabila terjadi kerusakan/*error* pada *server*, *storage* yang ditempatkan di pusat data dapat dilakukan penginstalan dan pemulihan (*recovery*) kembali.

G. Redudansi

Untuk menjamin ketersediaan dan kinerja aplikasi maka diperlukan redudansi aplikasi, basis data (*database*) dengan menggunakan teknik *clustering* dan duplikasi pusat data. *Clustering pusat data* aplikasi dapat membagi beban kerja pusat data (*load sharing*) dan duplikasi pusat data dapat menjaga ketersediaan aplikasi (*fail-over*).

H. Pemulihan Bencana yang Lebih Baik

Memiliki tingkat fleksibilitas dalam rencana pemulihan bencana yang lebih mudah untuk diberlakukan dan memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Jika terjadi bencana yang menyerang pusat data, proses pemindahan pusat data aplikasi ke tempat lain dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

I. Penghematan

Prinsip penghematan yang dimaksud meliputi:

1. Optimalisasi Pusat Data

   Operasionalisasi pusat data akan optimal jika infrastruktur *server*, *storage*, dan lainnya yang ditempatkan pada ruang *server* sesuai dengan perencanaan kapasitas pusat data.

2. Hemat Listrik dan *Hardware*

   Teknologi virtualisasi pusat data dapat menghemat penggunaan sumber daya listrik, dan perangkat keras pendukung pusat data, seperti: sistem pendingin ruangan, dan lainnya.

3. Hemat Ruang/Rack Pusat Data

   Semakin sedikit jumlah server fisik berarti semakin sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkat. Jika pusat data ditempatkan pada suatu *colocation* pusat data, akan berimbas pada pengurangan biaya sewa.

4. Tidak Terikat pada Satu Vendor

   Pusat Data hendaknya tidak tergantung pada satu vendor, atau *platform* tertentu karena hal ini akan memudahkan proses pengembangan dan pemulihan jika terjadi kerusakan pada aplikasi.

5. Aplikasi Lama Masih Dapat Digunakan

   Ketika ada aplikasi lama yang sudah tidak bisa berjalan di modern *Operating System (OS)* saat ini (misalnya aplikasi *DOS*) maka aplikasi tetap dapat dijalankan dengan teknologi tertentu pada pusat data yang ada.

6. Keamanan

   Jika terjadi kasus pusat data di *hack* dan data penting dalam pusat data dihapus/dirusak maka proses mengembalikan pusat data dan data penting dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Selain itu untuk menghapus *backdoor* dan *malware* yang ditinggalkan *hacker* tersebut juga dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

Sesuai Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tahun 2018 tentang Standarisasi Infrastruktur pusat data, penyelenggara pusat data harus memperhatikan:

1. Lokasi pusat data hendaknya aman dari bencana, mudah diakses dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan pusat data.
2. Rancangan dan bangunan pusat data sesuai dengan standar topologi yang dipilih sesuai kebutuhan berdasarkan kajian kebutuhan bisnis dan analisis dampak bisnis (*business impact analysis*).
3. Kapasitas *bandwidth* untuk keperluan komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur komunikasi data alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur *(single point of failure).*
4. Jalur *supply utility* dan logistik untuk keberlangsungan layanan Pusat Data. menyediakan *bandwidth* untuk keperluan komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur komunikasi data alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur (*single point of failure*).
5. Sistem pemantauan lingkungan pusat data (*environment monitoring system*) yang meliputi antara lain monitoring temperatur, kelembaban, asap, kebakaran, kebocoran air, dan tegangan listrik.
6. Standar operasional prosedur untuk operasi dan perawatan.
7. Rencana keberlangsungan usaha (*business continuity plan*) dan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang komprehensif serta proses pemulihan bencana yang cepat dan adaptif

8. SNI Pusat Data

Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang pusat data terdiri dari:

SNI No 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data

Bagian seri standar pusat data ini bertujuan untuk memberi panduan spesifikasi teknis pusat data yang diberlakukan di wilayah Indonesia bagi penyedia layanan berbasis elektronik, baik penyedia layanan berbasis elektronik untuk publik maupun yang dipergunakan untuk keperluan sendiri.

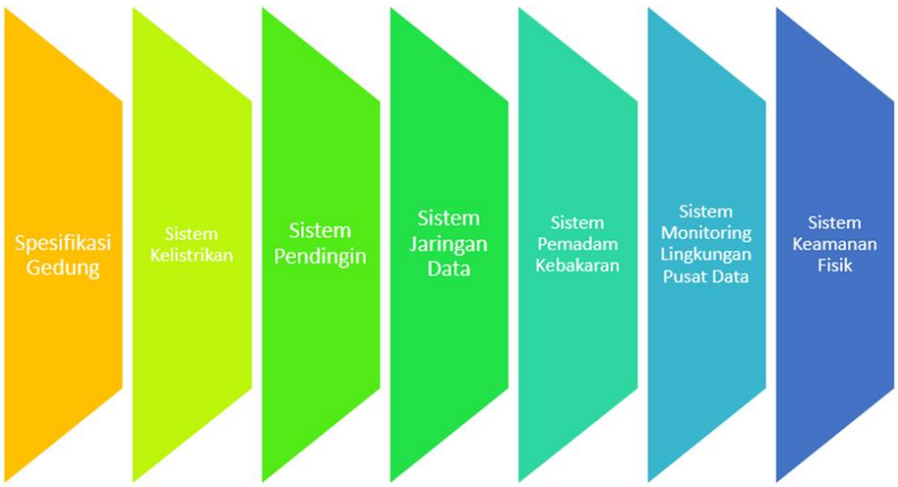

Gambar **2.5.2.2.1** SNI No 8799-1:2019 - Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data

Standar Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data merinci persyaratan spesifikasi teknis pusat data sebagai berikut:

a. Spesifikasi gedung

- Lokasi Gedung Pusat Data

  Ketentuan lokasi gedung pusat data antara lain tidak berada pada area rentan bencana seperti yang dipetakan pada peta BMKG, tidak berada pada lokasi rawan huru hara, perkampungan padat atau kumuh, jarak dengan arteri lalu lintas (jalan raya utama dan jalur kereta api) minimal 91m.
- Ketahanan gempa

  Bangunan pusat data memiliki ketahanan terhadap gempa sesuai dengan SNI 1726:2012 sekurang-kurangnya kategori resiko II.
- Ketahanan beban gedung

  Bangunan pusat data dapat menahan beban terpusat sekurang-kurangnya hingga 1.000 kg per meter persegi. Beban dimaksud adalah beban merata bukan hanya pada tulang lantai.
- Pembagian ruangan

  Pembagian ruangan meliputi area perkantoran (area publik, pribadi, ruang fasilitas penunjang), area telekomunikasi, dan area pusat data.
- Ketahanan material gedung

  Persyaratan ketahanan material gedung meliputi persyaratan ketahanan api dan ketahanan penggembungan.
- Sistem monitoring gedung

Sistem monitoring gedung pusat data memiliki fitur sekurang - kurangnya antara lain pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan operasional gedung, pelayanan penghuni atau tamu, pengelolaan pengamanan dan pengelolaan energi.

b. Spesifikasi sistem kelistrikan

- Catu daya listrik

  Pusat data memiliki distribusi jaringan sistem kelistrikan dari catu daya listrik primer atau catu daya listrik sekunder.

- Sistem kelistrikan berkesinambungan

  Pusat data memiliki distribusi jaringan sistem kelistrikan berkesinambungan dengan catu daya cadangan seperti genset dan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) dengan pemisahan panel-panel distribusi listrik untuk area pusat data hingga perangkat yang berada didalam gedung pusat data.

- Persediaan bahan bakar

  Pusat data memiliki tangki bahan bakar penyuplai genset dengan jumlah dan kapasitas minimum tertentu untuk melayani operasi pusat data.

- *Uninterruptible Power Supply (UPS)*

  Pusat data memiliki UPS untuk menjaga ketersedian kelistrikan tidak terputus. Kapasitas Perhitungan kapasitas UPS minimum yakni beban puncak pusat data sebelum arus kelistrikan digantikan oleh arus listrik dari genset. Pusat data memiliki sekurang-kurangnya 120% kapasitas listrik untuk dapat memenuhi kebutuhan pusat data dengan prioritas utama, beserta ruang-ruang lain yang yang diperlukan dalam operasi pusat data. Tersedia sambungan langsung otomatis atau manual untuk sistem kelistrikan yang diperlukan dalam perawatan jaringan kelistrikan.

- Analisis sistem listrik

  Pusat data memiliki analisis sistem listrik untuk mendapatkan kapasitas ukuran dari pemutus arus sesuai dengan beban yang ada sehingga jika terjadi hubungan singkat pada perangkat teknologi informasi tidak menyebabkan pemutus arus utama terputus.

- Konstruksi panel listrik

  Setiap panel listrik memiliki persyaratan konstruksi khususnya untuk panel induk pada masing-masing kategori strata pusat data.

- Jalur kabel listrik

  Pusat data memiliki pemisahan jalur kabel bermuatan listrik untuk menghindari radiasi dan interferensi elektromagnetik. Setiap kabel memiliki label jalur dan tercatat dalam dokumentasi dan diagram.

- Pembumian

  Pusat data memiliki pembumian bagi perangkat teknologi informasi, panel elektrikal, perangkat dari bahan metal dan pembumian penangkal petir sesuai ketentuan SNI 0225:2011. Pusat data memiliki sistem perlindungan terhadap bahaya petir dan pembumian dengan ketahanan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ohm.

- Efisiensi pemakaian listrik pada pusat data *(Power Usage Effectiveness)*
  Memiliki perhitungan efisiensi pemakaian listrik pada pusat data (*Power Usage Effectiveness*) terhadap keseluruhan beban daya maksimum pusat data.

c. Spesifikasi sistem pendinginan

Pusat data memiliki dokumen spesifikasi teknis sistem pendingin, skema diagram sistem pendinginan, jaminan layanan purna jual, nomor kontak layanan, dan kontrak perawatan. Pengoperasian peralatan teknologi informasi di dalam area pusat data dan area telekomunikasi harus memenuhi pengukuran:

- Temperatur ruangan : 18°C – 27°C;
- Tingkat perubahan temperatur ruangan per-jam maksimum : 5°C;
- Kelembaban ruangan : RH (*Relative Humidity*) ≤ 60%, titik embun : 5.5°C – 15°C; dan
- Tingkat perubahan kelembaban ruangan maksimum per-jam : 5% RH.

Penyusunan posisi rak pusat data harus mampu memisahkan jalur panas dan dingin. Jalur panas adalah bagian belakang dari rak pusat data. Jalur dingin adalah bagian depan dari rak pusat data sebagai jalur masuk udara dingin dari sistem pendingin.

Bagian pada rak pusat data yang kosong harus ditutup untuk menjaga pendinginan maksimal. Insulasi diperlukan untuk mencegah terjadinya pengembunan yang disebabkan oleh perbedaan temperatur antara ruang pusat data dengan ruang sekitarnya. Insulasi dapat berupa material pelindung berbahan *alumunium foil* berserat dan karet berbahan NBR sesuai ISO 6944-1.

d. Spesifikasi sistem jaringan data

Pusat data memiliki topologi jaringan data terperinci pada area ruang pusat data dan ruang interkoneksi telekomunikasi. Pusat data memiliki topologi distribusi jaringan utama dari ruang pusat data kepada pengguna jasa pusat data. Distribusi jaringan dapat menggunakan berbagai moda kabel dan berbagai perangkat komunikasi serta memiliki label kabel. Pusat data memiliki sistem monitoring jaringan dengan *fitur* peringatan dini dan alur alternatif sesuai dengan kategori strata pusat data.

e. Spesifikasi sistem kebakaran

Spesifikasi sistem kebakaran ditinjau dari berbagai aspek, seperti pemilihan dan pemasangan peralatan pemadam kebakaran (seperti *sprinkler,* alat pemadam api, dan detektor asap), sistem alarm, konfigurasi jaringan, dan prosedur pengujian dan pemeliharaan. Tujuan dari tinjuan spesifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa sistem kebakaran dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencegah, mendeteksi, dan memadamkan kebakaran terjadi, sehingga dapat melindungi keamanan dan keselamatan manusia serta properti yang berharga. Sistem pemadam kebakaran yang ada di pusat data perlu dipantau dan dievaluasi secara periodik. Pusat data hendaknya memiliki sistem monitoring dan deteksi dini bahaya kebakaran yang meliputi deteksi asap dan deteksi panas dengan moda sinar ultra.

f. Spesifikasi sistem *monitoring* lingkungan

Pusat data memiliki sistem *monitoring* lingkungan yang terdiri dari:

- stabilitas tegangan arus listrik dan penggunaan daya listrik yang dapat memberikan peringatan sebelum terjadi kelebihan beban;
- suhu perangkat serta kelembaban relatif ruangan di dalam area pusat data dan area telekomunikasi; dan
- sistem pemipaan dengan *fitur monitoring* kebocoran pipa air atau genangan di bawah *raised floor*.

g. Spesifikasi sistem keamanan fisik

Spesifikasi sistem keamanan fisik mencakup berbagai aspek seperti pemilihan dan pemasangan perangkat keamanan fisik (seperti kamera, sensor gerak, dan alarm), konfigurasi jaringan, sistem kontrol akses, dan prosedur pengujian dan pemeliharaan. Spesifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem keamanan fisik dapat bekerja sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna, serta dapat melindungi aset dan sumber daya dari ancaman keamanan. Moda memasuki pusat data bisa dengan mempergunakan kartu akses elektronik, biometrik atau pemindai jari. Penyambungan interkoneksi telekomunikasi memerlukan persetujuan pihak penyedia jasa telekomunikasi dan pengawas penyedia jasa layanan pusat data untuk keamanan pusat data ditetapkan perimeter tertentu sesuai dengan kategori strata pusat data.

SNI No 8799-2:2019 tentang Panduan Manajemen Pusat Data

Standar ini bertujuan untuk menyediakan panduan tentang desain dan penetapan pengaturan manajemen pusat data, mengklarifikasi peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama di dalam penyelenggara pusat data, serta menyediakan contoh-contoh untuk dipertimbangkan dalam manajemen pusat data. Manajemen pusat data perlu diterapkan secara sistematis dan konsisten agar penyediaan layanan pusat data yang berkualitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Standar Panduan Manajemen Pusat Data dapat digunakan oleh penyelenggara yang bertanggung jawab atas manajemen atau pengelolaan Pusat Data, meliputi: perencanaan, operasional, manajemen layanan, manajemen SDM, monitoring, pelaporan dan pengendalian, serta manajemen keberlangsungan.

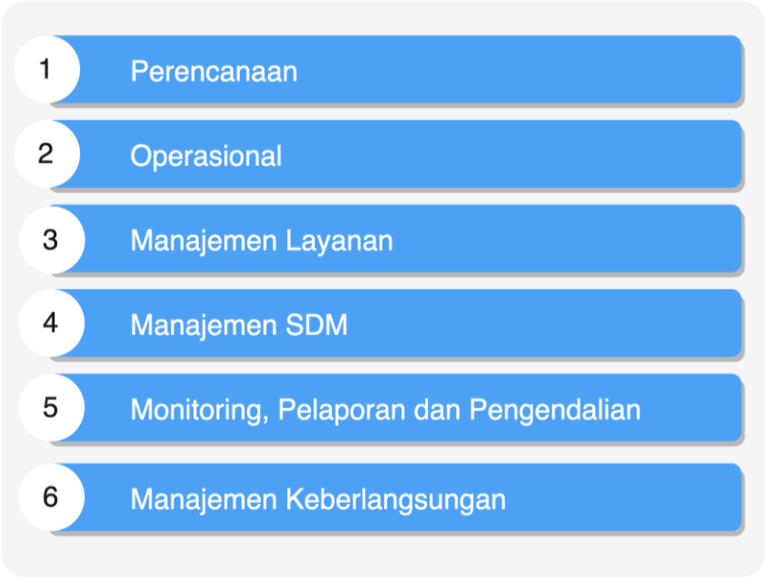

Gambar 2.5.2.2.2 SNI: No 8799-2:2019-Panduan Manajemen Pusat Data

Panduan Manajemen Pusat Data sebagai berikut :

a. Perencanaan

   Meliputi analisis kebutuhan, serta manajemen risiko dan kesesuaian.

b. Operasional

   Meliputi organisasi penyelenggara pusat data, sistem manajemen layanan operasional pusat data, infrastruktur (lokasi pusat data, manajemen fasilitas pusat data, manajemen aset, manajemen konfigurasi).

c. Manajemen layanan

   Meliputi manajemen layanan pusat data (sistem manajemen tingkat layanan, manajemen keselamatan, manajemen keamanan, dan manajemen proyek.

d. Manajemen SDM

   Meliputi pengelolaan kompetensi, pelatihan, dan manajemen kinerja.

e. Monitoring, pelaporan dan pengendalian

   Lingkup monitoring meliputi aktivitas pada gedung pusat data, aktivitas yang sedang berlangsung. Pelaporan kejadian tercatat dengan rincian waktu kejadian,

waktu pelaporan, dan resolusi akhir kejadian. Perubahan kendali tercatat dalam dokumen pengendalian.

f. Manajemen keberlangsungan

Meliputi manajemen keberlangsungan kegiatan, dan manajemen keberlangsungan lingkungan.

g. Pengembangan Pusat Data

1. Topologi Pusat Data

Terdiri dari sistem-sistem pendukung, infrastruktur utama, dan infrastruktur pendukung pusat data. Rincian topologi pusat data *sebagai berikut :*

a. Sistem–sistem pendukung pusat data meliputi:

- Sistem kelistrikan;
- Sistem pendingin dan kelembaban;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Sistem pengkabelan;
- Desain ruang komputer, meliputi: *raised floor, cable tray, dan lokasi rack pusat data*;
- Sistem keamanan;
- Sistem pencahayaan; dan
- Sistem pemantau lingkungan.

b. Infrastruktur Utama pusat data meliputi :

- Infrastruktur jaringan;
- Infrastruktur pusat data & *storage;*
- Model pusat data; dan
- Aplikasi pendukung (*Software*).

c. Infrastruktur Pendukung pusat data meliputi :

- *Local Area Network;*
- *Wireless LAN;*
- WAN;
- *Remote Access* dan VPN;
- Internet; dan
- Telekomunikasi.

2. Ruang Pendukung

Ruang pendukung pusat data adalah ruangan–ruangan untuk menempatkan perangkat–perangkat pendukung operasional pusat data seperti ruang perangkat sistem pendingin dan kelembaban, ruang perangkat *fire suppression*, dll. Ruang operasional dan pemantauan pusat data juga termasuk ruang pendukung pusat data. Rincian ruang pendukung pusat data yang direkomendasikan antara lain:

a. *Lobby*

Lokasi ruang tunggu tamu, rekanan, penukaran kartu identitas dengan kartu akses.

b. *Security*

Lokasi ruang operasi keamanan meliputi pemantauan *CCTV*, kontrol akses ke ruangan.

c. *Office*

Ruang kerja administrasi pusat data termasuk ruang kepala pusat data.

d. *Facility Control*

Ruang kontrol fasilitas pusat data seperti kontrol suhu dan kelembaban, power, listrik dan lain – lain.

e. *Hall*

Ruang serba guna yang bisa digunakan untuk kegiatan meeting dalam jumlah besar atau lainnya.

f. *Operations Command Center*

Petugas memonitor pusat data melalui *dashboard* yang ditayangkan dalam layar lebar.

g. *Network Room*

Lokasi rak perangkat jaringan dan keamanan jaringan. Semua struktur kabel data baik UTP maupun *fiber optic* berakhir di ruang jaringan.

h. *Meet Me Room*

Ruang terminasi (akhir) kabel jaringan dari *provider internet* (ISP), dan telekomunikasi.

i. *Network Operating Center*

Ruang pemantauan kinerja jaringan pusat data yang ditayangkan melalui *dashboard*.

j. *Meeting Room*

Ruang pertemuan untuk rapat atau diskusi pengelola pusat data.

k. *Fire Suppression System*

Ruang untuk menempatkan perangkat – perangkat pendukung sistem pemadam kebakaran (*fire suppression*).

l. UPS

Ruang untuk perangkat UPS pendukung catu daya cadangan ruang pusat data, lampu, cctv, *access control* dll.

m. *UPS Battery*

Ruang *battery* UPS yang terpisah dari UPS sehingga mudah untuk perawatan dan penggantian *battery*.

n. *Loading Dock*

Tempat untuk menerima peralatan yang baru datang untuk pusat data.

o. *Build Room/Staging Area*

Tempat untuk membangun dan mengkonfigurasi peralatan yang akan digunakan bagi pusat data.

p. *Chiller*

Ruang untuk perangkat *chiller* pendingin suhu.

q. *Warehouse*

Ruang untuk perangkat listrik.

r. *Genset Room*

Ruang untuk meletakkan perangkat generator pembangkit listrik cadangan (genset).

s. *Trafo*

Ruang untuk meletakkan trafo listrik dari PLN.

t. *Solar Tank*

Ruang untuk menyimpan solar sebagai bahan bakar genset.

u. Ruang Mekanik

Ruang kerja *Mechanical Engineering* (ME).

v. Ruang *Sparepart*

Ruang gudang penyimpanan suku cadang *(sparepart)* perangkat *mechanical* dan listrik pusat data.

3. Sistem Kelistrikan

Sistem kelistrikan meliputi catu daya utama dan catu daya cadangan. Catu daya utama berasal dari listrik PLN sedangkan catu daya cadangan berasal dari generator, dan UPS. Ketentuan tentang sistem kelistrikan di pusat data sebagai berikut:

a. Kabel daya masuk ke dalam bangunan pusat data determinasi di ruang kendali penyambungan listrik yang handal;

b. Daya listrik utama paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak di mana pusat data berada;

c. Tersedianya catu daya listrik alternatif seperti *generator standby* dengan kapasitas yang memadai untuk operasional minimal 3 jam selama kejadian gangguan listrik utama;

d. Perangkat *pusat data, storage, jaringan, keamanan pusat data & jaringan, CCTV, access control,* penerangan harus diproteksi dengan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) atau catu daya cadangan lainnya;

e. UPS atau catu daya cadangan lainnya harus memiliki kapasitas memadai untuk memasok beban pusat data sampai catu daya alternatif mampu memikul beban perangkat pusat data *(steady-state)*;

f. Kapasitas UPS harus lebih besar dari proyeksi beban puncak perangkat pusat data. Kapasitas beban rata-rata tidak lebih besar dari 80% kapasitas UPS;

g. UPS memiliki sistem pelaporan, pemantauan kinerja, dan sistem peringatan;

h. UPS yang digunakan telah memiliki jaminan dari pabrikan untuk dapat berfungsi sesuai spesifikasinya;

i. Bangunan harus dilengkapi dengan sistem proteksi petir;
j. Kabel komunikasi tembaga dari luar gedung diproteksi dengan peredam tegangan lebih (*surge suppressor*) sebelum ke ruang pusat data;
k. Ruang pusat data memiliki terminal pembumian (*grounding*) tembaga yang menjadi titik acuan pembumian ruangan tersebut;
l. Sistem *grounding* untuk peralatan pusat data harus dibedakan dengan peralatan lainnya seperti sistem penangkal petir pada bangunan pusat data; dan
m. Semua benda logam harus terikat ke tanah termasuk lemari, rak, *PDU, CRAC (AC* Ruangan pusat data), jalur kabel, dan setiap *raised floor* dengan *resistansi grounding* kurang dari 1 Ohm.

Kebutuhan listrik di pusat data untuk mendukung dua komponen yakni peralatan TI dan peralatan pendukung seperti tabel di bawah ini :

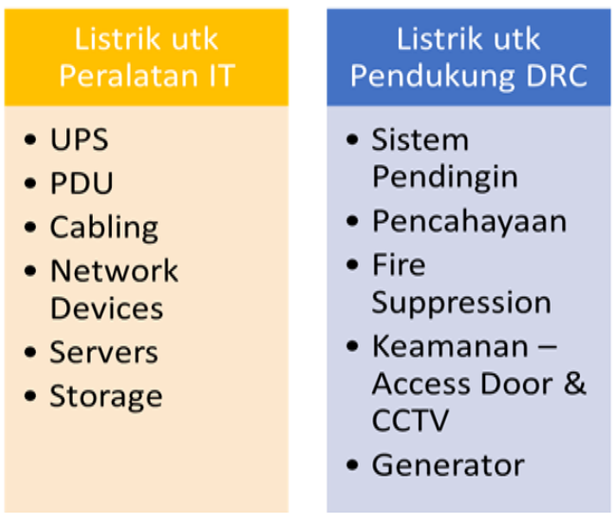

Gambar 2.5.2.2.3. Kebutuhan Listrik Pusat Data

4. Distribusi Listrik Ruang Pusat Data

Sistem kelistrikan di pusat data akan didistribusikan ke perangkat utama di dalam ruang komputer pusat data dengan dua teknik yakni:

a. Distribusi secara langsung dari PDU (*Power Distribution Units*)
Dari PDU listrik akan didistribusikan ke setiap lokasi kabinet tanpa melalui perantara apapun. Namun untuk pusat data yang berkapasitas besar hal ini tidak mungkin dilakukan karena tidak efisien dari segi pengkabelan.
b. Distribusi melalui *panel circuit*
PDU akan menuju ke *panel circuit* dan dari tempat tersebut akan didistribusikan ke masing-masing lokasi kabinet. Hal ini, jauh lebih

efisien dari segi pengkabelan karena dapat meminimalkan jarak yang jauh antara lokasi kabinet pusat data dengan PDU.

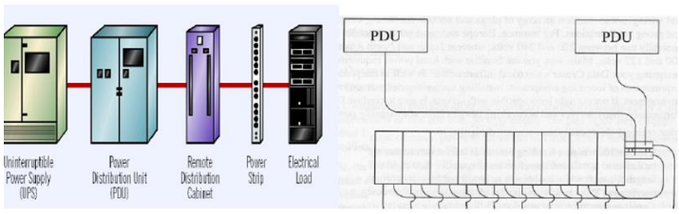

Gambar 2.5.2.2.4 Distribusi Listrik dari PDU melalui *Panel Circuit.*

Gambar di atas adalah distribusi listrik dengan menggunakan *panel circuit* yang tersebar di perangkat *remote distribution cabinet* untuk mendistribusikan listrik dari perangkat UPS ke beberapa panel sirkuit melalui *PDU. Distribution cabinet power* dari perangkat UPS akan diteruskan ke *PDU* untuk selanjutnya didistribusikan ke beberapa panel circuit *(remote distribution cabinet)*. Untuk selanjutnya *power* akan didistribusikan ke *power strip* yang ada di tiap rak *cabinet*. Di setiap *power strip* terdapat perangkat untuk pemantauan beban listrik (*electrical load*).

5. Redudansi Sumber Listrik

Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang tinggi maka diperlukan redudansi pada perangkat utama maupun cadangan dan jalur masuk ke pusat data. Saluran listrik ke lokasi pusat data berasal dari sumber gardu listrik yang berbeda. Selain itu, jalur masuk ke pusat data dari arah yang berbeda juga. Redudansi sumber listrik utama (PLN) dan sumber listrik cadangan diperlukan untuk menjamin keberlangsungan dan kehandalan dari pusat data. Redudansi meliputi sumber listrik PLN dari gardu listrik yang berbeda, jalur (lintasan) aliran listrik dari gardu menuju kawasan pusat data. Selain itu juga redudansi dari perangkat sumber listrik cadangan seperti generator, UPS, dan *automatic transfer switch (ATS).*

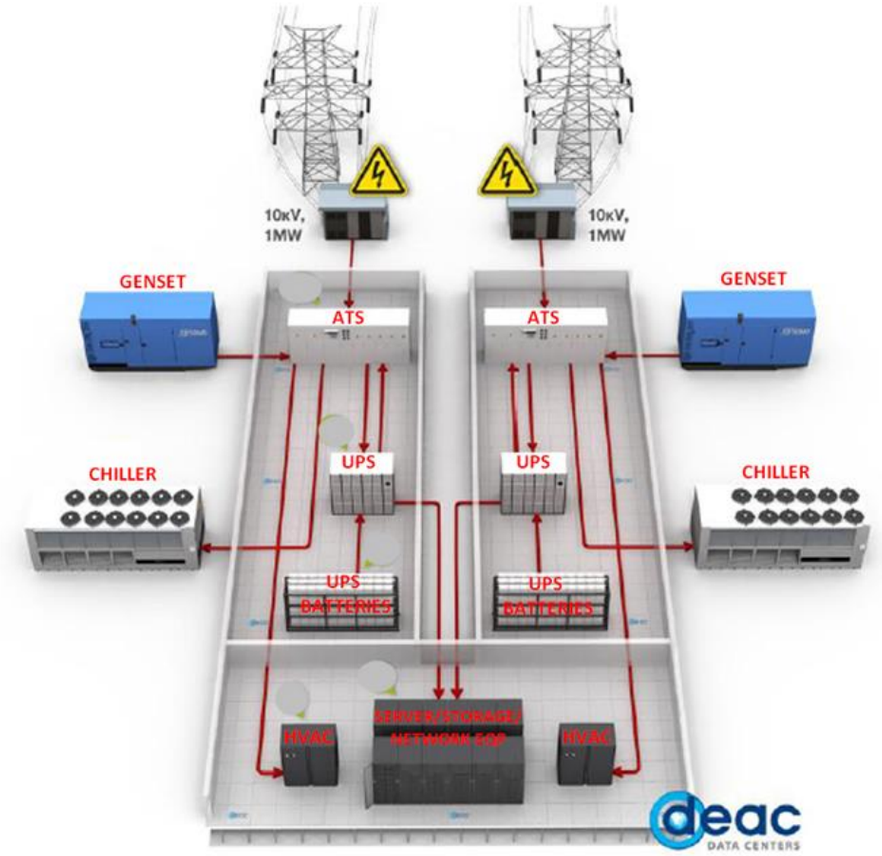

Gambar 2.5.2.2.5. Instalasi Jaringan Listrik dan Pendukung DC

Gambar di atas adalah gambar fisik instalasi sistem kelistrikan yang redundan. Listrik utama *DC* berasal dari dua sumber yang berbeda dengan jalur masuknya pun berbeda. Perangkat pendukung sistem kelistrikan, sistem pendingin diletakkan pada posisi yang berbeda yang memiliki jalur distribusi sendiri. Desain ini untuk menghindari adanya kegagalan pada sistem listrik atau pendingin karena adanya kerusakan pada salah satu jalur. Rak pusat data akan memiliki dua *power strip* dan akan ada *receptacle* yang berbeda juga disetiap pusat data.

Gambar di bawah ini adalah topologi infrastruktur jaringan kelistrikan secara logik. Setiap PDU terhubung ke sumber listrik cadangan (*UPS*) yang berbeda dengan sumber listrik utama dari dua sumber juga.

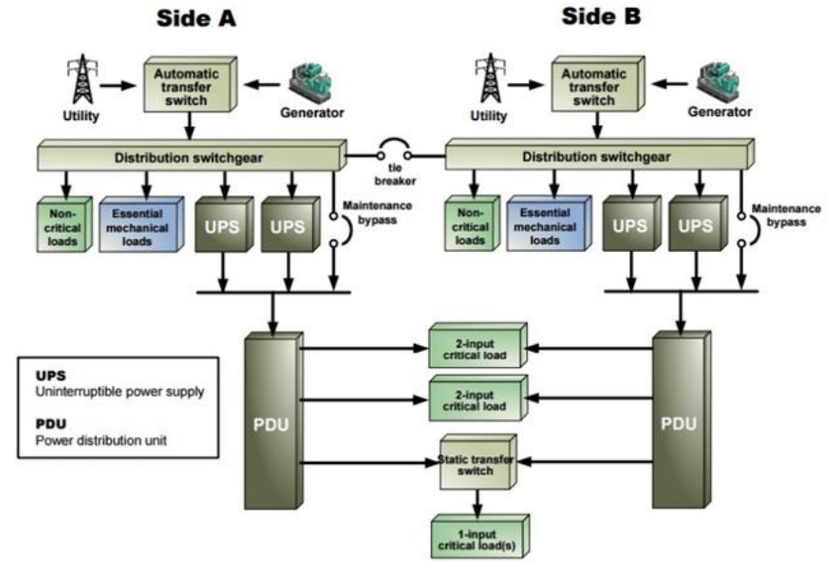

Gambar 2.5.2.2.6. Instalasi Logik dari Sistem Kelistrikan

6. Listrik Cadangan *(Standby Power)*

Sistem listrik yang berperan sebagai *standby power* pada pusat data merupakan sumber tenaga *back-up*-an ketika sistem listrik utama mengalami kegagalan. *Standby power* yang dibuat mempertimbangkan 3 (tiga) aspek yaitu redudansi, kesederhanaan, dan biaya. Berbagai perangkat terkait dengan *standby power* pada pusat data antara lain generator, *UPS*, dan baterai.

Berdasarkan fungsinya, *UPS* merupakan sebuah perangkat elektronik yang mampu menggantikan sementara, bahkan memperbaiki pasokan listrik yang diterima oleh satu atau beberapa perangkat yang dikoneksikan ke jalur keluaran *UPS*. Topologi *UPS* ada tiga, yaitu *offline UPS*, *online* UPS atau yang dikenal dengan *line-interactive* UPS, serta *true-online double conversion UPS*. Ketiganya memiliki perbedaan sangat mendasar, terutama pada besaran waktu perpindahan dari sumber listrik utama atau PLN ke sumber listrik *UPS*, yaitu baterai. Jika terjadi putus aliran listrik dari PLN, jika beban yang akan di-*back-up* oleh UPS adalah beban yang kritikal, maka sebaiknya menggunakan *True-online Double Conversion UPS* karena waktu perpindahannya adalah nol detik.

Selain lamanya waktu perpindahan, yang perlu dicatat adalah kehandalan dari masing-masing tipe terhadap kemampuan menangani permasalahan yang timbul dari jaringan listrik PLN, yaitu antara lain adalah kemampuan menangani tegangan naik atau turun, harmonik, *sag* (mati sesaat atau berkedip), *swell* (lonjakan tegangan), pergeseran fase, dan kemampuan untuk menerima daya dari genset sebagai pengganti listrik PLN untuk beberapa jam per-hari. *UPS* untuk *DC* sebaiknya memiliki kriteria antara lain:

- *UPS* memiliki *power factor* 0.9% agar efisien dan dapat diandalkan;

- *Runtime UPS* atau kemampuan *UPS* hidup selama sumber utama mati yakni UPS dapat bertahan 30 menit sampai 60 menit; dan
- Perhitungan kapasitas *UPS* adalah lebihkan 25% dari beban puncak.

a. Redudansi UPS

Redudansi UPS terdiri dari dua model yakni *parallel redundant* atau *internal modular redundant*. *Parallel redundant* merupakan perangkat *UPS* yang terdiri dari *UPS Module* dengan baterai redundan N+1, dimana N adalah jumlah *UPS* pada beban puncak. Selain itu, *internal modular redundant* merupakan jumlah modul *redundant* tanpa baterai. Secara umum, gambar di bawah memberikan informasi topologi perangkat *UPS* dengan dua model, yakni: *parallel redundant* dan *internal modular redundant.*

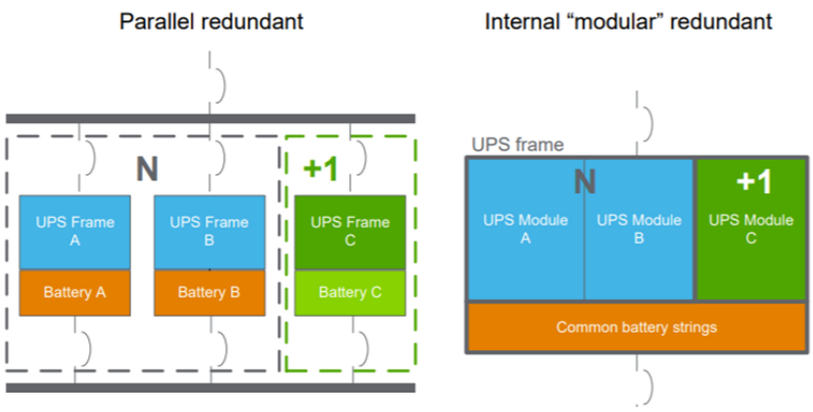

Gambar 2.5.2.2.7. Perbandingan Dua Model UPS DC

Gambar berikut menunjukkan contoh topologi perangkat UPS dengan kapasitas 1000kW yang terdiri dari 4 modul masing-masing 250kW, dimana *baseline* 1N *configuration* adalah satu UPS dengan empat modul tanpa *redundant*.

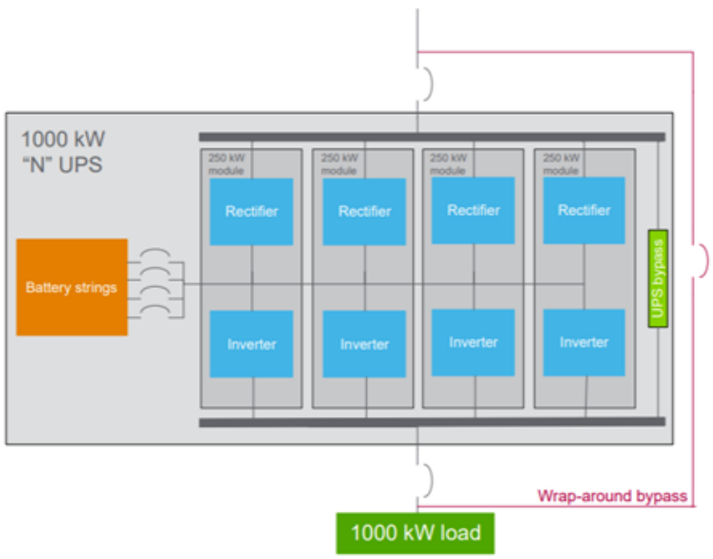

Gambar 2.5.2.2.8. UPS dengan Empat Modul Tanpa Redudansi

Gambar berikut menunjukkan topologi *UPS* dengan konfigurasi N+1 yang redundan secara internal dengan model modular. Terdapat lima modul *UPS*, yaitu empat modul utama dan satu cadangan.

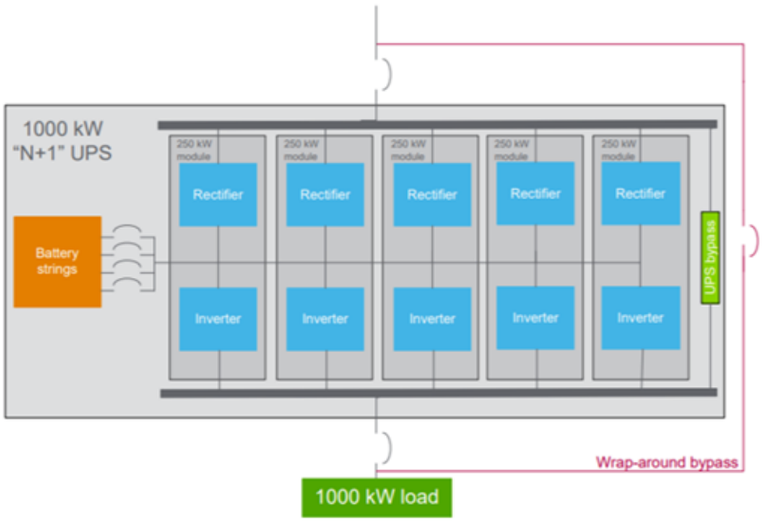

Gambar 2.5.2.2.9. UPS dengan *Internally Modular Redundancy*

Gambar berikut menunjukkan topologi UPS dengan konfigurasi N+1 yang redundan secara paralel. UPS utama terdiri dari dua modul dengan masing-masing daya 500 kW, serta satu modul cadangan dengan daya 500 kW.

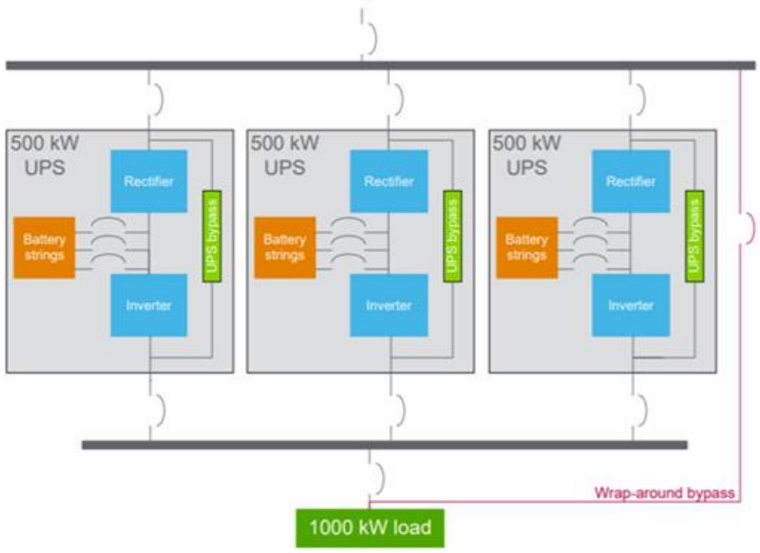

Gambar 2.5.2.2.10. UPS dengan *Parallel Redundant N+1*

b. *Fault Tolerance* UPS

Fault Tolerance adalah kegiatan yang memungkinkan suatu sistem untuk terus beroperasi (dalam hal ini, mendukung beban TI) jika terjadi kegagalan beberapa komponen. Beberapa *UPS* dirancang dengan tingkat toleransi kesalahan yang lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu, dalam pemilihan *UPS* penting untuk mempertimbangkan atribut desain toleransi kesalahan provinsi terutama jika arsitektur yang

dipilih terdiri dari satu bingkai *UPS* (seperti pada konfigurasi 1 dan 2). Di bawah ini contoh atribut desain toleransi kesalahan:

- Redudansi modul daya (*inverter*/penyearah);
- Redudansi penggemar;
- Redudansi catu daya pada pengontrol;
- Redudansi *string* baterai;
- Redudansi bus komunikasi;
- Redundansi dalam sistem kontrol; dan
- Saklar statis berukuran lebih besar dari beban maksimum yang diharapkan untuk mengakomodasi muatan *in-rush*/step peralatan IT.

7. Sistem Pendingin dan Kelembaban

Sistem pendingin berfungsi untuk menjaga suhu dan kelembaban di ruang pusat data tetap terjaga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika suhu terlalu panas atau terlalu dingin dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat di dalam ruang pusat data.

Kriteria umum untuk sistem pendingin dan kelembaban adalah :

- Temperatur dan kelembaban ruangan dijaga dan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan operasional normal perangkat di ruang pusat data yang paling peka;
- Peralatan pengatur temperatur dan kelembaban harus dihubungkan ke catu daya utama (didukung oleh catu daya alternatif);
- Memiliki skalabilitas dan adaptabilitas yang sangat baik; dan
- Sudah terstandarisasi.

Keadaan temperatur dan kelembaban yang harus dijaga di dalam pusat data:

- Temperatur kering: 200C–250C (680F-770F), dengan rata-rata keadaan temperatur normal di set menjadi 220C±100C;
- Kelembaban relatif (*Relative Humidity*) adalah jumlah air di udara pada suhu lingkungan : 40%-50%, dengan titik normal berada pada 45%±5%;
- Titik embun pada rentang 41,90F sampai 590F maksimum: 210C (69.80F); dan
- Perubahan maksimum yang boleh terjadi dari batas suhu sekarang adalah sebesar 50 C (90F) per jam.

Berikut ini adalah penjelasan dari perangkat sistem pendingin, tekanan udara, kelembaban, konsumsi listrik sistem pendingin, dan teknik pendinginan ruangan/pusat data :

Perangkat Sistem Pendingin

HVAC (*Heating, Ventilation, Air Conditioning*) bertujuan untuk menjaga agar temperatur tetap dalam keadaan rendah dan konstan serta menyebarkan titik-titik panas yang terletak di pusat data. Temperatur yang rendah sangat diperlukan untuk efisiensi operasi pusat data dan perangkat jaringan. Sistem pendingin pada pusat data pada prinsipnya adalah sistem aliran udara dingin, yang terbagi menjadi tiga perangkat utama, yaitu: *air handler, chiller, dan cooling towers*. Sistem pendingin dapat melakukan redudansi dengan memasang lebih dari satu air *handler* dan menara pendingin tambahan untuk setiap *chiller*. Selain itu, suplai air yang dibutuhkan untuk menciptakan udara dingin juga perlu dijamin keberadaannya dengan cara seperti membangun *container* penyimpan air yang dapat diandalkan.

Tekanan Udara

Tekanan udara pada pusat data harus dijaga pada level tertentu yang disebut sebagai tekanan statis. Pusat data didesain memiliki tekanan antara 0.2-0.5 *in. wc* guna menjaga agar tekanan udara tetap stabil maka periksa seluruh ruangan apakah telah tertutup dengan baik dan yakin bahwa tidak ada lubang sedikit pun. Mayoritas *handler* membutuhkan *buffer* sekitar 36-42 in (91.4-106.7 cm) sehingga perlu diletakan jauh dari *DC* air *handler*.

Kelembaban

Kelembaban merupakan konsentrasi uap air di udara. Kelembaban relatif menjadi salah satu aspek yang perlu dijaga dalam ruangan pusat data. Kelembaban relatif adalah persentase perbandingan dari jumlah uap air yang ada di udara dengan jumlah uap air di udara kering. Perangkat pusat data dan jaringan dapat berfungsi pada rentang level kelembaban yang cukup panjang yaitu sekitar 20%-80%. Menjaga kelembaban relatif dalam keadaan normal berfungsi untuk mencegah terjadinya korosi pada beberapa perangkat di pusat data karena penguapan (kelembaban tinggi) atau mencegah munculnya elektrostatis pada beberapa perangkat metal (kelembaban yang rendah). Cara yang dilakukan adalah melengkapi *Air Handling Unit (AH)* dengan kemampuan humidification atau melalui penggunaan unit-unit *humidification* yang terpisah dari *Air Handling Unit (AH).* Kelembaban relatif yang memungkinkan untuk suatu ruangan pusat data adalah sekitar 45%-55%, yaitu level kelembaban relatif normal sebesar 50% dengan tingkat sensitivitas sekitar 10%, yang memungkinkan variasi

pada level kelembaban sehingga komponen infrastruktur tidak konstan berada level tersebut.

Konsumsi Listrik Sistem Pendingin

Konsumsi listrik pusat data terbesar adalah pada sistem pendingin dan kelembaban (50%), pusat data dan *storage* (26%), perangkat jaringan (10%), *power conversion* (11%), dan *lighting* (3%). Untuk sistem pendingin dan kelembaban, komponen *chiller* mengkonsumsi daya listrik terbesar (39%), kipas (*fans)* (39%), *CW Pomps* (18%) dan paling kecil adalah *cooling towers* (4%).

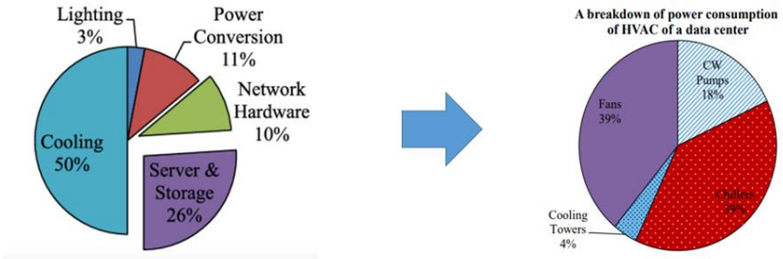

Gambar 2.5.2.2.11. Grafik Konsumsi Listrik di Pusat Data

Dari informasi di atas, diperlukan sistem pendingin dan kelembaban yang efisien dan efektif serta dukungan dari perangkat yang ada. Sistem pendingin dan kelembaban berfungsi untuk mendinginkan perangkat pusat data, *storage*, dan perangkat jaringan. Jika kapasitas ruang pusat data belum maksimal, maka diperlukan strategi agar tidak terjadi pemborosan karena prinsipnya adalah mendinginkan pusat data bukan ruang pusat data.

8. Teknik Pendinginan Ruangan/Pusat Data

Terdapat tiga teknik pendinginan ruangan pusat data atau rak pusat data yakni R*oom Cooling atau Cooling Room Air Conditioner (CRAC), IN-ROW,* dan *TOP Cooling.*

Gambar 2.5.2.2.12. Perbandingan Keuntungan dari Tiga Model Sistem Pendinginan Pusat Data

a) ROOM-COOLING

- Fungsi mendinginkan seluruh ruangan pusat data secara merata;
- *CRAC/PAC* disebar di sisi-sisi ruang pusat data;
- Jalur udara dingin (*cold aisle*) mengalir dari bawah *raised floor* naik ke atas melalui lubang – lubang kecil di papan *raised floor* arah depan *rack* pusat data;
- Jalur udara panas (*hot aisle*) yang berasal dari belakang *rack* pusat data akan mengalir ke perangkat *CRAC; dan*
- Kurang efisien jika ruang *pusat data* belum terisi penuh.

b) IN-ROW

- *CRAC/PAC* tidak lagi disebar di sisi-sisi ruang pusat data tapi sudah disebar di barisan *rack* pusat datanya;
- *CRAC/PAC* sudah disebar di barisan *rack pusat data*nya, di dalam barisan *rack-rack pusat data* ini di sisipkan *cooling system* yang mendinginkan udara panas di belakang pusat data dan menghembuskan ke sisi depan pusat data;
- Menutup jalur udara panas (*hot containment aisle*) agar tidak bercampur dengan jalur udara dingin, semua udara panas di dalam *hot containment* ini akan didinginkan oleh *CRAC* yang ada di samping *rack* pusat data; dan
- Tingkat efisiensi tinggi karena pembangunan bisa secara bertahap tergantung kebutuhan *rack* pusat data.

c) TOP-COOLING

- *CRAC/PAC* tidak lagi disebar di sisi-sisi ruang *pusat data* tapi diletakkan di atas *rack* pusat data;
- Di atas *rack-rack pusat data* ini disisipkan *cooling system* yang menghembuskan udara dingin ke sisi depan *pusat data* dan mendinginkan udara panas di belakang pusat data; dan
- Tingkat efisiensi tinggi paling tinggi karena tempat yang dibutuhkan paling kecil, konsumsi daya listrik paling kecil juga di bandingkan dua teknik lainnya.

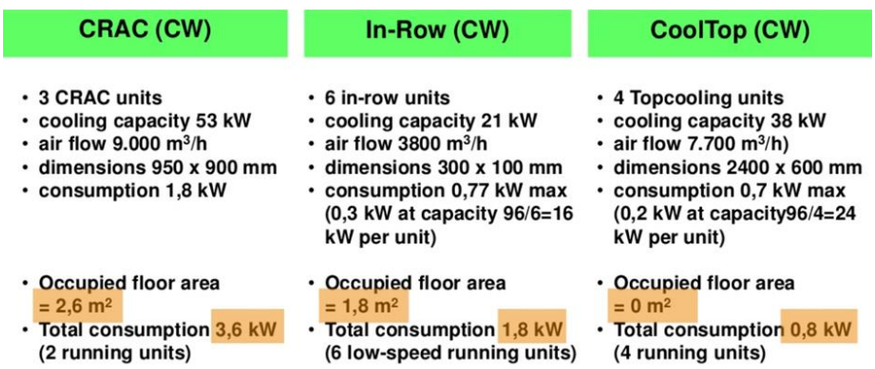

Gambar 2.5.2.2.13. Perbandingan Tiga Model Sistem Pendingin Pusat Data

Berdasarkan gambar diatas diperoleh informasi perbandingan teknik pendinginan ruang pusat data, teknik *CoolTop* mengkonsumsi daya listrik

paling kecil dibanding dua teknik lainnya sebesar 0,8kW. Selain itu luasan yang digunakan untuk perangkat pendingin juga paling kecil dibandingkan dua lainnya (0m2) karena perangkat di pasang di atas *rack* pusat data tidak menambah ruang di bawah. Kesimpulannya teknik *CoolTop* memiliki tingkat efisiensi paling tinggi untuk mendinginkan *rack pusat data.* Pada kondisi ruang *pusat data* yang belum terisi penuh, teknik ini juga sebagai solusi menekan biaya listrik.

9. Fire *Suppression System*

Perlindungan pusat data dari api mempunyai tiga tujuan utama yakni: identifikasi adanya api (*detection*), pemberitahuan adanya api ke seluruh penghuni Pusat Data dan orang-orang yang berkepentingan (*alarm*), dan memadamkan api (*suppression*). Acuan Standar dalam pembangunan *fire suppression system* menggunakan standar dari *NFPA* (*National Fire Protection Association*). Tipe *Suppression System* yang ada antara lain:

a. *Gas System*

Sistem gas tidak merusak perangkat pusat data dan perangkat lain efektif tetapi waktu singkat.

- Inert Gas Suppression System : mengurangi kadar oksigen sampai 15% untuk memadamkan api sehingga ruangan masih bisa digunakan untuk bekerja; dan
- *Synthetic Gas Suppression* : *cooling mechanism* untuk memadamkan api dengan menggunakan beberapa tipe gas seperti FM-200, Halon 1301, CO2.

b. *Water sprinklers*

Sistem air dapat merusak perangkat pusat data dll, dapat digunakan untuk melindungi bangunan dan memadamkan api.

Kriteria *Fire Suppression System* untuk pusat data adalah sebagai berikut :

- *QUICK*

  Sistem dapat memberikan respon cepat jika terjadi kebakaran untuk meminimalkan terjadinya kerusakan pada perangkat pusat data dll.
- *CLEAN*

  Jika terjadi insiden adanya titik api dan setelah gas dilepas serta proses pemadaman, tidak ada sampah atau sisa gas yang tertinggal.
- *ODORLESS*

  Gas yang dikeluarkan tidak menimbulkan bau yang menyengat.
- *NON-TOXIC*

  Gas yang dikeluarkan tergolong aman untuk manusia (tidak beracun).
- *NON-CONDUCTIVE*

  Gas yang dikeluarkan bukan penghantar panas atau elektrik karena dapat menyebabkan kerusakan.
- *LOW STORAGE SPACE*

Perangkat utama dan pendukung hanya membutuhkan tempat yang kecil.

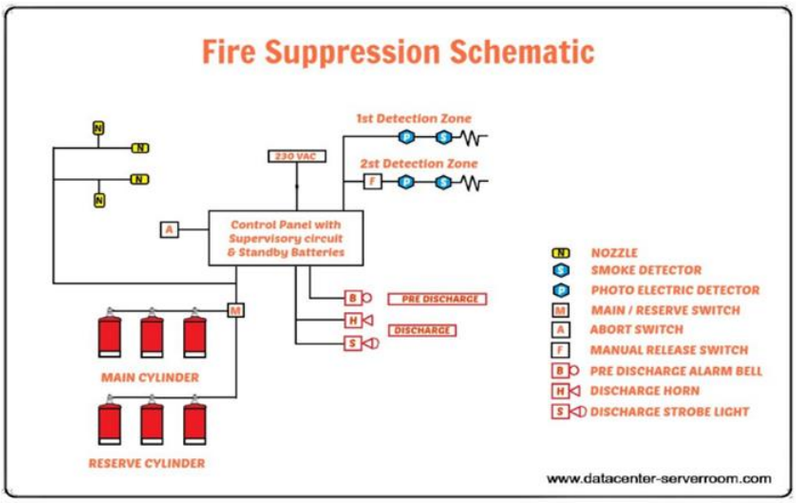

Gambar 2.5.2.2.14. *Skema Fire Suppression System* DC

Secara umum, sistem *fire suppression* terdiri atas elemen-elemen sebagai berikut:

1. Deteksi panas yang linier (kabel sensor panas), ditempatkan sepanjang *tray wire* dan jalur elektrik baik diatas maupun dibawah *raised-floor*. Alarm pada sensor dibunyikan pada sistem kontrol bukan untuk memicu bekerjanya sistem *fire suppression*;
2. Deteksi tipe *spot* secara *intelligent* (*photoelectric detector*);
3. Deteksi asap (*smoke detector*);
4. *Portable fire extinguisher;*
5. Agen pembersih sistem *fire suppression;* dan
6. *Pull station*, perangkat sinyal, dan sistem kontrol.

Sistem peringatan proteksi dini sangat penting untuk menghindari kerusakan dan kehilangan yang dapat terjadi selama status kebakaran belum benar-benar terjadi (atau awal terjadinya kebakaran), karena kerusakan peralatan yang signifikan dapat semata-mata terjadi karena asap atau pembakaran produk-produk lain terhadap peralatan elektronik. Contoh sebuah sistem peringatan proteksi dini adalah air sampling *smoke detection systems* yang menyediakan proteksi level lain untuk ruang komputer dan fasilitas-fasilitas pintu masuk terkait, ruang mekanik, dan ruang listrik. Sistem peringatan proteksi dini juga disediakan sebagai pengganti *smoke detectors* biasa, karena sensitivitas dan kapabilitas deteksinya jauh melampaui detektor konvensional.

Gambar berikut adalah topologi *fire suppression system* yang terdiri dari perangkat utama dan pendukung serta topologi instalasinya. Silinder tabung gas terdiri dari silinder utama dan silinder cadangan untuk redudansi. Gambar di bawah adalah instalasi *fire suppression*

system di ruang pusat data. *Smoke detector* di pasang di atas rack pusat data dan di bawah *raised floor*.

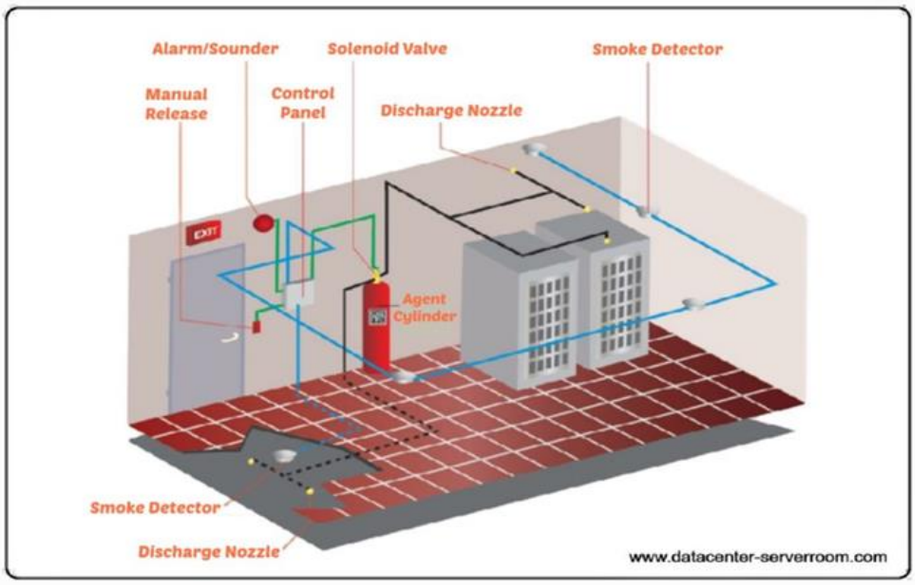

Gambar 2.5.2.2.15. *Instalasi Fire Suppression System* Pusat Data

Ketentuan dalam pembangunan *fire suppression system* pusat data sebagai berikut:

a. Jumlah dan lokasi pintu darurat kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Pintu darurat kebakaran dapat dibuka ke arah luar;
c. Lampu darurat dan tanda keluar diletakkan pada lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. Titik panggil manual harus dipasang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. Dinding dan pintu ke ruang pusat data, ruang mekanikal dan kelistrikan, ruang telekomunikasi dan ruangan penting lainnya memiliki tingkat terbakar (*fire-rating*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. Ruang komputer harus diproteksi dengan sistem pendeteksi asap. Seluruh sistem deteksi asap bangunan harus diintegrasikan ke dalam satu alarm bersama;
g. Catatan pemeliharaan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan deteksi api dan pemadaman harus tersedia untuk keperluan pemeriksaan;
h. Bukti pelatihan staf pada simulasi pengendalian kebakaran harus tersedia;
i. Ruang pusat data harus dilindungi dengan sistem pemadam kebakaran. Sistem pemadam kebakaran otomatis harus dapat diaktifkan secara manual;
j. Alat pemadam kebakaran harus ditempatkan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;

k. Semua tanda peringatan kebakaran harus ditempatkan pada posisinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. Seluruh sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran harus didesain dan dipasang oleh tenaga ahli yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi di bidang desain dan pemasangan sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran sesuai standar internasional/nasional atau regulasi nasional;

m. Jika ruang pusat data, ruang telekomunikasi, ruang mekanikal dan kelistrikan memiliki sistem pemadam api otomatis (*sprinkler*), maka sistem tersebut harus tipe *preaction*; dan

n. Jika ruang atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi pusat data tidak memiliki sistem pemadam api otomatis (*sprinkler)*, maka risiko kebakaran harus dikaji.

10. Sistem Pengkabelan

Sistem pengkabelan mengambil peran dalam komunikasi antar item di dalam pusat data atau ke dunia luar. Sistem pengkabelan infrastruktur jaringan data di pusat data menjadi salah satu hal yang paling rumit untuk merancangnya. Beberapa kriteria sistem pengkabelan yang baik antara lain adalah:

a. Mampu menyediakan konektivitas yang luas *(wide channel-capacity)* dan terstruktur dengan baik (sesuai dengan ketentuan).

b. Sederhana, yang berarti struktur pengkabelan yang dibuat tidak rumit sehingga memudahkan relokasi atau *maintenance*.

c. *Scalable* dan fleksibel, dapat mengakomodasi kebutuhan mendatang dan perubahan yang terjadi, serta keragaman dari aplikasi *user* (servis yang dimiliki pusat data).

Pertimbangan desain sistem pengkabelan yang akan digunakan yaitu:

a. Kabel menyumbang kurang dari 10 persen dari total biaya infrastruktur jaringan.

b. Rentang hidup dari sistem kabel yang khas adalah 16 tahun ke atas, sehingga kabel adalah komponen yang terpenting dalam sistem pengkabelan terstruktur.

c. Hampir 70 persen dari semua jaringan yang bermasalah berasal dari pemasangan kabel yang tak memenuhi standar dan komponen kabel itu sendiri.

Beberapa ketentuan umum sistem pengkabelan listrik dan data di *DC* antara lain:

a. Kabel kelistrikan dan kabel data harus dipisah, beberapa kabel harus diisolasi untuk menghindari gangguan.

b. Sistem kabel di atas dan dibawah yang terstruktur serta terlindungi, mendukung kemudahan dalam instalasi dan keamanan dari hubungan arus pendek.

c. Jalur kabel data harus memiliki jarak dari jalur listrik dan jalur *grounding* anti petir sesuai standard ANSI/TIA-469-B.

d. Infrastruktur kabel sesuai standar TIA-942 :

- Standar fiber optik jenis *single mode;*
- Jaringan backbone menggunakan *fiber optic multimode* dengan ukuran 50 *micron* kategori *lazer-optimized;*
- UTP CAT6;
- *Backbone fiber optic* maksimal 300 meter; dan
- Horizontal kabel maksimal 100 meter.

Standar ANSI/TIA/EIA-568-B berisi elemen dasar dari struktur sistem pengkabelan pada pusat data adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengkabelan horizontal (*horizontal cabling*);
2. Sistem pengkabelan *backbone* (*backbone cabling*);
3. *Cross-connect* pada pintu masuk (*entrance room*) atau area kerja (*main distribution area*);
4. *Main cross-connect* (MC) pada area distribusi utama(*main distribution area*);
5. *Horizontal cross-connect* (MC) pada ruang telekomunikasi, *HDA* atau *MDA*;
6. *Zone outlet* atau konsolidasi titik pada zone distribution area; dan
7. *Outlet* pada area distribusi perangkat (*equipment distribution area*).

Gambar di bawah ini adalah elemen fungsional yang saling terhubung satu sama lain pada sistem pengkabelan pusat data.

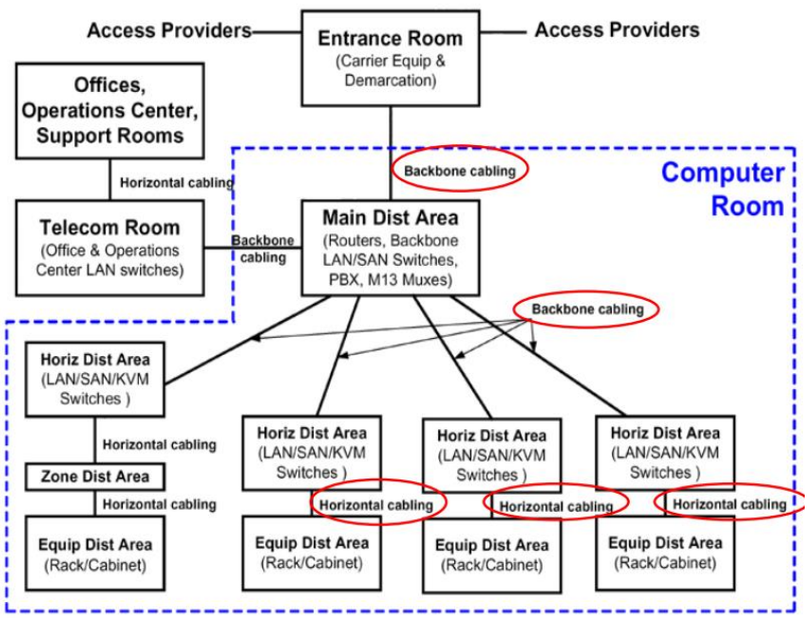

Gambar 2.5.2.2.16. Topologi Sistem Pengkabelan Pusat Data

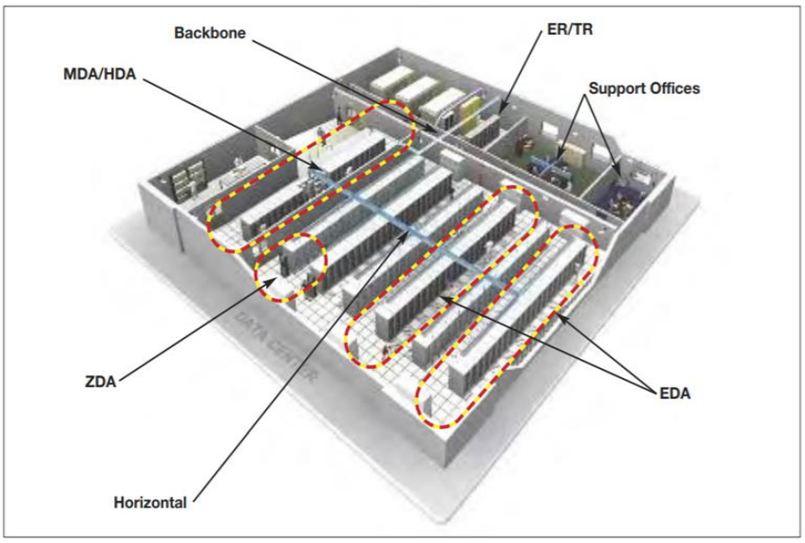

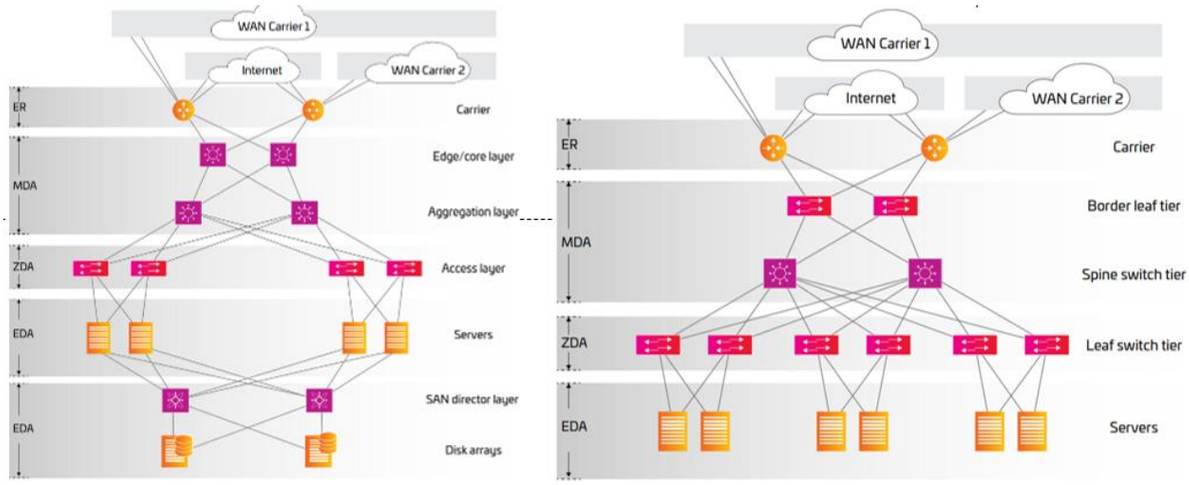

Gambar 2.5.2.2.17. Arsitektur Instalasi Sistem Pengkabelan Pusat Data

1. *Horizontal Cabling* (Pengkabelan Horizontal)

   Pengkabelan horisontal, sebagaimana ditentukan oleh ANSI/TIA/EIA-568-B, adalah kabel yang membentang dari ruang telekomunikasi ke area kerja dan berakhir di *outlet* telekomunikasi (informasi *outlet* atau dinding). *Wiring horizontal* dijalankan dari setiap *workstation* di suatu lantai yang sama ke ruang telekomunikasi, kemudian berakhir pada pemutusan *punchdown*, atau langsung ke *patch panel*. Di ruang telekomunikasi, peralatan jaringan seperti hub atau *switch* terhubung ke setiap stasiun kabel. Hub atau *switch* kemudian melewati sinyal komputer ke *workstation* lain atau ke pusat data, atau bahkan ruang telekomunikasi lainnya untuk konektivitas utama dengan seluruh jaringan. Pengkabelan horizontal meliputi:

   a. Kabel dari *patch panel* ke area kerja;
   b. Outlet telekomunikasi;
   c. Kabel penghentian;
   d. *Cross-connections* (jika diizinkan);
   e. Pembatasan maksimal pada satu titik transisi;

f. Komponen jaringan yang spesifik *(switch router)* tidak harus dipasang sebagai bagian dari kabel dengan sistem horizontal (dalam dinding). Perangkat *switch* atau *router* harus dipasang di ruang telekomunikasi atau area kerja;

g. Titik transisi ANSI/TIA/EIA-568-B memungkinkan untuk satu titik transisi di kabel horisontal. Titik transisi adalah di mana salah satu jenis kabel terhubung ke yang lain, seperti di mana kabel bulat terhubung ke bawah karpet kabel. Sebuah titik transisi juga bisa menjadi titik dimana kabel didistribusikan ke *furniture modular*.

2. *Backbone Cabling* (Pengkabelan *Backbone*)

   Kabel *backbone* diperlukan untuk menghubungkan fasilitas pintu masuk, ruang peralatan dan telekomunikasi, pengkabelan *backbone* juga bisa diaplikasikan antara lain untuk pemasangan kabel antara ruang inventaris dengan pintu masuk fasilitas pada bangunan dan koneksi vertikal antar lantai.

3. *Office, Operation Cente*r (Area Kerja)

   Ruang bangunan di mana pengguna menggunakan peralatan telekomunikasi, mencakup semua komponen kabel antara *outlet* komunikasi (soket dinding) dan peralatan telekomunikasi pengguna akhir, seperti telepon, *workstation* dan printer, termasuk *outlet* komunikasi itu sendiri. Area kerja kabel sistem dirancang agar fleksibel, tapi masih memerlukan manajemen hati-hati. Agar terhindar dari masalah seperti pasangan kabel yang tidak cocok, kita perlu memasang *outlet* area kerja dengan prosedur standar dan menggunakan standar yang sama (T568A atau T568B) di seluruh sistem saat menyelesaikan kabelnya. Standar T568B lebih umum digunakan dalam aplikasi data. Standar ini memerlukan dua lubang *outlet* pada setiap dinding, satu untuk suara, dan satu lagi untuk *data.568B* standar yang lebih umum digunakan dalam aplikasi data.

4. *Telecom Room* (Telekomunikasi)

   Daerah tertutup seperti ruang atau lemari, peralatan telekomunikasi perumahan, frame distribusi, terminasi kabel dan lintas menghubungkan kabel jaringan yang masuk dan keluar dari ruangan tersebut. Dengan kata lain, semua perangkat keras yang diperlukan untuk menghubungkan kabel horizontal untuk kabel vertikal. Daerah ini sering juga rumah peralatan bantu, termasuk berkas pusat data jaringan. Setiap bangunan harus memiliki minimal satu kabel lemari, dan standar merekomendasikan satu per lantai. Ukuran lemari khusus juga dianjurkan, tergantung pada ukuran area layanan, harus ada ruang yang cukup untuk tenaga pelayanan untuk melakukan pemeliharaan dan melaksanakan tugas-tugas lain, serta untuk semua

hardware yang dibutuhkan. Pencahayaan, pasokan listrik dan kondisi lingkungan juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh standar.

5. *Equipment Room* (Peralatan Kamar)

   Setiap rumah tentu perlu membangun sebuah sistem telekomunikasi, seperti: *PBXs*, pusat data, *switch* dll, dan penghentian mekanik dari sistem kabel telekomunikasi. Hal ini dianggap berbeda dari lemari telekomunikasi karena kompleksitas komponen. Ruang peralatan mengambil tempat dari lemari telekomunikasi atau menjadi fasilitas terpisah. Secara umum, fungsi ruang peralatan dapat dimasukkan dalam lemari kabel. Ruang peralatan menyediakan titik terminasi untuk vertikal (*backbone*) kabel yang terhubung ke satu atau lebih lemari telekomunikasi. Hal ini juga dapat menjadi titik *cross*-koneksi utama untuk seluruh fasilitas. Sebagai contoh, di lingkungan kampus, setiap bangunan dapat memiliki ruang dan peralatan sendiri dimana peralatan lemari telekomunikasi saling terhubung. Peralatan di ruangan juga dapat terhubung ke fasilitas kampus yang terhubung ke seluruh kampus.

6. *Entrance Room* (Fasilitas Pintu Masuk)

   Berisi pintu masuk layanan telekomunikasi ke gedung, dan mungkin juga mengandung koneksi *backbone.* Hal ini juga berisi titik demarkasi jaringan, yang merupakan interkoneksi untuk fasilitas telekomunikasi pertukaran operator lokal. Titik demarkasi biasanya 12 inci dari fasilitas pengangkut memasuki gedung, tapi *carrier* dapat menunjuk sebaliknya.

7. Administrasi Kabel

   Administrasi kabel adalah kegiatan yang mencakup seluruh aspek pengaturan kabel dalam suatu bangunan, seperti: mencatat, mengelola, dan menguji sistem kabel, membuat serta menjaga rencana sistem yang telah dirancang.

   A. Kabel Data *Ethernet*

      Kabel data yang digunakan menggunakan tipe *UTP Category* 6 (UTP Cat6) yang mampu meneruskan paket data sampai dengan 10 *Gbps* pada jarak 55 meter atau 1 *Gbps* pada jarak 100 meter. Di bawah ini adalah tabel kategori *UTP* dari yang awal *cat1* sampai dengan terbaru *Cat7*.

UTP Categories - Copper Cable				
UTP Category	Data Rate	Max. Length	Cable Type	Application
CAT1	Up to 1Mbps	-	Twisted Pair	Old Telephone Cable
CAT2	Up to 4Mbps	-	Twisted Pair	Token Ring Networks
CAT3	Up to 10Mbps	100m	Twisted Pair	Token Rink & 10BASE-T Ethernet
CAT4	Up to 16Mbps	100m	Twisted Pair	Token Ring Networks
CAT5	Up to 100Mbps	100m	Twisted Pair	Ethernet, FastEthernet, Token Ring
CAT5e	Up to 1 Gbps	100m	Twisted Pair	Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet
CAT6	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (55 meters)
CAT6a	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (55 meters)
CAT7	Up to 10Gbps	100m	Twisted Pair	GigabitEthernet, 10G Ethernet (100 meters)

Gambar 2.5.2.2.18. Kategori Kabel *UTP–Ethernet*

B. Fiber Optic

Standar ANSI/TIA/EIA-568-B memungkinkan penggunaan kabel serat optik baik yang menggunakan *mode single-mode* maupun *multimode*. Dengan kata lain, standar tersebut mengizinkan kabel serat optik yang memiliki karakteristik dan jenis mode yang berbeda untuk digunakan pada jaringan. Sistem pengkabelan horisontal ditetapkan dengan menggunakan kabel 62.5/125-*micron multimode*, sedangkan pengkabelan *backbone* dapat menggunakan baik kabel optik-serat *multimode* atau *single-mode*. Terdapat dua konektor yang sebelumnya banyak digunakan untuk pemasangan kabel dengan sistem serat optik, yaitu *ST* dan konektor *SC*. Banyak instalasi telah menggunakan jenis konektor *ST*, tetapi standar sekarang mengakui hanya konektor 568SC-jenis. Hal ini pun berubah sehingga serat-optik spesifikasi ANSI/TIA/EIA-568-B dapat menyetujui dengan Standar IEC 11801 yang digunakan di Eropa. Standar ANSI/TIA/EIA-568-B menggunakan *small-form factor* konektor seperti konektor MT-RJ.

Merujuk pada Gambar 2.2.2.2.18., menunjukkan gambaran singkat mengenai standar kabel serat optik yang digunakan pada pengkabelan premis. Terdapat empat tipe serat optik yang terdiri dari tiga jenis serat *multimode* (OM1, OM2, OM3) dan satu jenis serat *singlemode* (OS1).

Tipe Serat Optik	Panjang Gelombang	Atenuasi dB/Km (maks)	OFL Bandwidth MHz Km (Min)	EFL Bandwidth MHz Km (Min)
OM1	850 nm	3,5	200	Tidak ditentukan
(50/125úm atau 62,5/125 úm)	1300 nm	1,5	500	Tidak ditentukan
OM2	850 nm	3,5	500	Tidak ditentukan
(50/125úm atau 62,5/125 úm)	1300 nm	1,5	500	Tidak ditentukan
OM3	850 nm	3,5	1500 500	Tidak ditentukan
(50/125úm)	1300 nm	1,5		Tidak ditentukan
OS1	1310 nm	1,0	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan
(ITU-T G.652)	1550 nm	1,0	Tidak ditentukan	Tidak ditentukan

Gambar 2.5.2.2.19. Kategori Tipe Kabel Serat Optik

11. Desain Ruang Pusat Data

a. Desain *Raised Floor*

Disebut juga *access floor* atau *raised access floor*

Fungsi :

- Sistem distribusi udara dingin untuk mendinginkan peralatan IT;
- Jalur kabel data;
- Jalur kabel listrik;
- Jaringan kabel tembaga untuk *grounding* peralatan; dan
- Lokasi untuk mengalirkan air dingin (*chilled water*) atau pipa utilitas lainnya

Ukuran :

- *Panel* : 60x60cm;
- Tebal : 28-42 mm; dan
- Tinggi penyangga : 35cm.

Gambar 2.5.2.2.20. Komponen Pendukung *Raised Floor*

1. *Cable Tray*

a. Bawah *Raised Floor*

- 2 *cable tray* untuk listrik & data
- Standar TIA-569-B : kabel data dan listrik terpisah minimal 61 cm

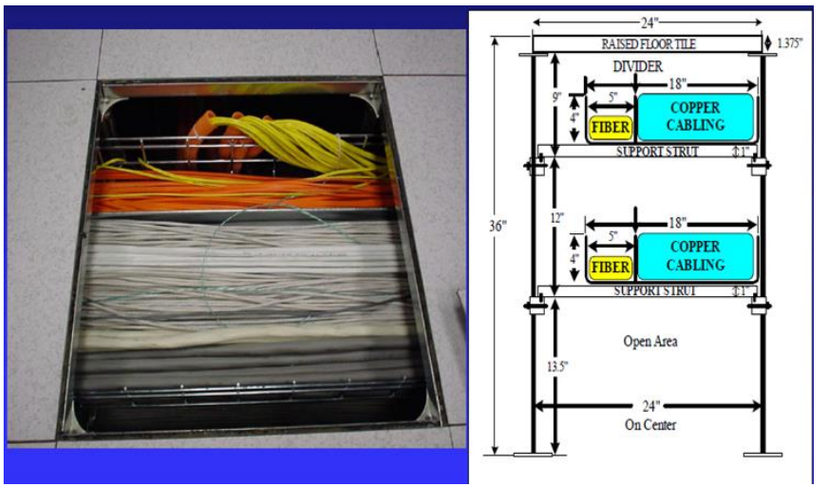

Gambar 2.5.2.2.21. Instalasi Kabel Data & *Power* di Bawah *Raised Floor*

b. Atas *Rack* Pusat Data

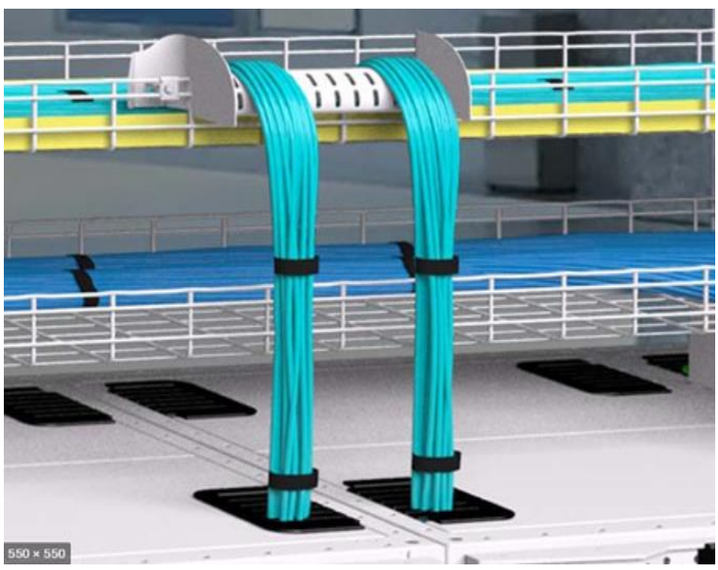

Gambar 2.5.2.2.22. Instalasi Kabel Data di Atas *Rack* pusat data dengan *Cable Tray*

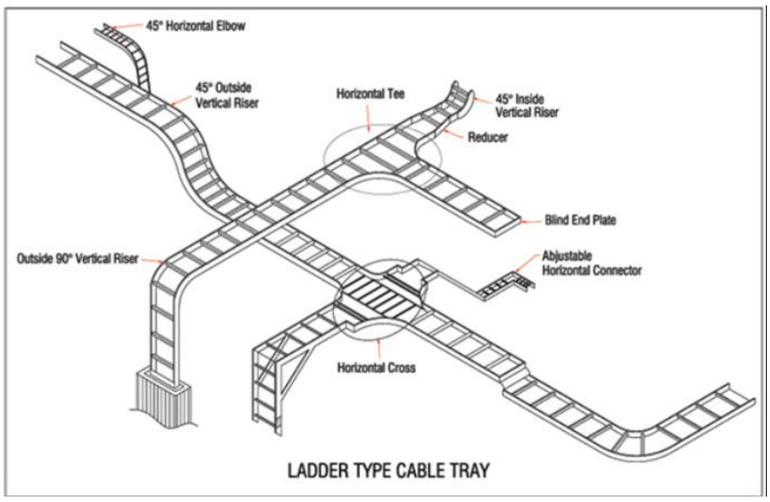

Gambar 2.5.2.2.23. Type Kabel *Tray* Untuk Instalasi Sistem Pengkabelan

c. *Rack Location Unit*

- Rack pusat data memenuhi persyaratan *EIA-310 (Electrical Industry Alliance Standards)* pada perangkat *rack 19"*.
- Memiliki jalur akses listrik dan jalur kabel data di bagian atas dan bawah, selain dari bagian depan dan belakang.
- Tata letak kabinet diatur sedemikian rupa untuk dapat mudah diakses oleh para teknisi dan diberikan ruang kosong agar suhu pada *rack* pusat data dapat lebih terkendali.
- Seluruh perangkat pusat data dan peralatan lainnya yang besar diletakan dibagian paling bawah *rack* pusat data.
- Setiap *rack* pusat data memiliki dua *strip power* dengan sumber listrik dari sumber yang berbeda.

Gambar dibawah ini adalah topologi redudansi sistem kelistrikan untuk tipe Tier 4 dengan *mode* aktif-aktif. Dua buah *power strip* yang ada di *rack* pusat data di-*supply* oleh sumber listrik yang berbeda.

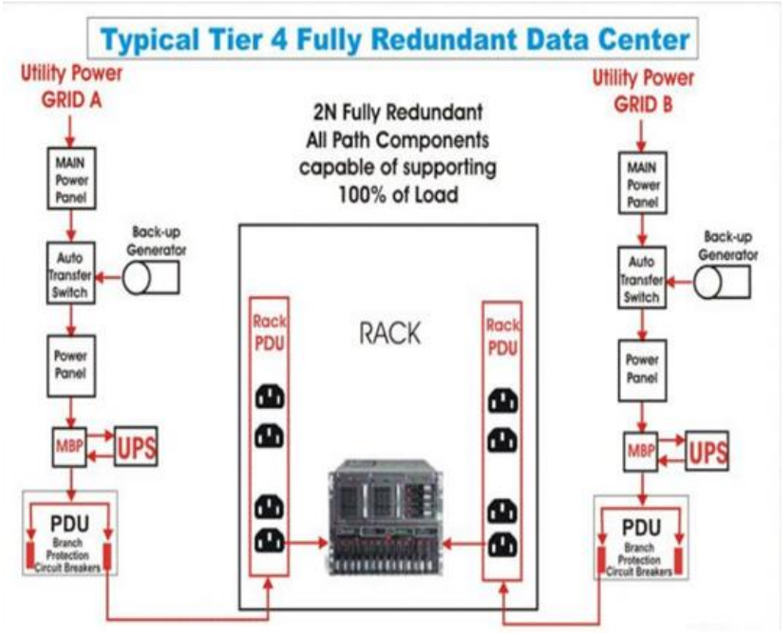

Gambar 2.5.2.2.24 Instalasi Sistem Kelistrikan *Tier-4-Fully Redundant*

12. Sistem Keamanan Fisik

Terdiri dari sistem pengamanan fisik dan non-fisik pada pusat data. *Fitur* sistem pengamanan fisik meliputi akses user ke pusat data berupa kunci akses memasuki ruangan (kartu akses atau biometrik) dan seluruh petugas keamanan yang mengawasi keadaan pusat data (baik di dalam maupun di luar). Pengamanan fisik juga dapat diterapkan pada seperangkat infrastruktur dengan melakukan penguncian dengan kunci gembok tertentu. Di dalam tabel sistem keamanan fisik pusat data terdiri dari keamanan gedung, keamanan ruang komputer, dan kebijakan serta prosedur keamanan.

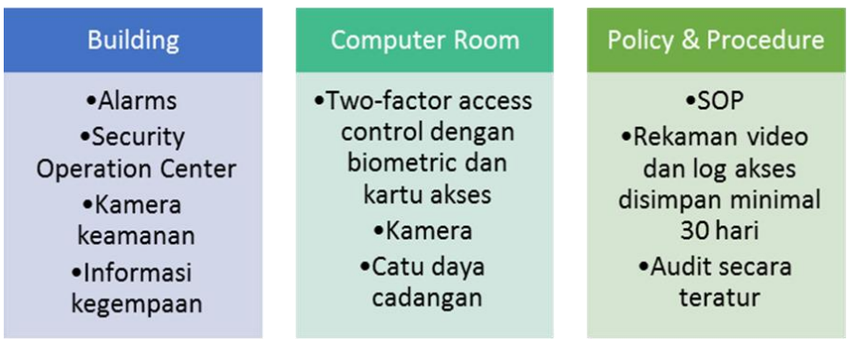

Gambar 2.5.2.2.25 Keamanan Pusat Data

Gambar di bawah ini adalah contoh perangkat pendukung sistem keamanan di pusat data untuk keamanan rak pusat data, dan pintu masuk ruang pusat data.

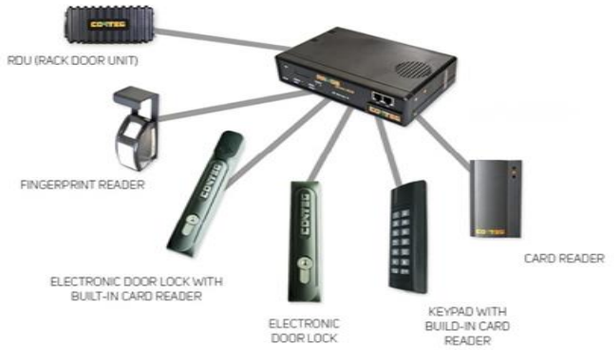

Gambar 2.5.2.2.26 Perangkat Pendukung Keamanan Fisik Pusat Data

13. Sistem Pencahayaan

Sistem pencahayaan pusat data diperlukan untuk menerangi ruang pusat data utama dan ruang–ruang lainnya termasuk jalur masuk atau lorong. Standar sistem pencahayaan menggunakan TIA-942-A. Lokasi penempatan lampu–lampu antara lain di atas lorong dan di atas antara rak cabinet. Selain lampu utama terdapat juga Lampu dan petunjuk darurat (*emergency lighting & signs*), jalur darurat. Penempatan dan intensitas cahaya lampu pusat data dibagi menjadi tiga lapisan yakni :

- Level 1: untuk lokasi yang tidak dihuni. Pencahayaan tidak perlu untuk mendukung kejelasan penglihatan manusia tetapi peralatan pengawas video harus tetap dapat bekerja dengan baik.
- Level 2: untuk lokasi menuju ruang pusat *Farm* berupa gang-gang dan lorong-lorong yang cukup diterangi untuk pergerakan yang aman dan kamera keamanan dapat bekerja dengan baik.
- Level 3: lokasi utama pusat data *Farm* dll dan ditempati di mana karyawan akan bekerja. Tingkat cahaya bidang horizontal: 500 *lux* dan bidang vertikal: 200 *lux.*

14. Sistem Pemantau Lingkungan

Fungsi utama dari *EMS* (*Environment Monitoring System*) adalah memonitor operasional pusat data dari ancaman lingkungan yang ada disekitarnya. Oleh karena operasional pusat data yang *non-stop* maka perlindungan dan monitoring pada fasilitas ini harus diutamakan. Pada umumnya gangguan yang dimonitor oleh *EMS* ini adalah suhu dan kelembaban pada pusat data *room*, kebocoran air di bawah *raised floor* (*Water Leak*) yang diakibatkan kondensasi *AC*, getaran, dan tegangan listrik akibat pemadaman yang tiba-tiba. Untuk memonitoring perangkat *EMS* ini didukung oleh beberapa sensor cerdas yang berupa *modular sensor*. Sensor ini bervariasi, diantaranya *sensor status on/off AC, sensor water leak, door contact, temperature, humidity, vibration, air flow, voltage, smoke detector*, dll. Sensor ini mendeteksi adanya kelainan pada lingkungan pusat data, yang kemudian informasi tersebut dikirimkan ke

perangkat *EMS*. Perangkat ini kemudian akan mengirimkan sinyal peringatan berupa *alarm, buzzers, e-mail, sms,* dan telepon ke *system administrator* atau *network administrator* yang selalu siaga di *NOC*, sehingga masalah tersebut dapat ditangani secepat mungkin. *EMS* akan melakukan pemantauan komponen berikut ini :

- Tegangan;
- Akses masuk keluar ruangan;
- Suhu/*temperatur;*
- Kelembaban;
- Adanya air di ruangan;
- Adanya asap/*smoke* di ruangan;
- Memonitor sisa solar di tangki genset;
- Mengaktifkan *AC* tambahan; dan
- Mendapatkan *alert* melalui *email/SMS* terintegrasi dengan *NMS* yang ada.

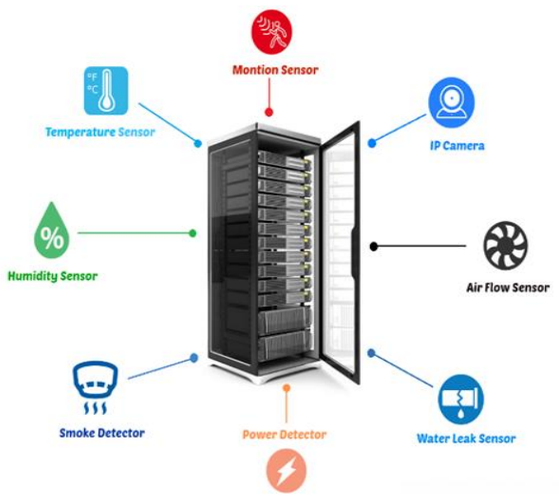

Gambar 2.5.2.2.27. Komponen Lingkungan yang akan di Pantau di Pusat Data

Gambar 2.5.2.2.28. Metode Notifikasi Sistem Pemantauan Lingkungan Pusat Data

15. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*)

Data dan informasi merupakan "aset" paling berharga bagi organisasi pemerintahan maupun perusahaan. Oleh karena itu, perlu ada perlindungan dan pencadangan terhadap data dan informasi, sehingga data tetap aman apabila terjadi bencana. Dengan begitu aktivitas bisnis tetap berlanjut. Oleh karenanya dibutuhkan Pusat Pemulihan Bencana atau *Disaster Recovery Center* (*DRC*) untuk membuat data, informasi, dan aplikasi tetap aman dan dapat diakses. *DRC* adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat IT, sistem, aplikasi dan data cadangan untuk persiapan menghadapi bencana yang diperlukan oleh perusahaan besar dan organisasi pemerintahan.

DRC diperlukan oleh organisasi pemerintahan maupun perusahaan dengan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Kegagalan mesin dan perangkat keras (*hardware*)

   Meskipun perusahaan telah berinvestasi dengan membeli mesin dan perangkat keras (*hardware*) kelas tinggi, bukan berarti tidak perlu membangun *DRC.* Mesin canggih dengan *hardware* tinggi dan *DRC,* akan membuat perusahaan tidak menemukan kegagalan layanan dikarenakan fungsi *hardware*.
2. Faktor kesalahan manusia

   Pencegahan terhadap kesalahan manusia (*human error*) seperti penghapusan data atau kesalah konfigurasi yang tidak disengaja. Organisasi bisa mencadangkan data dan mengembalikannya lagi seperti sebelum dilakukan kesalahan.
3. Faktor alam yang tak bisa diprediksi

   Bencana tidak bisa dihindari dan diprediksi, untuk itu, memiliki *DRC* yang berada di beberapa tempat yang secara teori aman terhadap bencana besar.
4. Optimalisasi layanan

   Kepemilikan *DR*C berarti memberikan layanan kepada masyarakat yang baik. Saat ini masyarakat ingin mendapatkan layanan cepat, dan itu bisa terjadi jika infrastruktur bisa diakses kapan saja. Keandalan dan kelancaran suatu layanan *DRC* bergantung pada terpenuhinya beberapa syarat bangunan dan arsitektur sebagai berikut:

- Jarak fisik antara Pusat Data utama (*DC*) dan Pusat Pemulihan Bencana (*DRC*) minimal lebih dari 40 km.
- Berada di luar radius mitigasi bencana seperti gunung berapi, tsunami, banjir, dan lain – lain.
- Tidak berada pada jalur patahan geologi.
- Indeks rawan bencana rendah di Indonesia (Sumber: Indeks Rawan Bencana Indonesia BNPB, 2011).
- Akses jaringan internet memadai, mudah dijangkau.

- Bangunan harus memiliki area bongkar muat yang memadai untuk menangani keluar - masuk barang/peralatan.

Terdapat 3 (tiga) jenis Pusat Pemulihan Bencana (*DRC*) yakni:

1. *Cold DRC*

   Cold DRC adalah jenis yang paling sederhana terdiri dari elemen daya dan kemampuan jaringan serta pendinginan tetapi tidak termasuk elemen perangkat keras lain seperti pusat data dan penyimpanan. Sebelum dapat digunakan, data cadangan bersama dengan beberapa perangkat keras tambahan harus dikirim ke lokasi *DRC* dan diinstal.

2. *Warm DRC*

   Warm DRC adalah tipe DRC yang standar terdiri dari komputer dengan segala komponennya seperti aplikasi, jalur komunikasi data, serta *backup* data yang paling terbaru, dimana sistem tidak secara otomatis berpindah, tetapi masih terdapat proses manual meskipun dilakukan seminimal mungkin.

   Ketika *DC* utama mengalami masalah atau bencana, semua akan dialihkan ke *DC* kedua yaitu *DRC* dan sementara itu *DRC* beroperasi, personel juga mulai memulihkan data yang ada pada *DC* utama agar *DC* utama bisa beroperasi kembali.

3. *Hot DRC*

   Hot DRC merupakan tipe *DRC* yang paling cepat dengan mengatur secepat mungkin operasional bisnis, sistem aplikasi, jaringan komunikasi data yang sama sudah dipasang dan sudah tersedia di lokasi *DRC*. Data secara terus menerus (*realtime*) di *backup* menggunakan koneksi antara *DC* dan lokasi *DRC*, dan operasional bisnis akan berjalan pada saat itu juga,tanpa harus mematikan sistem di pusat data lama.

A. Usulan Topologi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana (DRC)

Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo belum memiliki Pusat Pemulihan Bencana atau DRC. Sesuai dengan arahan dari Kebijakan Pemerintah untuk memanfaatkan Pusat Data Nasional. Diskominfo dapat memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional sebagai lokasi DRC.

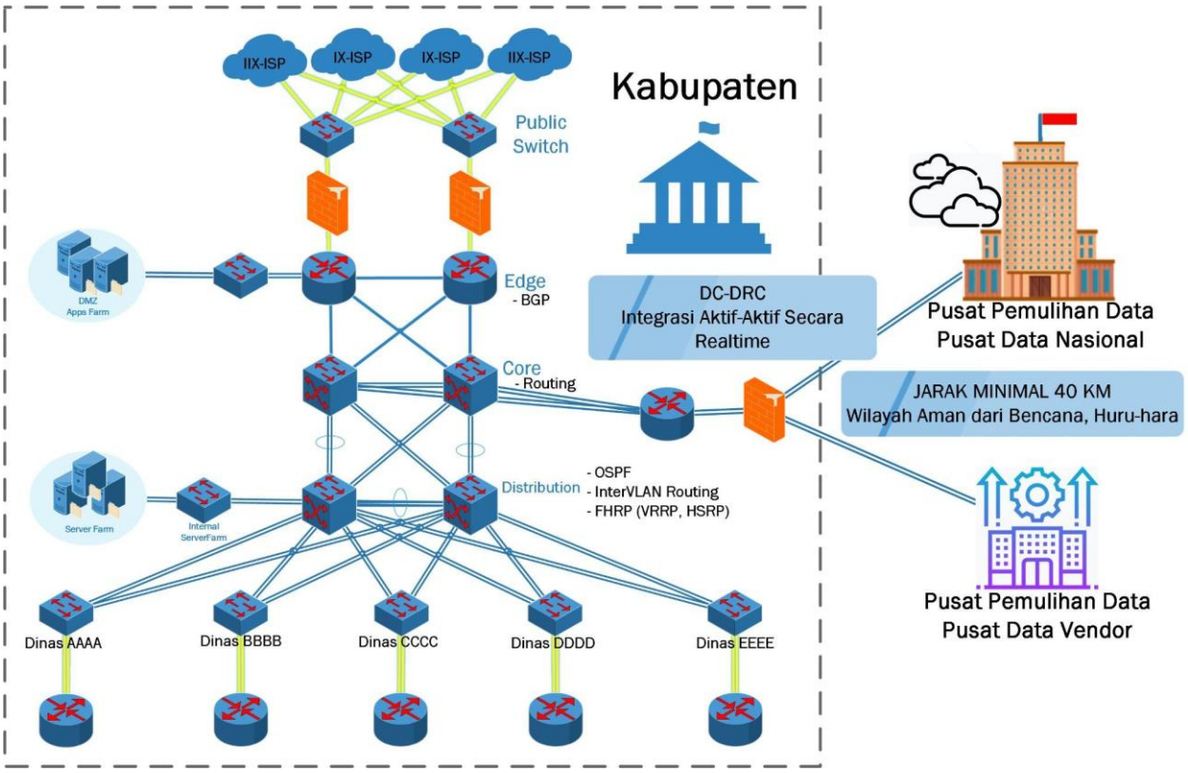

Gambar 2.5.2.2.30 Usulan Topologi *DC-DRC*

B. Katalog Pusat Data/Komputasi

Katalog infrastruktur (fasilitas komputasi - pusat data) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (fasilitasi komputasi - pusat data) (To be) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 2.5.2.1.1. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Fasilitas Komputasi - Pusat Data

silitas	Kode Model Referensi SPBE	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan	Unit Kerja Penanggung jawab	Klasifikasi Tier Fasilitas	Sistem Pengamanan Fasilitas	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
putasi ehatan					Sendiri	Dinas Kesehatan	Non Tier		RAI.01 FASILITAS KOMPUTASI	RAI.01.01 PUSAT DATA

Platform

Perangkat Keras Server

Katalog infrastruktur (perangkat keras server) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat keras server) (To Be) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 2.5.2.3.1. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform Server

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor
KP-DAI.03.01.01.29	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				
KP-DAI.03.01.01.30	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				
KP-DAI.03.01.01.31	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				
KP-DAI.03.01.01.32	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				
KP-DAI.03.01.01.33	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor
KP-DAI.03.01.01.34	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				
KP-DAI.03.01.01.35	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				
KP-DAI.03.01.01.36	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				
KP-DAI.03.01.01.37	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				
KP-DAI.03.01.01.38	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				
KP-DAI.03.01.01.39	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				
KP-DAI.03.01.01.40	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Daftar Aplikasi	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor
KP-DAI.03.01.01.41	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				
KP-DAI.03.01.01.42	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				
KP-DAI.03.01.01.43	Komputer Server					Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan				
KP-DAI.03.01.01.44	Server					Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika				
KP-DAI.03.01.01.45	Server					Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika				
KP-DAI.03.01.01.46	Server					Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika				

A. Perangkat Storage

Katalog infrastruktur (perangkat keras storage) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat keras storage) (To Be) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 2.5.2.3.2. Referensi Arsitektur Infrastruktur - *Platform* Perangkat Keras Storage

a Media orage	Deskripsi Data Storage	Data yang Digunakan[Data Input]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Perangkat Lunak yang Digunakan	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Lev (Dependen
sk	Media penyimpanan data magnetik dengan kapasitas besar, biasanya digunakan pada komputer atau server untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data.		Sendiri	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 MEDIA PENYIMPA AN (DATA STORAGE)
sk	Perangkat penyimpanan sekunder yang bekerja dengan piringan berputar, memiliki kecepatan baca/tulis sedang dan digunakan untuk penyimpanan jangka panjang.		Sendiri	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 MEDIA PENYIMPA AN (DATA STORAGE)
ge r	Server khusus yang difungsikan untuk menyimpa		Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 MEDIA PENYIMPA AN (DATA STORAGE)

a Media orage	Deskripsi Data Storage	Data yang Digunakan[Data Input]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Perangkat Lunak yang Digunakan	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Lev (Dependen
	n dan mengelola data dalam jumlah besar, dapat diakses oleh banyak pengguna melalui jaringan.									
ge r	Solusi penyimpanan terpusat yang mendukung akses data bersama (shared storage) dan biasanya digunakan dalam sistem jaringan perusahaan atau pusat data.		Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 MEDIA PENYIMPA AN (DATA STORAGE)
ge r	Perangkat penyimpanan dengan dukungan redundansi (RAID, backup) untuk menjaga keamanan dan ketersediaan data.		Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 MEDIA PENYIMPA AN (DATA STORAGE)
ge r	Server yang dirancang untuk mendukung kinerja tinggi dalam penyimpanan data, biasanya dilengkapi dengan manajemen data dan fitur keamanan.		Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.0 MEDIA PENYIMPA AN (DATA STORAGE)
ge	Sistem		Sendiri	Dinas	Dinas		Direct	RAI.03	RAI.03.01	RAI.03.01.0

a Media orage	Deskripsi Data Storage	Data yang Digunakan[Data Input]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Perangkat Lunak yang Digunakan	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Lev (Dependen
r	penyimpanan berbasis server yang skalabel, dapat diperluas sesuai kebutuhan organisasi, mendukung integrasi dengan berbagai aplikasi bisnis.			Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika		Attached Storage (DAS)	PLATFORM	KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	MEDIA PENYIMPA AN (DATA STORAGE)

B. Perangkat Jaringan

Katalog infrastruktur (perangkat keras jaringan) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat keras jaringan) (To Be) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 2.5.2.3.3. Referensi Arsitektur Infrastruktur - *Platform* Perangkat keras jaringan

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Leve (Dependenc
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR	RAI.03.01.03 PERANGKAT

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Leve (Dependenc
	jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.						DAN APLIKASI	KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Leve (Dependenc
	berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.							
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Leve (Dependenc
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Leve (Dependenc
	LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.							
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINC
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINC
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINC
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINC

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Leve (Dependenc
	duplex dan VLAN.							
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Leve (Dependenc
	OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.							
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINC
tch	Switch L2 adalah perangkat jaringan layer 2 OSI yang menghubungkan perangkat dalam LAN dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC, dengan fitur dasar seperti full-duplex dan VLAN.	Switch L2		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINC
ess Point	Access Point adalah perangkat jaringan nirkabel yang berfungsi menghubungkan perangkat ke jaringan LAN melalui Wi-Fi, memungkinkan perangkat bergerak (seperti laptop dan smartphone) untuk terhubung ke internet atau jaringan internal tanpa kabel.	Wireless Equipment		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINC
ess Point	Access Point adalah perangkat jaringan nirkabel yang berfungsi menghubungkan perangkat ke	Wireless Equipment		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINC

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Leve (Dependenc
	jaringan LAN melalui Wi-Fi, memungkinkan perangkat bergerak (seperti laptop dan smartphone) untuk terhubung ke internet atau jaringan internal tanpa kabel.							
ess Point	Access Point adalah perangkat jaringan nirkabel yang berfungsi menghubungkan perangkat ke jaringan LAN melalui Wi-Fi, memungkinkan perangkat bergerak (seperti laptop dan smartphone) untuk terhubung ke internet atau jaringan internal tanpa kabel.	Wireless Equipment		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
ess Point	Access Point adalah perangkat jaringan nirkabel yang berfungsi menghubungkan perangkat ke jaringan LAN melalui Wi-Fi, memungkinkan perangkat bergerak (seperti laptop dan smartphone) untuk terhubung ke internet atau jaringan internal tanpa kabel.	Wireless Equipment		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
ess Point	Access Point adalah perangkat jaringan nirkabel yang berfungsi menghubungkan perangkat ke jaringan LAN melalui Wi-Fi, memungkinkan perangkat bergerak (seperti laptop dan smartphone) untuk terhubung ke internet atau jaringan internal tanpa kabel.	Wireless Equipment		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Leve (Dependenc
ess Point	Access Point adalah perangkat jaringan nirkabel yang berfungsi menghubungkan perangkat ke jaringan LAN melalui Wi-Fi, memungkinkan perangkat bergerak (seperti laptop dan smartphone) untuk terhubung ke internet atau jaringan internal tanpa kabel.	Wireless Equipment		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINC
ess Point	Access Point adalah perangkat jaringan nirkabel yang berfungsi menghubungkan perangkat ke jaringan LAN melalui Wi-Fi, memungkinkan perangkat bergerak (seperti laptop dan smartphone) untuk terhubung ke internet atau jaringan internal tanpa kabel.	Wireless Equipment		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINC
ess Point	Access Point adalah perangkat jaringan nirkabel yang berfungsi menghubungkan perangkat ke jaringan LAN melalui Wi-Fi, memungkinkan perangkat bergerak (seperti laptop dan smartphone) untuk terhubung ke internet atau jaringan internal tanpa kabel.	Wireless Equipment		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINC
ess Point	Access Point adalah perangkat jaringan nirkabel yang berfungsi menghubungkan perangkat ke jaringan LAN melalui Wi-Fi, memungkinkan perangkat bergerak (seperti	Wireless Equipment		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARINC

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Leve (Dependenc
	laptop dan smartphone) untuk terhubung ke internet atau jaringan internal tanpa kabel.							
ter	Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan sekaligus, meneruskan data antar jaringan, serta menentukan rute terbaik untuk pengiriman paket data, biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke internet.	Router		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
ter	Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan sekaligus, meneruskan data antar jaringan, serta menentukan rute terbaik untuk pengiriman paket data, biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke internet.	Router		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
ter	Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan sekaligus, meneruskan data antar jaringan, serta menentukan rute terbaik untuk pengiriman paket data, biasanya digunakan untuk	Router		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Leve (Dependenc
	menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke internet.							
ter	Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan sekaligus, meneruskan data antar jaringan, serta menentukan rute terbaik untuk pengiriman paket data, biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke internet.	Router		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
ter	Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan sekaligus, meneruskan data antar jaringan, serta menentukan rute terbaik untuk pengiriman paket data, biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke internet.	Router		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
ter	Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan sekaligus, meneruskan data antar jaringan, serta menentukan rute terbaik untuk pengiriman paket data, biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal	Router		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Leve (Dependenc
	(LAN) ke internet.							
ter	Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan sekaligus, meneruskan data antar jaringan, serta menentukan rute terbaik untuk pengiriman paket data, biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke internet.	Router		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
ter	Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan sekaligus, meneruskan data antar jaringan, serta menentukan rute terbaik untuk pengiriman paket data, biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke internet.	Router		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING
ter	Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan sekaligus, meneruskan data antar jaringan, serta menentukan rute terbaik untuk pengiriman paket data, biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke	Router		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level (Dependenc
	internet.							
ter	Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan sekaligus, meneruskan data antar jaringan, serta menentukan rute terbaik untuk pengiriman paket data, biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke internet.	Router		Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.03 PERANGKAT KERAS JARING

C. Perangkat Periferal

Katalog infrastruktur (perangkat keras periferal) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (perangkat keras periferal) (To Be) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. **Metadata katalog perangkat keras periferal yang lebih lengkap dan komprehensif sesuai Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dapat diakses pada link:** https://bit.ly/MetadataSPBEKulonProgo **di sheet Perangkat Periferal.**

Tabel 2.5.2.3.4. Referensi Arsitektur Infrastruktur - *Platform* Perangkat Periferal

Nama rangkat eriferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	(
op	Laptop adalah perangkat	Input/Output	Badan Kepegawaian dan	Badan Kepegawaian dan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Penge

Nama rangkat eriferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	(
	komputer portabel yang digunakan untuk mengolah data, menjalankan aplikasi, dan terhubung ke jaringan.		Pengembangan SDM	Pengembangan SDM		INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI		
	PC adalah komputer pribadi yang berfungsi untuk mengolah data, menjalankan program, dan digunakan oleh satu pengguna.	Input/Output	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Penge
op	Laptop adalah perangkat komputer portabel yang digunakan untuk mengolah data, menjalankan aplikasi, dan terhubung ke jaringan.	Input/Output	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan dan P
op	Laptop adalah perangkat komputer portabel yang digunakan untuk mengolah data, menjalankan aplikasi, dan terhubung ke jaringan.	Input/Output	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan dan P
op	Laptop adalah perangkat komputer portabel yang digunakan untuk mengolah data, menjalankan aplikasi, dan terhubung ke jaringan.	Input/Output	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan dan P
Proyektor	LCD Proyektor adalah perangkat output yang menampilkan tampilan visual dari komputer atau laptop ke layar yang lebih besar.	Output	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Benca
ter	Printer adalah perangkat output yang berfungsi mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke	Input/Output	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badan Pemb

Nama rangkat eriferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	(
	media kertas.							
ter	Printer adalah perangkat output yang berfungsi mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media kertas.	Input/Output	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badar Pemb
Proyektor	LCD Proyektor adalah perangkat output yang menampilkan tampilan visual dari komputer atau laptop ke layar yang lebih besar.	Output	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badar Pemb
op	Laptop adalah perangkat komputer portabel yang digunakan untuk mengolah data, menjalankan aplikasi, dan terhubung ke jaringan.	Input/Output	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badar Pemb
op	Laptop adalah perangkat komputer portabel yang digunakan untuk mengolah data, menjalankan aplikasi, dan terhubung ke jaringan.	Input/Output	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badar Pemb
op	Laptop adalah perangkat komputer portabel yang digunakan untuk mengolah data, menjalankan aplikasi, dan terhubung ke jaringan.	Input/Output	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badar Pemb
op	Laptop adalah perangkat komputer portabel yang digunakan untuk mengolah data, menjalankan aplikasi, dan terhubung ke jaringan.	Input/Output	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badar Pemb
	UPS (Uninterruptible Power Supply) adalah perangkat	Input/Output	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badar Pemb

Nama rangkat eriferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	(
	yang menyediakan daya cadangan sementara saat listrik padam atau terjadi gangguan, sekaligus melindungi perangkat elektronik dari lonjakan tegangan.							
	UPS (Uninterruptible Power Supply) adalah perangkat yang menyediakan daya cadangan sementara saat listrik padam atau terjadi gangguan, sekaligus melindungi perangkat elektronik dari lonjakan tegangan.	Input/Output	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badar Pemb
LED	TV LED adalah perangkat output yang menampilkan gambar atau video dengan kualitas tinggi.	Output	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Badar Pemb
op	Laptop adalah perangkat komputer portabel yang digunakan untuk mengolah data, menjalankan aplikasi, dan terhubung ke jaringan.	Input/Output	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagia Ruma
op	Laptop adalah perangkat komputer portabel yang digunakan untuk mengolah data, menjalankan aplikasi, dan terhubung ke jaringan.	Input/Output	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagia Ruma
op	Laptop adalah perangkat komputer portabel yang digunakan untuk mengolah data, menjalankan	Input/Output	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagia Ruma

Nama rangkat eriferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	(
	aplikasi, dan terhubung ke jaringan.							
op	Laptop adalah perangkat komputer portabel yang digunakan untuk mengolah data, menjalankan aplikasi, dan terhubung ke jaringan.	Input/Output	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagia Ruma
op	Laptop adalah perangkat komputer portabel yang digunakan untuk mengolah data, menjalankan aplikasi, dan terhubung ke jaringan.	Input/Output	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagia Ruma
ner	Scanner adalah perangkat input yang digunakan untuk memindai dokumen atau gambar fisik menjadi file digital.	Input/Output	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagia Ruma
ter	Printer adalah perangkat output yang berfungsi mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media kertas.	Output	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagia Ruma
ter	Printer adalah perangkat output yang berfungsi mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media kertas.	Output	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagia Ruma
ter	Printer adalah perangkat output yang berfungsi mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke media kertas.	Output	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Bagia Ruma
Zoom ting	Alat Zoom Meeting adalah perangkat konferensi yang digunakan untuk mendukung rapat daring, biasanya	Input/Output	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	RAI.03.01.05 PERIPHERAL	Dinas

Nama rangkat eriferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	(
	terdiri dari kamera, mikrofon, speaker, dan software pendukung agar komunikasi audio visual berjalan lancar.							

Jaringan Intra Pemerintah

Prinsip utama dalam penyediaan jaringan data meliputi aspek ketersediaan, keamanan, dan pengendalian. Untuk memenuhi ketiga prinsip tersebut maka pengembangan arsitektur jaringan intra pemerintah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat bertumpu pada empat karakteristik yakni berjenjang atau hirarki (*hierarchy*), zonasi (*zoning*), redudansi (*redudancy*), dan keamanan (*security*). Hierarki dan zonasi memungkinkan pengembangan jaringan yang terdiri dari banyak komponen yang saling terkait secara berlapis dan terstruktur. Model hierarkis dapat membantu untuk memaksimalkan kinerja jaringan, mengurangi waktu untuk mengimplementasikan dan memecahkan masalah desain, dan meminimalkan biaya.

Desain jaringan redudansi untuk memenuhi persyaratan untuk ketersediaan jaringan dengan menduplikasi komponen jaringan, jalur koneksi jaringan, dan rute jaringan (*routing*). Redudansi dapat menghilangkan satu titik kegagalan pada jaringan. Redudansi juga memfasilitasi pembagian beban, yang meningkatkan kinerja jaringan. Redudansi akan menambah kompleksitas dan biaya pada jaringan, dan harus dirancang dengan hati-hati. Desain keamanan jaringan ditujukan untuk peningkatkan keamanan jaringan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dari serangan yang dilakukan oleh pihak luar. Perangkat f*irewall* berfungsi untuk memantau lalu lintas jaringan dan membatasi akses ke dalam jaringan internal, sehingga dapat membantu melindungi jaringan dari serangan yang tidak diinginkan dan memperkuat sistem keamanan jaringan secara keseluruhan.

A. Topologi Jaringan

Jaringan *LAN* harus dibangun secara terstruktur, baik dari sisi topologi jaringan, segmentasi jaringan, pengalamatan (*addressing*) maupun penggunaan perangkatnya. Dengan memiliki struktur jaringan yang baik maka akan dapat dilakukan pengaturan, pengawasan serta pemanfaatan yang lebih maksimal. Perangkat aktif jaringan sebagai komponen utama di jaringan tentunya harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya jaringan, seperti kapasitas *bandwidth*, menyaring paket data yang lewat (*traffic filtering*), segmentasi jaringan (*VLAN)*, mengatur prioritas lalu lintas paket data (*traffic priority*), dan ketahanan jaringan (*network reliability*) yang baik, serta berbagai fungsi pengontrolan lainnya, sehingga pemanfaatan TI dalam proses bisnis organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan hasil yang maksimal.

B. Berjenjang atau hirarki (*3-Tier Hierarchy*)

Model desain jaringan berjenjang atau hirarki untuk membantu dalam mengembangkan topologi di lapisan *diskrit*. Setiap lapisan atau *tier*, dalam hierarki menyediakan fungsi tertentu yang mendefinisikan perannya dalam jaringan secara keseluruhan. Setiap lapisan dapat difokuskan pada fungsi tertentu, memungkinkan untuk memilih sistem dan fitur yang tepat untuk setiap lapisan.

Setiap lapisan model hirarkis memiliki peran spesifik :

1. Lapisan inti (*Core Layer*)

   Menyediakan transportasi optimal antar lokasi. Lapisan inti dari topologi hierarkis tiga lapis adalah tulang punggung berkecepatan tinggi *internetwork*. Karena lapisan inti sangat penting untuk interkonektivitas, maka komponen pendukung harus redudansi. Lapisan inti harus sangat andal dan harus beradaptasi dengan perubahan dengan cepat.

2. Lapisan distribusi (*Distribution Layer*)

   Lapisan distribusi dapat berfungsi sebagai penghubung antara layanan jaringan pada lapisan akses dengan lapisan inti, penerapan kebijakan keamanan, lalu lintas paket data, dan perutean *(routing)*. Pada lapisan distribusi dapat dikonfigurasi agar dapat merutekan atau menghubungkan antara satu *VLAN* dengan *VLAN* yang lain. Hal ini memungkinkan untuk terciptanya hubungan antar *VLAN* dalam satu jaringan yang sama, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pengelolaan jaringan secara keseluruhan.

3. Lapisan Akses

   Lapisan akses adalah lapisan yang langsung berinteraksi dengan perangkat pengguna seperti komputer desktop, laptop, printer, *CCTV*, dan lain – lain. Perangkat jaringan yang digunakan pada lapisan akses meliputi *switch access* dan *Access Point* (AP) pada jaringan nirkabel.

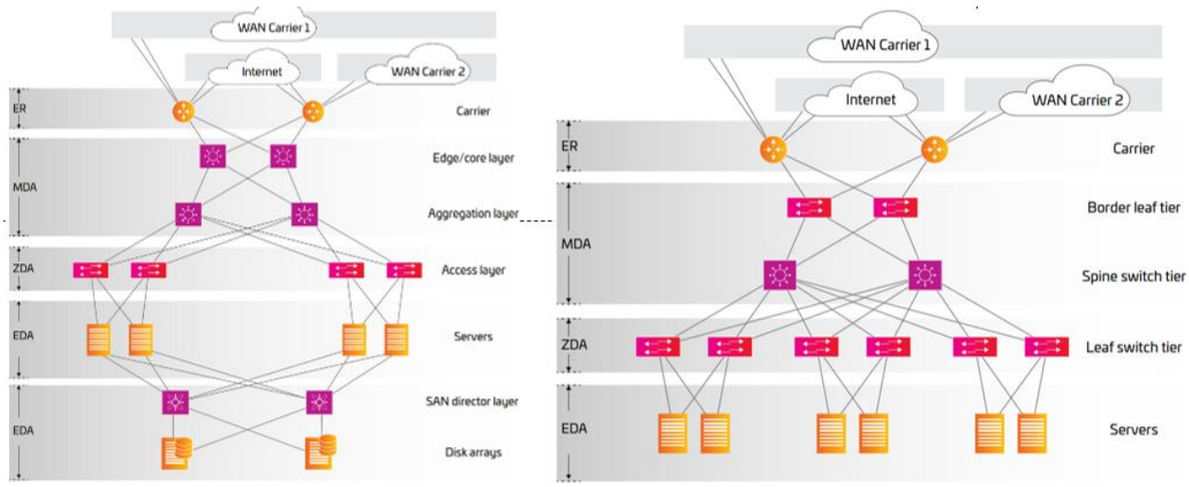

Gambar 2.5.2.4.1 Topologi Jaringan *Hierarchy dan Spine Leaf*

Penggunaan model hirarki dapat membantu untuk meminimalkan biaya. Pembelian perangkat yang sesuai untuk setiap lapisan hierarki, dapat menghindari pengeluaran uang pada fitur yang tidak perlu. Pendekatan modular dari desain hierarkis memungkinkan perencanaan kapasitas yang akurat dalam setiap lapisan hierarki, sehingga mengurangi *bandwidth* yang terbuang.

Desain jaringan dengan pendekatan zonasi memungkinkan untuk menjaga setiap elemen desain sederhana dan mudah dipahami. Kesederhanaan meminimalkan kebutuhan untuk pelatihan ekstensif untuk personel operasi jaringan dan mempercepat implementasi suatu desain. Menguji desain jaringan menjadi mudah karena ada fungsionalitas yang jelas di setiap lapisan. Isolasi kesalahan ditingkatkan karena jaringan teknisi dapat dengan mudah mengenali titik transisi dalam jaringan untuk membantu mereka mengisolasi kemungkinan titik kegagalan.

Tabel 2.5.2.4.1 Penerapan 3 (Tiga) Lapisan Jaringan Berjenjang (*3-Tier Hierarchy*)

Penerapan 3 (Tiga) Lapisan Jaringan Berjenjang (*3-Tier Hierarchy*)
Lapisan Inti (*Core Layer*)
Jaringan pada *core layer* dirancang dengan mempertimbangkan: ● Sebagai tulang punggung (*backbone*) jaringan yang menghubungkan zona-zona jaringan ● Memiliki performansi dan stabilitas yang tinggi ● Memiliki tingkat kompleksitas yang rendah ● Sebagai titik agregasi layer distribusi ● Memiliki skalabilitas yang tinggi untuk pengembangan ke depan ● Memiliki rancangan yang independen dari sisi teknologi (menerapkan *open standard*)

Penerapan 3 (Tiga) Lapisan Jaringan Berjenjang (*3-Tier Hierarchy*)
Lapisan Distribusi (*Distribution Layer*)
Jaringan pada layer distribusi dirancang dengan mempertimbangkan: ● *Availability, load balancing, QoS* dan *provisioning* ● Agregasi layer akses dan keterhubungan ke jaringan inti (*uplink*) ● Mengamankan jaringan inti dari permasalahan di jaringan akses ● Penerapan penyederhanaan *routing*, kecepatan konvergensi, jalur *redundant* dan *load sharing* ● redundansi perangkat (HSRP, GLB)
Lapisan Akses (*Access Layer*)
Penerapan teknologi jaringan pada akses layer yang meliputi: ● Jaringan *layer* 2/*layer* 3, mendukung konvergensi standar jaringan dan *storage*, HA, *security*, QoS, IP *multicast*. ● Memiliki kemampuan *Intelligent Network Services*: QoS, *boardcast suppression*, VLAN dan VTP, internal *routing protocol, port aggregation*. ● Mendukung fitur *security* yang terintegrasi 802. 1x, CISF, *port security*, *DHCP snooping*. ● Memiliki kompatibilitas interkoneksi dengan perangkat layanan: *Phone Discovery*, *PoE, auxiliary* VLAN. ● Jaringan dikelompokkan menjadi tiga kategori yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan implementasi dan layanannya sebagai berikut:
a. Jaringan internal
Local Area Network (LAN), memberikan akses jaringan di semua gedung dengan menggunakan kabel *fiber optic* (FO). Kabel FO dipilih karena kabel FO memiliki kekebalan terhadap imbas petir dan gangguan elektromagnetik. Sehingga dalam rancangan ini ditetapkan bila jaringan melintas keluar bangunan maka harus memakai kabel FO.
Metropolitan Area Network (MAN) dan *Wide Area Network* (WAN), memberikan akses jaringan pada *remote site internal* dengan menggunakan interkoneksi yang disediakan oleh penyedia jaringan akses. Titik masuk jaringan WAN diharuskan melalui fasilitas ruang telekomunikasi (*Telecommunication Room Facility*) yang ada di pusat data, yang berfungsi sebagai area demarkasi kepemilikan infrastruktur dan pengamanan masalah fisik.
Redundancy Link, penerapan jalur berganda pada jaringan LAN dan WAN untuk mendukung ketersediaan layanan yang tinggi pada jaringan data.
Penggunaan protokol *routing* internal seperti OSPF digunakan dengan pertimbangan kebutuhan konvergensi yang cepat untuk melayani jaringan internal.
b. Jaringan Pusat Data

Penerapan 3 (Tiga) Lapisan Jaringan Berjenjang (*3-Tier Hierarchy*)	
	Jaringan pusat data memberikan akses jaringan untuk semua pusat data yang ada pada pusat data. Jaringan memiliki fleksibilitas dalam mendukung konektivitas yang dinamis berbasis modul atau zone, memiliki densitas *port interface* perangkat yang tinggi dan kemampuan melayani lalu-lintas jaringan dengan *bandwidth* yang tinggi.
	Memiliki fleksibilitas untuk mendukung standar sistem storage berbasis jaringan seperti *Network Area Storage* (NAS) maupun standar *Storage Area Network* (SAN) seperti iSCSI dan FcoE.

C. Zonasi (*Zoning*)

Proyek desain jaringan besar dan implementasi jaringan besar pada umumnya terdiri dari area yang berbeda atau zona. Setiap zona harus dirancang menggunakan pendekatan sistematis, *top-down*, penerapan hierarki dan redudansi.

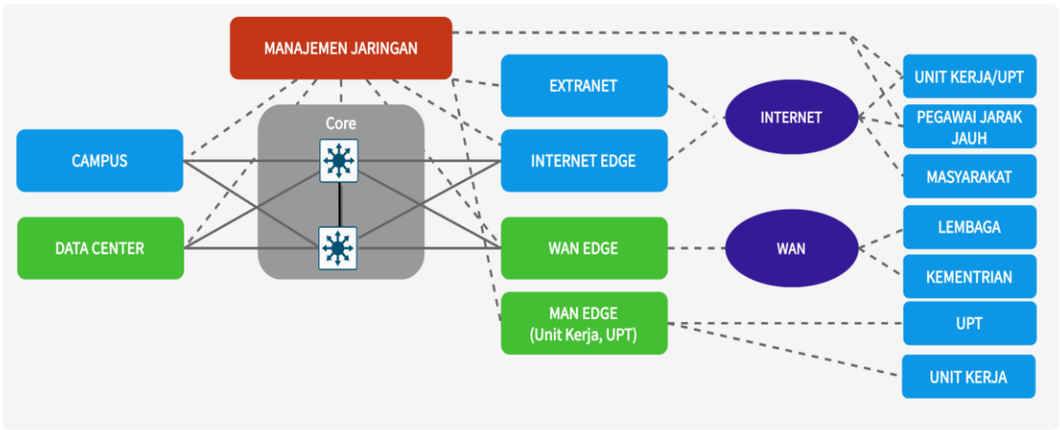

Gambar 2.5.2.4.2. Arsitektur Jaringan Berbasis Zonasi (*Zoning*)

Arsitektur Jaringan Berbasis Zonasi (*Zoning)* terdiri dari beberapa zona sebagai berikut:

1. Zona Inti (*Core*)

   Zona inti menghubungkan semua zona lainnya dan merupakan infrastruktur berkecepatan tinggi yang menyediakan transportasi *Layer 2* dan *Layer 3* yang andal dan dapat diukur. *Core* biasanya diimplementasikan dengan penggunaan dua unit *switch* (redundant) untuk menghubungkan ke zona kampus, pusat data, *WAN edge*, dan Internet *edge*.

2. Pusat Data

   Pusat data menampung server, aplikasi, dan perangkat penyimpanan untuk digunakan oleh pengguna internal. Pusat data juga menghubungkan infrastruktur jaringan. Pusat data tidak bisa diakses langsung oleh masyarakat umum melalui jaringan internet.

3. Kampus (*Campus*)

   Jaringan kampus menyediakan akses jaringan ke pengguna dan perangkat akhir (*endpoint*) yang terletak di satu lokasi. Kampus dapat menjangkau beberapa lantai dalam satu bangunan atau beberapa bangunan untuk perusahaan besar. Kampus ini menyelenggarakan layanan data. Desain kampus harus memungkinkan pengguna kampus aman mengakses pusat data dan sumber daya Internet dari infrastruktur kampus.

4. Manajemen

Jaringan manajemen menyediakan pemantauan, analisis, otentikasi, dan layanan rekam jejak (*logging*). pusat data manajemen mendukung *RADIUS, Kerberos, Protokol Waktu Jaringan (Network Time Protocol), Protokol Manajemen Jaringan Sederhana (Simple Network Management Protocol),* dan lalu lintas *syslog*.

Tabel 2.5.2.4.2 Aplikasi pusat data Manajemen Jaringan

No	Aplikasi pusat data	Fungsi
1	*Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP)	pusat data yang memudahkan penyebaran *IP Address* ke sebuah jaringan secara merata tanpa perlu dilakukan dengan manual dengan memasukkan *IP Address* satu persatu ke perangkat.
2	*Domain Name pusat data* (DNS) Lokal	Sistem yang menghubungkan *Uniform Resource Locator* (URL) dengan *IP Address*. pusat data DNS berisi *database* alamat IP privat dan nama *host* terkait. pusat data DNS ini untuk melayani permintaan akses nama domain aplikasi intranet. Dengan adanya DNS Lokal, pengguna tidak perlu menghafal alamat IP dari aplikasi, cukup memasukkan nama domain.
3	*Directory Service*	pusat data yang memberikan layanan untuk mengelola aturan, hak akses, dan *security* pada pengguna atau jaringan komputer di perusahaan. Directory Service menyimpan konfigurasi jaringan baik *user, group*, komputer, *hardware*, serta berbagai *policy* keamanan dalam satu *database* terpusat. Contoh directory service pusat data yakni *Active Directory Domain Service* (ADDS) pada Windows pusat data, *Lightweight Directory Access Protocol* (LDAP) pada distro Linux.
4	*Network Time Protocol* (NTP)	pusat data untuk melakukan sinkronisasi terhadap penunjuk waktu dalam sebuah sistem komputer dan jaringan. Proses sinkronisasi ini dilakukan di dalam jalur komunikasi data yang biasanya menggunakan protokol komunikasi TCP/IP.
5	*Remote Authentication Dial In User Service* (RADIUS)	pusat data yang digunakan untuk melayani service *Authentication, Authorization,* dan *Accounting* (AAA) di dalam sebuah jaringan. Singkatnya RADIUS pusat data ini menyimpan kumpulan *user* dimana *user-user* tersebut dapat digunakan oleh *client* atau *user* yang berada dalam satu jaringan dengan RADIUS pusat data tersebut.
6	*Network Monitoring System*(NMS)	Suatu pusat data yang diperuntukan oleh administrator jaringan untuk memantau performansi jaringannya, seperti *Memory usage, CPU load, disk usage, service states, running process*, dan lain sebagainya. NMS menggunakan protokol SNMP (*Simple Network Management Protocol*) yang merupakan standar manajemen jaringan pada TCP/IP.
7	*System Logging Protocol* (Syslog)	Protokol standar yang digunakan untuk mengirim log sistem atau pesan peristiwa ke pusat data tertentu, yang disebut pusat data syslog. Ini terutama digunakan untuk mengumpulkan berbagai log perangkat dari beberapa mesin berbeda di lokasi pusat untuk pemantauan dan peninjauan.

5. Jaringan Skala Luas (*Wide Area Network*)

WAN adalah bagian dari jaringan yang menghubungkan Pusat Data dengan kantor Kementerian/Lembaga, dan lokasi Pusat Pemulihan Bencana (*DRC*).

6. Jaringan Dalam Kota (*Metropolitan Area Network*)

   MAN (*Metropolitan Area Network*) adalah bagian dari jaringan komputer yang menghubungkan beberapa kantor perangkat daerah, dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang berada di area kabupaten/kota yang sama dengan pusat data.

7. Internet

   Internet adalah infrastruktur yang menyediakan konektivitas Internet dan yang bertindak sebagai pintu gerbang (*gateway*) ke seluruh dunia. Layanan Internet termasuk akses *De-Militerized Zone (DMZ)*, internet pengguna dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan akses jarak jauh *Virtual Private Network* (VPN).

D. Redudansi (*Redundancy*)

Desain jaringan redudansi untuk memenuhi persyaratan ketersediaan jaringan. Redudansi akan menghilangkan titik tunggal dari kegagalan (*single point of failure*) pada jaringan. Tujuannya adalah untuk menduplikasi komponen yang penting (utama) untuk menghindari aplikasi penting tidak dapat diakses. Komponen tersebut bisa berupa *router* into, *switch*, tautan antara dua *switch*, catu daya, *WAN Router*, konektivitas internet, dan sebagainya. Redudansi meliputi:

1. Duplikasi Komponen Kritis (*Duplicating High Critical Component)*

   Untuk menjaga ketersediaan layanan dan akses ke aplikasi utama maka komponen jaringan yang kritis seperti *switch core, firewall, router* internet harus diduplikasi dengan konfigurasi *High Availability (HA)* sehingga jika salah satu perangkat mengalami gangguan maka masih ada perangkat cadangan yang akan menggantikan secara otomatis.

2. Koneksi dan Jalur Cadangan (*Backup Path)*

   Untuk menjaga interkonektivitas ketika satu atau lebih jalur utama sedang terputus, maka lalu lintas paket data akan melalui jalur cadangan secara otomatis. Untuk melakukan proses otomatisasi perpindahan jalur utama ke cadangan maka diimplementasikan protokol rute (*routing protocol)* tertentu.

3. Pembagian Beban (*Load Sharing*)

   Tujuan utama redudansi adalah untuk memenuhi persyaratan ketersediaan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kinerja dengan mendukung pembagian beban lintas tautan paralel. *Load Sharing*, terkadang disebut *load balancing*, memungkinkan dua atau lebih antarmuka atau jalur untuk dibagikan beban lalu lintas.

E. Keamanan (*Security*)

Keamanan adalah tujuan teknis utama, dan desain keamanan adalah salah satu aspek terpenting desain jaringan organisasi. Meningkatnya ancaman baik dari dalam maupun dari luar jaringan organisasi memerlukan aturan dan teknologi keamanan paling mutakhir. Secara keseluruhan tujuan yang dimiliki sebagian besar organisasi adalah bahwa masalah keamanan seharusnya tidak mengganggu operasional organisasi.

Kegiatan perancangan desain keamanan jaringan secara efektif meliputi:

1. Mengidentifikasi Aset Jaringan *(Identifying Network Assets)*

   Mengidentifikasi aset yang harus dilindungi, nilainya aset, dan biaya yang diharapkan terkait dengan kehilangan aset ini jika keamanan pelanggaran terjadi. Aset jaringan meliputi perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan data. Aktiva juga termasuk kekayaan intelektual, rahasia dagang, dan reputasi perusahaan.

   Data yang digunakan perusahaan untuk mencapai misinya adalah aset yang sering diabaikan. Data dapat mencakup *blueprint*, dokumen perencanaan keuangan, hubungan pelanggan informasi, dokumen analisis persaingan, informasi konfigurasi untuk perangkat keras dan perangkat lunak, nomor Jaminan Sosial karyawan, informasi lencana karyawan, dan sebagainya.

   Integritas dan kerahasiaan data harus dilindungi dari kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja. Beberapa aset penting dalam jaringan adalah perangkat jaringan seperti *switch, router, firewall,* dan sistem deteksi intrusi (IDS) yang memberikan layanan keamanan untuk pengguna jaringan. Oleh karena perangkat-perangkat ini menjadi target bagi peretas, maka perlu diperkuat agar tidak mudah diintervensi terhadap intrusi.

2. Menganalisis Risiko Keamanan *(Analyzing Security Risk)*

   Menganalisa ancaman potensial dan mendapatkan pemahaman tentang kemungkinan dampak bisnis mereka. Penyusunan kebijakan keamanan dan desain jaringan yang aman memerlukan proses analisis risiko dan konsekuensinya yang berkelanjutan karena risiko dapat berubah dalam tingkat keparahan dan probabilitasnya.

3. Membangun Kebutuhan Keamanan (*Developing Security Requirements)*

   Masalah keamanan seharusnya tidak mengganggu kemampuan organisasi untuk melakukan bisnis. Persyaratan keamanan paling mendasar yang dimiliki setiap organisasi. Keamanan sekunder persyaratannya adalah untuk melindungi aset agar tidak lumpuh, dicuri, diubah, atau dirugikan.

4. Menetapkan kebijakan keamanan (*Developing a Security Policy*)

   Kebijakan keamanan memberitahu pengguna dan pimpinan tentang kewajiban mereka untuk melindungi aset teknologi dan informasi. Secara umum, suatu kebijakan setidaknya harus mencakup item-item berikut:

   a. Kebijakan akses yang menetapkan hak dan hak akses. Kebijakan akses harus memberikan pedoman untuk menghubungkan jaringan eksternal, menghubungkan perangkat ke jaringan, dan menambahkan perangkat lunak baru ke sistem. Kebijakan akses mungkin juga membahas caranya data dikategorikan (misalnya, rahasia, internal, dan sangat rahasia).
   b. Kebijakan akuntabilitas yang mendefinisikan tanggung jawab pengguna, staf operasi, dan manajemen. Kebijakan akuntabilitas harus menetapkan kemampuan audit dan memberikan pedoman penanganan insiden yang menentukan apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika kemungkinan intrusi terdeteksi.
   c. Kebijakan otentikasi yang membangun kepercayaan melalui kebijakan kata sandi yang efektif dan mengatur pedoman untuk otentikasi lokasi jauh.

d. Kebijakan privasi yang menetapkan ekspektasi privasi yang wajar mengenai pemantauan surat elektronik, pencatatan penekanan tombol, dan akses ke file pengguna.

e. Pedoman pembelian teknologi komputer yang menentukan persyaratan untuk memperoleh, mengkonfigurasi, dan mengaudit sistem dan jaringan komputer untuk kepatuhan dengan kebijakan tersebut.

5. Mengembangkan prosedur untuk menerapkan kebijakan keamanan (*Develop procedures for applying security policies*)

   Prosedur keamanan merupakan penerapan dari kebijakan keamanan. Prosedur tersebut meliputi konfigurasi, login, proses audit, dan pemeliharaan. Prosedur keamanan harus ditulis untuk pengguna, administrator jaringan, dan administrator keamanan. Prosedur keamanan juga memuat penanganan insiden yaitu, apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika intrusi terdeteksi.

6. Menguji keamanan secara periodik

   Pengujian keamanan jaringan dilakukan secara periodik misal satu tahun sekali untuk memastikan konfigurasi dan perangkat lunak perangkat keamanan jaringan sudah optimal, dan jika ditemukan adanya celah keamanan dapat segera dilakukan perbaikan.

7. Memelihara keamanan (*Maintain security*)

   Keamanan harus dijaga dengan menjadwalkan audit independen berkala, membaca audit log, menanggapi insiden, membaca literatur saat ini dan peringatan agen, melakukan pengujian keamanan, pelatihan administrator keamanan, dan memperbarui rencana dan kebijakan keamanan. Keamanan jaringan harus menjadi proses abadi. Risiko berubah seiring waktu, dan sebagainya harus keamanan. Penerapan, pemantauan, pengujian, dan peningkatan keamanan adalah proses yang tidak pernah berakhir.

F. Kondisi *Eksisting* Jaringan Intra Pemerintah

Topologi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjadikan Router Core di Diskominfo sebagai pusat topologi setelah mendapat aliran internet dari Vendor Global Prima Utama dengan bandwidth internet 1200 Mbps dan PT.Telkom sebagai sumber internet redundan dengan bandwidth internet 1000 Mbps. Router Core juga menjadi tempat terhubungnya antar OPD dan perangkat kerja lainnya dengan menggunakan transmisi kabel Fiber Optic dengan kecepatan transmisi data 10 Gbps ke tiap OPD.

G. Usulan Infrastruktur Jaringan Data

Infrastruktur jaringan data yang ada saat ini kurang adaptif terhadap semakin besarnya lalu lintas data, proses, dan pengguna serta keamanan jaringan. Oleh karena itu, arsitektur infrastruktur jaringan perlu didesain dengan menggunakan pendekatan zonasi. Zonasi infrastruktur jaringan akan memudahkan dalam pengembangan skalabilitas (*scalable*) sesuai dengan fungsi atau layanan dari zona tersebut. Zonasi yang diusulkan terdiri dari:

a. Zona Jaringan Inti (*Core Network*)

   Merupakan zona interkoneksi antar zona. Perangkat pendukung zona jaringan inti adalah *Switch Layer 3* dengan kapasitas besar untuk menangani lalu lintas data antar zona. Perangkat

switch Core ini sebaiknya tidak digunakan untuk fungsi lainnya seperti *DHPC pusat data*, dan lainnya.

b. Zona Jaringan Antar Gedung (*Campuss Network*)

Jaringan lokal yang ada di setiap gedung–gedung di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang berdekatan dengan kantor Diskominfo dapat dikelola dalam satu jaringan lokal yakni jaringan antar gedung (*Campuss Network*).

c. Zona pusat data (*pusat data Farm*)

pusat data database, file pusat data, *storage* yang tidak langsung diakses oleh pengguna ditempatkan di zona *pusat data Farm*.

d. Zona Internet (*Internet Edge*)

Zona internet adalah zona yang melayani akses internet pengguna atau akses ke aplikasi *web* internet Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, terdapat *De-Militerized Zone* (DMZ) untuk lokasi pusat data – pusat data yang diakses oleh publik melalui internet seperti *web pusat data, mail pusat data*, dan *cloud file pusat data*. Interkoneksi dari *web* pusat data ke *database pusat data* atau *file storage* harus difilter terlebih dahulu oleh *firewall*.

e. Zona Jaringan Antar perangkat daerah (MAN)

Interkoneksi antara pusat data dengan Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis ada di zona *Metropolitan Area Network (MAN)* dengan koneksi menggunakan kabel jaringan *fiber optic* atau radio link. Setiap perangkat daerah atau UPT memiliki jaringan lokal komputer *(LAN*) sendiri. Sehingga akses ke *pusat data* atau internet dari Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis menggunakan protokol *routing* seperti *static route*.

f. Zona Jaringan Antar Kementerian/Lembaga (*WAN*)

Interkoneksi antara pusat data dengan kementerian atau lembaga lainnya berada di zona *Wide Area Network (WAN)*. Interkoneksi ini menggunakan jaringan *Metro-E* atau *VPN-IP* dari penyedia layanan *WAN (provider*). Pembatasan akses ke pusat data – pusat data di Pusat Data seperti alamat *IP, port*, dan lainnya akan dikonfigurasi di *router WAN*.

Server Farm dan DMZ

Topologi *Server Farm* dengan DMZ dapat digambarkan secara sederhana seperti di bawah ini :

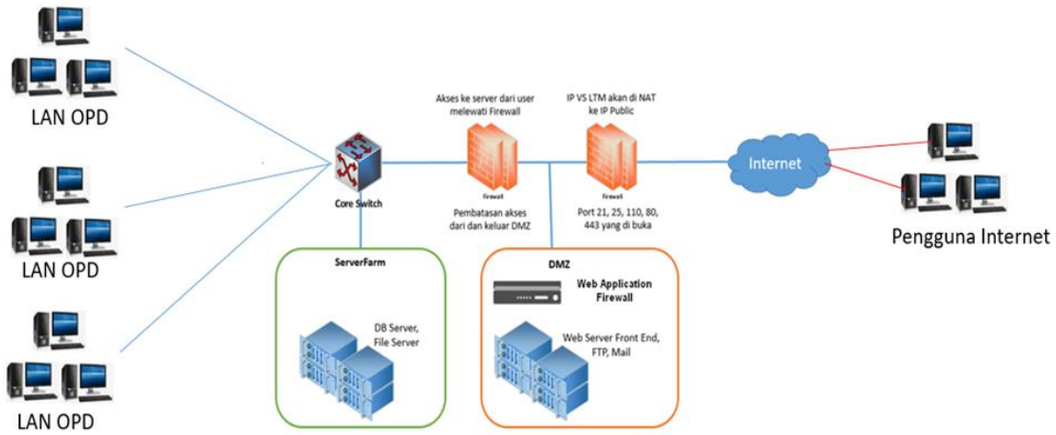

Gambar 2.5.2.4.3 Pemisahan Logik Server *Farm* dengan *DMZ*

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa antara pusat data *Farm* dan *DMZ* dipisahkan oleh perangkat *firewall* dan *Core Switch*. Pengguna – pengguna di perangkat daerah atau UPT akan dibatasi akses ke *server farm* melalui konfigurasi di *router* MAN. Akses aplikasi *web* dari pengguna di perangkat daerah/UPT menggunakan jaringan lokal (intranet). Akses aplikasi *web* melalui internet akan melewati *firewall* yang telah dikonfigurasi hanya *port* tertentu misal *port* 80 (*http*) atau *port* 443 (*https*) yang dibuka (*open*). *Firewall* secara logik akan dikonfigurasi untuk menyaring akses dari paket data dari *pusat data Farm* ke *DMZ* dan sebaliknya. Di dalam *DMZ* juga terdapat perangkat *Web Application Firewall* untuk perlindungan aplikasi *web* dari serangan seperti *SQL Injection, Site Cross Scripting (XSS),* dan lain-lain. Berikut ini adalah gambar usulan arsitektur jaringan data Diskominfo Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berbasis Zonasi.

Berikut ini adalah usulan topologi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

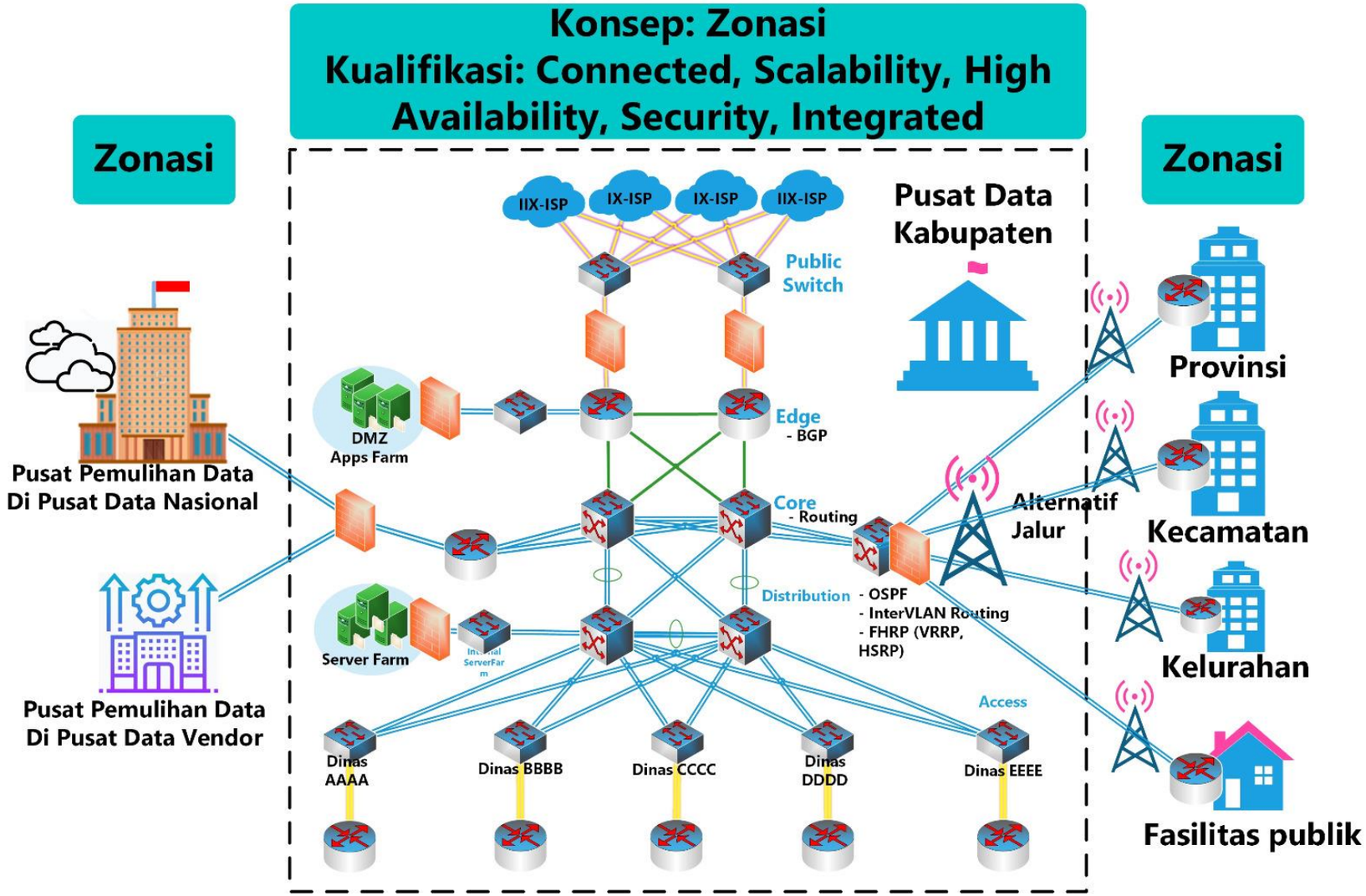

Gambar 2.5.2.4.4. Usulan Topologi Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan gambar topologi di atas sebagai berikut :

1. koneksi internet dibagi menjadi 2 (dua) layanan yakni :
    a. IP Transit yang digunakan untuk akses internet pusat data.
    b. *Broadband* yang digunakan untuk akses internet komputer pengguna, perangkat bergerak (laptop), maupun telepon cerdas (*smartphone*).
2. koneksi internet *IP Transit* maupun *Broadband* menggunakan 2 (dua) penyedia layanan internet (ISP).
3. semua perangkat inti dan kritis sudah *redundant* seperti :
    a. *router internet IP Transit* maupun *router internet Broadband*;
    b. Next-Generation Firewall (NG-Firewall);
    c. *Core Switch*; dan
    d. *Switch* pusat data.
4. *DMZ* digunakan untuk penempatan pusat data - pusat data yang diakses oleh publik/masyarakat melalui internet seperti *web* pusat data aplikasi, email pusat data, dan *cloud storage*. *Switch* pusat data *DMZ* langsung terkoneksi ke *NG-Firewall.*
5. *Pusat data Far*m digunakan untuk penempatan pusat data - pusat data yang hanya dapat diakses dari dalam jaringan Diskominfo antara lain pusat data Database, File pusat data, *DNS* pusat data, *NTP* pusat data, *DHCP*, dan lain - lain. *Switch pusat data Farm* langsung terkoneksi ke *Switch Core*.
6. Jaringan Lokal (LAN) Gedung A, dan B merupakan koneksi komputer, printer, dan lainnya yang berada satu gedung (Diskominfo) dengan perangkat jaringan utama. Jaringan LAN terdiri dari jaringan kabel (*wired*) dan non-kabel *(wireless).* Pengaturan perangkat *Access Point* pada jaringan *wireless* menggunakan *Wireless Controller* yang terkoneksi dengan *Switch Core*.
7. Jaringan Dalam Kota (*MAN*) merupakan koneksi antar *LAN* di setiap kantor perangkat daerah yang tersebar di beberapa lokasi. Interkoneksi menggunakan media *fiber optic* atau radio *link (wireless).*
8. Jaringan Skala Luas (*WAN*) merupakan koneksi antara jaringan Diskominfo dengan Kementerian/Lembaga lain. Interkoneksi menggunakan layanan *VPN-IP* atau *Metro-E.*

H. Metadata Jaringan Intra Pemerintah To Be

Katalog infrastruktur (jaringan intra pemerintah) (To be) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Jaringan Intra Pemerintah (JIP) yang digunakan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Jaringan ini dirancang khusus untuk menghubungkan perangkat daerah seperti Dinas, Badan, UPT, Kabupaten, Kecamatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. JIP beroperasi sebagai jaringan Area Kabupaten (MAN) yang mencakup area tertentu di dalam Kabupaten. Bertindak sebagai pengelola jaringan. JIP memiliki tujuan untuk mendukung pertukaran data dan komunikasi yang efisien antara perangkat daerah. Dengan adanya jaringan ini, kolaborasi dan koordinasi antara unit-unit pemerintah di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat terjalin dengan baik untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi.

Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 2.5.2.4.3. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Sistem Integrasi - JIP

ID	Nama Jaringan Intra Pemerintah	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Nama Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
KP-DAI.02.01.03.01	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menghubungkan Dinas, Badan, UPT yang ada di Kabupaten Kulon Progo	Wired (Kabel)	Sendiri	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Diskominfo Kabupaten Kulon Progo	2,2 Gbps	Fiber Optic		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH	RAI.02.01.03 JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH

2.5.2.3. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Seiring dengan adanya perkembangan proses bisnis serta kebutuhan pengguna informasi seperti pertukaran data/informasi antar organisasi di lingkungan pemerintahan, dan teknologi aplikasi yang heterogen maka diperlukan suatu sistem yang memudahkan dalam proses pertukaran data antar organisasi. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik paragraf 7 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pasal 33:

1. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
2. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah sistem yang digunakan untuk menghubungkan berbagai layanan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui satu *platform* atau portal tunggal. Ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah menemukan dan mengakses berbagai layanan pemerintah yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi berbagai situs *web* atau kantor pemerintah yang berbeda. Sistem ini biasanya mencakup *fitur* seperti pengajuan permohonan *online*, informasi status permohonan, dan pembayaran *online* untuk layanan yang ditawarkan.

Sistem penghubung layanan pemerintah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dengan tujuan antara lain:

a. efisiensi kerja;
b. mewujudkan layanan yang cepat, mudah, dan murah;
c. meningkatkan tingkat ketersediaan, dan validitas data; dan
d. dapat melakukan prediksi dan analisis untuk sistem pengambil keputusan (*Decision Support System*).

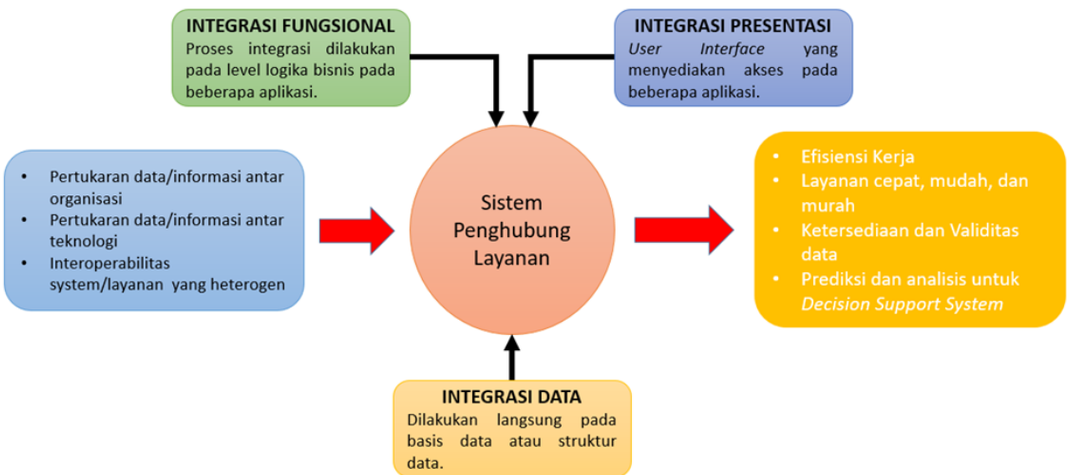

Gambar 2.5.2.6.1. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Secara umum, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terdiri dari: Integrasi Data (Proses integrasi dilakukan langsung pada basis data atau struktur data dari aplikasi), Integrasi Presentasi (Proses integrasi dengan membuat antarmuka pengguna yang menyediakan akses pada beberapa

aplikasi) dan Integrasi Fungsional (Proses integrasi dilakukan pada level logika bisnis pada beberapa aplikasi). Adapun secara detail Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dijabarkan sebagai berikut :

A. Integrasi Data

Integrasi data fokus pada perpindahan data antara aplikasi dengan tujuan membagi data yang sama ke beberapa aplikasi yang berbeda. Dari sudut pandang teknis, integrasi level data ini secara relatif lebih sederhana yang sudah sangat dikenal oleh kebanyakan pengembang. Mengakses basis data lebih mudah dan ada beberapa *tools* yang memudahkan *sharing* data dan mempercepat.Selain itu, integrasi level data tidak memerlukan perubahan aplikasi.

Integrasi data merupakan proses mengkombinasikan dua atau lebih set data agar mempermudah dalam berbagi data rangka mendukung manajemen informasi di dalam sebuah lingkungan kerja. Integrasi data menggabungkan data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (*data warehouse*). Integrasi data diperlukan karena adanya berbagai kebutuhan, seperti :

a. Data yang sama (misalnya: data penduduk) dapat dipakai bersama antar bagian organisasi (antar instansi); dan
b. Data suatu instansi dapat dipakai bersama oleh instansi-instansi lain yang memerlukan (tidak perlu ada duplikasi data dalam suatu lingkungan organisasi).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses integrasi data antara lain :

a. Integrasi data perlu dilakukan secara cermat karena kesalahan pada integrasi data dapat menghasilkan *output*/keluaran yang tidak sesuai dan berdampak pada pengambilan keputusan.
b. Syarat integrasi harus dipenuhi dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: konsisten dalam penamaan variabel, konsisten dalam ukuran variabel, konsisten dalam struktur pengkodean dan konsisten dalam atribut fisik dari data. Adapun masalah-masalah yang mungkin ada pada integrasi data yaitu adanya heterogenitas data, otonomi sumber data, kebenaran dan kinerja *query*/permintaan.

Penerapan interoperabilitas data diperlukan kaidah sebagai berikut :

1. Konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan.
2. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Fokus Pengembangan *SPL*

SPL dapat dikembangkan dengan berdasarkan pemangku kepentingan yang terlibat seperti pemerintah, swasta baik lokal maupun internasional :

1. *G2G*: Interaksi sistem antar lembaga atau badan pemerintahan;
2. *G2B*: Interaksi sistem antara badan pemerintahan dan bisnis/industri;
3. *G2C*: Interaksi sistem antara badan pemerintahan dengan masyarakat;
4. *G2Org*: Interaksi sistem antara badan pemerintahan dengan organisasi non pemerintah; dan
5. *G2OG*: Interaksi sistem badan pemerintahan antar negara.

***Application Programming Interface* (API)**

Aplikasi Perantara Akses Data Elektronik yang berbasis Layanan *Web* umumnya dinamakan Antarmuka Program Aplikasi (*Application Programming Interface*/API) atau disingkat *Web-API*. *API* adalah sekumpulan kode pemrograman yang membantu pengembang (*developer*) aplikasi melakukan integrasi data antara dua aplikasi berbeda secara bersamaan. *API* memungkinkan *developer* untuk membuat aplikasi dengan berbagai elemen seperti *function, protocols* dan *tools* lain. *API* bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai bahasa pemrograman.

Keuntungan memprogram dengan menggunakan *API* adalah:

1. Portabilitas

   Programmer yang menggunakan *API* dapat menjalankan programnya dalam sistem operasi mana saja asalkan sudah terinstall *API* tersebut. Sedangkan *system call* berbeda antar sistem operasi, dengan catatan dalam implementasinya mungkin saja berbeda.
2. Lebih mudah dimengerti.

   API menggunakan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti daripada bahasa *system call*. Hal ini sangat penting dalam hal editing dan pengembangan.
3. Daur ulang (*Reusable*)

   Web-API bersifat *reusable* (dapat didaur ulang) tanpa merubah akses layanan yakni alamat dan atribut *end point*.

   Web-API digunakan sebagai akses terhadap suatu fungsi/prosedur pengolahan data dalam program aplikasi yang dikomunikasikan dari aplikasi lain yang berbeda *platform* dan lokasi bahkan dengan jarak yang berjauhan melalui jaringan internet umumnya dinamakan *Remote Procedure Call* (RPC) atau dengan kata lain *Web-API* dapat mengakses sumberdaya layanan, program, informasi atau data dari tempat yang berbeda. *Web-API* berfungsi menterjemahkan bentuk, struktur, dan semantik suatu sumber data ke dalam format data standar yang dapat dibaca oleh semua Aplikasi berupa format data *XML, JSON, PHP-ARRAY, PHP-SERIALIZE*.

   Komunikasi data melalui *Web-API* dapat dilakukan melalui beberapa model interkoneksi, diantaranya:

a. *SOAP (Simple Object Access Protocol)*

Gambar 2.5.2.6.2 Arsitektur *SOAP*

Komunikasi data model *SOAP* dilakukan antara Aplikasi C*lient/Request (SOAP-Client)* dengan *Web-API/Provider (SOAP-pusat data)* melalui alamat *Web-API* dengan protokol *HTTPs (Hypertext Transfer Protocol/Secure).* Informasi Metadata yang disediakan *SOAP-pusat data* dapat disajikan melalui aplikasi Web-Browser dalam bentuk dokumen format *XML* dengan nama *Web Services Description Language (WSDL),* sementara data permintaan *(SOAP-Request)* dan tanggapan (SOAP-Response) dilewatkan diantara *SOAP-Client* dan *SOAP-pusat data* dalam format dokumen *XML SOAP-Envelope* yang dibentuk oleh fungsi *SOAP-pusat data* pada *Web-API.*

b. *REST (Representational State Transfer)*

Gambar 2.5.2.6.3. Arsitektur *REST*

Komunikasi model *REST* dilakukan antara Aplikasi *Client/Requester* dengan *Web-API/Provider* melalui Alamat Web-API dengan protokol *HTTPs (Hypertext Transfer Protocol/Secure).* Informasi Metadata yang disediakan *Web-API* dapat disajikan melalui aplikasi *Web-Browser* dalam bentuk dokumen format *XML/HTML/JSON/CSV* dengan nama *Web Application Description Language (WADL),* sementara data permintaan *(Adapter-Request)* dan tanggapan *(API-Response)* dilewatkan di antara Aplikasi dan *Web-API* dalam format dokumen standar *XML, JSON, RSS* yang dibentuk oleh *Web-API.*

B. Integrasi Presentasi

Integrasi interaksi pengguna dapat dicapai melalui pembuatan pengguna dengan sistem data yang berbeda. Misalnya menggunakan pintu untuk berinteraksi dengan data dan sistem intelegensi bisnis yang berbeda. Dengan demikian aplikasi dapat terintegrasi sehingga pengguna dapat melakukan operasi dengan *Single Sign On (SSO).*

Sistem *SSO* merupakan salah satu teknologi yang dapat mengizinkan para penggunanya untuk dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja. Sistem *SSO* merupakan salah satu solusi untuk *identity management* dan *access control* yang ada di dalamnya. Penerapan sistem *SSO* memberikan kemudahan kepada pengguna dengan cukup melakukan otentikasi sekali saja untuk mendapatkan izin akses terhadap semua layanan yang terdapat di dalam suatu jaringan atau aplikasi.

C. Integrasi Fungsional (Proses Bisnis)

Integrasi proses bisnis dilakukan dengan cara mengkoordinasikan setiap aktivitas melalui proses bisnis, seperti penjualan dan penagihan. Adapun tahapan dalam integrasi proses bisnis yaitu perencanaan dalam menentukan arah perusahaan, menerjemahkan strategi yang dibentuk dalam proses bisnis perusahaan, dan menerapkan serta memastikan bahwa proses bisnis yang

direncanakan dijalankan sesuai dengan strategi perusahaan. Latar belakang diperlukannya integrasi proses bisnis antara lain:

a. Efisiensi

   Beberapa proses bisnis digabungkan menjadi satu proses yang terintegrasi.

b. Persaingan bisnis

   Persaingan instansi lain dengan konsep proses bisnis yang terintegrasi, sehingga integrasi harus dilakukan untuk bersaing

c. Perkembangan Teknologi Informasi

   Semakin berkembangnya teknologi informasi sehingga integrasi proses bisnis semakin lebih mudah dilakukan.

D. Kondisi Eksisting Sistem Penghubung Layanan

Kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah merencanakan untuk mengimplementasikan SPLP dengan menggunakan platform yang telah disediakan oleh Kementerian Komdigi dengan alamat https://splpdev.layanan.go.id/devportal/apis.

E. Usulan Pengembangan Sistem Penghubung Layanan

Terdapat beberapa cara suatu aplikasi mengakses *service* pada aplikasi lainnya. Salah satunya dengan pengaksesan langsung atau *direct access* pada *service* yang dimiliki oleh suatu aplikasi.

Akses langsung pada *Web* API Aplikasi

Cara pertama yang sering banyak digunakan, walaupun bukan pendekatan yang terbaik adalah dengan cara mengakses langsung pada setiap *service.* Biasanya setiap *service* memiliki suatu *IP public* yang dapat diakses dari jaringan internet. Terkadang juga dengan satu *IP public* tetapi dibedakan *port* untuk melayani setiap *service*-nya.

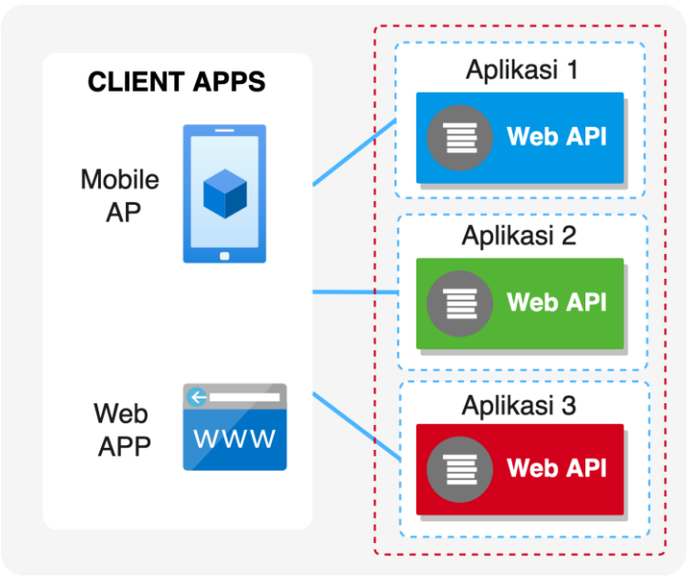

Gambar 2.5.2.6.4 Akses Langsung Antar API

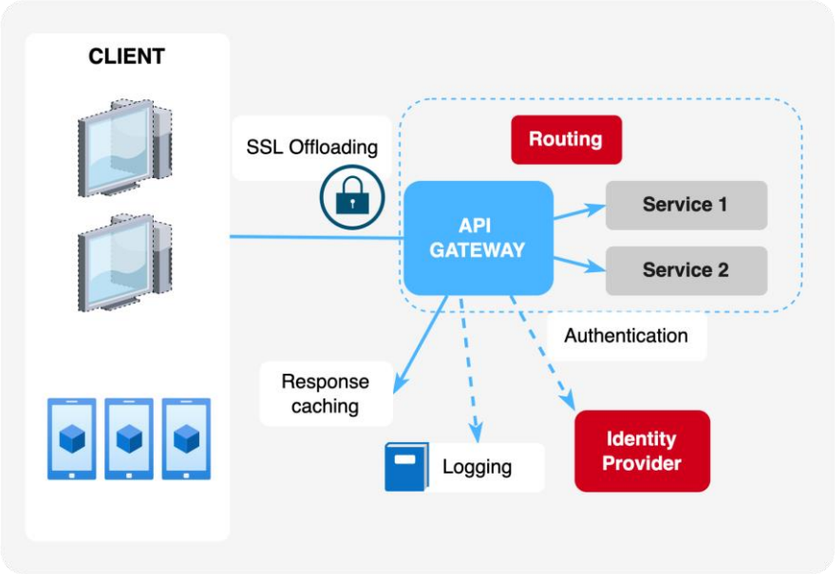

Gambar 2.5.2.6.5. Fungsi API *Gateway*

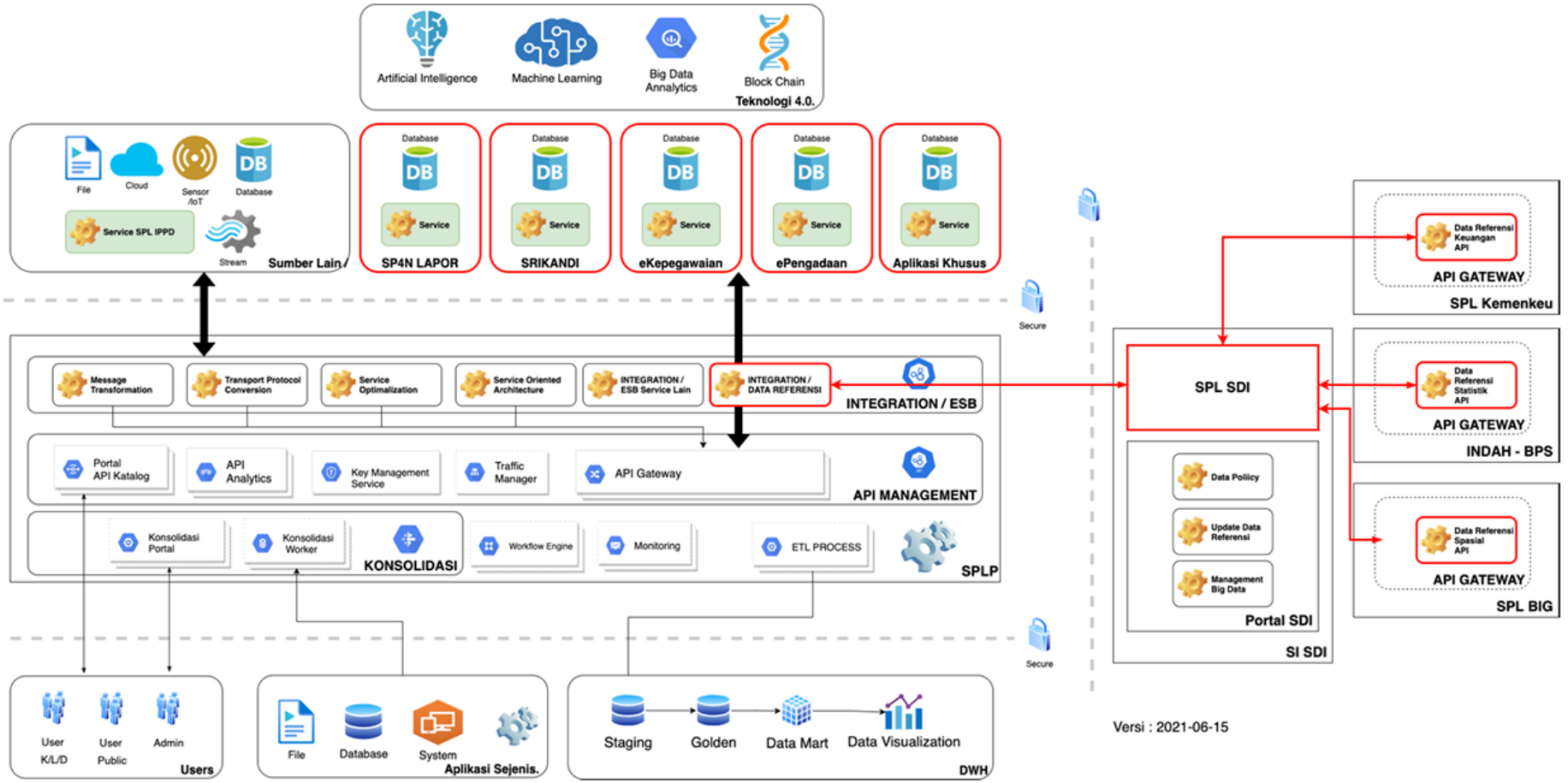

Gambar 2.5.2.6.6. Arsitektur Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Gambar 2.5.2.6.7. Fitur Utama SPLP

Fitur unggulan yang ada pada teknologi SIstem Penghubung Layanan Pemerintah antara lain:

1. API Manager
   teknologi pengelolaan API yang menjadi gerbang dan portal dalam penyediaan layanan pemerintah.
2. ESB
   teknologi enterprise service bus yang mengintegrasikan, memperkaya, serta mengorkestrasikan layanan pemerintah.
3. ETL
   Extract Transform Load merupakan teknologi untuk melakukan konsolidasi data dari berbagai tipe sumber data.
4. Multi Tenancy
   teknologi replikasi menjadi tenant - tenant memungkikan teknologi SPLP dapat diguna pakaikan untuk instansi - instansi pemerintah.

Usulan Sistem Penghubung Layanan

Untuk menjaga keamanan pertukaran data, dan tingkat ketersediaan *API Manager* maka pengembangan *API Gateway* dapat menyesuaikan dengan proses bisnis dan kebutuhan serta keamanan. *API Gateway* internal dapat digunakan untuk pertukaran data yang terjadi di lingkungan internal pusat data (intranet). Sedangkan *API Gateway* eksternal digunakan untuk pertukaran data dengan pihak lain seperti Kementerian/Instansi Pemerintah Daerah lain melalui melalui jalur internet.

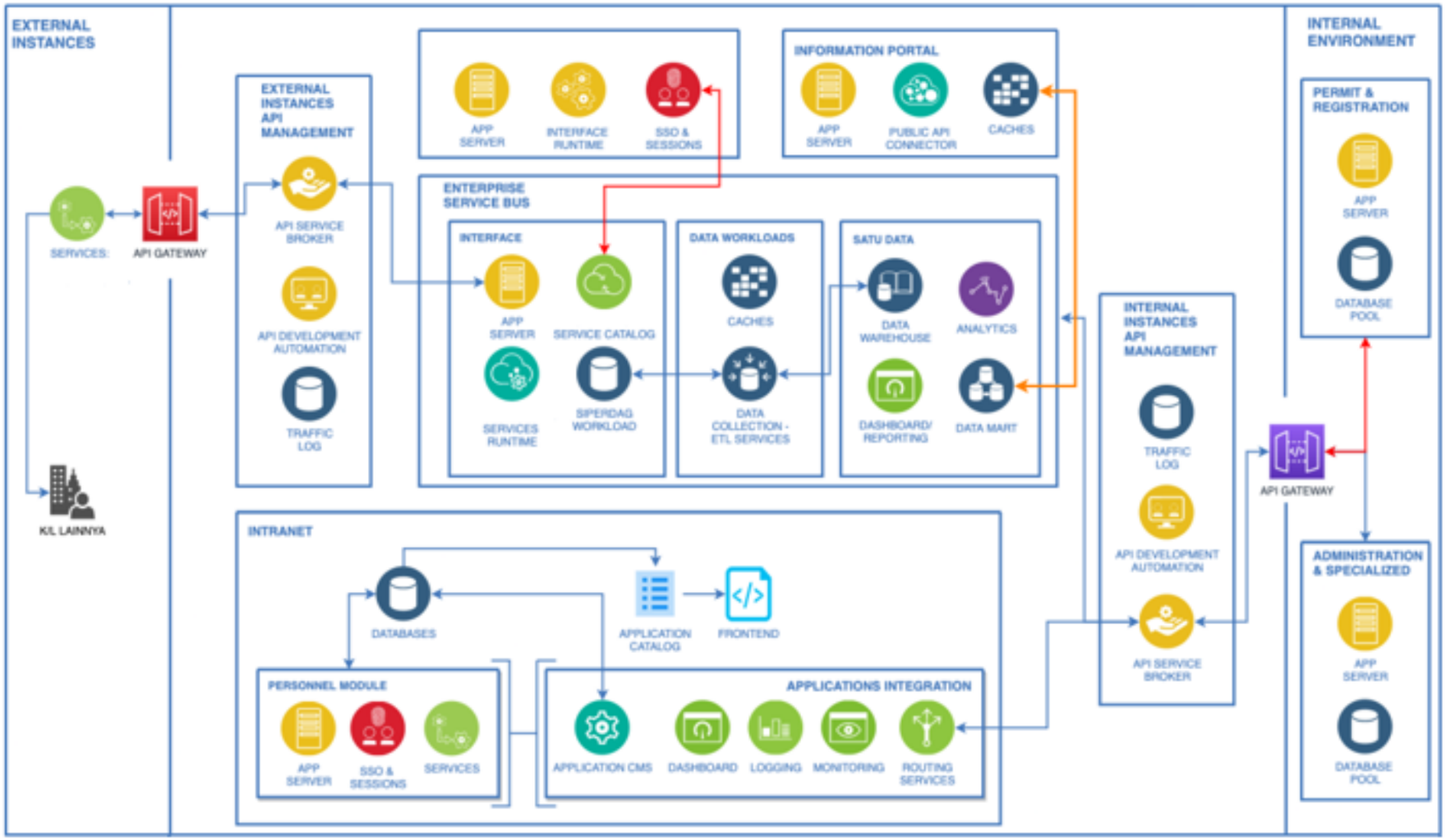

Gambar 2.5.2.6.8. Arsitektur API *Gateway* Internal dan Eksternal

Gambar di atas, memperlihatkan bahwa terdapat dua *API Gateway* yakni *API Gateway* Eksternal (kotak warna merah sebelah kiri) untuk melayani akses ke Kementerian/Lembaga dan API *Gateway* Internal untuk melayani akses *service* internal/intranet.

F. Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah To Be

Katalog infrastruktur (sistem penghubung layanan pemerintah) berisi deskripsi mengenai infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki dan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog infrastruktur (sistem penghubung layanan pemerintah) (To Be) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog infrastruktur yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Tabel 2.5.2.5.1. Referensi Arsitektur Infrastruktur - *Sistem Penghubung Layanan Pemerintah*

ID	Nama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Deskripsi Sistem Penghubung	Jenis SPL [Kode Referensi Infrastruktur]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
KP-DAI.02.02.01.03	SPLP Nasional	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan	Instansi Pemerintah Lain	Komdigi		RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.02 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	RAI.02.02.01 SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH

Arsitektur Keamanan To-Be

2.5.3.1. Kondisi Eksisting Keamanan SPBE

Kondisi saat ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memiliki beberapa kebijakan, standar, maupun prosedur keamanan informasi. Selain itu kegiatan seperti sosialisasi, peningkatan keamanan, dan penilaian mandiri keamanan informasi beberapa sudah dapat dilaksanakan.

2.5.3.2. Arsitektur Keamanan SPBE

Arsitektur keamanan merupakan aspek vital dalam usaha organisasi untuk melindungi aset-aset penting yang dimiliki. Arsitektur keamanan menjelaskan bagaimana struktur, komponen-komponen, hubungan antar komponen dan tata letak kontrol-kontrol keamanan yang diterapkan pada infrastruktur TI organisasi. Arsitektur keamanan bisa berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, bergantung pada subsistem, produk dan aplikasi-aplikasi yang dikelola/digunakannya. Perbedaan kondisi tersebut pada gilirannya akan menyebabkan perbedaan pendekatan dalam menerapkan pertahanan mendalam (*defense in depth*).

Arsitektur keamanan mengilustrasikan bagaimana sebuah organisasi menerapkan pertahanan mendalam, serta bagaimana lapisan-lapisan kontrolnya berhubungan satu dengan lainnya. Desain dan implementasi kontrol-kontrol keamanan yang berlapis ini sangat penting terutama untuk lingkungan yang cukup kompleks. Setiap komponen pada arsitektur keamanan juga mengandung risiko keamanan. Mengingat kondisi yang berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, maka analisis dan desain arsitekturnya harus mempertimbangkan variabel dan risiko spesifik yang mungkin terjadi pada masing-masing organisasi.

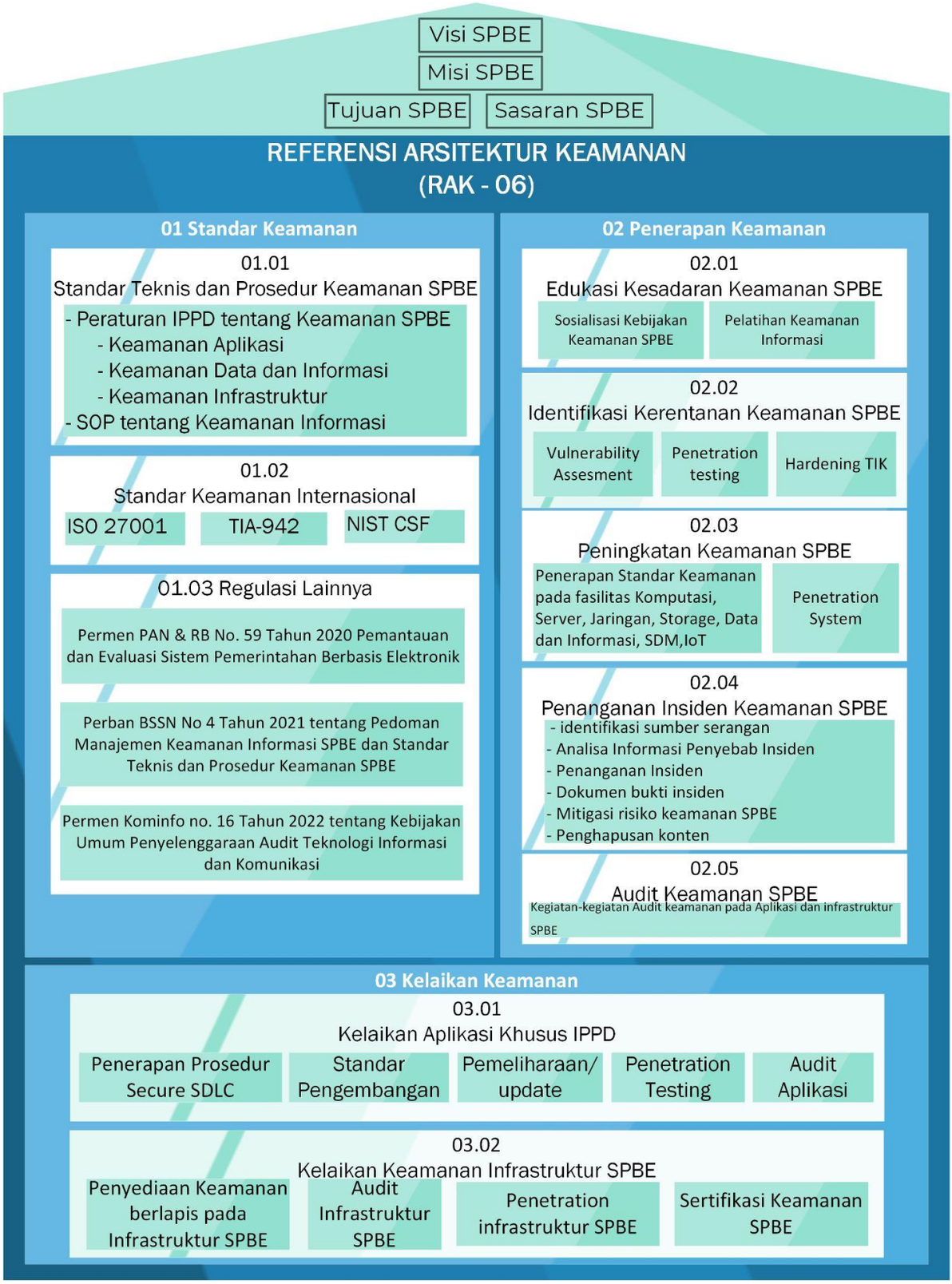

Gambar 2.5.3.2.1. Arsitektur Keamanan SPBE

2.5.3.3. Manajemen Keamanan Informasi SPBE

Adapun dasar hukum dari manajemen keamanan informasi SPBE yakni:

a. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. Permenpan-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
d. Peraturan BSSN Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan SPBE dan Standar Teknis & Prosedur Keamanan SPBE.

Perpres 95 menyebutkan bahwa Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Selanjutnya, dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 3 disebutkan bahwa pedoman manajemen keamanan informasi merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasioan, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi SPBE.

A. Pilar Manajemen dan Standar Teknis Keamanan SPBE

Standar teknis dan prosedur keamanan digunakan sebagai panduan untuk memastikan bahwa persyaratan keamanan minimal terpenuhi. Standar tersebut mencakup standar nasional dan internasional, serta peraturan regulasi yang berkaitan dengan keamanan SPBE. Penyusunan pedoman manajemen dan keamanan informasi berbasis risiko yang artinya melibatkan proses asesmen, identifikasi, dan manajemen risiko penggunaan teknologi informasi di SPBE yang dapat digambarkan sebagai pilar seperti di bawah ini.

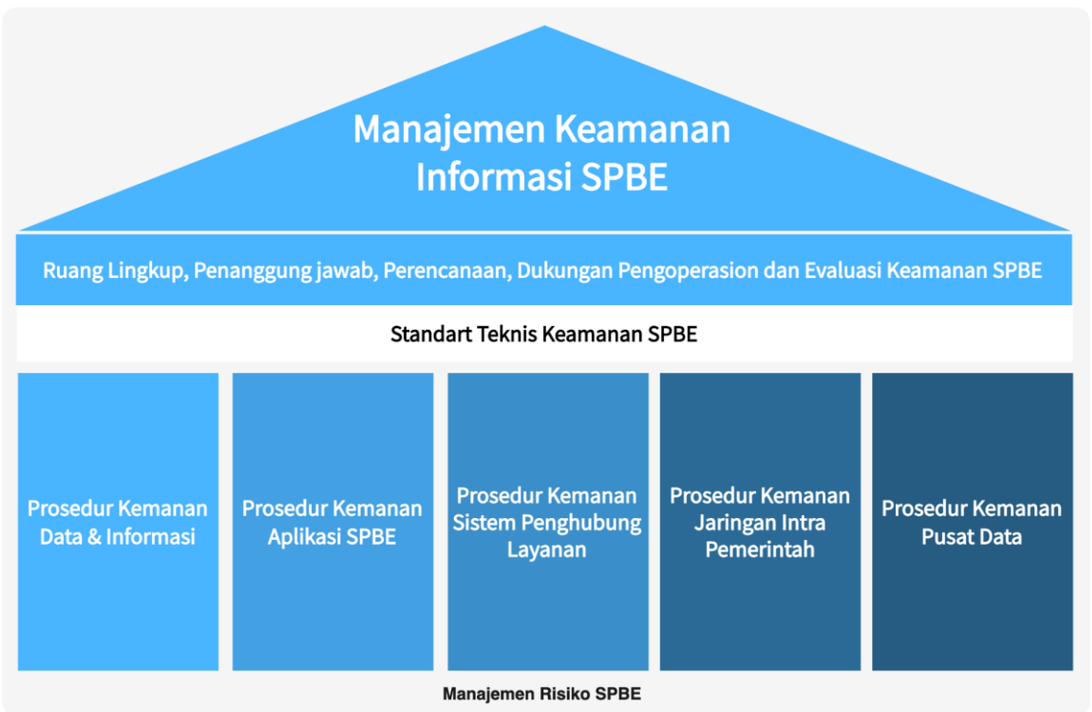

Gambar 2.5.3.3.1. Pilar Manajemen dan Standar Teknis Keamanan SPBE

Proses penyusunan manajemen keamanan SPBE dapat mengacu pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.5.3.3.2. Proses Manajemen Keamanan Informasi SPBE

B. SNI ISO 27001:2022 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Sistem Manajemen Kemanan Informasi (SMKI) adalah cara untuk melindungi dan mengelola informasi berdasarkan pendekatan risiko bisnis yang sistematis untuk menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan meningkatkan keamanan informasi. Proses dalam SMKI disusun berdasarkan risiko pendekatan bisnis untuk merencanakan (*Plan*), mengimplementasikan dan mengoperasikan (*Do*), memonitor dan meninjau ulang (*Check*) serta memelihara dan meningkatkan atau mengembangkan (*Act*).

Tabel 2.5.3.3.1. Peta PDCA dalam Proses SMKI

Plan **(Penetapan SMKI)**	Menetapkan kebijakan, sasaran, proses dan prosedur SMKI yang sesuai untuk pengelolaan risiko dan perbaikan keamanan informasi agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi secara keseluruhan.
Do **(Penerapan dan Pengoperasian SMKI)**	Menetapkan kebijakan, sasaran, proses dan prosedur SMKI yang sesuai untuk pengelolaan risiko dan perbaikan keamanan informasi agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi secara keseluruhan.
Check **(Pemantauan dan Pengkajian SMKI)**	Mengakses dan apabila berlaku mengukur kinerja proses terhadap kebijakan, sasaran SMKI dan pengalaman praktis dan melaporkan hasilnya kepada manajemen untuk pengkajian.
Act **(Peningkatan dan Pemeliharaan SMKI)**	Mengambil tindakan korektif dan pencegahan berdasarkan hasil internal audit SMKI dan tinjauan manajemen atau informasi terkait lainnya, untuk mencapai perbaikan berkesinambungan dalam SMKI.

Lingkup dan tujuan sistem manajemen keamanan aplikasi dari SNI ISO 27001:2022 meliputi :

a. Mendefinisikan persyaratan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meningkatkan secara berkesinambungan terhadap sistem manajemen keamanan informasi;
b. Persyaratan dalam standar ini bersifat umum dimaksudkan agar dapat diterapkan oleh organisasi tanpa membatasi jenis, ukuran, serta sifat organisasi;
c. Merupakan standar dengan pendekatan berbasis risiko, artinya melibatkan asesmen serta manajemen risiko terkait keamanan informasi; dan
d. Merupakan standar internasional dengan sasaran melindungi informasi dalam kontak CIA (*Confidentiality*, *Integrity*, dan *Availability*).

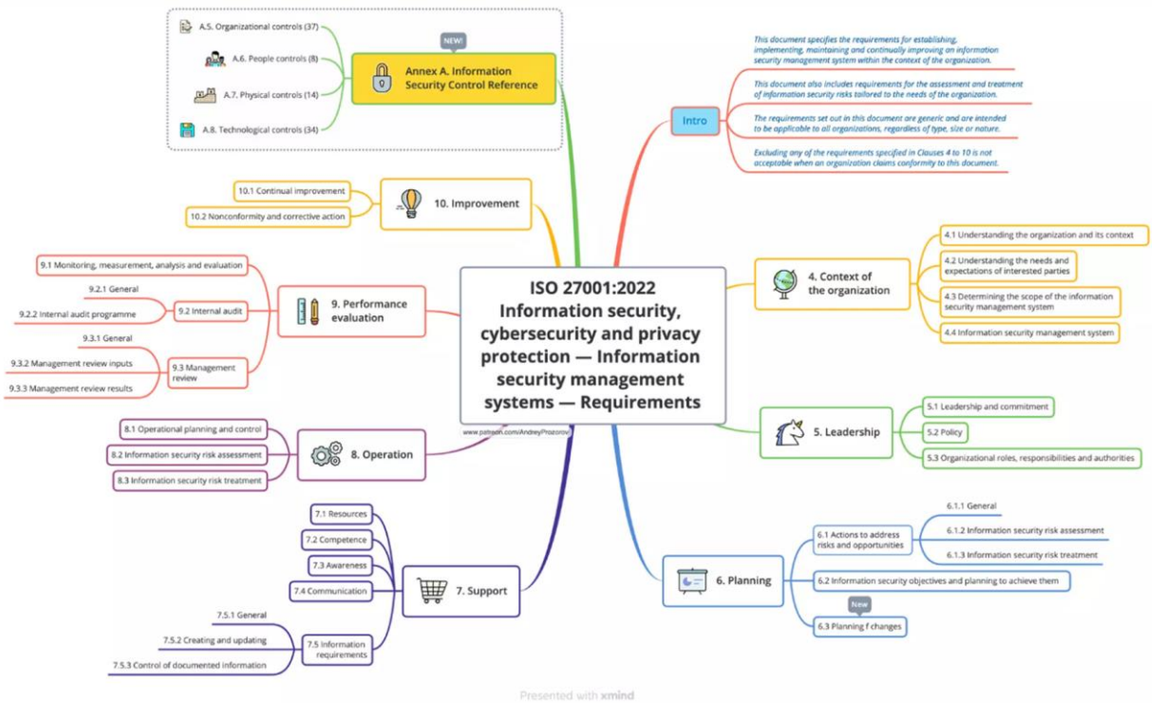

Gambar 2.5.3.3.3 Struktur SNI ISO 27001:2022

Berbeda dengan ISO/IEC 27001:2013, judul lengkap versi 2022 ini adalah ISO/IEC 27001:2022 *Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection*. Bagian yang mengalami perubahan paling signifikan adalah *Annex A* ISO/IEC 27001 yang selaras dengan pembaruan ISO/IEC 27002:2022. *Annex A* dari ISO/IEC 27001:2022 berisi perubahan pada keduanya, jumlah kontrol, dan daftarnya dalam grup. Judul Lampiran juga telah berubah dari “tujuan dan kontrol-kontrol referensi” menjadi “referensi kontrol keamanan informasi”. Oleh karena itu, tujuan referensi dari setiap kelompok-kontrol yang ada di versi standar sebelumnya, sekarang telah dihapus.

Jumlah kontrol *Annex A* telah berkurang dari 114 menjadi 93. Penurunan jumlah kontrol sebagian besar berasal dari penggabungan banyak kontrol. 35 kontrol tetap sama, 23 kontrol diganti namanya, 57 kontrol digabungkan menjadi 24 kontrol, dan 1 kontrol telah dibagi menjadi 2 kontrol. 93 kontrol telah direstrukturisasi menjadi empat grup kontrol.

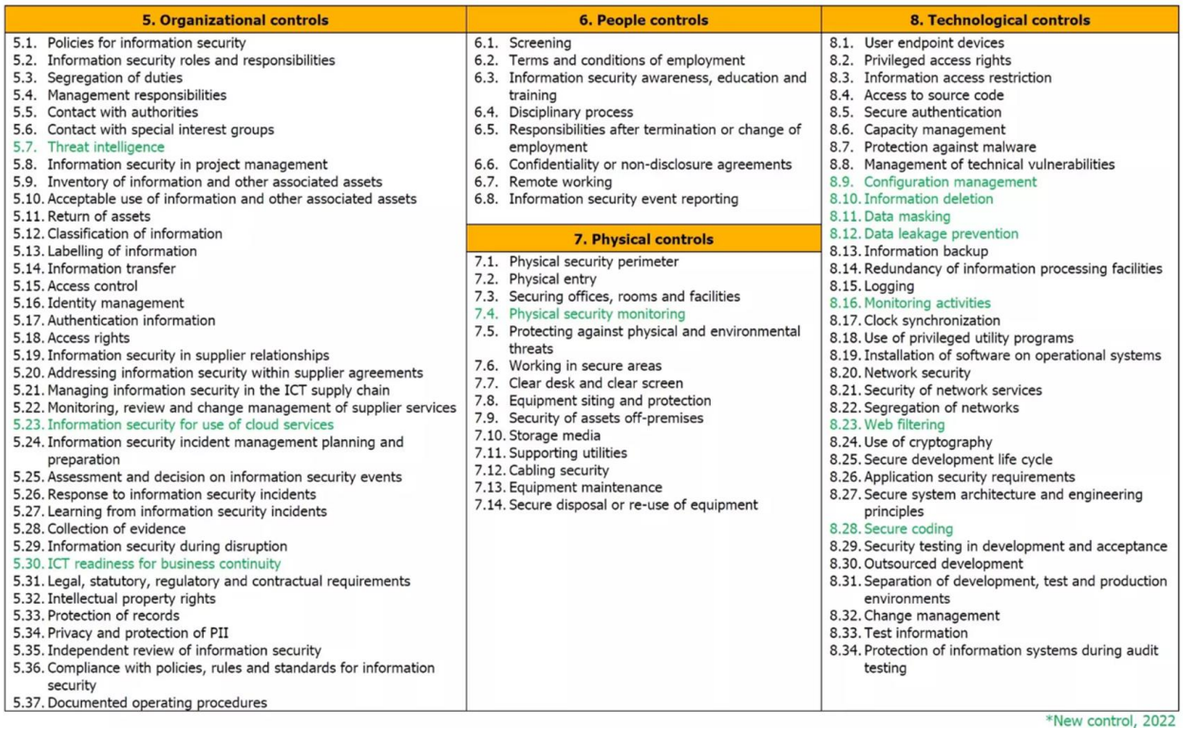

5. Organizational controls	6. People controls	8. Technological controls
5.1. Policies for information security	6.1. Screening	8.1. User endpoint devices
5.2. Information security roles and responsibilities	6.2. Terms and conditions of employment	8.2. Privileged access rights
5.3. Segregation of duties	6.3. Information security awareness, education and training	8.3. Information access restriction
5.4. Management responsibilities	6.4. Disciplinary process	8.4. Access to source code
5.5. Contact with authorities	6.5. Responsibilities after termination or change of employment	8.5. Secure authentication
5.6. Contact with special interest groups	6.6. Confidentiality or non-disclosure agreements	8.6. Capacity management
5.7. Threat intelligence	6.7. Remote working	8.7. Protection against malware
5.8. Information security in project management	6.8. Information security event reporting	8.8. Management of technical vulnerabilities
5.9. Inventory of information and other associated assets		8.9. Configuration management
5.10. Acceptable use of information and other associated assets	**7. Physical controls**	8.10. Information deletion
5.11. Return of assets	7.1. Physical security perimeter	8.11. Data masking
5.12. Classification of information	7.2. Physical entry	8.12. Data leakage prevention
5.13. Labelling of information	7.3. Securing offices, rooms and facilities	8.13. Information backup
5.14. Information transfer	7.4. Physical security monitoring	8.14. Redundancy of information processing facilities
5.15. Access control	7.5. Protecting against physical and environmental threats	8.15. Logging
5.16. Identity management	7.6. Working in secure areas	8.16. Monitoring activities
5.17. Authentication information	7.7. Clear desk and clear screen	8.17. Clock synchronization
5.18. Access rights	7.8. Equipment siting and protection	8.18. Use of privileged utility programs
5.19. Information security in supplier relationships	7.9. Security of assets off-premises	8.19. Installation of software on operational systems
5.20. Addressing information security within supplier agreements	7.10. Storage media	8.20. Network security
5.21. Managing information security in the ICT supply chain	7.11. Supporting utilities	8.21. Security of network services
5.22. Monitoring, review and change management of supplier services	7.12. Cabling security	8.22. Segregation of networks
5.23. Information security for use of cloud services	7.13. Equipment maintenance	8.23. Web filtering
5.24. Information security incident management planning and preparation	7.14. Secure disposal or re-use of equipment	8.24. Use of cryptography
5.25. Assessment and decision on information security events		8.25. Secure development life cycle
5.26. Response to information security incidents		8.26. Application security requirements
5.27. Learning from information security incidents		8.27. Secure system architecture and engineering principles
5.28. Collection of evidence		8.28. Secure coding
5.29. Information security during disruption		8.29. Security testing in development and acceptance
5.30. ICT readiness for business continuity		8.30. Outsourced development
5.31. Legal, statutory, regulatory and contractual requirements		8.31. Separation of development, test and production environments
5.32. Intellectual property rights		8.32. Change management
5.33. Protection of records		8.33. Test information
5.34. Privacy and protection of PII		8.34. Protection of information systems during audit testing
5.35. Independent review of information security		
5.36. Compliance with policies, rules and standards for information security		
5.37. Documented operating procedures		

*New control, 2022

Gambar 2.5.3.3.4 Struktur SNI ISO 27001:2022

A.5 Kontrol organisasi (*organizational*) - berisi 37 kontrol

A.6 Kontrol orang (*people*) - berisi 8 kontrol

A.7 Kontrol fisik (*physical*) - berisi 14 kontrol

A.8 Kontrol teknologi (*technology*) - berisi 34 kontrol

ISO/IEC 27001:2022 juga telah menambahkan 11 kontrol baru yang disebutkan di bawah ke *Annex A*:

1. *Threat Intelligence (A.5.7)*
2. *ICT readiness for business continuity (A.5.30)*
3. *Information security for cloud services (A.5.23)*
4. *Physical security monitoring (A.7.4)*
5. *Configuration management (A.8.9)*
6. *Information deletion (A.8.10)*
7. *Data masking (A.8.11)*
8. *Data leakage prevention (A.8.12)*
9. *Monitoring activities (A.8.16)*
10. *Web filtering (A.8.23)*
11. *Secure coding (A.8.28)*

Perusahaan yang sudah tersertifikasi ISO 27001:2013 harus menyelesaikan transisi ke ISO 27001:2022 sebelum 31 Oktober 2025. Sedangkan bagi Badan sertifikasi harus mulai mensertifikasi perusahaan dengan standar ISO 27001:2022 paling lambat 31 Oktober 2023.

2.5.3.4. Standar Teknis dan Prosedur

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE yang telah diterapkan oleh IPPD masing-masing. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional ataupun internasional. Saat ini telah terbit Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

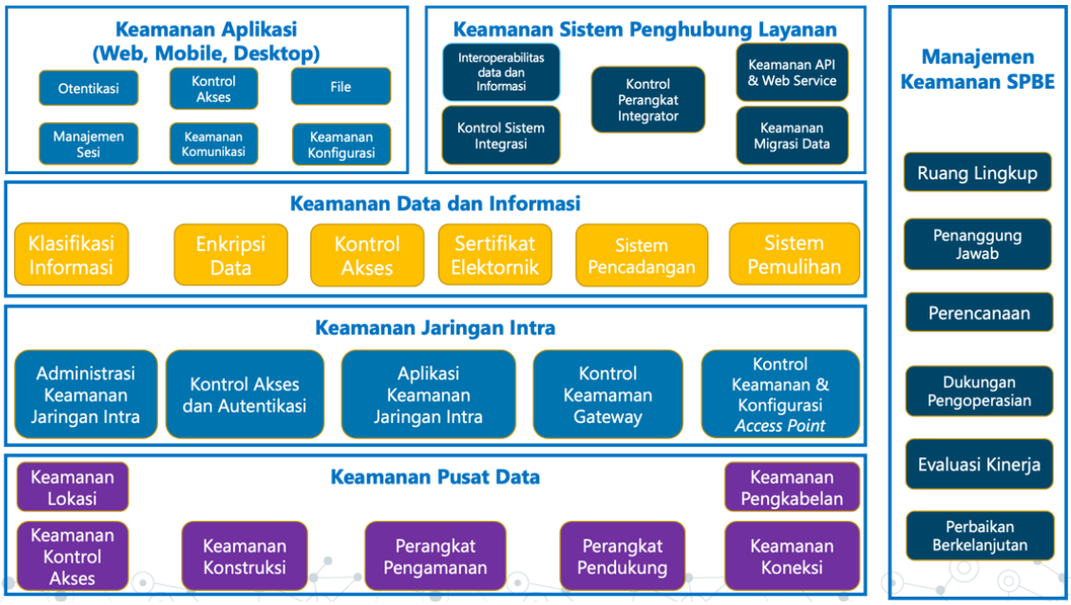

Gambar 2.5.3.4.1. Fungsi - Fungsi pada Standar Teknis Keamanan SPBE

A. Keamanan Data dan Informasi

Fungsi - fungsi yang ada di dalam standar teknis keamanan data dan informasi meliputi aspek: (a) Kerahasiaan (*Confidentiality*), (b) Keaslian (*Authentication*), (c) Keutuhan (*Integrity*), (d) Kenirsangkalan (*Non-Repudiation*), dan (e) Ketersediaan (*Availability*). Berikut ini adalah rincian beberapa prosedur untuk memenuhi fungsi standar teknis.

a. Kerahasiaan dengan menerapkan:
   - Klasifikasi informasi;
   - Enkripsi dengan sistem kriptografi; dan
   - Kontrol akses atau pembatasan akses terhadap data dan informasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penerapan klasifikasi informasi dapat mengacu pada Perka ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Tabel 2.5.3.4.1 Klasifikasi Informasi

Klasifikasi Informasi	Penjelasan
SANGAT RAHASIA	Jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa
RAHASIA	Jika diketahui oleh tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
TERBATAS	Jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan, seperti kerugian finansial yang signifikan.
PUBLIK	Jika dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

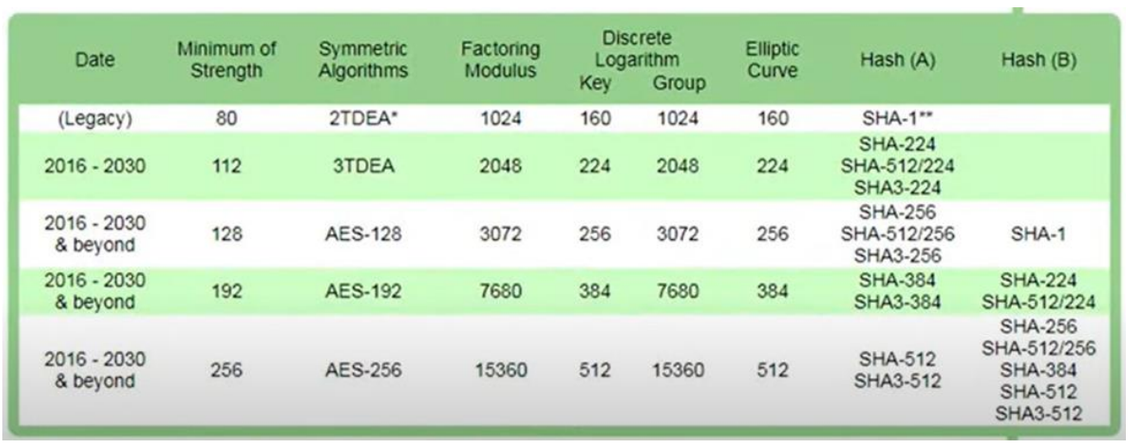

Date	Minimum of Strength	Symmetric Algorithms	Factoring Modulus	Discrete Logarithm Key	Discrete Logarithm Group	Elliptic Curve	Hash (A)	Hash (B)
(Legacy)	80	2TDEA*	1024	160	1024	160	SHA-1**	
2016 - 2030	112	3TDEA	2048	224	2048	224	SHA-224 SHA-512/224 SHA3-224	
2016 - 2030 & beyond	128	AES-128	3072	256	3072	256	SHA-256 SHA-512/256 SHA3-256	SHA-1
2016 - 2030 & beyond	192	AES-192	7680	384	7680	384	SHA-384 SHA3-384	SHA-224 SHA-512/224
2016 - 2030 & beyond	256	AES-256	15360	512	15360	512	SHA-512 SHA3-512	SHA-256 SHA-512/256 SHA-384 SHA-512 SHA3-512

Gambar 2.5.3.4.2 Standar Kriptografi untuk Enkripsi

b. Keaslian
   - Mekanisme verifikasi;
   - Mekanisme validasi; dan
   - Menerapkan sistem *hash function*.

c. Keutuhan
   - Penerapan pendeteksian modifikasi; dan
   - Penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

d. Kenirsangkalan
   - Penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan
   - Penjaminan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik melalui sertifikat elektronik.

e. Ketersediaan
   - Penerapan sistem pencadangan secara berkala;
   - Pembuatan perencanaan untuk menjamin data dan informasi dapat selalu diakses; dan

- Penerapan sistem pemulihan.

B. Keamanan Aplikasi SPBE

Keamanan aplikasi SPBE meliputi aplikasi berbasis *web* dan aplikasi berbasis *mobile*. Fungsi yang ada di dalam standar teknis keamanan aplikasi berbasis *web* meliputi aspek :

1. Autentikasi;
2. Manajemen sesi;
3. Persyaratan kontrol akses;
4. Validasi *input*;
5. Kriptografi pada verifikasi statis;
6. Penanganan *error* dan pencatatan *log*;
7. Proteksi data;
8. Keamanan komunikasi;
9. Pengendalian kode berbahaya;
10. Logika bisnis;
11. *File*;
12. Keamanan *API* dan *web service*; dan
13. Keamanan konfigurasi.

Pemenuhan beberapa aspek standar keamanan aplikasi berbasis *web* diperlukan prosedur – prosedur seperti berikut ini :

1. Autentikasi
   - menggunakan manajemen kata sandi untuk proses autentikasi;
   - menerapkan verifikasi kata sandi pada sisi pusat data;
   - mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi;
   - mengatur jumlah maksimum kesalahan dalam pemasukan kata sandi;
   - mengatur mekanisme pemulihan kata sandi;
   - menjaga kerahasiaan kata sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi; dan
   - menggunakan jalur komunikasi yang diamankan untuk proses autentikasi.

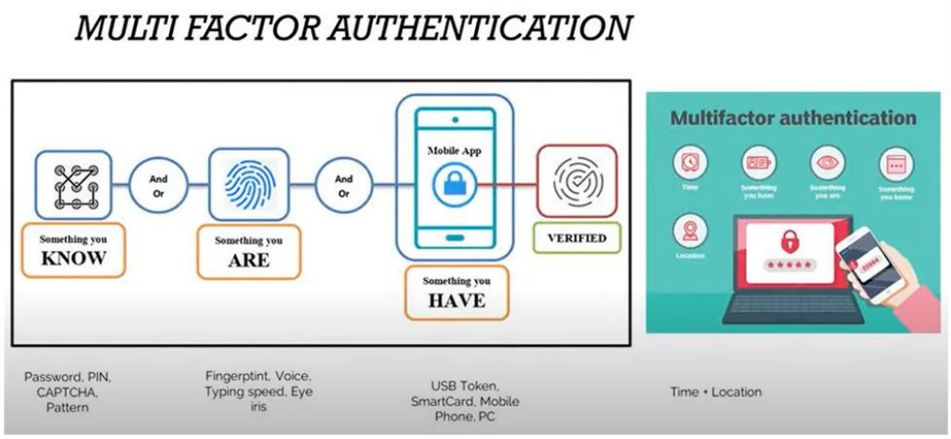

Gambar 2.5.3.4.3. *Multi Factor Authentication*

2. Manajemen Sesi
   - menggunakan pengendali sesi untuk proses manajemen sesi;
   - menggunakan pengendali sesi yang disediakan oleh kerangka kerja aplikasi;

- mengatur pembuatan dan keacakan token sesi yang dihasilkan oleh pengendali sesi;
- mengatur kondisi dan jangka waktu habis sesi;
- validasi dan pencantuman *session id*;
- perlindungan terhadap lokasi dan pengiriman token untuk sesi terautentikasi; dan
- perlindungan terhadap duplikasi dan mekanisme persetujuan pengguna.

3. Persyaratan Kontrol Akses
   - menetapkan otorisasi pengguna untuk membatasi kontrol akses;
   - mengatur peringatan terhadap bahaya serangan otomatis apabila terjadi akses yang bersamaan atau akses yang terus-menerus pada fungsi;
   - mengatur antarmuka pada sisi administrator; dan
   - mengatur verifikasi kebenaran token ketika mengakses data dan informasi yang dikecualikan.
4. Validasi Input
   - menerapkan fungsi validasi *input* pada sisi pusat data;
   - menerapkan mekanisme penolakan *input* jika terjadi kesalahan validasi;
   - memastikan *runtime environment* aplikasi tidak rentan terhadap serangan validasi *input*;
   - melakukan validasi positif pada seluruh *input*;
   - melakukan *filter* terhadap data yang tidak dipercaya;
   - menggunakan *fitur* kode dinamis;
   - melakukan perlindungan terhadap akses yang mengandung konten skrip; dan
   - melakukan perlindungan dari serangan injeksi basis data.
5. Kriptografi pada Verifikasi Statis
   - menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protokol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   - melakukan autentikasi data yang dienkripsi;
   - menerapkan manajemen kunci kriptografi; dan
   - membuat angka acak yang menggunakan generator angka acak kriptografi.
6. Penanganan *Error* dan Pencatatan *Log*
   - mengatur konten pesan yang ditampilkan ketika terjadi kesalahan;
   - menggunakan metode penanganan *error* untuk mencegah kesalahan terprediksi dan tidak terduga;
   - menangani seluruh pengecualian yang tidak ditangani;
   - tidak mencantumkan informasi yang dikecualikan dalam pencatatan *log*;
   - mengatur cakupan *log* yang dicatat untuk mendukung upaya penyelidikan ketika terjadi insiden;
   - mengatur perlindungan *log* aplikasi dari akses dan modifikasi yang tidak sah;
   - melakukan enkripsi pada data yang disimpan untuk mencegah injeksi *log*; dan
   - melakukan sinkronisasi sumber waktu sesuai dengan zona waktu dan waktu yang benar.
7. Proteksi Data
   - melakukan identifikasi dan penyimpanan salinan informasi yang dikecualikan;
   - melakukan perlindungan dari akses yang tidak sah terhadap informasi yang dikecualikan yang disimpan sementara dalam aplikasi;

- melakukan pertukaran, penghapusan, dan audit informasi yang dikecualikan;
- melakukan penentuan jumlah parameter;
- memastikan data disimpan dengan aman;
- menentukan metode untuk menghapus dan mengekspor data sesuai permintaan pengguna; dan
- membersihkan memori setelah tidak diperlukan.

8. Keamanan Komunikasi
   - menggunakan komunikasi terenkripsi;
   - mengatur koneksi masuk dan keluar yang aman dan terenkripsi dari sisi pengguna;
   - mengatur jenis algoritma yang digunakan dan alat pengujiannya; dan
   - mengatur aktivasi dan konfigurasi sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
9. Pengendalian Kode Berbahaya
   - menggunakan analisis kode dalam kontrol kode berbahaya;
   - memastikan kode sumber aplikasi dan pustaka tidak mengandung kode berbahaya dan fungsionalitas lain yang tidak diinginkan;
   - mengatur izin terkait *fitur* atau sensor terkait privasi;
   - mengatur perlindungan integritas; dan
   - mengatur mekanisme *fitur* pembaruan.
10. Logika Bisnis
    - memproses alur logika bisnis dalam urutan langkah dan waktu yang realistis;
    - memastikan logika bisnis memiliki batasan dan validasi;
    - memonitor aktivitas yang tidak biasa;
    - membantu dalam kontrol anti otomatisasi; dan
    - memberikan peringatan ketika terjadi serangan otomatis atau aktivitas yang tidak biasa.
11. File
    - mengatur jumlah *file* untuk setiap pengguna dan kuota ukuran *file* yang diunggah;
    - melakukan validasi *file* sesuai dengan tipe konten yang diharapkan;
    - melakukan perlindungan terhadap metadata *input* dan metadata *file*;
    - melakukan pemindaian *file* yang diperoleh dari sumber yang tidak dipercaya; dan
    - melakukan konfigurasi pusat data untuk mengunduh *file* sesuai ekstensi yang ditentukan.
12. Keamanan *API* dan *Web Service*
    - melakukan konfigurasi layanan *web*;
    - memverifikasi *uniform resource identifier* API tidak menampilkan informasi yang berpotensi sebagai celah keamanan;
    - membuat keputusan otorisasi;
    - menampilkan metode *RESTful hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
    - menggunakan validasi skema dan verifikasi sebelum menerima input;
    - menggunakan metode perlindungan layanan berbasis *web*; dan
    - menerapkan kontrol anti otomatisasi.
13. Keamanan konfigurasi

- mengkonfigurasi pusat data sesuai rekomendasi pusat data aplikasi dan kerangka kerja aplikasi yang digunakan;
- mendokumentasi, menyalin konfigurasi, dan semua dependensi;
- menghapus fitur, dokumentasi, sampel, dan konfigurasi yang tidak diperlukan;
- memvalidasi integritas aset jika aset aplikasi diakses secara eksternal; dan
- menggunakan respons aplikasi dan konten yang aman.

Standar teknis keamanan aplikasi berbasis mobile terdiri dari:

a. penyimpanan data dan persyaratan privasi;
b. kriptografi;
c. autentikasi dan manajemen sesi;
d. komunikasi jaringan;
e. interaksi *platform*;
f. kualitas kode dan pengaturan *build*; dan
g. ketahanan.

Prosedur–prosedur yang dapat diterapkan untuk memenuhi standar teknis keamanan aplikasi berbasis mobile meliputi:

a. penyimpanan data dan persyaratan privasi
   - menyimpan seluruh data dan informasi yang dikecualikan hanya dalam fasilitas penyimpanan kredensial sistem;
   - membatasi pertukaran data dan informasi yang dikecualikan dengan *third party*;
   - menonaktifkan *cache keyboard* pada saat memasukkan data dan informasi yang dikecualikan;
   - melindungi informasi yang dikecualikan saat terjadi *inter process communication*; dan
   - melindungi data dan informasi yang dikecualikan yang dimasukkan melalui antarmuka pengguna.

b. Kriptografi
   - menghindari penggunaan kriptografi simetrik dengan *hardcoded key*;
   - mengimplementasikan metode kriptografi yang sudah teruji sesuai kebutuhan;
   - menghindari penggunaan protokol kriptografi atau algoritma kriptografi yang obsolet;
   - menghindari penggunaan kunci kriptografi yang sama; dan
   - menggunakan pembangkit kunci acak yang memenuhi kriteria keacakan kunci.
c. Autentikasi dan manajemen sesi
   - menerapkan autentikasi pada *remote endpoint* terhadap aplikasi yang menyediakan akses pengguna untuk layanan jarak jauh;
   - menggunakan *session identifier* yang acak tanpa perlu mengirimkan kredensial pengguna apabila menggunakan *stateful* manajemen sesi;

- memastikan pusat data menyediakan token yang telah ditandatangani menggunakan algoritma yang aman apabila menggunakan autentikasi *stateless* berbasis token;
- memastikan *remote endpoint* memutus sesi yang ada saat pengguna *log out*;
- menerapkan pengaturan sandi pada *remote endpoint*;
- membatasi jumlah percobaan *log in* pada *remote endpoint*;
- menentukan masa berlaku sesi dan masa kadaluarsa token pada *remote endpoint*; dan
- melakukan otorisasi pada *remote endpoint*.

d. Komunikasi jaringan
- menerapkan *secure socket layer* atau *transport layer security* yang tidak obsolet secara konsisten; dan
- memverifikasi sertifikat *remote endpoint*.

e. Interaksi *platform*
- memastikan aplikasi hanya meminta akses terhadap sumber daya yang diperlukan;
- melakukan validasi terhadap seluruh input dari sumber eksternal dan pengguna;
- menghindari pengiriman fungsionalitas sensitif melalui skema *custom uniform resource locator* dan fasilitas *inter process communication;*
- menghindari penggunaan *JavaScript* dalam *WebView*;
- menggunakan protokol *hypertext transfer protocol secure* pada *WebView;* dan
- mengimplementasikan penggunaan serialisasi API yang aman.

f. Kualitas kode dan pengaturan *build*
- menandatangani aplikasi dengan sertifikat yang valid;
- memastikan aplikasi dalam *mode rilis*;
- menghapus simbol *debugging* dari *native binary*;
- menghapus kode *debugging* dan kode bantuan pengembang;
- mengidentifikasi kelemahan seluruh komponen *third party*;
- menentukan mekanisme penanganan *error*;
- mengelola memori secara aman; dan
- mengaktifkan fitur keamanan yang tersedia.

g. Ketahanan
- mencegah aplikasi berjalan pada perangkat yang telah dilakukan modifikasi yang tidak sah;
- mendeteksi dan merespons *debugger*;
- mencegah *executable file* melakukan perubahan pada sumber daya perangkat;
- mendeteksi dan merespons keberadaan perangkat *reverse engineering*;
- mencegah aplikasi berjalan dalam *emulator*;
- mendeteksi perubahan kode dan data di ruang memori;
- menerapkan fungsi *device binding* dengan menggunakan *properti* unik pada perangkat;
- melindungi seluruh *file* dan *library* pada aplikasi; dan
- menerapkan metode *obfuscation*.

C. Keamanan Sistem Penghubung Layanan

Standar keamanan pada Sistem Penghubung Layanan untuk memastikan penerapan kontrol sistem yang menghubungkan antara Aplikasi SPBE dengan aplikasi SPBE lainnya, atau antara Aplikasi SPBE dengan web pusat data, meliputi:

a. Keamanan interoperabilitas data dan informasi
   - menerapkan sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk pengamanan dokumen dan surat elektronik;
   - menerapkan sistem enkripsi data;
   - memastikan data dan informasi selalu dapat diakses sesuai otoritasnya; dan
   - menerapkan sistem *hash function* pada file.

b. Penerapan kontrol sistem integrasi
   - menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* versi terkini pada sesi pengiriman data dan informasi;
   - menerapkan *internet protocol security* untuk mengamankan transmisi data dalam jaringan berbasis *transmission control protocol/internet protocol*;
   - menerapkan sistem anti *distributed denial of service*;
   - menerapkan autentikasi untuk memverifikasi identitas eksternal antar Layanan SPBE yang terhubung;
   - menerapkan manajemen keamanan sesi;
   - menerapkan pembatasan akses pengguna berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan;
   - menerapkan validasi input;
   - menerapkan kriptografi pada verifikasi statis;
   - menerapkan sertifikat elektronik pada *web authentication*;
   - menerapkan penanganan *error* dan pencatatan *log*;
   - menerapkan proteksi data dan jalur komunikasi;
   - menerapkan pendeteksi virus untuk memeriksa beberapa konten file;
   - menetapkan perjanjian tingkat layanan dengan standar paling rendah 95% (sembilan puluh lima per seratus); dan
   - memastikan sistem integrasi tidak memiliki kerentanan yang berpotensi menjadi celah peretas.

c. Penerapan kontrol perangkat integrator
   - menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak dengan *security patches* terkini;
   - menggunakan anti virus dan *anti-spyware* terkini;
   - mengaktifkan fitur keamanan pada peramban *web*;
   - menerapkan *firewall* dan *host-based intrusion detection systems*;
   - mencegah instalasi perangkat lunak yang belum terverifikasi;
   - mencegah akses terhadap situs yang tidak sah; dan
   - mengaktifkan *sistem recovery* dan *restore* pada perangkat integrator.

d. Keamanan *API* dan *web service*
   - menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* di antara pengirim dan penerima *API*;
   - menerapkan protokol *open authorization* versi terkini untuk menjembatani interaksi antara *resource owner*, *resource pusat data* dan/atau *third party*;

- menampilkan metode RESTful *hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
- melindungi layanan *web* RESTful yang menggunakan *cookie* dari *cross-site request forgery*; dan
- memvalidasi parameter yang masuk oleh penerima API untuk memastikan data yang diterima valid dan tidak menyebabkan kerusakan.

e. Keamanan migrasi data

- memastikan migrasi data dilakukan secara bertahap dan terprogram oleh sistem;
- memastikan aplikasi yang menggunakan sistem basis data lama tetap dipertahankan sampai sistem pendukung basis data baru dapat berjalan atau berfungsi dengan normal;
- mendokumentasikan format sistem basis data lama secara rinci;
- melakukan pencadangan seluruh data yang tersimpan pada sistem sebelum melakukan migrasi data;
- menerapkan teknik kriptografi pada proses penyimpanan dan pengambilan data; dan
- melakukan validasi data ketika proses migrasi data selesai.

D. Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Standar teknis keamanan jaringan intra diterapkan pada Jaringan Intra Pemerintah (JIP), dan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (JIPPD).

Standar teknis keamanan jaringan intra meliputi :

1. aspek administrasi keamanan jaringan intra;
2. kontrol akses dan autentikasi;
3. persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra;
4. kontrol keamanan *gateway*;
5. kontrol keamanan *access point* pada jaringan nirkabel; dan
6. kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel.

Beberapa aspek pemenuhan standar teknis keamanan jaringan intra diperlukan prosedur–prosedur seperti berikut ini:

1. **Aspek administrasi keamanan jaringan intra**
   - menyusun dan mengevaluasi dokumen arsitektur jaringan intra;
   - mengidentifikasi seluruh aset infrastruktur jaringan;
   - menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur terkait pemeliharaan keamanan jaringan intra; dan
   - membuat laporan pengawasan keamanan jaringan secara periodik.
2. **Kontrol akses dan autentikasi**
   - menempatkan perangkat infrastruktur jaringan yang menyediakan layanan Jaringan Intra pada zona terpisah;
   - menggunakan autentikasi untuk mengakses jaringan intra;
   - menerapkan pembatasan akses dalam jaringan intra;
   - mematikan atau membatasi *protocol*, *port*, dan layanan yang tidak digunakan;
   - menerapkan penyaringan tautan dan memblokir akses ke situs berbahaya;

- menerapkan fungsi *honeypot* untuk menganalisis celah keamanan berdasarkan jenis serangan;
- menerapkan *virtual private network* dan mengaktifkan fungsi enkripsi pada jalur komunikasi yang digunakan;
- memberikan kewenangan hanya kepada administrator untuk menginstal perangkat lunak dan/atau mengubah konfigurasi sistem dalam jaringan intra;
- menerapkan *secure endpoint*;
- memblokir layanan yang tidak dikenal;
- menerapkan *secure socket layer* atau *transport layer security* versi terkini pada jalur akses jaringan Intra; dan
- menerapkan pusat data perantara saat *client* mengakses pusat data *database* dalam rangka pemeliharaan.

3. Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra

- menggunakan perangkat *security information and event management* untuk *network logging* dan *monitoring*;
- menerapkan sistem deteksi dini kerentanan keamanan perangkat jaringan;
- menggunakan perangkat *firewall*;
- menggunakan perangkat *intrusion detection systems* dan *intrusion prevention systems*;
- menerapkan *virtual private network* terenkripsi untuk penggunaan akses jarak jauh secara terbatas;
- menerapkan kontrol *update patching* pada infrastruktur jaringan intra dan sistem komputer;
- menggunakan perangkat *web application firewall*;
- menggunakan perangkat *load balancer* untuk menjaga ketersediaan akses terhadap jaringan dan aplikasi;
- memperbarui teknologi keamanan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meminimalisasi celah peretas;
- mengunduh perangkat lunak melalui *enterprise software distribution system*; dan
- menerapkan sertifikat elektronik.

4. Kontrol keamanan *gateway*

- menerapkan *content filtering*;
- menerapkan *inspection packet filtering* untuk memeriksa *packet* yang masuk pada Jaringan Intra;
- menerapkan kontrol keamanan pada fitur akses jarak jauh perangkat *gateway*;
- memastikan perangkat *gateway* yang menghubungkan antar Jaringan Intra tidak terkoneksi langsung dengan jaringan publik;
- melaksanakan manajemen *traffic gateway*; dan
- memastikan *port* tidak dibuka secara *default*.

5. Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel

- menerapkan protokol keamanan *access point* nirkabel dan teknologi enkripsi terkini;
- menerapkan *media access control* pada *address filtering;*
- menerapkan *dedicated service set identifier*;

- menerapkan pembatasan jangkauan radio transmisi dan pengguna jaringan;
- menerapkan pembatasan terkait penambahan perangkat nirkabel yang dipasang secara tidak sah;
- menerapkan manajemen *vulnerability* secara berkala dan berkelanjutan; dan
- melakukan *patching firmware* secara rutin.

6. Kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel

- menggunakan kata sandi yang kuat;
- menggunakan protokol model *authentication authorization* dan *accounting* pada perangkat infrastruktur jaringan untuk *management user* atau otentikasi administrator *access point*;
- memastikan *fitur* akses konfigurasi jarak jauh hanya dapat digunakan dalam kondisi darurat dengan menerapkan kontrol keamanan;
- mengisolasi atau melakukan segmentasi jaringan area lokal nirkabel; dan
- menonaktifkan antarmuka nirkabel, layanan, dan aplikasi yang tidak digunakan.

E. Keamanan Pusat Data

Standar teknis keamanan Pusat Data yakni persyaratan keamanan fisik dan persyaratan koneksi ke perangkat pusat data. Persyaratan keamanan fisik pusat data mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yakni SNI No 8799-1:2019 tentang Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data:

Lokasi

- Tidak berada pada area rentan bencana seperti yang dipetakan pada peta BMKG;
- Tidak berada pada lokasi rawan hurahara seperti perkampungan padat atau kumuh;
- Jarak dengan arteri lalu linta, jalan raya utama dan jalur kereta api umata minimal lebih dari 91 meter; dan
- Jarak ke bandara utama dan/atau pelabuhan minimal lebih dari 1,6 km.

Kontrol Akses

- Pusat data merupakan area kunjungan terbatas dan diperuntukan bagi yang telah mendapat izin memasuki area pusat data;
- Moda memasuki pusat data bisa dengan mempergunakan kartu akses elektronik, biometrik atau pemindai jari;
- Penyambungan interkoneksi telekomunikasi memerlukan persetujuan para pihak penyedia jasa telekomunikasi dan pengawas penyedia jasa layanan pusat data; dan
- Untuk keamanan pusat data ditetapkan perimeter tertentu sesuai dengan kategori strata pusat data.

Konstruksi

- Bangunan pusat data memiliki ketahanan terhadap gempa sesuai dengan SNI 1726:2012 sekurang – kurangnya kategori risiko II;
- Bangunan pusat data dapat menahan beban terpusat sekurang-kurangnya hingga 1.000 kg per meter persegi. Beban dimaksud adalah beban merata bukan hanya pada tulang lantai; dan
- Memenuhi persyaratan ketahanan material gedung meliputi ketahanan api, dan pengembunan.

Perangkat Pengamanan dan Pendukung

- CCTV;
- Access door;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Sistem pendinginan;dan
- Sistem monitoring lingkungan (suhu, kelembaban relatif ruangan, genangan air).

Pengkabelan

- Pusat data memiliki pemisahan jalur kabel bermuatan listrik untuk menghindari radiasi dan interferensi elektromagnetik;
- Setiap kabel memiliki label jalur dan tercatat dalam dokumentasi dan diagram; dan
- Pusat data memiliki topologi distribusi jaringan utama dari ruang pusat data kepada pengguna jasa pusat data. Distribusi jaringan dapat mempergunakan berbagai moda kabel dan berbagai perangkat komunikasi serta memiliki label kabel.

Persyaratan keamanan koneksi ke pusat data meliputi:

1. Memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional.
2. Memutus akses fisik atau logik dari perangkat yang tidak terotorisasi.
3. Memastikan akses tingkat *administrator* ke pusat data dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara *remote*.

2.5.3.5. Aktivitas Keamanan Informasi

Guna menjalankan keamanan SPBE, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat menerapkan keamanan SPBE yang mengacu pada Kerangka Kerja Keamanan Siber (*Cyber Security Framework*) yang dipublikasikan oleh lembaga *US National Institute of Standards and Technology* (NIST). Pada kerangka kerja tersebut terdapat 5 (lima) aktivitas yang perlu dilakukan oleh setiap organisasi dalam menghadapi serangan siber yakni identifikasi (*identity*), proteksi (*protect*), deteksi (*detect*), respon (*respond*), dan pemulihan (*recover*). Masing-masing aktivitas tersebut memiliki tujuan dan manfaat serta kegiatan atau inisiatif yang berbeda-beda, sesuai dengan fungsinya.

Gambar 2.5.3.5.1. Fungsi dan Kategori Aktivitas Keamanan Informasi

A. Identifikasi (*Identify*)

Pada tahap ini Diskominfo perlu mengidentifikasi sistem, data, aset informasi, dan kemampuan yang harus dilindungi sesuai dengan tingkat kritikalitas dan prioritas yang ditentukan. Kegiatan dalam tahap identifikasi antara lain:

1. Manajemen aset;
2. Lingkungan bisnis;
3. Tata kelola;
4. Penilaian risiko; dan
5. Strategi manajemen risiko.

B. Proteksi (*Protect*)

Pada tahap ini Diskominfo perlu melakukan tindakan mengembangkan dan menerapkan perlindungan terhadap seluruh aset informasi sesuai dengan kategori keamanan data yang telah ditentukan. Kegiatan dalam tahap proteksi antara lain:

1. Akses kontrol;
2. Pemahaman dan pelatihan;
3. Keamanan data;

4. Proses dan prosedur proteksi informasi; dan
5. Pemeliharaan.

C. Deteksi (*Detect*)

Pada tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi terjadinya serangan siber. Kegiatan dalam tahap deteksi antara lain:

1. Anomali dan kejadian;
2. Pemantauan Keamanan berkelanjutan; dan
3. Proses deteksi.

D. Respon (*Respond*)

Pada tahap ini Diskominfo diharapkan dapat melakukan tindak lanjut terhadap insiden keamanan yang terdeteksi atau terjadi. Kegiatan dalam tahap respon antara lain:

1. Rencana Respon;
2. Komunikasi;
3. Analisis;
4. Mitigasi; dan
5. Improvisasi.

E. Pemulihan (*Recover*)

Pada tahap ini Diskominfo diharapkan dapat memperbaiki atau memulihkan kemampuan, layanan, dan kondisi bisnis kembali seperti sedia kala yang mengalami gangguan keamanan/siber. Kegiatan dalam tahap pemulihan antara lain:

1. Rencana Pemulihan;
2. Improvisasi; dan
3. Komunikasi.

Gambar 2.5.3.5.2. Aktivitas Keamanan Informasi

Aktivitas dan kegiatan dari identifikasi sampai dengan pemulihan dapat dilaksanakan oleh *Security Operation Center* (SOC). Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, *SOC* berpedoman pada Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Untuk selanjutnya *SOC* bisa bekerja sama dengan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang dibentuk bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). *CSIRT* adalah tim yang menyediakan pelayanan dalam mencegah, menanggulangi dan menanggapi insiden keamanan siber, pada suatu wilayah (*constituency*) yang bertanggung jawab atas penerimaan, pemantauan dan penanganan laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Tim *CSIRT* akan bertanggung jawab penuh untuk memonitor dan mengelola berbagai isu-isu terkait dengan keamanan internet untuk menjaga aset informasi dan komunikasi dari seluruh unit-unit aktivitas organisasi.Laporan Arsitektur Kondisi Target SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) ini disusun guna memberikan gambaran kondisi kedepan yang perlu diimplementasikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kondisi target yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari proses tabulasi dan analisa kesenjangan dari kondisi eksisting dan kondisi yang ingin dicapai.

2.5.3.6. Metadata Arsitektur Keamanan Target

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan.

Katalog berikut ini berisi daftar Keamanan SPBE eksisting (To-be) yang akan diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, baik yang berasal dari kebijakan dan sistem keamanan instansi pusat maupun upaya pengamanan internal pemerintah daerah. Data ini mencakup mekanisme

keamanan seperti penggunaan firewall, sistem manajemen akses, enkripsi data, audit log, dan penerapan kebijakan keamanan informasi. Informasi ini menjadi acuan dalam menilai kesiapan dan ketahanan sistem SPBE daerah terhadap potensi ancaman siber, sekaligus menjadi dasar dalam merancang penguatan arsitektur keamanan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

A. Standar Keamanan

Standar keamanan berdasarkan Peraturan Presiden no 132 tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional terdapat 3 (tiga) hal yaitu:

1. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
2. Standar Keamanan Internasional
3. Regulasi lainnya.

Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Kulon Progo saat ini telah menyediakan kebijakan (To-be) ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.3.6.1. Daftar Peraturan Terkait Keamanan Informasi

ID	Nama Standar Keamanan	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	→ RAK Level 1	→ RAK Level 2
KP-DAK.01.01.08	Peraturan Bupati 49 Tahun 2024 tentang MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	Peraturan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati 49 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan dasar hukum yang mengatur kebijakan, prosedur, dan pengendalian untuk melindungi kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan informasi dalam penyelenggaraan SPBE.	2024		RAK.01 STANDAR KEAMANAN	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
KP-DAK.01.01.09	Peraturan Bupati 46 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Peraturan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah regulasi yang mengatur penggunaan sertifikat elektronik untuk menjamin keaslian, integritas, dan otentikasi dokumen maupun transaksi elektronik di instansi pemerintah daerah.	2024		RAK.01 STANDAR KEAMANAN	RAK.01.01 STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE

B. Penerapan Keamanan

Penerapan keamanan sebagai bentuk program kerja Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan oleh Diskominfo sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur dari setiap IPPD masing-masing. Program kerja Keamanan SPBE yang telah diterapkan meliputi:

1. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
2. Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE
3. Peningkatan Keamanan SPBE
4. Penanganan Insiden Keamanan SPBE
5. Audit Keamanan SPBE

1. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Katalog keamanan (edukasi kesadaran keamanan) berisi deskripsi mengenai upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (edukasi kesadaran keamanan) (To-be) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE.

Tabel 2.5.3.6.2. Referensi Arsitektur Keamanan - Edukasi Kesadaran Keamanan

ID	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	→ RAK Level 1	→ RAK Level 2	Aplikasi
KP-DAK.02.01.03	Sosialisasi keamanan informasi	Kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang keamanan informasi		RAK.02 PENERAPAN KEAMANAN	RAK.02.01 EDUKASI KESADARAN KEAMANAN SPBE	

2. Identifikasi Keamanan SPBE

Katalog keamanan (identifikasi keamanan) berisi deskripsi mengenai langkah-langkah identifikasi dan pengelolaan risiko keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (identifikasi keamanan) (To-be) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE.

Tabel 2.5.3.6.3. Referensi Arsitektur Keamanan - Identifikasi Keamanan

ID	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	RAK Level 1	RAK Level 2	→ Aplikasi
KP-DAK.02.02.02	BSSN VVIP Program	Pencarian bug pada aplikasi berbasis web di Kabupaten Kulon Progo	2024	RAK.02 PENERAPAN KEAMANAN	RAK.02.02 IDENTIFIKASI KERENTANAN KEAMANAN SPBE	

3. Peningkatan Keamanan SPBE

Katalog keamanan (peningkatan keamanan) berisi deskripsi mengenai upaya penguatan sistem, prosedur, dan teknologi keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (peningkatan keamanan) (To-be) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE.

Tabel 2.5.3.6.4. Referensi Arsitektur Keamanan - Peningkatan Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Keamanan Siber	→ RAK Level 1	→ RAK Level 2
	Belum ada					

4. Penanganan Insiden Keamanan SPBE

Katalog keamanan (penanganan insiden keamanan) berisi deskripsi mengenai prosedur, mekanisme, dan sistem yang diterapkan dalam menangani insiden keamanan siber di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dimana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (penanganan insiden keamanan) (To-be) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE.

Tabel 2.5.3.6.5. Referensi Arsitektur Keamanan - Penanganan Insiden Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Penangan Insiden Siber	→ Aplikasi)
	Belum ada Kegiatan				

5. Audit Keamanan SPBE

Katalog keamanan (audit keamanan) berisi deskripsi mengenai proses evaluasi dan pemeriksaan terhadap penerapan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sehingga katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana Level 1 dan 2 mengacu pada Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE Nasional berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog keamanan (audit keamanan) (To-be) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan metadata katalog keamanan yang sudah disesuaikan dengan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE.

Tabel 2.5.3.6.6. Referensi Arsitektur Keamanan - Audit Keamanan

ID	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Hasil Audit Keamanan SPBE	Jenis Audit Keamanan	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan	Tindak lanjut Audit Keamanan	→ Aplikasi	→ Infrastruktur
	Belum ada Kegiatan						

Bab III Penutup

Dokumen kondisi target ini akan dijadikan sebagai landasan dalam implementasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selama 5 (lima) tahun mendatang yang dituangkan dalam dokumen Arsitektur *Eksisting* SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 6 Februari 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN